



INDRA KARYA

Meningkatkan Kinerja untuk Infrastruktur Berkelanjutan

Optimizing Performance for Sustainable Infrastructure



2024

Laporan Tahunan
Annual Report

Tentang Laporan Tahunan 2024

About 2024 Annual Report

Laporan Tahunan 2024 PT Indra Karya (Persero) mengusung tema “Meningkatkan Kinerja untuk Infrastruktur Berkelanjutan”, yang disusun berdasarkan analisis dan kajian terhadap kinerja serta perkembangan usaha PT Indra Karya (Persero).

Laporan tahunan ini disusun dengan mengacu pada standar pengungkapan yang termuat di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No.29/POJK.04/2016 tentang Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik, serta Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 Tahun 2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Dalam rangka memaksimalkan kualitas pelaporan, laporan tahunan ini juga disusun dengan mengacu pada standar governansi di Indonesia, mencakup Pedoman Umum Governance Korporat Indonesia (PUGKI) 2021 yang disusun dan dipublikasikan oleh Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG). Sebagai pemenuhan prinsip transparansi, penyusunan dan publikasi laporan ini diharapkan dapat meningkatkan keterbukaan informasi Perseroan, sebagai bagian dari tanggung jawab kepada segenap pemangku kepentingan.

Laporan Tahunan ini disajikan dalam dua bahasa, yakni Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris, dengan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca, serta dicetak dengan kualitas terbaik. Publik dapat mengakses dan mengunduh laporan tahunan melalui situs resmi Perusahaan di www.eppid.indrakarya.co.id.

The 2024 Annual Report of PT Indra Karya (Persero) carries the theme “Optimizing Performance for Sustainable Infrastructure”, and is compiled based on analysis and review of the performance and business development of PT Indra Karya (Persero).

This annual report was prepared by referring to the disclosure standards contained in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 29/POJK.04/2016 concerning the Annual Report of Issuers or Public Companies, the Financial Services Authority Circular Letter (SEOJK) No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of Annual Reports of Issuers or Public Companies, and Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 of 2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs. In order to optimize the quality of reporting, this annual report was also prepared with reference to governance standards in Indonesia, including the 2021 General Code for Indonesian Corporate Governance (PUGKI) which were prepared and published by the National Committee on Governance Policy (KNKG). In fulfillment of the principle of transparency, the preparation and publication of this report is expected to improve the Company's information disclosure, as part of its responsibility to all stakeholders.

This Annual Report is presented in two languages, namely Indonesian and English, using easy-to-read font types and sizes, and is printed in high quality. The public can access and download the annual report through the Company's official website at www.eppid.indrakarya.co.id.

Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab

Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan PT Indra Karya (Persero) ini memuat sejumlah pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan perseroan, yang dalam pelaksanaan perundang-undangan yang berlaku digolongkan sebagai pernyataan ke depan, kecuali hal-hal yang bersifat historis. Pernyataan-pernyataan tersebut memiliki prospek risiko dan ketidakpastian, sehingga dapat mengakibatkan perkembangan aktual berbeda dari yang dilaporkan.

Pernyataan-pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang terkait perseroan serta lingkungan bisnis perseroan. Tidak terdapat jaminan bahwa dokumen-dokumen yang telah dipastikan keabsahannya tersebut akan membawa hasil yang seluruhnya sesuai.

Penyebutan satuan mata uang “Rupiah” atau “Rp” merujuk pada mata uang resmi Republik Indonesia, sedangkan “Dollar AS” atau “USD” merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Semua informasi keuangan dalam laporan ini disajikan dalam mata uang “Rupiah” sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia.

Laporan Tahunan ini memuat kata “Perseroan”, “Perusahaan”, serta “Kami” yang merujuk pada PT Indra Karya (Persero), Perusahaan yang menjalankan bisnis utama di bidang *Engineering, Developer, dan Industry*.

This Annual Report of PT Indra Karya (Persero) contains a number of statements regarding financial conditions, operating results, projections, plans, strategies, policies, and corporate objectives, which classified as forward-looking statements in the implementation of applicable laws, except for matters that are historical in nature. These statements involve prospective risks, uncertainties, and may cause actual developments to be materially different from those reported.

Prospective statements in this Annual Report are made based on various assumptions regarding current and future conditions of the company as well as business environment in which the company conducts business activities. There is no guarantee that documents whose validity have been confirmed will bring certain results as expected.

The use of the currency units “Rupiah” or “Rp” refers to the official currency of the Republic of Indonesia, while “US Dollar” or “USD” refers to the official currency of the United States of America. All financial information in this report is presented in “Rupiah” in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards.

*This Annual Report contains the terms “Company,” “Company,” and “We,” which are defined as PT Indra Karya (Persero) that carries out its main business in the fields of *Engineering, Developer, and Industry*.*

Penjelasan Tema

Theme Explanation

Meningkatkan Kinerja untuk Infrastruktur Berkelanjutan

Optimizing Performance for Sustainable Infrastructure

20
24



Di tahun 2024, PT Indra Karya kian meningkatkan kinerja dengan melakukan rebranding Perusahaan yang bertujuan untuk mendorong transformasi dan pengelolaan bisnis berkelanjutan. Dengan pembaruan yang lebih selaras dengan visi sebagai BUMN konsultan konstruksi terdepan di Indonesia, Perusahaan terus mengoptimalkan layanan di sektor Sumber Daya Air (SDA), Energi Baru dan Terbarukan (EBT), dan Transportasi.

Langkah ini diiringi dengan strategi untuk memperluas potensi Perusahaan, termasuk bersinergi dengan mitra strategis guna memperluas jangkauan dan memperkuat posisi Perusahaan di pasar domestik maupun internasional. Keberhasilan langkah strategis ini tercermin dalam berbagai pencapaian, termasuk penghargaan sebagai BUMN Konsultan Konstruksi Terbaik 2024.

In 2024, PT Indra Karya enhanced its performance by rebranding the Company to drive transformation and sustainable business management. With this renewal aligning more closely with its vision as Indonesia's leading state-owned construction consultancy, the Company continues to optimize its services in the Water Resources (SDA), Renewable Energy (EBT), and Transportation sectors.

This initiative is accompanied by strategies to expand the Company's potential, including synergizing with strategic partners to expand its reach and reinforce the Company's position in both domestic and international markets. The success of these strategic steps is reflected in various achievements, including the recognition as the Best State-Owned Construction Consultancy of 2024.

Kesinambungan Tema

Theme Continuity

Transformasi dan Kolaborasi, Berkarya untuk Indonesia

Creating for Indonesia through Transformation and Collaboration

2023

Didukung pengalaman lebih dari 60 tahun sebagai konsultan pada konstruksi bidang sumber daya air, perseroan terus memperkuat kontribusi bagi percepatan pembangunan Indonesia. Melalui transformasi dan kolaborasi, perseroan juga terus mengembangkan kontribusi pada bidang transportasi, energi, dan energi baru terbarukan melalui penerapan sejumlah inisiatif strategis. Hal ini antara lain terwujud melalui upaya penguatan layanan digital, penguatan kerja sama pasar luar negeri, hingga upaya diversifikasi sebagai faktor yang mendorong penguatan kinerja positif pada 2023. Perseroan optimistis transformasi dan kolaborasi yang terjalin dapat terus diperkuat dalam rangka menghadapi beragam tantangan perubahan ke depan, untuk memperkuat kontribusi positif bagi negeri.

Supported by more than 60 years of experience as a consultant in water resources construction, the company continues to strengthen its contribution to accelerating Indonesia's development. Through transformation and collaboration, the company also continues to develop its contribution to the fields of transportation, energy, and new renewable energy through the implementation of various strategic initiatives. This is realized, among others, through efforts to strengthen digital services, solidify cooperation in foreign markets, and diversification efforts as factors that drive positive performance in 2023. The company is optimistic that the transformation and collaboration that have been established can continue to be strengthened in facing various challenges of change in the future to strengthen positive contributions to the country.



Semangat Transformasi Membangun Indonesia

Spirit of Transformation to Build Indonesia

2022

PT Indra Karya (Persero) semakin mengukuhkan kiprahnya sebagai salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN), konsultan di bidang sumber daya air, transportasi, energi, dan energi baru terbarukan dengan pertumbuhan kinerja yang luar biasa di tahun 2022. Pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja sama tim dalam mendorong transformasi budaya kerja perseroan untuk memberikan layanan terbaik bagi para pelanggan. Perseroan senantiasa menanamkan semangat untuk terus maju, lincah (*agile*) dalam menghadapi beragam tantangan, adaptif dengan perkembangan dalam proses transformasi digital, dan transformasi layanan prima dan berkelanjutan yang dijalankan. Selain itu, perseroan juga memperhatikan aspek lingkungan, sosial dan governansi (*Environment, Social and Governance/ESG*) dalam menjalankan kegiatan bisnisnya agar dapat menciptakan nilai bagi seluruh pemangku kepentingan dan mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Dengan demikian, perseroan akan mampu memberikan kontribusi positifnya bagi bangsa dan masyarakat.

PT Indra Karya (Persero) increasingly strengthening its role as one of the State-Owned Enterprises (SOEs) consultants in the fields of water resources, transportation, energy, and new renewable energy with extraordinary performance growth in 2022. This achievement is the result of teamwork in encouraging transformation of the company's work culture to provide best services for customers. The Company always instills the spirit to continue moving forward, agile in facing various challenges, adaptive to development in digital transformation process, as well as excellent and sustainable service transformation. Apart from that, the company also pays attention to Environment, Social and Governance (ESG) aspects in carrying out its business activities in order to create value for all stakeholders and achieve sustainable development. In this way, the company will be able to make positive contribution to the nation and society.



Berdiri Teguh dengan AKHLAK meraih Kinerja Unggul

Standing firm with Morals to Achieve Excellent Performance

2021

PT Indra Karya (Persero) sebagai entitas BUMN telah bergerak melakukan penyelarasan nilai-nilai AKHLAK yang selaras dengan nilai-nilai yang dianut oleh Perusahaan. Penerapan *Core Values* AKHLAK di lingkungan Perusahaan diyakini dapat membangun solidaritas Insan Perusahaan sehingga tercipta nilai budaya yang berkelanjutan, efektif, dan mudah untuk dikembangkan. Di samping itu, penerapan *Core Values* AKHLAK juga mendukung Upaya Perusahaan dalam mengatasi tantangan bisnis ke depan yang semakin kompetitif serta memaksimalkan sekaligus mempersiapkan sumber daya dan potensi yang dimiliki sehingga Perusahaan dapat terus berkontribusi kepada seluruh stakeholders yang terpengaruh terhadap jalannya operasional bisnis Perusahaan. Indra Karya sendiri merupakan salah satu BUMN yang unggul dalam bidangnya sehingga hasil kinerja baik itu keuangan dan operasional memiliki output yang baik bagi Pemegang Saham. Dengan pencanangan AKHLAK sebagai nilai utama dalam pengelolaan Perusahaan bagi seluruh BUMN, maka dari itu setiap langkah-langkah yang diambil oleh Perusahaan tidak lepas dari seluruh kontribusi nilai tersebut.

PT Indra Karya (Persero) as a SOEs entity has aligned AKHLAK values which are in line with values espoused by the Company. It is believed that application of AKHLAK Core Values within the Company can build solidarity among Company People so as to create cultural values that are sustainable, effective, and easy to develop. In addition, implementation of AKHLAK Core Values also supports the Company's efforts in overcoming increasingly competitive business challenges in the future and maximizing and preparing its resources and potential, hence the Company can continue to contribute to all stakeholders who are influenced by the Company's business operations. Indra Karya itself is one of the SOEs that excels in its field, hence its performance results, both financial and operational, have good output for shareholders. With the declaration of AKHLAK as the main value in the management of the Company for all SOEs, every step taken by the Company cannot be separated from the contribution of this value.



Daftar Isi

Table of Contents

Tentang Laporan Tahunan 2024 <i>About 2024 Annual Report</i>	1
Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab <i>Disclaimer and Limitation of Liability</i>	1
Penjelasan Tema <i>Theme Explanation</i>	2
Kesinambungan Tema <i>Main Highlights</i>	3
Daftar Isi <i>Table of Contents</i>	4

01	Ikhtisar Kinerja <i>Performance Highlights</i>
Ikhtisar Data Keuangan Penting <i>Key Financial Data Highlights</i>	8
Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting <i>Charts of Key Financial Data Highlights</i>	10
Ikhtisar Kinerja Operasional <i>Operational Performance Highlights</i>	10
Grafik Ikhtisar Kinerja Operasional <i>Charts of Operational Performance Highlights</i>	11
Ikhtisar Saham <i>Share Highlights</i>	11
Informasi Efek Lainnya <i>Information on Other Securities</i>	11
Aksi Korporasi <i>Corporate Action</i>	12
Penghargaan dan Sertifikasi <i>Awards and Certifications</i>	12
Peristiwa Penting <i>Significant Event</i>	15

02	Laporan Manajemen <i>Management Report</i>
Laporan Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners Report</i>	20
Laporan Direksi <i>Board of Directors Report</i>	26

03	Profil Perusahaan <i>Company Profile</i>
Informasi Perusahaan <i>Company Information</i>	36
Riwayat Singkat Perseroan <i>Brief History of the Company</i>	37
Visi, Misi dan Tata Nilai <i>Vision, Mission, and Corporate Values</i>	38
Konsep dan Makna Logo <i>Logo Concept and Meaning</i>	40
Jejak Langkah <i>Milestones</i>	42
Bidang Usaha <i>Line of Business</i>	44
Produk dan Jasa <i>Products and Services</i>	45
Wilayah Operasional <i>Operational Area</i>	46
Struktur Organisasi <i>Organizational Structure</i>	48
Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Board of Commissioners and Board of Directors Composition</i>	48

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Changes in The Board of Commissioners and Board of Directors Composition</i>	49
Profil Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners' Profile</i>	50
Profil Direksi <i>Board of Directors' Profile</i>	52
Profil Senior Manajemen <i>Profile of Senior Management</i>	54
Komposisi Pemegang Saham <i>Shareholder Composition</i>	76
Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan/atau Perusahaan Ventura Bersama <i>List of Subsidiaries and Associates, and/or Joint Ventures</i>	77
Kronologi Pencatatan Saham <i>Chronology of Share Listing</i>	77
Kronologi Pencatatan Efek Lain <i>Chronology of Other Securities Listing</i>	78
Lembaga Profesi Penunjang <i>Supporting Professional Institutions</i>	78
Daftar Keanggotaan Asosiasi <i>List of Association Membership</i>	79
Informasi pada Website <i>Information on the Website</i>	80

04	Tinjauan Unit Pendukung Bisnis <i>Business Support Unit Overview</i>
Sumber Daya Manusia <i>Human Resources</i>	84
Teknologi Informasi <i>Information Technology</i>	94

05	Analisis dan Pembahasan Manajemen <i>Management Discussion and Analysis</i>
Tinjauan Perekonomian <i>Economic Review</i>	104
Tinjauan Industri <i>Industrial Review</i>	105
Tinjauan Operasi <i>Operational Review</i>	105
Tinjauan Keuangan <i>Financial Overview</i>	119
Kemampuan Membayar Utang <i>Ability to Pay Debt</i>	120
Tingkat Kolektibilitas Piutang <i>Receivables Collectibility Rate</i>	121
Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal <i>Capital Structure and Management Policy on Capital Structure</i>	122
Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal <i>Material Commitments for Capital Goods Investments</i>	122
Realisasi Investasi Barang Modal <i>Realization of Capital Goods Investment</i>	123
Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Pelaporan Keuangan <i>Material Information and Facts Subsequent to the Accountant's Report Date</i>	124
Prospek Usaha <i>Business Outlook</i>	124
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Tahun 2024 serta Proyeksi 2025 <i>Comparison Between 2024 Target and Realization, and 2024 Projection</i>	125
Strategi Pemasaran dan Pangsa Pasar <i>Marketing Strategy and Market Share</i>	126

Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum <i>Realization of the Use of Public Offering Funds</i>	130
Informasi Material mengenai Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan/Peleburan Usaha, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang/Modal <i>Material Information on Investments, Expansions, Divestments, Mergers/Acquisitions, Acquisitions, and Debt/Capital Restructuring</i>	131
Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan Pihak Afiliasi <i>Material Transactions Involving Conflict of Interest and/or Transactions with Affiliated Parties</i>	131
Kontribusi kepada Negara <i>Contribution to the State</i>	138
Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan <i>Changes to Laws and Regulations that Have a Significant Impact</i>	138
Perubahan Kebijakan Akuntansi <i>Changes in Accounting Policies</i>	139
Tingkat Kesehatan Perusahaan <i>Company Health Level</i>	140

06

Tata Kelola Perusahaan *Good Corporate Governance*

Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Commitment to The Implementation of Good Corporate Governance</i>	144
Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Good Corporate Governance Principles</i>	144
Sosialisasi dan Internalisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Dissemination and Internalization of Good Corporate Governance</i>	145
Roadmap Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Good Corporate Governance Roadmap</i>	146
Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik <i>Good Corporate Governance Structure</i>	147
Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2024 <i>Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance in 2024</i>	147
Rapat Umum Pemegang Saham <i>General Meeting of Shareholders</i>	148
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>	155
Direksi <i>Board of Directors</i>	166
Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>	178
Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi <i>Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and The Board of Directors</i>	182
Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi <i>Joint Meeting of the Board of Commissioners and the Board of Directors</i>	182
Komite Audit <i>Audit Committee</i>	183
Komite Nominasi dan Remunerasi <i>Nomination and Remuneration Committee</i>	188
Sekretaris Perusahaan <i>Corporate Secretary</i>	193
Satuan Pengawasan Internal (SPI) <i>Internal Audit Unit (SPI)</i>	196
Akuntan Publik <i>Public Accountant</i>	200
Manajemen Risiko <i>Risk Management</i>	201

Sistem Pengendalian Internal <i>Internal Control System</i>	205
Akses Informasi dan Data Perseroan <i>Access to Company Information and Data</i>	207
Perkara Penting dan Sanksi Administratif <i>Legal Cases and Administrative Sanction</i>	207
Kode Etik <i>Code of Conduct</i>	208
Program Kepemilikan Saham Oleh Manajemen (MSOP) dan atau Karyawan (ESOP) <i>Stock Ownership Program By Management (MSOP) and/or Employees (ESOP)</i>	208
Sistem Pelaporan Pelanggaran <i>Whistleblowing System</i>	212
Kebijakan Anti-Korupsi dan Anti-Gratifikasi <i>Anti-Corruption and Gratification Policy</i>	211
Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa <i>Mechanism for Good and Services Procurement</i>	214
Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) <i>State Officials Wealth Report (LHKPN)</i>	216

07

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan *Corporate Social and Environmental Responsibility*

Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan <i>Corporate Social and Environmental Responsibility</i>	224
Dasar Hukum Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan <i>Legal Basis of the Corporate Social Environment Responsibility Program</i>	224
Metode Due Diligence terhadap Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial dari Aktivitas Perusahaan <i>Due Dilligence Method for the Economic, Environmental, and Social Affairs of Company Activities</i>	225
Identifikasi Dampak Operasi bagi Pemangku Kepentingan <i>Identification of Operational Impacts on Stakeholders</i>	225
Pihak Pengelola Program TJSL <i>TJSL Program Management</i>	227
Struktur Organisasi Komite TJSL dan Unit TJSL <i>TJSL Committee and TJSL Unit Organizational Structure</i>	227
Realisasi Dana TJSL <i>Realization of TJSL Funds</i>	229
Pelaksanaan Program TJSL <i>TJSL Program Implementation</i>	230
Informasi Lebih Lanjut <i>Further Information</i>	232
Surat Pernyataan Dewan Komisaris dan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Tahun 2024 <i>Statement Letter of the Board of Commissioners and Directors Regarding Responsibility for the 2024 Annual Report</i>	234

Laporan Keuangan *Financial Statements*

Laporan Keuangan <i>Financial Statements</i>	237
--	-----





INDRA KARYA

01

KILAS KINERJA

*PERFORMANCE
HIGHLIGHTS*



Ikhtisar Data Keuangan Penting

Key Financial Data Highlights

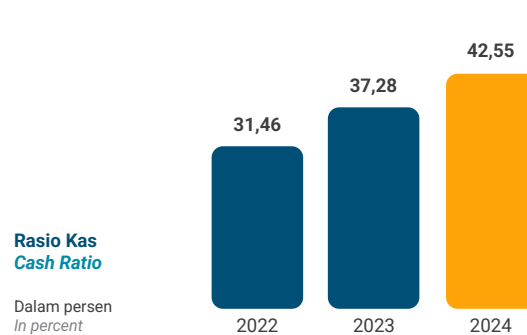
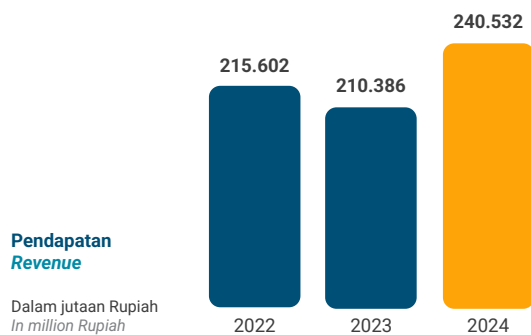
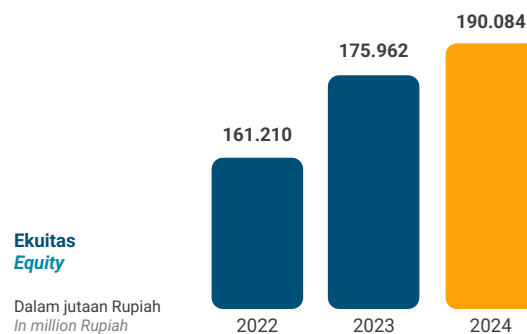
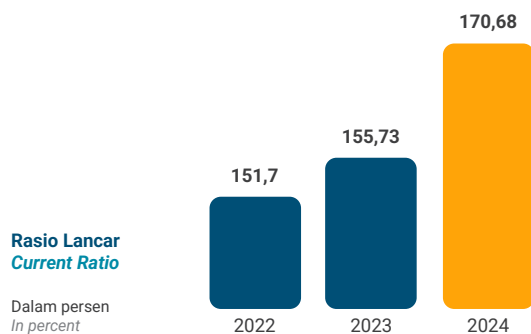
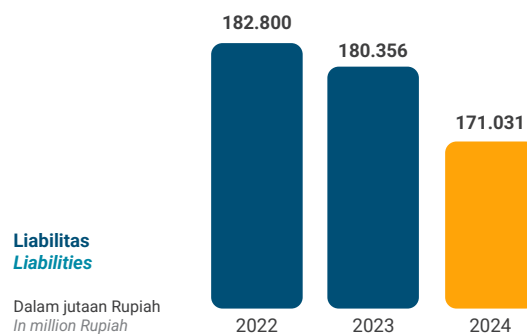
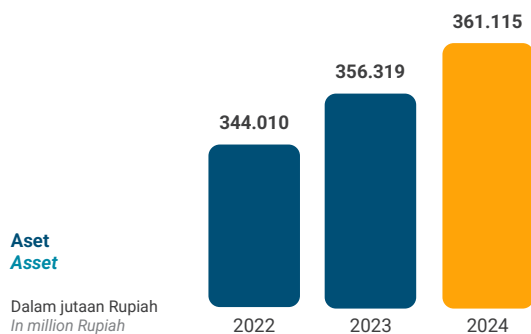
Data jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
In million Rupiah, unless stated otherwise

Uraian Description	2024	2023	2022
Laba Rugi <i>Profit (Loss)</i>			
Pendapatan Usaha Revenues	240.532	210.386	215.601
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(169.817)	(148.964)	(151.146)
Laba Bruto Gross Profit	70.715	61.422	64.445
Bagian Laba dari Ventura Bersama Share of Profit from Joint Ventures	1.060	1.686	4.433
Laba Bruto Setelah Pendapatan Bersih dari Ventura Bersama Gross Profit After Net Revenue from Joint Ventures	71.775	63.108	68.888
Beban Usaha Operating Expenses	(52.649)	(49.320)	(49.784)
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(5.985)	(5.013)	(5.293)
Laba Usaha Setelah Pajak Final Operating Income After Final Tax Expenses	13.141	8.775	13.811
Beban Keuangan Finance Cost	(1.741)	(1.135)	(572)
Pendapatan Bunga Interest Income	365	247	215
Laba Kurs Mata Uang Asing – Bersih Gain on Foreign Exchange – Net	549	(68)	150
Pendapatan Lain-lain – Bersih Other Income – Net	460	5.452	5.047
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	-	-	-
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	12.774	13.271	18.651
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Total Other Comprehensive Income for the Year	1.348	1.482	47.481
Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income for the Year	14.122	14.753	66.491
Laba Bersih per Saham (Dalam rupiah penuh) Basic Earnings per Share (In full amount of rupiah)	1.277.281	1.326.943	1.864.864
Posisi Keuangan <i>Financial Position</i>			
Aset Assets	361.115	356.319	344.010
Aset Lancar Current Assets	190.457	178.626	162.701
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	170.658	177.692	181.309
Liabilitas Liabilities	171.031	180.356	182.800

Uraian Description	2024	2023	2022
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	111.588	114.701	107.249
Liabilitas Jangka Panjang Non-current Liabilities	59.443	65.655	75.551
Ekuitas Equity	190.084	175.962	161.210
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	361.115	356.319	344.010
Arus Kas Cash Flows			
Arus Kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Operasi Cash Flows from (used in) Operating Activities	6.042	14.171	2.197
Arus Kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Investasi Cash Flows from (used in) Investing Activities	(172)	(3.736)	(2.467)
Arus Kas diperoleh dari (digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan Cash Flows from (used in) Financing Activities	(1.149)	(1.415)	(2.030)
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash on Hand and in Banks	4.721	9.020	(2.300)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash on Hand and in Banks at the Beginning of the Year	42.764	33.744	36.044
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash on Hand and in Banks at End of the Year	47.485	42.764	33.744
Rasio Keuangan Penting Key Financial Ratios			
Rasio Laba (Rugi) terhadap Aset (%) Return on Asset (%)	3,54	3,72	5,42
Rasio Laba (Rugi) terhadap Ekuitas (%) Return on Equity (%)	10,67	11,21	11,57
Rasio Laba (Rugi) terhadap Pendapatan (%) Net Profit Margin (%)	5,31	6,31	8,65
Rasio Lancar (%) Current Ratio (%)	170,68	155,73	151,70
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas (%) Debt to Equity Ratio (%)	142,86	152,37	113,39
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset (%) Debt to Total Asset Ratio (%)	47,36	50,62	53,14
Rasio Kas (%) Cash Ratio (%)	42,55	37,26	31,46
Collection Period (hari) Collection Period (days)	44	41	62
Total Asset Turnover (kali) Total Asset Turnover (times)	0,67	0,59	0,63

Grafik Ikhtisar Data Keuangan Penting

Charts of Key Financial Data Highlights



Ikhtisar Kinerja Operasional

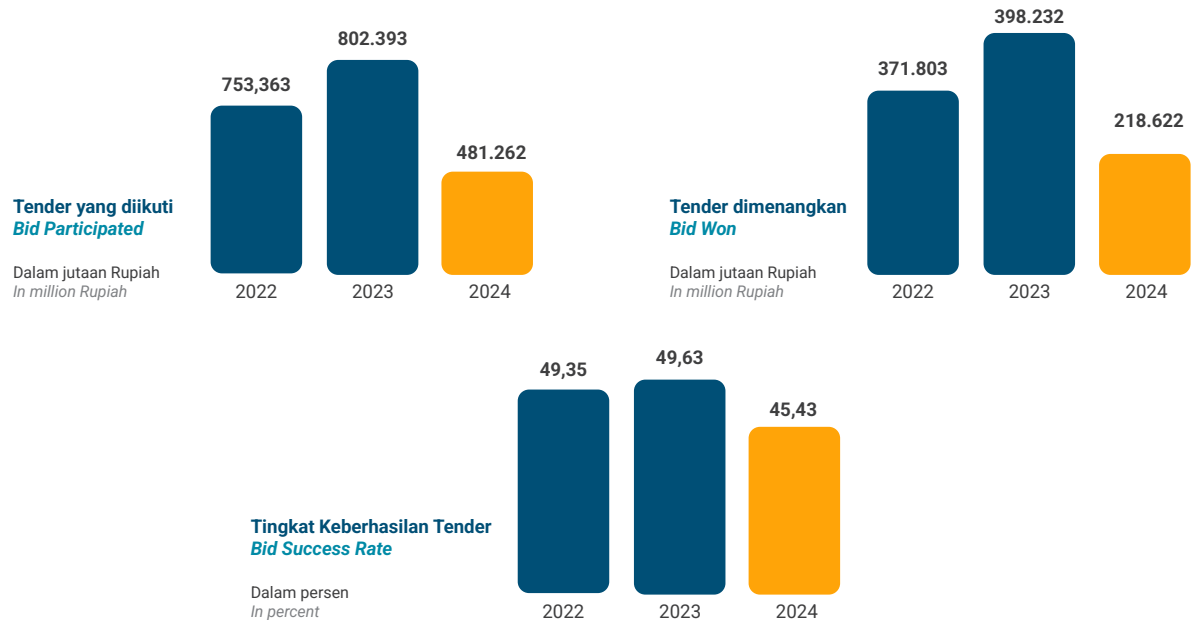
Operational Performance Highlights

Data jutaan rupiah, kecuali dinyatakan lain
In million Rupiah, unless stated otherwise

Uraian Description	2024	2023	2022
Tender yang diikuti Bid participated	481.261	802.393	753.363
Tender dimenangkan Bid Won	218.622	398.323	371.803
Tingkat Keberhasilan Tender Bid Success Rate	45,43%	49,63%	49,35%

Grafik Ikhtisar Kinerja Operasional

Charts of Operational Performance Highlights



Ikhtisar Saham

Share Highlights

Sampai dengan 31 Desember 2024, perseroan belum mencatatkan saham pada bursa efek mana pun. Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian, informasi mengenai jumlah saham beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi, harga saham terendah, harga saham penutupan, dan volume perdagangan tidak diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2024, the company has not listed its shares on any stock exchange. The company is a State-Owned Enterprise ("SOE" or "BUMN") whose shares are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, information regarding the number of shares outstanding, market capitalization, highest share price, lowest share price, closing share price, and trading volume are not disclosed in this Annual Report.

Informasi Efek Lainnya

Information on Other Securities

Sampai dengan 31 Desember 2024, perseroan tidak mencatatkan efek lain apa pun mencakup obligasi, sukuk, ataupun obligasi konversi.

As of December 31, 2024, the company has not listed any other securities including bonds, sukuk or convertible bonds.

Aksi Korporasi

Corporate Action

Perseroan tidak melakukan aksi korporasi apa pun berkenaan dengan saham pada 2024, mencakup pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus maupun perubahan nilai nominal saham. Di samping itu, tidak terdapat tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada perseroan pada 2024. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait hal-hal tersebut untuk diungkapkan pada bagian ini.

The company did not take any corporate action regarding shares in 2024, including stock splits, reverse stock, share dividends, bonus shares or changes in the nominal value of shares. In addition, there was no additional State Capital Participation (PMN) to the company in 2024. Thus, there is no information related to these matters to be disclosed in this section.

Penghargaan dan Sertifikasi

Awards and Certifications

Penghargaan 2024

Awards in 2024



17 Januari 2024
January 17, 2024

La Tofi - Indonesia Green Award
2024 predikat The Promising
La Tofi - Indonesia Green Award 2024
The Promising predicate



03 Februari 2024
February 03, 2024

Penghargaan Best Contractor
Site Vale
Best Contractor Site Vale Award



08 Maret 2024
March 08, 2024

13th Anugerah BUMN 2024 (BUMN
Track Kategori Terbaik III Inovasi Bisnis
Perusahaan BUMN
13th BUMN Award 2024 (BUMN Track
Category III Best BUMN Company Business
Innovation)



01 April 2024
April 01, 2024

Ajang Anugerah 13th Digital Brand
Award Infobank - The 2nd Best State
Owned Enterprise
13th Infobank Digital Brand Award
Event - The 2nd Best State Owned
Enterprise



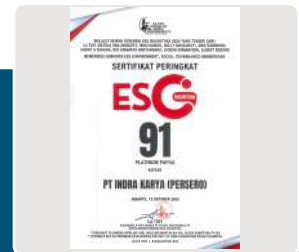
17 Juli 2024
July 17, 2024

Nusantara CSR Awards 2024 -
Pemimpin Transformasi Bisnis
Berkelanjutan
Nusantara CSR Awards 2024 -
Sustainable Business Transformation
Leaders



19 September 2024
September 19, 2024

Asian Impact Awards 2024 -
diselenggarakan oleh La Tofi di
Malaysia
Asian Impact Awards 2024 - hosted
by La Tofi in Malaysia



18 Oktober 2024
October 18, 2024

ESG Nusantara Plaudit 2024
dengan Peringkat 91 Platinum
Papua Rating
ESG Nusantara Plaudit 2024 with 91
Platinum Papua Rating

Sertifikasi 2024

Certification in 2024

Nama Sertifikasi / Certification Name
ISO 37001:2016 Sistem Manajemen Anti-Penyuapan
ISO 37001:2016 Anti-Bribery Management System

Tanggal Perolehan / Date of Issuance
23 Maret 2021 / March 23, 2021

Lembaga Pemberi Sertifikasi / Certification Body
Sucofindo International Certification Services

Masa Berlaku / Validity Period
23 Maret 2021 – 22 Maret 2024
March 23, 2021 – March 22, 2024



Nama Sertifikasi / Certification Name
ISO 14001:2015 Sistem Manajemen Lingkungan
ISO 14001:2015 Environmental Management System

Tanggal Perolehan / Date of Issuance
19 Oktober 2021 / October 19, 2021

Lembaga Pemberi Sertifikasi / Certification Body
PT Ciriajasa Cipta Mandiri Sertifikasi (CCMS)

Masa Berlaku / Validity Period
19 Oktober 2024 – 18 Oktober 2025
October 19, 2024 – October 18, 2025



Nama Sertifikasi / Certification Name
ISO 45001:2018 Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja
ISO 45001:2018 Occupational Health and Safety Management System

Tanggal Perolehan / Date of Issuance
19 Oktober 2021 / October 19, 2021

Lembaga Pemberi Sertifikasi / Certification Body
PT Ciriajasa Cipta Mandiri Sertifikasi (CCMS)

Masa Berlaku / Validity Period
19 Oktober 2024 – 18 Oktober 2025
October 19, 2024 – October 18, 2025



Nama Sertifikasi / Certification Name
SNI ISO 17025:2017 (Laboratorium Geoteknik)
SNI 17025:2017 (Geotechnical Laboratory)

Tanggal Perolehan / Date of Issuance
25 Januari 2023 / January 25, 2023

Lembaga Pemberi Sertifikasi / Certification Body
Komite Akreditasi Nasional
National Accreditation Body of Indonesia

Masa Berlaku / Validity Period
25 Januari 2028 / January 25, 2028
March 23, 2021 – March 22, 2024



Nama Sertifikasi / Certification Name
Sertifikat INDI 4.0
INDI 4.0 Certificate

Tanggal Perolehan / Date of Issuance
14 Maret 2023 / March 14, 2023

Lembaga Pemberi Sertifikasi / Certification Body
Kementerian Perindustrian RI
Ministry of Industry of the Republic of Indonesia

Masa Berlaku / Validity Period
8 Februari 2023 – 8 Februari 2026
February 8, 2023 – February 8, 2026



Nama Sertifikasi / Certification Name
ISO 9001:2015 Sistem Manajemen Mutu
ISO 9001:2015 Quality Management System

Tanggal Perolehan / Date of Issuance
5 Desember 2023 / December 5, 2023

Lembaga Pemberi Sertifikasi / Certification Body
PT Ciriayasa Cipta Mandiri Sertifikasi (CCMS)

Masa Berlaku / Validity Period
5 Desember 2023 – 4 Desember 2025
December 5, 2023 – December 4, 2025



Peristiwa Penting

Significant Event



08 Januari 2024/ January 08, 2024

Presiden Republik Indonesia ke-7, Joko Widodo, Meresmikan Bendungan Karian sebagai Infrastruktur Strategis Nasional untuk Mendukung Ketahanan Air dan Energi.

The 7th President of the Republic of Indonesia, Joko Widodo, Inaugurates the Karian Dam as a National Strategic Infrastructure to Support Water and Energy Security.



31 Januari 2024/ January 31, 2024

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Pembahasan dan Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024.

General Meeting of Shareholders (GMS) for the Discussion and Approval of the Company's Work Plan and Budget (RKAP) for the Year 2024.



28 - 29 Februari & 01 Maret 2024/ February 28 - 29 & March 01, 2024

PT Indra Karya (Persero) menyelenggarakan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Tahun 2024 sebagai forum strategis untuk menyinergikan langkah operasional terhadap pencapaian target bisnis perusahaan.

PT Indra Karya (Persero) held the 2024 National Working Meeting (Rakernas) as a strategic forum to align operational steps with the company's business target achievements.



18 - 26 Mei 2024/ May 18 - 26, 2024

PT Indra Karya (Persero) turut berpartisipasi dalam 10th World Water Forum yang diselenggarakan di Bali pada 20–24 Mei 2024.

PT Indra Karya (Persero) participated in the 10th World Water Forum held in Bali from May 20-24, 2024.



28 Juni 2024/ June 28, 2024

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) Tahun Buku 2023 PT Indra Karya (Persero).

Annual General Meeting of Shareholders (AGMS) for Fiscal Year 2023 of PT Indra Karya (Persero).



30 Juli 2024/ July 30, 2024

PT Indra Karya (Persero) menandatangani perjanjian kerja sama penyediaan jasa konsultasi untuk pelaksanaan survei hidrometri di Sungai Manna serta kajian ekologi dalam rangka pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Tanjung Saksi.

PT Indra Karya (Persero) signed a cooperation agreement for the provision of consultancy services to carry out hydrometric surveys on the Manna River and conduct ecological studies as part of the development of the Tanjung Saksi Hydroelectric Power Plant (PLTA).



31 Juli 2024/ July 31, 2024

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Indra Karya (Persero) dan PT Sucofindo dalam Rangka Sinergi BUMN, bertempat di The Westin Resort Nusa Dua, Bali.

PT Indra Karya (Persero) and PT Sucofindo signed a Memorandum of Understanding (MoU) as part of the State-Owned Enterprises (SOEs) synergy initiative. The signing took place at The Westin Resort Nusa Dua, Bali.



09 Agustus 2024/ August 09, 2024

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Indra Karya (Persero) dan PT Danareksa Finance dalam Rangka Penguatan Sinergi Pembiayaan Proyek Strategis.

PT Indra Karya (Persero) signed an MoU with PT Danareksa Finance to enhance collaboration in financing strategic national projects.



09 Agustus 2024/ August 09, 2024

Penandatanganan Nota Kesepahaman antara PT Indra Karya (Persero) dan PT PPA Finance sebagai Upaya Sinergi Pembiayaan dan Pengembangan Proyek Strategis.

PT Indra Karya (Persero) signed a Memorandum of Understanding (MoU) with PT PPA Finance to explore synergistic opportunities in financing and developing national strategic projects.



24 September 2024/September 24, 2024

PT Indra Karya (Persero) Raih Penghargaan pada Ajang Asian Impact Award 2024 di Malaysia sebagai Pengakuan atas Komitmen dalam Tanggung Jawab Sosial dan Dampak Positif di Kawasan Asia.

PT Indra Karya (Persero) was honored at the 2024 Asian Impact Award held in Malaysia, recognizing the company's strong commitment to corporate social responsibility and its significant positive contributions across the Asian region.



06 November 2024/ November 06, 2024

PT Indra Karya (Persero) Berpartisipasi dalam Pameran Konstruksi Indonesia 2024 sebagai Wujud Komitmen terhadap Inovasi dan Keandalan Infrastruktur Nasional.

PT Indra Karya (Persero) Participated in the 2024 Indonesia Construction Exhibition as a Demonstration of Its Commitment to Innovation and the Reliability of National Infrastructure.





INDRA KARYA

02

LAPORAN MANAJEMEN

MANAGEMENT
REPORT



Laporan Dewan Komisaris

Board of Commissioners' Report



Letjen TNI Purn.
R. Wisnoe Prasetija
Boedi

Komisaris Utama
President Commissioner

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Atas nama Dewan Komisaris PT Indra Karya (Persero) (selanjutnya disebut "Perusahaan"), kami mengawali laporan ini dengan mengucapkan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala berkah dan rahmat-Nya, sehingga Perusahaan dapat terus melangkah maju, beradaptasi, dan berkembang di tahun 2024. Dalam menghadapi berbagai tantangan global dan domestik, semangat kebersamaan dan komitmen tinggi seluruh jajaran Direksi dan karyawan telah menjadi kunci keberhasilan kami dalam menjalankan tugas serta mencapai kinerja yang positif. Perkenankan kami untuk menyampaikan laporan Dewan Komisaris yang mencakup tinjauan terhadap kondisi yang mempengaruhi kinerja Perusahaan, penilaian terhadap kinerja Direksi, serta pandangan kami terkait penerapan tata kelola perusahaan yang baik dan prospek usaha di masa depan.

Dear Shareholders and Stakeholders,

On behalf of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) (hereinafter referred to as "the Company"), we would like to begin this report by expressing our gratitude to God Almighty for all His blessings and grace, which have enabled the Company to continue to move forward, adapt, and grow in 2024. In facing various global and domestic challenges, the spirit of togetherness and high commitment of the entire Board of Directors and employees have been the key to our success in carrying out our duties and achieving positive performance. Allow us to present the Board of Commissioners' report, which includes a review of the conditions affecting the Company's performance, an assessment of the Board of Directors' performance, as well as our views on the implementation of good corporate governance and business prospects for the future.

Tinjauan atas Kondisi Ekonomi dan Industri Tahun 2024

Review of Economic and Industry Conditions in 2024

Tahun 2024 menghadirkan dinamika yang penuh tantangan bagi perekonomian global dan Indonesia, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi yang moderat. Meskipun situasi global masih dipengaruhi oleh ketegangan geopolitik, terutama akibat konflik Rusia-Ukraina dan ketidakpastian ekonomi di berbagai belahan dunia, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan ekonomi yang stabil. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 5,03% pada tahun 2024, meskipun sedikit melambat dibandingkan tahun 2023. Pencapaian ini menunjukkan ketahanan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tekanan eksternal yang terus berlanjut.

The year 2024 presents challenging dynamics for the global and Indonesian economies, with moderate economic growth projections. Although the global situation is still affected by geopolitical tensions, mainly due to the Russia-Ukraine conflict and economic uncertainty in various parts of the world, Indonesia has managed to record stable economic growth. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia's economy grew by 5.03% in 2024, although this was slightly slower than in 2023. This achievement demonstrates Indonesia's economic resilience in the face of continuing external pressures.

Sektor-sektor utama seperti konsumsi rumah tangga dan investasi tetap menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Konsumsi rumah tangga yang stabil, didukung oleh tingkat pengangguran yang relatif rendah dan tingkat daya beli yang meningkat, terus menjadi salah satu faktor utama yang mendukung ketahanan ekonomi. Selain itu, sektor investasi, terutama dalam proyek-proyek infrastruktur yang didorong oleh kebijakan pemerintah, memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Meskipun terdapat tantangan terkait ketidakpastian global, pemerintah Indonesia tetap fokus pada stabilisasi ekonomi domestik dengan berbagai kebijakan fiskal dan moneter yang mendukung.

Di sisi industri, sektor konstruksi menunjukkan perkembangan yang signifikan pada tahun 2024. Berdasarkan data BPS, sektor konstruksi menyumbang sekitar 10,23% terhadap PDB Indonesia pada triwulan pertama tahun 2024. Pertumbuhan sektor ini dipacu oleh beragam proyek besar yang sedang berjalan, seperti pembangunan infrastruktur dasar, jalan tol, dan fasilitas publik. Selain itu, sektor ini juga mendapat dorongan melalui berbagai proyek strategis nasional, termasuk pengembangan Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara dan proyek infrastruktur lainnya yang bertujuan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi jangka panjang. Namun, meskipun sektor konstruksi tumbuh positif, beberapa tantangan tetap menjadi perhatian. Di antaranya adalah isu ketersediaan bahan baku, kendala dalam pasokan tenaga kerja terampil, serta tekanan terhadap biaya operasional yang semakin meningkat.

Key sectors such as household consumption and investment remain the main drivers of Indonesia's economic growth. Stable household consumption, supported by relatively low unemployment rates and increasing purchasing power, continues to be one of the main factors supporting economic resilience. Additionally, the investment sector, particularly in infrastructure projects driven by government policies, has made a significant contribution to Indonesia's economic growth. Despite challenges related to global uncertainty, the Indonesian government remains focused on stabilizing the domestic economy through various fiscal and monetary policies.

In the industrial sector, the construction sector showed significant growth in 2024. According to BPS data, the construction sector contributed around 10.23% to Indonesia's GDP in the first quarter of 2024. The growth of this sector was driven by various large-scale projects, such as the construction of basic infrastructure, toll roads, and public facilities. In addition, this sector has also been boosted by various national strategic projects, including the development of the new capital city (IKN) Nusantara and other infrastructure projects aimed at supporting long-term economic growth. However, despite positive growth in the construction sector, several challenges remain. These include issues related to the availability of raw materials, constraints in the supply of skilled labor, and increasing pressure on operating costs.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap Kinerja Direksi

Board of Commissioners' Assessment of the Board of Directors' Performance

Dewan Komisaris memberikan penilaian yang positif terhadap kinerja Direksi di sepanjang tahun 2024, terutama dalam mendukung transformasi Perusahaan untuk mewujudkan Asta Cita Pemerintah dalam bidang ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia. Sebagai bagian dari strategi transformasi tersebut, Perusahaan mengambil langkah strategis yakni melakukan tahap kajian, yang meliputi Kajian Bisnis dan Finansial serta Kajian Hukum dan atau Legal. Selain itu, proses transformasi ini juga melibatkan penguatan struktur organisasi dan pondasi bisnis baru, yang diiringi dengan konsultasi dari pihak profesional guna memastikan keberlanjutan dan kesuksesan transformasi tersebut.

Penilaian Dewan Komisaris terhadap kinerja Direksi juga didasarkan pada pencapaian Key Performance Indicators (KPI) yang ditetapkan dalam Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024. Direksi berhasil mencapai 97,84% dari target yang ditetapkan dalam RKAP, yang mencerminkan upaya yang signifikan dalam mewujudkan tujuan strategis perusahaan. Capaian ini menunjukkan komitmen Direksi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh integritas dan dedikasi, di tengah tantangan besar yang ada dalam proses transformasi dan konversi bisnis perusahaan.

Namun, Dewan Komisaris juga mencatat beberapa area yang perlu perhatian khusus, terutama dalam hal rasio keuangan Perseroan. Capaian pada indikator Rasio Keuangan, yang mencakup EBITDA dan ROIC-WACC, belum mencapai target yang diharapkan. Ini menunjukkan bahwa ada kebutuhan untuk meninjau kembali proyeksi rencana operasional dan keuangan Perusahaan agar dapat lebih efektif dalam menghadapi tantangan bisnis yang ada. Dewan Komisaris menilai penting untuk memastikan bahwa seluruh perencanaan operasional dan keuangan Perusahaan disesuaikan dengan kondisi pasar dan kebutuhan bisnis yang berubah.

The Board of Commissioners has given a positive assessment of the Board of Directors' performance throughout 2024, particularly in supporting the Company's transformation to achieve the Government's Asta Cita in the areas of food, energy, and water security in Indonesia. As part of this transformation strategy, the Company has taken strategic steps by conducting a review phase, which includes a Business and Financial Review and a Legal Review. Additionally, this transformation process involves strengthening the organizational structure and new business foundations, accompanied by consultations with professionals to ensure the sustainability and success of the transformation.

The Board of Commissioners' assessment of the Board of Directors' performance is also based on the achievement of Key Performance Indicators (KPIs) set out in the Company's 2024 Work Plan and Budget (RKAP). The Board of Directors achieved 97.84% of the targets set in the RKAP, reflecting significant efforts in realizing the company's strategic objectives. This achievement demonstrates the Board of Directors' commitment to carrying out its duties and responsibilities with integrity and dedication, amid the enormous challenges in the company's transformation and business conversion process.

However, the Board of Commissioners also noted several areas that require special attention, particularly in terms of the Company's financial ratios. The achievement of financial ratio indicators, which include EBITDA and ROIC-WACC, has not reached the expected target. This indicates that there is a need to review the Company's operational and financial projections in order to be more effective in facing existing business challenges. The Board of Commissioners considers it important to ensure that all of the Company's operational and financial planning is adjusted to changing market conditions and business needs.

Dalam perspektif inovasi model bisnis, Dewan Komisaris memberikan apresiasi terhadap keberhasilan Direksi dalam mencapai skor tinggi pada indikator inovasi bisnis, yang mencakup penetrasi pasar baru dan sinergi antar BUMN. Skor 15,70 dari total bobot yang ditetapkan 15 menunjukkan bahwa Direksi berhasil mengimplementasikan strategi yang berfokus pada pengembangan pasar non-APBN dan penguatan hubungan bisnis antar BUMN. Di samping itu, pengembangan kepemimpinan teknologi melalui integrasi sistem ERP dan penerapan keamanan siber yang memadai juga mencerminkan komitmen Direksi dalam meningkatkan daya saing perusahaan melalui teknologi.

Dewan Komisaris juga menghargai upaya Direksi dalam meningkatkan investasi Perusahaan, yang tercermin dari kerjasama dengan mitra internasional dalam berbagai proyek, serta peningkatan pengembangan talenta yang menjadi bagian penting dalam memajukan perusahaan. Meskipun ada kinerja dalam rasio pemenuhan kualifikasi pengelola risiko belum sepenuhnya optimal, namun secara keseluruhan, Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi telah berhasil memimpin Perusahaan dalam menghadapi berbagai tantangan dan meraih hasil yang positif dalam hampir semua aspek kinerja yang ditetapkan.

Dilihat dari kinerja operasi dan keuangan, Dewan Komisaris memberikan penilaian yang positif terhadap kinerja Direksi di sepanjang tahun 2024, meskipun Perusahaan dihadapkan pada tantangan eksternal yang signifikan. Hingga akhir tahun 2024, Perusahaan berhasil mencatatkan realisasi kontrak sebesar Rp570,9 miliar, yang setara dengan 77,25% dari target Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang telah ditetapkan sebesar Rp739,0 miliar. Meskipun belum mencapai angka target penuh, pencapaian ini mencerminkan upaya maksimal yang telah dilakukan oleh Direksi dalam mengelola dan mendapatkan kontrak-kontrak proyek sepanjang tahun tersebut.

Lebih lanjut, komposisi kontrak yang diperoleh menunjukkan performa yang positif pada kontrak proyek lanjutan. Dengan nilai kontrak sebesar Rp354,0 miliar, kontrak lanjutan ini mengalami peningkatan signifikan sebesar 32,6% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, yang menunjukkan efektivitas Direksi dalam mempertahankan hubungan kerja sama yang telah terjalin dan memastikan kelancaran proyek-proyek yang sudah berjalan. Peningkatan ini mencerminkan kesuksesan Direksi dalam menjaga kualitas pelayanan dan kepuasan klien, yang pada gilirannya memperkuat posisi Perseroan dalam pasar.

Namun, di sisi lain, kontrak proyek baru mencatatkan penurunan sebesar 34,92% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mencerminkan tantangan yang dihadapi dalam memperoleh proyek-proyek baru yang lebih besar. Dewan Komisaris menganggap ini sebagai area yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut oleh Direksi, dengan mengidentifikasi peluang pasar baru dan memperkuat strategi pemasaran agar dapat meraih kontrak-kontrak baru yang lebih substansial. Penurunan ini menjadi pengingat pentingnya upaya yang lebih agresif dan terarah dalam merebut peluang pasar di masa mendatang.

Di sisi kinerja keuangan, Perusahaan berhasil memperoleh pendapatan usaha sebesar Rp240,5 miliar dan membukukan laba bersih sebesar Rp12,8 miliar. Meskipun laba bersih ini menggambarkan kinerja yang positif, Dewan Komisaris menilai bahwa pencapaian ini perlu diimbangi dengan peningkatan margin laba untuk mengoptimalkan potensi keuntungan perusahaan. Secara keseluruhan, Dewan Komisaris mengapresiasi upaya Direksi dalam mengelola perusahaan di tahun 2024, namun juga menekankan perlunya strategi lebih lanjut untuk mengatasi tantangan terkait kontrak baru dan peningkatan efisiensi operasional guna memastikan pertumbuhan yang berkelanjutan dan keberlanjutan kinerja positif di masa depan.

In terms of business model innovation, the Board of Commissioners commended the Board of Directors for achieving a high score on business innovation indicators, which include new market penetration and synergy between state-owned enterprises (SOEs). A score of 15.70 out of a total weight of 15 indicates that the Board of Directors has successfully implemented strategies focused on developing non-state budget markets and strengthening business relationships between SOEs. In addition, the development of technological leadership through ERP system integration and the implementation of adequate cybersecurity also reflects the Board of Directors' commitment to improving the company's competitiveness through technology.

The Board of Commissioners also appreciates the Board of Directors' efforts to increase the Company's investment, as reflected in its cooperation with international partners in various projects, as well as the improvement of talent development, which is an important part of advancing the company. Although the performance in the risk management qualification ratio has not been fully optimized, overall, the Board of Commissioners assesses that the Board of Directors has successfully led the Company in facing various challenges and achieving positive results in almost all aspects of performance set.

From an operational and financial perspective, the Board of Commissioners has given a positive assessment of the Board of Directors' performance throughout 2024, despite the Company facing significant external challenges. By the end of 2024, the Company successfully recorded contract realizations of Rp570.9 billion, equivalent to 77.25% of the target set in the Company's Work Plan and Budget (RKAP) of Rp739.0 billion. Although the full target has not been achieved, this achievement reflects the maximum efforts made by the Board of Directors in managing and securing project contracts throughout the year.

Furthermore, the composition of the contracts obtained shows positive performance in continuing project contracts. With a contract value of Rp354.0 billion, these continuing contracts experienced a significant increase of 32.6% compared to the realization in 2023, demonstrating the Board of Directors' effectiveness in maintaining existing cooperative relationships and ensuring the smooth running of ongoing projects. This increase reflects the Board of Directors' success in maintaining service quality and customer satisfaction, which in turn strengthens the Company's position in the market.

However, on the other hand, new project contracts recorded a decrease of 34.92% compared to the previous year. This reflects the challenges faced in securing larger new projects. The Board of Commissioners considers this an area that requires further attention from the Board of Directors, by identifying new market opportunities and strengthening marketing strategies to secure more substantial new contracts. This decline serves as an important reminder of the need for more aggressive and targeted efforts to capture market opportunities in the future.

In terms of financial performance, the Company managed to generate operating revenue of Rp240.5 billion and recorded a net profit of Rp12.8 billion. Although this net profit reflects positive performance, the Board of Commissioners believes that this achievement needs to be balanced with an increase in profit margin to optimize the company's profit potential. Overall, the Board of Commissioners appreciates the efforts of the Board of Directors in managing the company in 2024, but also emphasizes the need for further strategies to overcome challenges related to new contracts and improve operational efficiency to ensure sustainable growth and continued positive performance in the future.

Peran Pengawasan Dewan Komisaris dalam Perumusan dan Penerapan Strategi *The Supervisory Role of the Board of Commissioners in the Formulation and Implementation of Strategies*

Dewan Komisaris memiliki peran yang penting dalam memastikan bahwa perumusan dan penerapan strategi Perusahaan dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan tujuan jangka panjang Perusahaan. Dalam perumusan strategi, Dewan Komisaris tidak hanya bertindak sebagai pengawas, tetapi juga memberikan arahan strategis yang sejalan dengan visi dan misi Perusahaan. Dewan Komisaris berkolaborasi dengan Direksi dalam mengidentifikasi peluang dan tantangan yang ada, serta menyusun langkah-langkah yang dapat mengoptimalkan potensi Perusahaan. Dengan pengawasan yang hati-hati, Dewan Komisaris memastikan bahwa setiap strategi yang diterapkan memiliki dasar yang kuat dan dapat mendukung tujuan keberlanjutan serta pertumbuhan Perusahaan.

Selain itu, Dewan Komisaris memastikan bahwa setiap keputusan strategis yang diambil oleh Direksi sejalan dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (Good Corporate Governance/ GCG). Dalam setiap proses pengambilan keputusan, Dewan Komisaris berperan dalam melakukan evaluasi terhadap risiko yang mungkin timbul, serta mengusulkan langkah mitigasi yang sesuai. Pengawasan ini mencakup berbagai aspek penting, mulai dari pengelolaan risiko, penggunaan sumber daya, hingga pelaksanaan kebijakan-kebijakan yang berhubungan dengan operasional dan finansial perusahaan. Dewan Komisaris memberikan masukan konstruktif yang dapat memperbaiki dan menyempurnakan arah strategi yang dijalankan oleh Direksi.

Sebagai bagian dari peran pengawasannya, Dewan Komisaris juga memastikan bahwa penerapan strategi Perusahaan sesuai dengan perkembangan pasar dan dinamika industri. Pada tahun 2024, di tengah tantangan yang muncul, termasuk ketidakpastian ekonomi global dan fluktuasi harga komoditas, Dewan Komisaris terus memantau penerapan strategi perusahaan untuk memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil tetap relevan dan dapat menyesuaikan dengan kondisi pasar yang terus berubah. Dewan Komisaris juga melakukan evaluasi terhadap implementasi strategi yang telah disusun, untuk memastikan bahwa hasil yang diperoleh sesuai dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP).

Dewan Komisaris juga berperan dalam memastikan bahwa penerapan strategi didukung dengan sumber daya yang memadai dan efisien. Pengawasan ini mencakup pemantauan terhadap kinerja operasional dan keuangan Perusahaan, serta memastikan bahwa alokasi sumber daya – baik itu tenaga kerja, teknologi, maupun pendanaan – dilakukan dengan bijaksana. Dewan Komisaris menekankan pentingnya peningkatan efisiensi dalam pelaksanaan strategi, agar Perusahaan tidak hanya mencapai tujuan jangka pendek, tetapi juga dapat mempertahankan pertumbuhannya dalam jangka panjang.

The Board of Commissioners plays an important role in ensuring that the formulation and implementation of the Company's strategy are carried out appropriately and in accordance with the Company's long-term objectives. In formulating strategy, the Board of Commissioners not only acts as a supervisor but also provides strategic direction in line with the Company's vision and mission. The Board of Commissioners collaborates with the Board of Directors in identifying existing opportunities and challenges, as well as formulating measures that can optimize the Company's potential. Through careful supervision, the Board of Commissioners ensures that every strategy implemented has a strong foundation and can support the Company's sustainability and growth objectives.

In addition, the Board of Commissioners ensures that every strategic decision made by the Board of Directors is in line with the principles of Good Corporate Governance (GCG). In every decision-making process, the Board of Commissioners plays a role in evaluating potential risks and proposing appropriate mitigation measures. This supervision covers various important aspects, ranging from risk management and resource utilization to the implementation of policies related to the company's operations and finances. The Board of Commissioners provides constructive input that can improve and refine the direction of the strategies implemented by the Board of Directors.

As part of its supervisory role, the Board of Commissioners also ensures that the implementation of the Company's strategy is in line with market developments and industry dynamics. In 2024, amid emerging challenges, including global economic uncertainty and commodity price fluctuations, the Board of Commissioners continues to monitor the implementation of the company's strategy to ensure that the steps taken remain relevant and adaptable to changing market conditions. The Board of Commissioners also evaluates the implementation of the strategies that have been formulated to ensure that the results obtained are in line with the targets set in the Company's Work Plan and Budget (RKAP).

The Board of Commissioners also plays a role in ensuring that the implementation of strategies is supported by adequate and efficient resources. This supervision includes monitoring the Company's operational and financial performance, as well as ensuring that the allocation of resources—whether labor, technology, or funding—is carried out wisely. The Board of Commissioners emphasizes the importance of improving efficiency in the implementation of strategies so that the Company not only achieves its short-term goals but also maintains its growth in the long term.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Prospek Usaha Perusahaan *The Board of Commissioners' View on the Company's Business Prospects*

Dewan Komisaris memiliki pandangan optimis terhadap prospek usaha Perusahaan di masa depan, terutama dengan adanya transformasi yang tengah dilakukan untuk mendukung ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia. Dengan semakin meningkatnya kebutuhan nasional terhadap energi terbarukan dan ketahanan pangan, Perusahaan berada pada posisi strategis untuk mengembangkan bisnis berbasis kelapa sawit dan *biofuel*.

The Board of Commissioners is optimistic about the Company's future business prospects, especially with the ongoing transformation to support food, energy, and water security in Indonesia. With the increasing national demand for renewable energy and food security, the Company is strategically positioned to develop its palm oil and biofuel-based businesses.

Transformasi ini, yang mencakup pengelolaan kelapa sawit dari hulu hingga hilir, termasuk pengembangan produk-produk turunan seperti minyak goreng dan *biofuel*, memiliki potensi besar untuk memperkuat posisi perusahaan dalam pasar domestik maupun internasional.

Selain itu, sektor energi terbarukan, khususnya *biofuel*, diperkirakan akan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan perusahaan ke depan. Seiring dengan kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan energi terbarukan untuk mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil, Perusahaan berpotensi untuk memperoleh peluang yang lebih besar dalam proyek-proyek energi yang ramah lingkungan.

Namun, Dewan Komisaris juga menyadari adanya tantangan yang harus dihadapi, seperti fluktuasi harga komoditas kelapa sawit dan tantangan dalam memperoleh kontrak-kontrak baru. Penurunan dalam kontrak proyek baru pada tahun 2024 menunjukkan perlunya peningkatan strategi dalam mengidentifikasi peluang pasar yang lebih luas dan mengoptimalkan jaringan kemitraan dengan berbagai pihak. Oleh karena itu, Dewan Komisaris mengingatkan bahwa strategi Perusahaan harus lebih berfokus pada peningkatan penetrasi pasar, baik di sektor domestik maupun internasional, serta penguatan hubungan dengan klien dan mitra bisnis yang dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pendapatan Perusahaan.

Dewan Komisaris juga melihat bahwa pertumbuhan yang berkelanjutan memerlukan pengembangan kapasitas sumber daya manusia yang lebih baik. Penguatan organisasi dan peningkatan kemampuan tenaga kerja menjadi faktor kunci untuk memastikan Perusahaan dapat menjalankan transformasi dengan efektif. Dalam hal ini, Dewan Komisaris mendorong Direksi untuk terus berfokus pada pengembangan talenta unggul yang dapat mengimbangi kebutuhan bisnis yang terus berkembang.

This transformation, which includes palm oil management from upstream to downstream, including the development of derivative products such as cooking oil and biofuel, has great potential to strengthen the company's position in both the domestic and international markets.

In addition, the renewable energy sector, particularly biofuel, is expected to be one of the main drivers of the company's future growth. In line with government policies that support the development of renewable energy to reduce dependence on fossil fuels, the Company has the potential to gain greater opportunities in environmentally friendly energy projects.

However, the Board of Commissioners is also aware of the challenges that must be faced, such as fluctuations in palm oil commodity prices and challenges in securing new contracts. The decline in new project contracts in 2024 indicates the need to improve strategies in identifying broader market opportunities and optimizing partnerships with various parties. Therefore, the Board of Commissioners emphasizes that the Company's strategy must focus more on increasing market penetration, both domestically and internationally, as well as strengthening relationships with clients and business partners who can contribute significantly to the Company's revenue.

The Board of Commissioners also sees that sustainable growth requires better human resource capacity development. Organizational strengthening and workforce capability enhancement are key factors in ensuring that the Company can carry out its transformation effectively. In this regard, the Board of Commissioners encourages the Board of Directors to continue to focus on developing superior talent that can keep pace with evolving business needs.

Pandangan Dewan Komisaris terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

The Board of Commissioners' Views on the Implementation of Good Corporate Governance

Dewan Komisaris memberikan apresiasi yang tinggi terhadap komitmen Perusahaan dalam menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/ GCG*). Sepanjang tahun 2024, Perusahaan telah menunjukkan keseriusan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang berlandaskan pada transparansi, akuntabilitas, dan integritas yang tinggi. Dewan Komisaris menilai bahwa penerapan GCG yang solid adalah kunci untuk menciptakan kepercayaan di kalangan pemangku kepentingan, mulai dari investor, pelanggan, hingga mitra bisnis, yang sangat penting untuk mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan jangka panjang Perusahaan.

Sebagai bagian dari pengawasan, Dewan Komisaris juga telah memastikan bahwa implementasi GCG tidak hanya dilakukan secara formal, tetapi juga dijalankan dengan substansi yang mencerminkan nilai-nilai Perusahaan. Dalam hal ini, Dewan Komisaris menilai bahwa transparansi dalam laporan keuangan dan pengelolaan risiko sudah cukup baik. Perseroan telah meningkatkan sistem pengawasan internal, memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil oleh Direksi dapat dipertanggungjawabkan dengan jelas. Dengan sistem yang kuat ini, Perusahaan dapat memitigasi risiko-risiko yang berpotensi merugikan, baik itu yang berasal dari faktor internal maupun eksternal.

Namun, Dewan Komisaris juga mencatat bahwa ada beberapa aspek penerapan GCG yang perlu terus diperbaiki dan diperkuat, terutama dalam hal pengelolaan risiko dan pengawasan

The Board of Commissioners highly appreciates the Company's commitment to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG). Throughout 2024, the Company has demonstrated its seriousness in implementing policies based on transparency, accountability, and high integrity. The Board of Commissioners believes that solid GCG implementation is key to building trust among stakeholders, from investors and customers to business partners, which is essential to supporting the Company's sustainability and long-term growth.

As part of its oversight, the Board of Commissioners has also ensured that GCG implementation is not only formal, but also carried out with substance that reflects the Company's values. In this regard, the Board of Commissioners assesses that transparency in financial reporting and risk management is already quite good. The Company has improved its internal control system, ensuring that every policy taken by the Board of Directors can be clearly accounted for. With this robust system, the Company can mitigate risks that could potentially cause harm, whether they originate from internal or external factors.

However, the Board of Commissioners also notes that there are several aspects of GCG implementation that need to be continuously improved and strengthened, particularly in terms of

terhadap implementasi kebijakan yang lebih efektif. Meskipun struktur organisasi dan sistem pengawasan telah berjalan dengan baik, Dewan Komisaris berpendapat bahwa Perusahaan harus lebih proaktif dalam memperbarui dan menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ada, terutama yang berkaitan dengan perkembangan industri dan perubahan regulasi. Ini akan memastikan bahwa Perusahaan tetap mampu mengelola tantangan yang ada dan terus berkembang di pasar yang semakin kompetitif.

Dewan Komisaris menekankan bahwa dalam rangka mencapai tujuan jangka panjang, penerapan GCG yang lebih baik harus mencakup penguatan di area pengawasan, termasuk pengelolaan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas kepemimpinan. Hal ini sejalan dengan kebutuhan pengembangan bisnis Perusahaan ke depan.

risk management and oversight of policy implementation. Although the organizational structure and oversight systems are functioning well, the Board of Commissioners believes that the Company must be more proactive in updating and adjusting existing policies, especially those related to industry developments and regulatory changes. This will ensure that the Company remains capable of managing existing challenges and continues to grow in an increasingly competitive market.

The Board of Commissioners emphasized that in order to achieve long-term objectives, better GCG implementation must include strengthening in the area of supervision, including human resource management and leadership capacity building. This is in line with the Company's future business development needs.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris

Changes in the Composition of the Board of Commissioners

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-268/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024 dan No. SK-54/MBU/03/2025 Tanggal 11 Maret 2025 terdapat perubahan Dewan Komisaris Perusahaan sehingga susunan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Pursuant to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-268/MBU/11/2024 dated November 11, 2024 and No. SK-54/MBU/03/2025 dated March 11, 2025, the Board of Commissioners of the Company has been changed, resulting in the following composition of the Board of Commissioners:

Dewan Komisaris / Board of Commissioners	
Komisaris Utama/ President Commissioner	Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetya Boedi
Komisaris/ Commissioner	Wicipto Setiadi
Komisaris Independen/ Independent Commissioner	Ulfah Mashfufah

Apresiasi

Appreciation

Dewan Komisaris menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh jajaran Direksi, manajemen, dan karyawan Perusahaan atas dedikasi dan komitmen tinggi yang telah diberikan dalam menghadapi tantangan di tahun 2024. Keberhasilan Perusahaan dalam meraih kinerja positif di tengah situasi yang penuh ketidakpastian adalah hasil dari kerja keras dan sinergi yang solid di antara seluruh pihak terkait. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemangku kepentingan, termasuk mitra bisnis dan pemerintah, atas dukungan yang terus diberikan kepada Perusahaan. Dengan tetap menjaga komitmen terhadap keberlanjutan dan inovasi, kami yakin Perusahaan akan terus berkembang dan meraih kesuksesan di tahun-tahun mendatang.

The Board of Commissioners would like to express its highest appreciation to the entire Board of Directors, management, and employees of the Company for their dedication and high commitment in facing the challenges in 2024. The Company's success in achieving positive performance amid a situation full of uncertainty is the result of hard work and solid synergy among all parties involved. We would also like to thank our stakeholders, including business partners and the government, for their continued support to the Company. By maintaining our commitment to sustainability and innovation, we are confident that the Company will continue to grow and achieve success in the years to come.

Jakarta, Mei | May 2024
Atas Nama Dewan Komisaris
On Behalf of the Board of Commissioners
PT Indra Karya (Persero)



Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetya Boedi

Komisaris Utama
President Commissioner

Laporan Direksi

Board of Directors Report



Letjen TNI Purn.
Agus Sutomo

Direktur Utama
President Director

Para Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang terhormat,

Dengan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas nama Direksi PT Indra Karya (Persero) (selanjutnya disebut "Perusahaan"), perkenalkan kami menyampaikan Laporan Tahunan Tahun 2024. Tahun ini merupakan periode yang penuh tantangan sekaligus peluang, di mana Perusahaan berhasil menghadapi berbagai dinamika ekonomi global dan tantangan di sektor industri dengan tetap menjaga komitmen terhadap kinerja yang optimal. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam pencapaian ini, dan melalui laporan ini, kami ingin menyampaikan hasil kinerja, kebijakan strategis yang diterapkan, serta langkah-langkah yang akan diambil untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan di masa yang akan datang.

Dear Shareholders and Stakeholders,

With gratitude to God Almighty, on behalf of the Board of Directors of PT Indra Karya (Persero) (hereinafter referred to as "the Company"), we hereby present the 2024 Annual Report. This year has been a period of challenges and opportunities, during which the Company successfully navigated various global economic dynamics and challenges in the industry while maintaining its commitment to optimal performance. We would like to express our gratitude to all parties who have contributed to this achievement, and through this report, we would like to convey our performance results, the strategic policies implemented, and the steps that will be taken to ensure the sustainability and growth of the Company in the future.

Tinjauan Ekonomi dan Industri Tahun 2024

Economic and Industry Review for 2024

Tahun 2024 diperkirakan akan diwarnai oleh tantangan global yang signifikan, dengan proyeksi pertumbuhan ekonomi dunia yang melambat menjadi 3,2% menurut Dana Moneter Internasional (IMF). Hal ini disebabkan oleh dampak lanjutan dari perang di Ukraina, inflasi yang masih tinggi, serta kebijakan suku bunga yang lebih ketat. IMF memprediksi inflasi global akan tetap tinggi pada angka 4,1%, sementara suku bunga kebijakan global diperkirakan mencapai 5,2% pada tahun 2024, naik signifikan dari 3,5% pada tahun 2022.

The year 2024 is expected to be marked by significant global challenges, with global economic growth projected to slow to 3.2% according to the International Monetary Fund (IMF). This is due to the continued impact of the war in Ukraine, persistently high inflation, and tighter interest rate policies. The IMF predicts that global inflation will remain high at 4.1%, while global policy interest rates are expected to reach 5.2% in 2024, a significant increase from 3.5% in 2022.

Ketidakpastian ekonomi global ini berpotensi memberikan dampak pada stabilitas sistem keuangan, meskipun sejauh ini masih terjaga dengan pelonggaran kebijakan moneter di beberapa negara.

Di sisi domestik, Indonesia mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,03% pada tahun 2024, sedikit melambat dibandingkan dengan tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong oleh konsumsi masyarakat, investasi, dan belanja pemerintah, yang sebagian besar difokuskan pada kegiatan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Proyek-proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN), juga terus berlanjut, memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan sektor konstruksi dan infrastruktur. Kinerja ekspor non-migas Indonesia diprediksi terus tumbuh berkat peningkatan ekspor produk manufaktur dan pertambangan.

Namun, Indonesia juga menghadapi sejumlah tantangan domestik di tahun 2024. Pertama, pemilu presiden dan legislatif dapat menimbulkan ketidakpastian politik yang berpotensi mempengaruhi keputusan investasi dan daya beli konsumen. Kedua, kenaikan harga pangan dan energi global dapat meningkatkan inflasi domestik, yang pada gilirannya dapat menurunkan daya beli masyarakat dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Ketiga, defisit anggaran pemerintah diperkirakan akan meningkat seiring dengan besarnya belanja pemerintah untuk persiapan pemilu dan pembangunan infrastruktur, yang pada gilirannya dapat meningkatkan beban utang negara. Terakhir, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar AS berpotensi meningkatkan biaya barang impor dan biaya produksi bagi perusahaan.

Pada sektor infrastruktur, alokasi anggaran untuk Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dalam RAPBN Tahun 2024 mencapai Rp146,98 triliun, dengan fokus pada program-program strategis dan prioritas nasional. Kegiatan prioritas mencakup pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat, seperti program Padat Karya Tunai, pembangunan dan rehabilitasi jalan, jembatan, dan sistem pengelolaan air serta sanitasi. Anggaran untuk bidang sumber daya air, jalan dan jembatan, serta permukiman masing-masing mencapai Rp47,64 triliun, Rp55,40 triliun, dan Rp32,70 triliun, yang akan mendukung berbagai proyek pembangunan infrastruktur besar yang akan terus mendorong pertumbuhan ekonomi di seluruh Indonesia.

Kegiatan ini juga mencakup pengembangan infrastruktur di IKN dengan alokasi anggaran sebesar Rp35,37 triliun, yang akan menciptakan peluang bisnis yang lebih luas di sektor konstruksi dan pengelolaan infrastruktur. Keberlanjutan program-program ini diperkirakan akan memperkuat sektor konstruksi dan memberikan dampak positif terhadap perekonomian Indonesia, meskipun tantangan eksternal dan internal tetap perlu dihadapi dengan cermat.

This global economic uncertainty has the potential to impact financial system stability, although it has remained intact so far thanks to monetary policy easing in several countries.

Domestically, Indonesia recorded economic growth of 5.03% in 2024, slightly slower than in 2023. Indonesia's economic growth was driven by household consumption, investment, and government spending, which was largely focused on regional elections (Pilkada). National Strategic Projects (PSN), including the development of the new capital city (IKN), also continue, contributing to growth in the construction and infrastructure sectors. Indonesia's non-oil and gas exports are predicted to continue growing thanks to increased exports of manufactured and mining products.

However, Indonesia also faces several domestic challenges in 2024. First, the presidential and legislative elections could create political uncertainty that may affect investment decisions and consumer spending. Second, rising global food and energy prices could increase domestic inflation, which in turn could reduce consumer spending and slow economic growth. Third, the government budget deficit is expected to increase in line with high government spending on election preparations and infrastructure development, which in turn could increase the country's debt burden. Finally, the weakening of the rupiah against the US dollar has the potential to increase the cost of imported goods and production costs for companies.

In the infrastructure sector, the budget allocation for the Ministry of Public Works and Housing (PUPR) in the 2024 Draft State Budget (RAPBN) reached Rp146.98 trillion, with a focus on strategic and national priority programs. Priority activities include community-based infrastructure development, such as the Cash-for-Work Program, road construction and rehabilitation, bridges, and water management and sanitation systems. The budget for water resources, roads and bridges, and settlements amounts to Rp47.64 trillion, Rp55.40 trillion, and Rp32.70 trillion, respectively, which will support various large-scale infrastructure development projects that will continue to drive economic growth across Indonesia.

These activities also include infrastructure development in the IKN with a budget allocation of Rp35.37 trillion, which will create broader business opportunities in the construction and infrastructure management sectors. The sustainability of these programs is expected to strengthen the construction sector and have a positive impact on the Indonesian economy, although external and internal challenges still need to be addressed carefully.

Tantangan yang Dihadapi di Tahun 2024 dan Upaya Penyelesaiannya

Challenges Faced in 2024 and Efforts to Overcome Them

Tahun 2024 membawa sejumlah tantangan bagi Perusahaan seiring dengan dinamika ekonomi yang terus berkembang. Salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Perusahaan adalah masalah piutang macet atau bermasalah yang dihadapi oleh beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Untuk menyelesaikan persoalan ini, Perusahaan mengambil langkah strategis dengan melakukan mediasi kepada pihak terkait guna menemukan solusi terbaik yang tidak hanya menguntungkan bagi Perusahaan, tetapi juga bagi kelangsungan operasional BUMN yang terlibat. Langkah ini diambil agar tidak ada dampak yang lebih lanjut terhadap *cash flow* dan keberlanjutan hubungan bisnis dengan pihak-pihak tersebut.

The year 2024 brings a number of challenges for the Company in line with the evolving economic dynamics. One of the main challenges faced by the Company is the issue of bad or non-performing receivables faced by several State-Owned Enterprises (SOEs). To resolve this issue, the Company has taken strategic steps by mediating with the relevant parties to find the best solution that is not only beneficial to the Company but also to the operational continuity of the SOEs involved. This step was taken to prevent any further impact on cash flow and the continuity of business relationships with these parties.

Selain itu, kompetensi layanan bisnis Perusahaan dalam lingkungan Holding BUMN Danareksa perlu diperkuat, terutama untuk mengoptimalkan penetrasi pasar dan memperluas peluang pasar di tingkat nasional. Untuk itu, Perusahaan terus berusaha mencari peluang pasar, baik di dalam Holding BUMN Danareksa maupun lintas Holding. Perusahaan aktif mendukung pembentukan ekosistem di lingkungan Holding BUMN Danareksa dan terus berfokus pada sinergi yang lebih erat dengan berbagai entitas, seperti Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB), dan Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER). Upaya ini bertujuan untuk memperluas pangsa pasar dan meningkatkan daya saing Perusahaan di berbagai sektor industri, khususnya di bidang infrastruktur dan pengelolaan sumber daya air.

Di sisi lain, persaingan di sektor yang menjadi fokus utama Perusahaan, terutama terkait dengan sumber dana APBN/D dan pinjaman (*loan*), semakin masif dan semakin kompetitif. Banyak proyek yang masih didominasi oleh proyek-proyek lanjutan, sehingga penyerapan produksi belum optimal. Selain itu, ada kendala eksternal yang mempengaruhi kelancaran proyek, seperti beberapa pemberi kerja untuk proyek Manajemen Konstruksi yang melakukan pembekuan sementara atau "*freezing*" terkait dengan keterlambatan tender pekerjaan fisik. Meskipun demikian, Perusahaan tetap berkomitmen untuk mengoptimalkan pendapatan usaha, yang sebagian besar diperoleh dari proyek-proyek lanjutan, serta pendapatan lain-lain dari sewa, selisih kurs, dan jasa giro.

Sebagai respons terhadap tantangan ini, Perusahaan mengambil langkah cepat dengan melakukan diversifikasi ke arah peningkatan keikutsertaan dalam tender dan penyerapan sumber dana dari BUMN/D serta sektor swasta. Upaya ini dilakukan dengan menggali potensi kolaborasi dan inisiasi optimasi aset yang berkaitan dengan Sumber Daya Alam (SDA) dan Energi milik BUMN, baik di dalam maupun di luar Holding. Untuk sektor swasta, penetrasi pasar dilakukan secara intens melalui inisiasi pekerjaan baru dan peningkatan kualitas serta layanan jasa yang ditawarkan. Dengan strategi diversifikasi dan sinergi ini, Perusahaan berharap dapat mengurangi ketergantungan pada proyek-proyek lanjutan dan meningkatkan kontribusi dari pendapatan yang lebih variatif dan stabil.

Additionally, the Company's business service competencies within the Danareksa SOE Holding environment need to be strengthened, particularly to optimize market penetration and expand market opportunities at the national level. To this end, the Company continues to seek market opportunities, both within the Danareksa SOE Holding and across other Holdings. The Company actively supports the formation of an ecosystem within the Danareksa SOE Holding and continues to focus on closer synergies with various entities, such as Perum Jasa Tirta I, Perum Jasa Tirta II, Batang Integrated Industrial Estate (KITB), and Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER). These efforts aim to expand the Company's market share and increase its competitiveness in various industrial sectors, particularly in infrastructure and water resource management.

On the other hand, competition in the Company's main focus sectors, particularly those related to state budget/D funding and loans, is becoming increasingly fierce and competitive. Many projects are still dominated by follow-up projects, resulting in suboptimal production absorption. Furthermore, external challenges are affecting project progress, such as some clients for Construction Management projects implementing temporary freezes or "freezing" due to delays in physical work tenders. Despite this, the Company remains committed to optimizing business revenue, which is primarily derived from ongoing projects, as well as other income from rentals, exchange rate differences, and giro services.

In response to these challenges, the Company has taken swift action by diversifying its efforts toward increasing participation in tenders and securing funding from state-owned enterprises (SOEs) and the private sector. These efforts involve exploring potential collaborations and initiating asset optimization related to natural resources (NR) and energy owned by SOEs, both within and outside the Holding Company. For the private sector, market penetration is being pursued intensively through the initiation of new projects and improvements in the quality and services offered. With this diversification and synergy strategy, the Company hopes to reduce its dependence on follow-up projects and increase its contribution from more diversified and stable revenues.

Strategi dan Kebijakan Strategis Tahun 2024

Strategic Strategies and Policies for 2024

Di tengah berbagai tantangan yang dihadapi pada tahun 2024, Perusahaan tetap berkomitmen untuk menjaga produktivitas dan inovasi dalam menjalankan kegiatan usaha. Salah satu langkah strategis yang diambil adalah dengan mengimplementasikan transformasi dan konversi perusahaan yang sejalan dengan Asta Cita Pemerintah yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto, yang berfokus pada ketahanan pangan, energi, dan air di Indonesia. Sebagai bagian dari upaya ini, Perusahaan diberi amanah untuk menjalankan bisnis utama yang melibatkan pengelolaan dan pengolahan kelapa sawit dari hulu hingga hilir. Selain itu, perusahaan juga fokus pada pengembangan produk turunan kelapa sawit, seperti minyak goreng dan *biofuel*, yang mendukung ketahanan energi nasional. Dengan demikian, perusahaan berkomitmen untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pembangunan nasional melalui sektor-sektor strategis ini.

Di sisi lain, bidang usaha jasa konsultan tetap menjadi prioritas utama bagi Perusahaan. Pengembangan bisnis di bidang ini bertujuan untuk memperkuat posisi perusahaan sebagai penyedia layanan utama dalam proyek-proyek Sumber Daya Air (SDA) dan sektor lainnya. Perusahaan memiliki kapasitas untuk mengerjakan proyek-proyek di sektor SDA, mencakup seluruh

Amid various challenges faced in 2024, the Company remains committed to maintaining productivity and innovation in its business operations. One of the strategic steps taken is to implement corporate transformation and conversion in line with the Asta Cita Government led by President Prabowo Subianto, which focuses on food, energy, and water security in Indonesia. As part of these efforts, the Company has been entrusted with the core business of managing and processing palm oil from upstream to downstream. Additionally, the Company is focusing on developing palm oil derivatives, such as cooking oil and biofuel, which support national energy security. Thus, the Company is committed to making a tangible contribution to national development through these strategic sectors.

On the other hand, the consulting services business remains a top priority for the Company. Business development in this area aims to strengthen the Company's position as a leading service provider in Water Resources (SDA) projects and other sectors. The company has the capacity to undertake projects in the SDA sector, covering the entire process from upstream to downstream, which

proses dari hulu hingga hilir, yang memperkuat eksistensi perusahaan sebagai BUMN Konsultan *Engineering* terbaik sesuai dengan visi dan misi yang telah ditetapkan. Meskipun fokus pada sektor SDA, perusahaan juga terus memperluas lini bisnisnya dengan memasukkan sektor jalan, jembatan, gedung, survei dan investigasi geologi, serta laboratorium pengujian teknik yang terintegrasi. Pengembangan sektor *Engineering* yang terintegrasi ini diharapkan dapat memperkuat peran perusahaan dalam mendukung proyek-proyek infrastruktur penting di Indonesia, termasuk sektor energi dan energi baru terbarukan (EBT).

Sebagai bagian dari upaya untuk mempercepat pertumbuhan dan meningkatkan profitabilitas, manajemen telah menetapkan "Strategi Pertumbuhan Berkelanjutan" sebagai fokus utama dalam mengembangkan usaha di tahun 2024. Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan pendapatan berkelanjutan (*recurring income*) dengan memfokuskan pada pengembangan usaha yang tidak hanya memberikan keuntungan jangka pendek tetapi juga menciptakan peluang pendapatan jangka panjang. Langkah-langkah yang diambil untuk mewujudkan strategi ini meliputi variasi produk *engineering* untuk sektor pengembangan sumber daya air dan energi, dengan target pasar utama adalah Pemerintah dan BUMN/BUMD.

Lebih lanjut, Perusahaan juga memfokuskan upaya pada optimalisasi aset yang ada, baik yang terkait dengan SDA maupun energi, dengan tujuan untuk meningkatkan produktivitas dan memaksimalkan nilai aset yang tidak produktif. Selain itu, peningkatan kompetensi sumber daya manusia (SDM) menjadi salah satu fokus utama dalam strategi perusahaan. Melalui pengelolaan SDM terintegrasi yang berkelanjutan, perusahaan berharap dapat memberikan layanan prima yang mendukung pertumbuhan laba dan meningkatkan nilai perusahaan di mata pemegang saham. Peningkatan kompetensi SDM ini juga akan berkontribusi pada akselerasi kinerja perusahaan secara berkelanjutan. Di samping itu, perusahaan terus melakukan penyempurnaan dalam sistem manajemen dan organisasi untuk meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan, perumusan kebijakan, dan perencanaan strategi. Sebagai tambahan, Perusahaan juga berkomitmen untuk melakukan riset pemasaran yang lebih efektif dan seleksi proyek yang lebih tepat guna memastikan bahwa proyek-proyek yang dijalankan memiliki nilai tambah yang optimal bagi perusahaan.

strengthens the company's existence as the best state-owned engineering consulting company in line with its vision and mission. Despite its focus on the SDA sector, the company continues to expand its business lines by entering the road, bridge, building, geological survey and investigation, and integrated technical testing laboratory sectors. The development of this integrated engineering sector is expected to strengthen the company's role in supporting important infrastructure projects in Indonesia, including the energy and new and renewable energy (EBT) sectors.

As part of its efforts to accelerate growth and improve profitability, management has established a "Sustainable Growth Strategy" as the main focus in developing the business in 2024. This strategy aims to increase recurring income by focusing on business development that not only provides short-term profits but also creates long-term income opportunities. Steps taken to realize this strategy include diversifying engineering products for the water and energy resource development sectors, with the main target market being the government and state-owned enterprises (BUMN/BUMD).

Furthermore, the company is also focusing its efforts on optimizing existing assets, both those related to natural resources and energy, with the aim of increasing productivity and maximizing the value of unproductive assets. In addition, improving the competence of human resources (HR) is one of the main focuses of the company's strategy. Through integrated and sustainable HR management, the company aims to provide excellent services that support profit growth and enhance the company's value in the eyes of shareholders. The improvement of HR competencies will also contribute to the acceleration of the company's performance in a sustainable manner. In addition, the company continues to improve its management and organizational systems to enhance the effectiveness of decision-making, policy formulation, and strategic planning. Furthermore, the company is committed to conducting more effective marketing research and selecting more appropriate projects to ensure that the projects undertaken provide optimal added value to the company.

Peran Direksi dalam Perumusan dan Penerapan Strategi

Role of the Board of Directors in Strategy Formulation and Implementation

Sebagai bagian dari kepemimpinan perusahaan, Direksi memiliki peran sentral dalam merumuskan dan memastikan penerapan strategi yang akan membawa perusahaan menuju pencapaian visi dan misinya. Dalam merumuskan strategi, Direksi secara aktif melakukan analisis mendalam terhadap kondisi ekonomi global dan domestik, serta tantangan yang dihadapi oleh industri dan pasar. Proses perumusan strategi tidak hanya melibatkan evaluasi internal terkait kekuatan dan kelemahan perusahaan, tetapi juga mempertimbangkan tren pasar, regulasi, serta peluang yang muncul di sektor-sektor strategis, seperti ketahanan pangan, energi, dan pengelolaan sumber daya air. Dalam hal ini, Direksi memastikan bahwa setiap langkah strategis yang diambil bersinergi dengan tujuan pembangunan nasional dan Asta Cita Pemerintah.

Setelah perumusan strategi, Direksi berperan aktif dalam penerapan kebijakan strategis yang telah ditetapkan, baik dalam konteks pengelolaan kelapa sawit, pengembangan *biofuel*, maupun ekspansi di sektor-sektor lain seperti air minum dalam kemasan dan energi terbarukan. Penerapan strategi ini dilakukan dengan melibatkan seluruh jajaran manajemen untuk memastikan implementasi yang efisien dan sesuai dengan rencana yang telah

As part of the company's leadership, the Board of Directors plays a central role in formulating and ensuring the implementation of strategies that will lead the company towards achieving its vision and mission. In formulating strategies, the Board of Directors actively conducts in-depth analysis of global and domestic economic conditions, as well as challenges faced by the industry and market. The strategy formulation process not only involves internal evaluation of the company's strengths and weaknesses, but also considers market trends, regulations, and opportunities emerging in strategic sectors, such as food security, energy, and water resource management. In this regard, the Board of Directors ensures that every strategic step taken is in line with national development goals and the Government's Asta Cita program.

After formulating the strategy, the Board of Directors plays an active role in implementing the strategic policies that have been established, both in the context of palm oil management, biofuel development, and expansion in other sectors such as bottled water and renewable energy. The implementation of this strategy is carried out by involving all levels of management to ensure efficient implementation in accordance with the plans that have been

disusun. Direksi juga memastikan adanya koordinasi yang erat antar unit-unit dalam perusahaan, guna mendukung sinergi dalam pencapaian target-target perusahaan, termasuk pengembangan bisnis inti dan lini bisnis baru yang telah direncanakan. Dalam hal ini, Direksi memantau dan mengevaluasi setiap proses untuk memastikan kelancaran implementasi dan penyesuaian strategi jika diperlukan.

Selain itu, Direksi juga memegang tanggung jawab dalam pengelolaan sumber daya manusia dan peningkatan kompetensi internal perusahaan. Direksi memastikan bahwa setiap anggota tim memiliki pemahaman yang jelas mengenai strategi perusahaan dan bertanggung jawab atas pencapaiannya. Dengan meningkatkan kompetensi dan kapasitas SDM, Direksi meyakini bahwa perusahaan akan memiliki keunggulan kompetitif dalam menghadapi tantangan pasar dan berkontribusi dalam pertumbuhan berkelanjutan. Direksi juga memberikan perhatian khusus pada pengelolaan aset dan optimalisasi seluruh sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, agar setiap langkah strategis memberikan hasil yang maksimal bagi perkembangan jangka panjang perusahaan.

Secara keseluruhan, Direksi berkomitmen untuk terus memantau dan menyesuaikan strategi sesuai dengan dinamika pasar dan kebutuhan industri. Dengan pengawasan yang cermat dan pengambilan keputusan yang tepat, Direksi memastikan bahwa strategi perusahaan tidak hanya fokus pada pencapaian tujuan jangka pendek, tetapi juga berorientasi pada pencapaian tujuan jangka panjang yang berkelanjutan. Dalam setiap kebijakan yang diterapkan, Direksi memastikan bahwa langkah-langkah yang diambil selalu mendukung keberlanjutan dan pertumbuhan perusahaan, sekaligus memberikan kontribusi positif bagi masyarakat dan negara.

prepared. The Board of Directors also ensures close coordination between units within the company to support synergy in achieving company targets, including the development of core businesses and new business lines that have been planned. In this regard, the Board of Directors monitors and evaluates every process to ensure smooth implementation and adjustment of strategies if necessary.

In addition, the Board of Directors is also responsible for human resource management and improving the company's internal competencies. The Board of Directors ensures that every team member has a clear understanding of the company's strategy and is responsible for its achievement. By improving the competence and capacity of human resources, the Board of Directors believes that the company will have a competitive advantage in facing market challenges and contribute to sustainable growth. The Board of Directors also pays special attention to asset management and optimization of all resources owned by the company, so that every strategic step provides maximum results for the company's long-term development.

Overall, the Board of Directors is committed to continuously monitoring and adjusting strategies in accordance with market dynamics and industry needs. With careful supervision and appropriate decision-making, the Board of Directors ensures that the company's strategy is not only focused on achieving short-term goals, but also oriented towards achieving long-term sustainable goals. In every policy implemented, the Board of Directors ensures that the steps taken always support the sustainability and growth of the company, while also making a positive contribution to society and the country.

Kinerja dan Pencapaian Target 2024

Performance and Achievement of 2024 Targets

Perusahaan terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas layanan di berbagai sektor usaha, dengan mengutamakan hasil pekerjaan yang sesuai dengan standar yang berlaku dan memastikan kepuasan klien. Hingga akhir tahun 2024, perusahaan berhasil mencatatkan realisasi kontrak sebesar Rp570,9 miliar, yang merupakan 77,25% dari target RKAP 2024 sebesar Rp739,0 miliar. Realisasi kontrak ini terdiri dari kontrak proyek lanjutan yang tercatat sebesar Rp354,0 miliar dan kontrak proyek baru sebesar Rp216,8 miliar. Pencapaian kontrak proyek lanjutan menunjukkan kenaikan yang signifikan sebesar 32,6% dibandingkan dengan realisasi tahun 2023, sementara kontrak proyek baru mengalami penurunan sebesar 34,92% dibandingkan dengan realisasi yang tercatat pada tahun sebelumnya. Meskipun demikian, perusahaan terus berfokus pada upaya memperoleh peluang proyek baru yang dapat meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Selain itu, Perusahaan juga berhasil mencapai pendapatan usaha/produksi sebesar Rp240,5 miliar pada tahun 2024, yang mencakup 95,81% dari target RKAP sebesar Rp251,0 miliar. Pencapaian ini didorong oleh berbagai proyek yang sedang berjalan, dengan kontribusi yang signifikan dari proyek lanjutan sebesar Rp112,5 miliar (46,78%) dan proyek baru sebesar Rp128,0 miliar (53,22%). Proyek-proyek ini mencakup berbagai jenis pekerjaan, dengan pendapatan dari pekerjaan konsultan mencapai Rp238,2 miliar (99,02%) dan non-konsultan sebesar Rp2,4 miliar (0,98%). Dalam hal proyek Kerjasama Operasi (KSO), perusahaan membukukan produksi sebesar Rp113,4 miliar (47,16%), sementara proyek non-KSO menghasilkan Rp127,1 miliar (52,83%).

The company remains committed to improving service quality across various business sectors, prioritizing work outcomes that meet applicable standards and ensuring client satisfaction. By the end of 2024, the company successfully recorded contract realizations totaling Rp570.9 billion, representing 77.25% of the 2024 RKAP target of Rp739.0 billion. This contract realization consists of ongoing project contracts totaling Rp354.0 billion and new project contracts totaling Rp216.8 billion. The achievement of ongoing project contracts shows a significant increase of 32.6% compared to the realization in 2023, while new project contracts experienced a decrease of 34.92% compared to the realization recorded in the previous year. Nevertheless, the company continues to focus on efforts to secure new project opportunities that can improve performance in the future.

In addition, the Company also managed to achieve operating/production revenue of Rp240.5 billion in 2024, which covers 95.81% of the RKAP target of Rp251.0 billion. This achievement was driven by various ongoing projects, with significant contributions from ongoing projects amounting to Rp112.5 billion (46.78%) and new projects amounting to Rp128.0 billion (53.22%). These projects encompass various types of work, with revenue from consulting services reaching Rp238.2 billion (99.02%) and non-consulting services amounting to Rp2.4 billion (0.98%). In terms of Joint Operation Projects (KSO), the company recorded production of Rp113.4 billion (47.16%), while non-KSO projects generated Rp127.1 billion (52.83%).

Keberhasilan Perusahaan dalam mencapai target pendapatan ini juga tercermin pada pencapaian laba bersih yang mencapai Rp12,8 miliar, yang tercatat sebesar 84,73% dari target laba bersih yang direncanakan sebesar Rp15,0 miliar untuk tahun 2024. Pencapaian laba bersih ini dapat dicapai berkat optimalnya penyerapan produksi dan efisiensi yang dilakukan oleh perusahaan, baik dalam biaya langsung terhadap pendapatan maupun dalam pengendalian biaya tidak langsung. Hal ini menunjukkan kemampuan perusahaan dalam mengelola biaya secara efektif, sekaligus memastikan kualitas dan mutu pekerjaan yang tetap terjaga.

Dari sisi keuangan, Perusahaan mengalami kenaikan yang signifikan dalam total aset, dengan nilai total aset hingga 31 Desember 2024 tercatat sebesar Rp361.116 juta, meningkat Rp4.797 juta dibandingkan dengan total aset Audited tahun 2023 yang sebesar Rp356.319 juta. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh peningkatan Aset Lancar sebesar Rp11.831 juta, yang mendukung likuiditas perusahaan, meskipun terdapat penurunan pada Aset Tidak Lancar sebesar Rp7.034 juta. Peningkatan aset lancar ini mencerminkan kemampuan perusahaan dalam mengoptimalkan penggunaan sumber daya yang ada untuk mendukung kegiatan operasional yang lebih efisien dan produktif. Dengan pencapaian tersebut, Perusahaan terus menunjukkan kinerja yang solid dan siap untuk menghadapi tantangan di tahun-tahun mendatang dengan pondasi keuangan yang lebih kuat.

Prospek Usaha

Business Prospects

Melihat ke depan, prospek usaha perusahaan pada tahun 2025 dan seterusnya sangatlah positif, dengan potensi pertumbuhan yang kuat di berbagai sektor strategis. Salah satu faktor utama yang mendorong prospek usaha perusahaan adalah perkembangan pesat dalam sektor infrastruktur, terutama di bidang pengelolaan sumber daya air, energi terbarukan, dan pembangunan kelapa sawit. Pemerintah Indonesia terus menggalakkan proyek-proyek infrastruktur besar, termasuk pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dan proyek-proyek strategis lainnya, yang memberikan peluang signifikan bagi Perusahaan untuk terlibat lebih dalam. Dengan pengalaman dan keahlian yang dimiliki, perusahaan akan terus berperan penting dalam mendukung program pembangunan nasional, terutama di sektor yang menjadi fokus utama pemerintah.

Selain itu, sektor energi, khususnya energi baru terbarukan (EBT), diperkirakan akan menjadi salah satu pendorong utama pertumbuhan perusahaan di masa depan. Seiring dengan komitmen pemerintah untuk meningkatkan ketahanan energi dan mengurangi ketergantungan pada energi fosil, perusahaan berpotensi memperoleh lebih banyak proyek pengembangan dan implementasi energi terbarukan, seperti *biofuel* dan energi dari sumber daya alam lainnya. Dengan mendalami sektor ini, perusahaan akan dapat memperluas portofolio bisnisnya, sekaligus mendukung inisiatif pemerintah dalam mencapai target-target energi berkelanjutan.

Pada sisi lainnya, sektor pengelolaan kelapa sawit dan produk turunannya juga menyimpan potensi besar, terutama dalam pengembangan produk *biofuel* dan minyak goreng yang ramah lingkungan. Seiring dengan meningkatnya kebutuhan global terhadap produk-produk ramah lingkungan dan energi terbarukan, perusahaan dapat memanfaatkan keunggulan kompetitifnya untuk memperluas pasar internasional dan memperkuat posisinya sebagai pemain utama di industri ini. Perusahaan juga berencana untuk mengoptimalkan proses produksi dan distribusi produk turunan kelapa sawit guna meningkatkan efisiensi dan menambah daya saing di pasar global.

The company's success in achieving its revenue target is also reflected in its net profit of Rp12.8 billion, which is 84.73% of the planned net profit target of Rp15.0 billion for 2024. This net profit was achieved thanks to optimal production absorption and efficiency implemented by the company, both in terms of direct costs to revenue and in controlling indirect costs. This demonstrates the company's ability to manage costs effectively while ensuring that the quality and standards of work remain maintained.

From a financial perspective, the Company experienced a significant increase in total assets, with total assets as of December 31, 2024, recorded at Rp361,116 million, an increase of Rp4,797 million compared to the audited total assets for 2023 of Rp356,319 million. This increase was primarily driven by a rise in Current Assets of Rp11,831 million, which supports the company's liquidity, despite a decrease in Non-Current Assets of Rp7,034 million. The increase in current assets reflects the company's ability to optimize the use of available resources to support more efficient and productive operational activities. With this achievement, the Company continues to demonstrate solid performance and is ready to face challenges in the coming years with a stronger financial foundation.

Looking ahead, the company's business prospects for 2025 and beyond are very positive, with strong growth potential in various strategic sectors. One of the main factors driving the company's business prospects is the rapid development in the infrastructure sector, particularly in water resource management, renewable energy, and palm oil development. The Indonesian government continues to promote major infrastructure projects, including the development of the new capital city (IKN) and other strategic projects, which provide significant opportunities for the Company to become more involved. With its experience and expertise, the Company will continue to play an important role in supporting national development programs, especially in sectors that are the government's main focus.

*In addition, the energy sector, particularly new and renewable energy (EBT), is expected to be one of the main drivers of the company's future growth. In line with the government's commitment to improving energy security and reducing dependence on fossil fuels, the company has the potential to secure more renewable energy development and implementation projects, such as *biofuels* and energy from other natural resources. By deepening its involvement in this sector, the company will be able to expand its business portfolio while supporting the government's initiatives to achieve its sustainable energy targets.*

*On the other hand, the palm oil management and derivative products sector also holds great potential, especially in the development of environmentally friendly *biofuel* and cooking oil products. With the increasing global demand for environmentally friendly products and renewable energy, the company can leverage its competitive advantages to expand its international market and strengthen its position as a major player in the industry. The Company also plans to optimize the production and distribution processes of palm oil derivative products to improve efficiency and increase competitiveness in the global market.*

Secara keseluruhan, prospek usaha Perusahaan sangat bergantung pada keberlanjutan proyek-proyek infrastruktur, pengembangan sektor energi terbarukan, dan pengelolaan produk kelapa sawit yang lebih terintegrasi. Perusahaan akan terus mencari peluang pasar baru, baik di dalam negeri maupun internasional, dengan mengutamakan inovasi, efisiensi, dan kualitas dalam setiap lini bisnis. Dengan perencanaan strategis yang matang dan komitmen yang kuat terhadap keberlanjutan, perusahaan siap menghadapi masa depan dengan optimisme yang tinggi dan siap berkontribusi lebih besar dalam mendukung pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

Overall, the Company's business prospects are highly dependent on the sustainability of infrastructure projects, the development of the renewable energy sector, and more integrated palm oil product management. The Company will continue to seek new market opportunities, both domestically and internationally, by prioritizing innovation, efficiency, and quality in every line of business. With careful strategic planning and a strong commitment to sustainability, the company is ready to face the future with high optimism and is prepared to contribute more to supporting sustainable development in Indonesia.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Implementation of Good Corporate Governance

Perusahaan berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG) sebagai dasar dalam menjalankan kegiatan usaha dan mencapai tujuan jangka panjang. Penerapan GCG yang efektif dan transparan merupakan faktor penting yang mendasari semua keputusan strategis perusahaan dan memastikan keberlanjutan operasional yang sehat. Dalam upaya untuk menjaga integritas dan akuntabilitas, perusahaan mengadopsi kebijakan dan prosedur yang mendukung pengelolaan yang transparan, adil, dan bertanggung jawab, serta memastikan bahwa setiap pihak yang terlibat dalam pengambilan keputusan menjalankan tugasnya dengan integritas tinggi.

The Company is committed to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the basis for conducting its business activities and achieving its long-term objectives. Effective and transparent implementation of GCG is an important factor underlying all of the Company's strategic decisions and ensuring healthy operational sustainability. In an effort to maintain integrity and accountability, the company has adopted policies and procedures that support transparent, fair, and responsible management, and ensure that all parties involved in decision-making carry out their duties with the highest integrity.

Sebagai bagian dari penerapan GCG, perusahaan telah memperkuat struktur pengawasan melalui pembentukan Dewan Komisaris yang independen dan Komite Audit yang bekerja untuk memastikan bahwa setiap kebijakan dan tindakan perusahaan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Direksi berperan aktif dalam merumuskan kebijakan dan strategi, sementara Dewan Komisaris berfungsi untuk mengawasi dan memberikan arahan strategis guna mendukung keberlanjutan usaha. Komite-komite yang ada, termasuk Komite Nominasi dan Remunerasi serta Komite Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), juga berperan penting dalam mendukung transparansi dan objektivitas dalam pengelolaan sumber daya perusahaan.

As part of the implementation of GCG, the company has strengthened its supervisory structure through the establishment of an independent Board of Commissioners and an Audit Committee that works to ensure that all company policies and actions comply with applicable regulations. The Board of Directors plays an active role in formulating policies and strategies, while the Board of Commissioners serves to supervise and provide strategic direction to support business sustainability. The existing committees, including the Nomination and Remuneration Committee and the Human Resources Development Committee, also play an important role in supporting transparency and objectivity in the management of the company's resources.

Dalam pelaksanaan operasionalnya, perusahaan selalu mengedepankan transparansi, baik dalam pengelolaan keuangan, pengambilan keputusan strategis, maupun dalam hubungan dengan pemangku kepentingan. Laporan keuangan perusahaan disusun sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dan diaudit oleh auditor eksternal yang independen untuk memastikan akurasi dan objektivitas laporan yang disampaikan kepada pemegang saham dan regulator. Perusahaan juga secara rutin mengadakan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk melibatkan para pemegang saham dalam proses pengambilan keputusan yang penting, sehingga menciptakan rasa saling percaya dan menjaga hubungan yang harmonis antara manajemen dan pemangku kepentingan.

In its operations, the company always prioritizes transparency, both in financial management, strategic decision-making, and in its relationships with stakeholders. The company's financial statements are prepared in accordance with applicable accounting standards and audited by independent external auditors to ensure the accuracy and objectivity of the reports submitted to shareholders and regulators. The company also regularly holds general meetings of shareholders (GMS) to involve shareholders in important decision-making processes, thereby creating mutual trust and maintaining harmonious relations between management and stakeholders.

Selain itu, perusahaan mengimplementasikan kebijakan yang mengutamakan keberlanjutan dalam semua aspek operasionalnya. Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua kegiatan yang dilakukan tidak hanya mendatangkan keuntungan bagi perusahaan, tetapi juga memberi manfaat sosial dan lingkungan yang positif. Sebagai contoh, perusahaan berfokus pada pengelolaan sumber daya alam yang bertanggung jawab, serta berpartisipasi aktif dalam kegiatan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR) yang mendukung pembangunan berkelanjutan di masyarakat. Melalui penerapan GCG yang kuat dan keberlanjutan dalam operasional, perusahaan berusaha untuk membangun reputasi yang baik dan menciptakan nilai jangka panjang bagi semua pemangku kepentingan.

In addition, the company implements policies that prioritize sustainability in all aspects of its operations. The company is committed to ensuring that all activities undertaken not only generate profits for the company but also provide positive social and environmental benefits. For example, the company focuses on responsible natural resource management and actively participates in corporate social responsibility (CSR) activities that support sustainable development in the community. Through the implementation of strong GCG and sustainability in its operations, the company strives to build a good reputation and create long-term value for all stakeholders.

Perubahan Komposisi Direksi

Changes in the Composition of the Board of Directors

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-267/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024 dan No. SK-53/MBU/03/2025 tanggal 11 Maret 2025 terdapat perubahan Direksi perusahaan sehingga susunan Direksi adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. SK-267/MBU/11/2024 dated November 11, 2024 and No. SK-54/MBU/03/2025 dated March 11, 2025, there has been changes in the company's Board of Directors, resulting in the following composition of the Board of Directors:

Direksi/ Board of Directors	
Direktur Utama President Director	Letjen TNI Purn. Agus Sutomo
Direktur Operasi Director of Operations	Ospin Sembiring
Direktur Bisnis dan Pengembangan Industri Director of Business and Industrial Development	Edi Slamet Irianto
Direktur Keuangan and Manajemen Risiko Director of Finance and Risk Management	Mohammad Wais Fansuri
Direktur Sumber Daya dan Umum Director of Human Resources and General Affairs	Mayjen TNI Purn. Bachtiar Utomo
Direktur Perkebunan Director of Palm Oil Plantation	Mayjen TNI Purn. Cucu Somantri
Direktur Konsultan Konstruksi Director of Construction Consultant	Gagah Guntur Aribowo

Apresiasi

Appreciation

Atas nama Direksi, kami ingin menyampaikan apresiasi yang mendalam kepada seluruh jajaran karyawan, Dewan Komisaris, serta mitra bisnis yang telah memberikan kontribusi luar biasa sepanjang tahun 2024. Keberhasilan yang diraih Perusahaan tidak terlepas dari dedikasi, kerja keras, dan komitmen semua pihak yang telah bekerja tanpa mengenal lelah untuk mencapai tujuan bersama. Terima kasih atas dukungan yang terus menerus dan semangat untuk terus berinovasi dalam menghadapi tantangan yang ada. Kami berharap kerja sama yang solid ini akan terus berkembang, memungkinkan kita untuk mencapai lebih banyak pencapaian di masa depan dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi perusahaan, masyarakat, dan negara.

On behalf of the Board of Directors, we would like to express our deepest appreciation to all employees, the Board of Commissioners, and business partners who have made outstanding contributions throughout 2024. The Company's success cannot be separated from the dedication, hard work, and commitment of all parties who have worked tirelessly to achieve our common goals. Thank you for your continued support and enthusiasm for innovation in the face of challenges. We hope that this strong collaboration will continue to grow, enabling us to achieve even greater accomplishments in the future and make a more significant positive impact on the company, society, and the nation.

Jakarta, Mei | May 2024

Atas Nama Direksi

On Behalf of the Board of Directors

PT Indra Karya (Persero)



Letjen TNI Purn. Agus Sutomo

Direktur Utama
President Director





INDRA KARYA

03

PROFIL PERUSAHAAN

*COMPANY
PROFILE*



Informasi Perusahaan

Company Information

Nama Perusahaan Company Name

PT Indra Karya (Persero)

Tanggal Pendirian Date of Establishment

29 Maret 1961

March 29, 1961

Dasar Hukum Pendirian Legal Basis of Establishment

PT Indra Karya (Persero) selanjutnya disebut "Perusahaan" atau "Perseroan" didirikan di Jakarta pada tahun 1972 sebagai kelanjutan dari PN Indra Karya, sesuai dengan Akta No. 108 tanggal 20 Desember 1972 dari Dian Paramita Tamzil, S.H., Notaris di Jakarta dan diubah dengan Akta No. 107 tanggal 17 April 1973 dari Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta serta telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/165/11 tanggal 8 Mei 1973.

Anggaran Dasar Perseroan kemudian mengalami perubahan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Perseroan No. 09 tanggal 24 Oktober 2022.

PT Indra Karya (Persero) hereinafter called "the Company" was founded in Jakarta in 1972 as a continuation of the PN Indra Karya, based on the Deed No. 108 dated December 20, 1972 of Dian Paramita Tamzil, S.H., Notary in Jakarta and amended by the Deed No. 107 dated 17 April 1973 of Kartini Muljadi, S.H., notary in Jakarta and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. Y.A.5/165/11 dated May 8, 1973.

The Company's Articles of Association then underwent changes based on the Deed of Company Meeting Decision Statement No. 09 dated October 24, 2022.

Bidang Usaha Line of Business

Engineering, Developer,
dan Industry

Engineering, Developer, and Industry

Jumlah Karyawan Total Employees

169

orang (Per 31 Desember 2024)

employees (as of December 31, 2024)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Paid up Capital

Rp10.001.000.000,-

Rp10,001,000,000,-

Modal Dasar Authorized Capital

Rp40.004.000.000,-

Rp40,004,000,000,-

Alamat dan Kontak Perusahaan Address and Company Contact

HK Tower Lantai 9/ 9th Floor Jl. Biru Laut X
Kav. 9 Cawang Jakarta 13340 Indonesia

Telp/Phone: (021) 8192 636

Surel/Email: agrinaspalma@agrinaspalma.id

Situs Web/Website: agrinaspalma.id

Komposisi Pemegang Saham Shareholder Composition

100%

Pemerintah Republik Indonesia

Government of the Republic of Indonesia

Riwayat Singkat Perseroan

Brief History of the Company

PT Indra Karya (Persero) awalnya didirikan dengan nama PN Indra Karya pada tahun 1961 dan berfokus pada bidang pemborongan, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 57 Tahun 1961. Perseroan kemudian mengalami perubahan signifikan pada tahun 1972, ketika statusnya berubah menjadi perusahaan perseroan yang tercatat dalam Akta Notaris No. 108 tanggal 20 Desember 1972 dan kemudian diperbaharui melalui Akta No. 107 tanggal 17 April 1973. Perubahan tersebut disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. Y.A.5/165/11 tanggal 8 Mei 1973, yang menandai langkah awal transformasi Perseroan.

Pada tahun 1978, Menteri Pekerjaan Umum sebagai kuasa pemegang saham memutuskan untuk merestrukturisasi organisasi perusahaan dan mengubah fokus utama Perseroan ke dalam bidang usaha baru, yaitu jasa konsultansi rekayasa (engineering). Sebagai langkah awal dalam memasuki sektor ini, bidang tenaga listrik dipilih dengan pertimbangan adanya peluang yang terbuka lebar dan minimnya kompetisi pada saat itu.

Untuk mendukung pengembangan industri konstruksi nasional, pada tahun 1981, Menteri Pekerjaan Umum melakukan langkah-langkah penguatan terhadap Perseroan. Salah satu langkah utama adalah pengalihan sejumlah tenaga kerja ahli, teknis, dan staf administrasi dari Proyek Induk Serbaguna Kali Brantas ke dalam tubuh Perseroan. Tahun tersebut juga menyaksikan penambahan Penyertaan Modal Negara dalam bentuk tanah, gedung kantor, kendaraan, peralatan laboratorium, peralatan survei, komputer, dan lain-lain, berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) No. 34 Tahun 1981. Dengan penambahan ini, bidang usaha Perseroan berkembang mencakup pengelolaan sumber daya air, khususnya dalam rekayasa bendungan besar, serta pekerjaan survei, investigasi, manajemen, dan ekonomi.

Pada 1981, meskipun proyek-proyek di sektor sumber daya air mulai diperoleh, bidang ketenagalistrikan masih mendominasi dengan kontribusi 85% terhadap total pekerjaan. Namun, proporsi ini berubah pada 1987, ketika proyek-proyek dari Direktorat Jenderal Pengairan Departemen Pekerjaan Umum mencapai 80% dari total pekerjaan Perseroan.

Keberhasilan besar tercatat pada tahun 1982, ketika Perseroan memenangkan lelang proyek PLTA Sengguruh yang didanai oleh *Asian Development Bank* (ADB). Perseroan ditunjuk sebagai konsultan utama, dan proyek ini berlangsung hingga 1989. Pencapaian serupa tercatat pada 1988, ketika Perseroan terpilih sebagai konsultan utama dalam dua proyek PLTA besar yang didanai oleh *International Bank for Reconstruction and Development* (IBRD).

Pada tahun 2024, Perseroan kini dikelola oleh empat divisi utama yang memiliki fokus bidang usaha masing-masing, yaitu:

1. Divisi *Engineering I*: Menyediakan layanan perencanaan untuk Sumber Daya Air (SDA).
2. Divisi *Engineering III*: Fokus pada pekerjaan di luar SDA, seperti jalan dan jembatan, gedung dan bangunan, energi, dan lainnya.
3. Divisi Survei dan Investigasi: Memberikan layanan survei dan investigasi untuk berbagai kebutuhan proyek.

Dengan struktur yang matang dan divisi-divisi yang terus berkembang, PT Indra Karya (Persero) kini menjadi salah satu pemain utama di sektor rekayasa dan konstruksi di Indonesia, siap untuk terus berinovasi dan mendukung pembangunan nasional.

PT Indra Karya (Persero) was initially established under the name PN Indra Karya in 1961 and focused on the field of contracting, based on Government Regulation No. 57 of 1961. The Company then underwent a significant change in 1972, when its status changed to a corporate company as recorded in Notarial Deed No. 108 dated 20 December 1972 and later renewed through Deed No. 107 dated 17 April 1973. The change was ratified by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. Y.A.5/165/11 dated 8 May 1973, which marked the first step in the Company's transformation.

In 1978, the Minister of Public Works as the shareholder authority decided to restructure the Company's organisation and change the Company's main focus into a new business field, namely engineering consultancy services. As the first step in entering this sector, the electric power sector was chosen in consideration of the wide open opportunities and lack of competition at that time.

To support the development of the national construction industry, in 1981, the Minister of Public Works took steps to strengthen the Company. One of the main steps was the transfer of a number of labour experts, technicians and administrative staff from the Kali Brantas Multipurpose Master Project into the Company. The year also saw the addition of State Capital Participation in the form of land, office buildings, vehicles, laboratory equipment, survey equipment, computers, and others, based on Government Regulation (PP) No. 34 of 1981. With this addition, the Company's business expanded to include water resources management, particularly in the engineering of large dams, as well as survey, investigation, management and economic works.

In 1981, although projects in the water resources sector began to be acquired, the power sector still dominated with a contribution of 85% to the total work. However, this proportion changed in 1987, when projects from the Directorate General of Irrigation of the Ministry of Public Works accounted for 80% of the Company's total work.

A major success was recorded in 1982, when the Company won the tender for the Sengguruh Hydropower project funded by the Asian Development Bank (ADB). The Company was appointed as the main consultant, and the project lasted until 1989. A similar achievement was recorded in 1988, when the Company was selected as the main consultant in two large hydropower projects funded by the International Bank for Reconstruction and Development (IBRD).

In 2024, The Company is now managed by four main divisions that focus on their respective fields of business, namely:

1. *Engineering Division I: Provides planning services for Water Resources (SDA).*
2. *Engineering III Division: Focuses on work outside natural resources, such as roads and bridges, buildings and structures, energy, and others.*
3. *Survey and Investigation Division: Provides survey and investigation services for various project needs.*

With a mature structure and growing divisions, PT Indra Karya (Persero) is now one of the major players in the engineering and construction sector in Indonesia, ready to continue innovating and supporting national development.

Pada tahun 2024, Perseroan akan melanjutkan langkah-langkah strategis untuk memperluas cakupan usahanya dan memperkenalkan teknologi terbaru dalam setiap aspek operasionalnya, guna memastikan kontribusi maksimal terhadap perkembangan infrastruktur dan industri di Indonesia.

In 2024, the Company will continue to take strategic steps to expand its business scope and introduce the latest technology in every aspect of its operations, to ensure maximum contribution to the development of infrastructure and industry in Indonesia.

Visi, Misi, dan Tata Nilai

Vision, Mission, and Corporate Values



Visi *Vision*

Menjadi Perusahaan Konsultan yang Diperluas, Terintegrasi, dan Berkinerja Unggul di Asia.

Becoming an Integrated and Extended Consultancy Company with Excellent Performance in Asia.

Penjelasan atas Visi di atas adalah sebagai berikut:

Konsultan yang Diperluas dan Terintegrasi

Menjadi konsultan yang memiliki 3 lini bisnis layanan utama yang terintegrasi di sektor Sumber Daya Air (SDA) dan Non-SDA dari Hulu hingga Hilir yakni Konsultan *Engineering, Developer, Industry* dengan penjelasan sebagai berikut:

- **Engineering**

Produk jasa konsultan engineering meliputi studi, feasibility study, desain, supervisi, manajemen konstruksi, survei dan investigasi pada sektor pekerjaan sipil/keairan, energi, jalan dan jembatan, gedung dan bangunan dan lain-lain, dengan layanan pendukung utama seperti layanan survei investigasi dan layanan pengujian laboratorium geoteknik yang tersertifikasi ISO 17025.

- **Developer**

Produk jasa meliputi kegiatan bisnis yang dilakukan sejak inisiasi, kajian, pembangunan, operasi dan pemeliharaan pada sektor pekerjaan sipil/keairan dan energi, air bersih dan pengelolaan limbah terintegrasi.

- **Industry**

Produk Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) yang diproduksi sesuai Standar Nasional Indonesia (SNI)*.

Berkinerja Unggul di Asia

Mengacu pada standar nasional dan internasional untuk memperkuat layanan yang mencakup:

- ISO 9001:2015 (Sistem Manajemen Mutu)
- ISO 14001:2015 (Sistem Manajemen Lingkungan)
- ISO 45001:2018 (Sistem Manajemen K3)
- ISO 37001:2016 (Sistem Manajemen Anti-Penyuapan)
- ISO/IEC 17025:2017 (Standar Kompetensi Laboratorium Pengujian dan Kalibrasi)
- Good Corporate Governance (GCG)

The Explanation of the above Vision is as follows:

Integrated and Extended Consultant

Become a consultant who has 3 main integrated service business lines in the Water Resources (SDA) and Non-SDA sectors from Upstream to Downstream, namely Engineering Consultant, Developer, Industry with the following explanation:

- **Engineering**

Engineering consultant service and products include studies, feasibility studies, design, supervision, construction management, surveys and investigations in the civil/ water works, energy, roads and bridges, buildings and structures and others, with main supporting services such as investigative survey services and ISO 17025 certified geotechnical laboratory testing services.

- **Developers**

Service and products include business activities carried out from initiation, study, construction, operation and maintenance in the civil works/water and energy, clean water and integrated waste management sectors.

- **Industry**

Bottled Drinking Water (AMDK) products which are produced according to Indonesian National Standards (SNI).*

Outperforming in Asia

Referring to national and international standards to strengthen services that include:

- ISO 9001:2015 (Quality Management System)*
- ISO 14001:2015 (Environmental Management Systems)*
- ISO 45001:2018 (OHS Management System)*
- ISO 37001:2016 (Anti-Bribery Management System)*
- ISO/IEC 17025:2017 (Testing and Calibration Laboratory Competency Standard)*
- Good Corporate Governance (GCG)*

*) Perseroan telah memberhentikan layanan produk air minum dalam kemasan (AMDK) merek Infresh efektif pada tanggal 15 Agustus 2024.

*) The Company has discontinued its bottled drinking water (AMDK) product under the Infresh brand effective August 15, 2024.



Misi Mission

Sebagai entitas BUMN yang terus memperkuat strategi dalam pencapaian visi perusahaan, Perseroan memiliki misi sebagai berikut:

As a state-owned entity that continuously strengthens its strategy in achieving the company's vision, the Company has the following mission:

Membangun SDM ber-AKHLAK.
Cultivating Human Capital with AKHLAK.

Mengembangkan usaha Engineering, Developer, dan Industry yang unggul.
Developing Excellent Engineering, Developer, and Industry Business.

Inovasi berkelanjutan atas produk dan proses untuk terciptanya kepuasan pelanggan.
Carrying out continuous innovation on Products and Process for customer satisfaction.

Melakukan transformasi budaya digital.
Performing a Digital Culture Transformation.

Menjalankan Perusahaan dengan GCG.
Running the Company with GCG.



Tata Nilai Corporate Values

Perseroan menerapkan tata nilai **AKHLAK** sebagai *core values* yang berlaku bagi seluruh Insan Indra Karya, dengan penjelasan sebagai berikut:

*The Company applies **AKHLAK** values as core values that apply to all Indra Karya employees, with the following explanation:*

A

AMANAH/ TRUSTWORTHY

Memegang teguh kepercayaan yang diberikan.
Uphold the trust given.

K

KOMPETEN/ COMPETENT

Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas.
Continue to learn and develop capabilities.

H

HARMONIS/ HARMONIOUS

Saling peduli dan menghargai perbedaan.
Mutual care and respect for differences.

L

LOYAL/ LOYAL

Berdedikasi dan mengutamakan kepentingan Bangsa dan Negara.
Dedicated and prioritize the interests of the Nation and the State.

A

ADAPTIF/ ADAPTIVE

Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan perubahan.
Continue to innovate and be enthusiastic in driving or facing change.

K

KOLABORATIF/ COLLABORATIVE

Membangun kerja sama yang sinergis.
Build synergistic cooperation.

Konsep dan Makna Logo

Logo Concept and Meaning



Logo PT Indra Karya (Persero) didesain dengan konsep modern dan minimalis dengan tujuan menggambarkan semangat baru Perusahaan untuk terus berkarya bagi Indonesia. Warna logo terdiri dari perpaduan warna biru tua dan biru muda, yang mengekspresikan sikap profesional, dapat dipercaya, kemandirian, kompeten, serta memiliki komitmen yang kuat.

The logo of PT Indra Karya (Persero) was designed with a modern and minimalist concept with the aim of depicting the Company's new spirit to continue working for Indonesia. The logo color consists of a combination of dark blue and light blue, which expresses a professional, trustworthy, independent, competent manner, and a strong commitment.



Huruf "I" dan "K"

Konsep dasar bentuk logo merupakan gabungan dari huruf "I" dan "K" yang mewakili inisial dari nama Perseroan.

The basic concept of the logo is a combination of the letters "I" and "K" which represent the initials of the Company's name.



Arah Panah Ke Atas

Arah panah merepresentasikan PT Indra Karya (Persero) berkembang secara dinamis sebagai perusahaan konsultan teknik dan manajemen terkemuka di Indonesia.

The arrow represents PT Indra Karya (Persero) developing dynamically as a leading engineering and management consulting company in Indonesia.



Tanda Checklist

Tanda *checklist* merepresentasikan bahwa Perusahaan memiliki kualitas terpercaya dan berhasil menyelesaikan seluruh penugasan kontrak secara profesional.

The arrow represents PT Indra Karya (Persero) developing dynamically as a leading engineering and management consulting company in Indonesia.



3 Bidang Objek

Tiga bidang objek merepresentasikan 3 (Tiga) lini bisnis utama Perusahaan yakni *Engineering Consultant, Developer, dan Industry*.

The three object fields represent the Company's 3 (three) main business lines, namely Engineering Consultant, Developer, and Industry.



Warna

Warna biru pada logo memiliki makna profesional, dapat dipercaya, kemandirian, kompeten, serta memiliki komitmen yang kuat.

The blue color in the logo represents professional, trustworthy, independent, competent, and has a strong commitment.



Jejak Langkah Milestones

Tahun / Year

1961

Perseroan didirikan dengan bidang usaha di sektor Sumber Daya Air.

The Company was established with a business sector in the Water Resources sector.



Tahun / Year

1982

Pemindahan kantor pusat Perseroan dari Malang ke Jakarta.

Relocation of the Company's head office from Malang to Jakarta.



Tahun / Year

1994

Penambahan kantor perwakilan Perseroan di beberapa wilayah yang tersebar secara nasional.

Addition of the Company's representative offices in several regions spread nationally.



Tahun / Year

1972

Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perusahaan Terbatas (PT).

Changes to the Company's Articles of Association from State Company (PN) to Limited Liability Company (PT).

Tahun / Year

1987

Perluasan bidang usaha Perseroan di sektor energi ketenagalistrikan.

Expansion of the Company's business sector in the electricity energy sector.



Bidang Usaha

Line of Business

Perseroan menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar yang telah disahkan melalui Surat Keputusan Menteri BUMN No. 816/MBU/12/2018 tertanggal 12 Desember 2018, yang mengatur tentang perubahan Anggaran Dasar Perseroan. Selain itu, juga terdapat Akta Notaris No. 09 tertanggal 14 Desember 2018 yang menyatakan perubahan lebih lanjut pada Anggaran Dasar Perseroan. Dalam perkembangannya, Perseroan memperluas ruang lingkup usahanya menjadi konsultan yang mencakup bidang *Engineering Consultant*, Developer, dan Industri. Selanjutnya, Anggaran Dasar Perseroan kembali mengalami penyesuaian yang tercatat dalam Akta Anggaran Dasar No. 09 tanggal 24 Oktober 2022 yang disusun oleh Nia Kurniasih S.H., notaris di Jakarta, terkait dengan perubahan pada pasal 3.

Sesuai Anggaran Dasar, Perseroan beroperasi dengan maksud dan tujuan untuk melakukan beragam aktivitas berikut:

- Aktivitas Keinsinyuran dan konsultasi teknis;
- Aktivitas arsitektur;
- Aktivitas Konsultasi transportasi;
- Aktivitas Konsultasi manajemen lainnya;
- Jasa Inspeksi Teknik Instalasi;
- Jasa Inspeksi Periodik;
- Penyediaan SDM dan manajemen fungsi SDM;
- Jasa sertifikasi;
- Jasa *Commissioning* Proses Industrial,
- *Quality Assurance* dan *Quality Control*;
- Aktivitas Kantor Pusat;
- Jasa pengujian laboratorium;
- Jasa Kalibrasi/Metrologi;
- Aktivitas penunjang pertambangan dan penggalian lainnya;
- Konstruksi Bangunan Sipil pengolahan air bersih;
- Konstruksi Bangunan sipil pertambangan;
- Penyiapan lahan;
- Konstruksi khusus lainnya, yang tidak termasuk dalam lainnya (YTDL);
- Aktivitas desain interior;
- Jasa instalasi konstruksi navigasi laut, sungai dan udara;
- Industri air minum isi ulang;
- Sewa guna usaha tanpa hak opsi intelektual properti, bukan karya hak cipta;
- Penampungan dan penyaluran air baku;
- Perdagangan Besar Minuman non-alkohol bukan susu;
- Konstruksi bangunan sipil prasarana dan sarana sistem pengolahan limbah padat, cair, dan gas;
- Industri air kemasan; dan
- Pembuatan/pengeboran sumur air tanah.

The Company conducts its business activities in accordance with the provisions contained in the Articles of Association which have been approved through the Decree of the Minister of SOEs No. 816/MBU/12/2018 dated 12 December 2018, which regulates the amendment of the Company's Articles of Association. In addition, there is also Notarial Deed No. 09 dated 14 December 2018 stating further amendments to the Company's Articles of Association. In its development, the Company expanded the scope of its business into a consultant that covers the fields of Engineering Consultant, Developer, and Industry. Furthermore, the Company's Articles of Association underwent another adjustment as recorded in the Deed of Articles of Association No. 09 dated 24 October 2022 prepared by Nia Kurniasih S.H., a notary in Jakarta, related to the amendment in article 3.

In accordance with the Articles of Association, the Company operates with the goal and purpose of carrying out the following various activities:

- *Engineering and technical consulting activities;*
- *Architectural activity;*
- *Transportation consulting activities;*
- *Other management consulting activities;*
- *Installation Engineering Inspection Services;*
- *Periodic Inspection Services;*
- *Provision of human resources and management of HR functions;*
- *Certification services;*
- *Industrial Process Commissioning Services,*
- *Quality Assurance and Quality Control;*
- *Head Office Activities;*
- *Laboratory testing services;*
- *Calibration/Metrology Services;*
- *Other mining and excavation support activities;*
- *Civil Building Construction, clean water processing;*
- *Mining civil building construction;*
- *Land preparation;*
- *Other special construction, which is not included in other (YTDL);*
- *Interior design activities;*
- *Sea, river and air navigation construction installation services;*
- *Refill drinking water industry;*
- *Leaseholds without intellectual property rights, not copyrighted works;*
- *Storage and distribution of raw water;*
- *Wholesale Trade in non-alkoholic non-dairy beverages;*
- *Construction of civil buildings, infrastructure and facilities for solid, liquid and gas waste processing systems;*
- *Bottled water industry; and*
- *Construction/drilling of groundwater wells.*

Produk dan Jasa

Products and Services

Selaras dengan bidang usaha yang tercantum dalam Anggaran Dasar, Perseroan menyediakan berbagai macam layanan jasa, antara lain sebagai berikut:

In line with the line of business stated in the Articles of Association, the Company provides various services, including the following:

Engineering

Sumber Daya Air

- Bendungan
- Waduk
- Irigasi
- Manajemen Banjir
- Pengolahan Air Bersih dan Air Limbah
- Penyediaan Air Bersih

Transportasi

- Jalan
- Jembatan
- Rel Perkerataan
- Pelabuhan
- Bandara
- Jalan Bebas Hambatan
- Tunneling

Industri, Energi, dan Minerba

- PLTA
- PLTM
- PLTU
- PLTB
- Jaringan Transmisi dan Substasiun
- Distribusi dan Perpipaian
- Fasilitas Pendukung Pertambangan

Bangunan (Gedung), Permukiman, Tata Ruang dan Lainnya

- Kawasan dan Tata Ruang
- Tunneling
- Komunitas dan Sosial

Water Resources

- Dam
- Reservoir
- Irrigation
- Flood Management
- Clean Water and Wastewater Treatment
- Clean Water Supply

Transportation

- Road
- Bridge
- Railway
- Port
- Airport
- Highway
- Tunneling

Industry, Energy, and Minerals and Coal

- Hydroelectric Power Plant
- Micro Hydro Power Plant
- Steam Powered Plant
- Wind Power Plant
- Transmission Network and Substation
- Plumbing and Distribution
- Mining Support Facilities

Buildings, Spatial Planning, Settlements, and Others

- Area and Spatial Planning
- Tunneling
- Social and Community

Developer

- Clean Water Supply
- Wastewater Treatment
- Specialist Contractor:
 - » Geotechnical Investigation (Drilling, CPT Insitu Testing, etc)
 - » Monitoring Well and Deep Well Construction

Industry

- Drinking Water
- Drinking Water Treatment Plant

Support

Survey & Investigation

- Topographic Survey
- Bathymetry Survey
- Geophysical Survey
- Geology & Geotechnical Investigation
- Geotechnical Laboratory Testing
- Hydrology Survey
- Hydro-Geology Survey
- Hydro-Oceanography Survey
- Foundation Sementation (Grouting)

Wilayah Operasional

Operational Area



Kantor Pusat

PT Indra Karya (Persero)
HK Tower Lantai 9 Jl. Biru Laut X Kav. 9
Cawang, Jakarta 13340



Divisi Engineering I

Jl. Surabaya No. 3A, Malang 65115
Telp.: (034) 551463 | Faks.: (034) 551311
Email: divisi_eng1@indrakarya.co.id



Divisi Engineering II¹⁾

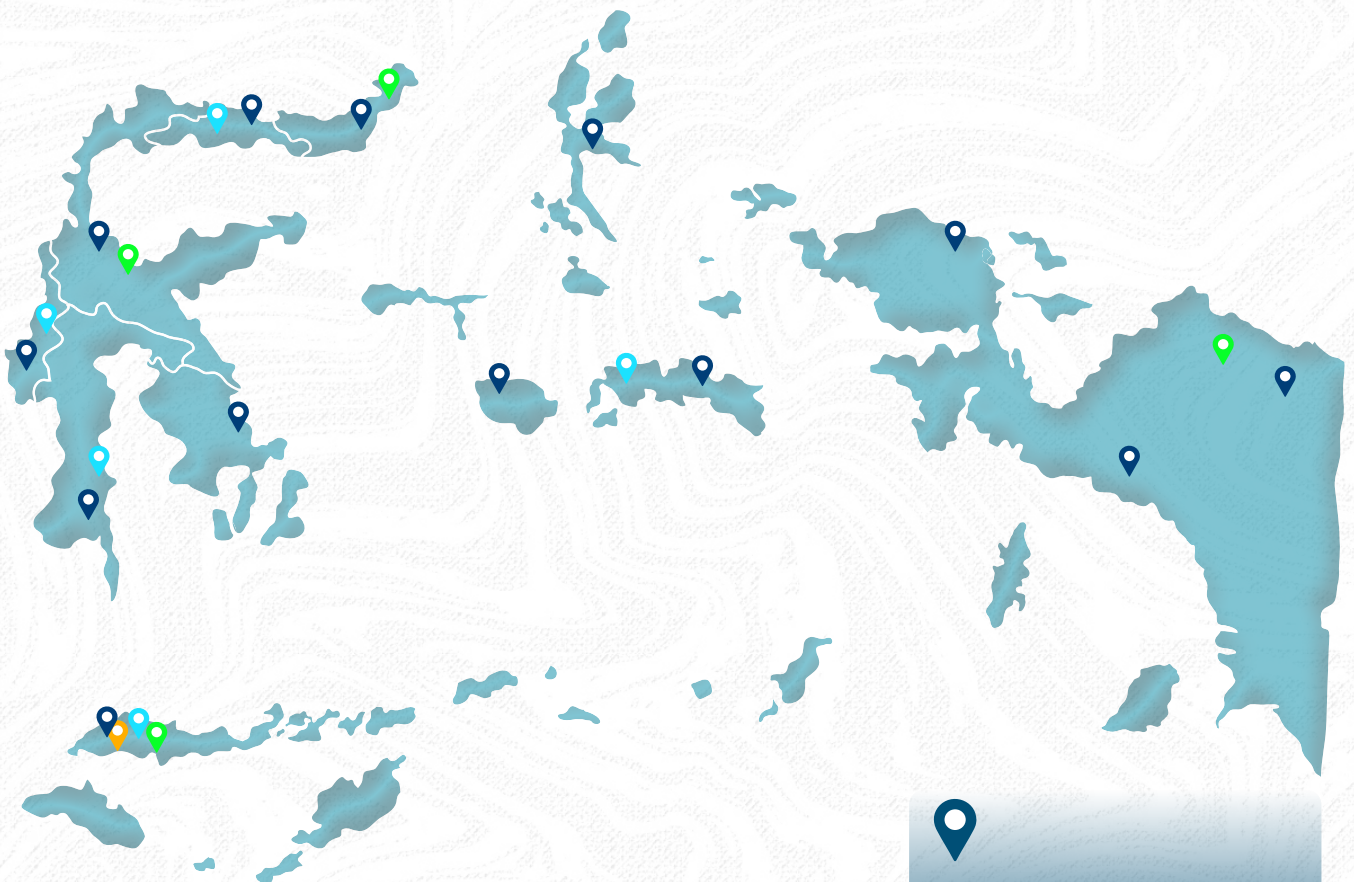
Jl. Ketileng Raya No. 16, Semarang 50276
Telp.: (024) 6725046 | Faks.: (024) 6725045
Email: divisi_eng2@indrakarya.co.id



Divisi Engineering III

Jl. Tebet Dalam III C No. 9 Jakarta Selatan 12810
Telp.: (021) 8192 636
Email: divisi_eng3@indrakarya.co.id

¹⁾ Perseroan telah melimpahkan kewenangan atas pengelolaan seluruh fungsi dan lini bisnis Divisi Engineering II kepada Divisi Engineering I berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 026/KPTS/IK/XI/2023.
The Company has delegated authority over the management of all functions and business lines of Engineering Division II to Engineering Division I based on Board of Directors' Decree Letter No. 026/KPTS/IK/XI/2023.



Divisi Pusat Hidrologi
Jl. Madrasah XII No. 28 RT. 005/RW. 010
Cipinang Cempedak, Jakarta Timur 13340
Telp.: (021) 8192 636
Email: indrakarya@indrakarya.co.id



Divisi Survei dan Investigasi
Jl. Janti Barat 27, Malang 65148
Telp.: (0341) 3622 61 | Faks.: (0341) 324402
Email: divisi_si@indrakarya.co.id



Divisi Industri Komplek Gudang Tertutup III
Jl. Pulobuaran Raya Kawasan Industri JIEP
Pulogadung Cakung, Jakarta 13930
Telp.: (021) 8354 237
Email: divisi_industri@indrakarya.co.id



Divisi Developer²
Jl. Madrasah XII No. 28 RT. 005/RW. 010
Cipinang Cempedak, Jakarta Timur 13340
Telp.: (021) 8192 636
Email: indrakarya@indrakarya.co.id

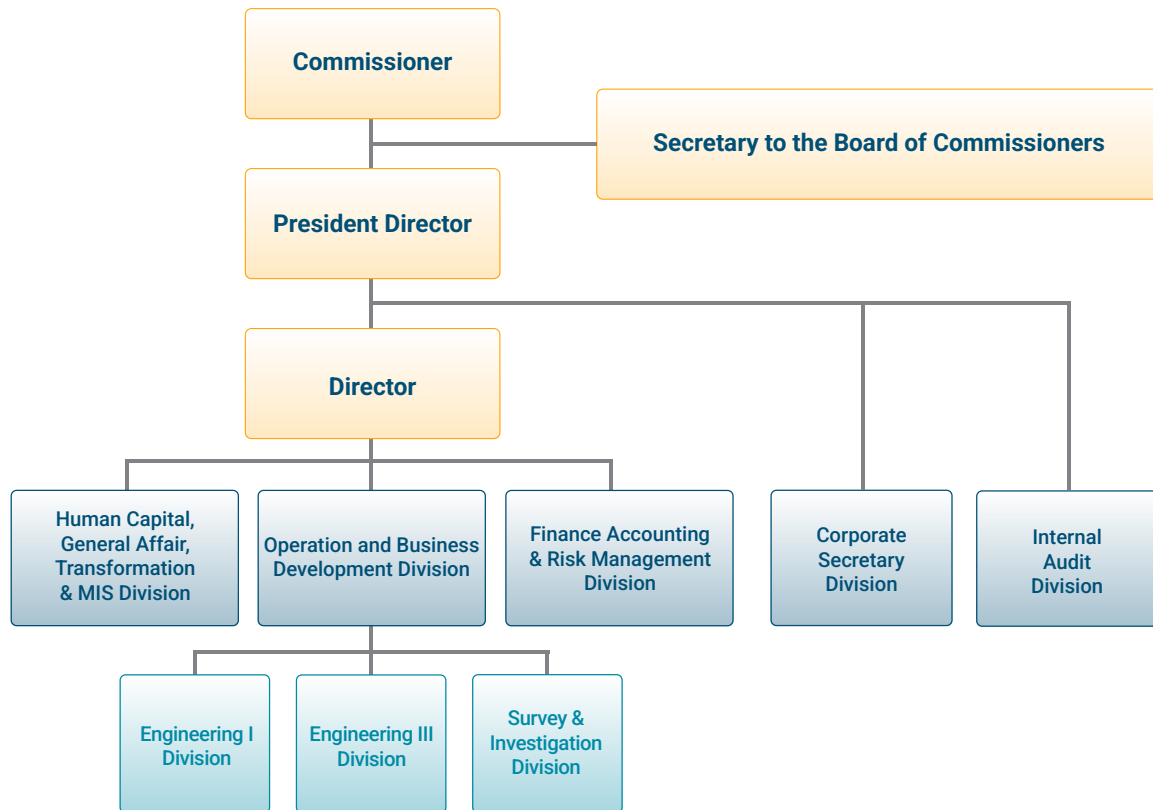
²⁾ Perseroan telah melimpahkan kewenangan atas pengelolaan seluruh fungsi dan lini bisnis Divisi Developer kepada Divisi Survei dan Investigasi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 026/KPTS/IK/VII/2024.
The Company has delegated authority over the management of all functions and business lines of Developer Division to Survey and Investigation Division based on Board of Directors' Decree Letter No. 026/KPTS/IK/VII/2024.

Struktur Organisasi

Organizational Structure

Sesuai dengan tiga lini bisnis yang dijalankan, yaitu *Engineering*, *Developer*, dan *Industry*, Perseroan menetapkan struktur organisasi yang tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 026/KPTS/IK/IX/2021 tanggal 7 September 2021 mengenai Perubahan Struktur Organisasi PT Indra Karya (Persero). Berdasarkan ketentuan tersebut, struktur organisasi Perseroan adalah sebagai berikut:

In accordance with the three business lines carried out, namely Engineering, Developer, and Industry, the Company establishes an organisational structure as stated in the Decree of the Board of Directors No. 026/KPTS/IK/IX/2021 dated 7 September 2021 regarding Changes in the Organisational Structure of PT Indra Karya (Persero). Based on this decree, the Company's organisational structure is as follows:



Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Komposisi anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan periode 2024 berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-143/MBU/06/2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indra Karya adalah sebagai berikut:

The composition of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors for the 2024 period based on the Decree of the Minister of SOEs No. SK-143/MBU/06/2024 on the Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners of the Company (Persero) PT Indra Karya is as follows:

Dewan Komisaris / Board of Commissioners

Komisaris Utama / President Commissioner

Airlangga Mardjono

Komisaris / Commissioner

Fajar Rahwinto Soeharto

Direksi / Board of Directors

Direktur Utama / President Director

Gok Ari Joso Simamora

Direktur / Director

Eko Budiono

Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 15 November 2024 dari Arminawan, S.H., Tuan Airlangga Mardjono diberhentikan sebagai Komisaris Utama dan Tuan Fajar Rahwinto Soeharto diberhentikan sebagai Komisaris serta Tuan R. Wisnoe Prasetya Boedi diangkat sebagai Komisaris.

Based on Deed No. 05 dated November 15, 2024, issued by Arminawan, S.H., Mr. Airlangga Mardjono was dismissed as President Commissioner, and Mr. Fajar Rahwinto Soeharto was dismissed as Commissioner. Furthermore, Mr. R. Wisnoe Prasetya Boedi was appointed as Commissioner.

Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 15 November 2024 dari Arminawan, S.H., Tuan Gok Ari Joso Simamora dialihkan penugasannya yang semula sebagai Direktur Utama menjadi Direktur, Tuan Eko Budiono diberhentikan sebagai Direktur, dan Tuan Agus Sutomo diangkat sebagai Direktur Utama.

Based on Deed No. 04 dated November 15, 2024, issued by Arminawan, S.H., Mr. Gok Ari Joso Simamora was reassigned as President Director to Director, Mr. Eko Budiono was dismissed as Director, and Mr. Agus Sutomo was appointed as President Director.

Perubahan Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Changes in the Board of Commissioners and Board of Directors Composition

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-53/MBU/03/2025 Tanggal 11 Maret 2025 dan No. SK-54/MBU/03/2025 Tanggal 11 Maret 2025 terdapat pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sehingga susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-53/MBU/03/2025 Dated March 11, 2025 and No. SK-54/MBU/03/2025 Dated March 11, 2025, there was an appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company so that the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

Dewan Komisaris / Board of Commissioners	
Komisaris Utama / President Commissioner	Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetya Boedi
Komisaris / Commissioner	Wicipto Setiadi
Komisaris / Commissioner	Ulfah Mashfufah
Direksi / Board of Directors	
Direktur Utama / President Director	Letjen TNI Purn. Agus Sutomo
Direktur Operasi / Director of Operations	Ospin Sembiring
Direktur Bisnis dan Pengembangan Industri / Director of Business and Industrial Development	Edi Slamet Irianto
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko / Director of Finance and Risk Management	Mohammad Wais Fansuri
Direktur Sumber Daya dan Umum / Director of Human Resources and General Affairs	Mayjen TNI Purn. Bachtiar Utomo
Direktur Perkebunan / Director of Palm Oil Plantation	Mayjen TNI Purn. Cucu Somantri
Direktur Konsultan Konstruksi / Director of Construction Consultant	Gagah Guntur Aribowo

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-54/MBU/03/2025 Tanggal 11 Maret 2025, R. Wisnoe Prasetya Boedi diangkat sebagai Komisaris Utama, Wicipto Setiadi dan Ulfah Mashfufah diangkat sebagai Komisaris.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-54/MBU/03/2025 Dated March 11, 2025, R. Wisnoe Prasetya Boedi was appointed as President Commissioner, Wicipto Setiadi dan Ulfah Mashfufah was appointed as Commissioner.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-53/MBU/03/2025 Tanggal 11 Maret 2025, memberhentikan Gok Ari Joso Simamora sebagai Direktur Utama dan mengangkat Ospin Sembiring sebagai Direktur Operasi, Edi Slamet Irianto sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Industri, Mohammad Wais Fansuri sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Bachtiar Utomo sebagai Direktur SDM dan Umum, Cucu Somantri sebagai Direktur Perkebunan dan Gagah Guntur Aribowo sebagai Direktur Konsultan Konstruksi.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-53/MBU/03/2025 Dated March 11, 2025, Gok Ari Joso Simamora was discharged as President Director and appointed Ospin Sembiring as Director Operational, Edi Slamet Irianto as Director of Business and Industrial Development, Mohammad Wais Fansuri as Director of Finance and Risk Management, Bachtiar Utomo as Director of Human Capital and General, Cucu Somantri as Director of Palm Oil Plantation and Gagah Guntur Aribowo as Director of Construction Consultant.

Profil Dewan Komisaris

Profile of the Board of Commissioners



Airlangga Mardjono*

Komisaris Utama (Per Tahun Buku 2024)
President Commissioner (As of Financial Year 2024)

Usia Age	54 Tahun 54 Years Old
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Malang, 23 April 1970 Malang, April 23, 1970
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali *Legal Basis of First-time Appointment*

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-395/MBU/12/2021 tanggal 9 Desember 2021
Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-395/MBU/12/2021 dated December 9, 2021

Riwayat Pendidikan *Education Background*

- S2 Teknik dari Universitas Gadjah Mada (2004)
Master's Degree in Engineering from Universitas Gadjah Mada (2004)
- S1 Teknik Sipil dari Universitas Trisakti (1993)
Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Trisakti (1993)

Riwayat Jabatan *Position History*

- Direktur Bendungan dan Danau Kementerian PUPR (2020-Sekarang)
Director of Dams and Lakes, Ministry of Public Works and Housing (2020 - Present)
- Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida Kementerian PUPR (2019-2020)
Head of the Bali Penida River Area, Ministry of Public Works and Housing (2019 - 2020)
- Kepala Bidang Bendungan Wilayah Barat Kementerian PUPR (2015-2019)
Head of West Region Dams Division, Ministry of Public Works and Housing (2015-2019)

Kepemilikan Saham pada Perseroan *Ownership of the Company's Shares*

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi *Affiliation*

Tidak Ada
None

*Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024
* No longer in office since November 11, 2024



Fajar Rahwinto Soeharto*

Komisaris (Per Tahun Buku 2024)
Commissioner (As of Financial Year 2024)

Usia <i>Age</i>	61 Tahun <i>61 Years Old</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Sei Gerong, 15 November 1963 <i>Sei Gerong, November 15, 1963</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta <i>Jakarta</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali *Legal Basis of First-time Appointment*

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-143/MBU/06/2024 tanggal 19 Juni 2024
Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.No. SK-143/MBU/06/2024 dated June 19, 2024

Riwayat Pendidikan *Education Background*

- Magister Administrasi Bisnis (MBA) dari Graduate School of Business Administration, National University of San Diego, Amerika Serikat
Master of Business Administration (MBA) from Graduate School of Business Administration, National University of San Diego, USA
- Insinyur Industrial Engineering dari Fakultas Teknik, Universitas Indonesia
Industrial Engineering Engineer from the Faculty of Engineering, University of Indonesia

Riwayat Jabatan *Position History*

- Senior Executive Vice President (SEVP) di PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) (2020-2023)
Senior Executive Vice President (SEVP) at PT Perusahaan Pengelolaan Aset (Persero) (2020 - 2023)
- Direktur Keuangan dan Sumber Daya Manusia di PT Utama Karya Realtindo (2017-2018)
Director of Finance & Human Capital at PT Utama Karya Realtindo (2017- 018)
- Komisaris di PT Menara Antam Sejahtera (2017-2018)
Commissioner at PT Menara Antam Sejahtera (2017-2018)
- Direktur Keuangan, Sumber Daya Manusia, dan Pengadaan di PT Adhya Tirta Batam (2008-2017)
Director of Finance, Human Resources & Procurement at PT Adhya Tirta Batam (2008-2017)

Rangkap Jabatan *Concurrent Position*

Komisaris di PT Nindya Karya Beton (2021-Sekarang)
Commissioner at PT Nindya Karya Beton (2021-Present)

Kepemilikan Saham pada Perseroan *Ownership of the Company's Shares*

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi *Affiliation*

Tidak Ada
None

*Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024
** No longer in office since November 11, 2024*

Profil Direksi

Profile of the Board of Directors



Gok Ari Joso Simamora*

Direktur (Per Tahun Buku 2024)
Director (As of Financial Year 2024)

Usia <i>Age</i>	51 Tahun <i>51 Years Old</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Medan, 17 Juni 1973 <i>Medan, June 17, 1973</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Bekasi <i>Bekasi</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali *Legal Basis of First-time Appointment*

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-267/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024
Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. 267/MBU/11/2024 dated November 11, 2024

Riwayat Pendidikan *Education Background*

- S2 Manajemen dari STIE Widyatama (2004)
Master's Degree in Management from STIE Widyatama (2004)
- S1 Teknik Sipil dari Universitas Gadjah Mada (2000)
Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Gadjah Mada (2000)

Riwayat Jabatan *Position History*

- Direktur Operasional dan Komersial Anak Perusahaan PJT II (2018-2020)
Director of Operations and Commercial of PJT II Subsidiaries (2018-2020)
- Spesial Ekspertise Tk. I Perum Jasa Tirta II (2018)
Special Expertise Level I of Perum Jasa Tirta II (2018)
- Manajer Operasional dan Perencanaan Perum Jasa Tirta II (2016-2018)
Manager of Operational and Planning of Perum Jasa Tirta II (2016-2018)
- Manajer Pengelolaan Data Perum Jasa Tirta II (2013-2016)
Manager of Data Management of Perum Jasa Tirta II (2013-2016)
- Asisten Manajer Perencanaan Perum Jasa Tirta II (2011-2013)
Vice Manager of Planning of Perum Jasa Tirta II (2011-2013)
- Asisten Manajer Operasional Perum Jasa Tirta II (2009-2011)
Vice Manager of Operations of Perum Jasa Tirta II (2009-2011)
- Pengamat SDMA Perum Jasa Tirta II (2008-2009)
SDMA Observer Perum Jasa Tirta II (2008-2009)

Hubungan Afiliasi *Affiliation*

Tidak Ada
None

Kepemilikan Saham pada Perseroan *Ownership of the Company's Shares*

Tidak Ada
None

*Dialihkan penugasan semula Direktur Utama, menjadi Direktur sejak 11 November 2024
**Reassigned from the position of President Director to Director as of November 11, 2024*



Eko Budiono*

Direktur (Per Tahun Buku 2024)
Director (As of Financial Year 2024)

Usia <i>Age</i>	57 Tahun <i>57 Years Old</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Tegal, 19 Juli 1967 <i>Tegal, July 19, 1967</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Semarang <i>Semarang</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali *Legal Basis of First-time Appointment*

Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-199/MBU/06/2018
tanggal 28 Juni 2018

*Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-199/MBU/06/2018
dated June 28, 2018*

Dasar Hukum Pengangkatan Kembali *Legal Basis of Reappointment*

Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-240/MBU/08/2023
tanggal 21 Agustus 2023

*Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-240/MBU/08/2023
dated August 21, 2023*

Riwayat Pendidikan *Education Background*

S1 Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya (1993)

Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Brawijaya (1993)

Riwayat Jabatan *Position History*

- Staf Ahli dan Pengembangan Usaha PT Indra Karya (Persero) (2016-2018)
Expert Staff and Business Development of PT Indra Karya (Persero) (2016-2018)
- General Manager Teknik dan Sumber Daya PT Indra Karya (Persero) (2012-2016)
General Manager of Engineering and Resources of PT Indra Karya (Persero) (2012-2016)
- General Manager Wilayah II PT Indra Karya (Persero) (2009-2012)
General Manager Region II of PT Indra Karya (Persero) (2009-2012)
- Manajer Pengendalian Usaha PT Indra Karya (Persero) (2008-2009)
Manager of Business Control of PT Indra Karya (Persero) (2008-2009)

Hubungan Afiliasi *Affiliation*

Tidak Ada
None

Kepemilikan Saham pada Perseroan *Ownership of the Company's Shares*

Tidak Ada
None

*Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024
**No longer in office since November 11, 2024*

Profil Senior Manajemen

Profile of Senior Management



Okky Suryono

Vice President Corporate Secretary
Vice President Corporate Secretary

Tempat, Tanggal Lahir
Place, Date of Birth

Jakarta, 15 Oktober 1983
Jakarta, October 15, 1983

Riwayat Pendidikan Education Background

S1 Sistem Informasi Komputer dari STMIK Muhammadiyah Jakarta (2011)
Bachelor's Degree in Computer Information System from STMIK Muhammadiyah Jakarta (2011)

Riwayat Jabatan Position History

- Corporate Communications and Government Relations (Corporate Secretary Division) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2015-2018)
Corporate Communications and Government Relations (Corporate Secretary Division) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2015-2018)
- Internal Communication and Media Relations (Corporate Secretary Division), PT Sucofindo (2013-2015)
Internal Communication and Media Relations (Corporate Secretary Division) PT Sucofindo (2013-2015)
- Surveyor and Technical Operational (SBU Government), PT Sucofindo (2011-2013)
Surveyor and Technical Operational (SBU Government) PT Sucofindo (2011-2013)
- Asst. Employee Relation Manager (HRD Division), PT Media Hotel & Group Sheraton Media Hotel (2009-2011)
Asst. Employee Relation Manager (HRD Division) PT Media Hotel & Group Sheraton Media Hotel (2009-2011)
- Warehouse Administration and Merchandising, PT Perdana Makmur Agung (PMA) subsidiary of PT Toko Buku Gunung Agung (2006-2009)
Warehouse Administration and Merchandising PT Perdana Makmur Agung (PMA) subsidiary of PT Toko Buku Gunung Agung (2006-2009)
- Storekeeper, PT Chikara Adhiyasa Mid Plaza Intercontinental Hotels (2002-2005)
Storekeeper PT Chikara Adhiyasa Mid Plaza Intercontinental Hotels (2002-2005)

Keanggotaan Organisasi Shares Organization Membership

- Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) (2021-Sekarang)
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) (2021-Present)
- Pena Maritim Organization (2013-2020)
Pena Maritime Organization (2013-2020)
- Forum Humas BUMN (2016-2019)
SOEs Public Relations Forum (2016-2019)
- Ketua Organisasi Perpustakaan Rumah Buku Masyarakat (2007-2008)
Chairman of the Community Book House Library Organization (2007-2008)
- Humas Organisasi Wihdatul Ummah
Public Relations of the Wihdatul Ummah Organization
- Sekretaris Pencak Silat di STMIK Muhammadiyah
Secretary of Pencak Silat at STMIK Muhammadiyah
- Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Pendanaan FH BUMN
Head of the SOEs FH Business Development and Funding Division

Sertifikat Keahlian Skill Certificate

- Pendidikan II Profesi Sekretaris Perusahaan dari Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) (2022)
Professional Education II in Corporate Secretary from the Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) (2022)
- Certified of Public Relations (CPR) dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (2021)
Certified Public Relations (CPR) from the National Professional Certification Agency (BNSP) (2021)
- Executive Public Relations dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (2021)
Executive Public Relations from the National Professional Certification Agency (BNSP) (2021)
- Certified Performance Management Professional (CPMP) dari IEEE Institute (2021)
Certified Performance Management Professional (CPMP) from IEEE Institute (2021)
- Certified Professional Risk Management (CPRM) dari RMI (2021)
Certified Professional Risk Management (CPRM) from RMI (2021)
- Audit Internal SMAP ISO 37001:2016 dari IKRCS Academy (2020)
Audit Internal SMAP ISO 37001:2016 IKRCS Academy (2020)
- Awareness dan Standard SMAP ISO 37001 dari IKRCS Academy (2020)
Awareness and Standard SMAP ISO 37001 from IKRCS Academy (2020)
- Pengelolaan Arsip Nasional dari ANRI (2019)
National Archive Management from ANRI (2019)
- Sertifikat Kompetensi Public Relations dari Badan Nasional Sertifikat Profesi (2015)
Public Relations Competence Certificate from National Agency for Profession Certificate (2015)
- Corporate Journalism dari Markshare (2013)
Corporate Journalism from Markshare (2013)

Pelatihan Tahun 2024 Training in 2024

Seminar Environmental, Social, and Governance (ESG), PT CRMS
Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar, PT CRMS



Ferdinandus Baskoro Hari Sapto Waluyo

Head of Internal Audit
Head of Internal Audit

Tempat, Tanggal Lahir
Place, Date of Birth

Malang, 7 Januari 1978
Malang, January 7, 1978

Riwayat Pendidikan *Education Background*

- S2 Manajemen dari Universitas Stikubang (2020)
Masters in Management from Universitas Stikubang (2020)
- S2 Teknik dari Universitas Islam Sultan Agung (2019)
Masters in Engineering from Universitas Islam Sultan Agung (2019)
- S1 Profesi Insinyur dari Universitas Diponegoro (2022)
Bachelor of Professional Engineering from Universitas Diponegoro (2022)
- S1 Teknik dari Universitas Merdeka Malang (2001)
Bachelors in Engineering from Universitas Merdeka Malang (2001)

Riwayat Jabatan *Position History*

- Head of Internal Audit PT Indra Karya (Persero) (2023-saat ini)
Head of Internal Audit of PT Indra Karya (Persero) (2023–present)
- General Manager Divisi Engineering II PT Indra Karya (Persero) (2013-2023)
General Manager, Engineering Division II of PT Indra Karya (Persero) (2013–2023)
- Deputy General Manager PT Indra Karya (Persero) (2012-2013)
Deputy General Manager of PT Indra Karya (Persero) (2012–2013)
- Manajer Pengendalian PT Indra Karya (Persero) (2011-2012)
Control Manager of PT Indra Karya (Persero) (2011 - 2012)
- Manager Marketing PT Indra Karya (Persero) (2009-2011)
Manager Marketing of PT Indra Karya (Persero) (2009-2011)
- Tenaga Fungsional PT Indra Karya (Persero) (2001-2009)
Functional Personnel of PT Indra Karya (Persero) (200 -2009)

Sertifikat Keahlian *Skill Certificate*

- Sertifikat ICSA – Pendidikan Dasar II Standar Profesi Sekretaris Perusahaan (2022)
ICSA Certificate – Basic Education II Corporate Secretary Professional Standards (2022)
- Ahli Sumber Daya Air - Madya (2021-2024)
Water Resources Expert - Intermediate (2021-2024)
- Ahli Sistem Manajemen Mutu - Madya (2021-2024)
Quality Management System Expert - Intermediate (2021-2024)

Keanggotaan Organisasi *Organization Membership*

- Anggota Persatuan Insinyur Indonesia (PII) (2023-saat ini)
Member of Indonesian Engineers Association (PII) (2023-present)
- Bendahara II Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia Pusat (HATHI) (2021-saat ini)
Treasurer II of Indonesian Association of Hydraulics Engineers HQ (HATHI) (2021-present)
- Bendahara I Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia Jawa Tengah (HATHI) (2018-saat ini)
Treasurer I of Indonesian Hydraulic Engineering Experts Association Central Java Region (HATHI) (2018–present)

Pelatihan Tahun 2024 *Training in 2024*

- Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018, In House
Internal Audit ISO 19011:2018 Training, In House
- Seminar Environmental, Social, and Governance (ESG), PT CRMS
Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar, PT CRMS
- Pelatihan Navigating Uncertainty: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management, DANAREKSA
Training on Navigating Uncertainty: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management, DANAREKSA
- Workshop COSO-2013 Internal Control Framework, The Center of Internal Audit Resources - Yayasan Pendidikan Internal Audit (CIAR-YPIA)
Workshop on COSO-2013 Internal Control Framework, The Center of Internal Audit Resources - Internal Audit Education Foundation (CIAR-YPIA)
- Pelatihan Elevator Pitch, DLI
Elevator Pitch Training, DLI
- Pelatihan Sertifikasi QIA KSPI Pra Managerial, YPIA
QIA Certification Training - Pre-Managerial Level KSPI, YPIA



Gagah Guntur Wibowo*

Vice President Operation and Business Development
Vice President Operation and Business Development

Tempat, Tanggal Lahir
Place, Date of Birth

Kudus, 4 April 1977
Kudus, April 4, 1977

Riwayat Pendidikan Education Background

- S3 Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya (2023)
Doctoral Degree in Civil Engineering from Universitas Brawijaya (2023)
- S2 Teknik Sipil dari Universitas Islam Sultan Agung (2010)
Master's Degree in Civil Engineering from Universitas Islam Sultan Agung (2010)
- S1 Teknik Pengairan dari Universitas Brawijaya, Malang (1999)
Bachelor's Degree in Hydraulic Engineering from Universitas Brawijaya, Malang (1999)

Riwayat Jabatan Position History

- General Manager Divisi Engineering I PT Indra Karya (Persero)
(2016-2021)
General Manager of Engineering Division I PT Indra Karya (Persero) (2016-2021)
- Manajer Proposal dan Pemasaran Divisi Engineering I PT Indra Karya (Persero)
(2016)
Manager of Proposal and Marketing Engineering Division I of PT Indra Karya (Persero) (2016)
- Manajer Produksi dan Pemasaran Divisi Engineering I PT Indra Karya (Persero)
(2014-2016)
Manager of Production and Marketing Engineering Division I of PT Indra Karya (Persero) (2014 - 2016)
- Kepala Perwakilan NTB (2005-2014)
Head of NTB Representative (2005-2014)

Sertifikat Keahlian Skill Certificate

Ahli Madya Bendungan
Intermediate Expert of Dam

Pelatihan Tahun 2024 Training in 2024

- CRMO & Sertifikasi, RAP
CRMO & Certification, RAP
- Pelatihan Elevator Pitch, DLI
Elevator Pitch Training, DLI
- Seminar Environmental, Social, and Governance (ESG), PT CRMS
Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar, PT CRMS

Keanggotaan Organisasi Organization Membership

- Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) (2016-2022)
Indonesian Association of Hydraulics Engineers (HATHI) (2016-2022)
- Bendahara Umum Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB) (2021-Sekarang)
Treasurer of the Indonesian National Committee for Large Dams (KNIBB) (2021-Present)
- Anggota Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB) (2014-Sekarang)
Member of the Indonesian National Committee for Large Dams (KNIBB) (2014-Present)
- Koordinator Bidang Pengairan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) NTB (2006-2010)
Irrigation Coordinator of the Indonesian National Consultant Association (INKINDO) NTB (2006-2010)
- Ketua Komisi Pengembangan Organisasi dan Hubungan Antar Forum Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Cabang NTB (2016-2021)
Chairman of the Organizational Development and Inter-Forum Relations Commission of the Indonesian Hydraulic Engineering Experts Association (HATHI) NTB Branch (2016-2021)
- Ketua I Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Cabang NTB (2013-2016)
Chairman I of the Indonesian Hydraulic Engineering Experts Association (HATHI) NTB Branch (2013-2016)
- Wakil Bendahara I Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Cabang NTB (2009-2013)
Deputy Treasurer I of the Indonesian Hydraulic Engineering Experts Association (HATHI) NTB Branch (2009-2013)

*Tidak lagi menjabat sejak 11 Maret 2025
*No longer in office since March 11, 2025



Wahyu Tri Raharja*

Vice President Human Capital, General Affair, Transformation, and Management
Vice President Human Capital, General Affair, Transformation, and Management

Tempat, Tanggal Lahir
Place, Date of Birth

Klaten, 17 Mei 1974
Klaten, May 17, 1974

Riwayat Pendidikan *Education Background*

- S1 Teknik Geologi dari Universitas Pembangunan Nasional (1996)
Bachelor's Degree in Geological Engineering from Universitas Pembangunan Nasional (1996)
- S2 Teknik Geologi dari Universitas Padjadjaran (2015)
Master's Degree in Geological Engineering from Universitas Padjadjaran (2015)

Riwayat Jabatan *Position History*

- Direktur PT Arcadis Logos Indonesia (2019-2020)
Director of PT Arcadis Logos Indonesia (2019-2020)
- Direktur PT Tirta Investama (2008-2014)
Director of PT Tirta Investama (2008-2014)
- Manajer Golder Associates (2006-2008)
Manager of Golder Associates (2006-2008)
- Project Manager ERM Indonesia (2005-2006)
Project Manager of Indonesian ERM (2005-2006)
- Geotechnical Engineer PT Freeport Indonesia (2005)
Geotechnical Engineer of PT Freeport Indonesia (2005)

Sertifikat Keahlian *Skill Certificate*

- Pengembangan Human Capital dari BNSP (2021-2023)
Human Capital Development from BNSP (2021-2023)
- Perencanaan Human Capital dari BNSP (2021-2023)
Human Capital Planning from BNSP (2021-2023)
- Risk Management (ISO 31000:2018) dari Revolution Mind Indonesia (2021-2023)
Risk Management (ISO 31000:2018) from Revolution Mind Indonesia (2021-2023)
- Project Management dari Arcadis (2020-2022)
Project Management from Arcadis (2020-2022)

Keanggotaan Organisasi *Organization Membership*

Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) (2012-2013)
Association of Indonesian Soil Engineering Experts (HATTI) (2012-2013)

Keanggotaan Organisasi *Organization Membership*

Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI) (2012-2013)
Association of Indonesian Soil Engineering Experts (HATTI) (2012-2013)

Pelatihan Tahun 2024 *Training in 2024*

Pengembangan Pegawai: Model Kompetensi, Assessment dan Sistem
Pengembangan Pegawai
Employee Development: Competency Models, Assessments, and Development Systems

*Tidak lagi menjabat sejak 28 Juni 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 023/KPTS/IK/VI/2024
*No longer in office since June 28, 2024, based on the Board of Directors' Decree Letter No. 023/KPTS/IK/VI/2024



Bambang Palgunandi*

Pjs. Vice President Human Capital, General Affair, Transformation, and Management Information System
Pjs. Vice President Human Capital, General Affair, Transformation, and Management Information System

Tempat, Tanggal Lahir
Place, Date of Birth

6 Februari 1971
February 6, 1971

Riwayat Pendidikan *Education Background*

S1 Manajemen Informatika dari Universitas Gunadarma (1966)
Bachelor's Degree in Information Management from Universitas Gunadarma (1966)

Riwayat Jabatan *Position History*

- Pj. VP Human Capital, General Affair Transformation & MIS di Perusahaan (2024)
Acting Vice President of Human Capital, General Affairs Transformation & MIS at the Company (2024)
- Corporate Social & Environmental Responsibility Manager di Perusahaan (2022)
Corporate Social & Environmental Responsibility Manager at the Company (2022)
- Staf Teknik, Pemasaran & Sumber Daya (2013)
Technical, Marketing & Resource Staff (2013)
- Staf Sekretaris Perusahaan (2007 - 2019)
Corporate Secretary Staff (2007–2019)
- Tenaga Ahli IT Hardware Perusahaan (2006)
IT Hardware Specialist at the Company (2006)
- Staf Tata Usaha Perusahaan (2003)
Administrative Staff at the Company (2003)
- Staf Pengembangan Tek & PDE Perusahaan (2002)
Technology Development & EDP Staff at the Company (2002)
- Staf Pusat Sumber Daya (Perusahaan) (2001)
Resource Center Staff (Company) (2001)
- Kepala Teknisi Komputer di Dwi Mitha Komputer (1999-2001)
Head Computer Technician at Dwi Mitha Komputer (1999–2001)
- Resident Konsultan di PT Bumi Prasidi Bi-Epsi (1998-1999)
Resident Consultant at PT Bumi Prasidi Bi-Epsi (1998–1999)

Keanggotaan Organisasi *Organization Membership*

Tidak Ada
None

Pelatihan Tahun 2024 *Training in 2024*

Pelatihan DLI *Design Thinking*, DANAREKSA
DLI Design Thinking Training, DANAREKSA

Sertifikat Keahlian *Skill Certificate*

Tidak Ada
None

*Mulai menjabat sejak 27 Juni 2024 berdasarkan Surat Keputusan Direksi Nomor 021/KPTS/IK/VI/2024
*Started in office since June 27, 2024 based on the Board of Directors' Decree Letter No. 021/KPTS/IK/VI/2024



Marlena Puspitasari

Vice President Finance, Accounting & Risk Management
Vice President Finance, Accounting & Risk Manageme

Tempat, Tanggal Lahir
Place, Date of Birth

Jakarta, 3 Maret 1988
Jakarta, March 3, 1988

Riwayat Pendidikan

Education Background

S1 Administrasi Fiskal dari STIAM I Jakarta (2010)
Bachelor's Degree in Fiscal Administration from STIAM I Jakarta (2010)

Riwayat Jabatan

Position History

- Plt. General Manager Biro Keuangan dan Akuntansi PT Indra Karya (Persero) (2021)
Acting General Manager of Finance and Accounting Bureau of PT Indra Karya (Persero) (2021)
- Manajer Keuangan dan Akuntansi Divisi Engineering III PT Indra Karya (Persero) (2017-2021)
Manager of Finance and Accounting in Engineering Division III of PT Indra Karya (Persero) (2017-2021)
- Koordinasi Akuntansi dan Pajak PT Indra Karya (Persero) (2015-2016)
Accounting and Tax Coordination of PT Indra Karya (Persero) (2015-2016)
- Junior Manager Keuangan PT. Global Promedika Service (2010-2012)
Junior Finance Manager, PT. Global Promedika Service (2010-2012)

Sertifikat Keahlian

Skill Certificate

- Sertifikasi CRP Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh TAP Kapital pada Juni (2022)
Risk Management CRP Certification from TAP Kapital in June (2022)
- Sertifikasi CRP Manajemen Risiko ini diselenggarakan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi Pasar Modal (LSPPM)
This CRP Risk Management Certification is organized by the Capital Market Professional Certification Institute (LSPPM)

Keanggotaan Organisasi

Organization Membership

- Anggota Forum Pajak BUMN (2022-Sekarang)
Member of the StateOwned Enterprises Tax Forum (2022-Present)
- Ketua Srikandi PT Indra Karya (Persero) (2022-Sekarang)
Head of Srikandi of PT Indra Karya (Persero) (2022-Present)

Pelatihan Tahun 2024

Training in 2024

- Pelatihan Navigating Uncertainty: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management, DANAREKSA
Training on Navigating Uncertainty: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management, DANAREKSA
- Pelatihan Risk Modelling (Risk Conference Subklaster Konstruksi Konsultan Karya 2024), RAP
Risk Modelling Training (Risk Conference – Construction Consultant Subcluster 2024), RAP
- Pelatihan & Sertifikasi Dasar-Dasar Audit, PPAK
Basic Audit Training & Certification, PPAK
- Seminar Environmental, Social, and Governance (ESG), PT CRMS
Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar, PT CRMS



Yuli Astuti

General Manager of Engineering I Division
General Manager of Engineering I Division

Tempat, Tanggal Lahir
Place, Date of Birth

Malang, 26 Juli 1975
Malang, July 26, 1975

Riwayat Pendidikan *Education Background*

- S2 Teknik Pengairan dari Universitas Brawijaya (2012)
Master's Degree in Water Resources Engineering from Universitas Brawijaya (2012)
- S1 Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya (1998)
Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Brawijaya (1998)

Riwayat Jabatan *Position History*

- Manager Operasional - 2 (2016 - 2021)
Operations Manager - 2 (2016 - 2021)
- Team Leader FS Bendungan Air Nasal Bengkulu (2015 - 2016)
Team Leader of FS Bengkulu Nasal Water Dam (2015 - 2016)
- Team Leader Review Desain Bendungan Lesti III (2015)
Team Leader of Lesti III Dam Design Review (2015)
- Team Leader Detail Desain Bendungan Mujur (2014)
Team Leader Detail Design of Mujur Dam (2014)
- Team Leader Review Desain Bendungan Blega (2013)
Team Leader of Blega Dam Design Review (2013)

Sertifikat Keahlian *Skill Certificate*

- Insinyur Profesional Madya (IPM)
Intermediate Professional Engineer (IPM)
- ASEAN Engineer
ASEAN Engineer

Keanggotaan Organisasi *Organization Membership*

Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB)
Indonesian National Committee on Large Dams (INACOLD)

Pelatihan Tahun 2024 *Training in 2024*

Seminar *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, PT CRMS
Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar, PT CRMS



Miftahul Arifin Sri Paku Alam

General Manager of Engineering III Division
General Manager of Engineering II Division

Tempat, Tanggal Lahir
Place, Date of Birth

Bima, 12 Juni 1977
Bima, June 12, 1977

Riwayat Pendidikan Education Background

- S2 Manajemen Konstruksi dari Institut Teknologi Nasional (2014)
Master's Degree in Construction Management from Institut Teknologi Nasional (2014)
- S1 Profesi Insinyur dari Universitas Brawijaya (2021)
Bachelor of Professional Engineering from Universitas Brawijaya (2021)
- S1 Teknik Sipil dari Universitas Merdeka Malang (2000)
Bachelor of Civil Engineering from Universitas Merdeka Malang (2000)

Riwayat Jabatan Position History

- Manajer Proposal dan Pemasaran Divisi Engineering I PT Indra Karya (Persero) (2016 - 2021)
Manager of Proposal and Marketing of Engineering I Division of PT Indra Karya (Persero) (2016 - 2021)
- Plt. General Manager Divisi Engineering I PT Indra Karya (Persero) (2017)
Acting General Manager of Engineering I Division of PT Indra Karya (Persero) (2017)
- Manajer Operasi dan Pengendalian Divisi Engineering I PT Indra Karya (Persero) (2015 - 2016)
Manager of Operations and Control of Engineering Division I of PT Indra Karya (Persero) (2015 - 2016)

Sertifikat Keahlian Skill Certificate

- Sertifikasi CRP Manajemen Risiko yang diselenggarakan oleh TAP Kapital pada Juni (2022)
Risk Management CRP Certification from TAP Kapital in June (2022)
- Ahli Teknik Bendungan Besar - Madya (2021 - 2024)
Large Dam Engineering Expert - Intermediate (2021 - 2024)
- Ahli Sumber Daya Air - Utama (2020 - 2023)
Water Resources Expert - Main (2020 - 2023)
- Ahli Manajemen Konstruksi - Madya (2020 - 2023)
Construction Management Expert - Intermediate (2020 - 2023)

Keanggotaan Organisasi Organization Membership

- Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB) (2012 - Sekarang)
Indonesian National Committee on Large Dams (INACOLD) (2012 - Present)
- Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) (2015 - Sekarang)
Indonesian Association of Hydraulics Engineers (HATHI) (2015 - Present)

Pelatihan Tahun 2024 Training in 2024

- Pelatihan *Financial Modelling*, DANAREKSA
Financial Modelling Training, DANAREKSA
- CRMO & Sertifikasi, RAP
CRMO & Certification, RAP



Adrian Yulianto

General Manager of Survey and Investigation Division
General Manager of Survey and Investigation Division

Tempat, Tanggal Lahir
Place, Date of Birth

Klaten, 5 Juli 1979
Klaten, July 5, 1979

Riwayat Pendidikan *Education Background*

- S1 Teknik Geologi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran (2003)
Bachelor's Degree in Geological Engineering from Universitas Pembangunan Nasional Veteran (2003)
- Program Profesi Insinyur, Gelar Ir., Universitas Brawijaya (2021)
Professional Engineer Program, Ir. Degree, Universitas Brawijaya (2021)

Riwayat Jabatan *Position History*

Manajer Administrasi dan Pengembangan PT Indra Karya (Persero) (2012)
Manager of Administration and Development of PT Indra Karya (Persero) (2012)

Sertifikat Keahlian *Skill Certificate*

- Ahli Geoteknik Utama (Level 9)
Master Geotechnical Expert (Level 9)
- Ahli K3 Konstruksi Madya A2K4 - 1
Intermediate Construction K3 Expert A2K4 - 1

Keanggotaan Organisasi *Organization Membership*

- Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI)
Indonesian Association of Geologists (IAGI)
- Himpunan Ahli Teknik Tanah Indonesia (HATTI)
Indonesian Society for Geotechnical Engineering (ISGE)
- Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB)
Indonesian National Committee on Large Dams (INACOLD)

Pelatihan Tahun 2024 *Training in 2024*

Seminar *Environmental, Social, and Governance (ESG)*, PT CRMS
Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar, PT CRMS



Transformasi dan Konversi Perusahaan

Company Transformation and Restructuring

Pondasi Baru Menuju PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)

Building a New Foundation Toward Agrinas Palma Nusantara

Pada tanggal 11 November 2024, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Republik Indonesia menerbitkan Surat Nomor: S-579/MBU/11/2024 yang memuat rencana transformasi bisnis bagi PT Indra Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), dan PT Virama Karya (Persero). Inisiatif ini bertujuan untuk mengoptimalkan peran masing-masing perusahaan dalam rangka mempercepat dan menunjang pelaksanaan program prioritas pemerintah di bidang swasembada pangan nasional.

Langkah transformasi tersebut diperkuat melalui diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025, tertanggal 16 Januari 2025, yang merupakan perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang pengalihan bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero). Regulasi ini menjadi landasan hukum yang sah atas perubahan status badan hukum serta perluasan ruang lingkup usaha PT Indra Karya (Persero) dalam mendukung agenda transformasi bisnis.

Sebagai bagian dari proses transformasi berkelanjutan tersebut, pada tanggal 20 Februari 2025, perusahaan melakukan perubahan Anggaran Dasar sekaligus perubahan nama perusahaan dari PT Indra Karya (Persero) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara, sebagaimana dituangkan dalam Akta Notaris Arminawan, SH Nomor 09. Perubahan ini merupakan wujud penyesuaian strategi dan arah bisnis perusahaan, yang kini difokuskan pada pengembangan ekosistem komoditas perkebunan nasional, khususnya di sektor kelapa sawit.

Perubahan-perubahan tersebut tidak hanya mencerminkan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga merupakan tonggak penting dalam perjalanan transformasi perusahaan menuju entitas yang lebih relevan, adaptif, dan berdaya saing tinggi dalam mendukung ketahanan pangan dan energi nasional.

On November 11, 2024, the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs) of the Republic of Indonesia issued Letter No. S-579/MBU/11/2024, outlining a comprehensive business transformation plan for PT Indra Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), and PT Virama Karya (Persero). This strategic initiative was designed to optimize the roles of each company in accelerating and supporting national food self-sufficiency programs, one of the Government's key priorities.

The transformation was further formalized through the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 3 of 2025, dated January 16, 2025, which amended Government Regulation No. 42 of 1970 concerning the conversion of the State Enterprise (Perusahaan Negara) Indra Karya into a Limited Liability Company (Persero). This new regulation provided a legal foundation for the change in legal status and business scope of PT Indra Karya (Persero), reaffirming its strategic mandate within the broader transformation agenda.

As part of this continuing transformation, on February 20, 2025, the company executed an amendment to its Articles of Association and officially changed its name from PT Indra Karya (Persero) to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara, as documented in Notarial Deed No. 09 by Notary Arminawan, SH. This name change and amendment reflect a strategic realignment of the company's business direction, emphasizing its new role in developing and strengthening the national plantation commodity ecosystem, particularly in the palm oil sector.

These regulatory changes mark a significant milestone in the company's transformation journey, ensuring full legal compliance while aligning organizational identity with national development priorities in agriculture, energy, and sustainability.



Transformasi Strategis PT Indra Karya (Persero) dalam Mendukung Asta Cita Pemerintah

Strategic Transformation of PT Indra Karya (Persero) in Support of the Government's Asta Cita Vision

Dalam rangka mewujudkan visi besar Asta Cita Pemerintah yang telah dicanangkan oleh Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto, PT Indra Karya (Persero) dirancang untuk melakukan transformasi strategis guna memperkuat kontribusinya terhadap ketahanan pangan, energi, dan air nasional.

Sebagai bagian dari transformasi tersebut, PT Indra Karya (Persero) akan mengembangkan bisnis utamanya ke sektor pengelolaan dan pengolahan kelapa sawit, yang mencakup rantai nilai secara menyeluruh, mulai dari hulu hingga hilir. Hal ini mencakup produksi bahan mentah hingga pengembangan produk turunan strategis seperti minyak goreng, serta inovasi dalam produk-produk berbasis energi terbarukan, terutama biofuel, yang dipandang sebagai elemen krusial dalam mewujudkan ketahanan energi nasional.

Transformasi ini dilaksanakan tanpa menghilangkan identitas dan kapabilitas organisasi yang telah terbentuk. PT Indra Karya (Persero) tetap mempertahankan struktur organisasi yang telah ada, namun dilengkapi dengan penguatan kelembagaan dan penyesuaian struktur untuk menjawab tantangan dan peluang dalam model bisnis baru. Selain itu, perusahaan juga menggandeng layanan jasa konsultan profesional guna memastikan proses transformasi berjalan dengan terarah, terukur, dan sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik (GCG).

Langkah-langkah ini diharapkan mampu menjadikan PT Indra Karya (Persero) sebagai motor penggerak dalam mendukung kedaulatan energi nasional, serta berkontribusi aktif terhadap pencapaian tujuan pembangunan nasional sebagaimana tercantum dalam Asta Cita.

In alignment with the Asta Cita vision initiated by the President of the Republic of Indonesia, Mr. Prabowo Subianto, PT Indra Karya (Persero) is undertaking a strategic transformation to enhance its role in supporting national resilience in food, energy, and water security.

As part of this transformation, PT Indra Karya (Persero) is designated to develop a core business focused on the management and processing of palm oil, encompassing the entire value chain from upstream to downstream. This includes not only the production of essential consumer goods such as cooking oil, but also the development of palm oil-based derivative products aimed at supporting national energy security—particularly biofuels and other renewable energy sources.

This transformation will be implemented while maintaining the company's existing organizational structure, accompanied by institutional strengthening and organizational refinement to support the new business direction. The company is also supported by the involvement of professional consulting services to ensure the transformation process is well-planned, effectively executed, and aligned with the principles of Good Corporate Governance (GCG).

Through these strategic initiatives, PT Indra Karya (Persero) aims to become a key driver in strengthening Indonesia's energy independence, while actively contributing to the realization of the national development goals embedded in the Asta Cita framework.



Profil Dewan Komisaris

Profil of the Board of Commissioners



Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetija Boedi

Komisaris Utama (Per tanggal Pelaporan Laporan Tahunan)
President Commissioner (As of reporting date of the Annual Report)

Usia Age	60 Tahun 60 Years Old
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Surabaya, 20 April 1964 Surabaya, April 20, 1964
Domisili Domicile	Surakarta Surakarta
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali Legal Basis of First-time Appointment

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-268/MBU/11/2024
tanggal 11 November 2024
Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. No. SK-268/MBU/11/2024
dated November 11, 2024

Riwayat Pendidikan Education Background

- Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (Sesko TNI) (2010)
Indonesian National Armed Forces Command and Staff College (Sesko TNI) (2010)
- Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (Seskoad) (2000)
Army Command and Staff College (Seskoad) (2000)
- Pendidikan Lanjutan Perwira II Kecabangan Infantri (Diklapa-II/INF) (1996)
Advanced Officer Education II, Infantry Branch (Diklapa-II/INF) (1996)
- Susunan Latihan Perwira Tingkat I/Infanteri (Suslapa-I/INF) (1991)
Level I Officer Training/Infantry (Suslapa-I/INF) (1991)
- Suso Rangkaian Cabang Infantri (Sussarcab Infantri) (1986)
Infantry Branch Qualification Course (Sussarcab Infantri) (1986)
- Akademi Militer (Akmil) (1986)
Military Academy (Akmil) (1986)

Riwayat Jabatan Position History

- Komisaris PT Indra Karya (Persero) (2024)
Commissioner of PT Indra Karya (Persero) (2024)
- IRJENAD (2021)
Inspector General Of The Army (2021)
- KOORSAHLI KASAD (2021)
Chief Expert Staff, Army Headquarters (2021)
- DANPUSTERAD (2020)
Commander Of Army Territorial Training Command (2020)
- PANGDAM V/BRW (2019)
Commander Of KODAM V/BRW (2019)
- WAKIL GUBERNUR AKMIL (2016)
Deputy Governor, Military Academy (2016)
- KAPOK SAHLI BID JEMEN SISHANNAG (2016)
Expert Staff Coordinator For Management, Defense Strategy (2016)
- DIRBINLEM AKMIL (2014)
Director Of Training And Education, Military Academy (2014)
- IRDAM IM 9 (2013)
Military Inspector, IRDAM IM (2013)
- DANREM 084/BJ KODAM V/BRW (2012)
Commander Of KODAM V/BRW'S 084/BJ Military Resort Command (2012)
- DANRINDAM V/BRW (2011)
Commander Of RINDAM V/BRW (2011)
- PAMEN AHLI GOL IV SESKOAD TAKTIK DAN STRATEGI (2010)
Senior Expert Officer Group Iv, SESKOAD Tactics And Strategy (2010)
- ASRENDAM XVII/CEND (2009)
Assistant To The Territorial Commander XVII/CEND (2009)
- WAASRENDAM XVII/CEND (2008)
Deputy Assistant To The Territorial Commander XVII/CEND (2008)

- KASREM 074/WRT DAM IV/DIP (2006)
Chief Of Staff, 074/WRT Command, KODAM IV/DIP (2006)
- DANDIM 0735/SKA REM 074/WRT KODAM IV/DIP (2005)
Military District Commander 0735/SKA, 074/WRT Command, KODAM IV/DIP (2005)
- DANDIM 0726/SKH REM 074/WRT KODAM IV/DIP (2003)
Military District Commander 0726/SKH, 074/WRT Command, KODAM IV/DIP (2003)
- PABANDYA OPS SOPS KOSTRAD (2002)
Operations Staff Officer, KOSTRAD Headquarters (2002)
- KOORSAHLI KASAD (2020)
Chief Expert Staff, Army Headquarters (2020)
- DANYONIF 413/6/2 KOSTRAD (2000)
Battalion Commander, Infantry Battalion 413/6/2 KOSTRAD (2000)
- KASI BINSAT SDIRBINLEM AKMIL (1999)
Head Of Physical Training Division, Military Academy (1999)
- DANKOTAMA C YONTAR MADYA MENTAR AKMIL (1977)
Battalion Commander C, Intermediate Cadet Battalion, Military Academy (1977)
- PS DANKOTAMA C YONTAR MADYA MENTAR AKMIL (1966)
Acting Battalion Commander C, Intermediate Cadet Battalion, Military Academy (1966)
- KAUR OPSJAR/GUMIL TIKNIK SECABA RINDAM IX/UDY (1944)
Head Of Training Ops/Doc, SECABA Training Center KODAM IX/UDY (1944)
- KASI OPS YONIFTER 743 DAM IX/UDY (1992)
Operations Section Head, Infantry Battalion 743, KODAM IX/UDY (1992)
- DANKIPAN A YONIFTER 743 DAM IX/UDY (1989)
Company Commander A, Infantry Battalion 743, KODAM IX/UDY (1989)
- DANTON II KIPAN B YONIFTER 743 DAM IX/UDY (1988)
Platoon Commander II, B Company, Infantry Battalion 743, KODAM IX/UDY (1988)
- PAMA KODAM IX/UDY (1988)
Junior Officer, KODAM IX/UDY (1988)
- DAN UNIT 1 TEAM 1 DEN 86 KOPASSUS (1987)
Unit Commander 1, Team 1, Company 86 KOPASSUS (1987)
- DAN UNIT 1 TEAM 2 DEN 1 YON 2 GRUP-2 KOPASSUS (1986)
Unit Commander 1, Team 2, Company 1, Battalion 2, Group 2 KOPASSUS (1986)
- DANTON KOPASSUS (1986)
Platoon Commander, KOPASSUS (1986)

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak Ada
None

Kepemilikan Saham pada Perseroan Ownership of the Company's Shares

Tidak Ada
None



Wicipto Setiadi

Komisaris (Per tanggal Pelaporan Laporan Tahunan)
Commissioner (As of reporting date of the Annual Report)

Usia <i>Age</i>	64 Tahun <i>64 Years Old</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Purbalingga, 11 September 1957 <i>Purbalingga, September 11, 1957</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta <i>Jakarta</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali *Legal Basis of First-time Appointment*

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-54/MBU/03/2025 tanggal 11 Maret 2025

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. No. SSK-54/MBU/03/2025 dated March 11, 2025

Riwayat Pendidikan *Education Background*

- S3 Hukum dari Universitas Indonesia (2003)
Ph.D. in Law from University of Indonesia (2003)
- S2 Hukum dari Universitas Padjadjaran (1991)
Master of Law from Padjadjaran University (1991)
- S1 Hukum dari Universitas Gadjah Mada (1982)
Bachelor of Law from Gadjah Mada University (1982)

Riwayat Jabatan *Position History*

- Pengawas Perum Bulog Tahun (2024)
Supervisor of Perum Bulog (2024)
- Tenaga Ahli pada Kementerian PPN/Bappenas Tahun (2024)
Expert Staff, Ministry of National Development Planning / Bappenas (2024)
- Sekretaris Senat di UPN Veteran Jakarta (2022)
Senate Secretary at UPN Veteran Jakarta (2022)
- Tenaga Ahli di Kementerian ATR/BPN (2021)
Expert Staff at the Ministry of Agrarian Affairs and Spatial Planning/National Land Agency (ATR/BPN) (2021)
- Komisaris di PT Adhi Karya (Persero) (2020)
Commissioner at PT Adhi Karya (Persero) Tbk (2020)
- Senior Partners di GWS Tobing&Partner
Senior Partner at GWS Tobing & Partners
- Ketua/anggota di berbagai Tim Penyusunan/Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM dan Kementerian lain
Chair/Member of various Drafting Teams for Legislation at the Ministry of Law and Human Rights and other ministries
- Pengajar di Diklat Perancang Peraturan Perundang-undangan, Badan Pengembangan SDM, Kementerian Hukum dan HAM
Lecturer in Legislative Drafting Training Programs at the Human Resource Development Agency, Ministry of Law and Human Rights
- Penguji Eksternal Disertasi Program Doktor (S3) di Fakultas Hukum UNAIR, UI, UGM, UNDIP, UNPAD, UNSOED
External Dissertation Examiner for Doctoral Programs (Ph.D.) at the Faculties of Law of UNAIR, UI, UGM, UNDIP, UNPAD, and UNSOED
- Pengajar Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) di Fakultas Hukum UNDIP
Lecturer for the Doctoral Program in Law (PDIH) at the Faculty of Law, Diponegoro University (UNDIP)
- Pengajar Program Magister Hukum di Fakultas Hukum UPN "Veteran" Jakarta, Fakultas Hukum UGM, Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman Purwokerto
Lecturer for Master's Programs in Law at the Faculties of Law of UPN "Veteran" Jakarta, UGM, and Jenderal Soedirman University (UNSOED) Purwokerto (year)
- Pengajar Program S1 Fakultas Hukum di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta
Lecturer for Undergraduate Law Program at the Faculty of Law, UPN Veteran Jakarta

- Staf Ahli Menteri Hukum dan HAM Bidang Sosial di Kementerian Hukum dan HAM (2017)
Expert Staff to the Minister of Law and Human Rights for Social Affairs (2017)
- Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan di Kementerian Hukum dan HAM (2014)
Director General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights (2014)
- Komisaris di PT Nindya Karya (Persero), tahun (2014)
Commissioner at PT Nindya Karya (Persero) (2014)
- PLT Inspektur Jenderal di Kementerian Hukum dan HAM (2013)
Acting Inspector General at the Ministry of Law and Human Rights (2013)
- Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional di Kementerian Hukum dan HAM (2010)
Head of the National Law Development Agency, Ministry of Law and Human Rights (2010)
- Direktur Perancangan Peraturan Perundang-undangan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM (2010)
Director of Legislative Drafting at the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights (2010)
- Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-undangan di Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan HAM (2004)
Director of Legislative Harmonization at the Directorate General of Legislation, Ministry of Law and Human Rights (2004)
- Kasubdit Hukum Tata Negara di Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, Kementerian Hukum dan HAM (2000)
Head of the Constitutional Law Sub-Directorate at the Directorate General of General Legal Administration, Ministry of Law and Human Rights (2000)
- Kasubdit Hukum Internasional di Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman (1998)
Head of the International Law Sub-Directorate at the Directorate General of Law and Legislation, Ministry of Justice (1998)
- Kasubdit Hukum Tata Negara di Direktorat Jenderal Hukum dan Perundang-undangan, Departemen Kehakiman (1995)
Head of the Constitutional Law Sub-Directorate at the Directorate General of Law and Legislation, Ministry of Justice (1995)

Kepemilikan Saham pada Perseroan *Ownership of the Company's Shares*

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi *Affiliation*

Tidak Ada
None



Ulfah Masfufah

Komisaris Independen (Per tanggal Pelaporan Laporan Tahunan)
Independent Commissioner (As of reporting date of the Annual Report)

Usia <i>Age</i>	60 Tahun <i>60 Years Old</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Jakarta, 16 Oktober 1964 <i>Jakarta, October 16, 1964</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta <i>Jakarta</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali *Legal Basis of First-time Appointment*

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-54/MBU/03/2025 tanggal 11 Maret 2025

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. No. SSK-54/MBU/03/2025 dated March 11, 2025

Riwayat Pendidikan *Education Background*

- S2 Kesehatan Masyarakat di Universitas Indonesia (2006)
Master of Public Health from University of Indonesia (2006)
- S1 Kedokteran Gigi di Universitas Indonesia (1992)
Bachelor of Dental Surgery from University of Indonesia (1992)

Riwayat Jabatan *Position History*

- Pengawas Perum Bulog Tahun (2024)
Supervisor of Perum Bulog (2024)
- Wakil Ketua BNSP (2023-saat ini)
Vice Chairman at National Professional Certification Agency (BNSP) (2023–present)
- Tim Ahli Kebijakan Strategi Kementerian Ketenagakerjaan RI, 2022 – sampai sekarang
Expert Team for Strategic Policy at Ministry of Manpower of the Republic of Indonesia (2022–present)
- Dewan Pembina Yayasan Univ. Wahab Chasbullah Jombang (2018-saat ini)
Advisory Board Member at Wahab Chasbullah University Foundation, Jombang (2018–present)
- Direktur Klinik Ar-Rahmah (2018-saat ini)
Director at Ar-Rahmah Clinic (2018-present)
- Komisaris di Rumah Sakit Pertamedika IHC (2020)
Commissioner at Pertamedika IHC Hospital (2020)
- Direktur Utama di PT Hijaz Tour & Travel (2020)
President Director at PT Hijaz Tour & Travel (2020)
- Staf Ahli Anggota di Dewan Perwakilan Rakyat RI (2009)
Expert Staff to a Member of the House of Representatives of the Republic of Indonesia (DPR RI) (2009)

Kepemilikan Saham pada Perseroan *Ownership of the Company's Shares*

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi *Affiliation*

Tidak Ada
None

Profil Direksi

Profil of the Board of Directors



Letjen TNI Purn. Agus Sutomo

Direktur Utama (Per tanggal Pelaporan Laporan Tahunan)
President Director (As of reporting date of the Annual Report)

Usia Age	65 Tahun 65 Years Old
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Klaten, 14 April 1960 Klaten, April 14, 1960
Domisili Domicile	Bekasi Bekasi
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali Legal Basis of First-time Appointment

Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-267/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024
Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. 267/MBU/11/2024 dated November 11, 2024

Riwayat Pendidikan Education Background

- Lembaga Ketahanan Nasional (LEMHANNAS) (2009)
National Resilience Institute of the Republic of Indonesia (2009)
- Kursus Calon Komandan Korem (SUSDANREM) (2008)
Military Resort Commander Preparation Course (SUSDANREM) (2008)
- Sekolah Staf dan Komando Tentara Nasional Indonesia (SESKO TNI) (2004)
Indonesian National Armed Forces Command and Staff College (2004)
- Sekolah Staf dan Komando Angkatan Darat (SESKOAD) (1998)
Army Command and Staff College (1998)
- Kursus Calon Komandan Batalyon Infanteri (SUSDANYONIF) (1996)
Infantry Battalion Commander Preparation Course (SUSDANYONIF) (1996)
- Kursus Khusus Search and Rescue Para (Lintas Udara) (SUS SAR PARA) (1993)
Special Course on Airborne Search and Rescue (1993)
- Kursus Khusus Intelijen Satuan Para (SUSSARPA INTEL) (1993)
Special Intelligence Course for Airborne Units (1993)
- Pendidikan Terjun Bebas (FREE FALL) (1991)
Free Fall Education (1991)
- Kursus Lanjutan Perwira Tingkat I (SUSLAPA I) (1991)
Advanced Officer Course Level I (1991)
- Pendidikan Komando (DIK KOMANDO) (1984)
Commando Training (1984)
- Suso Rangkaian Cabang Infantri (Sussarcab Infantri) (1984)
Infantry Branch Qualification Course (Sussarcab Infantri) (1984)
- Kursus Lanjutan Perwira Tingkat II (SUSLAPA II) (1984)
Advanced Officer Course Level II (1984)
- Akademi Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (AKABRI) (1984)
Indonesian Armed Forces Academy (1984)

Riwayat Jabatan Position History

- Direktur Utama PT Indra Karya (Persero) (2024)
President Director of PT Indra Karya (Persero) (2024)
- Komisaris PT. KE (2020)
Commissioner of PT. KE (2020)
- Komisaris PT. KIEC (2019)
Commissioner of PT. KIEC (2019)
- Komisaris Utama PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) (2017)
President Commissioner of PT Asuransi Sosial Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ASABRI) (2017)
- IRJEN KEMHAN (2017)
Inspector General, Ministry of Defense (2017)
- DANSESKO TNI (2016)
Commander, SESKO TNI (2016)
- DANKODIKLAT TNI AD (2015)
Commander of Training and Education Doctrine Command, Indonesian Army (Dankodiklat TNI AD) (2015)
- PANGDAM JAYA (2014)
PANGDAM JAYA (2014) mander, Kodam Jaya (2014)
- DANJEN KOPASSUS (2012)
Commander, Kopassus (2012)
- DANPASPAMPRES (2011)
Commander, Presidential Security Forces (Paspampres) (2011)
- WADANJEN KOPASSUS (2012)
Deputy Commander, Kopassus (2012)
- KASDIVIF 1 KOSTRAD (2010)
Chief of Staff, Division 1 Kostrad (2010)

- DANREM 061/SK KODAM III/SLW (2008)
Military Resort Commander 061/SK, Kodam III/SLW (2008)
- DANGRUP A PASPAMPRES (2004)
Group A Commander, Paspampres (2004)
- WAASOPS PASPAMPRES (2002)
Assistant for Operations, Paspampres (2002)
- WADAN GRUP A PASPAMPRES (2001)
Deputy Commander, Group A, Presidential Security Forces (Paspampres) (2001)
- PAMEN MABES TNI (2001)
Officer, TNI Headquarters (2001)
- DANDIM 0507/BKS REM 051/WKT DAM JAYA (2000)
Command 051/WKT, Kodam Jaya (2000)
- KASI OPS REM 051/WKT KODAM JAYA (1999)
Commander of District Military Command 0507/BKS, Military Resort (1999)
- DANYONIF 202/TM KODAM JAYA (1998)
Chief of Operations, Military Resort Command 051/WKT, Kodam Jaya (1998)
- PAMEN KOPASSUS (SESKOAD) (1997)
Battalion Commander, Infantry 202/TM, Kodam Jaya (1997)
- WADANYON 21 GRUP 2 KOPASSUS (1996)
WADANYON 21 GRUP 2 KOPASSUS (1996)
- Staff, Kopassus (SESKOAD) (1997)
Staff, Kopassus (SESKOAD) (1997)
- KASI PAM GRUP 3 PUSDIKPASSUS KOPASSUS (1995)
Deputy Battalion Commander 21, Group 2 Kopassus (1996)
- DANSATDIKSANDHA SUSSANDHA KOPASSUS (1995)
Chief of Security, Group 3, Pusdikpassus Kopassus (1995)
- PAMEN WASLAT PUSLATPUS GRUP 3 KOPASSUS (1994)
Acting Officer, Supervision and Control, Puslatpur Group 3 Kopassus (1992)
- PGS. PAMEN WASLAT PUSLATPUR GRUP 3 KOPASSUS (1992)
Officer, Supervision and Control, Puslatpur Group 3 Kopassus (1992)
- DAN UNIT 1/2 GRUP 1 KOPASSUS (1986)
DAN UNIT 1/2 GRUP 1 KOPASSUS (1986)
- Dansatdik P.U. Suspara Kopassus (1990)
Commander of the Education Section, P.U. SUSPARA Kopassus (1990)
- Dan Unit 1/2 Grup 1 Kopassus (1986)
Commander of Unit 1/2, Group 1 Kopassus (1986)
- DANTON 2/122 GRUP 1 KOPASSUS (1986)
Platoon Commander 2/122, Group 1 Kopassus
- DANTON KOPASSANDHA KOPASSUS - (1984)
Platoon Commander, Kopassandha Kopassus (1984)

Kepemilikan Saham pada Perseroan Ownership of the Company's Shares

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak Ada
None



Ospin Sembiring

Direktur Operasi (Per tanggal Pelaporan Laporan Tahunan)
Director of Operations (As of reporting date of the Annual Report)

Usia <i>Age</i>	58 Tahun <i>58 Years Old</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Tebing Tinggi, 30 Oktober 1966 <i>Tebing Tinggi, October 30, 1966</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Medan <i>Medan</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali *Legal Basis of First-time Appointment*

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-54/MBU/03/2025
tanggal 11 Maret 2025
*Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. No. SSK-54/MBU/03/2025
dated March 11, 2025*

Riwayat Pendidikan *Education Background*

S1 Pertanian dari Universitas Jambi (1991)
Bachelor of Agriculture from Jambi University (1991)

Hubungan Afiliasi *Affiliation*

Tidak Ada
None

Kepemilikan Saham pada Perseroan *Ownership of the Company's Shares*

Tidak Ada
None

Riwayat Jabatan *Position History*

- Regional Head di PT Perkebunan Nusantara IV Regional IV (2025-saat ini)
Regional Head at PT Perkebunan Nusantara IV, Regional IV (2025–present)
- Regional Head di PT Perkebunan Nusantara IV Regional IV (2023-2024)
Regional Head at PT Perkebunan Nusantara IV, Regional IV (2023–2024)
- SEVP Operation di PT Perkebunan Nusantara V (2020-2023)
SEVP of Operations at PT Perkebunan Nusantara V (2020–2023)
- Direktur Operasional di PT Perkebunan Nusantara V (2019-2020)
Director of Operations at PT Perkebunan Nusantara V (2019–2020)
- Direktur Operasional di PT Perkebunan Nusantara XIII (2017-2019)
Director of Operations at PT Perkebunan Nusantara XIII (2017–2019)
- Kepala Bagian Tanaman di PT Perkebunan Nusantara III (2016-2017)
Head of Plantation Division at PT Perkebunan Nusantara III (2016–2017)
- Distrik Manajer Asahan di PT Perkebunan Nusantara III (2016)
Asahan District Manager at PT Perkebunan Nusantara III (2016)
- Distrik Manajer Simalungun di PT Perkebunan Nusantara III (2016)
Simalungun District Manager at PT Perkebunan Nusantara III (2016)
- Manajer Kebun Rambutan di PT Perkebunan Nusantara III (2014-2015)
Rambutan Estate Manager at PT Perkebunan Nusantara III (2014–2015)
- Manajer Kebun Gunung Para di PT Perkebunan Nusantara III (2014)
Gunung Para Estate Manager at PT Perkebunan Nusantara III (2014)
- Pj. Distrik Manajer Simalungun di PT Perkebunan Nusantara III (2012-2014)
Acting Simalungun District Manager at PT Perkebunan Nusantara III (2012–2014)
- Pj. Manajer Kebun Huta Padang di PT Perkebunan Nusantara III (2012-2014)
Acting Huta Padang Estate Manager at PT Perkebunan Nusantara III (2012–2014)
- Kepala Urusan Budidaya Kelapa Sawit Bagian Tanaman di PT Perkebunan Nusantara III (2012)
Head of Oil Palm Cultivation Affairs, Plantation Division at PT Perkebunan Nusantara III (2012)
- Kepala Urusan Budidaya Karet Bagian Tanaman di PT Perkebunan Nusantara III (2011-2012)
Head of Rubber Cultivation Affairs, Plantation Division at PT Perkebunan Nusantara III (2011–2012)



Edi Slamet Irianto

Direktur Bisnis dan Pengembangan Industri (Per tanggal Pelaporan Laporan Tahunan)
Director of Business and Industrial Development (As of reporting date of the Annual Report)

Usia Age	62 Tahun 62 Years Old
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Kuningan, 03 Mei 1963 Kuningan, May 03, 1963
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali

Legal Basis of First-time Appointment

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-54/MBU/03/2025 tanggal 11 Maret 2025

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. No. SSK-54/MBU/03/2025 dated March 11, 2025

Riwayat Pendidikan

Education Background

- S2 Ilmu Hukum dari STIH IBLAM (2023)
Master of Law from STIH IBLAM (2023)
- S3 Politik Perpajakan dari Universitas Gadjah Mada (2008)
Doctorate of Taxation Politics from Gadjah Mada University (2008)
- S1 Ilmu Hukum dari Universitas Wiraswasta Indonesia (2020)
Bachelor of Law from Wiraswasta Indonesia University (2020)
- S2 Sains dari Universitas Indonesia (1999)
Master of Science from the University of Indonesia (1999)
- S1 Ilmu Ekonomi dari STIE Tridharma Bandung (1992)
Bachelor of Economics from STIE Tridharma Bandung (1992)
- D3 Ilmu Ekonomi-Akuntansi dari Universitas Padjajaran (1986)
Associate of Economics - Accounting from Padjadjaran University (1986)

Riwayat Jabatan

Position History

- Kepala Kanwil Bidang Keuangan di DJP Jakarta Utara (2021)
Head of Regional Office for Finance at the Directorate General of Taxes (DGT) North Jakarta (2021)
- Kepala Kanwil Bidang Keuangan di DJP Jakarta Selatan II (2016)
Head of Regional Office for Finance at DGT South Jakarta II (2016)
- Direktur Pemeriksaan dan Penagihan Bidang Keuangan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2015)
Director of Audit and Collection in the Finance Sector at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2015)
- Kepala Kanwil Bidang Keuangan di DPJ Jawa Tengah I (2013)
Head of Regional Office for Finance at DGT Central Java I (2013)
- Pjb. Kepala Kanwil Bidang Keuangan di DJP Riau-Kepri (2012)
Acting Head of Regional Office for Finance at DGT Riau-Riau Islands (2012)
- Tenaga Pengkaji Penegakan Hukum Perpajakan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012)
Policy Analyst for Tax Law Enforcement at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2012)
- Kepala Subdit Potensi Perpajakan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2012)
Head of the Tax Potential Sub-Directorate at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2012)

- Kepala KPP Penanaman Modal Asing Empat di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2008)
Head of Audit Planning Sub-Directorate at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2007)
- Kepala Subdit Perencanaan Pemeriksaan di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2007)
Head of Audit Planning Sub-Directorate at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2007)
- Kepala Submit Pemeriksaan Wajib Pajak OP di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2006)
Head of Individual Taxpayer Audit Subsection at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2006)
- Pejabat Fungsional Pemeriksa/Penyidik Pajak di Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2006)
Functional Officer – Tax Auditor/Investigator at the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia (2006)
- Pelaksana Pada Kanwil VII DJP Jawa Barat (1989)
Staff Member at Regional Office VII DGT West Java (1989)

Hubungan Afiliasi

Affiliation

Tidak Ada
None

Kepemilikan Saham pada Perseroan

Ownership of the Company's Shares

Tidak Ada
None



Mohammad Wais Fansuri

Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko (Per tanggal Pelaporan Laporan Tahunan)
Director of Finance and Risk Management (As of reporting date of the Annual Report)

Usia <i>Age</i>	55 Tahun <i>55 Years Old</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Medan, 19 Februari 1970 <i>Medan, February 19, 1970</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta Selatan <i>South Jakarta</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali *Legal Basis of First-time Appointment*

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-54/MBU/03/2025
tanggal 11 Maret 2025
*Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. No. SSK-54/MBU/03/2025 dated
March 11, 2025*

Riwayat Pendidikan *Education Background*

S1 Manajemen dari Universitas Islam Sumatera Utara (1993)
Bachelor of Management from Islamic University of North Sumatra (1993)

Riwayat Jabatan *Position History*

- **Direktur Keuangan di PT Jasa Sarana (BUMD) (2019-saat ini)**
*Finance Director at PT Jasa Sarana (Regional-Owned Enterprise / BUMD)
(2019–present)*
- **Direktur Utama di PT Jaya Agro Mandiri (2017-2019)**
President Director at PT Jaya Agro Mandiri (2017–2019)
- **Investment Specialist - Sustainability Funding Program di Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (2019)**
*Investment Specialist – Sustainability Funding Program at Kehati Foundation
(Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia) (2019)*
- **Advisory - Investment Committee di Asuransi Jiwa Mega Indonesia (2016-2017)**
Advisory – Investment Committee at Asuransi Jiwa Mega Indonesia (2016–2017)
- **Senior Investment Specialist - ESG Program and SRI KEHATI Index Bursa Efek Indonesia di Yayasan Keanekaragaman Hayati Indonesia (2015-2017)**
*Senior Investment Specialist – ESG Program and SRI KEHATI Index at Indonesia
Stock Exchange (IDX) via Kehati Foundation (2015–2017)*
- **Direktur Komersil di PT Monopoli Raya (2011-2014)**
Commercial Director at PT Monopoli Raya (2011–2014)
- **Direktur Bisnis di DINAR Strategic Firm (2009)**
Business Director at DINAR Strategic Firm (2009)
- **Vice President Treasury & Capital Market di Bank CIMB Niaga (2006-2008)**
Vice President of Treasury & Capital Market at Bank CIMB Niaga (2006–2008)
- **Manager Investment Structuring di DANAREKSA (2000-2006)**
Investment Structuring Manager at DANAREKSA (2000–2006)
- **Senior Assistant Manager di Bank Muamalat Indonesia (1995-2000)**
Senior Assistant Manager at Bank Muamalat Indonesia (1995–2000)
- **Assistant Manager di BCA Syariah (1994-1995)**
Assistant Manager at BCA Syariah (1994–1995)

Hubungan Afiliasi *Affiliation*

Tidak Ada
None

Kepemilikan Saham pada Perseroan *Ownership of the Company's Shares*

Tidak Ada
None



Mayjen TNI Purn. Bachtiar Utomo

Direktur Sumber Daya dan Umum (Per tanggal Pelaporan Laporan Tahunan)
Director of Human Resources and General Affairs (As of reporting date of the Annual Report)

Usia Age	65 Tahun 65 Years Old
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Pati, 09 April 1960 Pati, April 09, 1960
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali *Legal Basis of First-time Appointment*

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-54/MBU/03/2025
tanggal 11 Maret 2025
*Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. No. SSK-54/MBU/03/2025
dated March 11, 2025*

Riwayat Pendidikan *Education Background*

- S3 Administrasi Negara dari Universitas Hasanudin (2016)
Doctoral Degree (Ph.D.) in Public Administration from Hasanuddin University (2016)
- S2 Administrasi Negara dari STIA Lembaga Administrasi Negara (2021)
Master's Degree in Public Administration from STIA National Institute of Public Administration (2021)
- S1 Ilmu Administrasi Publik dari Universitas Terbuka (2001)
Bachelor's Degree in Public Administration from Universitas Terbuka (2001)
- LEMHANNAS (2012)
LEMHANNAS (National Resilience Institute) (2012)
- SUSANREM (2008)
SUSANREM (Regiment Commander Education Course) (2008)
- SESKO TNI (2023)
SESKO TNI (Armed Forces Staff and Command School) (2023)
- SUSANBRIG (2003)
SUSANBRIG (Brigade Commander Education Course) (2003)
- TARTIH IF (1999)
TARTIH IF (Infantry Tactical and Technical Training) (1999)
- SESKOAD (1998)
SESKOAD (Army Staff and Command School) (1998)
- SUSLAPA-2 (1995)
SUSLAPA-2 (Advanced Officer Training Course Level 2) (1995)
- SUSLAPA-1 (1989)
SUSLAPA-1 (Advanced Officer Training Course Level 1) (1989)
- TER TERPUSAT (1985)
TER TERPUSAT (Centralized Basic Infantry Training) (1985)
- COMBAT INTEL (1984)
COMBAT INTEL (Combat Intelligence Training) (1984)
- AKABRI (1984)
AKABRI (Indonesian Military Academy) (1984)
- SUSSARPARA (1983)
SUSSARPARA (Airborne Ranger Special Course) (1983)

Riwayat Jabatan *Position History*

- Ketua Harian HKTI (2023-saat ini)
Daily Chairperson of HKTI (Indonesian Farmers Harmony Association) (2023-present)
- Dewan Pembina PB PJSI (2022-saat ini)
Advisory Board Member of PB PJSI (Indonesian Judo Federation) (2022-present)
- Sekretaris Jenderal Gerakan Pramuka (2018-saat ini)
Secretary General of the Indonesian Scout Movement (Gerakan Pramuka) (2018-present)
- Dosen di Universitas Jenderal Achmad Yani (2017-saat ini)
Lecturer at Jenderal Achmad Yani University (2017-present)
- Direktur PBI Perum Bulog (2018-2020)
Director of Public Service Obligation (PBI) at Perum Bulog (2018-2020)
- Komisaris Utama PT GMM (2018-2020)
President Commissioner at PT GMM (2018-2020)
- Direktur Pengadaan Perum Bulog (2018-2020)
Director of Procurement at Perum Bulog (2018-2020)
- Sekretaris Jenderal PB PJSI (2016-2022)
Secretary General of PB PJSI (Indonesian Judo Federation) (2016-2022)

Hubungan Afiliasi *Affiliation*

Tidak Ada
None

Kepemilikan Saham pada Perseroan *Ownership of the Company's Shares*

Tidak Ada
None



Mayjen TNI Purn. Cucu Somantri

Direktur Perkebunan (Per tanggal Pelaporan Laporan Tahunan)
Director of Palm Oil Plantation (As of reporting date of the Annual Report)

Usia <i>Age</i>	63 Tahun <i>63 Years Old</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Kodya Bandung, 05 November 1961 <i>Kodya Bandung, November 05, 1961</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Jakarta <i>Jakarta</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali *Legal Basis of First-time Appointment*

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-54/MBU/03/2025 tanggal 11 Maret 2025

Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. No. SSK-54/MBU/03/2025 dated March 11, 2025

Riwayat Pendidikan *Education Background*

- S2 Hukum di Universitas Prima Indonesia Medan (2019)
Master's Degree (S2) in Law at Prima Indonesia Medan University (2019)
- LEMHANNAS (2012)
LEMHANNAS (National Resilience Institute) (2012)
- SESKO TNI (2008)
SESKO TNI (Indonesian Armed Forces Command and Staff College) (2008)
- SUSKAT JEMEN Modern Pertahanan Terorism and Counter Terorism (2008)
Modern Defense, Terrorism and Counter-Terrorism Special Course (2008)
- SUS DAN BRIGIF (2006)
SUS DAN BRIGIF (Infantry Brigade Command Course) (2006)
- SUSPA OPSGAB (2005)
SUSPA OPSGAB (Joint Operations Staff Course) (2005)
- S1 Ilmu Politik di Universitas Terbuka (2001)
Bachelor's Degree (S1) in Political Science at Terbuka University (2001)
- SESKOAD (1998)
SESKOAD (Army Command and Staff College) (1998)
- AIR BORNE (1996)
AIR BORNE (Airborne Training) (1996)
- DIKLAPA-II/INF (1995)
DIKLAPA-II/INF (Advanced Infantry Officer Course II) (1995)
- SUSPA INTEL (1995)
SUSPA INTEL (Intelligence Staff Course) (1995)
- SUSPA SANDI (1991)
SUSPA SANDI (Cryptography Staff Course) (1991)
- SUSLAPA-I/INF (1990)
SUSLAPA-I/INF (Basic Infantry Officer Course I) (1990)
- SUS Bahasa Inggris (1986)
English Language Special Course (1986)
- SUSSARCAB INFANTRI (1984)
SUSSARCAB INFANTRI (Infantry Jump Master Course) (1984)
- AKABRI (1984)
AKABRI (Military Academy) (1984)
- LAT SAR PARA (1983)
LAT SAR PARA (Paratrooper Search and Rescue Training) (1983)

Riwayat Jabatan *Position History*

- Pengurus Pusat Purnawirawan Pejuang Indonesia Raya (PPIR) (2022-saat ini)
Central Board of the Veterans of the Great Indonesian Fighters (PPIR) (2022–present)
- Ketua Persatuan Purnawirawan TNI AD (PPAD) Jawa Barat (2023-saat ini)
Chairman of the Association of Indonesian Army Veterans (PPAD) West Java (2023–present)
- Ketua Persatuan Alumni AKABRI 1984 (2020-saat ini)
Chairman of the AKABRI 1984 Alumni Association (2020–present)
- Direktur Utama LIB (2019)
President Director of LIB (2019)
- Wakil Ketua Umum PSSI (2019-2022)
Deputy Chairman of PSSI (Indonesian Football Association) (2019–2022)

Hubungan Afiliasi *Affiliation*

Tidak Ada
None

Kepemilikan Saham pada Perseroan *Ownership of the Company's Shares*

Tidak Ada
None



Gagah Guntur Wibowo

Direktur Konsultan Konstruksi (Per tanggal Pelaporan Laporan Tahunan)
Director of Construction Consultant (As of reporting date of the Annual Report)

Usia Age	48 Tahun 48 Years Old
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Kudus, 04 April 1977 Kudus, April 04, 1977
Domisili Domicile	Mataram, Nusa Tenggara Barat Mataram, Nusa Tenggara Barat
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesia

Riwayat Pendidikan *Education Background*

- S3 Teknik Sipil dari Universitas Brawijaya (2023)
Doctoral Degree in Civil Engineering from Universitas Brawijaya (2023)
- S2 Teknik Sipil dari Universitas Islam Sultan Agung (2010)
Master's Degree in Civil Engineering from Universitas Islam Sultan Agung (2010)
- S1 Teknik Pengairan dari Universitas Brawijaya, Malang (1999)
Bachelor's Degree in Hydraulic Engineering from Universitas Brawijaya, Malang (1999)

Riwayat Jabatan *Position History*

- General Manager Divisi Engineering I PT Indra Karya (Persero) (2016-2021)
General Manager of Engineering Division I PT Indra Karya (Persero) (2016-2021)
- Manajer Proposal dan Pemasaran Divisi Engineering I PT Indra Karya (Persero) (2016)
Manager of Proposal and Marketing Engineering Division I of PT Indra Karya (Persero) (2016)
- Manajer Produksi dan Pemasaran Divisi Engineering I PT Indra Karya (Persero) (2014-2016)
Manager of Production and Marketing Engineering Division I of PT Indra Karya (Persero) (2014 - 2016)
- Kepala Perwakilan NTB (2005-2014)
Head of NTB Representative (2005-2014)

Sertifikat Keahlian *Skill Certificate*

Ahli Madya Bendungan
Intermediate Expert of Dam

Pelatihan Tahun 2024 *Training in 2024*

- CRMO & Sertifikasi, RAP
CRMO & Certification, RAP
- Pelatihan Elevator Pitch, DLI
Elevator Pitch Training, DLI
- Seminar Environmental, Social, and Governance (ESG), PT CRMS
Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar, PT CRMS

Keanggotaan Organisasi *Organization Membership*

- Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) (2016-2022)
Indonesian Association of Hydraulics Engineers (HATHI) (2016-2022)
- Bendahara Umum Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB) (2021-Sekarang)
Treasurer of the Indonesian National Committee for Large Dams (KNIBB) (2021-Present)
- Anggota Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB) (2014-Sekarang)
Member of the Indonesian National Committee for Large Dams (KNIBB) (2014-Present)
- Koordinator Bidang Pengairan Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) NTB (2006-2010)
Irrigation Coordinator of the Indonesian National Consultant Association (INKINDO) NTB (2006-2010)
- Ketua Komisi Pengembangan Organisasi dan Hubungan Antar Forum Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Cabang NTB (2016-2021)
Chairman of the Organizational Development and Inter-Forum Relations Commission of the Indonesian Hydraulic Engineering Experts Association (HATHI) NTB Branch (2016-2021)
- Ketua I Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Cabang NTB (2013-2016)
Chairman I of the Indonesian Hydraulic Engineering Experts Association (HATHI) NTB Branch (2013-2016)
- Wakil Bendahara I Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) Cabang NTB (2009-2013)
Deputy Treasurer I of the Indonesian Hydraulic Engineering Experts Association (HATHI) NTB Branch (2009-2013)



Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

Perseroan ini adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang sepenuhnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, dengan kepemilikan saham sebesar 100%. Pengelolaan perseroan berada di bawah tanggung jawab Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Sejak tahun 2021, Kementerian BUMN telah menunjuk PT Danareksa (Persero) untuk mengambil alih pengelolaan PT Indra Karya (Persero) melalui penyerahan Surat Kuasa Khusus (SKK) No. SKK-117/MBU/12/2021 tertanggal 29 Desember 2021. Struktur kepemilikan saham perusahaan diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan, yang mencakup Saham Seri A dan Saham Seri B. Penempatan dan komposisi saham ini dijabarkan lebih lanjut dalam tabel berikut.

The company is a State-Owned Enterprise (SOE) wholly owned by the Government of the Republic of Indonesia, with 100% shareholding. The management of the company is under the responsibility of the Ministry of State-Owned Enterprises (SOEs). Since 2021, the Ministry of SOEs has appointed PT Danareksa (Persero) to take over the management of PT Indra Karya (Persero) through the submission of Special Power of Attorney (SKK) No. SKK-117/MBU/12/2021 dated 29 December 2021. The company's shareholding structure is regulated in the Company's Articles of Association, which includes Series A Shares and Series B Shares. The placement and composition of these shares are further elaborated in the following table.



100%
Pemerintah Republik Indonesia
Government of the Republic of Indonesia



PT Indra Karya (Persero)



Komposisi Pemegang Saham

Shareholders Composition

Uraian Description	Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham (Lembar) Number of Shares (Sheet)	Jumlah Modal Disetor (Rp) Amount of Paid-in Capital (Rp)
Modal Dasar Authorized Capital		40.004	40.004.000.000
Modal Belum Ditempatkan dan Disetor Penuh Capital That Has Not Been Issued and Has Not Been Fully Paid	Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	30.003	30.003.000.000
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital		10.001	10.001.000.000

Daftar Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan/ atau Perusahaan Ventura Bersama

List of Subsidiaries, Associated Companies, and/or Joint Venture Companies

Hingga 31 Desember 2024, Perseroan tidak memiliki entitas anak, perusahaan asosiasi, ataupun perusahaan ventura bersama.

As of December 31, 2024, the Company did not have any subsidiaries, associates, or joint ventures.

Kronologi Pencatatan Saham

Share Listing Chronology

Hingga 31 Desember 2024, Perseroan belum pernah melakukan pencatatan saham di bursa efek mana pun.

As of December 31, 2024, the Company has never listed shares on any stock exchange.

Kronologi Pencatatan Efek Lainnya

Chronology of other Securities Listing

Hingga 31 Desember 2024, Perseroan belum melakukan pencatatan efek lainnya di bursa efek mana pun.

As of December 31, 2024, the Company has not listed other securities on any stock exchange.



Lembaga Profesi Penunjang

Supporting Professional Institutions

Dalam menjalankan operasional usahanya, Perseroan mendapat dukungan dari berbagai lembaga profesi yang berperan penting dalam kelancaran dan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Di antaranya adalah Kantor Akuntan Publik, Notaris, serta Konsultan Hukum, yang memberikan berbagai layanan profesional untuk memastikan bahwa setiap langkah yang diambil sesuai dengan standar hukum dan akuntansi yang tepat. Beberapa lembaga profesi yang mendukung kegiatan tersebut antara lain:

In carrying out its business operations, the Company receives support from various professional institutions that play an important role in the smooth running and compliance with applicable regulations. Among them are Public Accounting Firms, Notaries, and Legal Consultants, who provide various professional services to ensure that every step taken is in accordance with proper legal and accounting standards. Some of the professional institutions that support these activities include:

Nama dan Alamat Lembaga Name and Address of Institutions		Jasa yang Diberikan Service Rendered
Kantor Akuntan Publik Public Accounting Firm	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Jasa audit laporan keuangan Perseroan untuk periode penugasan 2024. Kantor Akuntan Publik tidak memberikan jasa lain selain jasa audit. Audit service for the Company's financial statements for the 2024 assignment period. The Public Accounting Firm did not provide other services apart from audit services. Biaya audit / Audit fee: Rp422.532.045/ Rp422,532,045
Notaris & PPAT Notary & PPAT	Notaris & PPAT Arminawan, S.H.	Jasa notaris sehubungan dengan akta RUPS, dan dokumen lainnya untuk periode penugasan 2024. Notary service in connection with the GMS deed and other documents for the 2024 assignment period.
Konsultan Hukum Legal Consultant	Kantor Hukum Daniel Sinambela & Partners	Jasa konsultasi atas kebutuhan dan kepentingan hukum Perseroan. Consulting services for the Company's legal needs and interests.

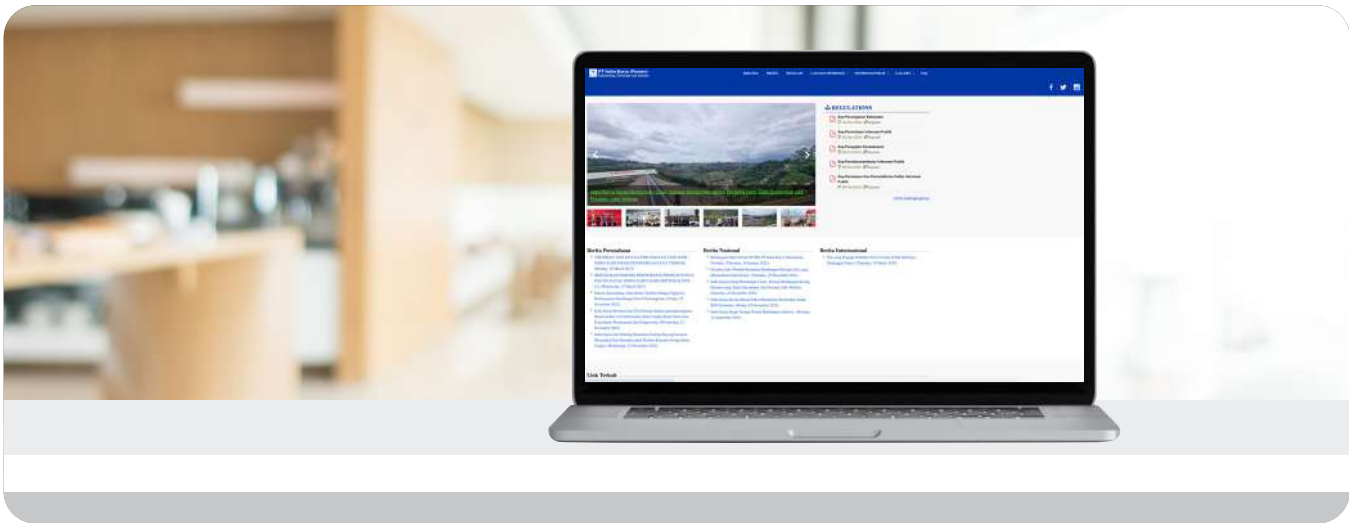
Daftar Keanggotaan Asosiasi

List of Association Membership

Perseroan tercatat sebagai anggota resmi dan secara aktif terlibat dalam berbagai asosiasi industri yang relevan. Keterlibatannya ini mencerminkan komitmen Perseroan untuk terus beradaptasi dengan perkembangan industri dan berkontribusi dalam pengembangan sektor terkait. Berikut adalah pengungkapan mengenai asosiasi-asosiasi industri yang menjadi bagian dari kegiatan usaha Perseroan:

The Company is registered as an official member and is actively involved in various relevant industry associations. This involvement reflects the Company's commitment to continuously adapt to industry developments and contribute to the development of related sectors. The following is a disclosure of industry associations that are part of the Company's business activities:

Nama Asosiasi Association Name	Deskripsi Asosiasi Association Description	Posisi dalam Asosiasi Position in Association
Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO) <i>Ikatan Nasional Konsultan Indonesia (INKINDO)</i>	Asosiasi Perusahaan Jasa Konsultan di Indonesia <i>Association of Consulting Service Companies in Indonesia</i>	Anggota <i>Member</i>
Kamar Dagang dan Industri <i>Chamber of Commerce and Industry</i>	Organisasi Pengusaha Indonesia yang bergerak di bidang perekonomian <i>Indonesian Entrepreneurs Organization in economic sector</i>	Anggota <i>Member</i>
Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar (KNIBB) <i>National Committee on Large Dams (INACOLD)</i>	Asosiasi Komite Nasional Indonesia untuk Bendungan Besar <i>Association of Indonesian National Committees for Large Dams</i>	Anggota <i>Member</i>
Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) <i>Indonesian Hydraulic Engineering Association (HATHI)</i>	Perhimpunan yang bergerak dalam bidang edukasi di bidang teknik, terutama teknik keairan <i>An association that operates in the field of education in the field of engineering, especially water engineering</i>	Anggota <i>Member</i>
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) <i>Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA)</i>	Asosiasi Sekretaris Perusahaan di Indonesia <i>Indonesia Corporate Secretary Association</i>	Anggota <i>Member</i>
Forum Humas BUMN (FH BUMN) <i>Forum Humas BUMN (FH BUMN)</i>	Forum Kementerian Badan Usaha Milik Negara (FHBUMN) berfokus pada pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) dan membangun sinergi di antara jajaran humas. <i>The Ministry of State-Owned Enterprises Forum (FHBUMN) focuses on managing Human Resources (HR) and building synergy among public relations staff.</i>	Anggota <i>Member</i>
QHSE BUMN Konstruksi <i>Construction SOE QHSE</i>	Forum yang berfokus pada peningkatan standar dan kualitas praktik Kesehatan dan Keselamatan Kerja (K3) pada pembangunan proyek infrastruktur di Indonesia. <i>A forum that focuses on improving the standards and quality of Occupational Health and Safety (K3) practices in infrastructure project development in Indonesia.</i>	Anggota <i>Member</i>
Forum Human Capital Indonesia BUMN (FHCI BUMN) <i>Forum Human Capital Indonesia BUMN (FHCI BUMN)</i>	Forum yang didirikan untuk mengelola serta mengembangkan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan tujuan merumuskan wawasan strategis guna meningkatkan kapabilitas dan kualitas tenaga kerja di Indonesia terutama dalam lingkup Badan Usaha Milik Negara (BUMN). <i>A forum established to manage and develop Human Resources (HR) with the aim of formulating strategic insights to improve the capabilities and quality of the workforce in Indonesia, especially within the scope of State-Owned Enterprises (SOE).</i>	Anggota <i>Member</i>



Informasi pada Website

Information on the Website

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Layanan ini dapat diakses melalui *microsite* yang terhubung dengan portal utama perusahaan, yaitu <https://www.eppid.indrakarya.co.id>. Layanan ini merupakan bagian dari enam akses layanan publik yang dimiliki oleh Perseroan, memastikan bahwa seluruh informasi yang relevan dapat dijangkau dengan mudah oleh masyarakat dan pemangku kepentingan.

Informasi yang dapat diakses melalui situs web tersebut meliputi jenis-jenis informasi sebagai berikut:

Information and Documentation Management Officer (PPID). This service can be accessed through a *microsite* connected to the company's main portal, namely <https://www.eppid.indrakarya.co.id>. This service is part of the six public service accesses owned by the Company, ensuring that all relevant information can be easily accessed by the public and stakeholders.

Information that can be accessed through the website includes the following types of information:

Jenis Informasi Type on Information	Ketersediaan Availability
Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu <i>Shareholder information down to the individual final owner</i>	✓
Isi Kode Etik <i>Code of Ethics Content</i>	✓
Informasi RUPS paling kurang meliputi bahwa mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan <i>GMS information at least includes agenda items discussed at the GMS, summary of the minutes of the GMS, and information on important dates, namely announcement date of the GMS, invitation date to the GMS, date of the GMS, summary date of minutes of the GMS was announced</i>	✓
Laporan Keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir) <i>Separate annual financial statements (last 5 years)</i>	✓
Profil Dewan Komisaris dan Direksi <i>Profile of the Board of Commissioners and Board of Directors</i>	✓
Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-Komite, dan Unit Audit Internal <i>Charter of the Board of Commissioners, Board of Directors, Committees and Internal Audit Unit</i>	✓
Kepatuhan LHKPN <i>LHKPN Compliance</i>	✓
Informasi Perusahaan <i>Company Information</i>	✓
Berita Perusahaan <i>Company News</i>	✓
Layanan Keterbukaan Informasi Publik <i>Public Information Disclosure Service</i>	✓







INDRA KARYA

04

TINJAUAN UNIT PENDUKUNG BISNIS

*BUSINESS SUPPORT UNIT
OVERVIEW*



Sumber Daya Manusia

Human Resources

Sumber Daya Manusia (SDM) memegang peranan penting dalam mendorong peningkatan kinerja Perseroan untuk mencapai visi dan misinya. Oleh karena itu, pengelolaan dan pemeliharaan SDM yang baik merupakan kunci utama dalam memastikan kesuksesan jangka panjang Perseroan. SDM yang berkualitas dan unggul tidak hanya menjadi aset berharga, tetapi juga menjadi modal utama bagi Perseroan untuk bersaing secara efektif dan berkembang secara berkelanjutan di pasar yang semakin kompetitif.

Human resources (HR) play an important role in driving the Company's performance to achieve its vision and mission. Therefore, good HR management and maintenance are key to ensuring the Company's long-term success. Qualified and excellent human resources are not only valuable assets, but also the main capital for the Company to compete effectively and develop sustainably in an increasingly competitive market.

Kebijakan Sumber Daya Manusia

Human Resources Policy

Dalam pengelolaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM), Perseroan sangat menekankan pentingnya menciptakan SDM yang sesuai dengan nilai-nilai AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif). Nilai-nilai tersebut menjadi landasan dalam memastikan kelancaran aktivitas operasional serta mendukung keberlanjutan usaha Perseroan. Mengingat pesatnya persaingan di dunia usaha, Perseroan menetapkan pengembangan SDM sebagai salah satu unsur keunggulan utama yang akan mendorong daya saing dan ketahanan organisasi.

In managing and developing human resources (HR), the Company strongly emphasises the importance of creating human resources that are in line with the values of AKHLAK (trustworthy, competent, harmonious, loyal, adaptive, collaborative). These values serve as the foundation for ensuring the smooth running of operational activities and supporting the sustainability of the Company's business. Given the rapid competition in the business world, the Company has established HR development as one of the key elements that will boost the organisation's competitiveness and resilience.

Fokus utama Perseroan dalam menetapkan kebijakan SDM adalah untuk memberikan dukungan yang maksimal terhadap pencapaian tujuan kinerja perusahaan, serta memberikan kontribusi terbaik dalam penyediaan layanan yang memuaskan bagi pelanggan. Oleh karena itu, Perseroan memiliki kebijakan yang komprehensif untuk mengelola SDM mulai dari tahap perekrutan, pelatihan dan pendidikan karyawan, pengelolaan jenjang karier, hingga pengelolaan karyawan yang akan memasuki masa pensiun. Dengan pendekatan ini, Perseroan memastikan bahwa SDM yang dimiliki dapat berkontribusi secara optimal terhadap kesuksesan dan pertumbuhan jangka panjang Perseroan.

The Company's main focus in establishing HR policies is to provide maximum support for the achievement of the company's performance objectives and to contribute in the best possible way to providing satisfactory services to customers. Therefore, the Company has a comprehensive policy for managing human resources from the recruitment stage, employee training and education, career path management, to managing employees who are about to retire. With this approach, the Company ensures that its human resources can contribute optimally to the success and long-term growth of the Company.

Tujuan Pengelolaan Sumber Daya Manusia

Objectives of Human Resources Management

Perseroan menyadari bahwa salah satu faktor utama yang memperkuat fondasi sebuah perusahaan untuk tumbuh adalah tersedianya sumber daya manusia yang memadai dan kompeten. Oleh karena itu, Perseroan memiliki tujuan pengelolaan sumber daya manusia yang mencakup optimalisasi kinerja perusahaan, yang meliputi efisiensi operasional, produktivitas karyawan, dan pencapaian tujuan strategis perusahaan. Selain itu, Perseroan juga meyakini bahwa dengan pengelolaan sumber daya manusia yang baik, dapat memberikan dampak positif terhadap citra perusahaan, menjadikannya sebagai tempat yang nyaman dan mendukung bagi karyawan. Hal ini penting dalam membangun hubungan yang harmonis dan meningkatkan loyalitas karyawan, yang pada gilirannya akan berkontribusi pada kesuksesan dan pertumbuhan berkelanjutan Perseroan.

The Company recognises that one of the main factors strengthening a company's foundation for growth is the availability of adequate and competent human resources. Therefore, the Company has a human resource management objective that includes optimising company performance, which encompasses operational efficiency, employee productivity, and the achievement of the company's strategic objectives. Furthermore, the Company also believes that effective human resource management can have a positive impact on the company's image, making it a comfortable and supportive workplace for employees. This is crucial in fostering harmonious relationships and enhancing employee loyalty, which in turn will contribute to the Company's success and sustainable growth.

Pihak Pengelola Sumber Daya Manusia

Parties Responsible in Managing Human Resources

Sistem dan prosedur pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) yang dimiliki oleh Perseroan telah dikelola dengan baik oleh divisi *Human Capital, General Affair, Transformation*, dan *MIS*. Di dalam divisi ini terdapat tenaga ahli yang berpengalaman dalam mengelola SDM perusahaan. Keberhasilan pengelolaan ini terbukti dari meningkatnya kinerja Perseroan secara keseluruhan, serta pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi karyawan yang dilakukan secara optimal. Hal ini mencerminkan bahwa pengelolaan SDM di Perseroan telah berjalan dengan efektif dan berkontribusi pada pencapaian tujuan perusahaan.

The human resource management system and procedures of Perseroan are well managed by the Human Capital, General Affairs, Transformation, and MIS divisions. These divisions employ experts who are experienced in managing the company's human resources. The success of this management is evident from the overall improvement in the Company's performance and the optimal implementation of employee competency development activities. This reflects that HR management at the company is being carried out effectively and contributing to the achievement of the company's objectives.

Tugas dan Tanggung Jawab Pihak Pengelola Sumber Daya Manusia

Duties and Responsibilities of Parties Responsible of the Human Resources Management

Komitmen Perseroan dalam mengelola sumber daya manusia tercermin melalui berbagai upaya dalam pelatihan dan pendidikan karyawan, serta pemberian apresiasi bagi karyawan yang telah menunjukkan kinerja baik. Apresiasi tersebut berupa peningkatan kesejahteraan karyawan dan insentif lainnya, yang bertujuan untuk mengoptimalkan produktivitas karyawan. Pemberian apresiasi ini dilakukan berdasarkan sistem penilaian yang berlaku di Perseroan, yang memastikan bahwa penghargaan diberikan secara adil dan transparan.

The Company's commitment to managing human resources is reflected in various efforts in employee training and education, as well as appreciation for employees who have demonstrated good performance. This appreciation takes the form of improved employee welfare and other incentives, which aim to optimise employee productivity. This appreciation is given based on the assessment system applicable at the Company, which ensures that awards are given fairly and transparently.

Selain memberikan apresiasi, Perseroan juga menunjukkan bentuk penghargaan kepada karyawan melalui penyempurnaan sistem pengelolaan SDM, termasuk pengaturan cuti, sistem manajemen kinerja (*performance management system*), dan penyediaan fasilitas untuk memastikan pengukuran kinerja yang lebih adil dan objektif. Semua kebijakan ini dirancang untuk memastikan bahwa karyawan menerima hak-hak mereka sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, memberikan rasa aman, dan meningkatkan kepuasan kerja yang pada akhirnya berkontribusi pada kinerja yang lebih baik bagi Perseroan.

In addition to providing recognition, the Company also demonstrates its appreciation to employees through improvements to its human resource management system, including leave arrangements, a performance management system, and the provision of facilities to ensure fair and objective performance measurement. All these policies are designed to ensure that employees receive their rights in accordance with the applicable laws and regulations in Indonesia, provide a sense of security, and enhance job satisfaction, which ultimately contributes to better performance for the Company.



Jumlah Karyawan

Total Employee

Jumlah karyawan Perseroan per 31 Desember 2024 tercatat sebanyak 169 orang, tidak mengalami perubahan dibandingkan dengan jumlah karyawan pada tahun sebelumnya yang juga berjumlah 169 orang. Adapun rincian jumlah karyawan berdasarkan klasifikasinya adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2024, the Company had a total of 169 employees, unchanged from the previous year, which also recorded 169 employees. The details of the number of employees based on their classification are as follows:

Komposisi Karyawan berdasarkan Tingkat Pendidikan

Employee Composition by Education Level

Tingkat Pendidikan Education Level	2024	2023	2022
S2 dan S3 / Master's and Doctoral Degree	21	21	22
S1 / Bachelor's Degree	87	88	103
D3 / Associate's Degree	6	6	9
SMA / High School Diploma	55	54	44
Jumlah / Total	169	169	178

Komposisi Karyawan berdasarkan Usia

Employee Composition by Age

Usia Age	2024	2023	2022
< 40 tahun / years old	80	81	75
40-50 tahun / years old	57	84	59
>50 tahun / years old	32	4	44
Jumlah / Total	169	169	178

Komposisi Karyawan berdasarkan Status Kepegawaian

Employee Composition by Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2024	2023	2022
Karyawan Tetap / Permanent Employee	73	74	80
Karyawan Kontrak / Non-Permanent Employee	96	95	98
Jumlah / Total	169	169	178

Komposisi Karyawan berdasarkan Jenis Kelamin

Employee Composition by Gender

Jenis Kelamin Gender	2024	2023	2022
Pria / Male	112	110	116
Wanita / Female	57	59	62
Jumlah / Total	169	169	178

Pengembangan Kompetensi Karyawan serta Manajemen Perusahaan tahun 2024

Employee Competency Development and Company Management in 2024

Pengembangan kompetensi karyawan merupakan proses sistematis yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan, pengetahuan, dan keterampilan karyawan, sehingga mereka dapat memberikan kontribusi maksimal dalam mendukung kinerja Perseroan. Sepanjang tahun 2024, karyawan Perseroan mengikuti total 68 pelatihan dan/atau pendidikan yang diselenggarakan baik secara internal maupun eksternal, yang disesuaikan dengan kebutuhan kompetensi yang relevan bagi perusahaan. Data terkait pengembangan kompetensi karyawan Perseroan selama tahun 2024 dapat dilihat pada rincian berikut:

Employee competency development is a systematic process aimed at improving the abilities, knowledge, and skills of employees so that they can contribute maximally to supporting the Company's performance. Throughout 2024, the Company's employees participated in a total of 68 training and/or education programmes, both internal and external, tailored to the relevant competency needs of the company. Data related to employee competency development at the Company during 2024 can be seen in the following details:

No No	Nama Pelatihan/Pendidikan Name of Training/Seminar	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer	Nama Peserta Names of Participants
1	Pelatihan Harmonisasi Kapabilitas HC/ Human Capital Capability Harmonization Training	11/01/2024 - 12/01/2024	DANAREKSA	Wahyu Tri raharja
2	Pelatihan Harmonisasi Kapabilitas HC/ Human Capital Capability Harmonization Training	11/01/2024 - 12/01/2024	DANAREKSA	Ardi Imrona Febrini
3	Sertifikasi QIA (CIAR YPIA) / Tingkat Lanjutan/ QIA Certification (CIAR YPIA) / Advanced Level	22/01/2-24 - 03/02/2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit	Saipul Bahri
4	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ Internal Audit Training ISO 19011:2018	22-23/02/2024	In house	Ferdinandus Baskoro
5	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ Internal Audit Training ISO 19011:2018	22-23/02/2024	In house	Dewi Wulandari
6	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ Internal Audit Training ISO 19011:2018	22-23/02/2024	In house	Syifa Afia Rizfahphi
7	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ Internal Audit Training ISO 19011:2018	22-23/02/2024	In house	Indri Widhoretno
8	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ Internal Audit Training ISO 19011:2018	22-23/02/2024	In house	Kresna Dwiki Komara
9	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ Internal Audit Training ISO 19011:2018	22-23/02/2024	In house	Farah Fauziyah
10	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ Internal Audit Training ISO 19011:2018	22-23/02/2024	In house	William Wijaya
11	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ Internal Audit Training ISO 19011:2018	22-23/02/2024	In house	Saipul Bahri
12	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ Internal Audit Training ISO 19011:2018	22-23/02/2024	In house	Nadya Sio Uli
13	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ Internal Audit Training ISO 19011:2018	22-23/02/2024	In house	Zcezcac Blesseventeen Heaven Suharno
14	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ Internal Audit Training ISO 19011:2018	22-23/02/2024	In house	Fandi Akhmad Akbar
15	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ Internal Audit Training ISO 19011:2018	22-23/02/2024	In house	Stephanus Dadang Sancoyo
16	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ Internal Audit Training ISO 19011:2018	22-23/02/2024	In house	Mellany Ayu Susanto
17	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ Internal Audit Training ISO 19011:2018	22-23/02/2024	In house	Ardi Imrona Febrini

No No	Nama Pelatihan/Pendidikan Name of Training/Seminar	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer	Nama Peserta Names of Participants
18	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ <i>Internal Audit Training ISO 19011:2018</i>	22-23/02/2024	<i>In house</i>	Eva Safi'i
19	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018/ <i>Internal Audit Training ISO 19011:2018</i>	22-23/02/2024	<i>In house</i>	Nur Utomo
20	Pelatihan Penilai <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) Batch II/ <i>Risk Maturity Index (RMI) Assessor Training – Batch II</i>	3/5/2024	PT PMLI	Farah Fauziyah
21	Pelatihan Penilai <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) Batch II/ <i>Risk Maturity Index (RMI) Assessor Training – Batch II</i>	3/5/2024	PT PMLI	Dewi Wulandari
22	Pelatihan Penilai <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) Batch II/ <i>Risk Maturity Index (RMI) Assessor Training – Batch II</i>	3/5/2024	PT PMLI	Syifa Afia Rizfahphi
23	Pelatihan Penilai <i>Risk Maturity Index</i> (RMI) Batch II/ <i>Risk Maturity Index (RMI) Assessor Training – Batch II</i>	3/5/2024	PT PMLI	Ria Andriani
24	Online Webinar Optimasi Sumberdaya Air pada kegiatan pertambangan/ <i>Online Webinar on Optimizing Water Resources in Mining Activities</i>	2/5/2024	Indra Purnama	Anindya Estiandari
25	Online Webinar Optimasi Sumberdaya Air pada kegiatan pertambangan/ <i>Online Webinar on Optimizing Water Resources in Mining Activities</i>	2/5/2024	Indra Purnama	Achsin Wijayanto
26	Sertifikasi QIA (CIAR YPIA) / Tingkat Lanjutan/ <i>QIA Certification (CIAR YPIA) / Advanced Level</i>	18/03/2024 - 01/04/2024	Yayasan Pendidikan Internal Audit	Dewi Wulandari
27	Seminar <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)/ Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar</i>	5/3/2024	PT CRMS	Dewi Wulandari
28	Seminar <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)/ Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar</i>	5/3/2024	PT CRMS	Farah Fauziyah
29	Seminar <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)/ Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar</i>	5/3/2024	PT CRMS	Ferdinandus Baskoro H.S.W
30	Seminar <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)/ Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar</i>	5/3/2024	PT CRMS	Gagah Guntur Aribowo
31	Seminar <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)/ Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar</i>	5/3/2024	PT CRMS	Marlena Puspitasari
32	Seminar <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)/ Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar</i>	5/3/2024	PT CRMS	Okky Suryono
33	Seminar <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)/ Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar</i>	5/3/2024	PT CRMS	Adrian Yulianto
34	Seminar <i>Environmental, Social, and Governance (ESG)/ Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar</i>	5/3/2024	PT CRMS	Yuli Astuti
35	Sertifikasi <i>Human Capital Staff/Officer (Online)/ Human Capital Staff/Officer Certification (Online)</i>	14 - 16, 22, 25/05/2024	Essas Management	Rina Ain Ningsih
36	<i>Risk Conference Navigating Uncertainty: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management / Risk Conference: Navigating Uncertainty – Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management</i>	6/13/2024	DANAREKSA	Eko Budiono
37	<i>Risk Conference Navigating Uncertainty: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management / Risk Conference: Navigating Uncertainty – Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management</i>	6/13/2024	DANAREKSA	Ayudia

No No	Nama Pelatihan/Pendidikan Name of Training/Seminar	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer	Nama Peserta Names of Participants
38	<i>Risk Conference Navigating Uncertainty: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management / Risk Conference: Navigating Uncertainty – Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management</i>	6/13/2024	DANAREKSA	Marlena Puspitasari
39	<i>Risk Conference Navigating Uncertainty: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management / Risk Conference: Navigating Uncertainty – Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management</i>	6/13/2024	DANAREKSA	Farah Fauziyah
40	<i>Risk Conference Navigating Uncertainty: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management / Risk Conference: Navigating Uncertainty – Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management</i>	6/13/2024	DANAREKSA	Ferdinandus Baskoro H.S.W
41	Webinar IAMI Internal Control Over Financial Reporting (ICFR) & Internal Control over Sustainability Reporting (ICSR)/ IAMI Webinar: Internal Control Over Financial Reporting (ICFR) & Internal Control over Sustainability Reporting (ICSR)	6/22/2024	IAMI	Eko Budiono
42	Pelatihan DLI Design Thinking / <i>DLI Design Thinking Training</i>	26-28/06/2024	DANAREKSA	Bambang Palgunadi
43	Pelatihan & Sertifikasi Skema Sekretaris Administrasi / <i>Training & Certification –</i>	27, 28, 31/07/2024 & 3/08/2024	Magnet Solusi Integra	Nadya Sio Uli Elisabet Simatupang
44	<i>Workshop COSO-2013 Internal Control Framework / COSO-2013 Internal Control Framework Workshop</i>	08-09/07/2024	The Center of Internal Audit Resources - Yayasan Pendidikan Internal Audit (CIAR- YPIA)	Ferdinandus Baskoro H.S.W
45	Pelatihan Financial Analysis / <i>Financial Analysis Training</i>	18-19/07/2024	DANAREKSA	Nadia Nurtanti
46	Pelatihan Financial Analysis / <i>Financial Analysis Training</i>	18-19/07/2024	DANAREKSA	Gita Ayu Kesuma
47	Pelatihan <i>Risk Modelling (Risk Conference Subklaster Konstruksi Konsultan Karya 2024) / Risk Modelling (Risk Conference – Construction Consultant Subcluster 2024)</i>	23-24/07/2024	RAP	Eko Budiono
48	Pelatihan <i>Risk Modelling (Risk Conference Subklaster Konstruksi Konsultan Karya 2024) / Risk Modelling (Risk Conference – Construction Consultant Subcluster 2024)</i>	23-24/07/2024	RAP	Marlena Puspitasari
49	Pelatihan <i>Risk Modelling (Risk Conference Subklaster Konstruksi Konsultan Karya 2024) / Risk Modelling (Risk Conference – Construction Consultant Subcluster 2024)</i>	23-24/07/2024	RAP	Farah Fauziyah
50	Pelatihan Finon / <i>Finon Training</i>	24-26/07/2024	DANAREKSA	Agung Yudianto Safi
51	Pelatihan Finon / <i>Finon Training</i>	24-26/07/2024	DANAREKSA	Adi Setio
52	Pelatihan Financial Modelling / <i>Financial Modelling Training</i>	29-31/07/2024	DANAREKSA	Miftahul Arifin
53	Pelatihan & Sertifikasi Dasar-Dasar Audit / <i>Basic Audit Training & Certification</i>	5-14/08/2024	PPAK	Marlena Puspitasari
54	<i>Online Training Legal Officer Perusahaan / Online Training for Corporate Legal Officer</i>	26-29/08/2024	Media SDM Indonesia	Bintang Rosa Tabitha
55	<i>Online Training Legal Officer Perusahaan / Online Training for Corporate Legal Officer</i>	26-30/08/2024	PPHBI	Mellany Ayu Susanto

No No	Nama Pelatihan/Pendidikan Name of Training/Seminar	Tanggal Pelaksanaan Date	Penyelenggara Organizer	Nama Peserta Names of Participants
56	Sertifikasi Marketing Communication Officer / Marketing Communication Officer Certification	31/08/2024 1&7/09/2024	Magnet Solusi Integra	Kinanti Cahyani Hasna
57	Sertifikasi CRGP / CRGP Certification	28-29/08/2024	RAP	Fajar Rahwinto Soeharto
58	Sertifikasi CRMO / CRMO Certification	21-23/11/2024	RAP	Miftahul Arifin
59	Sertifikasi CRMO / CRMO Certification	6-9/08/2024	RAP	Gagah Guntur Aribowo
60	Elevator Pitch / Elevator Pitch	9-10/10/2024	DLI	Ferdinandus Baskoro
61	Elevator Pitch / Elevator Pitch	9-10/10/2024	DLI	Gagah Guntur Aribowo
62	Pelatihan Sertifikasi QIA KSPI Pra Managerial / QIA Certification Training – KSPI Pre-Managerial	2-7/09/2024	YPIA	Ferdinandus Baskoro
63	Sertifikasi Public Speaking / Public Speaking Certification	7-8/09/2024 & 21/09/2024	Magnet Solusi Integra	Maria Berliana Rismauli Sitanggang
64	Pembuatan SKP & Lisensi AK3U Kemnaker RI an Syifa Afia Rizfahphi / SKP Preparation & AK3U License (Ministry of Manpower RI) on behalf of Syifa Afia Rizfahphi	10/13/2024	Mutiara Mutu Sertifikasi	Syifa Afia Rizfahphi
65	Perpanjangan lisensi sertifikat Damkar dan P3K DSI / Renewal of Fire Safety and First Aid Certification – DSI	10/29/2024	Nafisa Katiga Semesta	Fandi Akhmad Akbar dan Nisa Shafira
66	Sertifikasi CRMP / CRMP Certification	4-7/11/2024	RAP	Farah Fauziyah
67	Pelatihan Strategi Penyusunan Program Kerja CSR & Laporan Praktik Terbaik / Training on Strategy for Developing CSR Work Program & Best Practice Reports	22-23/11/2024	Media SDM Indonesia	Amilia Fahma Kusumawardhani
68	Sertifikat Auditor SMK3 / SMK3 Auditor Certificate	18 - 22 Nov 2024	Mutiara Mutu Sertifikasi	Syifa Afia Rizfahphi

Biaya Pengembangan Kompetensi Tahun 2024

Competency Development Fee in 2024

Pada tahun 2024, Perseroan mengalokasikan anggaran biaya investasi untuk pengelolaan sumber daya manusia sebesar Rp300.000.000 dan terealisasi sebesar Rp202.679.530. Realisasi biaya tersebut mengalami penurunan dibandingkan dengan tahun 2023, di mana realisasi dana pengembangan kompetensi tercatat sebesar Rp214.331.702,-. Perubahan ini sejalan dengan implementasi strategi pengembangan kompetensi yang berbeda antara tahun 2024 dan 2023, yang disesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan Perseroan yang terus berkembang.

In 2024, the Company allocated an investment budget for human resource management amounting to Rp300,000,000 and realised Rp202,679,530. The realisation of these costs decreased compared to 2023, where the realisation of competency development funds was recorded at Rp214,331,702. This change aligns with the implementation of a different competency development strategy between 2024 and 2023, which has been adjusted to accommodate the Company's evolving dynamics and needs.

Rekrutmen Karyawan

Employee Recruitment

Perkembangan dinamika bisnis dan ekonomi mendorong Perseroan untuk menyadari pentingnya pemenuhan kebutuhan Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas dan jumlahnya proporsional. Oleh karena itu, Perseroan melaksanakan penerimaan karyawan melalui proses rekrutmen yang terstruktur dengan baik. Penambahan karyawan tidak hanya bertujuan untuk mengisi kekosongan posisi yang tersedia, tetapi juga untuk melakukan sinkronisasi jabatan di internal Perseroan, guna memastikan bahwa struktur organisasi berjalan secara efektif dan mendukung pencapaian tujuan strategis perusahaan.

The dynamic developments in business and the economy have prompted the Company to recognise the importance of fulfilling the need for qualified human resources in proportionate numbers. Therefore, the Company conducts employee recruitment through a well-structured recruitment process. The addition of employees is not only aimed at filling vacant positions but also at synchronising roles within the Company to ensure that the organisational structure operates effectively and supports the achievement of the Company's strategic objectives.

Mekanisme Rekrutmen Karyawan

Employee Recruitment Mechanism

Dalam proses penerimaan karyawan baru, Perseroan mencari individu yang memiliki kemampuan serta karakteristik yang sesuai dengan spesifikasi posisi yang dibutuhkan. Fokus utama adalah pada kompetensi, yang dilihat melalui kualifikasi dan keahlian tertentu yang relevan dengan posisi yang tersedia. Kualifikasi tersebut kemudian disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing Unit Kerja atau Unit Bisnis, serta perencanaan sumber daya manusia (*manpower planning*) yang telah ditetapkan sebelumnya. Proses penerimaan karyawan baru di Perseroan juga selalu menjunjung tinggi prinsip keterbukaan, kewajaran, dan kesetaraan, memastikan bahwa setiap individu mendapatkan kesempatan yang adil dan transparan.

In the process of recruiting new employees, the Company seeks individuals who possess the abilities and characteristics that match the specifications of the position required. The main focus is on competence, which is assessed through qualifications and specific skills relevant to the available position. These qualifications are then adjusted to the needs of each Work Unit or Business Unit, as well as the previously established manpower planning. The new employee recruitment process at the Company also upholds the principles of openness, fairness, and equality, ensuring that every individual receives a fair and transparent opportunity.

Jumlah Rekrutmen Karyawan Baru Tahun 2024

Number of New Employee Recruitments in 2024

Tahun Year	2024	2023	2022
Orang People	4	11	10

Tingkat Perputaran Karyawan

Employee Turnover Rate

Tingkat perputaran karyawan merupakan indikator penting untuk mengukur kesehatan sebuah perseroan serta efektivitas dari strategi manajemen sumber daya manusia yang diterapkan. Perputaran karyawan pada umumnya dipengaruhi oleh jumlah karyawan yang diterima atau bergabung dengan Perseroan dan jumlah karyawan yang memutuskan untuk keluar, baik karena pengunduran diri, pensiun, maupun Pemutusan Hubungan Kerja (PHK).

Employee turnover rate is an important indicator for measuring the health of a company and the effectiveness of its human resource management strategies. Employee turnover is generally influenced by the number of employees hired or joining the company and the number of employees who decide to leave, whether due to resignation, retirement, or termination of employment (PHK).

Menurut UU Ketenagakerjaan, PHK adalah pengakhiran hubungan kerja karena alasan tertentu yang menyebabkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja/buruh dengan pengusaha. Secara umum, terdapat dua jenis PHK yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan, yaitu:

1. PHK sukarela, yang terjadi karena pengunduran diri (*resign*), memasuki masa pensiun, atau karena meninggal dunia.
2. PHK tidak sukarela, yang dilakukan karena alasan efisiensi Perseroan atau kondisi tertentu di luar kendali Perseroan yang memaksa untuk melakukan pemecatan (*force majeure*).

Kedua jenis PHK ini berpengaruh pada tingkat perputaran karyawan yang menjadi salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam evaluasi kinerja manajemen SDM.

According to the Labour Law, termination of employment is the termination of the employment relationship for specific reasons that result in the termination of rights and obligations between the worker/ employee and the employer. Generally, there are two types of termination of employment regulated in the Labour Law, namely:

1. Voluntary termination, which occurs due to resignation, reaching retirement age, or death.
2. Involuntary termination, which is carried out due to reasons of company efficiency or certain conditions beyond the company's control that force the company to dismiss employees (*force majeure*).

Both types of termination have an impact on employee turnover, which is one of the aspects that needs to be considered in evaluating the performance of human resource management.

Data Perputaran Karyawan Tahun 2024

Data of Employee Turnover Rate in 2024

Keterangan Description	Jumlah Total
Mengundurkan Diri / Resigned	1
Pensiun / Retired	5
PHK / Laid-Off	0
Meninggal Dunia / Passed Away	0
Habis Kontrak / End of Contract	1
Jumlah / Total	7

Kebijakan Kesetaraan Gender

Gender Equality Policy

Perseroan berkomitmen untuk senantiasa menjunjung tinggi asas kesetaraan dalam kesempatan kerja di lingkungan Perseroan. Lebih dari itu, Perseroan membuka kesempatan yang sama bagi seluruh karyawan untuk berkarya dan meraih jenjang karier tanpa memandang jenis kelamin, suku, agama, atau faktor lainnya yang tidak berkaitan dengan profesionalisme seseorang.

Komitmen ini tercermin dalam penerapan keberagaman gender yang seimbang di setiap posisi, baik di tingkat manajemen maupun operasional lapangan. Perseroan meyakini bahwa kebijakan kesetaraan gender bukan hanya soal mematuhi hukum yang berlaku, tetapi juga tentang menciptakan lingkungan kerja yang nyaman, bebas dari diskriminasi, dan memberdayakan semua karyawan. Pendekatan ini tidak hanya meningkatkan moral karyawan, tetapi juga memperkuat loyalitas serta membantu perusahaan dalam menarik dan mempertahankan bakat-bakat terbaik di pasar kerja yang kompetitif.

Secara keseluruhan, dampak positif dari komitmen kesetaraan gender di Perseroan terlihat dari komposisi karyawan pada tahun 2024, di mana persentase karyawan perempuan lebih besar dibandingkan dengan tahun 2023, menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam menciptakan lingkungan kerja yang inklusif dan berkeadilan.

The Company is committed to upholding the principle of equality in employment opportunities within the Company. Furthermore, the Company provides equal opportunities for all employees to work and advance their careers regardless of gender, ethnicity, religion, or other factors unrelated to professional competence.

This commitment is reflected in the balanced gender diversity in every position, both at the management and operational levels. The Company believes that gender equality policies are not merely about complying with applicable laws, but also about creating a comfortable work environment free from discrimination and empowering all employees. This approach not only enhances employee morale but also strengthens loyalty and helps the company attract and retain top talent in a competitive job market.

Overall, the positive impact of the Company's commitment to gender equality is evident in the employee composition in 2024, where the percentage of female employees is higher than in 2023, indicating significant progress in creating an inclusive and equitable work environment.

Kebijakan Remunerasi

Remuneration Policy

Implementasi kebijakan remunerasi yang efektif dapat membantu Perseroan dalam menarik, mempertahankan, dan mengelola bakat terbaik, serta memotivasi karyawan untuk mencapai kinerja yang optimal. Dalam penerapannya, Perseroan memberikan remunerasi yang disesuaikan dengan jabatan atau posisi masing-masing karyawan. Kebijakan ini merujuk pada Peraturan Direksi melalui memo Dinas No. 013/MD/IKA/2019 tentang Penetapan Standarisasi Gaji Karyawan Kontrak PT Indra Karya (Persero), No. 018/MD/IKA/2018 tentang Kompensasi Fasilitas Kendaraan Roda 4 (empat), serta Penetapan Pemakaian Pulsa Telepon Genggam/Handphone No. 015/MD/IKA/2017 tentang Penerimaan Gaji Karyawan Tetap untuk Pengelola Proyek-Proyek Mandiri.

Adapun komponen remunerasi yang diterapkan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

The implementation of an effective remuneration policy can help the Company attract, retain, and manage the best talent, as well as motivate employees to achieve optimal performance. In its implementation, the Company provides remuneration tailored to the position or role of each employee. This policy is based on the Board of Directors' Regulation through Memorandum No. 013/MD/IKA/2019 regarding the Establishment of Standardised Salaries for Contract Employees of PT Indra Karya (Persero), No. 018/MD/IKA/2018 on Compensation for Four-Wheeled Vehicle Facilities, and the Determination of Mobile Phone/Handphone Credit Usage No. 015/MD/IKA/2017 on the Receipt of Salaries for Permanent Employees Managing Independent Projects.

The remuneration components applied by the Company are as follows:

Jenis Remunerasi Remuneration Type	Penerima Receiver
Gaji Pokok/Merit / Basic Salary/Merit	Seluruh karyawan / All employee
Bonus Tahunan / Annual Bonus	Seluruh karyawan / All employee
Asuransi BPJS Kesehatan / BPJS Health Insurance	Seluruh karyawan / All employee
Asuransi BPJS Ketenagakerjaan / BPJS Employment Insurance	Seluruh karyawan / All employee
Tunjangan Staff / Staff Benefit	Seluruh karyawan / All employee
Tunjangan Sosial / Social Benefit	Seluruh karyawan / All employee
Tunjangan Kesejahteraan / Welfare Benefit	Karyawan tetap / Permanent employee
Tunjangan Hari Raya / Holiday Benefit	Seluruh karyawan / All employee
Uang Cuti / Leave Benefit	Karyawan tetap / Permanent employee
Tunjangan Transportasi / Transportation Benefit	General Manager dan Kepala Biro / General Manager and Bureau Head

Rencana Pengembangan Kompetensi Karyawan Tahun 2025

Employee Competency Development Plant for 2025

Investasi dalam rencana pengembangan karyawan memberikan peluang besar untuk menciptakan kesiapan Perseroan dalam menghadapi persaingan bisnis yang semakin kompetitif di masa mendatang. Oleh karena itu, pengembangan karyawan memiliki peran yang sangat penting dalam kesuksesan jangka panjang Perseroan. Dengan perencanaan yang tepat dan optimal, Perseroan dapat mencapai keberhasilan dalam membentuk sumber daya manusia yang inovatif dan kreatif. Hal ini menjadi kesempatan strategis bagi Perseroan untuk menjaga keberlanjutan dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki.

Adapun pengembangan sumber daya manusia yang dilakukan perseroan, sebagai berikut:

- Penyelesaian Transformasi Pengelolaan Human Capital sesuai Roadmap SDM dengan capaian level Good Practice dalam standar pengelolaan SDM di tahun 2025 yang tertera pada pengelolaan organisasi SDM dan telah menjadi inisiatif strategis perseroan.

Investing in employee development plans provides a great opportunity to prepare the Company to face increasingly competitive business competition in the future. Therefore, employee development plays a very important role in the long-term success of the Company. With proper and optimal planning, the Company can achieve success in developing innovative and creative human resources. This is a strategic opportunity for the Company to maintain the sustainability and quality of its human resources.

The human resource development carried out by the company is as follows:

- Completion of Human Capital Management Transformation in accordance with the HR Roadmap with the achievement of the Good Practice level in HR management standards in 2025 which is stated in the management of the HR organisation and has become a strategic initiative of the company.

- Menyampaikan *monitoring* dan laporan demografi pegawai dengan tujuan untuk pengelolaan perusahaan yang efisien dan peningkatan efektivitas pemanfaatan SDM.
- Pelaporan progress kajian dan/atau rencana implementasi *Talent Management* meliputi *Talent Management*, *Successor Directors*, dan *program talent mobility*.
- Penerapan *Talent Mapping*, *Workload Analysis*, *Appraisal 360* dan rangka penilaian kinerja (*performance*) pegawai.
- Pemenuhan kuantitas dan kualitas Data Talenta (Direksi/BoD dan BoD-1) dalam *Talent Pool* Kementerian BUMN. Serta mendukung implementasi *Program Talent Mobility* untuk mempersiapkan talenta- talenta terbaik dalam menciptakan SDM unggul dan profesional di lingkungan Perseroan.
- Implementasi Sistem Kompensasi dan *Benefits* dengan sistem *Job Grading* agar tercipta sistem kompensasi yang adil dan jenjang karir yang memadai.
- Menerapkan KPI Individu untuk pegawai di seluruh unit kerja perusahaan dan personil dalam rangka penilaian *performance* pegawai dan penerapan sistem *reward* and *punishment*.
- Kenaikan gaji pokok berkala yang disesuaikan dengan peningkatan biaya hidup bagi seluruh pegawai sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
- Rekrutmen pegawai diprioritaskan untuk tenaga *engineer* sesuai dengan kebutuhan proyek. Desain Pembelajaran Adaptif (*Adaptive Learning*) dan Kerjasama dengan *Forum Human Capital Indonesia* (FHCI).
- Meningkatkan jumlah tenaga kerja bersertifikat keahlian profesi bagi seluruh pegawai sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kementerian Tenaga Kerja dan Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) maupun Peraturan Kementerian Pekerjaan Umum Nomor 14 tahun 2021 terkait Sertifikat Kompetensi Kerja (SKK) Konstruksi melalui Kerjasama Asosiasi Profesi.
- Menawarkan program pensiun dini kepada pegawai yang memiliki produktifitas rendah dan kompetensi menurun yang telah memenuhi syarat pensiun dini sesuai dengan Peraturan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- Penyempurnaan dan pemutakhiran data base pegawai dengan berbasis ERP.
- Mendorong pegawai bertindak lebih aktif dalam penerapan RWP (*Respectfull Work Place*).
- Menjaga rasio Perempuan dalam *nominated talent*, dengan target sebesar 20% dari total *talent* yang memegang kendali jabatan pada perusahaan yang tertera pada indikator KPI Pengembangan Talenta sejalan dengan *organization development* Perusahaan.
- Menjaga rasio *top talent* muda (≤ 42 tahun) dalam *nominated talent*, dengan target sebesar 20% dari total *top talent* yang menjabat pada level 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang tertera pada indikator KPI Pengembangan Talenta sejalan dengan *organization development* Perusahaan.
- *Delivering monitoring and employee demographic reports with the aim of efficient company management and increasing the effectiveness of HR utilisation.*
- *Reporting on the progress of Talent Management studies and/or implementation plans including Talent Management, Successor Directors, and talent mobility programmes.*
- *Implementation of Talent Mapping, Workload Analysis, Appraisal 360 and employee performance appraisal framework.*
- *Fulfilment of the quantity and quality of Talent Data (BoD and BoD-1) in the Talent Pool of the Ministry of SOEs. As well as supporting the implementation of the Talent Mobility Programme to prepare the best talents in creating superior and professional human resources within the Company.*
- *Implementation of Compensation and Benefits System with Job Grading system to create a fair compensation system and adequate career path.*
- *Implementing Individual KPIs for employees in all company work units and personnel in order to assess employee performance and implement a reward and punishment system.*
- *Periodic basic salary increases adjusted to the increase in the cost of living for all employees in accordance with applicable regulations.*
- *Employee recruitment is prioritised for engineers in accordance with project needs. Adaptive Learning Design and Cooperation with Forum Human Capital Indonesia (FHCI).*
- *Increase the number of certified workers with professional expertise for all employees in accordance with the Indonesian National Work Competency Standards (SKKNI) of the Ministry of Manpower and the National Professional Certification Agency (BNSP) as well as the Ministry of Public Works Regulation Number 14 of 2021 related to the Construction Work Competency Certificate (SKK) through Professional Association Cooperation.*
- *Offering early retirement programmes to employees who have low productivity and declining competence who have met the requirements for early retirement in accordance with the Collective Labour Agreement (CLA) Regulations.*
- *Enhancing and updating the ERP-based employee data base.*
- *Encouraging employees to act more actively in the implementation of RWP (Respectfull Work Place).*
- *Maintain the ratio of Women in nominated talent, with a target of 20% of the total talents who hold controlling positions in the company as stated in the Talent Development KPI indicator in line with the Company's organisation development.*
- *Maintain the ratio of young top talent (≤ 42 years old) in nominated talent, with a target of 20% of the total top talent serving at the level of 1 (one) level below the Board of Directors as stated in the Talent Development KPI indicator in line with the Company's organisation development.*

Teknologi Informasi

Information Technology

Dengan kemajuan teknologi informasi yang semakin pesat dan meningkatnya tingkat persaingan bisnis di era digital saat ini, Perseroan menyadari pentingnya untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan tersebut. Pengembangan teknologi informasi yang dilakukan bertujuan tidak hanya untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam setiap aspek operasional, tetapi juga untuk mendorong peningkatan kinerja yang lebih optimal di semua lini.

With the rapid advancement of information technology and increasing business competition in today's digital era, the Company recognises the importance of continuing to innovate and adapt to these changes. The development of information technology is aimed not only at improving effectiveness and efficiency in every aspect of operations, but also at driving more optimal performance across all lines.

Melalui pemanfaatan teknologi informasi yang canggih, Perseroan dapat memperkuat daya saingnya, meningkatkan kualitas layanan, serta mempercepat proses pengambilan keputusan yang lebih tepat dan akurat. Oleh karena itu, pengembangan teknologi informasi menjadi salah satu pilar utama yang mendukung Perseroan dalam meraih kinerja yang berkelanjutan dan mempertahankan posisinya di pasar yang semakin kompetitif.

Through the use of advanced information technology, the Company can strengthen its competitiveness, improve service quality, and accelerate the decision-making process to be more precise and accurate. Therefore, information technology development has become one of the main pillars supporting the Company in achieving sustainable performance and maintaining its position in an increasingly competitive market.

Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi

Information Technology Management Policy

Teknologi Informasi telah menjadi elemen yang sangat dinamis dan krusial dalam mendukung pertumbuhan sebuah perseroan. Konsep ini telah dipelajari dan dikaji secara mendalam oleh Perseroan dengan merumuskan kebijakan pengelolaan teknologi informasi yang sesuai dan efektif. Kebijakan tersebut diharapkan dapat memberikan dorongan yang signifikan bagi Perseroan untuk mencapai target pertumbuhannya, sekaligus meningkatkan ketahanan dalam menghadapi tantangan pasar yang terus berkembang.

Information Technology has become a highly dynamic and crucial element in supporting the growth of a company. This concept has been studied and examined in depth by the Company by formulating appropriate and effective information technology management policies. These policies are expected to provide a significant boost for the Company to achieve its growth targets, while increasing resilience in the face of evolving market challenges.

Tujuan Pengelolaan Teknologi Informasi

Information Technology Management Objectives

Efektivitas dan efisiensi operasional yang tercapai menjadi salah satu tujuan utama dari pengelolaan teknologi informasi di Perseroan. Selain itu, penguatan infrastruktur teknologi informasi diharapkan dapat membantu Perseroan untuk menghadapi tantangan pasar yang semakin kompetitif. Oleh karena itu, Perseroan telah menetapkan prioritas dan merancang program-program strategis khusus untuk pengelolaan Teknologi Informasi, dengan fokus-fokus yang telah dipertimbangkan dan dikaji secara mendalam sebelumnya. Program-program ini dirancang untuk memastikan bahwa teknologi informasi tidak hanya mendukung operasional sehari-hari, tetapi juga berperan sebagai pendorong utama dalam pencapaian tujuan jangka panjang Perseroan.

The effectiveness and efficiency of operations achieved are among the main objectives of information technology management at the Company. In addition, strengthening the information technology infrastructure is expected to help the Company face increasingly competitive market challenges. Therefore, the Company has set priorities and designed special strategic programmes for information technology management, with focuses that have been carefully considered and reviewed in advance. These programmes are designed to ensure that information technology not only supports daily operations but also plays a key role in achieving the Company's long-term goals.

Pihak Pengelola Teknologi Informasi

Parties Responsible In Managing Information Technology

Pengembangan Teknologi Informasi di Perseroan dikelola secara khusus oleh Unit *Management Information System (MIS)*, yang berada di bawah divisi *Human Capital Management, Corporate Transformation, dan Management Information System (MIS)*. Unit ini memiliki tanggung jawab utama dalam mengelola dan mengembangkan teknologi informasi, serta merancang dan melaksanakan rencana pengembangan teknologi informasi untuk masa mendatang. Dengan pengelolaan yang terfokus, unit ini berperan penting dalam memastikan bahwa teknologi informasi yang digunakan oleh Perseroan selalu relevan, efisien, dan mendukung transformasi serta inovasi dalam organisasi.

Information Technology Development in the Company is managed specifically by the Management Information System (MIS) Unit, which is under the Human Capital Management, Corporate Transformation, and Management Information System (MIS) divisions. This unit is primarily responsible for managing and developing information technology, as well as designing and implementing information technology development plans for the future. With focused management, this unit plays an important role in ensuring that the information technology used by the Company is always relevant, efficient, and supports transformation and innovation within the organisation.

Tugas Dan Tanggung Jawab Pengelola Teknologi Informasi

Duties and Responsibilities of Management of Information Technology

Sebagai divisi yang berperan langsung dalam pengelolaan teknologi informasi, Unit *Management Information System* (MIS) memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

Tugas

1. Sebagai pelaksana kepatuhan perusahaan di bidang teknologi atas penilaian terhadap KPI perseroan;
2. Sebagai penanggung jawab atas evaluasi kegiatan TI terhadap pelaksanaan teknologi dalam perseroan;
3. Melakukan analisis dan rencana jangka pendek, menengah dan panjang.

Tanggung Jawab

1. Melaksanakan implementasi rencana jangka pendek, menengah dan panjang atas kegiatan TI;
2. Melakukan evaluasi atas pelaksanaan program kerja dan melakukan pelaporan kepada atasan;
3. Melakukan usulan inovasi terhadap program kerja terkait teknologi.

As a division that plays a direct role in information technology management, the Management Information System (MIS) Unit has the following duties and responsibilities:

Duties

1. *As an implementer of the Company's compliance in the technology sector regarding the assessment of the Company's KPIs;*
2. *As the person responsible for evaluating IT activities regarding the implementation of technology within the Company;*
3. *Carrying out short, medium and long-term analyzes and plans.*

Responsibilities

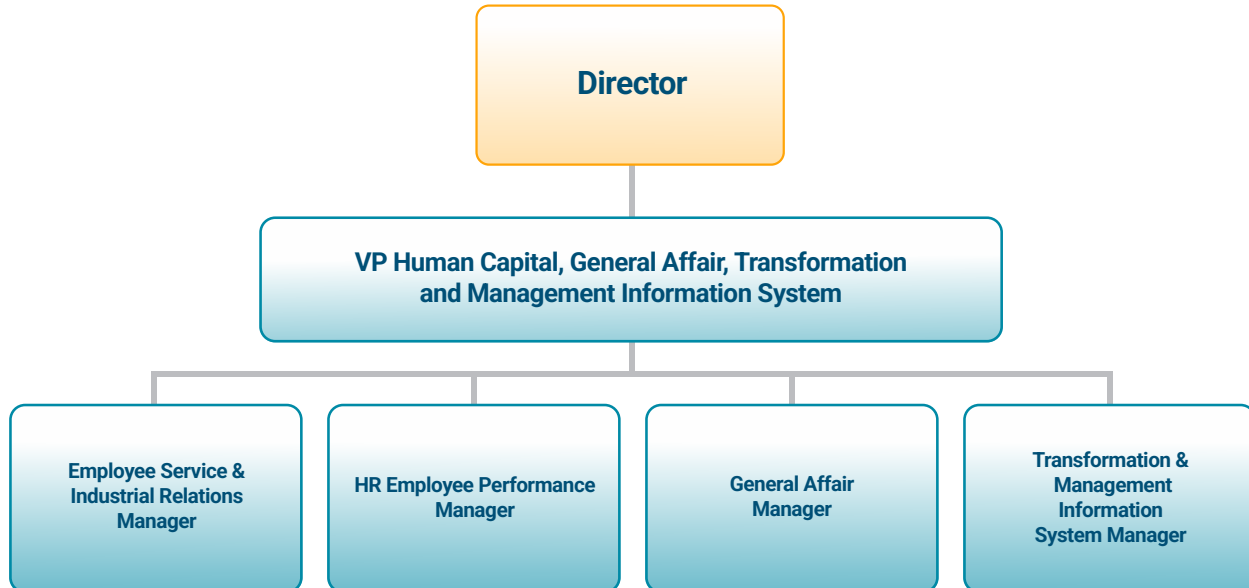
1. *Carry out the implementation of short, medium, and longterm plans for IT activities;*
2. *Evaluating the implementation of work programs and reporting to superiors;*
3. *Make innovation proposals for technology-related work programs.*

Struktur Tata Kelola Teknologi Informasi

Information Technology Governance Structure

Dalam pengelolaan teknologi informasi di Perseroan, terdapat struktur tata kelola yang dirinci sebagai berikut:

In the management of Information Technology in the Company, there is a governance structure which is detailed as follows:



Secara umum unit MIS memiliki 3 jenis kegiatan di antaranya:

1. Digitalisasi proses bisnis seperti Pembuatan sistem ERP (*Enterprises Resource Planning*).
2. Improvisasi Tata Kelola IT seperti pelaksanaan IT Governance.
3. Improvisasi Infrastruktur IT seperti Standarisasi peralatan kerja dan *licensed software* teknis maupun pendukung kinerja yang ada di seluruh Perusahaan.

In general, the MIS unit has 3 types of activities including:

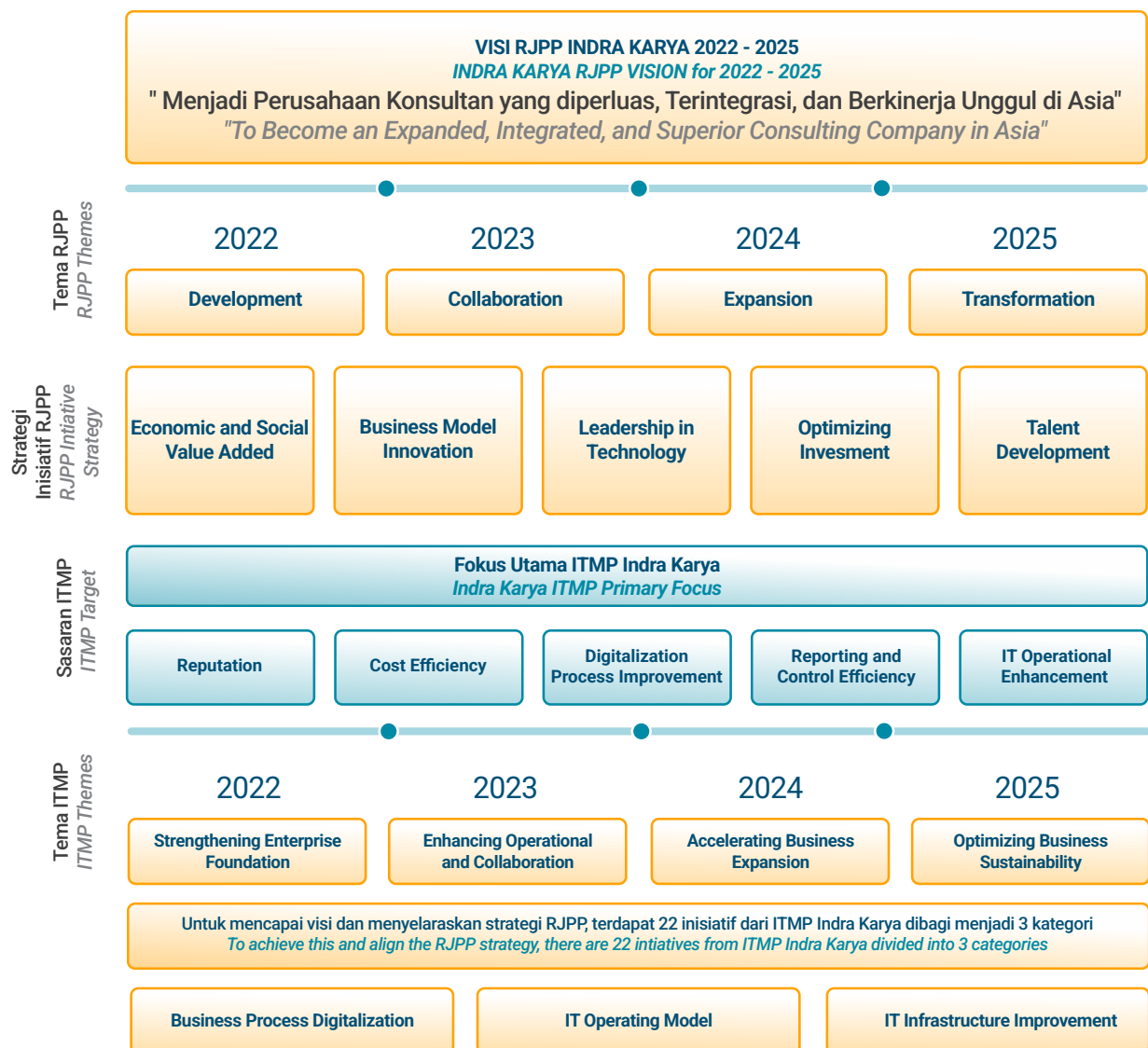
1. *Digitalization of business processes such as the creation of an ERP (*Enterprises Resource Planning*) system.*
2. *Improvising IT Governance such as implementing IT Governance.*
3. *Improvisation of IT Infrastructure such as standardization of work equipment and licensed technical software and performance support throughout the Company.*

Roadmap Pengembangan Teknologi Informasi

Information Technology Development Roadmap

Sebuah *roadmap* bertujuan untuk memberikan panduan jelas mengenai langkah-langkah yang perlu diambil untuk mencapai tujuan jangka panjang dalam pengelolaan teknologi informasi. Dalam konteks ini, Perseroan telah memastikan bahwa kebijakan pengelolaan teknologi informasi yang diterapkan sejalan dengan arahan yang diberikan oleh pemegang saham. Hal ini dituangkan dalam sebuah *roadmap* yang dirancang untuk memastikan pengelolaan teknologi informasi yang efektif dan strategis. Berikut adalah rincian *roadmap* yang telah disusun oleh Perseroan:

A *roadmap* aims to provide clear guidance on the steps that need to be taken to achieve long-term goals in information technology management. In this context, the Company has ensured that the information technology management policies implemented are in line with the directives given by the shareholders. This is outlined in a *roadmap* designed to ensure effective and strategic information technology management. The following are details of the *roadmap* prepared by the Company:



Portofolio Layanan Teknologi Informasi

Portfolio of Information Technology Services

No No	Kategori Kegiatan Activity Categories	Nama Kegiatan Activity Names	Detail Kegiatan Detail of Activity
1	Strategi Strategic	Pendampingan ERP Iksmart Iksmart ERP Assistance	Digitalisasi proses bisnis Digitalization of business processes
2	Operasi Pendukung Support Operational	IT Helpdesk IT Helpdesk	Mengelola kendala operasional terkait IT yang ada di perusahaan Managing IT-related operational constraints in the company

Portofolio Aplikasi

Application Portfolio

No No	Nama Aplikasi Application Name	Jenis Aplikasi Application Type	Rilis Release	Integrasi Integrated
1	Situs Web Perusahaan Company Website	Situs Web Website	In-House In-House	Public External Portal
2	IK Smart	Situs Web Website	Partner Partner	Device Android/IOS
3	Smart Water System	Situs Web Website	In-House In-House	Device IoT
4	E-PPID	Situs Web Website	In-House In-House	External

Portofolio Infrastruktur

Infrastructure Portfolio

No No	Nama Layanan Service Name	Target & Realisasi SLA SLA Target & Realization	Laporan Kinerja Performance Report
1	Domain dan Hosting Domain and Hosting	100%	Setiap Bulan Monthly
2	Server Pribadi Virtual Virtual Private Server	100%	Setiap Bulan Monthly
3	Internet Internet	100%	Setiap Bulan Monthly

Data Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2024

Information Technology Development Data for 2024

Dalam era Teknologi Informasi yang mendukung industri 4.0, Perseroan senantiasa berupaya untuk menyempurnakan teknologi yang dimiliki serta menghadirkan peralatan berbasis Teknologi Informasi guna memenuhi tuntutan pasar. Baik perangkat keras maupun perangkat lunak terus mengalami pengembangan dan peningkatan kualitas. Adapun pengembangan Teknologi Informasi yang dilakukan oleh Perseroan sepanjang tahun 2024 meliputi:

1. Pengembangan dan Implementasi ERP Fase 2 terkait FICO dan Nota Dinas Elektronik.
2. Pengembangan Fase 3 terkait e-Business, e-Procurement dan Integrasi Dashboard.

In the era of Information Technology that supports industry 4.0, the Company constantly strives to improve its technology and provide Information Technology-based equipment to meet market demands. Both hardware and software continue to undergo development and quality improvements. The Information Technology developments carried out by the Company throughout 2024 include:

1. Development and Implementation of ERP Phase 2 related to FICO and Electronic Memos.
2. Phase 3 Development related to e-Business, e-Procurement, and Dashboard Integration.

Kegiatan IT yang dilakukan di 2024

IT Activities Carried Out in 2024

No No	Kegiatan Activity	Jenis Kegiatan Type of Activity
1	Sinkronisasi Pedoman Kerja, Standar Operasi Prosedur (SOP), Tata Kelola TI dan Sistem Manajemen MLK3 dan SMAP pada Proses Bisnis Perusahaan <i>Synchronization of Work Guidelines, Standard Operating Procedures (SOP), IT Governance, and Management Systems (MLK3 and SMAP) within the Company's Business Processes</i>	Tata Kelola IT IT Governance
2	Pemasangan <i>credential</i> SSL di Server IKSMART <i>Installation of SSL Credentials on the IKSMART Server</i>	Tata Kelola IT IT Governance
3	Pemasangan <i>tools</i> Security Information and Event Management (SIEM) dan Extended Detection and Respons (XDR) di Server IKSMART <i>Installation of Security Information and Event Management (SIEM) and Extended Detection and Response (XDR) tools on the IKSMART Server</i>	Tata Kelola IT IT Governance
4	Pemasangan <i>tools</i> pengaman akses admin ke infrastruktur Server IKSMART <i>Installation of Admin Access Security Tools on IKSMART Server Infrastructure</i>	Tata Kelola IT IT Governance
5	Pelaksanaan Layanan Office 365 <i>Implementation of Office 365 Services</i>	Tata Kelola IT IT Governance
6	Langganan <i>Virtual Private Server, Domain</i> dan <i>Hosting</i> <i>Subscription to Virtual Private Server, Domain, and Hosting</i>	Tata Kelola IT IT Governance
7	Peningkatan Kualitas hasil Produksi Bisnis dan <i>Digital Security</i> menggunakan <i>Digital Signature & e-materai PRIVY</i> <i>Improvement of Business Production Quality and Digital Security using Digital Signature & PRIVY e-Stamp</i>	Tata Kelola IT IT Governance
8	Pelaksanaan Layanan dan Peningkatan Konektivitas Internet untuk seluruh Divisi <i>Implementation and Enhancement of Internet Connectivity Services for All Divisions</i>	Tata Kelola IT IT Governance

Biaya Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2024

Information Technology Development Costs in 2024

Selama tahun 2024, Perseroan mengalokasikan biaya sebesar Rp132,9 juta untuk mendukung pengembangan teknologi informasi, dengan rincian sebagai berikut:

During 2024, the Company allocated Rp132.9 million to support information technology development, with the following details:

Pengembangan Development	Biaya Cost
Pengembangan dan implementasi ERP fase 2 terkait FICO dan Nota Dinas Elektronik <i>Development and implementation of ERP Phase 2</i>	Rp132.904.774
Fase 3 <i>e-Business, e-Procurement</i> dan Integrasi <i>Dashboard</i> <i>Phase 3 of e-Business, e-Procurement, and Dashboard Integration</i>	

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi Tahun 2025

Information Technology Development Plan for 2025

Perseroan telah merencanakan program pengembangan Teknologi Informasi yang akan dilaksanakan pada tahun 2025 untuk mendukung pengelolaan Teknologi Informasi. Berikut adalah rincian rencana program pengembangan teknologi informasi untuk tahun 2025:

- Melaksanakan dan memastikan *Master Plan* Teknologi Informasi (*Masterplan TI*) yang telah dimiliki Perusahaan untuk periode 2022-2025 sudah sesuai dengan Peraturan Menteri

The Company has planned an Information Technology development programme that will be implemented in 2025 to support Information Technology management. The following are details of the information technology development programme plan for 2025:

- Implement and ensure that the Information Technology Master Plan (IT Masterplan) that the Company has for the period 2022-2025 is in accordance with the Regulation of the Minister of*

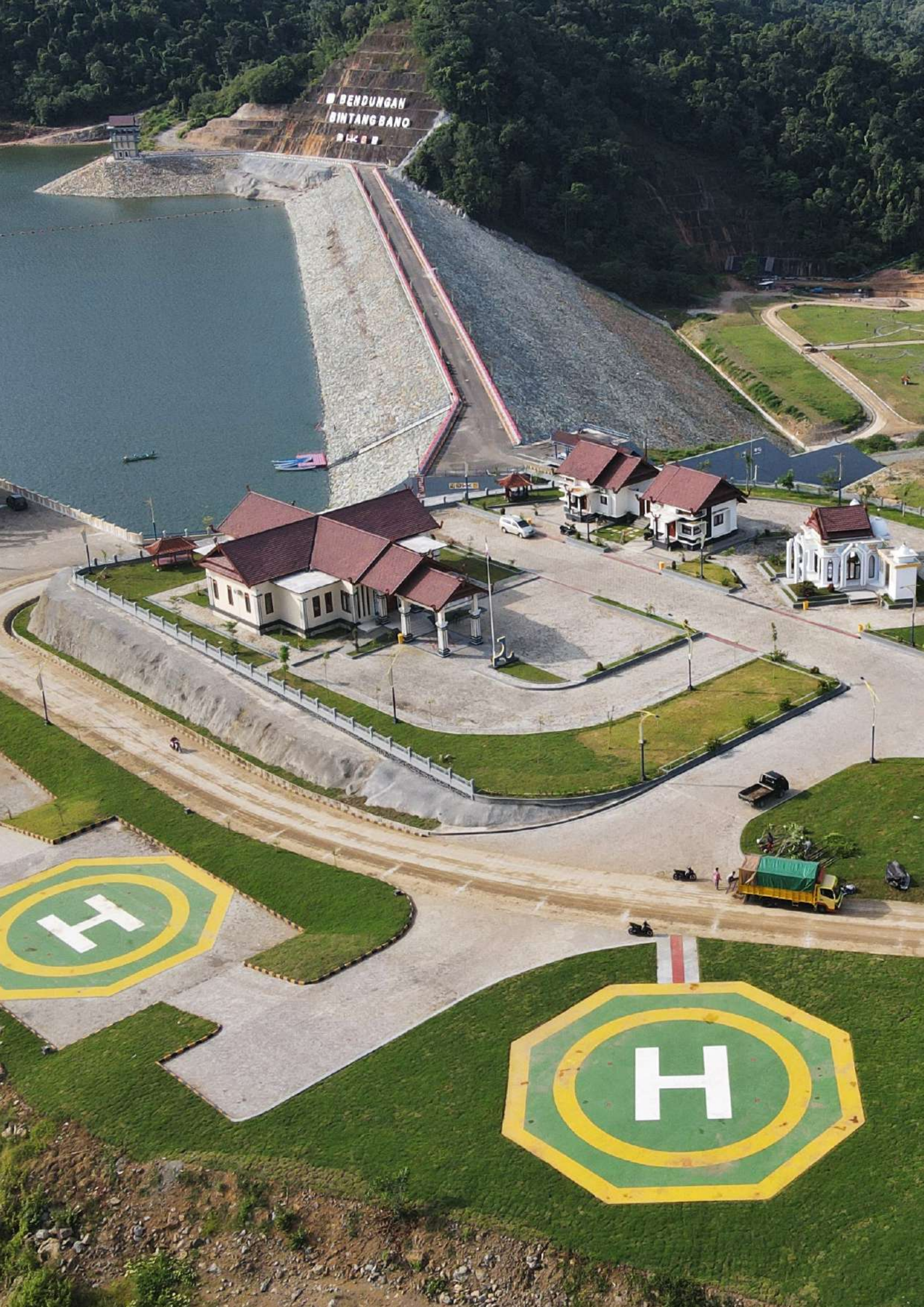
BUMN dengan No. PER- 02/MBU/2013 Pasal 3 tentang Master Plan TI dan menyampaikan progress implementasi program dalam Laporan Manajemen Triwulanan dan Tahunan.

- Melakukan penguatan fungsi *Business Process Digitalization* yang terdapat pada IT Masterplan diantaranya keberlanjutan proses *Enterprise Resource Planning* (ERP), melakukan integrasi sistem external dan internal dan akan menjadikan sentralisasi proses kegiatan Perusahaan. Serta pengelolaan data yang ada di sistem akan dijadikan sebagai bagian dari kegiatan *Big Data* dan komputasi *Machine Learning*.
- Melakukan penguatan fungsi *Operating Model Improvement* yang ada di IT Masterplan diantaranya sebagai penunjang utama pelaksanaan proses bisnis di Perusahaan, serta penunjang dalam fungsi kegiatan administrasi. Diantaranya melalui penguatan organisasi IT (*man power planning*) dan pelaksanaan tatakelola IT.
- Melakukan penguatan fungsi *Infrastructure Improvement* yang ada di IT Masterplan diantaranya adalah sentralisasi proses *procurement*, *controlling* dan pelaksanaan tindakan preventive serta pelaksanaan prosedur yang berhubungan dengan fungsi ini.
- Pelaksanaan rencana pemenuhan gap terhadap IT Maturity yang akan dilakukan untuk kegiatan sentralisasi proses bisnis menggunakan IKSMART untuk semua fitur, penguatan digitalisasi berupa kegiatan *Shared Services* dan pelaksanaan tata kelola IT di Perusahaan.
- Pelaksanaan rencana pemenuhan gap serta melakukan penguatan terhadap program Transformasi yang ada di Perusahaan yang berhubungan dengan Transformasi Digital (INDI 4.0) untuk kegiatan Budaya Kerja Digital pada seluruh bidang yang ada di Perusahaan, serta menerapkan prinsip Adaptif dan Kolaboratif.
- Berpartisipasi dalam Program Digital Talent BUMN dengan menugaskan pegawai dengan capaian target kepesertaan minimal sebanyak 7% dari jumlah keseluruhan SDM (organik dan non-organik).
- Penguatan kegiatan Transformasi melalui aksi korporasi Perusahaan dengan cara Pelaksanaan Pedoman dan Peraturan Perusahaan, serta bersifat sentralisasi fungsi prosedur yang berpedoman kepada aturan yang sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku serta dilakukannya penerapan KPI (*Key Performance Indicator*) kepada seluruh Pegawai Perusahaan.
- Implementasi agenda Transformasi didalam semua KPI (*Key Performance Indicator*) individu yang harus dilaksanakan oleh seluruh Personil, sehingga menguatkan kesadaran seluruh personil dalam mematuhi regulasi dan peraturan perusahaan. Diantaranya melakukan penguatan terhadap budaya kerja digital.
- Memperkuat keamanan digital/*Cyber Security* seluruh aspek digital Perusahaan untuk memberikan kepastian pengelolaan data digital tetap terjaga dan terkelola dengan baik.
- Menerapkan budaya Inovasi aktif menyeluruh yang hadir di Perusahaan, baik secara internal antar Unit Kerja, serta berkolaborasi dengan Dunia Pendidikan/Institusi Kampus. Baik dalam bentuk program inkubator bisnis, pengembangan kemampuan personil, yang akan mengarah kedalam evolusi fungsi IT sebagai penghasil *Revenue*.
- Membangun komunikasi aktif dengan Kedeputan SDM & TI Cq.Kementerian Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham (*Shareholders*) untuk mempersiapkan perangkat dan mekanisme sistem dalam rangka Transformasi.

SOEs with No. PER- 02/MBU/2013 Article 3 concerning IT Master Plan and submit the progress of programme implementation in the Quarterly and Annual Management Reports.

- Strengthening the *Business Process Digitalisation* function contained in the IT Master Plan including the continuation of the *Enterprise Resource Planning* (ERP) process, integrating external and internal systems and will centralise the Company's activity processes. As well as data management in the system will be used as part of *Big Data* activities and *Machine Learning* computing.
- Strengthening the *Operating Model Improvement* function in the IT Masterplan, including as the main support for the implementation of business processes in the Company, as well as support in the function of administrative activities. This includes strengthening the IT organisation (*man power planning*) and the implementation of IT governance.
- Strengthening the *Infrastructure Improvement* function in the IT Masterplan, including centralising the *procurement* process, *controlling* and implementing preventive actions and implementing procedures related to this function.
- Implementation of gap filling plans for IT Maturity which will be carried out for centralising business processes using IKSMART for all features, strengthening digitalisation in the form of *Shared Services* activities and implementing IT governance in the Company.
- Implementation of the gap fulfilment plan and strengthening the existing Transformation programme in the Company related to Digital Transformation (INDI 4.0) for Digital Work Culture activities in all fields in the Company, as well as applying Adaptive and Collaborative principles.
- Participating in the SOE Digital Talent Programme by assigning employees with a minimum participation target of 7% of the total number of human resources (organic and non-organic).
- Strengthening Transformation activities through the Company's corporate actions by implementing Company Guidelines and Regulations, as well as centralising procedural functions that are guided by rules in accordance with applicable laws and regulations and implementing KPI (*Key Performance Indicator*) to all Company employees.
- Implementation of the Transformation agenda in all individual KPIs (*Key Performance Indicator*) that must be implemented by all personnel, thus strengthening the awareness of all personnel in complying with company regulations and regulations. Among them is strengthening the digital work culture.
- Strengthening digital security / cyber security of all digital aspects of the Company to provide certainty that digital data management is maintained and well managed.
- Implementing a comprehensive culture of active innovation present in the Company, both internally between Work Units, as well as collaborating with the World of Education / Campus Institutions. Both in the form of business incubator programmes, personnel capability development, which will lead to the evolution of the IT function as a revenue generator.
- Build active communication with the Deputy of HR & IT Cq. Ministry of State-Owned Enterprises as Shareholders to prepare tools and system mechanisms in the framework of Transformation.







INDRA KARYA

05

ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

*MANAGEMENT DISCUSSION AND
ANALYSIS*



Tinjauan Perekonomian

Economic Review

Pada tahun 2024, perekonomian global menghadapi berbagai dinamika yang kompleks, yang turut memberikan dampak signifikan terhadap perkembangan ekonomi dunia. Ketidakpastian yang semakin meningkat, baik di sektor politik, ekonomi, maupun sosial, menjadi tantangan besar yang harus dihadapi oleh banyak negara. Ketegangan geopolitik, seperti ketegangan antara negara besar dan kebijakan proteksionisme yang semakin ketat, turut menghambat kelancaran perdagangan global, memperlambat laju pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan ketidakpastian di pasar finansial dan pasar komoditas.

Menurut *World Economic Outlook (WEO)* yang dirilis oleh *International Monetary Fund (IMF)* pada Oktober 2024, diperkirakan pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2024 akan mencapai angka 3,2%. Meskipun angka ini mencerminkan stabilitas, laju pertumbuhannya masih terbilang lambat dan tidak cukup kuat untuk mengatasi tantangan ekonomi global yang sedang berlangsung. Negara-negara maju, terutama di Eropa dan Amerika Utara, diperkirakan akan mengalami laju pertumbuhan yang moderat karena dampak dari kebijakan moneter ketat dan inflasi yang lebih tinggi. Sebaliknya, negara-negara berkembang, khususnya di Asia dan Afrika, diperkirakan akan mencatatkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Negara-negara seperti India dan beberapa negara di Asia Tenggara diperkirakan akan terus tumbuh lebih cepat, didorong oleh konsumsi domestik yang kuat, peningkatan investasi infrastruktur, dan potensi pasar yang besar di kawasan ini.

Perekonomian negara berkembang diprediksi akan melanjutkan pemulihan yang lebih kuat, dengan fokus utama pada investasi infrastruktur dan peningkatan perdagangan antarnegara. Negara-negara ini juga akan semakin mengandalkan sektor-sektor yang berbasis pada konsumerisme domestik, seperti sektor teknologi, manufaktur, dan energi terbarukan. Peningkatan konektivitas antar negara melalui pembangunan infrastruktur dan peningkatan kerjasama perdagangan akan menjadi kunci penting dalam mendorong perekonomian negara berkembang.

Di sisi lain, perekonomian Indonesia menunjukkan kinerja yang cukup positif meskipun di tengah tantangan yang datang dari ekonomi global. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) sebesar 5,03% pada tahun 2024. Pertumbuhan ini lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata global, mencerminkan ketahanan ekonomi Indonesia di tengah gejolak eksternal. Salah satu faktor utama yang mendukung stabilitas ekonomi Indonesia adalah konsumsi domestik yang tetap kuat. Sektor investasi juga menunjukkan angka yang positif, terutama dalam sektor infrastruktur yang menjadi prioritas nasional.

In 2024, the global economy will face various complex dynamics that will have a significant impact on world economic development. Increasing uncertainty in the political, economic and social sectors will be a major challenge for many countries. Geopolitical tensions, such as tensions between major countries and increasingly strict protectionist policies, are hampering the smooth flow of global trade, slowing economic growth, and creating uncertainty in financial and commodity markets.

According to the World Economic Outlook (WEO) released by the IMF in October 2024, global economic growth in 2024 is expected to reach 3.2%. Although this figure reflects stability, the growth rate is still relatively slow and insufficient to overcome the ongoing global economic challenges. Developed countries, particularly in Europe and North America, are expected to experience moderate growth due to the impact of tight monetary policies and higher inflation. In contrast, developing countries, particularly in Asia and Africa, are expected to record higher growth. Countries such as India and several countries in Southeast Asia are expected to continue to grow faster, driven by strong domestic consumption, increased infrastructure investment, and the region's large market potential.

Developing economies are predicted to continue their stronger recovery, with a primary focus on infrastructure investment and increased trade between countries. These countries will also increasingly rely on sectors based on domestic consumption, such as technology, manufacturing, and renewable energy. Increased connectivity between countries through infrastructure development and enhanced trade cooperation will be key to boosting the economies of developing countries.

Meanwhile, Indonesia's economy has shown positive performance despite challenges from the global economy. Based on data from the Central Statistics Agency (BPS), Indonesia managed to record a Gross Domestic Product (GDP) growth of 5.03% in 2024. This growth is higher than the global average, reflecting Indonesia's economic resilience amid external turmoil. One of the main factors supporting Indonesia's economic stability is strong domestic consumption. The investment sector also showed positive figures, especially in the infrastructure sector, which is a national priority.

Tinjauan Industri

Industrial Review

Di tengah tantangan global seperti inflasi dan ketegangan geopolitik, sektor infrastruktur Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif, didorong oleh kebijakan pemerintah yang fokus pada pemerataan pembangunan dan pemulihan pasca-pandemi. Hal ini tercermin dalam alokasi anggaran yang signifikan dan kebijakan strategis yang diambil pemerintah pada sektor infrastruktur dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2024. Anggaran ini digunakan untuk berbagai proyek strategis, termasuk pembangunan bendungan, jaringan irigasi, jalan tol, dan perumahan, yang bertujuan untuk meningkatkan konektivitas, ketahanan pangan, dan kualitas hidup masyarakat.

Pada tahun 2024, sektor konstruksi Indonesia menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS), kontribusi sektor konstruksi terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tercatat sebesar 10,43% pada triwulan IV tahun 2024. Angka ini menunjukkan posisi sektor konstruksi sebagai sektor keempat terbesar dalam perekonomian Indonesia, setelah industri pengolahan, perdagangan, dan pertanian.

Secara keseluruhan, sektor konstruksi tidak hanya berkontribusi signifikan terhadap PDB, tetapi juga menjadi pendorong utama dalam penciptaan lapangan kerja dan peningkatan kualitas infrastruktur nasional. Dengan alokasi anggaran yang terus meningkat dan fokus pada proyek-proyek strategis, sektor infrastruktur diharapkan dapat mempertahankan peran vitalnya dalam mendukung pertumbuhan ekonomi Indonesia di masa mendatang.

Amid global challenges such as inflation and geopolitical tensions, Indonesia's infrastructure sector is showing positive developments, driven by government policies that focus on equitable development and post-pandemic recovery. This is reflected in the significant budget allocation and strategic policies adopted by the government for the infrastructure sector in the 2024 State Budget (APBN). This budget is allocated for various strategic projects, including the construction of dams, irrigation networks, toll roads, and housing, aimed at improving connectivity, food security, and the quality of life for the community.

In 2024, Indonesia's construction sector made a significant contribution to the national economy. According to data from the Central Statistics Agency (BPS), the construction sector's contribution to Indonesia's Gross Domestic Product (GDP) was recorded at 10.43% in the fourth quarter of 2024. This figure highlights the construction sector's position as the fourth-largest sector in Indonesia's economy, following manufacturing, trade, and agriculture.

Overall, the construction sector not only contributes significantly to GDP but also serves as a key driver in job creation and the improvement of national infrastructure quality. With increasing budget allocations and a focus on strategic projects, the infrastructure sector is expected to maintain its vital role in supporting Indonesia's economic growth in the future.

Tinjauan Operasi

Operational Review

Dengan pengalaman lebih dari 60 tahun, PT Indra Karya (Persero) telah membangun reputasi sebagai mitra tepercaya dalam mendukung proyek-proyek strategis nasional Indonesia. Kontribusi signifikan yang diberikan antara lain peran aktif dalam pembangunan lebih dari 60% bendungan di Indonesia. Selain itu, perseroan juga terlibat dalam berbagai proyek infrastruktur penting, seperti pembangunan jaringan transportasi untuk meningkatkan mobilitas dan aksesibilitas, pengembangan fasilitas pembangkit energi, termasuk energi terbarukan, serta inisiatif dalam pengelolaan air bersih.

Perseroan mengoperasikan tiga lini bisnis utama, yaitu *engineering*, *developer*, dan *industry*. Rincian lebih lanjut mengenai produk dan jasa dapat ditemukan pada bab Profil Perusahaan. Dalam hal ini, perseroan memiliki kekuatan utama pada lini *engineering*, khususnya dalam pengembangan sumber daya air, transportasi, dan energi. Seiring perkembangannya, perseroan juga berkontribusi dalam lini *developer*, terutama pada sektor sumber daya air, melalui penyediaan, pengembangan, dan pengelolaan air bersih baik untuk skala unit maupun kawasan.

With more than 60 years of experience, PT Indra Karya (Persero) has built a reputation as a trusted partner in supporting Indonesia's national strategic projects. Significant contributions include an active role in the construction of more than 60% of dams in Indonesia. In addition, the company is also involved in various important infrastructure projects, such as the construction of transportation networks to improve mobility and accessibility, the development of energy generation facilities, including renewable energy, as well as initiatives in clean water management.

The company operates three main business lines, namely engineering, development, and industry. Further details on products and services can be found in the company Profile section. In this regard, the company has its core strength in the engineering line, particularly in the development of water resources, transportation, and energy. As it has grown, the company has also contributed to the developer line, especially in the water resources sector, through the provision, development, and management of clean water for both unit and regional scales.

Berikut adalah uraian terkait tender dan kontrak pekerjaan, produksi dan pendapatan, serta profitabilitas perseroan pada tahun 2024:

The following is a description of the company's tenders and work contracts, production and revenue, as well as profitability in 2024:

Tender dan Kontrak Pekerjaan

Tenders and Work Contracts

Tender yang diikuti perseroan pada 2024 adalah senilai Rp481,3 miliar atau 49,44% dari RKAP tahun 2024 yang sejumlah Rp973,49 miliar. Dari jumlah tersebut, tender yang dimenangkan perseroan adalah sejumlah Rp218,6 miliar atau 41,17% dari RKAP 2024 yang sebesar Rp530,98 miliar. Dengan demikian, persentase keberhasilan kemenangan tender perseroan pada 2024 adalah 45,43% lebih rendah dari target RKAP 2024 yang sebesar 54,54%.

The company's tenders in 2024 totalled Rp481.3 billion or 49.44% of the 2024 RKAP of Rp973.49 billion. Of this amount, the company won tenders totalling Rp218.6 billion or 41.17% of the 2024 RKAP of Rp530.98 billion. Thus, the company's tender winning percentage in 2024 was 45.43%, lower than the 2024 RKAP target of 54.54%.

Sementara itu, kontrak dikelola perseroan pada 2024 sebesar Rp570,83 miliar atau menurun 4,88% dibanding kontrak dikelola pada tahun sebelumnya yang sejumlah Rp600,16 miliar. Perolehan tersebut dikontribusikan oleh kontrak lanjutan sejumlah Rp354,02 miliar, meningkat 32,60% dari kontrak lanjutan pada 2023 yang sejumlah Rp266,98 miliar, serta kontrak baru sejumlah Rp216,83 miliar atau menurun sebesar 34,92% dibanding kontrak baru pada 2023 yang sejumlah Rp333,18 miliar.

Meanwhile, the company's managed contracts in 2024 amounted to Rp570.83 billion or decreased by 4.88% compared to the managed contracts in the previous year of Rp600.16 billion. This was contributed by follow-on contracts of Rp354.02 billion, an increase of 32.60% from follow-on contracts in 2023 of Rp266.98 billion, and new contracts of Rp216.83 billion, a decrease of 34.92% from new contracts in 2023 of Rp333.18 billion.

Tender dan Kontrak Pekerjaan

Tenders and Work Contracts

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Description	2024 (1)	2023 (2)	RKAP 2024 (3)	Pencapaian Achievement	
				2023-2024 (1)/(2)	RKAP 2024 (1)/(3)
Tender yang Diikuti Tenders Participated	481.262	802.393	973.494	-40,02%	49,44%
Tender Dimenangkan Tenders Won	218.622	398.232	530.982	-45,10%	41,17%
Tingkat Keberhasilan Tender Bid Success Rate	45,43%	49,63%	54,54%	-8,47%	83,28%
Kontrak Dikelola Contracts Managed	570.855	600.158	738.999	-4,88%	77,25%
Kontrak Lanjutan Advanced Contract	354.022	266.980	320.378	32,60%	110,50%
Kontrak Baru New Contracts	216.834	333.177	418.621	-34,92%	51,80%

Produksi dan Pendapatan

Production and Income

Perseroan menerapkan langkah optimal dalam meningkatkan kinerja melalui penyelesaian pekerjaan serta mempercepat pengakuan progres produksi eksternal dari pemberi kerja, dengan tetap mengedepankan kualitas/mutu pekerjaan. Hal tersebut kemudian berdampak terhadap realisasi produksi pada 2024, dengan nominal pendapatan Rp240,53 miliar atau memenuhi 95,84% terhadap target RKAP 2024.

The company implemented optimal steps in improving performance through work completion and accelerating the recognition of external production progress from employers, while still prioritising the quality of work. This then had an impact on the realisation of production in 2024, with a nominal income of Rp240.53 billion or meeting 95.84% of the 2024 RKAP target.

Realisasi produksi pada 2024 terdiri dari produksi proyek lanjutan sejumlah Rp112,49 miliar dan proyek baru sebesar Rp128,05 miliar, dengan uraian sebagai berikut:

Production realisation in 2024 consisted of production of continued projects amounting to Rp112.49 billion and new projects amounting to Rp128.05 billion, with the following description:

Produksi Kontrak**Contract Production**dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Description	2024	2023	RKAP 2024	Pencapaian Achievement	
				2023-2024	RKAP 2024
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
Produksi Kontrak Contract Production	240.532	210.386	250.979	14,33%	95,84%
Kontrak Lanjutan Advanced Contracts	112.485	116.960	149.612	-3,83%	75,18%
Kontrak Baru New Contracts	128.046	93.426	101.367	37,06%	126,32%

Selaras dengan informasi tersebut, perseroan memperoleh pendapatan usaha yang secara dominan dikontribusikan oleh proyek-proyek baru dengan nilai mencapai Rp128,05 miliar pada 2024. Realisasi ini memperlihatkan peningkatan secara tahunan dengan persentase terhadap perolehan tahun 2023 sebesar 37,06%. Angka tersebut sekaligus memperlihatkan pemenuhan terhadap target RKAP 2024 mencapai 126,32%.

In line with this information, the company obtained business income which was mainly contributed by new projects with a value reaching Rp128.05 billion in 2024. This realization indicated an annual increase at a percentage of 37.06% compared to 2023. The figure also indicated that the fulfillment of the 2024 RKAP targets reached 126.32%.

Atas kontrak lanjutan dan kontrak baru yang dijalankan pada 2024, perseroan memperoleh pendapatan sejumlah Rp240,53 miliar. Perincian komponen pendapatan per jenis kegiatan pada 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

With ongoing and new contracts executed in 2024, the company recorded an income of Rp240.53 billion. A detailed breakdown of income components per type of activity in 2024 is presented in the following table:

Pendapatan per Jenis Kegiatan**Income per Type of Activity**Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Description	2024	2023	RKAP 2024	Pencapaian Achievement	
				2023-2024	RKAP 2024
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
Pengawasan Supervision	86.454	71.331	100.389	21,20%	86,12%
Perencanaan Planning	58.908	59.901	67.357	-1,66%	87,46%
Survei Investigasi Investigation Survey	17.021	13.945	16.196	22,06%	105,09%
Studi Feasibility Study	19.247	35.722	5.020	-46,12%	383,45%
Konsultan Lain-lain Miscellaneous Consultants	20.743	24.690	32.346	-15,99%	64,13%
Industry AMDK AMDK Industry	1.163	2.442	3.561	-52,38%	32,65%
Developer Keairan Water Developer	23.121	2.356	10.224	881,55%	226,15%
Jumlah Pendapatan Total Income	240.532	210.386	250.979	14,33%	95,84%

Adapun uraian pendapatan berdasarkan komponen sektor pekerjaan adalah sebagai berikut:

The description of income by work sector components is as follows:

Pendapatan per Sektor Pekerjaan

Income per Work Sector

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Description	2024	2023	RKAP 2024	Pencapaian Achievement	
				2023-2024	RKAP 2024
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
Permukiman, Tata Ruang, Industry dan lainnya Settlement, Spatial Planning, Industrial, and others	-	18.714	20.312	0,00%	0,00%
Transportasi Transportation	10.207	9.159	9.688	11,44%	105,36%
Sumber Daya Air (SDA) Water Resources	158.948	150.940	149.456	5,31%	106,35%
Gedung dan Bangunan Buildings and Structures	10.675	6.429	15.076	66,03%	70,81%
Industri, Energi dan Migas Industry, Energy, Oil and Gas	35.913	20.346	42.664	76,51%	84,18%
Industri AMDK AMDK Industry	1.163	2.442	3.561	-52,38%	32,65%
Developer Keairan Water Developer	23.121	2.356	10.224	881,55%	226,15%
Jumlah Pendapatan Total Income	240.532	210.386	250.979	14,33%	95,84%

Profitabilitas

Profitability

Dengan produksi dan pendapatan tersebut, perseroan mengukur tingkat profitabilitas yang baik. Perolehan laba kotor perseroan pada 2024 adalah sejumlah Rp70,72 miliar, memenuhi target RKAP 2024 dengan persentase 95,51%. Adapun laba bersih tahun berjalan perseroan adalah Rp12,77 miliar yang memenuhi target RKAP 2024 dengan persentase 84,73%. Profitabilitas Perseroan dapat dilihat melalui uraian sejumlah komponen laba (rugi) sebagai berikut:

With this production and income, the company has a good level of profitability. The company's gross profit for 2024 was Rp70.72 billion, achieving its 2024 RKAP target at a percentage of 95.51%. The company's net income for the year was Rp12.77 billion, achieving its 2024 RKAP target with a percentage of 84.73%. The company's profitability can be seen in the following profit (loss) components:

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Description	2024	2023	RKAP 2024	Pencapaian Achievement	
				2023-2024	RKAP 2024
	(1)	(2)	(3)	(1)/(2)	(1)/(3)
Laba Kotor Gross Profit	70.715	61.422	74.039	15,13%	95,51%
Laba Usaha Operating Income	18.066	12.102	22.324	49,28%	80,93%
Laba Bersih Tahun Berjalan Net Income for the Year	12.774	13.271	15.076	-3,74%	84,73%
EBITDA Tahun Berjalan EBITDA for the Year	21.069	16.676	28.077	26,34%	75,04%

Tinjauan Keuangan

Financial Review

Laporan kinerja keuangan Perseroan pada bagian ini disusun berdasarkan informasi yang termuat di dalam Laporan Keuangan PT Agrinas Palma Nusantara (d/h/ formerly PT Indra Karya (Persero)) untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan dengan opini wajar dalam semua hal yang material. Pengungkapan di dalam Laporan Keuangan tersebut telah disusun sesuai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia, mencakup Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

The Company's financial performance report in this section is prepared based on the information contained in the PT Agrinas Palma Nusantara (d/h/ formerly PT Indra Karya (Persero)) Financial Statements for the years ending on December 31, 2024 and 2023, audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan with fair opinion in all material respects. The information in the financial statements has been prepared in accordance with Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, including the Statement of Financial Accounting Standards (PSAK) and Interpretation of Financial Accounting Standards (ISAK) issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (DSAK-IAI).

Laporan Posisi Keuangan

Statements of Financial Positions

Aset

Assets

Perseroan telah mencatat total aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp361,12 miliar, meningkat 1,33% atau sebesar Rp4,80 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp356,32 miliar. Peningkatan ini seiring dengan total aset lancar yang meningkat sebesar 6,21%, dan penurunan aset tidak lancar sebesar 4,12%.

The Company recorded total assets as of 31 December 2024 amounting to Rp361.12 billion, an increase of 1.33% or Rp4.80 billion compared to the previous year's figure of Rp356.32 billion. This increase was in line with a 6.21% increase in current assets and a 4.12% decrease in non-current assets.

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Aset Lancar Current Assets	190.457	178.626	11.831	6,62%
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	170.658	177.692	(7.034)	-3,96%
Jumlah Aset Total Assets	361.115	356.319	4.796	1,35%

Aset Lancar

Current Assets

Perseroan telah mencatat total aset per 31 Desember 2024 sebesar Rp361,12 miliar, meningkat 1,33% atau sebesar Rp4,80 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp356,32 miliar. Peningkatan ini seiring dengan total aset lancar yang meningkat sebesar 6,21%, dan penurunan aset tidak lancar sebesar 4,12%.

The Company recorded total assets as of 31 December 2024 amounting to Rp361.12 billion, an increase of 1.33% or Rp4.80 billion compared to the previous year's figure of Rp356.32 billion. This increase was in line with a 6.21% increase in current assets and a 4.12% decrease in non-current assets.

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Kas dan Bank Cash on Hand and in Banks	47.485	42.764	4.721	11,04%
Piutang Usaha Account Receivables	28.970	23.631	5.339	22,59%
Piutang Lain-lain Other Receivables	20.381	32.791	(12.410)	-37,85%
Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa Gross Amount Due from Customers	88.905	74.888	14.017	18,72%
Persediaan Inventories	719	1.814	(1.095)	-60,36%
Uang Muka dan Jaminan Advances and Guarantee	3.307	695	2.612	375,83%
Biaya Dibayar di Muka Prepaid Expenses	339	285	54	18,95%
Pajak Dibayar di Muka Prepaid Taxes	4	3	1	33,33%
Penugasan Jasa Konsultan dalam Pelaksanaan Assignment of Consulting Services in Execution	348	1.755	(1.407)	-80,17%
Jumlah Aset Lancar Total Current Assets	190.457	178.626	11.831	6,62%

Aset Tidak Lancar

Non-Current Assets

Total aset tidak lancar pada tahun 2024 sebesar Rp170,66 miliar, menurun 3,96% atau Rp7,03 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp177,69 miliar. Hal ini salah satunya dipengaruhi oleh investasi pada ventura bersama yang menurun di tahun 2024.

Total non-current assets in 2024 amounted to Rp170.66 billion, a decrease of 3.96% or Rp7.03 billion compared to the previous year's figure of Rp177.69 billion. This was partly influenced by a significant decreased investments in joint ventures in 2024.

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Investasi pada Ventura Bersama Investments in Joint Ventures	1.570	4.987	(3.417)	-68,52%
Aset Tetap Fixed Assets	137.747	139.312	(1.565)	-1,12%
Aset Hak Guna Right of Use Assets	29.778	31.509	(1.731)	-5,49%
Aset Tak Berwujud Intangible Assets	1.563	1.884	(321)	-17,04%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets	170.658	177.692	(7.034)	-3,96%

Liabilitas

Liabilities

Perseroan telah mencatat total liabilitas per 31 Desember 2024 sebesar Rp171,03 miliar, menurun 5,17% atau sebesar Rp9,33 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp180,36 miliar. Penurunan ini seiring dengan terjadinya penurunan pada liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang masing-masing sebesar 2,71% dan 9,46%.

The company recorded total liabilities as of 31 December 2024 amounting to Rp171.03 billion, a decrease of 5.17% or Rp9.33 billion compared to the previous year's figure of Rp180.36 billion. This decrease was in line with the decrease in current liabilities and non-current liabilities by 2.71% and 9.46%, respectively.

dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal	Persentase Percentage
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	111.588	114.701	(3.113)	-2,71%
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	59.443	65.655	(6.212)	-9,46%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	171.031	180.356	(9.325)	-5,17%

Liabilitas Jangka Pendek

Current Liabilities

Pada tahun 2024, jumlah liabilitas jangka pendek sebesar Rp111,59 miliar, menurun 2,71% atau Rp3,11 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp114,70 miliar. penurunan ini salah satunya dipengaruhi oleh liabilitas sewa jangka panjang yang jatuh tempo dalam setahun menurun sebesar 58,38%.

In 2024, short-term liabilities amounted to Rp111.59 billion, a decrease of 2.71% or Rp3.11 billion compared to 2023, which amounted to Rp114.70 billion. This decrease was partly influenced by current maturities of long-term lease liabilities, which decreased by 58.38%.

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Utang Bank Bank Loan	4.249	4.999	(750)	-15,00%
Utang Usaha Account Payables	16.084	16.922	(838)	-4,95%
Utang Pajak Taxes Payables	4.524	4.191	333	7,95%
Uang Muka dari Pelanggan yang Jatuh Tempo dalam Setahun Current Maturities of Advance from Customers	18.097	19.734	(1.637)	-8,30%
Biaya yang Masih Harus Dibayar Accrued Expenses	43.250	40.508	2.742	6,77%
Liabilitas Sewa Jangka Panjang yang Jatuh Tempo dalam Setahun Current Maturities of Long-term Lease Liabilities	628	1.509	(881)	-58,38%
Liabilitas Lainnya Other Liabilities	24.756	26.838	(2.082)	-7,76%
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities	111.588	114.701	(3.113)	-2,71%

Liabilitas Jangka Panjang

Non-Current Liabilities

Pada tahun 2024, total liabilitas jangka panjang perseroan sebesar Rp59,44 miliar, menurun 9,46% atau Rp6,21 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp65,66 miliar. Hal ini salah satunya disebabkan oleh adanya penurunan yang signifikan pada uang muka dari pelanggan.

In 2024, the company's total non-current liabilities amounted to Rp59.44 billion, a decrease of 9.46% or Rp6.21 billion compared to Rp65.66 billion in 2023. This was partly due to a significant decrease in advances from customers.

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Uang Muka dari Pelanggan <i>Advance from Customers</i>	2.828	5.766	(2.938)	-50,95%
Liabilitas Sewa <i>Lease Liabilities</i>	32.557	37.769	(5.212)	-13,80%
Liabilitas Imbalan Kerja <i>Employee Benefit Liabilities</i>	12.924	13.847	(923)	-6,67%
Liabilitas Pajak Tangguhan <i>Deferred Tax Liabilities</i>	1.160	1.160	0	0,00%
Liabilitas Lainnya <i>Other Liabilities</i>	9.975	7.114	2.861	40,22%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang <i>Total Non-Current Liabilities</i>	59.443	65.655	(6.212)	-9,46%

Ekuitas

Equity

Perseroan telah mencatat total Ekuitas per 31 Desember 2024 meningkat sebesar 8,03% atau Rp14,12 miliar dari Rp175,96 miliar di tahun sebelumnya menjadi Rp190,08 miliar. peningkatan ini dikontribusikan oleh saldo laba yang meningkat sebesar Rp12,77 miliar dibandingkan dengan tahun 2023.

The company recorded total equity as of 31 December 2024 increased by 8.03% or Rp14.12 billion from Rp175.96 billion in the previous year to Rp190.08 billion. This increase was contributed by retained earnings which increased by Rp12.77 billion compared to 2023.

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh <i>Issued and Paid-Up Capital</i>	10.001	10.001	0	0,00%
Saldo Laba <i>Retained Earnings</i>	72.768	59.994	12.774	21,29%
Pendapatan Komprehensif Lain <i>Other Comprehensive Income</i>	107.315	105.968	1.347	1,27%
Jumlah Ekuitas <i>Total Equity</i>	190.084	175.962	14.122	8,03%

Laporan Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif

Statements of Profit (Loss) and Comprehensive Income

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan Usaha Revenues	240.532	210.386	30.146	14,33%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(169.817)	(148.964)	(20.853)	14,00%
Laba Bruto Gross Profit	70.715	61.422	9.293	15,13%
Bagian Laba dari Ventura Bersama Share of Profit from Joint Ventures	1.060	1.686	(626)	-37,13%
Laba Bruto Setelah Pendapatan Bersih dari Ventura Bersama Gross Profit After Net Revenue from Joint Ventures	71.775	63.108	8.667	13,73%
Beban Usaha Operating Expenses	(52.649)	(49.320)	(3.329)	6,75%
Beban Pajak Final Final Tax Expenses	(5.985)	(5.013)	(972)	19,39%
Laba Usaha Setelah Pajak Final Operating Income After Final Tax Expenses	13.141	8.775	4.366	49,75%
Beban Keuangan Finance Cost	(1.741)	(1.135)	(606)	53,39%
Pendapatan Bunga Interest Income	365	247	118	47,77%
Laba Kurs Mata Uang Asing - Bersih Gain on Foreign Exchange - Net	549	(68)	617	-907,35%
Pendapatan Lain-lain - Bersih Other Income - Net	460	5.452	(4.992)	-91,56%
Beban Pajak Penghasilan Income Tax Expenses	-	-	-	-
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	12.774	13.271	(497)	-3,75%
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income for the Year	1.348	1.482	(134)	-9,04%
Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income for the Year	14.122	14.753	(631)	-4,28%
Laba Bersih per Saham (Dalam rupiah penuh) Earnings per Share (In full amount of rupiah)	1.277.281	1.326.943	(49.662)	-3,74%

Pendapatan Usaha

Revenues

Pada tahun 2024, perseroan telah membukukan total pendapatan usaha sebesar Rp240,53 miliar, meningkat 14,33% atau Rp30,15 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp210,39 miliar. Peningkatan ini seiring dengan adanya peningkatan pada pendapatan lain-lain, pendapatan supervisi, serta pendapatan survei dan investigasi.

In 2024, the company recorded total revenues of Rp240.53 billion, an increase of 14.33% or Rp30.15 billion compared to the previous year's figure of Rp210.39 billion. This increase was in line with increases in other income, supervision income, and survey and investigation income.

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Supervisi Supervision	100.329	78.995	21.334	27,01%
Desain Design	58.908	59.901	(993)	-1,66%
Studi Kelayakan Feasibility Study	19.247	35.722	(16.475)	-46,12%
Survei dan Investigasi Survey and Investigation	17.021	13.945	5.726	41,06%
Lain-lain Others	42.376	21.823	20.553	94,18%
Jumlah Pendapatan Usaha Total Revenues	240.532	210.386	30.146	14,33%

Beban Pokok Pendapatan

Cost of Revenues

Pada tahun 2024, jumlah beban pokok pendapatan sebesar Rp169,82 miliar, meningkat 14,00% atau Rp20,85 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp148,96 miliar. hal ini dipengaruhi salah satunya oleh peningkatan pada beban overhead dan beban subkonsultasi.

In 2024, the total operating expenses amounted to Rp169.82 billion, an increase of 14.00% or Rp20.85 billion compared to the previous year's amount of Rp148.96 billion. This was partly influenced by an increase in overhead expenses and subconsultancy expenses.

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Tenaga Kerja Labor	57.253	67.930	(10.677)	-15,72%
Overhead Overhead	50.634	29.315	21.319	72,72%
Subkonsultasi Subconsultant	43.375	30.738	12.637	41,11%
Perjalanan Dinas Travel	12.939	14.101	(1.162)	-8,24%
Kendaraan/Peralatan Transport/Equipment	5.253	5.802	(549)	-9,46%
Pemasaran Marketing	363	1.077	(714)	-66,30%
Jumlah Total	169.817	148.964	20.853	14,00%

Laba Bruto

Gross Profit

Pada tahun 2024, perseroan telah mencatat jumlah laba bruto sebesar Rp70,72 miliar, meningkat 15,13% atau Rp9,29 miliar jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebesar Rp61,42 miliar.

In 2024, the company recorded a gross profit of Rp70.72 billion, an increase of 15.13% or Rp9.29 billion compared to 2023 of Rp61.42 billion.

Laba Tahun Berjalan

Income for the Year

Perseroan telah membukukan laba tahun berjalan pada tahun 2024 sebesar Rp12,77 miliar, turun 3,74% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp13,27 miliar.

The company has recorded an income for the year 2024 of Rp12.77 billion, down 3.74% compared to the previous year's of Rp13.27 billion.

Jumlah Penghasilan Lain

Total Other Income

Pada tahun 2024, jumlah penghasilan lain mengalami penurunan sebesar Rp4,99 miliar, dari Rp5,45 miliar di tahun 2023 menjadi Rp460 juta. Hal ini karena adanya beban lain-lain sebesar Rp1,9 miliar di tahun 2024.

In 2024, other income decreased by Rp4.99 billion, from Rp5.45 billion in 2023 to Rp460 million. This was due to other expenses of Rp1.9 billion in 2024.

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Other Comprehensive Income for the Year

Pada tahun 2024, penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp1,35 miliar, turun 9,04% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1,48 miliar. Hal ini karena pada tahun 2024 tidak terdapat penghasilan revaluasi aset tetap dan pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

In 2024, other comprehensive income for the year amounted to Rp1.35 billion, down 9.04% compared to the previous year's Rp1.48 billion. This was due to the absence of fixed asset revaluation income and income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss in 2024.

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Pendapatan Sewa Lease Revenue	2.379	2.379	0	0,00%
Lain-lain Others	(1.918)	3.073	(4.991)	-162,41%
Jumlah Total	460	5.452	(4.992)	-91,56%

Laba Usaha Setelah Pajak Final

Operating Income After Final Tax Expenses

Pada tahun 2024, laba usaha setelah pajak final sebesar Rp13,14 miliar, meningkat 49,75% atau Rp4,37 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp8,78 miliar.

In 2024, operating income after final tax amounted to Rp13.14 billion, an increase of 49.75% or Rp4.37 billion compared to the previous year of Rp8.78 billion.

Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan

Other Comprehensive Income for the Year

Pada tahun 2024, penghasilan komprehensif lain tahun berjalan sebesar Rp1,35 miliar, turun 9,04% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1,48 miliar. Hal ini karena pada tahun 2024 tidak terdapat penghasilan revaluasi aset tetap dan pajak penghasilan terkait pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi.

In 2024, other comprehensive income for the year amounted to Rp1.35 billion, down 9.04% compared to the previous year's Rp1.48 billion. This was due to the absence of fixed asset revaluation income and income tax relating to items that will not be reclassified to profit or loss in 2024.

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Revaluasi Aset Tetap Fixed Assets Revaluation	-	1.437	(1.437)	-100,00%
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Remeasurement on Defined Benefit Plan	1.348	81	1.267	1564,20%
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi Income Tax Relating to Item that will not be Reclassified to Profit or Loss	-	(36)	36	-100,00%
Jumlah Total	1.348	1.482	(134)	-9,04%

Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan

Comprehensive Income for the Year

Pada tahun 2024, Pendapatan komprehensif tahun berjalan menurun sebesar Rp631 juta atau 4,28%, dari Rp14,75 miliar di tahun 2023 menjadi Rp14,12 miliar.

In 2024, comprehensive income for the year decreased by Rp631 million or 4.28%, from Rp14.75 billion in 2023 to Rp14.12 billion.

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Laba Tahun Berjalan Income for the Year	12.774	13.271	(497)	-3,75%
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan Other Comprehensive Income for the Year	1.348	1.482	(134)	-9,04%
Jumlah Total	14.122	14.753	(631)	-4,28%

Laporan Arus Kas

Cash Flows Statements

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi <i>Net Cash Provided from Operating Activities</i>	6.042	14.171	(8.129)	-57,36%
Kas Bersih Digunakan untuk Aktivitas Investasi <i>Net Cash Used In Investing Activities</i>	(172)	(3.736)	3.564	-95,40%
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan <i>Net Cash Provided from (Used In) Financing Activities</i>	(1.149)	(1.415)	266	-18,80%
Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank <i>Net Increase (Decrease) Cash on Hand and in Banks</i>	4.721	9.020	(4.299)	-47,66%
Kas dan Setara Kas Awal Tahun <i>Cash on Hand and in Banks at the Beginning of the Year</i>	42.764	33.744	9.020	26,73%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun <i>Cash on Hand and in Banks at the End of the Year</i>	47.485	42.764	4.721	11,04%

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Cash Flows from Operating Activities

Perseroan telah mencatat arus kas dari aktivitas operasi pada tahun 2024 sebesar Rp6,04 miliar, turun 57,36% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp14,17 miliar. peningkatan ini salah satunya dikontribusikan oleh adanya peningkatan pada pembayaran beban keuangan, dan penerimaan bunga.

The company recorded cash flow from operating activities in 2024 of Rp6.04 billion, down 57.36% compared to the previous year of Rp14.17 billion. This increase was partly contributed by an increase in financial cost paid and interest received.

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Penerimaan Kas dari Pelanggan <i>Cash Receipts from Customers</i>	233.950	212.712	21.238	9,98%
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Karyawan <i>Cash Paid to Suppliers and Employee</i>	(220.546)	(192.640)	(27.906)	14,49%
Pembayaran Beban Keuangan <i>Financial Cost Paid</i>	(1.741)	(1.135)	(606)	53,39%
Penerimaan Bunga <i>Interest Received</i>	365	247	118	47,77%
Pembayaran Pajak Penghasilan <i>Income Tax Paid</i>	(5.985)	(5.013)	(972)	19,39%
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi <i>Net Cash Provided from Operating Activities</i>	6.042	14.171	(8.129)	-57,36%

Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Cash Flows from Investing Activities

Pada tahun 2024, arus kas yang diperoleh dari aktivitas investasi sebesar Rp172 juta, menurun Rp3,56 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp3,74 miliar. Hal ini seiring dengan penurunan yang terjadi pada perolehan aset tetap dan perolehan aset tak berwujud, masing-masing sebesar Rp2,84 miliar dan Rp721 juta.

In 2024, cash flow from investing activities amounted to Rp172 million, a decrease of Rp3.56 billion compared to the previous year's Rp3.74 billion. This was in line with the decline in the acquisition of fixed assets and intangible assets, amounting to Rp2.84 billion and Rp721 million, respectively.

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Perolehan Aset Tetap <i>Acquisition of Fixed Assets</i>	(39)	(2.882)	2.843	-98,65%
Perolehan Aset Takberwujud <i>Acquisition of Intangible Asset</i>	(133)	(854)	721	-84,43%
Kas Bersih Digunakan untuk (Diperoleh dari) <i>Net Cash Used in (Provided by) Investing Activities</i>	(172)	(3.736)	3.564	-95,40%

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Cash Flows from Financing Activities

Pada tahun 2024, arus kas yang digunakan untuk aktivitas pendanaan sebesar Rp1,15 miliar, menurun Rp266 juta atau 18,80% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp1,42 miliar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya penurunan signifikan pada pembayaran liabilitas sewa.

In 2024, cash flow used for financing activities amounted to Rp1.15 billion, a decrease of Rp266 million or 18.80% compared to the previous year's figure of Rp1.42 billion. This was influenced by a significant decrease in lease liability payments.

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Penerimaan Pinjaman dari Bank <i>Receipt Loan from Bank</i>	-	-	-	-
(Pembayaran) Pinjaman dari Bank <i>(Payment) of Loan from Bank</i>	(750)	(223)	(527)	236,32%
(Pembayaran) Liabilitas Sewa <i>(Payment) of Lease Liabilities</i>	(399)	(1.192)	793	-66,53%
Kas Bersih Diperoleh dari (Digunakan untuk) Aktivitas Pendanaan <i>Net Cash Provided by (Used in) Financing Activities</i>	(1.149)	(1.415)	266	-18,80%

Kenaikan (Penurunan) Bersih Kas dan Bank

Net Increase (Decrease) Cash on Hand and in Banks

Pada tahun 2024, perseroan telah mencatat penurunan bersih kas dan bank sebesar Rp4,30 miliar atau 47,66%, dari Rp9,02 miliar di tahun 2023 menjadi Rp4,72 miliar.

In 2024, the company recorded a net decrease in cash on hand and in banks of Rp4.30 billion or 47.66%, from Rp9.02 billion in 2023 to Rp4.72 billion.

Kas dan Setara Kas Awal Tahun

Cash on Hand and in Banks at the Beginning of the Year

Pada tahun 2024, kas dan setara kas awal tahun sebesar Rp42,76 miliar, meningkat 26,73% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp33,74 miliar.

In 2024, cash on hand and in banks at the beginning of the year amounted to Rp42.76 billion, an increase of 26.73% compared to the previous year of Rp33.74 billion.

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun

Cash on Hand and in Banks at the End of the Year

Pada tahun 2024, kas dan setara kas akhir tahun sebesar Rp47,49 miliar, meningkat 11,04% atau Rp4,72 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar Rp42,76 miliar.

In 2024, cash on hand and in banks at the end of the year amounted to Rp47.49 billion, an increase of 11.04% or Rp4.72 billion compared to the previous year of Rp42.76 billion.

Kemampuan Membayar Utang

Ability to Pay Debt

Perseroan melakukan evaluasi terhadap kemampuannya dalam memenuhi kewajiban finansial, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang, melalui perhitungan rasio likuiditas dan rasio solvabilitas. Rasio likuiditas berfokus pada kapasitas perusahaan untuk menyelesaikan kewajiban-kewajiban jangka pendek, sementara rasio solvabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi seluruh kewajiban yang dimiliki, baik yang bersifat jangka pendek maupun jangka panjang.

The Company evaluates its ability to meet its financial liabilities, both current and non-current, by calculating liquidity ratios and solvency ratios. Liquidity ratios focus on the Company's ability to settle its current liabilities, while solvency ratios illustrate the Company's ability to meet all of its liabilities, both current and non-current.

Untuk menilai kemampuan perseroan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek, digunakan rasio-rasio seperti rasio kas, rasio cepat, dan rasio lancar. Berikut adalah hasil dari perhitungan rasio-rasio tersebut:

To assess the company's ability to meet its current liabilities, ratios such as the cash ratio, quick ratio, and current ratio are used. The results of these calculations are as follows:

Kemampuan Memenuhi Kewajiban Jangka Pendek

Ability to Pay Short-Term Obligations (Liquidity)

Dalam persen
In percent

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth
Rasio Kas Cash Ratio	42,55	37,28	14,14%
Rasio Cepat Acid Test Ratio	68,52	57,89	18,36%
Rasio Lancar Current Ratio	170,68	155,73	9,60%

Rasio kas dihitung dengan membandingkan kas dan setara kas terhadap liabilitas jangka pendek. Hasil perhitungan pada tahun 2024 menunjukkan rasio kas sebesar 42,55%, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,30% dibandingkan dengan rasio kas pada tahun 2023 yang tercatat sebesar 37,26%.

The cash ratio is calculated by comparing cash and cash equivalents to current liabilities. The calculation results for 2024 show a cash ratio of 42.55%, representing an increase of 14.20% compared to the cash ratio in 2023, which was recorded at 37.26%.

Perseroan juga mengukur rasio cepat dengan membandingkan jumlah kas dan setara kas, efek, serta piutang terhadap kewajiban lancar. Pada tahun 2024, rasio cepat tercatat sebesar 68,52%, mengalami kenaikan signifikan sebesar 18,36% dibandingkan dengan rasio cepat pada tahun 2023 yang hanya mencapai 57,89%.

Selain itu, rasio lancar dihitung dengan membandingkan aset lancar dengan liabilitas jangka pendek. Rasio lancar pada tahun 2024 tercatat sebesar 170,68%, mengalami kenaikan sebesar 9,60% dibandingkan dengan rasio lancar pada tahun 2023 yang berada pada level 155,73%.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio-rasio ini, dapat disimpulkan bahwa perseroan menunjukkan kemampuan yang semakin baik dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya pada tahun 2024, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

The company also measures the acid test ratio by comparing cash and cash equivalents, effects, and accounts receivable to current liabilities. In 2024, the acid test ratio was recorded at 68.52%, a significant increase of 18.36% compared to the acid test ratio in 2023, which only reached 57.89%.

Additionally, the current ratio is calculated by comparing current assets with current liabilities. The current ratio for 2024 was recorded at 170.68%, an increase of 9.60% compared to the current ratio in 2023, at 155.73%.

Based on the results of these ratio calculations, it can be concluded that the company demonstrated improved ability to meet its current liabilities in 2024 compared to the previous year.

Kemampuan Memenuhi Kewajiban Jangka Panjang

Ability to Pay Long-Term Obligations (Solvency)

Dalam persen
In percent

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth
Rasio Liabilitas terhadap Aset Debt to Assets Ratio	47,36	50,62	-6,44%
Rasio Aset terhadap Likuiditas Asset to Liquidity Ratio	211,14	197,56	6,87%
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas Debt to Equity Ratio	142,86	152,37	-6,24%

Perseroan mencatatkan rasio liabilitas terhadap aset sebesar 47,36% pada 2024, menurun 6,44% dari tahun sebelumnya yang sebesar 52,14%. Rasio aset terhadap likuiditas perseroan pada 2024 adalah sebesar 211,14%, meningkat 6,87% dari tahun sebelumnya yang sebesar 191,78%. Adapun, rasio liabilitas terhadap ekuitas perseroan pada 2024 adalah sebesar 142,86 atau menurun 6,24% dibanding pada tahun sebelumnya yang sebesar 105,59%.

The company recorded a liability to asset ratio of 47.36% in 2024, a decrease of 6.44% from the previous year's ratio of 52.14%. The company's asset to liquidity ratio in 2024 was 211.14%, an increase of 6.87% from the previous year's ratio of 191.78%. Meanwhile, the company's liability to equity ratio in 2024 was 142.86, a decrease of 6.24% from the previous year's figure of 105.59%.

Secara umum, hasil perhitungan sejumlah rasio tersebut memperlihatkan bahwa perseroan tetap memiliki kemampuan yang baik dalam memenuhi kewajiban jangka panjang, dibanding dengan tahun sebelumnya.

In general, the results of these ratios show that the company remains in a good position to meet its long-term obligations compared to the previous year.

Tingkat Kolektibilitas Piutang

Receivables Collectability Rate

Perseroan menilai kemampuannya dalam mengumpulkan piutang dengan menggunakan perhitungan periode penagihan (*collection period*) atau jangka waktu rata-rata penagihan. Secara umum, periode penagihan dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu jumlah piutang usaha dan jumlah pendapatan bersih yang diperoleh perseroan.

Tingkat kolektibilitas piutang perseroan diukur dengan memperhitungkan *collection period*, yang memberikan gambaran mengenai lamanya waktu yang dibutuhkan untuk mengumpulkan piutang. Berikut adalah hasil perhitungan *collection period* perseroan:

The company assesses its ability to collect receivables using the collection period or average collection period. In general, the collection period is influenced by two main factors, namely the amount of trade receivables and the amount of net income earned by the company.

The collectability of the company's accounts receivable is measured by considering the collection period, which provides an indication of the length of time required to collect accounts receivable. The following are the results of the company's collection period calculations:

Dalam persen
In percent

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth
Rata-rata Pengumpulan Piutang (Collection Period) <i>Average Receivables Collectability (Collection Period)</i>	142,86	152,37	-6,24%

Rata-rata pengumpulan piutang Perseroan pada 2024 adalah 44 hari, meningkat dibanding rata-rata pengumpulan piutang pada tahun sebelumnya yang sejumlah 41 hari.

The average collection period for the Company's accounts receivable in 2024 is 44 days, an increase compared to the average collection period in the previous year, which was 41 days.

Struktur Modal dan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Capital Structure and Management Policy on Capital Structure

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Management Policy on Capital Structure

Perseroan menerapkan kebijakan pengelolaan struktur modal yang bertujuan untuk memastikan kelangsungan usaha dan memaksimalkan nilai bagi pemegang saham serta pemangku kepentingan lainnya. Salah satu cara yang ditempuh adalah dengan mengoptimalkan keseimbangan antara saldo liabilitas dan ekuitas. Untuk itu, perseroan secara rutin melakukan pemantauan terhadap struktur modalnya dengan menghitung rasio utang terhadap modal, yang dilakukan dengan membandingkan jumlah utang yang dimiliki terhadap total modal perseroan.

The company implements a capital structure management policy that aims to ensure business continuity and maximise value for shareholders and other stakeholders. One of the ways this is achieved is by optimising the balance between liabilities and equity. To this end, the company regularly monitors its capital structure by calculating the debt to equity ratio, which is done by comparing the amount of debt to the total capital of the company.

Dasar Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Basis of Management Policy on Capital Structure

Kebijakan manajemen dalam penetapan besaran modal dilakukan dengan mempertimbangkan proporsi terhadap risiko yang dihadapi, melalui pengelolaan yang hati-hati serta penyesuaian yang disesuaikan dengan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Untuk menjaga atau menyesuaikan struktur modal, perseroan dapat melakukan berbagai langkah, seperti menyesuaikan jumlah dividen yang dibayarkan kepada pemegang saham, mengatur pengembalian modal kepada pemegang saham, menerbitkan saham baru, atau menjual aset guna mengurangi beban utang. Manajemen secara rutin melakukan penelaahan terhadap struktur permodalan perseroan, di mana Direksi mempertimbangkan biaya permodalan serta risiko yang terkait dalam setiap keputusan yang diambil.

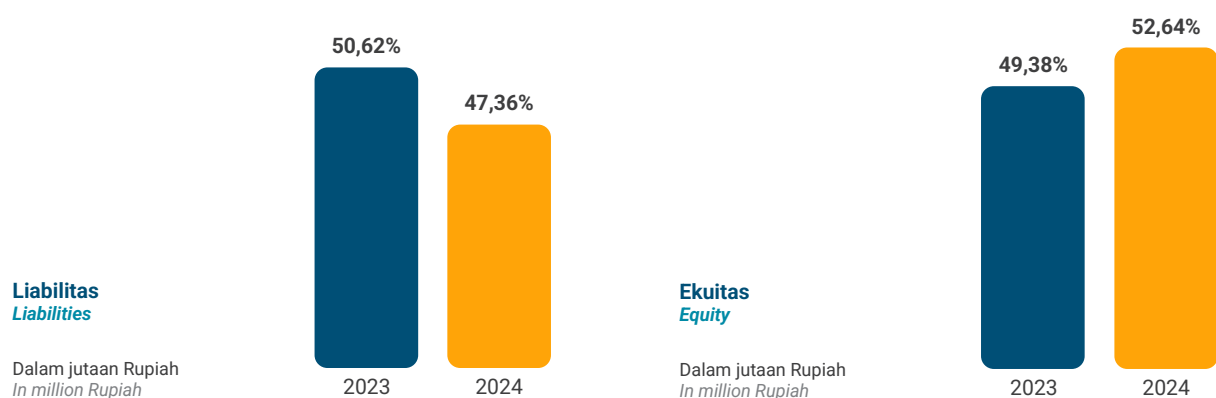
The management policy in determining the amount of capital is carried out by considering the proportion of the risks faced, through careful management and adjustments tailored to changes in economic conditions and the characteristics of the underlying assets. To maintain or adjust the capital structure, the company may take various measures, such as adjusting the amount of dividends paid to shareholders, arranging capital returns to shareholders, issuing new shares, or selling assets to reduce debt. Management regularly reviews the company's capital structure, with the Board of Directors considering the cost of capital and the risks associated with each decision made.

Dalam persen
In percent

Uraian Description	2024		2023		Pertumbuhan Growth	
	Nominal Nominal	Persentase Percentage	Nominal Nominal	Persentase Percentage	Nominal Nominal	Persentase Percentage
Liabilitas Liabilities	171.031	47,36%	180.356	50,62%	-9.325	-5,17%
Ekuitas Equity	190.084	52,64%	175.962	49,38%	14.122	8,03%
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity	361.115	100,00%	356.319	100,00%	4.796	1,35%
Rasio Utang Debt to Equity Ratio (x)		1,43		1,05		36,19%

Komposisi Struktur Modal

Capital Structure Composition



Terjadi perubahan pada struktur modal perseroan, dimana persentase liabilitas mengalami penurunan menjadi 47,36%, sementara persentase ekuitas meningkat menjadi 52,64% pada tahun 2024. Secara keseluruhan, perubahan ini menunjukkan bahwa perseroan memiliki struktur modal yang lebih sehat dan lebih baik pada tahun 2024 jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

There has been a change in the company's capital structure, with liabilities decreasing to 47.36% and equity increasing to 52.64% in 2024. Overall, this change indicates that the company has a healthier and better capital structure in 2024 compared to the previous year.

Ikatan Material Investasi Barang Modal

Material Commitment on Capital Expenditure

Mengacu pada standar pengungkapan yang berlaku, salah satunya yang tercantum dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha, suatu transaksi investasi barang modal baru dikategorikan sebagai material jika nilai transaksi tersebut sama dengan atau lebih dari 20% dari ekuitas perusahaan.

Pada tahun 2024, tidak terdapat ikatan material investasi barang modal yang dilakukan perseroan.

In accordance with applicable disclosure standards, including those set forth in the Financial Services Authority Regulation (POJK) No. 17/POJK.04/2020 on Material Transactions and Changes in Business Activities, a new capital investment transaction is classified as material if the transaction value is equal to or exceeds 20% of the company's equity.

In 2024, there were no material commitment on capital expenditure made by the Company.

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Expenditure

Jenis dan Nilai Investasi Barang Modal perseroan memandang investasi sebagai bagian penting dalam upaya pengembangan kegiatan usaha. Secara berkala, perseroan melaksanakan investasi barang modal (*Capital Expenditure*) sebagai pengeluaran dana untuk pembelian atau penambahan nilai aset, dengan tujuan untuk memberikan nilai manfaat jangka panjang bagi perusahaan.

Types and Value of Capital Expenditure The company considers investment as an important part of its business development efforts. The company regularly carries out capital expenditure as an expenditure of funds for the purchase or addition of assets, with the aim of providing long-term benefits to the company.

Pada tahun 2024, Perseroan berhasil merealisasikan investasi barang modal sebesar Rp172 juta, yang menunjukkan penurunan dibandingkan dengan realisasi tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp4,77 miliar. Perincian investasi barang modal pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

In 2024, the cwwompany successfully realised capital expenditure of Rp172 million, representing a decrease compared to the previous year's realisation of Rp4.77 billion. The breakdown of capital expenditure for 2024 is as follows:

Realisasi Investasi Barang Modal

Realization of Capital Expenditures

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Descriptions	2024	2023	Pertumbuhan Growth	
			Nominal Nominal	Persentase Percentage
Investasi Rutin Regular Investment				
Pengadaan Inventaris dan Kantor (Hardware) Inventory and Office (Hardware) Procurement	39	466	(427)	-91,63%
Jumlah Investasi Rutin Total Regular Investment	39	466	(427)	-91,63%
Investasi Non-Rutin Non-Regular Investment				
Pengadaan Tanah Land Acquisition	-	-	-	-
Sarana dan Prasarana Facilities and infrastructure	-	-	-	-
Pembangunan/Renovasi Bangunan/Perlengkapan Gedung Construction/Renovation of Construction/ Building Equipment	-	2.407	-	-100,00%
Pengadaan Peralatan Proyek dan Laboratorium Procurement of Project and Laboratory Equipment	-	-	-	-
Pengadaan Kendaraan/Alat Transportasi/Mesin Produksi Procurement of Vehicles/Transportation/ Production Machines	-	9	-	-
IT (Management Information System, Server, dan Software) IT (Management Information System, Server and Software)	133	1.884	(1.751)	-92,95%
Penelitian dan Pengembangan Research and Development		-		
Jumlah Investasi Non-Rutin Total Non-Regular Investment	133	4.300	(4.167)	-96,91%
Total Investasi Total Investment	172	4.766	(4.594)	-96,39%

Tujuan Investasi Barang Modal

Capital Expenditure Objectives

Perseroan melakukan investasi barang modal sebagai langkah strategis untuk meningkatkan kualitas pelayanan jasa, yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas kinerja perusahaan. Kebijakan investasi ini juga dirancang untuk mendorong perolehan pendapatan yang lebih optimal melalui hasil dari investasi yang dilakukan. Setiap proses investasi dilakukan dengan pertimbangan yang cermat dan mengacu pada *Key Performance Indicators* (KPI) yang telah ditetapkan, guna memastikan bahwa setiap keputusan investasi memberikan dampak positif terhadap tujuan jangka panjang perseroan.

The company invests in capital goods as a strategic measure to improve the quality of its services, which in turn will increase the company's productivity. This investment policy is also designed to encourage optimal revenue generation through the results of the investments made. Each investment process is carried out with careful consideration and refers to the Key Performance Indicators (KPIs) that have been set, to ensure that every investment decision has a positive impact on the company's long-term objectives.

Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan

Material Facts and Information Subsequent to Balance Sheet Date

Tidak terdapat informasi atau fakta material yang terjadi setelah tanggal pelaporan akuntan sampai dengan Laporan Tahunan ini dipublikasikan.

There are no material facts and information subsequent to the balance sheet's date until this Annual Report was published.

Prospek Usaha

Business Outlook

Perekonomian global yang terus beradaptasi dengan dinamika geopolitik dan tantangan struktural diperkirakan akan mempengaruhi kinerja ekonomi di masa depan. Bank Dunia dan IMF memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi global pada 2025 dan 2026 akan stabil di kisaran 2,7%, mencerminkan pemulihan yang lebih lambat dan ketidakpastian yang masih ada dalam perdagangan internasional, kebijakan fiskal, dan pengaruh dari perubahan iklim.

The global economy, which continues to adapt to geopolitical dynamics and structural challenges, is expected to affect future economic performance. The World Bank and IMF project that global economic growth in 2025 and 2026 will stabilize at around 2.7%, reflecting a slower recovery and continued uncertainty in international trade, fiscal policy, and the impact of climate change.

Di sisi lain, perekonomian Indonesia menunjukkan daya tahan yang kuat meskipun berada di tengah ketidakpastian global. Neraca perdagangan Indonesia terus mencatatkan surplus yang signifikan. Selain itu, laju inflasi masih tetap terjaga pada tingkat yang rendah, terutama jika dibandingkan dengan negara-negara mitra dagang Indonesia seperti Jepang, Amerika Serikat, dan India. Stabilitas harga barang dan jasa di Indonesia memberikan fondasi yang kuat bagi konsumsi domestik, yang merupakan pendorong utama pertumbuhan ekonomi negara ini. Bank Indonesia memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2025 berada di kisaran 4,8% hingga 5,6%, didorong oleh konsumsi domestik dan investasi.

On the other hand, the Indonesian economy has shown strong resilience despite global uncertainty. Indonesia's trade balance continues to record significant surpluses. In addition, inflation remains low, especially when compared to Indonesia's trading partners such as Japan, the United States, and India. The stability of prices for goods and services in Indonesia provides a strong foundation for domestic consumption, which is the main driver of the country's economic growth. Bank Indonesia projects Indonesia's economic growth in 2025 to be in the range of 4.8% to 5.6%, driven by domestic consumption and investment.

Industri infrastruktur Indonesia tahun 2025 menunjukkan prospek yang menjanjikan, meskipun dihadapkan pada tantangan efisiensi anggaran. Pemerintah telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp433,9 triliun untuk sektor infrastruktur dalam APBN 2025, serta menjadi prioritas nasional dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, dengan fokus pada pembangunan infrastruktur yang mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan.

Indonesia's infrastructure industry in 2025 shows promising prospects, despite facing challenges in budget efficiency. The government has allocated a budget of Rp433.9 trillion for the infrastructure sector in the 2025 State Budget, and it is a national priority in the 2025–2045 National Long-Term Development Plan (RPJPN), with a focus on infrastructure development that supports inclusive and sustainable economic growth.

Seiring dengan hal tersebut, perseroan tengah memasuki fase transformasi strategis yang menjanjikan. Perubahan ini sejalan dengan arahan pemerintah untuk memperkuat ketahanan pangan dan energi nasional. Perseroan tidak hanya berfokus pada ekspansi bisnis, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan kontribusi terhadap ketahanan pangan dan perekonomian nasional.

In line with this, the company is entering a promising phase of strategic transformation. This change is in line with the government's directive to strengthen national food and energy security. The company is not only focused on business expansion, but also on community empowerment and contributing to national food security and the economy.

Perbandingan antara Target dan Realisasi 2024 serta Proyeksi 2025

Comparison between 2024 Target and Realization and 2025 Projection

Perseroan menetapkan target capaian pada Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) 2024, dengan mempertimbangkan perkembangan situasi ekonomi. Perbandingan realisasi kinerja perseroan terhadap target RKAP 2024 adalah sebagai berikut:

The company has set achievement targets in the 2024 company's Work Plan and Budget (RKAP), taking into account developments in the economic situation. The comparison of the company's performance realization on the 2024 RKAP target is as follows:

Perbandingan Target dan Realisasi 2024 Comparison of 2024 Target and Realization

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Description	Target 2024 2024 Target	Realisasi 2024 2024 Realization	Pencapaian Achievement
Pendapatan Usaha Revenues	250.979	240.532	95,84%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(176.940)	(169.817)	95,97%
Laba Bruto Gross Profit	74.039	70.715	95,51%
Laba Tahun Berjalan Income for The Year	15.076	12.774	84,73%
Aset Assets	377.403	361.115	95,68%
Liabilitas Liabilities	198.743	171.031	86,06%
Ekuitas Equity	178.660	190.084	106,39%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash on Hand and in Banks at the End of the Year	33.298	47.485	142,61%

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja 2024 dengan proyeksi pencapaian pada 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

The comparison between the 2024 performance realization and the projected achievements in 2025 can be seen in the table below:

Perbandingan Realisasi 2024 dan Proyeksi 2025 Comparison of 2024 Realization and 2025 Projection

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Uraian Description	Realisasi 2024 2024 Realization	Target 2025 2025 Target	Proyeksi Pertumbuhan Growth Projection
Pendapatan Usaha Revenues	240.532	276.077	14,78%
Beban Pokok Pendapatan Cost of Revenues	(169.817)	(195.146)	14,91%
Laba Bruto Gross Profit	70.715	80.931	14,45%

Uraian Description	Realisasi 2024 2024 Realization	Target 2025 2025 Target	Proyeksi Pertumbuhan Growth Projection
Laba Tahun Berjalan Income for The Year	12.774	19.134	49,78%
Aset Assets	361.115	386.117	6,92%
Liabilitas Liabilities	171.031	177.517	3,79%
Ekuitas Equity	190.084	208.600	9,74%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash on Hand and in Banks at the end of the Year	47.485	40.989	13,68%

Strategi Pemasaran dan Pangsa Pasar

Marketing Strategy and Market Share

Strategi Pemasaran

Marketing Strategy

Perseroan merumuskan serangkaian strategi untuk memperkuat posisi di pasar yang sudah ada, sekaligus menciptakan peluang baru untuk memasuki pasar baru maupun menawarkan layanan baru dalam lini bisnis *engineering*, *developer*, dan industri. Tujuan dari strategi ini adalah untuk memperkuat daya saing perseroan di tengah semakin ketatnya kompetisi di dunia usaha. Beberapa langkah yang akan diambil untuk mencapai tujuan tersebut antara lain:

1. Perluasan jangkauan lini bisnis *engineering* untuk mulai menjangkau pasar sumber anggaran non-APBN dan *loan* melalui pola kerja sama berkelanjutan serta inisiasi kolaborasi antar-holding BUMN ataupun Swasta;
2. Peningkatan layanan eksisting dan eksplorasi layanan baru melalui investasi perangkat kerja, baik *hardware* maupun *software*;
3. Peningkatan kompetensi personil khususnya tenaga ahli melalui sertifikasi profesi;
4. Optimasi aset dengan tetap mengedepankan prinsip PCV (*Profitable, Cashable, Valueable*) dalam perencanaannya serta BMWLS (*Biaya Mutu Waktu Likuiditas Safety*) dalam implementasinya.

Dalam sektor utamanya, yaitu di bidang sumber daya air, perseroan mengimplementasikan inovasi produk dan strategi diversifikasi usaha, serta memperluas wilayah pasar dengan melakukan penajajaran tender non-PUPR. Selain itu, perseroan juga fokus pada peningkatan pelayanan dan pengembangan pasar potensial secara selektif untuk memperoleh profit margin yang lebih tinggi. Langkah-langkah ini juga mencakup pengaktifan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI), serta perizinan minerba (SIUJP), migas (SKUP), dan SBU lingkungan untuk memperkuat posisi di sektor tersebut.

Perseroan juga berkomitmen untuk memperkuat lini bisnis hilir, dengan memaksimalkan potensi yang ada pada setiap unit yang telah terbentuk. Pada lini tengah, yakni bisnis *developer* keairan, perseroan terus mendorong inisiasi penyediaan air bersih di kawasan-kawasan tertentu, serta pengembangan proyek terintegrasi yang berlandaskan prinsip keberlanjutan

The company has formulated a series of strategies to strengthen its position in existing markets, while creating new opportunities to enter new markets and offer new services in the engineering, developer, and industrial business lines. The objective of this strategy is to strengthen the company's competitiveness amid increasingly fierce competition in the business world. Several steps will be taken to achieve this objective, including:

1. *Expanding the reach of the engineering business line to begin tapping into non-state budget and loan markets through sustainable cooperation patterns and initiating collaboration between state-owned and private holding companies;*
2. *Improving existing services and exploring new services through investment in work equipment, both hardware and software;*
3. *Improving personnel competence, particularly that of experts, through professional certification;*
4. *Optimising assets by continuing to prioritise the PCV (Profitable, Cashable, Valuable) principle in planning and the BMWLS (Cost, Quality, Time, Liquidity, Safety) principle in implementation.*

In its main sector, namely water resources, the company is implementing product innovations and business diversification strategies, as well as expanding its market area by participating in non-PUPR tenders. Additionally, the company focuses on improving service quality and selectively developing potential markets to achieve higher profit margins. These efforts include activating the Indonesian Standard Industrial Classification (KBLI), as well as obtaining mining permits (SIUJP), oil and gas permits (SKUP), and environmental permits (SBU) to strengthen its position in the sector.

The company is also committed to strengthening its downstream business lines by maximising the potential of each existing unit. In the midstream business line, namely water development, the company continues to promote the provision of clean water in certain areas, as well as the development of integrated projects based on sustainability principles in line with the Sustainable

sesuai dengan tujuan *Sustainable Development Goals* (SDGs). Upaya ini didukung oleh kolaborasi yang telah terjalin di dalam lingkungan BUMN, melalui program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL).

Selain itu, perseroan juga menjalin kerjasama lain yang fokus pada perluasan distribusi dan diversifikasi pasar, dengan sinergi bersama distributor untuk pasar BUMN dan usaha turunannya. Sebagai langkah strategis, perseroan juga melakukan inisiasi untuk memasuki pasar *Food and Beverage* (F&B), khususnya di sektor Hotel-Restoran-Café (Horeca), guna memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan potensi pertumbuhan di industri ini.

Peran aktif perseroan dalam membentuk citra merek korporat dilakukan melalui berbagai langkah strategis yang bertujuan untuk memperkuat keberadaan dan pengenalan merek di pasar. Beberapa kegiatan utama yang dilakukan antara lain:

1. Keterlibatan dalam Asosiasi Perusahaan dan Profesional: Perseroan aktif mengikuti berbagai asosiasi baik di tingkat nasional maupun internasional, untuk membangun jaringan dan meningkatkan reputasi di industri yang relevan.
2. Partisipasi dalam Pameran dan Expo: perseroan juga berpartisipasi dalam pameran dan expo yang berkaitan dengan lini bisnisnya, untuk menampilkan produk dan layanan, serta memperkenalkan inovasi terbaru kepada khalayak luas, baik di dalam negeri maupun pasar global.

Melalui langkah-langkah ini, perseroan berkomitmen untuk terus memperkuat *brand image*-nya, memperluas jangkauan pasar, serta meningkatkan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang.

Development Goals (SDGs). These efforts are supported by existing collaboration within the state-owned enterprise environment through the Social and Environmental Responsibility (TJSL) programme.

Additionally, the company has established other collaborations focused on expanding distribution and diversifying markets, through synergies with distributors for the SOE market and its subsidiaries. As a strategic step, the company has also initiated efforts to enter the Food and Beverage (F&B) market, particularly in the Hotel-Restaurant-Café (Horeca) sector, to expand market reach and enhance growth potential in this industry.

The company's active role in shaping its corporate brand image is carried out through various strategic measures aimed at strengthening its presence and brand recognition in the market. Some of the main activities carried out include:

1. *Participation in Business and Professional Associations*: The Company actively participates in various associations at both national and international levels to build networks and enhance its reputation in relevant industries.
2. *Participation in Exhibitions and Expos*: The company also participates in exhibitions and expos related to its business lines to showcase its products and services and introduce the latest innovations to a wide audience, both domestically and globally.

Through these measures, the company is committed to continuously strengthening its brand image, expanding its market reach, and increasing customer loyalty in the long term.

		Produk/Layanan Product/Services	
		Lama/Old	Baru/New
Target Pasar Market Target	Baru/New	Pengembangan Pasar - Kolaborasi Optimalisasi Aset SDA dan Energi BUMN - Peningkatan Layanan Eksisting khususnya Swasta Minerba - Kolaborasi sebagai produsen AMDK antar BUMN (Makloom) Market Development - Collaboration in Optimizing SOEs Natural Resources and Energy Assets - Improvement of existing services, especially private mineral and coal - Collaboration as an AMDK producer between SOEs (Makloom)	Diversifikasi - Peningkatan kemampuan alat kerja khususnya bidang Survei Investigasi - SDGs Layanan Sumber Daya Air Terintegrasi - Optimasi keterlibatan dalam proyek EPC Diversification - Increasing work equipment capabilities, especially in the field of Investigation Survey - Integrated Water Resources Services SDSs - Optimization of Involvement in EPC projects
	Lama/Old	Penetrasi Pasar - Investasi/Lembaga Non-PUPR - Optimalisasi kegiatan Branding mengarah ke penjualan langsung - Optimalisasi layanan pengelolaan Sumber Daya Air Kawasan Industri dan Komersial Market Penetration - Non-PUPR Agencies/Institutions - Optimization of branding activities leads to direct sales - Optimization of Water Resources management services for industrial Commercial Areas	Pengembangan Produk - Developer Keairan untuk sektor Minerba Product Development - Water Developer for Mineral and Coal sector

Sesuai dengan arah transformasi bisnis, perseroan fokus pada penguatan dan perluasan pasar di lini bisnis *engineering*, *developer*, dan industri, dengan memprioritaskan sektor-sektor utama seperti Sumber Daya Air (SDA), Energi Baru dan Terbarukan (EBT), mineral dan batu bara (minerba), transportasi, serta pengembangan gedung. Dalam upaya ini, perseroan juga memperkuat layanan jasa *engineering* di sektor non-SDA, seperti energi dan minerba, serta mendorong optimalisasi sektor transportasi, gedung, dan pemukiman untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kontribusi dari sektor-sektor tersebut.

Selain itu, perseroan terus berfokus pada efisiensi proses bisnis, termasuk dalam aspek pemasaran dan penjualan. Salah satu langkah penting yang telah diimplementasikan adalah pengadopsian *Enterprise Resource Planning* (ERP) "IKSmart", yang memungkinkan automasi dalam proses bisnis. Dengan adanya sistem ERP ini, Perseroan dapat memperbarui dan memonitor proses pemasaran secara lebih efektif, termasuk pengisian data pasar secara periodik melalui *platform* IKSmart, yang memberikan informasi pasar secara *real-time*.

Dalam hal pemasaran, perseroan berkomitmen untuk terus berinovasi dan mendiversifikasi produk-produk yang ada, baik di layanan *engineering*, *developer*, maupun industri. Diversifikasi ini bertujuan untuk memperkenalkan variasi produk baru yang dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Sejalan dengan itu, perseroan juga berfokus pada diversifikasi pendapatan dengan tidak hanya bergantung pada proyek-proyek APBN, tetapi juga mendorong spesialisasi dan peningkatan kompetensi untuk menjadi konsultan konstruksi yang mampu bersaing di tingkat regional. Langkah-langkah ini diharapkan dapat memperkuat posisi perseroan sebagai pemain utama di industri dan mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan.

Pangsa Pasar

Market Share

Perseroan terus mengembangkan dan memperluas pangsa pasar di berbagai sektor yang memiliki potensi besar, termasuk sektor-sektor utama yang mencakup sektor sipil sumber daya air sebagai *core business*, sektor energi (infrastruktur penyedia energi, mineral, dan batu bara), sektor transportasi (jalan, jembatan, infrastruktur transportasi), sektor bangunan dan gedung (komersial dan non-komersial), sektor konsultasi lainnya (permukiman, tata ruang, industrial, dan lainnya), dan sektor *developer* sumber daya air.

Pangsa pasar perseroan terbagi secara strategis dalam tiga lini bisnis utama, yang masing-masing memiliki ruang lingkup yang jelas untuk memaksimalkan potensi di setiap sektor sebagai berikut:

1. *Engineering*, meliputi layanan jasa konsultasi studi, *feasibility study*, desain, supervisi, manajemen konstruksi, survei dan investigasi pada sektor pekerjaan sipil/keairan, energi, jalan dan jembatan, gedung serta bangunan, dan lain-lain.
2. *Developer*, meliputi layanan jasa mulai dari inisiasi, kajian, pembangunan, operasi dan pemeliharaan dalam sektor pekerjaan sipil sumber daya air, energi dan minerba, serta konsultasi manajemen.
3. *Industry*, berupa Industri Air Bersih dan Limbah.

Proporsi pangsa pasar berdasarkan sektor pekerjaan perseroan tercermin melalui portofolio pekerjaan jasa konsultasi dari total nilai kontrak pada 2024, dengan uraian sebagai berikut:

In line with its business transformation direction, the company focuses on strengthening and expanding its market in the engineering, developer, and industrial business lines, with priority given to key sectors such as Water Resources (SDA), New and Renewable Energy (EBT), minerals and coal (minerba), transportation, and building development. In this effort, the Company is also strengthening its engineering services in non-SDA sectors, such as energy and minerba, and encouraging the optimisation of the transportation, building, and housing sectors to expand market reach and increase contributions from these sectors.

In addition, the company continues to focus on business process efficiency, including in marketing and sales. One of the important steps that has been implemented is the adoption of the Enterprise Resource Planning (ERP) system 'IKSmart,' which enables automation in business processes. With this ERP system, the company can update and monitor marketing processes more effectively, including periodic market data entry through the IKSmart platform, which provides real-time market information.

In terms of marketing, the company is committed to continuing to innovate and diversify its existing products, both in engineering, development, and industrial services. This diversification aims to introduce new product variations that can meet the needs of an ever-evolving market. In line with this, the company is also focusing on diversifying its revenue streams by not only relying on government-funded projects but also promoting specialisation and enhancing competencies to become a construction consultant capable of competing at the regional level. These steps are expected to strengthen the company's position as a key player in the industry and drive sustainable growth.

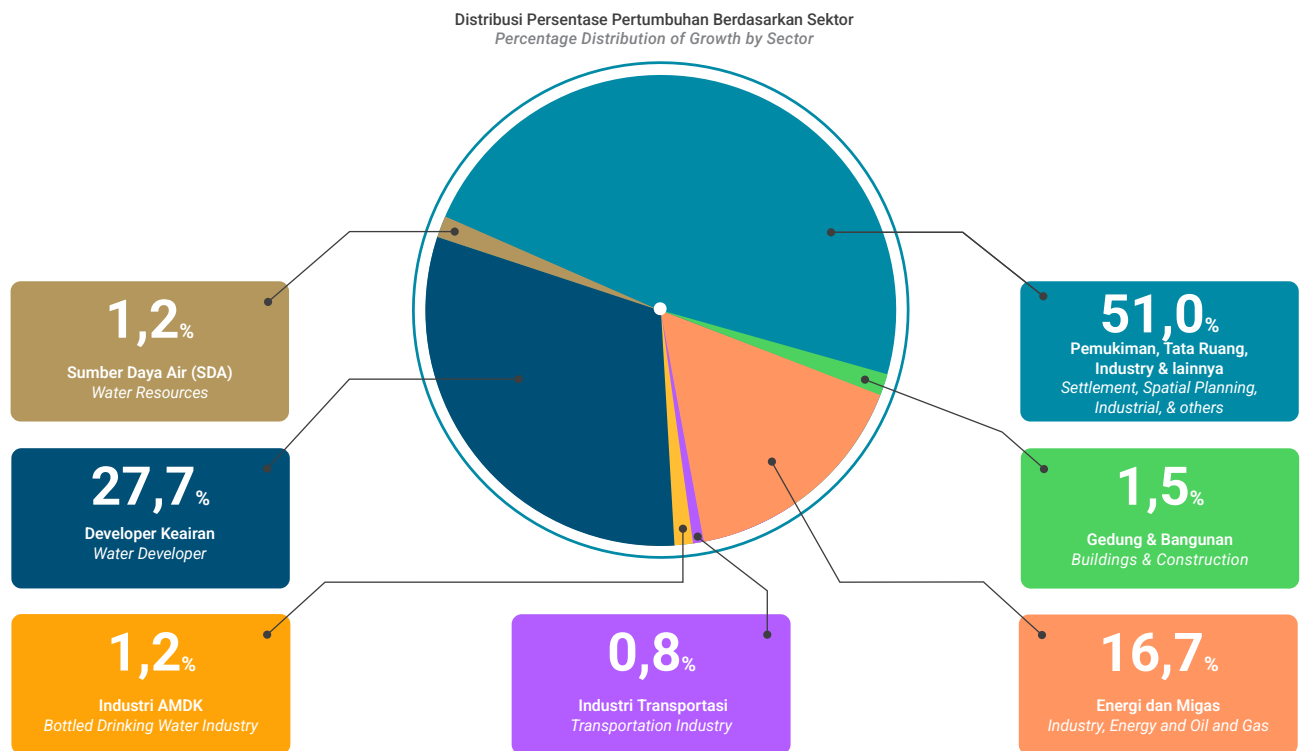
The company continues to develop and expand its market share in various sectors with significant potential, including key sectors such as water resources as its core business, the energy sector (energy infrastructure, minerals, and coal), the transportation sector (roads, bridges, transportation infrastructure), the building and construction sector (commercial and non-commercial), other consulting sectors (settlements, spatial planning, industrial, and others), and water resource development sector.

The company's market share is strategically divided into three main business lines, each with a clear scope to maximise potential in each sector as follows:

1. *Engineering*, including consulting services for studies, *feasibility studies*, design, supervision, construction management, surveys and investigations in the civil/water works, energy, roads and bridges, buildings and structures, and other sectors.
2. *Developer*, encompassing services from initiation, *feasibility studies*, construction, operations, and maintenance in the sectors of civil engineering for water resources, energy, and mining, as well as management consulting.
3. *Industry*, comprising clean water industry, and waste management.

The proportion of market share based on the company's work sector is reflected through the portfolio of consulting services work from the total contract value in 2024, with the following description:

Proporsi Pasar per Sektor Pekerjaan Market Share per Work Sector



Adapun proporsi pangsa pasar perseroan berdasarkan sumber dana atau sumber anggaran tercermin melalui persentase kontribusi masing-masing sumber dana/anggaran terhadap keseluruhan tender yang dimenangkan pada tahun 2024. Berikut adalah perincian kontribusi masing-masing sumber dana/anggaran terhadap total tender yang berhasil dimenangkan oleh perseroan pada tahun tersebut:

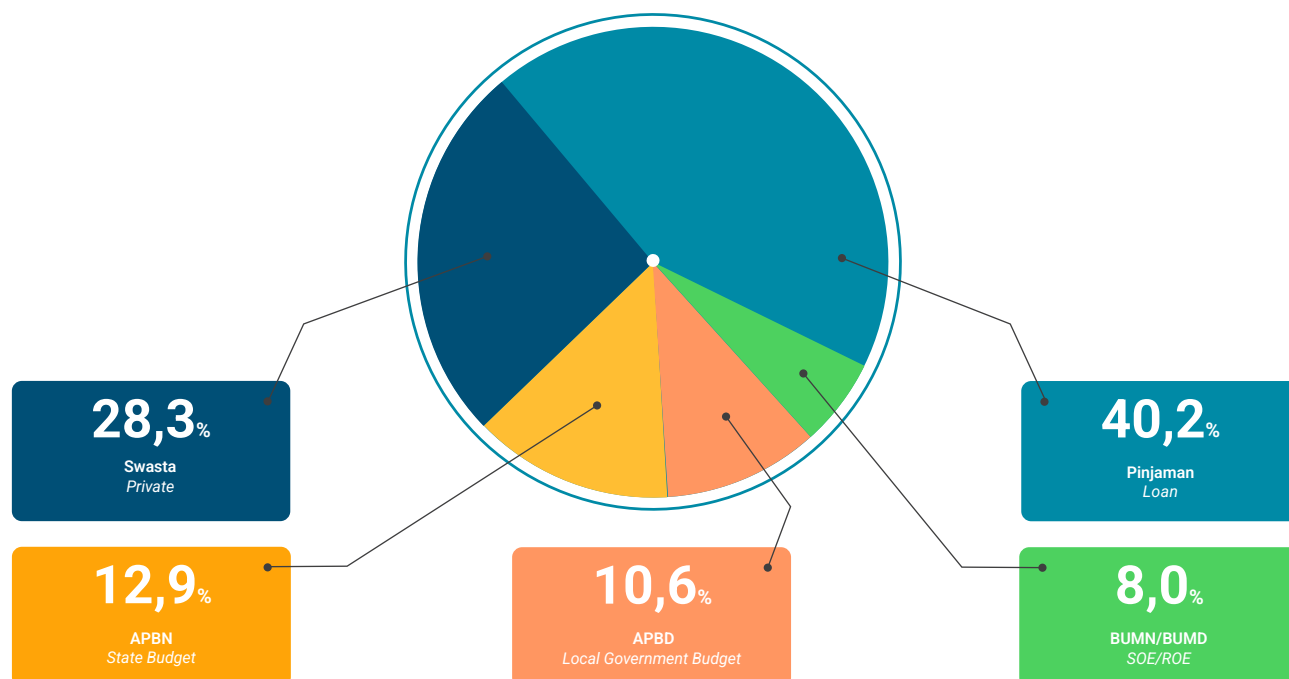
The proportion of the company's market share based on funding sources or budget sources is reflected in the percentage contribution of each funding source/budget to the total tenders won in 2024. The following is a breakdown of the contribution of each funding source/budget to the total tenders won by the company in that year:



Proporsi Pasar berdasarkan Sumber Dana/Anggaran

Market Proportion based on Source of Funds/Budget

Distribusi Persentase Pendanaan berdasarkan Sumber
Percentage Distribution of Funding by Source



Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum

Realization of Use of Proceeds From Public Offering

Perseroan merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang 100% sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia, yang tidak pernah melakukan penawaran umum perdana saham di bursa efek mana pun. Selain itu, sampai dengan 31 Desember 2024, perseroan tidak melakukan penawaran umum atas obligasi, sukuk, ataupun efek dalam bentuk lainnya.

The company is a State-Owned Enterprise (SOE) with shares that are 100% owned by the Government of the Republic of Indonesia and has never conducted an initial public offering of shares on any stock exchange. Additionally, as of December 31, 2024, the company did not make a public offering of bonds, sukuk, or any other forms of securities.



Informasi Material Mengenai Investasi, Ekspansi, Penggabungan/ Peleburan Usaha, Divestasi, Akuisisi, dan Restrukturisasi Utang dan Modal

Material Information Regarding Investment, Expansion, Business Merger/ Consolidation, Divestment, Acquisition, and Debt and Capital Restructuring

Perseroan tidak melakukan ekspansi, penggabungan/peleburan usaha, divestasi, akuisisi, maupun restrukturisasi utang atau modal pada tahun 2024. Oleh karena itu, informasi terkait dengan hal-hal tersebut tidak dapat disajikan pada bagian ini.

The company did not undertake any expansion, merger/ amalgamation, divestment, acquisition, or debt or capital restructuring in 2024. Therefore, information related to these matters cannot be presented in this section.

Namun, terkait dengan pengungkapan mengenai transaksi investasi pada ventura bersama, perseroan melakukan investasi melalui model bisnis kerja sama operasi yang dibentuk khusus untuk penyelesaian proyek-proyek dengan sumber dana dari APBN maupun pinjaman (Loan). Rincian mengenai transaksi investasi tersebut adalah sebagai berikut:

However, regarding disclosures on investment transactions in joint ventures, the company has made investments through a special purpose business model established for the completion of projects funded by the State Budget (APBN) or loans (Loan). Details of such investment transactions are as follows:

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

Nama Ventura Bersama Joint Venture Name	Nama Proyek Project Name	Persentase Percentage	2024	2023
IKA W1 - MEC - BEC	Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongodow <i>Supervision of the Lolak Dam Construction in Bolaang Mongondow Regency</i>	100	-	1.006.634.094
Lain-lain (dibawah Rp250 juta) <i>Others (below Rp250 million)</i>			1.570.203.113	3.980.660.473
Jumlah <i>Total</i>			1.570.203.13	4.987.294.567

Informasi Transaksi material yang mengandung benturan Kepentingan dan/atau Transaksi dengan pihak Afiliasi

Information on Material Transactions Containing Conflicts of Interest and/or Transactions with Affiliated parties

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Transactions Containing Conflicts of Interest

Pada tahun 2024, tidak terdapat transaksi material yang mengandung benturan kepentingan yang dilakukan oleh perseroan.

In 2024, there were no material transactions containing conflicts of interest carried out by the company.

Transaksi dengan Pihak Berelasi Penjelasan Mengenai Pihak Berelasi

Transactions with Related Parties Explanation on Related Parties

Sesuai standar dan ketentuan yang berlaku, pihak berelasi mengacu pada orang atau entitas yang terkait dengan perseroan, dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan perseroan, jika orang tersebut:
 - a. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas perseroan.
 - b. Memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan.
 - c. Merupakan personil manajemen kunci Perseroan.
2. Suatu entitas berelasi dengan perseroan jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - a. Entitas tersebut dan perseroan merupakan anggota dari kelompok usaha yang sama;
 - b. Satu entitas merupakan entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, dengan entitas tersebut adalah anggotanya).
 - c. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
 - d. Satu entitas merupakan ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga.
 - e. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pascakerja untuk imbalan kerja dari Perseroan atau entitas yang terkait dengan perseroan.
 - f. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi pada angka (1).
 - g. Orang yang diidentifikasi dalam angka (1.a) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas.
 - h. Entitas atau anggota dari kelompok dengan entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Dalam hal ini, pemerintah dapat mengacu kepada pemerintah, instansi pemerintah, dan badan yang serupa. Entitas yang berelasi dengan pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

According to the applicable standards and regulations, related parties refer to people or entities related to the company, with the following explanation:

1. A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - a. Has control or joint control over the company.
 - b. Has significant influence over the company.
 - c. Is a key management personnel of the company.
2. An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - a. The entity and the company are members of the same group;
 - b. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - c. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - d. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;
 - e. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the company or an entity related to the company.
 - f. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in number (1);
 - g. A person identified in number (1.a) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity;
 - h. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A Government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the government. Government refers to Government, Government agencies and similar bodies. Government related entity can be an entity that is controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the Ministry of SOE as a shareholder's representative.

Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Nature of Relationships and Transactions with Related Parties

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah, dalam hal ini adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham perusahaan dan BUMN.
- b. Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan.
- c. Komisaris dan Direksi sebagai personil manajemen kunci Perusahaan.

Daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan perusahaan pada 2024 adalah sebagai berikut:

The nature of the relationship with related parties are as follows:

- a. The Government is the Ministry of State-Owned Enterprise of the Republic of Indonesia, the shareholder of the Company and State-Owned Enterprise.
- b. The company is related to other State-Owned Enterprise owned by the Ministry of State-Owned Enterprise.
- c. Commissioners and Directors are member of the key management of the Company.

Below is the list of related parties with which the company has transactions in 2024:

Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	Sifat Pihak Berelasi Nature of Related Parties	Transaksi Transaction
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Bank, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Cash in Bank, Gross Amount Due From Customers
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Bank Cash in Bank
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Bank, Utang Bank Cash in Bank, Bank Loan
PT Perusahaan Umum Jasa Tirta II	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Account Receivables, Gross Amount Due From Customers
Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan Account Receivables, Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers
Balai Besar Wilayah Sungai Maluku	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan Account Receivables, Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers
Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, II dan III	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan Account Receivables, Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers
PT PAL Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha Account Receivables
PT Danareksa Capital	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Account Receivables, Gross Amount Due From Customers
PT Kawasan Berikat Nusantara	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Account Receivables, Gross Amount Due From Customers
Kantor Banjarmasin	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha Account Receivables
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Pompean Jeneberang	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan Account Receivables, Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers
PT Indah Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha Account Receivables
Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksana Jaringan Sumber Air Serayu Opak	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan Account Receivables, Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers
PT Virama Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa Account Receivables, Gross Amount Due From Customers
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha Account Receivables
PT Bhanda Ghara Reksa (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah Government Related Entities	Piutang Usaha Account Receivables

Pihak-Pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	Sifat Pihak Berelasi <i>Nature of Related Parties</i>	Transaksi <i>Transaction</i>
Direktorat Jenderal Bina Marga	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
PT Kawasan Industri Terpadu Batang	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
PT Utama Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Piutang Lain-lain <i>Other Receivables</i>
Bina Marga - Departemen PU	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Piutang Lain-lain <i>Other Receivables</i>
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Other Receivables, Gross Amount Due From Customers</i>
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Piutang Lain-lain <i>Other Receivables</i>
Hutama Karya PRJT	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Piutang Lain-lain <i>Other Receivables</i>
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Kalimantan IV	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan <i>Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai Sulawesi III Palu	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan <i>Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
Balai Besar Wilayah Sungai Bangka Belitung	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan <i>Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Other Receivables, Gross Amount Due From Customers</i>
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Sulawesi III	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Other Receivables, Gross Amount Due From Customers</i>
PT Kayan Hydro Energy	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan <i>Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
PT PLN Nusantara Power	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
PT Krakatau Chandra Energi	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>

Pihak-Pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	Sifat Pihak Berelasi <i>Nature of Related Parties</i>	Transaksi <i>Transaction</i>
Balai Wilayah Sungai Sumatera I	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Bank Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
PT Brantas Abipraya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan <i>Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan <i>Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan <i>Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Dari Pelanggan <i>From Customers</i>
PT PLN Indonesia Power	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Direktorat Jendral Perhubungan Laut	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Pesisir Ibu Kota Negara	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Pemanfaatan Air Pemali Juana	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Sumber Daya Air - Dirjend PU	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Kolaborasi 9 BUMN Madua Moljeh Asreh	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTT	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>

Pihak-Pihak Berelasi <i>Related Parties</i>	Sifat Pihak Berelasi <i>Nature of Related Parties</i>	Transaksi <i>Transaction</i>
Direktorat Jendral Perhubungan	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan <i>Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
Perusahaan Umum Jasa Tirta I	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Piutang Usaha, Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan <i>Account Receivables, Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
PT PLN Indonesia Power	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan <i>Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
Direktorat Jendral Perhubungan Laut	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Account Receivables, Gross Amount Due From Customer</i>
Balai Wilayah Sungai Bali - Penida	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan <i>Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Direktorat Jendral Cipta Karya	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
PT Jasa Marga - Toll road	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sulawesi II	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa <i>Gross Amount Due From Customers</i>
Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan <i>Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS Kaliki-Karama WS PaluLariang Provinsi Sulawesi Barat	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Uang Muka Proyek Dari Pelanggan <i>Advance From Customers</i>
PT Utama Karya Realtindo	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah <i>Government Related Entities</i>	Uang Muka Proyek Dari Pelanggan <i>Advance From Customers</i>

Realisasi Transaksi dengan Pihak Berelasi

Realization of Transactions with Related Parties

Perincian transaksi perseroan dengan pihak berelasi pada 2023-2024 adalah sebagai berikut:

Details of the company's transactions with related parties in 2023-2024 are as follows:

Uraian Description	31 Desember 2024 December 31, 2024		31 Desember 2023 December 31, 2023	
	Nominal Nominal	Persentase Percentage	Nominal Nominal	Persentase Percentage
Kas dan Bank Cash on Hand and in Banks	47.409.496.389	13,13%	42.620.841.229	11,96%
Piutang Usaha Account Receivables	11.683.894.743	3,24%	18.090.626.662	4,95%
Piutang Lain-lain Other Receivables	18.206.766.538	5,05%	30.459.148.752	8,45%
Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa Gross Amount Due from Customers	68.639.933.405	19,01%	54.220.033.105	15,01%
Utang Bank Bank Loan	4.248.557.534	2,48%	4.998.557.534	2,77%
Uang Muka dari Pelanggan Current Maturities of Advance from Customers	14.899.898.089	8,71%	22.283.229.506	12,36%
Pendapatan usaha Revenues	168.311.576.041	69,97%	163.540.408.603	77,73%

Mekanisme Review terhadap Transaksi serta Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Review Mechanism for Transactions and Compliance with Related Regulations and Provisions

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa semua transaksi yang dilakukan dengan pihak berelasi dijalankan dengan prosedur yang transparan dan sesuai dengan prinsip kewajaran (*arm's length principle*). Setiap transaksi tersebut diatur sedemikian rupa agar sesuai dengan peraturan yang berlaku, serta memenuhi ketentuan hukum yang ditetapkan. Selain itu, perseroan secara aktif melakukan pemantauan terhadap transaksi-transaksi dengan pihak berelasi untuk memastikan bahwa semua kegiatan tersebut tetap berada dalam kerangka yang hati-hati dan penuh pertimbangan. Dalam hal ini, perseroan selalu berpegang pada regulasi yang berlaku dan mengacu pada praktik terbaik yang ada, untuk menjaga integritas dan transparansi dalam setiap langkah yang diambil.

The company is committed to ensuring that all transactions with related parties are conducted in accordance with transparent procedures and the arm's length principle. Each transaction is structured to comply with applicable regulations and legal requirements. In addition, the company actively monitors transactions with related parties to ensure that all activities remain within a prudent and considered framework. In this regard, the company always adheres to applicable regulations and refers to best practices to maintain integrity and transparency in every step taken.

Peran Dewan Komisaris dan/atau Komite Audit dalam Memastikan Kewajaran Transaksi

The Role of the Board of Commissioners and/or Audit Committee in Ensuring Fairness of Transactions

Perseroan menerapkan mekanisme yang kuat untuk memastikan kewajaran setiap transaksi melalui proses audit internal yang sistematis. Proses ini secara rutin dimonitor oleh Komite Audit, yang bertugas untuk memastikan bahwa semua transaksi dengan pihak berelasi dan pihak eksternal dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hasil audit dan pemantauan ini dilaporkan secara berkala kepada Dewan Komisaris, sehingga memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam setiap transaksi yang dilakukan oleh perseroan.

The company implements robust mechanisms to ensure the fairness of every transaction through a systematic internal audit process. This process is routinely monitored by the Audit Committee, which is responsible for ensuring that all transactions with related parties and external parties are carried out in accordance with the principles of fairness and compliance with applicable regulations. The results of these audits and monitoring are reported periodically to the Board of Commissioners, thereby providing transparency and accountability in every transaction carried out by the company.

Kontribusi Kepada Negara

Contribution to The State

Pembayaran Dividen

Dividend Payment

Pada Tahun 2024, perseroan tidak mendapatkan kewajiban dan arahan khusus untuk melaksanakan pembayaran dividen kepada Pemegang Saham, yakni Pemerintah Republik Indonesia, sehingga laba bersih perseroan seluruhnya digunakan sebagai laba ditahan.

In 2024, the company did not receive any specific instructions to pay dividends to shareholders, including the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, the company's net profit was entirely retained.

Pembayaran Pajak

Tax Payment

Perseroan menyalurkan kontribusi kepada negara secara berkala melalui pembayaran pajak, dengan realisasi pada 2024 sebagai berikut:

The company makes contributions to the state periodically through tax payments, with the realization in 2024 as follows:

Dalam jutaan rupiah
In millions of rupiah

No. No.	Uraian Description	2024
1	PPh Pasal 21 Income Tax Article 21	4.264.453.528
2	PPh Pasal 23 & 22 Income Tax Article 23 & 22	1.238.135.291
3	PPh Pasal 4 ayat 2 Income Tax Article 4, point 2	3.346.461.434
4	PPN Keluaran Output VAT	8.904.188.526
5	PBB Land and Building Tax	23.510.655
6	Pajak Kendaraan Bermotor Vehicle Tax	138.301.200
7	Pajak Lainnya Other Taxes	2.220.181.919
8	Jumlah Total	20.135.232.553

Perubahan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang Berpengaruh Signifikan

Changes to Laws and Regulations that Have a Significant Impact

Tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan dengan dampak signifikan bagi perseroan pada 2024.

There are no changes in laws and regulations with significant impact on the company in 2024.

Perubahan Kebijakan Akuntansi

Changes In Accounting Policy

Pada tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK-IAI").

Berikut amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa– Balik;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" dan amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok; dan
- Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infak, dan Sedekah dan Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Implementasi amendemen standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang Kekurangan Ketertukaran;
- PSAK 117 "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang Dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;
- PSAK 232: Instrumen Keuangan Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 238: Aset Takberwujud; dan
- PSAK 240: Properti Investasi.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amendemen atas standar tersebut.

On January 1, 2024, references to the individual PSAKs and ISAKs has been changed as published by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI").

The following amendment to standards which are relevant to the Company, are effective from January 1, 2024, but do not result in significant impact to the financial statements are as follows:

- Amendments PSAK 116: Lease regarding Lease Liability in a Sale and Leaseback;
- Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as Current or Noncurrent.
- Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements related to NonCurrent Liabilities with Covenants;
- Amendment to PSAK 207 "Statement of Cash Flows" and amendment to PSAK 107 "Financial Instrument: Disclosure" related to Supplier Finance Agreements; and
- Revision PSAK 409: Accounting for Zakat, Infak, dan Sadaqah and Revision PSAK 401: Presentation of Sharia Financial Statements.

The implementation of the above amendment to standards had no material on the amounts reported for the current period or prior financial year.

New Standard and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendment to PSAK 221 "Effect of Changes in Foreign Exchange Rate" related to The Lack of Intechangeability;
- PSAK 117 "Insurance Contracts"; and
- Amendments PSAK 104: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 104 and PSAK 109 – Comparative Information.

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- PSAK 103: Business Combinations;
- PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;
- PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;
- PSAK 109: Financial Instruments;
- PSAK 115: Income from Contracts with Customers;
- PSAK 201; Presentation of Financial Statements;
- PSAK 207: Statement of Cash Flows;
- PSAK 216: Fixed Assets;
- PSAK 219: Employee Benefits;
- PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;
- PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;
- PSAK 236 Impairment of Asset;
- PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;
- PSAK 238: Intangible Assets; and
- PSAK 240: Investment Property.

Until the date of the financial statements is authorized, the Company is still evaluating the potential impact of the implementation those new standard and amendments to standards.

Tingkat Kesehatan Perusahaan

Company Health Level

Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan yang sebelumnya didasarkan pada KEP-100/MBU/2002 Tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Badan Usaha Milik Negara. Saat ini penilaian tersebut didasarkan pada PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yaitu penilaian yang dilakukan oleh Lembaga Pemeringkat dengan *deadline* bulan ke-5 tahun berikutnya.

Berdasarkan Surat Pefindo No.RC-837/PEF-DIR/VI/2025, Tanggal 20 Juni 2025 Perihal Sertifikat Pemeringkatan atas PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) (d/h PT Indra Karya (Persero)) Periode 20 Juni 2025 sampai dengan 1 Juni 2026. Sesuai dengan hasil rapat yang diadakan pada hari Jumat, 20 Juni 2025, Panitia Pemeringkat PT PEFINDO memutuskan peringkat idA/Stable (Single A; Stable Outlook) terhadap PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) (d/h PT Indra Karya (Persero)) untuk periode 20 Juni 2025 sampai dengan 1 Juni 2026. Peringkat tersebut diberikan berdasarkan data dan informasi dari Perusahaan serta Laporan Keuangan Tidak Diaudit per 31 Maret 2025 dan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2025.

Berikut adalah informasi terkait tingkat kesehatan Perseroan Berdasarkan Surat Pefindo No.RTG-214/PEF-DIR/VI/2025, Tanggal 20 Juni 2025 Perihal Penyampaian informasi Peringkat Berdiri Sendiri (*Standalone Rating*) dan Peringkat Akhir (*Final Rating*) PT Indra Karya (Persero):

The previous assessment of the Company's Health Level was based on KEP-100/MBU/2002 concerning Health Level Assessment of State-Owned Enterprises. Currently, the assessment is based on PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which is an assessment conducted by a Rating Agency with a deadline of the 5th month of the following year.

Based on Pefindo Letter No. RC-837/PEF-DIR/VI/2025, dated June 20, 2025, regarding the Rating Certificate for PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) (formerly PT Indra Karya (Persero)) for the period from June 20, 2025 to June 1, 2026. In accordance with the results of the meeting held on Friday, June 20, 2025, the Rating Committee of PT PEFINDO has decided to assign a rating of idA/Stable (Single A; Stable Outlook) to PT Agrinas Palma Nusantara (Persero) (formerly PT Indra Karya (Persero)) for the period from June 20, 2025, to June 1, 2026. The rating is based on data and information from the Company, as well as the Unaudited Financial Statements as of March 31, 2025, and the Audited Financial Statements as of December 31, 2025.

The following is information regarding the Company's financial health based on Pefindo's Letter No. RTG-214/PEF-DIR/VI/2025 dated June 20, 2025, regarding the disclosure of the Standalone Rating and Final Rating for PT Indra Karya (Persero):

Peringkat Berdiri Sendiri (<i>Standalone Rating</i>)	Peringkat Akhir (<i>Final Rating</i>)	Tingkat Kesehatan (<i>Health Level</i>)
idA(sa)	idA/Stable	Sehat/ <i>Healthy</i>
Obligor dengan peringkat idA memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan obligor dengan peringkat lebih tinggi. <i>Obligors rated idA have a strong ability compared to other Indonesian obligors to meet their longterm financial commitments. However, the obligor's ability may be more easily affected by adverse changes in circumstances and economic conditions than obligors with higher ratings.</i>	Obligor dengan peringkat idA memiliki kemampuan yang kuat dibandingkan obligor Indonesia lainnya untuk memenuhi komitmen keuangan jangka panjangnya. Walaupun demikian, kemampuan obligor mungkin akan mudah terpengaruh oleh perubahan buruk keadaan dan kondisi ekonomi dibandingkan obligor dengan peringkat lebih tinggi. <i>Obligors rated idA have a strong ability compared to other Indonesian obligors to meet their long-term financial commitments. However, the obligor's ability may be more easily affected by adverse changes in circumstances and economic conditions than obligors with higher ratings.</i>	(sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor PER-2/MBU/03/2023 pasal 81). <i>(according to the Regulation of the Minister of StateOwned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 article 81)</i>
Tanda (sa) menunjukkan bahwa peringkat adalah peringkat berdiri sendiri (<i>standalone rating</i>). <i>The (sa) symbol indicates that the rating is a standalone rating.</i>		







INDRA KARYA

06

TATA KELOLA PERUSAHAAN

GOOD CORPORATE
GOVERNANCE



Komitmen Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Commitment to the Implementation of Good Corporate Governance

Perseroan menegaskan komitmennya dalam menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance/ GCG) sebagai landasan utama dalam membangun sistem bisnis yang sehat, berkelanjutan, dan adaptif. GCG menjadi elemen krusial dalam mendukung keberlangsungan operasional perusahaan, terutama di tengah ketidakpastian kondisi ekonomi dan perubahan lanskap bisnis yang terus berkembang.

Dalam pelaksanaannya, perseroan menanamkan prinsip-prinsip GCG ke seluruh lini organisasi secara menyeluruh dan terstruktur, agar seluruh insan perusahaan mampu menjalankan peran mereka secara transparan, akuntabel, dan bertanggung jawab. Pendekatan ini diharapkan dapat mendorong peningkatan kinerja perusahaan sekaligus memberikan nilai tambah bagi para pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Di samping itu, perseroan juga senantiasa memastikan bahwa seluruh aktivitas usaha telah sesuai dan patuh terhadap ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku, sebagai wujud tanggung jawab dan integritas perusahaan dalam menjalankan bisnisnya.

The company emphasises its commitment to implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) as the main foundation in building a healthy, sustainable, and adaptive business system. GCG is a crucial element in supporting the operational sustainability of the company, especially amid the uncertainty of economic conditions and the ever-evolving changes in the business landscape.

In its implementation, the company instills GCG principles throughout all levels of the organisation in a comprehensive and structured manner, so that all company personnel are able to carry out their roles transparently, accountably, and responsibly. This approach is expected to drive improvements in the company's performance while providing added value for shareholders and all stakeholders.

In addition, the company also ensures that all business activities comply with applicable laws and regulations, as a form of corporate responsibility and integrity in conducting its business.

Prinsip-Prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance Principles

Dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip GCG di seluruh tingkatan organisasi, perseroan senantiasa mengacu pada pedoman resmi yang ditetapkan oleh otoritas terkait. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen nyata Perseroan dalam memenuhi kewajiban hukum serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Penerapan GCG di lingkungan perseroan dilandaskan pada lima prinsip utama sebagaimana tercantum dalam Pedoman Umum GCG yang disusun oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG). Kelima prinsip tersebut mencakup Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Tanggung Jawab (*Responsibility*), Kemandirian (*Independence*), serta Keadilan (*Fairness*), yang keseluruhannya menjadi fondasi dalam menciptakan tata kelola perusahaan yang sehat dan berintegritas.

1. Transparansi

Perseroan menjalankan prinsip transparansi dengan menyampaikan informasi dan kebijakan yang bersifat material dan relevan guna mendukung terselenggaranya kegiatan usaha secara objektif dan terbuka. Penyampaian informasi dilakukan secara tepat waktu, dengan penyajian yang jelas dan melalui saluran komunikasi yang mudah diakses oleh para pemangku kepentingan. Dalam praktiknya, perseroan tetap menjaga keseimbangan antara keterbukaan informasi dan perlindungan terhadap hal-hal yang bersifat rahasia, seperti rahasia perusahaan, rahasia jabatan, serta hak-hak pribadi, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Hal ini dilakukan tanpa mengurangi esensi transparansi yang menjadi bagian penting dalam Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

In implementing GCG principles at all levels of the organisation, the company always refers to the official guidelines set by the relevant authorities. This step is part of the company's real commitment to fulfilling its legal obligations and ensuring compliance with applicable regulations.

The implementation of GCG within the company is based on five main principles as stated in the General Guidelines for Good Corporate Governance compiled by the National Committee on Governance Policy (KNKG). The five principles include Transparency, Accountability, Responsibility, Independence, and Fairness, all of which are the foundation for creating sound corporate governance with integrity.

1. Transparency

The company upholds the principle of transparency by providing material and relevant information and policies to support the conduct of business activities in an objective and open manner. Information is provided in a timely manner, clearly presented and through communication channels that are easily accessible to stakeholders. In practice, the company maintains a balance between information disclosure and protection of confidential matters, such as company secrets, official secrets, and personal rights, in accordance with applicable laws. This is done without compromising the essence of transparency, which is an important part of good corporate governance.

2. Akuntabilitas

Perseroan menjalankan aktivitas usahanya secara profesional, terukur, dan sejalan dengan visi, misi, serta tujuan strategis yang telah ditetapkan. Setiap keputusan yang diambil senantiasa mempertimbangkan kepentingan para pemegang saham serta seluruh pemangku kepentingan lainnya, guna menciptakan nilai jangka panjang dan menjaga keberlanjutan usaha. Dalam rangka memperkuat prinsip akuntabilitas, Perseroan secara konsisten menanamkan dan menginternalisasi Kode Etik (*Code of Conduct*) kepada seluruh jajaran organisasi, termasuk manajemen dan karyawan.

3. Tanggung Jawab

Dalam menjalankan setiap kegiatan usahanya, perseroan senantiasa bertindak dengan penuh tanggung jawab serta menjunjung tinggi kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kebijakan dan ketentuan internal perusahaan. Sebagai bagian dari komitmen untuk menjadi entitas usaha yang bertanggung jawab secara sosial dan hukum (*Good Corporate Citizen*), perseroan secara konsisten menerapkan prinsip kehati-hatian dalam setiap pengambilan keputusan.

4. Kemandirian

Perseroan selalu menjaga prinsip kemandirian dalam menjalankan setiap aktivitas bisnisnya. Dalam proses pengambilan keputusan, perseroan memastikan bebas dari pengaruh atau intervensi pihak manapun, baik internal maupun eksternal, yang dapat menimbulkan benturan kepentingan atau dominasi tertentu. Dengan menjamin tidak adanya tekanan maupun campur tangan yang tidak semestinya, perseroan dapat mempertahankan objektivitas dan independensinya secara utuh, sehingga setiap keputusan yang diambil mencerminkan integritas serta mengedepankan kepentingan perusahaan dan para pemangku kepentingan secara adil.

5. Kesetaraan dan Kewajaran

Perseroan berkomitmen untuk memperlakukan seluruh pemangku kepentingan dan mitra bisnis secara adil dan setara, tanpa adanya perlakuan yang diskriminatif. Prinsip kesetaraan dan kewajaran menjadi landasan utama dalam menjalin hubungan profesional yang sehat dan saling menghormati. Selain itu, perseroan juga senantiasa mendorong terciptanya lingkungan kerja yang inklusif dengan memberikan peluang yang sama kepada seluruh karyawan, baik dalam proses rekrutmen maupun pengembangan karier jangka panjang tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan, maupun gender, sebagai wujud nyata dari komitmen terhadap keberagaman dan keadilan di tempat kerja.

2. Accountability

The company carries out its business activities in a professional and measurable manner, in line with its established vision, mission and strategic objectives. Every decision made always considers the interests of shareholders and all other stakeholders, in order to create long-term value and maintain business sustainability. In order to strengthen the principle of accountability, the company consistently instills and internalises the Code of Conduct throughout the organisation, including management and employees.

3. Responsibility

In carrying out each of its business activities, the company always acts responsibly and upholds compliance with applicable laws and regulations, including the company's internal policies and regulations. As part of its commitment to being a socially and legally responsible business entity (Good Corporate Citizen), the company consistently applies the principle of prudence in every decision making.

4. Independence

The company always upholds the principle of independence in carrying out all its business activities. In the decision-making process, the company ensures that it is free from the influence or intervention of any party, whether internal or external, that may give rise to a conflict of interest or a particular dominance. By guaranteeing the absence of undue pressure or interference, the company is able to maintain its objectivity and independence intact, so that every decision made reflects integrity and promotes the interests of the company and its stakeholders in a fair manner.

5. Fairness

The company is committed to treating all stakeholders and business partners fairly and equally, without any discriminatory treatment. The principles of equality and fairness are the main foundations for establishing healthy and respectful professional relationships. In addition, the company also always encourages the creation of an inclusive work environment by providing equal opportunities to all employees, both in the recruitment process and long-term career development, regardless of differences in ethnicity, religion, race, class, or gender, as a concrete manifestation of the commitment to diversity and fairness in the workplace.

Sosialisasi dan Internalisasi Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Dissemination and Internalization of Good Corporate Governance

Dalam rangka mewujudkan komitmennya terhadap keberhasilan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance/GCG*), perseroan secara aktif melaksanakan sosialisasi dan internalisasi mengenai konsep, prinsip-prinsip, serta tujuan GCG kepada seluruh insan perusahaan. Kegiatan ini dilakukan secara menyeluruh, mencakup pihak internal maupun eksternal.

In order to realise its commitment to the successful implementation of Good Corporate Governance (GCG), the company actively carries out socialisation and internalisation of the concepts, principles, and objectives of GCG to all company personnel. This activity is carried out comprehensively, covering both internal and external parties.

Bagi pihak internal, fokus utama perseroan adalah membangun pemahaman mendalam tentang GCG serta menumbuhkan kesadaran dan rasa tanggung jawab untuk menerapkannya secara konsisten di setiap lini kerja. Sementara itu, kepada pihak eksternal, kegiatan sosialisasi ditujukan untuk menjelaskan bagaimana perseroan menjalankan operasionalnya sesuai prinsip GCG, guna menciptakan kepercayaan dan transparansi.

Perseroan juga memastikan bahwa Pedoman GCG telah diterapkan secara berkelanjutan dengan dukungan sistem pelaporan berkala dari masing-masing unit kerja terkait implementasi prinsip-prinsip tersebut. Sebagai bentuk penguatan, perseroan menerapkan sistem *reward and punishment* yang objektif dan terukur, baik kepada unit kerja maupun individu, sebagai insentif atas kepatuhan dan kinerja dalam mendukung tata kelola yang baik.

For internal parties, the company's main focus is to build a deep understanding of GCG and foster awareness and a sense of responsibility to apply it consistently in every line of work. Meanwhile, for external parties, socialisation activities are aimed at explaining how the company carries out its operations in accordance with GCG principles, in order to create trust and transparency.

The company also ensures that the GCG Guidelines have been implemented on an ongoing basis with the support of a periodic reporting system from each work unit related to the implementation of these principles. As a form of reinforcement, the company implements an objective and measurable reward and punishment system, both for work units and individuals, as an incentive for compliance and performance in supporting good governance.

Roadmap Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance Roadmap

Perseroan telah merumuskan dan menetapkan tujuan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) sebagai pedoman dalam menciptakan tata kelola yang berkualitas di lingkungan kerja. Tujuan ini dibagi ke dalam dua kategori, yaitu jangka pendek dan jangka panjang, yang masing-masing berfungsi sebagai landasan strategis dalam pelaksanaan GCG sesuai dengan visi dan harapan perseroan. Adapun rincian tujuan tersebut adalah sebagai berikut:

The company has formulated and set the goal of implementing Good Corporate Governance (GCG) as a guideline in creating quality governance in the work environment. This goal is divided into two categories, namely short-term and long-term, each of which functions as a strategic foundation in the implementation of GCG in accordance with the company's vision and expectations. The details of these goals are as follows:

Tujuan Objectives	
Jangka Pendek Short-term	Jangka Panjang Long-term
Memberikan arah yang jelas bagi manajemen perusahaan dalam mengelola perusahaan berdasarkan praktik-praktik transparansi, akuntabilitas, bertanggung jawab, kemandirian dan kewajaran. <i>Provide clear direction for company management based on practices of transparency, accountability, responsibility, independence, and fairness</i>	Mengarahkan perusahaan untuk fokus pada strategi-strategi utama. <i>Direct the company to focus on main strategies.</i>
Memudahkan bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk melakukan evaluasi terhadap kinerja manajemen dalam melaksanakan tata kelola perusahaan secara baik. <i>Make it more accessible for interested parties to evaluate management performance in implementing Good Corporate Governance</i>	Meminimalkan potensi benturan kepentingan. <i>Minimize potential conflicts of interest.</i>
Mengetahui secara dini kebutuhan dan posisi perusahaan dalam memenuhi atau menanggapi kepentingan <i>stakeholders</i> . <i>Acknowledge early on the company's needs and position in fulfilling or responding to stakeholder interests.</i>	Memberikan kepastian pengelolaan perusahaan secara berkesinambungan. <i>Provide certainty of the company's sustainable management.</i>
	Meningkatkan kepuasan pelanggan maupun <i>stakeholders</i> lainnya. <i>Increase customer and other stakeholder satisfaction.</i>
	Meningkatkan komunikasi dan reputasi perusahaan kepada Pemegang Saham maupun <i>stakeholders</i> . <i>Improve the company's communication and reputation with Shareholders and Stakeholders.</i>

Struktur Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Good Corporate Governance Structure

Perseroan telah membentuk struktur tata kelola perusahaan yang solid sebagai bagian dari komitmen dalam menjalankan sistem *Good Corporate Governance* (GCG) secara menyeluruh. Struktur ini disusun guna memastikan setiap fungsi dan tanggung jawab dijalankan secara efektif sesuai prinsip transparansi, akuntabilitas, dan integritas.

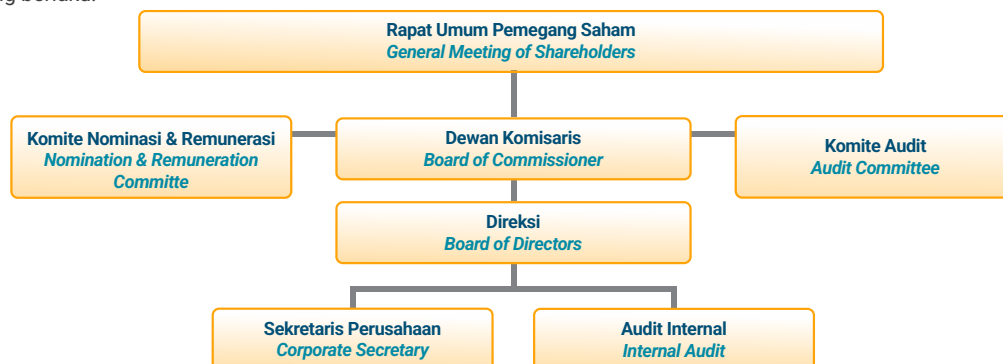
Struktur GCG perseroan terdiri dari tiga organ utama, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Direksi, dan Dewan Komisaris, yang masing-masing memiliki peran strategis dan saling melengkapi dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan. Pembentukan struktur tersebut merujuk dan mengacu pada Ketentuan Umum Pasal 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan Terbatas, yang menjadi dasar hukum dalam penyelenggaraan tata kelola perusahaan di Indonesia.

Dengan struktur ini, perseroan memastikan setiap kebijakan dan langkah strategis dijalankan secara bertanggung jawab, profesional, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

The company has established a solid corporate governance structure as part of its commitment to implementing a comprehensive *Good Corporate Governance* (GCG) system. This structure is designed to ensure that each function and responsibility is carried out effectively in accordance with the principles of transparency, accountability, and integrity.

The company's GCG structure consists of three main organs, namely the General Meeting of Shareholders (GMS), the Board of Directors, and the Board of Commissioners, each of which has a strategic and complementary role in the decision-making and supervision process. The establishment of this structure refers to the General Provisions of Article 1 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability companies, which is the legal basis for the implementation of corporate governance in Indonesia.

With this structure, the company ensures that every policy and strategic step is carried out responsibly, professionally, and in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.



Penilaian Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Tahun 2024

Assessment of the Implementation of Good Corporate Governance in 2024

Komitmen perseroan dalam meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tercermin melalui upaya penyelenggaraan penilaian GCG secara berkala. Penilaian ini bertujuan sebagai alat evaluasi sekaligus tolok ukur terhadap efektivitas implementasi GCG serta sebagai dasar pengembangan berkelanjutan di lingkungan perseroan. Namun demikian, seiring dengan diberlakukannya Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-12/S.MBU/08/2023 tanggal 16 Agustus 2023, perseroan tetap berkomitmen menjaga kualitas tata kelola perusahaan dengan mengacu pada prinsip-prinsip GCG yang berlaku serta menanti arahan lebih lanjut dari regulator terkait pelaksanaan asesmen di masa mendatang.

Komitmen perseroan dalam meningkatkan kualitas penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) tetap menunjukkan hasil yang positif. Hal ini tercermin dari penghargaan yang berhasil diraih perseroan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik selama tahun 2024.

The company's commitment to improving the quality of *Good Corporate Governance* (GCG) implementation is reflected in the efforts to conduct GCG assessments on a regular basis. This assessment aims to be an evaluation tool as well as a benchmark for the effectiveness of GCG implementation and as a basis for sustainable development within the company. However, in line with the enactment of the Decree of the Secretary of the Ministry of SOEs No. SK-12/S.MBU/08/2023 dated 16 August 2023, the company remains committed to maintaining the quality of corporate governance by referring to applicable GCG principles and awaits further direction from regulators regarding future assessments.

The company's commitment to improving the quality of *Good Corporate Governance* (GCG) implementation continues to show positive results. This is reflected in the awards that the company has received for implementing good corporate governance during 2024.

Selain penghargaan atas implementasi prinsip-prinsip Good Corporate Governance (GCG), perseroan juga meraih apresiasi atas keberhasilan dalam menjalankan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL). Pencapaian ini menjadi bagian integral dari komitmen perseroan dalam menerapkan tata kelola yang bertanggung jawab, tidak hanya dari aspek bisnis, tetapi juga terhadap masyarakat dan lingkungan.

Adapun hasil penilaian penerapan GCG tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

Berdasarkan PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara untuk laporan triwulanan terkait dengan laporan tata kelola terintegrasi, terdapat opsi penyampaian "jika ada" sehingga PT Indra Karya (Persero) yang termasuk ke dalam BUMN Individu dengan klasifikasi netral tidak melakukan laporan tata kelola terintegrasi. Pada Tahun 2024 perihal Hasil Tata Kelola Terintegrasi didasarkan pada Assessment Internal yang dalam hal ini masih dalam tahap proses pelaksanaan.

In addition to the award for the implementation of Good Corporate Governance (GCG) principles, the company also received appreciation for its success in implementing the Social and Environmental Responsibility (TJSL) programme. This achievement is an integral part of the company's commitment to implementing responsible governance, not only from a business aspect, but also towards society and the environment.

The results of the assessment of GCG implementation for the 2024 financial year are as follows:

Based on PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Actions of State-Owned Enterprises, for quarterly reports related to integrated governance reporting, there is an option to submit the report "if available." Therefore, PT Indra Karya (Persero), which is classified as an individual SOE with a neutral classification, does not submit an integrated governance report. In 2024, the Integrated Governance Results are based on an internal assessment, which is currently still in the implementation process.

Rapat Umum Pemegang Saham

General Meeting of Shareholders

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi dalam struktur tata kelola perseroan yang memiliki kewenangan utama, melampaui peran Direksi dan Dewan Komisaris. Di lingkungan Perseroan, RUPS terbagi menjadi dua jenis, yakni RUPS Tahunan (RUPST) dan RUPS Luar Biasa (RUPSLB).

RUPS berfungsi sebagai forum resmi bagi para pemegang saham untuk mengevaluasi kinerja perseroan sekaligus menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam Undang-Undang serta Anggaran Dasar perseroan. Setiap keputusan yang diambil dalam forum RUPS dilaksanakan secara terbuka, akuntabel, dan mengutamakan kepentingan terbaik bagi keberlanjutan perseroan.

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest organ in the company's governance structure with primary authority, surpassing the roles of the Board of Directors and Board of Commissioners. Within the company, the GMS is divided into two types, namely the Annual General Meeting of Shareholders (AGM) and the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGM).

The GMS serves as an official forum for shareholders to evaluate the company's performance as well as to carry out supervisory and control functions, while still referring to the provisions stated in the Law and the company's Articles of Association. Every decision made in the GMS forum is carried out openly, accountably, and prioritises the best interests for the company's sustainability.

Sejalan dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, pengaturan mengenai pelaksanaan RUPS telah diperbarui dan disesuaikan, termasuk dalam hal wewenang, pelaksanaan, serta ruang lingkup keputusan yang dapat diambil dalam forum tersebut.

In line with the enactment of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, the regulations regarding the implementation of the GMS have been updated and adjusted, including in terms of the authority, implementation, and scope of decisions that can be made in the forum.

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST)

Annual General Meeting of Shareholders (AGMS)

RUPST 30 Januari 2024

January 30, 2024 AGMS

Pada tahun 2024, Perseroan telah melaksanakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (RUPST) pada tanggal 30 Januari 2024, bertempat di Menara Danareksa.

Rapat tersebut dihadiri oleh perwakilan pemegang saham, serta jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan. Seluruh agenda yang dibahas dalam RUPST berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan seluruh keputusan yang disahkan dalam rapat tersebut dinyatakan sah dan mengikat.

In 2024, the Company held its Annual General Meeting of Shareholders (AGM) on January 30, 2024, at Menara Danareksa.

The meeting was attended by representatives of shareholders, as well as the Board of Commissioners and Directors of the Company. All agenda items discussed in the AGM proceeded in accordance with applicable regulations, and all decisions ratified at the meeting were declared valid and binding.

Setelah RUPST ditutup, setiap keputusan yang diambil segera ditindaklanjuti oleh pihak terkait sebagai bentuk implementasi atas hasil keputusan pemegang saham.

After the AGM was closed, each decision taken was immediately followed up by the relevant parties as a form of implementation of the results of the shareholders' decisions.

Agenda dan Realisasi Keputusan RUPST 2024

Agenda and Realization of the 2024 AGMS Resolution

Agenda Agenda	Keputusan Resolution
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2024. <i>Approval of the Company Work Plan and Budget (RKAP) for 2024 including the 2024 Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA).</i>	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun 2024 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2024. <i>Approving the Company Work Plan and Budget (RKAP) for 2024 including the 2024 Board of Commissioners' Work Plan and Budget (RKA).</i>
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) 2024. <i>Approval of the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) 2024.</i>	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) 2024. <i>Approving the Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA-TJSL) 2024.</i>
Penetapan Key Performance Indicator (KPI) Direksi Tahun 2024 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2024 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. <i>Determination of Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors in 2024 as stated in the 2024 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and Shareholders.</i>	Menetapkan Key Performance Indicator (KPI) Direksi Tahun 2024 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2024 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. <i>Determining Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Directors in 2024 as stated in the 2024 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners and Shareholders.</i>
Penetapan Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2024 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2024 antara Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. <i>Determination of Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners in 2024 as stated in the 2024 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.</i>	Menetapkan Key Performance Indicator (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2024 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2024 antara Dewan Komisaris dan Pemegang Saham. <i>Determining Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners in 2024 as stated in the 2024 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.</i>
Persetujuan pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui perubahan dan realokasi anggaran antar program/ kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total investasi Tahun 2024 tanpa mengubah nilai investasi. <i>Approval to delegate authority to the Board of Commissioners to approve changes and reallocation of the budget between programs/activities with a maximum value of 10% of the total 2024 investment without changing the total investment value.</i>	Menyetujui pelimpahan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menyetujui perubahan dan realokasi anggaran antar program/ kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total investasi Tahun 2024 tanpa mengubah nilai investasi. <i>Approving the delegation of authority to the Board of Commissioners to approve changes and reallocation of the budget between programs/activities with a maximum value of 10% of the total 2024 investment without changing the total investment value.</i>
Persetujuan pemberian wewenang dan kuasa kepada PT DANAREKSA (Persero) untuk: - Menyetujui perubahan dan realokasi anggaran antar program/ kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total investasi Tahun 2024 tanpa mengubah nilai investasi; - Menyetujui perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan inisiatif strategis, anggaran, dan/ atau pencadangan. <i>Approval to grant authority and power to PT DANAREKSA (Persero) to:</i> <i>Approve changes and budget reallocations between programs/ activities with a maximum value of 10% of the total 2024 investment without changing the total investment value.</i> <i>Approve changes to the Company Work Plan and Budget (RKAP) for 2024 of the Company, including but not limited to changes in strategic initiatives, budgeting, and/or projections.</i>	Menyetujui pemberian wewenang dan kuasa kepada PT DANAREKSA (Persero) untuk: - Menyetujui perubahan dan realokasi anggaran antar program/ kegiatan investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari total investasi Tahun 2024 tanpa mengubah nilai investasi; - Menyetujui perubahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2024 Perseroan, termasuk namun tidak terbatas pada perubahan inisiatif strategis, anggaran, dan/ atau pencadangan. <i>To approve the granting of authority and power to PT DANAREKSA (Persero) to:</i> <i>Approve changes and budget reallocations between programs/ activities with a maximum value of 10% of the total 2024 investment without changing the total investment value.</i> <i>Approve changes to the Company Work Plan and Budget (RKAP) for 2024 of the Company, including but not limited to changes in strategic initiatives, budgeting, and/or projections.</i>

RUPST 28 Juni 2024

June 28, 2024 AGMS

Pada tahun 2024, perseroan menyelenggarakan RUPST pada tanggal 28 Juni 2024 yang berlokasi di Menara Danareksa, dengan dihadiri oleh pemegang kuasa pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi perseroan. Seluruh keputusan yang diambil melalui RUPS telah berlaku dan ditindaklanjuti setelah RUPS ditutup.

In 2024, the company held an AGM on June 28, 2024, located in Menara Danareksa, which was attended by proxy holders of shareholders, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors of the company. All decisions made through the GMS have taken effect and been followed up after the GMS was closed.

Agenda dan Realisasi Keputusan RUPST 2024

Agenda and Realization of the 2024 AGMS Resolution

Agenda Agenda	Keputusan Resolution
Persetujuan Laporan Tahunan perseroan dan Pengesahan Laporan Keuangan perseroan, Persetujuan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2023, serta Pengesahan Laporan Pelaksanaan Program Pendapatan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023 sekaligus Pemberian Pelunasan dan Pembebasan Tanggungan Sepenuhnya (<i>volledig acquit de charge</i>) kepada Direksi atas Tindakan Kepengurusan perseroan dan Dewan Komisaris atas Tindakan pengurusan perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023. <i>Approval of the company's Annual Report and Ratification of the company's Financial Statements, Approval of the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners for Fiscal Year 2023, as well as Ratification of the Implementation Report of the Micro and Small Business Income Program (PUMK) for Fiscal Year 2023, along with the Granting of Full Release and Discharge (volledig acquit de charge) to the Board of Directors for the management actions of the company and to the Board of Commissioners for the supervisory actions of the company carried out during Fiscal Year 2023.</i>	- Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir 31 Desember 2023. <i>Approving the company's Annual Report, including the Supervisory Report of the Board of Commissioners for the Fiscal Year ending December 31, 2023.</i> - Mengesahkan: - Laporan Keuangan perseroan untuk Tahun Buku 2023 berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik (AKP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00100/2.1030/AU.1/03/1169-2/1/II/2024, tanggal 21 Februari 02 2024 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material". - Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang menjadi bagian dari Laporan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan yang telah diaudit oleh (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya Nomor 00167/2.1020/AU.2.12.1169-2/0-II/2024 tanggal 21 Februari 2024 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material". <i>To ratify:</i> <i>The company's Financial Statements for the Fiscal Year 2023 ending on December 31, 2023, which have been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, as stated in their report No. 00100/2.1030/AU.1/03/1169-2/1/II/2024 dated February 21, 2024, with an opinion of "fair in all material respects".</i> <i>The Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2023 ending on December 31, 2023, which is part of the Social and Environmental Responsibility Report, and has been audited by the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, as stated in their report No. 00167/2.1020/AU.2.12.1169-2/0-II/2024 dated February 21, 2024, with an opinion of "fair in all material respects".</i>

Agenda Agenda	Keputusan Resolution
	3. Dengan telah disetujuinya Laporan Tahunan perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan disahkannya Laporan Keuangan Perseroan serta Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) untuk Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 maka RUPS memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>acquit et de charge</i>) kepada seluruh anggota Direksi atas tindakan pengurusan Perseroan dan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris atas Tindakan Pengawasan perseroan yang telah dijalankan selama Tahun Buku 2023 yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan/atau melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan prosedur hukum yang berlaku dan tercermin dalam buku-buku laporan perseroan. <i>With the approval of the company's Annual Report, including the Supervisory Duties Report of the Board of Commissioners, and the ratification of the company's Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the Fiscal Year 2023 ending on December 31, 2023, the General Meeting of Shareholders (GMS) hereby grants full release and discharge (acquit et de charge) to all members of the Board of Directors for the management actions and to all members of the Board of Commissioners for the supervisory actions carried out during the Fiscal Year 2023 ending on December 31, 2023, provided that such actions were not criminal offenses and/or did not violate the prevailing laws and regulations or applicable legal procedures, and are reflected in the company's official reports.</i>
Penetapan Penggunaan Laba Bersih perseroan Tahun Buku 2023. <i>Determination of the Use of the company's Net Profit for Fiscal Year 2023.</i>	Penetapan Penggunaan Laba Bersih perseroan Tahun Buku 2023 akan ditetapkan secara tersendiri. <i>The determination of the use of the company's net profit for Fiscal Year 2023 will be stipulated separately.</i>
Penetapan Gaji/ Honorarium Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya Untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2023. <i>Determination of Salaries/Honorariums Along with Facilities and Other Allowances for the Board of Directors and the Board of Commissioners of the Company for Fiscal Year 2024, and Tantiem (Performance Bonuses) for the Board of Directors and the Board of Commissioners for Fiscal Year 2023 Performance.</i>	Menetapkan Gaji/ Honorarium Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya Untuk Direksi dan Dewan Komisaris perseroan untuk Tahun Buku 2024 serta tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas Kinerja Tahun Buku 2023 akan ditetapkan secara tersendiri. <i>The determination of salaries/honorariums along with facilities and other allowances for the Board of Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2024, as well as tantiem for the Board of Directors and Board of Commissioners for the 2023 performance, will be stipulated separately.</i>
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Makro (PUMK) Tahun Buku 2024. <i>Appointment of a Public Accounting Firm (PAF) to Audit the company's Financial Statements and the Financial Statements for the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2024.</i>	Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan Perseroan dan Laporan Keuangan Pelaksanaan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Makro (PUMK) Tahun Buku 2024 dilakukan secara tersendiri oleh RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris. <i>The appointment of a Public Accounting Firm (PAF) to audit the Company's Financial Statements and the Financial Statements for the Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for Fiscal Year 2024 will be conducted separately by the GMS based on the recommendation of the Board of Commissioners.</i>

Rapat Umum Pemegang Saham Tahun Sebelumnya

General Meeting of Shareholders in the Previous Year

Agenda dan Realisasi Keputusan RUPST 2023

Agenda and Realization of the 2023 AGMS Resolution

Pada tahun 2023, perseroan menyelenggarakan RUPST sebanyak 2 kali, yakni pada tanggal 30 Januari 2023 dan 27 Juni 2023 dengan dihadiri oleh pemegang kuasa pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi Perseroan.

In 2023, the company held 2 AGMS, namely on 30 January 2023 and 27 June 2023, which were attended by proxy holders of shareholders, members of the Board of Commissioners, and members of the Board of Directors of the Company.

RUPST 30 Januari 2023

January 30, 2023 AGMS

Agenda Agenda	Keputusan Resolution
Persetujuan Laporan Tahunan perseroan dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2022 serta Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Tahun Buku 2022. <i>Approval of the company's Annual Report and validation of the Company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year and the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report for the 2022 Fiscal Year.</i>	Menyetujui Laporan Tahunan 2022 termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan mengesahkan Laporan keuangan perseroan untuk Tahun Buku 2022 termasuk laporan penunjang lainnya yang telah diaudit oleh KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagaimana dimuat dalam laporannya No. 00180/2.1030/AU.1/03/1169-1/1/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material" serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindakan pidana dan tercermin dalam buku-buku laporan perseroan. <i>Approving the 2022 Annual Report including the Board of Commissioners' Supervisory Task Report and ratify the company's Financial Statements for the 2022 Fiscal Year including other supporting reports that have been audited by KAP Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as stated in its report No. 00180/2.1030/AU.1/03/1169-1/1/ III/2023 dated March 14, 2023 with the opinion "fair, in all material respects" and providing full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the company's Board of Directors and Board of Commissioners for the management and supervision actions that have been carried out in the financial year ending December 31, 2022 as long as the actions do not constitute criminal acts and are reflected in the Company's report books.</i>
Persetujuan Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) perseroan Tahun Buku 2022 dan Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2022. <i>Approval of the company's Annual Report on Social and Environmental Responsibility (TJSL) Program for the 2022 Fiscal Year and Validation of the Financial Report on the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2022 Fiscal Year.</i>	Menyetujui Laporan Tahunan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) Tahun Buku 2022 PT Indra Karya (Persero) telah diaudit oleh KAP RSM Indonesia Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sesuai laporannya No. 00193/2.1030/AU.2/12/1169-1/0/III/2023 tanggal 14 Maret 2023 dengan pendapat "wajar, dalam semua hal yang material", serta memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab (<i>volledig acquit et de charge</i>) kepada Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan TJSL Tahun Buku 2022, sepanjang tindakan tersebut bukan merupakan tindak pidana dan tercermin di dalam laporan tersebut. <i>Approving the Annual Report of the Social and Environmental Responsibility Program (TJSL) for the 2022 Fiscal Year of PT Indra Karya (Persero) which has been audited by KAP RSM Indonesia Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan in accordance with its report No. 00193/2.1030/AU.2/12/1169-1/0/III/2023 dated March 14, 2023 with the opinion of "fair, in all material respects", and providing full release and discharge of responsibility (volledig acquit et de charge) to the Board of Directors and Board of Commissioners of the company for the management and supervision of TJSL for the 2022 Fiscal Year, as long as the actions are not criminal acts and are reflected in the report.</i>

Agenda Agenda	Keputusan Resolution
Penetapan Penggunaan Laba Bersih perseroan Tahun Buku 2022. <i>Determination of Use of the company's Net Profit for the 2022.</i>	Menetapkan penggunaan laba bersih perseroan Tahun Buku 2022 sebesar Rp18.650.504.001,- seluruhnya untuk laba ditahan. <i>Determining the use of the Company's net profit for the 2022 Fiscal Year amounting to Rp18,650,504,001 entirely for retained earnings.</i>
Penetapan Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji untuk Direksi dan Honorarium Untuk Dewan Komisaris Perseroan Berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2023. <i>Determination of Tantiem for the 2022 Fiscal Year, Salary for Directors and Honorarium for the Board of Commissioners along with Facilities and Other Allowances for 2023.</i>	Besaran Tantiem Tahun Buku 2022, Gaji untuk Direksi dan Honorarium untuk Dewan Komisaris berikut Fasilitas dan Tunjangan Lainnya untuk Tahun 2023, akan ditetapkan dalam suatu keputusan tersendiri. <i>The amount of Tantiem for the 2022 Fiscal Year, Salary for Directors and Honorarium for the Board of Commissioners along with Facilities and Other Allowances for 2023, will be determined in a separate decision.</i>
Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) untuk Mengaudit Laporan Keuangan serta Laporan Keuangan dan Pelaksanaan Program pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023. <i>Appointment of Public Accounting Firm (KAP) to Audit Financial Statements and Financial Statements and Implementation of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year.</i>	1. Menunjuk kembali Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan sebagai auditor yang akan mengaudit Laporan Keuangan perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Perseroan untuk Tahun Buku 2023; <i>Reappointing the Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan as the auditor who will audit the company's Financial Statements and the Financial Statements of the Company's Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year;</i> 2. Memberikan wewenang dan kuasa kepada Dewan Komisaris perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan perseroan periode lainnya pada Tahun Buku 2023 untuk tujuan dan kepentingan Perseroan; <i>Delegating authority and power to the company's Board of Commissioners to appoint a Public Accounting Firm to conduct an audit of the Company's Financial Statements for other periods in the 2023 Fiscal Year for the purposes and interests of the Company;</i> 3. Melimpahkan kewenangan kepada Dewan Komisaris perseroan untuk menetapkan besaran imbalan jasa audit dan persyaratan penunjukan lainnya yang wajar bagi KAP tersebut, serta menunjuk Kantor Akuntan Publik pengganti dalam hal Kantor Akuntan Publik Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), karena sebab apapun, tidak dapat menyelesaikan audit Laporan Keuangan perseroan dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023, termasuk menetapkan imbalan jasa audit dan persyaratan lainnya bagi Kantor Akuntan Publik pengganti tersebut. <i>Delegating authority to the company's Board of Commissioners to determine the amount of audit service fees and other reasonable appointment requirements for the KAP, as well as to appoint a replacement Public Accounting Firm in the event that the Public Accounting Firm of Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan (RSM Indonesia), for whatever reason, is unable to complete the audit of the Company's Financial Statements and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Fiscal Year, including determining the audit service fees and other requirements for the replacement Public Accounting Firm.</i>

RUPST 27 Juni 2023
June 27, 2023 AGMS

Agenda Agenda	Keputusan Resolution
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 termasuk Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2023. <i>Approval of the 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP) including the 2023 Board of Commissioners Work Plan and Budget (RKA).</i>	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 termasuk di dalamnya Penetapan Klasifikasi Risiko PT Indra Karya (Persero) pada Kuadran Netral serta Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dewan Komisaris Tahun 2023. <i>Approving the 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP) including the Determination of the Risk Classification of PT Indra Karya (Persero) in the Neutral Quadrant and the 2023 Board of Commissioners Work Plan and Budget (RKA).</i>
Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA-TJSL) Tahun 2023. <i>Approval of the 2023 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA-TJSL)</i>	Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023. <i>Approving the 2023 Social and Environmental Responsibility Program Work Plan and Budget (RKA TJSL).</i>
Penetapan Key Performance Indicators (KPI) Direksi Tahun 2023 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. <i>Determination of the 2023 Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI) as stated in the 2023 Management Contract between the Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders.</i>	Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) Direksi Tahun 2023 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. <i>Establishing the 2023 Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI) as stated in the 2023 Management Contract between the Board of Directors and Board of Commissioners with Shareholders.</i>
Penetapan Key Performance Indicators (KPI) Direksi Tahun 2023 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. <i>Determination of the 2023 Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI) as stated in the 2023 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.</i>	Menetapkan Key Performance Indicators (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2023 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham. <i>Establishing the Key Performance Indicators (KPI) for the Board of Commissioners for 2023 as stated in the 2023 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.</i>
Penetapan Indikator Aspek Operasional untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2023. <i>Determination of Operational Aspect Indicators for Measuring Company Health Levels in 2023.</i>	Menetapkan Indikator Aspek Operasional untuk pengukuran Tingkat Kesehatan Tahun 2023. <i>Establishing Operational Aspect Indicators for measuring Health Level in 2023.</i>

Agenda dan Realisasi Keputusan RUPST 2023

Agenda and Realization of the 2023 AGMS Resolution

Perseroan juga menyelenggarakan RUPSLB sebanyak 1 (satu) kali pada 21 Agustus 2023, melalui diterbitkannya Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Selaku Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) perusahaan perseroan (Persero), yang telah dimuat di dalam Akta No. 06 tanggal 20 September 2023 oleh Nia Kurniasih, S.H., notaris di Jakarta, dengan keputusan sebagai berikut:

The company also held an EGMS 1 (one) time on August 21, 2023, through the issuance of the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises (SOE) as the General Meeting of Shareholders (GMS) of the company (Persero), which has been stated in Deed No. 06 dated September 20, 2023 by Nia Kurniasih, S.H., notary in Jakarta, with the following decisions:

Keputusan BUMN selaku RUPS SOE's decision as GMS

Agenda Agenda	Keputusan Resolution
1. Mengukuhkan pemberhentian dengan hormat Sdr. Eko Budiono sebagai Direktur Perusahaan perseroan PT Indra Karya yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor SK-199/MBU/06/2018 tanggal 28 Juni 2018, dengan Ucapan Terima kasih atas segala sumbang tenaga dan pikirannya selama memangku jabatannya tersebut. <i>Confirming the honorable dismissal of Mr. Eko Budiono as Director of the Limited Liability company PT Indra Karya who was appointed based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-199/MBU/06/2018 dated June 28, 2018, with gratitude for all his contributions of energy and thoughts during his tenure.</i>	Memberhentikan dan mengangkat Kembali Sdr. Eko Budiono sebagai direktur PT Indra Karya (Persero) sesuai dengan SK Menteri Nomor SK-240/MBU/08/2023 dan diaktakan Nomor 06 tanggal 20 September 2023 di hadapan notaris Nia Kurniasih, S.H Notaris di Jakarta. <i>Dismissing and reappointing Mr. Eko Budiono as the director of PT Indra Karya (Persero) in accordance with the Ministerial Decree No. SK-240/MBU/08/2023 and notarized No. 06 dated September 20, 2023 before notary Nia Kurniasih, S.H. Notary in Jakarta.</i>
2. Mengangkat Sdr. Eko Budiono sebagai Direktur perusahaan perseroan PT Indra Karya <i>Appointing Mr. Eko Budiono as Director of the Limited Liability company PT Indra Karya.</i>	

Dewan Komisaris

Board of Commissioners

Dewan Komisaris merupakan salah satu organ utama dalam struktur perseroan yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan fungsi pengawasan umum dan/atau khusus terhadap kebijakan dan jalannya pengelolaan perusahaan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Anggaran Dasar perseroan. Selain itu, Dewan Komisaris juga berperan memberikan nasihat strategis kepada Direksi dalam rangka memastikan tercapainya tujuan usaha secara optimal.

Peran Dewan Komisaris sangat krusial dalam menjamin kelangsungan usaha dan keberhasilan operasional perseroan secara menyeluruh, melalui pelaksanaan fungsi pengawasan yang independen, objektif, dan profesional.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, perseroan menetapkan ketentuan mengenai keberadaan dan wewenang Dewan Komisaris dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN, yang menjadi acuan dalam penguatan prinsip tata kelola yang baik di lingkungan BUMN.

The Board of Commissioners is one of the main organs in the company's structure that has the responsibility to carry out general and/or special supervisory functions over the policies and management of the company, in accordance with the provisions stated in the company's Articles of Association. In addition, the Board of Commissioners also plays a role in providing strategic advice to the Board of Directors in order to ensure the optimal achievement of business objectives.

The role of the Board of Commissioners is crucial in ensuring the company's overall business continuity and operational success through the implementation of an independent, objective, and professional supervisory function.

In carrying out its duties and functions, the company establishes provisions regarding the existence and authority of the Board of Commissioners based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs, which serves as a reference in strengthening the principles of good governance within SOEs.

Piagam Dewan Komisaris (Board Manual)

Board of Commissioners Charter (Board Manual)

Untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris, perseroan telah menetapkan Piagam Dewan Komisaris (*Board Manual*) sebagai pedoman kerja yang resmi. Piagam ini disahkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 048/KPTS/IK/XII/2021 tentang Penerapan Panduan Good Corporate Governance di PT Indra Karya (Persero).

Board Manual berfungsi sebagai acuan bagi Dewan Komisaris dalam menjalankan peran pengawasan dan pemberian nasihat secara profesional, transparan, dan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Dokumen ini memuat ketentuan yang mengatur tata kerja, hubungan kerja dengan Direksi, serta etika dan prinsip yang harus dijunjung tinggi dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Secara lebih rinci, isi dari *Board Manual* mencakup antara lain:

1. Skema pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Fungsi dan peran pengawasan Dewan Komisaris;
3. Fungsi dan peran pengurusan Direksi;
4. Fungsi *check and balances*; dan
5. Sosialisasi dan evaluasi.

To support the effective implementation of the duties and responsibilities of the Board of Commissioners, the company has established a Board of Commissioners Charter (Board Manual) as an official work guideline. This charter was ratified through the Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 048/KPTS/IK/XII/2021 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Guidelines at PT Indra Karya (Persero).

The Board Manual serves as a reference for the Board of Commissioners in carrying out its supervisory and advisory role in a professional, transparent manner, and in accordance with good governance principles. This document contains provisions governing the work procedures, working relationship with the Board of Directors, as well as ethics and principles that must be upheld in the implementation of the supervisory function. In more detail, the contents of the Board Manual include, among others:

1. Scheme of the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors;
2. Supervisory functions and roles of the Board of Commissioners;
3. Management functions and roles of the Board of Directors;
4. Check and balances functions; and
5. Dissemination and evaluation

Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris

Membership and Composition of the Board of Commissioners

Persyaratan Anggota Dewan Komisaris

Membership Requirements of the Board of Commissioners

Untuk dapat menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris, terdapat sejumlah persyaratan yang wajib dipenuhi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Perseroan mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023

To be able to serve as a member of the Board of Commissioners, there are a number of requirements that must be met in accordance with applicable regulations. The company refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-

tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, yang mengatur kualifikasi dan integritas calon anggota Dewan Komisaris. Adapun persyaratan yang dimaksud meliputi:

Pasal 16

1. Orang perseorangan;
2. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
3. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan;
4. Tidak pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan/Perum dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan; dan
5. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

Masa Jabatan Anggota Dewan Komisaris***Term of Office of Members of the Board of Commissioners***

Dewan Komisaris ditetapkan untuk menjalankan masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan anggota yang telah menyelesaikan masa tugas tersebut dapat diangkat kembali untuk satu kali masa jabatan berikutnya. Ketentuan ini bertujuan untuk menjaga keberlanjutan pengawasan yang efektif sekaligus memberi ruang bagi penyegaran struktur organisasi.

Namun demikian, anggota Dewan Komisaris dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan disertai alasan yang jelas dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Adapun jabatan seorang anggota Dewan Komisaris dinyatakan berakhir apabila terjadi salah satu dari kondisi berikut:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatan berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri; dan/atau
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.

Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris***Dismissal of Members of the Board Of Commissioners***

Pemberhentian anggota Dewan Komisaris dapat dilakukan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), dengan disertai alasan yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Sebelum keputusan pemberhentian diambil, pemegang saham wajib memberitahukan rencana pemberhentian tersebut kepada anggota yang bersangkutan, baik secara lisan maupun tertulis.

Pemberhentian ini dapat dilakukan apabila anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan, berdasarkan fakta dan kenyataan, telah:

1. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan Anggaran Dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan perseroan dan/atau Negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatuhan yang seharusnya dihormati sebagaimana anggota Dewan Komisaris BUMN;
5. Dinyatakan bersalah dengan putusan Pengadilan yang mempunyai ketentuan hukum yang tetap;
6. Mengundurkan diri;
7. Memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis ke samping, termasuk hubungan yang timbul karena perkawinan antara anggota Direksi dengan anggota Dewan Komisaris;
8. Berdasarkan alasan lainnya yang dinilai tepat oleh RUPS demi kepentingan dan tujuan perseroan.

Owned Enterprises, which regulates the qualifications and integrity of prospective members of the Board of Commissioners. The requirements in question include:

Article 16

1. Individual;
2. Legally competent;
3. Never been declared bankrupt within 5 (five) years prior to the nomination;
4. Never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board who was found guilty of causing a company/Perum to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the nomination; and
5. Never been sentenced due to criminal acts that caused loss to state finances and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to the appointment.

The Board of Commissioners is appointed to serve a term of 5 (five) years, and members who have completed their term of office may be reappointed for one subsequent term. This provision aims to maintain the continuity of effective supervision while providing room for refreshing the organisational structure.

However, members of the Board of Commissioners may be dismissed at any time by the General Meeting of Shareholders (GMS), with clear reasons and in accordance with applicable law. The position of a member of the Board of Commissioners is declared terminated if one of the following conditions occurs:

1. Passed away;
2. If term of office ends;
3. If dismissed based on the resolution of GMS/Minister; and/or
4. If no longer fulfils the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the articles of association and prevailing laws including prohibited concurrent positions.

The dismissal of a member of the Board of Commissioners can be carried out at any time based on the decision of the General Meeting of Shareholders (GMS), with clear and justifiable reasons. Before the dismissal decision is made, the shareholders must notify the member concerned of the dismissal plan, either verbally or in writing.

This dismissal can be carried out if the member of the Board of Commissioners concerned, based on facts and reality, has:

1. Unable to carry out his/her duties properly;
2. Does not implement the provisions of the laws and regulations and/or the provisions of the Articles of Association;
3. Engages in actions that are detrimental to the company and/or the State;
4. Performs actions that violate ethics and/or compliance that should be respected as a member of the Board of Commissioners of SOEs;
5. Is found guilty by a court decision that has permanent legal force;
6. Resigns;
7. Has a family relationship up to the third degree, both vertically and horizontally, including a relationship from marriage between a member of the Board of Directors and a member of the Board of Commissioners;
8. Based on other reasons deemed appropriate by the GMS for the interests and objectives of the company.

Pengunduran Diri Anggota Dewan Komisaris**Resignation of Members of the Board Of Commissioners**

Seluruh anggota Dewan Komisaris memiliki hak untuk mengundurkan diri dari jabatannya, dengan tetap mengikuti ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan serta Anggaran Dasar perseroan. Adapun ketentuan yang mengatur pengunduran diri tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pemegang Saham, anggota Dewan Komisaris lainnya, dan Direksi paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dari tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri.
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan diri diterima dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, maka anggota Dewan Komisaris tersebut berhenti dengan sendirinya pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS.
3. Pengunduran diri anggota Dewan Komisaris dapat kurang dari 30 (tiga puluh) hari, apabila secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan merangkap jabatan.
4. Dalam hal anggota Dewan Komisaris tidak mengundurkan diri dan secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan merangkap jabatan, maka anggota Dewan Komisaris tersebut dianggap telah mengundurkan diri dan RUPS hanya menetapkan atau meratifikasi pengunduran diri tersebut telah menjadi efektif berdasarkan peraturan perundang-undangan.

All members of the Board of Commissioners have the right to resign from their position, while still following the provisions and procedures established by laws and regulations and the company's Articles of Association. The provisions governing resignation include the following:

1. *Notify in writing regarding his/her intention to Shareholders, other members of the Board of Commissioners, and the Board of Directors no later than 30 (thirty) days before the date of resignation. If resignation letter state that the effective date is less than 30 (thirty) days from the date the letter is received, then it is considered that the effective date of resignation is not stated.*
2. *If by the date requested by relevant member of the Board of Commissioners or within 30 (thirty) days from the date the letter is received in the event that the effective date of resignation is not stated, then member of the Board of Commissioners will automatically resign on requested date in upon or with expiry of 30 (thirty) days from the resignation request letter date is received without requiring GMS approval.*
3. *Resignation of member of the Board of Commissioners can be done in less than 30 (thirty) days, if statutory regulations do not allow the person concerned to hold concurrent positions.*
4. *If the member of the Board of Commissioners does not resign and statutory regulations do not allow the person concerned to hold concurrent positions, then member of the Board of Commissioners is deemed to have resigned and the GMS only determine or ratify that the resignation has become effective based on the statutory regulations.*

Komposisi Anggota Dewan Komisaris Tahun 2024**Composition of Members of the Board of Commissioners In 2024**

komposisi Dewan Komisaris perseroan per 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

The composition of the company's Board of Commissioners as of 31 December 2024 is as follows:

No No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
1	Airlangga Mardjono ¹	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-395/MBU/12/2021 tanggal 9 Desember 2021. <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-395/ MBU/12/2021 dated December 9, 2021.</i>
2	Fajar Rahwinto Soeharto ²	Komisaris <i>Commissioner</i>	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-143/MBU/06/2024 tanggal 19 Juni 2024. <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.No. SK-143/MBU/06/2024 dated June 19, 2024.</i>
3	Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetija Boedi ³	Komisaris <i>Commissioner</i>	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-268/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024. <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. No. SK-268/MBU/11/2024 dated November 11, 2024.</i>

¹⁾ Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024

²⁾ Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024

³⁾ Menjabat sejak 11 November 2024

¹⁾ No longer in office since November 11, 2024

²⁾ No longer in office since November 11, 2024

³⁾ Serving since November 11, 2024

Adapun Komposisi Dewan Komisaris perseroan per tanggal laporan ini disahkan adalah sebagai berikut:

The composition of the company's Board of Commissioners as of reporting date of the annual report is as follows:

No No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
1	Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetya Boedi	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No.SK-268/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024. <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-268/MBU/11/2024 dated November 11, 2024.</i>
2	Wicipto Setiadi	Komisaris <i>Commissioner</i>	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-54/MBU/03/2025 tanggal 11 Maret 2025. <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-54/MBU/03/2025 dated March 11, 2025.</i>
3	Ulfah Mashfufah	Komisaris Independen <i>Independent Commissioner</i>	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-54/MBU/03/2025 tanggal 11 Maret 2025. <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-54/MBU/03/2025 dated March 11, 2025.</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Duties and Responsibilities of the Board of Commissioners

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, khususnya Pasal 14, Dewan Komisaris sebagai organ pengawas di perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab yang mencakup hal-hal berikut:

1. Dalam melaksanakan tugasnya, Dewan Komisaris harus mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar;
2. Dewan Komisaris bertanggung jawab dan berwenang melakukan pengawasan atas kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai BUMN maupun usaha BUMN dan memberikan nasihat kepada Direksi;
3. Pengawasan dan pemberian nasihat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, dan tidak dimaksudkan untuk kepentingan pihak atau golongan tertentu;
4. Dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BUMN kecuali ditetapkan dalam anggaran dasar BUMN atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
5. Pengambilan keputusan kegiatan operasional BUMN oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggung jawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan BUMN;
6. Pembagian tugas Dewan Komisaris ditetapkan dengan keputusan Dewan Komisaris;
7. Dewan Komisaris memberikan persetujuan terhadap hal strategis sesuai dengan ketentuan anggaran dasar;
8. Dewan Komisaris wajib menyusun rencana kerja dan anggaran tahunan Dewan Komisaris yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari RKAP;
9. Dewan Komisaris wajib memiliki pedoman dan tata tertib kerja yang bersifat mengikat bagi setiap anggota Dewan Komisaris;
10. Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS/Menteri;
11. Dewan Komisaris harus memantau dan memastikan bahwa Tata Kelola Perusahaan yang Baik telah diterapkan secara efektif dan berkelanjutan;

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, especially Article 14, the Board of Commissioners as the supervisory organ in the Company has duties and responsibilities which include the following matters:

1. In fulfilling its duties, the Board of Commissioners is obliged to comply with the laws and regulations and/or articles of association;
2. The Board of Commissioners is responsible and authorized to supervise management policy and the general course of management, both regarding SOEs and SOEs business and provide advice to the Board of Directors;
3. The supervision and provision of advice, as referred to in paragraph (2), are carried out for the interest of the SOEs and in accordance with the purpose and objectives of the SOEs and are not intended for the interest of any particular party or group;
4. In supervising, as referred to in paragraph (2), the Board of Commissioners is prohibited from participating in decisionmaking on SOE operational activities unless stipulated in the SOE's articles of association or the provisions of laws and regulations;
5. Making decisions on SOE operational activities by the Board of Commissioners/Supervisory Board, as referred to in paragraph (4), is part of the supervisory duties of the Board of Commissioners. Thus, it does not negate the responsibility of the Board of Directors for implementing SOEs management;
6. The Board of Commissioners' resolutions determine the division of duties of the Board of Commissioners;
7. The Board of Commissioners approves strategic matters in accordance with the provisions of the articles of association.
8. The Board of Commissioners is obliged to prepare the annual work plan and budget of the Board of Commissioners which is an integral part of the RKAP;
9. The Board of Commissioners must hold work guidelines and regulations binding for each member of the Board of Commissioners.
10. The Board of Commissioners is obliged to submit a report regarding the supervisory duties carried out during the previous fiscal year to the GMS/Minister;
11. The Board of Commissioners is obliged to monitor and ensure that Good Corporate Governance is implemented effectively and sustainably;

12. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan Audit Intern, Audit Eksternal, audit BPK, audit BPKP, dan/atau hasil lembaga pengawasan otoritas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
13. Dewan Komisaris harus memastikan bahwa dalam laporan tahunan telah memuat informasi mengenai identitas, pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di perusahaan lain, termasuk rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku yang meliputi rapat internal maupun rapat gabungan dengan Direksi, serta honorarium, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan;
14. Dewan Komisaris wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya.

12. The Board of Commissioners is obliged to ensure that the Board of Directors has followed up on the findings of the Internal Audit, External Audit, BPK audit, BPKP audit, and/ or the results of other authority supervisory institutions in accordance with the provisions of laws and regulations;
13. The Board of Commissioners is obliged to ensure that the annual report contains information regarding the identity, main jobs, positions of the Board of Commissioners in other companies, including meetings held in one fiscal year (internal meetings or joint meetings with the Board of Directors), and honorarium, facilities, and/or other allowances received from the relevant SOEs;
14. The Board of Commissioners is obliged to report to the SOEs regarding their share ownership and/or their families in the relevant SOEs and other companies, including any changes thereto.

Pembagian Tugas Dewan Komisaris

Division of Duties of the Board of Commissioners

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah membagi tugasnya sebagai berikut:

In fulfilling its duties and responsibilities, the Board of Commissioners has divided their duties as follows:

No No	Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
1	Airlangga Mardjono ¹⁾	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	Melaksanakan pengawasan di bidang Operasional, SDM, Kebijakan dan Rencana Strategis sekaligus sebagai Ketua Nominasi, Remunerasi dan Pemantau Risiko <i>Conducting supervision in the field of Operations, HR, Policy and Strategic Plans as well as Chair of Nomination, Remuneration and Risk Monitor.</i>
2	Fajar Rahwinto Soeharto ²⁾	Komisaris <i>Commissioner</i>	Melaksanakan pengawasan di bidang Keuangan, Pemasaran dan Teknologi Informasi sekaligus sebagai Ketua Komite Audit. <i>Conducting supervision in the field of Finance, Marketing and Information Technology as well as Chair of the Audit Committee.</i>
3	Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetija Boedi ³⁾	Komisaris <i>Commissioner</i>	

¹⁾ Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024

²⁾ Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024

³⁾ Menjabat sejak 11 November 2024

¹⁾ No longer in office since November 11, 2024

²⁾ No longer in office since November 11, 2024

³⁾ Serving since November 11, 2024

Informasi Rangkap Jabatan Dewan Komisaris

Information on Concurrent Position of the Board of Commissioners

Informasi terkait rangkap jabatan anggota Dewan Komisaris pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Information related to the concurrent positions of members of the Board of Commissioners in 2024 is as follows:

No No	Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Position	
				Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Position in Other Companies/ Institutions	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Other Companies/ Institutions
1	Airlangga Mardjono ¹⁾	Komisaris Utama <i>President Commissioner</i>	2021-2026	Direktur Bendungan dan Danau <i>Director of Dams and Lakes</i>	Kementerian PUPR <i>Ministry of Public Works and Housing</i>
2	Fajar Rahwinto Soeharto ²⁾	Komisaris <i>Commissioner</i>	2024-2029	Komisaris <i>Commissioner</i>	PT Nindya Karya Beton <i>PT Nindya Karya Beton</i>
3	Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetija Boedi ³⁾	Komisaris <i>Commissioner</i>	2024-2029	-	-

¹⁾ Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024

²⁾ Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024

³⁾ Menjabat sejak 11 November 2024

¹⁾ No longer in office since November 11, 2024

²⁾ No longer in office since November 11, 2024

³⁾ Serving since November 11, 2024

Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris

Affiliation of the Board of Commissioners

Seluruh anggota Dewan Komisaris perseroan dipastikan tidak memiliki hubungan afiliasi, baik dalam bentuk hubungan keuangan, hubungan keluarga, maupun hubungan kepentingan lainnya dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham perseroan.

All members of the company's Board of Commissioners are certain to have no affiliations, whether in the form of financial relationships, family relationships, or other interests with other members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Shareholders of the company.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Dewan Komisaris Tahun 2024

Disclosure of Affiliation of the Board of Commissioners in 2024

No No	Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Hubungan Keuangan dengan Financial Relations with			Hubungan Keluarga dengan Family Relations with			Hubungan Kepengurusan Management Relations
				Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	
1	Airlangga Mardjono ¹⁾	Komisaris Utama President Commissioner	2021-2026	X	X	X	X	X	X	X
2	Fajar Rahwinto Soeharto ²⁾	Komisaris Commissioner	2021-2026	X	X	X	X	X	X	X
3	Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetija Boedi ³⁾	Komisaris Commissioner	2024-2029	X	X	X	X	X	X	X

¹⁾ Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024

²⁾ Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024

³⁾ Menjabat sejak 11 November 2024

¹⁾ No longer in office since November 11, 2024

²⁾ No longer in office since November 11, 2024

³⁾ Serving since November 11, 2024

Kepemilikan Saham Dewan Komisaris

Share Ownership of the Board of Commissioners

Hingga tanggal 31 Desember 2024, seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki kepemilikan saham di perseroan. Hal ini sejalan dengan status perseroan sebagai Badan Usaha Milik Negara (BUMN), di mana seluruh saham Perseroan (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Until 31 December 2024, all members of the Board of Commissioners do not have share ownership in the company. This is in line with the company's status as a State-Owned Enterprise (SOE), where all of the company's shares (100%) are owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Komisaris Independen

Independent Commissioner

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang bebas dari hubungan keuangan, jabatan, kepemilikan saham, maupun hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi, pemegang saham pengendali, serta tidak memiliki keterkaitan dengan BUMN yang bersangkutan, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dapat memengaruhi kemampuannya dalam menjalankan fungsi secara independen dan objektif. Penetapan komposisi dan kriteria Komisaris Independen bagi BUMN tertentu mengikuti ketentuan yang berlaku sesuai regulasi sektor usaha masing-masing BUMN dan/atau peraturan di bidang pasar modal, apabila relevan.

An Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who is free from financial relationships, positions, share ownership, or family relationships with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors, controlling shareholders, and has no direct or indirect relationship with the SOE in question that could affect his or her ability to perform his or her functions independently and objectively. The determination of the composition and criteria for Independent Commissioners for certain SOEs follows the applicable provisions according to the business sector regulations of each SOE and/or regulations in the capital market sector, if relevant.

Sampai dengan akhir tahun 2024, perseroan belum memiliki anggota Dewan Komisaris yang menjabat sebagai Komisaris Independen.

Until the end of 2024, the company does not have a member of the Board of Commissioners who serves as an Independent Commissioner.

Rapat Dewan Komisaris

Board of Commissioners Meeting

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan terhadap operasional bisnis perseroan, Dewan Komisaris secara berkala mengadakan rapat internal. Rapat ini menjadi forum penting untuk membahas perkembangan perusahaan, mengevaluasi kinerja Direksi, serta merumuskan rekomendasi strategis dalam rangka memastikan tercapainya tujuan usaha.

Adapun ketentuan terkait penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Rapat Dewan Komisaris harus diadakan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam setiap bulan, dan dalam rapat tersebut Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi;
2. Dewan Komisaris harus menetapkan tata tertib Rapat Dewan Komisaris;
3. Setiap Rapat Dewan Komisaris harus dibuatkan risalah rapat yang memuat pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), keputusan/kesimpulan rapat, serta alasan ketidakhadiran anggota Dewan Komisaris, apabila ada;
4. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak menerima salinan risalah Rapat Dewan Komisaris, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Dewan Komisaris tersebut;
5. Risalah asli dari setiap Rapat Dewan Komisaris harus disimpan oleh BUMN yang bersangkutan dan harus tersedia bila diminta oleh setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi; dan
6. Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.

Dewan Komisaris sepanjang tahun 2024 telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 12 (dua belas) kali dengan rincian sebagai berikut:

Frekuensi dan Kehadiran Dewan Komisaris dalam Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

Frequency and Attendance of the Board of Commissioners in the Board of Commissioners Meeting in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) (%)
Airlangga Mardjono ¹	Komisaris Utama President Commissioner	8	8	100
Fajar Rahwinto Soeharto ²	Komisaris Commissioner	8	8	100
Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetya Boedi ³	Komisaris Commissioner	4	4	100

¹⁾ Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024

²⁾ Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024

³⁾ Menjabat sejak 11 November 2024

In order to support the implementation of duties and responsibilities for overseeing the company's business operations, the Board of Commissioners periodically holds internal meetings. These meetings are an important forum to discuss the company's development, evaluate the performance of the Board of Directors, and formulate strategic recommendations to ensure the achievement of business objectives.

The provisions related to the organisation of Board of Commissioners meetings are as follows:

1. Meetings of the Board of Commissioners must be held periodically, at least once a month, and in such meetings the Board of Commissioners may invite the Board of Directors;
2. The Board of Commissioners must determine the regulations of the Board of Commissioners Meetings;
3. At every Board of Commissioners meeting, minutes of the meeting must be made containing the opinions that developed in the meeting, both supportive and non-supportive opinions or dissenting opinions, decisions/ conclusions of the meeting, as well as reasons for the absence of members of the Board of Commissioners, if any;
4. Each member of the Board of Commissioners has the right to receive a copy of the minutes of the Board of Commissioners Meeting, whether they are present or absent at the Board of Commissioners Meeting;
5. The relevant SOEs must keep the original minutes of each meeting of the Board of Commissioners and must be available if requested by each member of the Board of Commissioners and the Board of Directors; and
6. The number of meetings of the Board of Commissioners and the number of attendances of each member of the Board of Commissioners must be included in the SOEs Annual Report.

Throughout 2024, the Board of Commissioners has held 12 (twelve) internal meetings with the following details:

Agenda Rapat Dewan Komisaris Tahun 2024

Board of Commissioners Meeting Agenda in 2024

Agenda rapat Dewan Komisaris pada 2024 dapat dilihat pada bagian Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi subbagian Agenda Rapat Gabungan Tahun 2024.

The agenda for the Board of Commissioners meeting in 2024 can be seen in the Joint Meeting of the Board of Commissioners and Directors section, subsection of the Joint Meeting Agenda

Pendidikan dan/atau Pelatihan Dewan Komisaris Tahun 2024

Education and/or Training of the Board of Commissioners in 2024

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dengan perincian sebagai berikut:

Throughout 2024, the Board of Commissioners participated in education and/or training with the following details:

Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Pelatihan/Pendidikan Training/Education Dates	Nama Pelatihan/Pendidikan Name of Training/Education	Penyelenggara Organizer
Fajar Rahwinto Soeharto Komisaris/Commissioner	23-29 Agustus 2024 August 23-29, 2024	Sertifikasi CRGP CRGP Certification	RAP

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary to the Board of Commissioners

Dewan Komisaris perseroan didukung oleh Sekretaris Dewan Komisaris, yang berperan sebagai organ pendukung dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan secara efektif. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab membantu koordinasi internal, penyusunan agenda, dokumentasi rapat, hingga penyampaian informasi yang relevan kepada anggota Dewan Komisaris.

The company's Board of Commissioners is supported by the Secretary of the Board of Commissioners, who acts as a supporting organ in effectively supporting the implementation of supervisory duties and functions. The Secretary of the Board of Commissioners is responsible for assisting with internal coordination, agenda setting, meeting documentation, and the delivery of relevant information to members of the Board of Commissioners.

Penunjukan Sekretaris Dewan Komisaris dilakukan berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 36/KOM/IKA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Indra Karya (Persero). Berdasarkan keputusan tersebut, jabatan Sekretaris Dewan Komisaris diamanatkan kepada Sdr. Darajat, yang secara resmi diangkat pada tanggal 28 September 2022.

The appointment of the Secretary of the Board of Commissioners is based on the Decree of the Board of Commissioners No. 36/KOM/IKA/2022 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero). Based on this decision, the position of Secretary of the Board of Commissioners is mandated to Mr Darajat, who was officially appointed on 28 September 2022.

Profil Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary to the Board of Commissioners



DRAJAT

Sekretaris Dewan Komisaris
Secretary to the Board of Commissioners

Usia Age	59 Tahun 59 Years Old
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Garut, 20 September 1965 Garut, September 20, 1965
Domisili Domicile	Bekasi Bekasi
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan Pertama Kali Legal Basis of First-time Appointment

Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-395/MBU/12/2021 tanggal 9 Desember 2021
Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-395/MBU/12/2021 dated December 9, 2021

Riwayat Pendidikan Education Background

Sekolah Menengah Atas YBKP 3 (1985)
YBKP Senior High School 3 (1985)

Kepemilikan Saham pada Perseroan Ownership of the Company's Shares

Tidak Ada
None

Pengalaman Kerja Professional Experience

- Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT Industri Kapal Indonesia (2018-2021)
Secretary to the Board of Commissioners/Supervisory Board of PT Industri Kapal Indonesia (2018-2021)
- Analisis Kinerja BUMN (2020-2021)
SOEs Performance Analyst (2020-2021)
- Analisis Data BUMN (2014-2020)
SOEs Data Analyst (2014-2020)

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak Ada
None

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Dewan Komisaris

Implementation of the Secretary of the Board of Commissioners Duties

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, Sekretaris Dewan Komisaris memiliki peran strategis dalam mendukung kelancaran tugas dan fungsi pengawasan Dewan Komisaris. Adapun tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris meliputi:

Pasal 125

1. Sekretariat Dewan Komisaris bertugas melakukan kegiatan untuk membantu Dewan Komisaris BUMN dalam melaksanakan tugasnya berupa:
 - a. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (briefing sheet) Dewan Komisaris BUMN;
 - b. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris BUMN sesuai ketentuan anggaran dasar BUMN yang bersangkutan;
 - c. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris BUMN, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya;
 - d. Menyusun rancangan rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris BUMN;
 - e. Menyusun rancangan laporan-laporan Dewan Komisaris BUMN; dan
 - f. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris BUMN.
2. Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN selaku pimpinan Sekretariat Dewan Komisaris BUMN melaksanakan tugas lain berupa:
 - a. Memastikan bahwa Dewan Komisaris/Dewan Pengawas BUMN mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik;
 - b. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris BUMN secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
 - c. Mengkoordinasikan anggota komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris BUMN;
 - d. Sebagai penghubung (liaison officer) Dewan Komisaris BUMN dengan pihak lain; dan
 - e. Menindaklanjuti setiap Keputusan Dewan Komisaris dengan cara sebagai berikut:
 - i. Mencatat setiap keputusan yang dihasilkan dalam forum-forum pengambilan keputusan serta penanggung jawabnya;
 - ii. Memantau dan mengecek tahapan kemajuan pelaksanaan hasil keputusan rapat, pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan Dewan Komisaris lainnya;
 - iii. Melakukan upaya untuk mendorong pelaksanaan tindak lanjut keputusan rapat, pertimbangan, pendapat, saran dan keputusan Dewan Komisaris lainnya kepada penanggung jawab terkait;

Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the Secretary of the Board of Commissioners has a strategic role in supporting the smooth running of the duties and supervisory functions of the Board of Commissioners. The duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners include:

Article 125

1. The Secretariat of the Board of Commissioners is tasked with carrying out activities to assist the SOE Board of Commissioners in carrying out its duties in the form of:
 - a. Preparing meetings, including meeting materials (briefing sheets) for the SOE Board of Commissioners;
 - b. Preparing minutes of meetings of the SOE Board of Commissioners in accordance with the provisions of the SOE's articles of association;
 - c. Administering the SOE Board of Commissioners documents, including incoming letters, outgoing letters, minutes of meetings, and other documents;
 - d. Preparing a draft work plan and budget for the SOE Board of Commissioners;
 - e. Preparing draft reports of the SOE Board of Commissioners; and
 - f. Carrying out other duties of the SOE Board of Commissioners.
2. Apart from carrying out the duties as intended in paragraph (1), the Secretary of the SOE Board of Commissioners/ Supervisory Board as the head of the Secretariat of the SOE Board of Commissioners, carries out other duties in the form of:
 - a. Ensuring that the SOE Board of Commissioners/ Supervisory Board complies with statutory regulations and applies the principles of good corporate governance;
 - b. Providing information required by the SOE Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
 - c. Coordinating committee members, if necessary, in order to expedite the duties of the SOE Board of Commissioners;
 - d. As a liaison officer for the SOE Board of Commissioners with other parties; and
 - e. Following up on every Decision of the Board of Commissioners in the following manner:
 - i. Record every decision made in decision-making forums and the person in charge;
 - ii. Monitor and check the stages of progress in implementing the results of meeting decisions, considerations, opinions, suggestions and other decisions of the Board of Commissioners;
 - iii. Make efforts to encourage the implementation of follow-up to meeting decisions, considerations, opinions, suggestions and other decisions of the Board of Commissioners to the relevant person in charge;

Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris

Implementation of the Board of Commissioners Duties

Fungsi Pengawasan

Supervisory Function

Dewan Komisaris memiliki tanggung jawab utama dalam melakukan pengawasan atas kebijakan dan pelaksanaan perusahaan yang dijalankan oleh Direksi. Pengawasan ini mencakup seluruh dinamika usaha yang dijalankan perusahaan, dengan memastikan bahwa setiap kebijakan dan langkah strategis berada dalam koridor peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar perseroan, serta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

The Board of Commissioners has primary responsibility for overseeing the policies and implementation of the management of the company carried out by the Board of Directors. This oversight covers all business dynamics carried out by the company, by ensuring that every policy and strategic move is within the corridors of applicable laws and regulations, the company's Articles of Association, and the decisions of the General Meeting of Shareholders (GMS).

Selain fungsi pengawasan, Dewan Komisaris juga memberikan nasihat dan masukan strategis kepada Direksi dalam pelaksanaan tugasnya. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris pada tahun 2024 difokuskan pada pemantauan terhadap kebijakan pengelolaan dan pelaksanaan operasional perseroan yang dijalankan oleh Direksi. Pengawasan ini mencakup evaluasi terhadap konsistensi kebijakan manajerial dengan tujuan strategis perusahaan, serta memastikan jalannya pengurusan berjalan sesuai rencana.

Secara khusus, pengawasan diarahkan pada pelaksanaan dan pencapaian target-target yang tercantum dalam RKAP tahun 2024, sebagaimana tertuang dalam kontrak manajemen antara Direksi dan Pemegang Saham. Selain itu, Dewan Komisaris juga memantau kepatuhan terhadap ketentuan dalam Anggaran Dasar perseroan serta pelaksanaan keputusan dan arahan yang telah ditetapkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

Arahan dan Rekomendasi kepada Direksi

Directives and Recommendations to the Board of Directors

Sepanjang tahun 2024, Dewan Komisaris secara aktif melaksanakan fungsi pengawasan dan memberikan arahan serta rekomendasi strategis kepada Direksi dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dan kinerja perseroan secara optimal. Adapun bentuk pelaksanaan tugas Dewan Komisaris yang berkaitan dengan arahan dan rekomendasi tersebut meliputi:

1. Terhadap temuan audit pada *management letter*, Dewan Komisaris mendorong agar manajemen dapat menindaklanjutinya tepat waktu serta menjadikan sebagai evaluasi agar di periode berikutnya tidak terjadi lagi serta tata kelola menjadi lebih baik.
2. Dewan Komisaris mendukung upaya perbaikan & penyempurnaan sistem pengendalian internal yang efektif dan terus menerus, terutama terkait dengan tata kelola perusahaan yang baik (GCG), manajemen risiko, pengendalian, serta sistem kepatuhan di organisasi agar internal control, governance dan kinerja terjaga dengan optimal.
3. Dewan Komisaris meminta manajemen untuk memastikan seluruh operasional dilaksanakan secara keberlanjutan sesuai standar ISPO (*Indonesian Sustainable Palm Oil*) dan RSPO (*Roundtable on Sustainable Palm Oil*) sehingga dapat menjadi Perkebunan Kelapa Sawit yang *sustainable*.
4. Dewan Komisaris memandang pentingnya penguatan manajemen risiko dengan cara melakukan pelatihan dan sertifikasi manajemen risiko, serta memastikan peran masing-masing lini sesuai *three lines* model dapat berjalan dengan baik di perusahaan.
5. Dewan Komisaris meminta terhadap bisnis sawit yang dititipkan untuk dibuatkan SPO terutama terkait penggunaan dana pada *escrow account* serta pengawasan dan pencatatan agar dapat dilakukan secara hati-hari sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Selain itu, dalam operasional perusahaan untuk meminta pendampingan dari BPKP dan Kejaksaan.
6. Dewan Komisaris meminta manajemen untuk mengevaluasi kinerja unit yang belum mencapai target RKAP 2024 dan menyusun RKAP 2025 dengan kajian bisnis yang menyeluruh terutama terkait dengan bisnis sawit perusahaan.

In addition to the supervisory function, the Board of Commissioners also provides advice and strategic input to the Board of Directors in the performance of its duties. The implementation of the supervisory function by the Board of Commissioners in 2024 is focused on monitoring the company's operational management and implementation policies carried out by the Board of Directors. This oversight includes evaluating the consistency of managerial policies with the company's strategic objectives, as well as ensuring that management is running according to plan.

In particular, supervision is directed at the implementation and achievement of the targets set out in the 2024 RKAP, as set out in the management contract between the Board of Directors and Shareholders. In addition, the Board of Commissioners also monitors compliance with the provisions of the company's Articles of Association and the implementation of decisions and directions determined at the General Meeting of Shareholders (GMS).

Throughout 2024, the Board of Commissioners will actively carry out its supervisory function and provide strategic direction and recommendations to the Board of Directors in order to optimally support the achievement of the company's objectives and performance. The implementation of the duties of the Board of Commissioners relating to these directions and recommendations includes:

1. *Regarding the audit findings in the management letter, the Board of Commissioners encourages management to follow up in a timely manner and use them as evaluation points to prevent recurrence in the next period and to improve governance.*
2. *The Board of Commissioners supports the continuous improvement and enhancement of an effective internal control system, particularly concerning good corporate governance (GCG), risk management, control, and compliance systems within the organization, to ensure optimal internal control, governance, and performance.*
3. *The Board of Commissioners requests that management ensure all operations are conducted sustainably in accordance with ISPO (Indonesian Sustainable Palm Oil) and RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil) standards, so the company can become a sustainable palm oil plantation.*
4. *The Board of Commissioners considers it important to strengthen risk management by conducting risk management training and certification, and by ensuring that each line of responsibility in the three lines model is functioning properly within the company.*
5. *The Board of Commissioners requests that a Standard Operating Procedure (SOP) be established for the entrusted palm oil business, especially regarding the use of funds in the escrow account, as well as supervision and recording, to ensure all actions are conducted prudently and in accordance with applicable laws and good corporate governance. Additionally, the company's operations should be accompanied by oversight from BPKP (Financial and Development Supervisory Agency) and the Attorney General's Office.*
6. *The Board of Commissioners requests that management evaluate the performance of units that have not met the 2024 RKAP (Work Plan and Budget) targets and prepare the 2025 RKAP based on a comprehensive business study, especially with regard to the company's palm oil business.*

7. Dewan Komisaris menghimbau manajemen untuk selalu berkoordinasi dengan PT Perkebunan Nusantara IV dan K/L terkait sehingga bisnis sawit yang diamanatkan kepada PT APN dapat berjalan baik dan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan dan Tata Kelola Perusahaan yang Baik.
8. Dalam rangka transformasi perusahaan dan pemenuhan kebutuhan tenaga kerja, manajemen perlu melakukan asesmen terhadap setiap fungsi organisasi untuk menilai kecukupan SDM serta dampaknya terhadap program kerja, dengan tetap memperhatikan efisiensi biaya.

7. The Board of Commissioners urges management to continuously coordinate with PT Perkebunan Nusantara IV and relevant Ministries/Institutions to ensure that the entrusted palm oil business runs properly and in accordance with laws and good corporate governance principles.
8. In line with the company's transformation and workforce needs, management must assess each organizational function to evaluate HR adequacy and its impact on work programs, while maintaining cost efficiency.

Kunjungan Kerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners Working Visit

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan dan pembinaan usaha, Dewan Komisaris melaksanakan kunjungan kerja secara langsung ke berbagai kantor divisi/unit kerja maupun ke lokasi proyek. Kegiatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai pelaksanaan operasional, menilai kemajuan proyek, serta memastikan bahwa aktivitas usaha berjalan sesuai dengan rencana, ketentuan yang berlaku, dan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Adapun realisasi kunjungan kerja Dewan Komisaris selama tahun 2024 mencakup antara lain:

In order to carry out the function of business supervision and development, the Board of Commissioners conducts working visits directly to various division offices/work units as well as to project sites. This activity is carried out to obtain a real picture regarding the implementation of operations, assess project progress, and ensure that business activities are running according to plan, applicable regulations, and the principles of good corporate governance. The realisation of the Board of Commissioners' working visits during 2024 includes:

No No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	3 Juli 2024 July 3, 2024	Site Visit Pabrik Pemrosesan Air Minum Dalam Kemasan Infresh Site Visit to Infresh Bottled Drinking Water Processing Plant
2	5 Juli 2024 July 5, 2024	Site Visit Proyek Pembangunan Bendungan Pamukkulu di Sulawesi Selatan Site Visit to Pamukkulu Dam Construction Project in South Sulawesi
3	9 November 2024 November 9, 2024	- Pemaparan Kinerja DE I Performance Presentation of DE I - Site Visit Laboratorium Divisi SI Site Visit to the Laboratory of the SI Division

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Board of Commissioners Performance Assessment

Sebagai wujud komitmen terhadap peningkatan kualitas tata kelola serta evaluasi performa Dewan Komisaris, perseroan melaksanakan penilaian kinerja Dewan Komisaris secara terukur dengan menggunakan metode *Key Performance Indicators* (KPI). Penilaian ini bertujuan untuk memastikan kinerja Dewan Komisaris senantiasa memenuhi ekspektasi serta memberikan kontribusi optimal terhadap pencapaian tujuan strategis perseroan.

As a form of commitment to improving the quality of governance and evaluating the performance of the Board of Commissioners, the company carries out a measurable assessment of the performance of the Board of Commissioners using the *Key Performance Indicators* (KPI) method. This assessment aims to ensure that the performance of the Board of Commissioners always meets expectations and makes an optimal contribution to the achievement of the company's strategic objectives.

Adapun rincian indikator yang digunakan dalam KPI Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

The details of the indicators used in the KPI of the Board of Commissioners are as follows:

No No	Aspek Aspect	Skor Score
1	Aspek Perencanaan Planning Aspect	10,00
2	Aspek Pengawasan dan Pengarahan Supervision and Direction Aspect	38,00
3	Aspek Pelaporan Reporting Aspect	34,20
4	Aspek Dinamis Dynamic Aspect	14,00
Jumlah Total		96,20

Direksi

Board of Directors

Direksi merupakan organ perseroan yang memiliki peran sentral dalam mengelola dan menjalankan kegiatan operasional, bisnis, serta organisasi perusahaan. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan, termasuk perumusan dan implementasi strategi serta rencana kerja demi tercapainya tujuan bisnis secara optimal.

Perseroan menetapkan ketentuan yang mengatur tentang Direksi dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, yang merupakan pengganti dari Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) pada Badan Usaha Milik Negara. Dengan diberlakukannya peraturan tersebut, perseroan memastikan bahwa tugas, wewenang, serta tanggung jawab Direksi dalam mengelola bisnis dan operasional perseroan telah sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik, transparan, akuntabel, serta sesuai dengan kepentingan jangka panjang perseroan.

The Board of Directors is the organ of the company that has a central role in managing and running the operational activities, business, and organisation of the company. The Board of Directors has full responsibility for the management of the company, including the formulation and implementation of strategies and work plans to optimally achieve business objectives.

The company establishes provisions governing the Board of Directors with reference to the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, which replaces the Regulation of the State Minister for SOEs No. PER-01/MBU/2011 concerning the Implementation of Good Corporate Governance (GCG) in State-Owned Enterprises. With the enactment of this regulation, the company ensures that the duties, authorities, and responsibilities of the Board of Directors in managing the company's business and operations are in accordance with the principles of good corporate governance, transparency, accountability, and in accordance with the company's long-term interests.

Piagam Direksi (Board Manual)

Board of Directors Charter (Board Manual)

Dalam rangka memastikan Direksi mampu menjalankan tugas dan tanggung jawab secara optimal, perseroan telah memiliki Piagam Direksi (*Board Manual*) yang ditetapkan melalui Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 048/KPTS/IK/XII/2021 tentang Penerapan Panduan *Good Corporate Governance* di PT Indra Karya (Persero).

In order to ensure that the Board of Directors is able to carry out its duties and responsibilities optimally, the company has a Board of Directors Charter (Board Manual) which was stipulated through a Joint Decree of the Board of Commissioners and Board of Directors No. 048/KPTS/IK/XII/2021 concerning the Implementation of Good Corporate Governance Guidelines at PT Indra Karya (Persero).

Board Manual tersebut berfungsi sebagai acuan utama bagi Direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan, termasuk memberikan kejelasan terkait peran, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Direksi. Secara rinci, isi *Board Manual* mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Skema pola hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
2. Fungsi dan peran pengawasan Dewan Komisaris;
3. Fungsi dan peran pengurusan Direksi;
4. Fungsi *check and balances*;
5. Sosialisasi dan evaluasi.

The Board Manual serves as the main reference for the Board of Directors in managing the company, including providing clarity regarding the roles, duties, authorities, and responsibilities of the Board of Directors. In detail, the contents of the Board Manual cover the following matters:

1. *Scheme of the working relationship between the Board of Commissioners and the Board of Directors;*
2. *Supervisory functions and roles of the Board of Commissioners;*
3. *Management functions and roles of the Board of Directors;*
4. *Check and balances functions;*
5. *Dissemination and evaluation.*

Keanggotaan dan Komposisi Direksi

Membership and Composition of the Board of Directors

Persyaratan Anggota Direksi

Membership Requirements of the Board of Directors

Berdasarkan Peraturan Menteri BUMN No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara, persyaratan untuk menjadi anggota Direksi mencakup persyaratan materiil, formal, dan persyaratan tambahan lainnya. Secara lebih rinci, persyaratan tersebut meliputi:

1. Persyaratan Materiil (Pasal 3)

Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi BUMN atau anggota Direksi Anak Perusahaan, seseorang harus memenuhi syarat materiil yaitu:

Based on the Regulation of the Minister of SOEs No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises, the requirements to become a member of the Board of Directors include material, formal, and other additional requirements. In more detail, these requirements include:

1. *Material Requirements (Article 3)*

To be appointed as a member of the SOE Board of Directors or member of the Board of Directors of a Subsidiary, an individual must fulfill the material requirements, namely:

- a. Keahlian;
- b. Integritas;
- c. Kepemimpinan;
- d. Pengalaman;
- e. Jujur;
- f. Perilaku yang baik;
- g. Dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan.

2. Persyaratan Formal (Pasal 4)

Selain memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi Persero atau anggota Direksi Anak Perusahaan, seseorang harus memenuhi syarat formal sebagai berikut:

- a. Orang perseorangan;
- b. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
- c. Tidak pernah dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- d. Tidak pernah menjadi anggota direksi atau anggota dewan komisaris/dewan pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu BUMN, anak perusahaan dan/atau badan usaha lainnya dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan;
- e. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara, BUMN, anak perusahaan, badan usaha lainnya dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan.

3. Persyaratan Lain (Pasal 6)

Persyaratan lain Direksi BUMN adalah sebagai berikut:

- a. Bukan pengurus partai politik, calon anggota legislatif, dan/atau anggota legislatif pada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
- b. Bukan calon kepala/wakil kepala daerah dan/atau kepala/wakil kepala daerah, termasuk penjabat kepala/wakil kepala daerah;
- c. Tidak menjabat sebagai anggota Direksi pada BUMN atau Anak Perusahaan yang bersangkutan selama 2 (dua) periode;
- d. Tidak sedang menjabat sebagai pejabat pada kementerian/lembaga, anggota Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas pada BUMN lain, anggota Direksi pada BUMN lain, anggota Direksi pada Anak Perusahaan dan/atau badan usaha lainnya;
- e. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi;
- f. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melakukan tugasnya, yang dinyatakan dengan surat pernyataan dari yang bersangkutan;
- g. Sehat jasmani dan rohani, yakni tidak sedang menderita suatu penyakit yang dapat menghambat pelaksanaan tugas sebagai anggota Direksi, yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat dari rumah sakit; dan
- h. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan telah melaksanakan kewajiban membayar pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.

- a. Expertise;
- b. Integrity;
- c. Leadership;
- d. Experience;
- e. Honesty;
- f. Good behavior;
- g. High dedication to promoting and developing the Company.

2. Formal Requirements (Article 4)

Apart from fulfilling the criteria as intended in Article 3, to be appointed as a member of the Company's Board of Directors or member of the Board of Directors of a Subsidiary, an individual must fulfill the following formal requirements:

- a. Individual;
- b. Legally competent;
- c. Never been declared bankrupt within 5 (five) years prior to the appointment;
- d. Never been a member of the Board of Directors or a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board who was found guilty of causing SOEs, subsidiaries and/or other business entities to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to the appointment;
- e. Never been sentenced due to criminal acts that caused loss to state finances, SOEs, subsidiaries, other business entities and/or related to the financial sector within 5 (five) years prior to the appointment.

3. Other Requirements (Article 6)

Other requirements for the SOE Board of Directors are as follows:

- a. Not a Political Party official, candidate for a member of the legislature, and/or legislature members in the House of Representatives, Regional Representatives Council, Provincial Legislative Council, and Regency/City Legislative Council;
- b. Not a candidate for regional head/deputy head and/or a regional head/deputy head, including regional head/ deputy head officials;
- c. Not serving as a member of the Board of Directors of the relevant SOE or Subsidiary for 2 (two) periods;
- d. Not serving as an official in a ministry/institution, member of the Board of Commissioners/Supervisory Board in another SOEs, member of the Board of Directors in another SOEs, member of the Board of Directors in a Subsidiary and/or other business entity;
- e. Not currently holding a position that is prohibited from holding a position as a member of the Board of Directors according to statutory regulations;
- f. Having dedication and devoting full time to carry out his duties, which is stated in a statement from the person concerned;
- g. Physically and mentally healthy (not suffering from conditions that can hinder the performance of duties as the member of the Board of Directors), as evidenced by a health certificate from hospital; and
- h. Having a Taxpayer Identification Number (NPWP) and have carried out the obligation to pay taxes for the last two years.

Masa Jabatan Anggota Direksi

Term of Office of Members of the Board of Directors

Anggota Direksi memiliki masa jabatan selama 5 (lima) tahun, dan setelah berakhirnya masa jabatan tersebut, dapat diangkat kembali untuk maksimal 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Namun demikian, anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan disertai alasan yang jelas dan sah. Adapun jabatan anggota Direksi dinyatakan berakhir apabila:

Members of the Board of Directors have a term of office of 5 (five) years, and after the end of that term of office, they can be reappointed for a maximum of 1 (one) subsequent term of office. However, members of the Board of Directors can be dismissed at any time based on a decision from the General Meeting of Shareholders (GMS) with clear and valid reasons. The position of a member of the Board of Directors is declared terminated if:

1. Meninggal dunia;
2. Masa jabatan berakhir;
3. Diberhentikan berdasarkan RUPS; dan/atau
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi BUMN berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan termasuk rangkap jabatan yang dilarang.

Pemberhentian Anggota Direksi

Dismissal of Members of the Board of Directors

Anggota Direksi dapat diberhentikan sewaktu-waktu berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) atau Keputusan Menteri BUMN, dengan menyebutkan alasan pemberhentian yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun alasan pemberhentian tersebut antara lain meliputi:

1. Meninggal dunia; Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
2. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
3. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan negara;
4. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai anggota dewan komisaris/dewan pengawas BUMN;
5. Telah ditetapkan sebagai tersangka atau terdakwa oleh pihak yang berwenang dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau keuangan negara; atau
6. Dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Apabila terdapat perbedaan atau ketidaksesuaian antara ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri BUMN dengan Anggaran Dasar Perseroan terkait alasan pemberhentian anggota Direksi, maka yang menjadi acuan serta yang berlaku adalah ketentuan yang tertuang dalam Anggaran Dasar Perseroan.

Pengunduran Diri Anggota Direksi

Resignation of Members of the Board of Directors

Seluruh anggota Direksi berhak untuk mengundurkan diri dari jabatannya dengan mengikuti ketentuan dan prosedur yang berlaku, antara lain sebagai berikut:

1. Memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada perseroan dengan tembusan kepada Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan anggota Direksi lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya. Apabila dalam surat pengunduran diri disebutkan tanggal efektif kurang dari 30 (tiga puluh) hari dan tanggal surat diterima, maka dianggap tidak menyebutkan tanggal efektif pengunduran diri;
2. Apabila sampai dengan tanggal yang diminta oleh anggota Direksi yang bersangkutan atau dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri dalam hal tidak disebutkan tanggal efektif pengunduran diri, tidak ada keputusan dari RUPS, maka anggota Direksi tersebut berhenti pada tanggal yang diminta tersebut di atas atau dengan lewatnya waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal surat permohonan pengunduran diri diterima tanpa memerlukan persetujuan RUPS;
3. Pengunduran diri anggota Direksi dapat kurang dari 30 (tiga puluh) hari, apabila secara peraturan perundangan tidak memperbolehkan yang bersangkutan rangkap jabatan.

Ketentuan Mengenai Rangkap Jabatan Direksi

Provision on Concurrent Positions of the Board of Directors

Terdapat ketentuan mengenai rangkap jabatan yang dilarang bagi Direksi, yakni sebagai berikut:

1. Direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta;
2. Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;

1. Passed away;
2. Term of office ends;
3. Dismissed based on the GMS; and/or
4. No longer fulfills the requirements as the SOE Board Directors based on the Articles of Association and laws and regulations including prohibited concurrent positions.

Members of the Board of Directors may be dismissed at any time based on a decision of the General Meeting of Shareholders (GMS) or a decision of the Minister of State-Owned Enterprises, stating clear and accountable reasons for dismissal. The reasons for dismissal include:

1. Unable to carry out his/her duties properly;
2. Does not implement the provisions of the laws and regulations and/or the provisions of the Articles of Association;
3. Engages in actions that are detrimental to SOEs and/or the state finances;
4. Performs actions that violate ethics and/or compliance that should be respected as a member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOEs;
5. Has been named as a suspect or defendant by the authorities in an action that is detrimental to state-owned enterprises and/or state finances;
6. Declared guilty by a court decision that has permanent legal force.

If there are differences or discrepancies between the provisions stated in the Regulation of the Minister of SOEs and the Company's Articles of Association regarding the reasons for the dismissal of members of the Board of Directors, the provisions stated in the Company's Articles of Association shall be the reference and the applicable one.

All members of the Board of Directors have the right to resign from their position by following the applicable provisions and procedures, including the following:

1. Notifying the company in writing with copies to the Shareholders, the Board of Commissioners and fellow members of the Board of Directors of the intent no later than 30 (thirty) days prior to the date of their resignation. If the resignation letter mentions an effective date of less than 30 (thirty) days from the date the letter is received, it is deemed not to mention the effective date of the resignation;
2. If up to the date requested by the member of the Board of Directors concerned or within 30 (thirty) days from the date the resignation letter is received if the effective date of resignation is not stated, there is no decision from the GMS, the member of the Board of Directors automatically resigns on the requested date with the lapse of 30 (thirty) days from the date the resignation letter is received without requiring approval of the GMS;
3. The resignation of a member of the Board of Directors may be less than 30 (thirty) days, if the law does not allow the person concerned to hold concurrent positions.

There are provisions regarding prohibited multiple positions for the Board of Directors, which are as follows:

1. Board of Directors in SOEs, regionally-owned enterprises, private owned enterprises;
2. Board of Commissioners/Supervisory Board in SOEs;

3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan;
5. Pengurus partai politik, anggota legislatif dan/atau kepala daerah/wakil kepala daerah;
6. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan;
7. Menjadi calon legislatif atau calon kepala daerah/wakil kepala daerah; dan/atau
8. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS secara fisik, keputusan Menteri selaku RUPS, atau keputusan seluruh pemegang saham secara sirkuler.

Anggota Direksi dilarang untuk merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain, kecuali dalam kondisi tertentu yang diperbolehkan, yaitu:

1. Anggota Dewan Komisaris pada anak perusahaan/ perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, dengan ketentuan hanya berhak atas akumulasi penghasilan sebagai anggota Dewan Komisaris pada satu atau lebih anak perusahaan/perusahaan patungan maksimal sebesar 30 % (tiga puluh persen) dari gaji Anggota Direksi yang bersangkutan di BUMN, sedangkan penghasilan lain/ selebihnya diserahkan menjadi penghasilan BUMN yang bersangkutan;
2. Anggota Dewan Komisaris pada perusahaan lain untuk mewakili/memperjuangkan kepentingan BUMN sepanjang memperoleh ijin dari Menteri.

Apabila anggota Direksi memegang jabatan rangkap yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana disebutkan di atas, maka secara otomatis masa jabatannya sebagai anggota Direksi dinyatakan berakhir sejak terjadinya perangkapan jabatan tersebut.

Komposisi Anggota Direksi Tahun 2024

Membership Composition of the Board of Directors In 2024

Sepanjang tahun 2024, terdapat adanya perubahan pada komposisi Direksi. Berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-267/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024 dan Akta No. 04 tanggal 15 November 2024 dari Arminawan, S.H., Tuan Gok Ari Joso Simamora dialihkan penugasannya yang semula sebagai Direktur Utama menjadi Direktur, Tuan Eko Budiono diberhentikan sebagai Direktur, dan Tuan Agus Sutomo diangkat sebagai Direktur Utama.

3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
4. Other positions in accordance with the provisions of the laws and regulations;
5. Official of political parties, members of the legislature and/ or regional heads/deputy regional heads;
6. Other positions that may cause a conflict of interest;
7. Candidate for the legislature or candidate for regional head/ deputy regional head; and/or
8. Dismissed based on the resolution of the physical GMS, the decision of the Minister as the GMS, or the decision of all shareholders in a circular manner.

Members of the Board of Directors are prohibited from concurrently serving as members of the Board of Commissioners at other companies, except in certain conditions that are allowed, namely:

1. Members of the Board of Commissioners in a subsidiary/ joint venture of the SOE concerned, provided that they are only entitled to the accumulation of income as members of the Board of Commissioners in one or more subsidiaries/ joint ventures of a maximum of 30% (thirty percent) of the salary of the members of the Board of Directors concerned in the SOE, while other income/the rest is handed into the income of the SOE concerned;
2. Members of the Board of Commissioners in other companies to represent/promote the interests of the SOE throughout the consent of the Minister.

If a member of the Board of Directors holds multiple positions that do not comply with the provisions as mentioned above, then automatically the term of office as a member of the Board of Directors is declared terminated since the occurrence of the multiple positions.

Throughout 2024, there was a change in the composition of the Board of Directors. Pursuant to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-267/MBU/11/2024 dated November 11, 2024, and Notarial Deed No. 04 dated November 15, 2024, by Arminawan, S.H., Mr. Gok Ari Joso Simamora was reassigned from his position as President Director to Director, Mr. Eko Budiono was dismissed from his position as Director, and Mr. Agus Sutomo was appointed as President Director.

No No	Nama Name	Masa Jabatan Term of Office	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
1	Letjen TNI Purn. Agus Sutomo ¹	2024-2029	Direktur Utama President Director	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-267/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-267/MBU/11/2024 dated November 11, 2024
2	Gok Ari Joso Simamora ²	2022-2027	Direktur Director	Surat Keputusan Menteri BUMN No. SK-267/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-267/MBU/11/2024 dated November 11, 2024
3	Eko Budiono ³	2023-2028	Direktur Director	Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. SK-240/MBU/08/2023 tanggal 21 Agustus 2023 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-240/MBU/08/2023 dated August 21, 2023

¹) Menjabat sejak 11 November 2024

²) Dialihkan penugasan semula Direktur Utama, menjadi Direktur sejak 11 November 2024

³) Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024

¹) Serving since November 11, 2024

²) Reassigned from the position of President Director to Director as of November 11, 2024

³) No longer in office since November 11, 2024

Adapun Komposisi Direksi perseroan per tanggal laporan ini disajikan adalah sebagai berikut:

The composition of the company's Board of Directors as of reporting date of the annual report is as follows:

No No	Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
1	Letjen TNI Purn. Agus Sutomo	Direktur Utama <i>President Director</i>	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SSK-267/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024. <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-267/MBU/11/2024 dated November 11, 2024.</i>
2	Mayjen TNI Purn. Cucu Somantri	Direktur Perkebunan <i>Director of Palm Oil Plantation</i>	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-53/MBU/03/2025 tanggal 11 Maret 2025. <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-53/MBU/03/2025 dated March 11, 2025.</i>
3	Mayjen TNI Purn. Bachtiar Utomo	Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum <i>Director of Human Resources and General Affairs</i>	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-53/MBU/03/2025 tanggal 11 Maret 2025. <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-53/MBU/03/2025 dated March 11, 2025.</i>
4	M. Wais Fansuri	Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko <i>Director of Finance and Risk Management</i>	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-53/MBU/03/2025 tanggal 11 Maret 2025. <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-53/MBU/03/2025 dated March 11, 2025.</i>
5	Edi Slamet Irianto	Direktur Bisnis dan Pengembangan Industri <i>Director of Business and Industrial Development</i>	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-53/MBU/03/2025 tanggal 11 Maret 2025. <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-53/MBU/03/2025 dated March 11, 2025.</i>
6	Gagah Guntur Aribowo	Direktur Konsultan Konstruksi <i>Director of Construction Consultant</i>	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-53/MBU/03/2025 tanggal 11 Maret 2025. <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-53/MBU/03/2025 dated March 11, 2025.</i>
7	Ospin Sembiring	Direktur Operasi <i>Director of Operations</i>	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-53/MBU/03/2025 tanggal 11 Maret 2025. <i>Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-53/MBU/03/2025 dated March 11, 2025.</i>

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Duties and Responsibilities of the Board of Directors

Sebagai organ Perseroan yang memiliki fungsi strategis dalam pengelolaan bisnis dan operasional, Direksi memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Direksi harus melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai Pemangku Kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Penunjukan salah seorang anggota Direksi oleh Rapat Direksi sebagai penanggung jawab dalam penerapan dan pemantauan GCG di BUMN yang bersangkutan;
3. Direksi harus menyampaikan informasi mengenai identitas, pekerjaan-pekerjaan utamanya, jabatan Dewan Komisaris di anak perusahaan/perusahaan patungan dan/atau perusahaan lain, termasuk rapat-rapat yang dilakukan dalam satu tahun buku (rapat internal maupun rapat gabungan dengan Dewan Komisaris), serta gaji, fasilitas, dan/atau tunjangan lain yang diterima dari BUMN yang bersangkutan dan anak perusahaan/perusahaan patungan BUMN yang bersangkutan, untuk dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN;
4. Direksi wajib melaporkan kepada BUMN mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya (istri/suami dan anak-anaknya) pada BUMN yang bersangkutan dan perusahaan lain, termasuk setiap perubahannya;
5. Direksi wajib menyiapkan Rencana Jangka Panjang (RJP) yang memuat sasaran dan tujuan yang hendak dicapai dalam 5 (lima) tahun, yang berisi:

As an organ of the Company that has a strategic function in business and operational management, the Board of Directors has the following duties and responsibilities:

1. The Board of Directors is obliged to carry out their duties in good faith for the interest of SOEs and in accordance with the purpose and objectives of the SOEs, and ensure that the SOE carries out its social responsibility and pays attention to the interests of various Stakeholders in accordance with the provisions of the laws and regulations;
2. Appointment of member of the Board of Directors by the Board of Directors Meeting as party in charge for implementing and monitoring GCG in the relevant SOEs;
3. The Board of Directors is obliged to submit information regarding the identity, main duties, positions of the Board of Commissioners in subsidiaries/joint ventures and/or other companies, including meetings held in one fiscal year (internal meetings or joint meetings with the Board of Commissioners), as well as salary, facilities, and/ or other allowances received from the relevant SOEs and its subsidiaries/joint ventures of the relevant SOEs, to be included in the SOEs' Annual Report;
4. The Board of Directors is required to report to the SOEs regarding their share ownership and/or their family (wife/ husband and children) in the relevant SOEs and other companies, including any changes thereto;
5. The Board of Directors is required to prepare a Long-term Plan (RJP) which contains the goals and objectives to be achieved in 5 (five) years, which contains:

- a. Evaluasi pelaksanaan RJP sebelumnya;
 - b. Posisi BUMN saat ini;
 - c. Asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan RJP; dan
 - d. Penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja jangka panjang;
 6. Direksi wajib menyiapkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) sebagai penjabaran tahunan dari RJP, yang memuat antara lain:
 - a. Misi, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan;
 - b. Anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan;
 - c. Proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya; dan
 - d. Hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS/Menteri;
 7. Dewan Komisaris mengkaji dan memberikan pendapat atas RJP dan RKAP yang disiapkan Direksi sebelum ditandatangani bersama;
 8. Untuk memenuhi syarat akuntabilitas, keterbukaan, dan tertib administrasi, Direksi wajib:
 - a. Membuat Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS dan Risalah Rapat Direksi;
 - b. Membuat Laporan Tahunan dan Dokumen Keuangan Perusahaan;
 - c. Memelihara seluruh daftar, risalah, dan dokumen Keuangan Perusahaan dan dokumen lainnya;
 - d. Menyimpan di tempat kedudukan perusahaan, seluruh daftar, risalah, dokumen keuangan perusahaan, dan dokumen lainnya; dan
 9. Para anggota Direksi dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung dari pengambilan keputusan dan kegiatan BUMN yang bersangkutan selain penghasilan yang sah.
- a. Evaluation of previous RJP implementation;
 - b. The current position of SOEs;
 - c. Assumptions used in the preparation of RJP; and
 - d. Determination of long-term mission, goals, strategies, policies, and work programs;
 6. The Board of Directors is required to prepare the Company's Work Plan and Budget (RKAP) as annual details of the RJP, which includes, among others:
 - a. Mission, business targets, business strategies, company policies and work programs/activities;
 - b. Company budget which is detailed for each work program/ activity budget;
 - c. Financial projections of the company and its subsidiaries; and
 - d. Other matters that require resolution of the GMS/ Minister;
 7. The Board of Commissioners reviews and provides opinions on the RJP and RKAP prepared by the Board of Directors before collectively signed;
 8. To fulfill the requirements for accountability, transparency, and orderly administration, the Board of Directors is required to:
 - a. Prepare a Register of Shareholders, Special Register, Minutes of GMS and Minutes of the Board of Directors Meetings;
 - b. Prepare the Company's Annual Report and Financial Documents;
 - c. Maintain all registers, minutes, and financial documents of the Company and other documents;
 - d. Keep at the domicile of the Company, all registers, minutes, the Company's financial documents, and other documents; and
 9. Members of the Board of Directors are prohibited from taking actions that have a conflict of interest, and taking personal benefits, either directly or indirectly from the decision-making and activities of the SOEs concerned other than legitimate income.

Pembagian Tugas Direksi

Division of Duties of the Board of Directors

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah membagi tugasnya sebagai berikut:

In fulfilling its duties and responsibilities, the Board of Directors has divided its duties as follows:

No No	Nama Name	Jabatan Position	Tugas Duties
1	Letjen TNI Purn. Agus Sutomo ¹⁾	Direktur Utama <i>President Director</i>	Mengoordinasikan, mengawasi, mengarahkan, mengendalikan, menerapkan, mengevaluasi dan memimpin manajemen perseroan dalam memastikan semua kegiatan usaha perseroan dijalankan sesuai dengan visi, misi, dan nilai perseroan; mengawasi dan menelaah manajemen risiko, sistem pengendalian internal perseroan, tata kelola perusahaan untuk kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya, kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, serta memimpin Direksi, komunikasi perusahaan, audit internal, komunikasi, proses bisnis dan pengembangan bisnis perusahaan. <i>Coordinate, supervise, direct, control, implement, evaluate and lead the company's management in ensuring that all of the company's business activities are carried out in accordance with the company's vision, mission and values; supervise and review risk management, the company's internal control system, corporate governance for the benefit of shareholders and other stakeholders, compliance with applicable regulations, and lead the Board of Directors, corporate communications, internal audits, communications, business processes and business development of the company.</i>
2	Gok Ari Joso Simamora ²⁾	Direktur <i>Director</i>	Mengoordinasikan, merencanakan, mengarahkan, mengendalikan, menerapkan dan mengevaluasi aspek-aspek bisnis dan keseluruhan proses operasi, dan semua kegiatan usaha perseroan dijalankan sesuai dengan visi, misi dan nilai perseroan; sumber daya manusia, teknik, teknologi informasi, proses bisnis perusahaan. <i>Coordinate, plan, direct, control, implement and evaluate aspects of business and overall operational processes, and all business activities of the company are carried out in accordance with the company's vision, mission and values; human resources, engineering, information technology, business processes of the company.</i>
3	Eko Budiono ³⁾	Direktur <i>Director</i>	

¹⁾ Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024

²⁾ Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024

³⁾ Menjabat sejak 11 November 2024

¹⁾ No longer in office since November 11, 2024

²⁾ No longer in office since November 11, 2024

³⁾ Serving since November 11, 2024

Informasi Rangkap Jabatan Direksi

Information on Concurrent Position of the Board of Directors

Informasi terkait rangkap jabatan anggota Direksi pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Information related to the concurrent positions of members of the Board of Directors in 2024 is as follows:

No No	Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Informasi Rangkap Jabatan Information on Concurrent Position	
				Jabatan pada Perusahaan/ Instansi Lain Position in Other Companies/ Institutions	Nama Perusahaan/Instansi Lain Name of Other Companies/ Institutions
1	Letjen TNI Purn. Agus Sutomo	Direktur Utama President Director	2024-2029	Tidak Ada None	Tidak Ada None
2	Gok Ari Joso Simamora	Direktur Director	2022-2027	Tidak Ada None	Tidak Ada None
3	Eko Budiono	Direktur Director	2023-2028	Tidak Ada None	Tidak Ada None

Hubungan Afiliasi Direksi

Affiliation of the Board of Directors

Seluruh anggota Direksi perseroan tidak memiliki/memiliki hubungan afiliasi berupa hubungan keuangan, hubungan keluarga, maupun hubungan lainnya dengan anggota Dewan Komisaris, sesama anggota Direksi, dan/atau Pemegang Saham.

All the company's members of the Board of Directors have no affiliation in the form of financial, family, or other relations with fellow members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, and/or Shareholders.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi Direksi Tahun 2024

Disclosure of Affiliation of the Board of Directors in 2024

No No	Nama Name	Jabatan Position	Masa Jabatan Term of Office	Hubungan Keuangan dengan Financial Relations with			Hubungan Keluarga dengan Family Relations with			Hubungan Kepengurusan Management Relations
				Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	Dewan Komisaris Board of Commissioners	Direksi Board of Directors	Pemegang Saham Shareholders	
1	Letjen TNI Purn. Agus Sutomo	Direktur Utama President Director	2024-2029	X	X	X	X	X	X	X
2	Gok Ari Joso Simamora	Direktur Director	2022-2027	X	X	X	X	X	X	X
3	Eko Budiono	Direktur Director	2023-2028	X	X	X	X	X	X	X

Kepemilikan Saham Direksi

Share Ownership of the Board of Directors

Hingga 31 Desember 2024, seluruh anggota Direksi tidak memiliki saham di perseroan. Perseroan merupakan BUMN yang seluruh sahamnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

As of December 31, 2024, all members of the Board of Directors did not own shares in the company or in other companies. The company is a SOE whose entire shares (100%) are owned by the Government of the Republic of Indonesia.

Rapat Direksi

Board of Directors Meetings

Rapat Direksi harus diselenggarakan secara berkala dan konsisten untuk memastikan kelancaran pengelolaan dan pengurusan perseroan. Ketentuan yang mengatur pelaksanaan rapat Direksi adalah sebagai berikut:

1. Direksi mengundang Dewan Komisaris/Dewan Pengawas;
2. Direksi menetapkan tata tertib Rapat Direksi;
3. Risalah Rapat Direksi untuk setiap Rapat Direksi yang memuat segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat, tetapi tidak terbatas pada pendapat-pendapat yang berkembang dalam rapat, baik pendapat yang mendukung maupun yang tidak mendukung atau pendapat berbeda (*dissenting opinion*), serta alasan ketidakhadiran anggota Direksi, apabila ada;
4. Setiap anggota Direksi berhak menerima salinan risalah Rapat Direksi, baik yang bersangkutan hadir maupun tidak hadir dalam Rapat Direksi tersebut;
5. Risalah dari setiap Rapat Direksi harus disimpan oleh BUMN yang bersangkutan;
6. Jumlah rapat Direksi dan jumlah kehadiran masing-masing anggota Direksi harus dimuat dalam Laporan Tahunan BUMN.

Board of Directors meetings must be held regularly and consistently to ensure the smooth running and management of the company. The provisions governing the implementation of Board of Directors meetings are as follows:

1. *The Board of Directors invites the Board of Commissioners/Supervisory Board;*
2. *The Board of Directors determines the rules of the Board of Directors Meeting;*
3. *Minutes of the Board of Directors Meeting for each Board of Directors Meeting which contains everything discussed and decided at the Meeting, but is not limited to the opinions that developed in the meeting, both supportive and non-supportive opinions or dissenting opinions, as well as reasons for the absence of members of the Board of Directors, if any;*
4. *Each member of the Board of Directors is entitled to receive a copy of the minutes of the Board of Directors Meeting, whether he/she is present or absent at the Board of Directors Meeting;*
5. *The minutes of each meeting of the Board of Directors must be kept by the relevant SOEs;*
6. *The number of meetings of the Board of Directors and attendance of each member of the Board of Directors must be included in the SOEs Annual Report.*

Sepanjang tahun 2024, Direksi telah menyelenggarakan rapat internal sebanyak 29 (dua puluh sembilan) kali, dengan perincian sebagai berikut:

Throughout 2024, the Board of Directors has held 29 (twenty nine) internal meetings, with the following details:

Frekuensi dan Kehadiran Direksi dalam Rapat Direksi Tahun 2024

Frequency and Attendance of the Board of Directors in the Board of Directors Meetings in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) (%)
Letjen TNI Purn. Agus Sutomo ¹	Direktur Utama President Director	15	15	100
Gok Ari Joso Simamora ²	Direktur Director	29	29	100
Eko Budiono ³	Direktur Director	14	14	100

¹⁾ Menjabat sejak 11 November 2024

²⁾ Dialihkan penugasan semula Direktur Utama, menjadi Direktur sejak 11 November 2024

³⁾ Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024

¹⁾ Serving since November 11, 2024

²⁾ Reassigned from the position of President Director to Director as of November 11, 2024

³⁾ No longer in office since November 11, 2024

Agenda Rapat Direksi Tahun 2024

Board of Directors Meeting Agenda in 2024

No No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	2 Juli 2024 July 2, 2024	Rapat Pembahasan RJPP RJPP Discussion Meeting
2	10 Juli 2024, July 10, 2024	Rapat Evaluasi Divisi Internal Audit dengan Direksi Internal Audit Division Evaluation Meeting with the Board of Directors
3		Entry Meeting Risk Maturity Index (RMI) Entry Meeting for Risk Maturity Index (RMI)
4	16 Juli 2024 July 16, 2024	Rapat Koordinasi BOD-1 dengan Direksi Coordination Meeting of BOD-1 with the Board of Directors
5	23 Juli 2024 July 23, 2024	Rapat dengan Tim KTM serta Evaluasi sistem IKSmart Meeting with KTM Team and IKSmart System Evaluation

No No	Tanggal Date	Agenda Agenda
6	26 Juli 2024 July 26, 2024	Rapat Evaluasi Divisi <i>Operation & Business Development</i> dengan Direksi <i>Operation & Business Development Division Evaluation Meeting with the Board of Directors</i>
7	8 Agustus 2024 August 8, 2024	Rapat Evaluasi Divisi <i>Corporate Secretary</i> dengan Direksi <i>Corporate Secretary Division Evaluation Meeting with the Board of Directors</i>
8	10 September 2024 September 10, 2024	Rapat dengan Tim dari Bank BRI Cabang Pancoran <i>Meeting with the Team from BRI Bank, Pancoran Branch</i>
9	12 September 2024 September 12, 2024	Rapat Pembahasan <i>Mid Year</i> <i>Mid Year Discussion Meeting</i>
10	19 September 2024 September 19, 2024	Rapat Pembahasan Evaluasi Piutang DE III <i>DE III Receivables Evaluation Discussion Meeting</i>
11	23 September 2024 September 23, 2024	Rapat Evaluasi DSI & Piutang PAD <i>DSI & PAD Receivables Evaluation Meeting</i>
12	24 September 2024 September 24, 2024	Rapat Evaluasi DE I dan Piutang PAD DE III <i>DE I and PAD DE III Receivables Evaluation Meeting</i>
13	8 Oktober 2024 October 8, 2024	Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) <i>Management Review Meeting (MRM)</i>
14	15 Oktober 2024 October 15, 2024	Pertemuan Direksi dengan Merdeka Group <i>Board of Directors Meeting with Merdeka Group</i>
15	2 Desember 2024 December 2, 2024	Rapat dengan Tim Konsultan Kelapa Sawit <i>Meeting with Palm Oil Consultant Team</i>
16		Rapat dengan Tim POKJA <i>Meeting with the POKJA Team</i>
17	3 Desember 2024 December 3, 2024	<i>Kick Off Meeting KAP 2024</i> <i>2024 KAP Kick-Off Meeting</i>
18		Rapat dengan Konsultan Danareksa <i>Meeting with Danareksa Consultant</i>
19	5 Desember 2024 December 5, 2024	Rapat Koordinasi dengan PTPN <i>Coordination Meeting with PTPN</i>
20	6 Desember 2024 December 6, 2024	Rapat Pembahasan RKAP dengan PTPN <i>RKAP Discussion Meeting with PTPN</i>
21	9 Desember 2024 December 9, 2024	Rapat dengan Tim POKJA <i>Meeting with the POKJA Team</i>
22	12 Desember 2024 December 12, 2024	Harmonisasi Konsep RKAP TA 2025 dan SOP PT Agrinas Palma <i>Harmonization of 2025 Fiscal Year RKAP Concept and PT Agrinas Palma SOP</i>
23	13 Desember 2024 December 13, 2024	Rapat Pembahasan Harmonisasi Konsep RKAP TA 2025 dan SOP PT Agrinas Palma <i>Discussion Meeting on Harmonization of 2025 Fiscal Year RKAP Concept and PT Agrinas Palma SOP</i>
24	16 Desember 2024 December 16, 2024	Rapat dengan Tim Eksternal <i>Meeting with External Team</i>
25	17 Desember 2024 December 17, 2024	Rapat RKAP dan SOP <i>RKAP and SOP Meeting</i>
26	19 Desember 2024 December 19, 2024	Rapat <i>Konsinyering Day 2</i> <i>Consignment Meeting Day 2</i>
27	18 Desember 2024 December 18, 2024	Rapat <i>Konsinyering Day 1</i> <i>Consignment Meeting Day 1</i>
28	23 Desember 2024 December 23, 2024	Rapat Harmonisasi Tim POKJA <i>Harmonization Meeting with the POKJA Team</i>
29	24 Desember 2024 December 24, 2024	Rapat dengan Tim POKJA <i>Meeting with the POKJA Team</i>

Pendidikan dan/atau Pelatihan Direksi Tahun 2024

Education and/or Training of the Board of Directors in 2024

Sepanjang tahun 2024, Direksi mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dengan perincian sebagai berikut:

Throughout 2024, the Board of Directors participated in education and/or training with the following details:

Nama dan Jabatan Name and Position	Tanggal Pelatihan/ Pendidikan Training/ Education Dates	Nama Pelatihan/Pendidikan Name of Training/ Education	Penyelenggara Organizer
Eko Budiono Direktur Director	13 Juni 2024 June 13, 2024	Pelatihan Navigating Uncertainty: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management Navigating Uncertainty Training: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management	DANAREKSA
	22 Juni 2024 June 22, 2024	Webinar Internal Control Over Financial Reporting (ICFR) & Internal Control over Sustainability Reporting (ICSR) Internal Control Over Financial Reporting (ICFR) & Internal Control over Sustainability Reporting (ICSR) Webinar	IAMI
	23-24 Juli 2024 July 23-24, 2024	Pelatihan Risk Modelling (Risk Conference Subklaster Konstruksi Konsultan Karya 2024) Risk Modelling Training (Risk Conference for the Construction Consultant Sub-cluster 2024)	RAP

Pelaksanaan Tugas Direksi

Implementation of the Board of Directors Duties

Fungsi Pengelolaan dan Pengurusan

Pelaksanaan tugas Direksi sepanjang tahun 2024 terkait dengan fungsi pengelolaan dan pengurusan dapat diukur melalui capaian Key Performance Indicators (KPI) yang telah ditetapkan. KPI tersebut mencerminkan sejauh mana Direksi berhasil dalam menjalankan strategi dan operasional perusahaan. Adapun capaian KPI Direksi sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Management Function

The implementation of the Board of Directors' duties throughout 2024 related to management functions can be measured through the achievement of established Key Performance Indicators (KPIs). These KPIs reflect the extent to which the Board of Directors has succeeded in implementing the company's strategy and operations. The Board of Directors' KPI achievements throughout 2024 are as follows:

No No	Indikator Indicator	Skor Score
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia Social-Economic Value for Indonesia	47,20
2	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation	15,70
3	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	10,00
4	Peningkatan Investasi Investment Improvement	15,80
5	Pengembangan Talenta Talent Development	9,14
Jumlah/Total		97,84

Keputusan Direksi

Keputusan-keputusan telah diambil oleh Direksi sepanjang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Board of Directors Decree

Decrees issued by the Board of Directors throughout 2024 are as follows:

No	Bulan Month	Nomor Surat Letter No	Perihal Subject
1	Januari January	001/KPTS/IK/I/2024	Perubahan ke II Atas Penilaian Karyawan untuk Promosi, Rotasi, Demosi dan Mutasi Karyawan (Tim Kepegawaian) PT IK <i>Second Amendment to the Employee Assessment for Promotion, Rotation, Demotion, and Transfer (HR Team) PT IK</i>
2	Februari February	002/KPTS/IK/II/2024	Mutasi dan Pengangkatan Personil Pada Jabatan Struktural Tingkat BOD-2 Kantor Pusat a.n Nur Utomo <i>Transfer and Appointment of Personnel to Structural Position Level BOD-2 at Head Office on behalf of Nur Utomo</i>
3	Februari February	003/KPTS/IK/II/2024	Pengangkatan BOD-2 Communication dan Eksternal Relation Manager Kantor Pusat (PJS) a.n. Resa Nugraha <i>Appointment of BOD-2 Communication and External Relations Manager at Head Office (Acting) on behalf of Resa Nugraha</i>
4	Februari February	004/KPTS/IK/II/2024	Pengangkatan BOD-2 Finance Manager di DSI (PJS) a.n Gita Ayu Kesuma <i>Appointment of BOD-2 Finance Manager at DSI (Acting) on behalf of Gita Ayu Kesuma</i>
5	Februari February	005/KPTS/IK/II/2024	Pengangkatan Personil Sebagai Pejabat Sementara (PJS) Manager GA <i>Appointment of Personnel as Acting Manager of General Affairs (GA)</i>
6	Maret March	006/KPTS/IK/III/2024	Mutasi Personil Pada Jabatan Struktural Tingkat Board of Director-3 Staff Unit Corporate Transformation <i>Transfer of Personnel to Structural Position Level Board of Director-3 Staff in Corporate Transformation Unit</i>
7	Maret March	007/KPTS/IK/III/2024	Mutasi Personil Pada Jabatan Struktural Tingkat Board of Director-3 Staff Operasi Divisi Engineering III <i>Transfer of Personnel to Structural Position Level Board of Director-3 Staff in Engineering Division III Operations</i>
8	Maret March	008/KPTS/IK/III/2024	Pelaksanaan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2024 <i>Implementation of Religious Holiday Allowance Payment for 2024</i>
9	Maret March	010/KPTS/IK/III/2024	Pemberhentian Dengan Hormat Pensiun Dini a.n. Bpk Farid M <i>Honorable Discharge for Early Retirement on behalf of Mr. Farid M</i>
10	April April	011/KPTS/IK/IV/2024	Pengangkatan Calon Karyawan Tetap A.N. Rumi Alkindi Ednawan Sujono ST <i>Appointment of Prospective Permanent Employee on behalf of Rumi Alkindi Ednawan Sujono, ST</i>
11	April April	012/KPTS/IK/IV/2024	Pengangkatan Calon Karyawan Tetap a.n. Hendy Kusuma Rajasa,ST <i>Appointment of Prospective Permanent Employee on behalf of Hendy Kusuma Rajasa, ST</i>
12	April April	013/KPTS/IK/IV/2024	Pengangkatan Calon Karyawan Tetap a.n Anindya Estiandari,ST <i>Appointment of Prospective Permanent Employee on behalf of Anindya Estiandari, ST</i>
13	April April	014/KPTS/IK/IV/2024	Pengangkatan Calon Karyawan Tetap a.n Kresna Dwiki Komara,ST <i>Appointment of Prospective Permanent Employee on behalf of Kresna Dwiki Komara, ST</i>
14	Maret March	015/KPTS/IK/III/2024	Pemberhentian Dengan Hormat Memasuki Usia Pensiun a.n Rachmat Kurniawan S.Si <i>Honorable Discharge Due to Reaching Retirement Age on behalf of Rachmat Kurniawan, S.Si</i>
15	April April	016/KPTS/IK/IV/2024	KPTS Mutasi Staff an. Elfrida Manurung 0 Staff Internal Audit a.n Elfrida Manurung SH <i>Staff Transfer Decree for Elfrida Manurung – Internal Audit Staff on behalf of Elfrida Manurung, SH</i>
16	Mei May	017/KPTS/IK/V/2024	Pemberhentian Dengan Hormat Memasuki Usia Pensiun a.n Abdul Muin <i>Honorable Discharge Due to Reaching Retirement Age on behalf of Abdul Muin</i>
17	Mei May	018/KPTS/IK/V/2024	Rotasi Personil Pada Jabatan Struktural BOD-3 Divisi FAR <i>Rotation of Personnel in Structural Position BOD-3 FAR Division</i>
18	Juni June	019/KPTS/IK/VI/2024	Promosi Manager Proposal DSI a.n Denis Marais ST,MT <i>Promotion to Manager of Proposals at DSI on behalf of Denis Marais, ST., MT</i>
19	Juni June	020/KPTS/IK/VI/2024	Promosi Manager Operasi DSI a.n Adi Setio, ST. <i>Promotion to Operations Manager at DSI on behalf of Adi Setio, ST</i>
20	Juni June	021/KPTS/IK/VI/2024	Penetapan Promosi Personil Karyawan Struktural Menjadi PJS VP HGTM BOD-1 Bambang Palgunandi S.Kom <i>Personnel Promotion to Acting Vice President HGTM BOD-1 – Bambang Palgunandi, S.Kom</i>

No	Bulan Month	Nomor Surat Letter No	Perihal Subject
21	Juni June	022/KPTS/IK/VI/2024	Penetapan Promosi Karyawan Struktur PJS CSER Manager BOD-2 <i>Structural Employee Promotion to Acting CSER Manager BOD-2</i>
22	Juni June	023/KPTS/IK/VI/2024	Pemberhentian dan Pengangkatan Pada Jabatan Struktural BOD-1 dan BOD-2 <i>Dismissal and Appointment in Structural Positions BOD-1 and BOD-2</i>
23	Juli July	024/KPTS/IK/VII/2024	Perubahan IV Admin Portal BUMN <i>Fourth Amendment to BUMN Admin Portal</i>
24	Juli July	025/KPTS/IK/VII/2024	Perubahan II PIC Talenta BUMN <i>Second Amendment to BUMN Talent PIC</i>
25	Juli July	026/KPTS/IK/VII/2024	Pelimpahan Kewenangan Atas Pengelolaan Seluruh Fungsi dan Lini Bisnis Developer Division Kepada Survey & Investigation Division <i>Delegation of Authority for Management of All Functions and Business Lines of Developer Division to Survey & Investigation Division</i>
26	Juli July	027/KPTS/IK/VII/2024	Promosi, Rotasi, Demosi dan Mutasi Personil Karyawan Struktural dan Fungsional Akibat Pelaksanaan Pelimpahan Kewenangan Atas Pen <i>Promotion, Rotation, Demotion, and Transfer of Structural and Functional Personnel Due to Authority Delegation Implementation</i>
27	Agustus August	028/KPTS/IK/VIII/2024	Computer Security Incident Response Team PT IK <i>Computer Security Incident Response Team PT IK</i>
28	September September	030/KPTS/IK/IX/2024	Penggunaan Logo Perusahaan <i>Company Logo Usage</i>
29	September September	030-1/KPTS/IK/IX/2024	Pengangkatan Karyawan Tetap a.n Okky Suryono, S.Kom <i>Permanent Employee Appointment on behalf of Okky Suryono, S.Kom</i>
30	Oktober October	031/KPTS/IK/X/2024	Standar Layanan Informasi Publik PT IK <i>PT IK Public Information Service Standards</i>
31	Oktober October	032/KPTS/IK/X/2024	Penetapan Daftar Informasi Publik PT IK <i>Establishment of Public Information List of PT IK</i>
32	Oktober October	033/KPTS/IK/X/2024	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan PT IK <i>Classification of Exempted Information at PT IK</i>
33	Oktober October	034/KPTS/IK/X/2024	Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi PT IK <i>Appointment of Information and Documentation Management Officer at PT IK</i>
34	Oktober October	035/KPTS/IK/X/2024	Pengangkatan Karyawan Tetap a.n Rumi Alkindi Ednawan <i>Permanent Employee Appointment on behalf of Rumi Alkindi Ednawan</i>
35	Oktober October	036/KPTS/IK/X/2024	Pengangkatan Karyawan Tetap a.n Kresna Dwiki Komara <i>Permanent Employee Appointment on behalf of Kresna Dwiki Komara</i>
36	Oktober October	037/KPTS/IK/X/2024	Pengangkatan Karyawan Tetap a.n Hendy Kusumarajasa <i>Permanent Employee Appointment on behalf of Hendy Kusumarajasa</i>
37	Oktober October	038/KPTS/IK/X/2024	Pengangkatan Karyawan Tetap a.n Anindya Estiandari <i>Permanent Employee Appointment on behalf of Anindya Estiandari</i>
38	Oktober October	039/KPTS/IK/X/2024	Pembentukan Panitia Pembina Keselamatan dan Kesehatan Kerja (P3K3) di Lingkungan PT IK <i>Formation of the Occupational Health and Safety Committee (P3K3) at PT IK</i>
39	Oktober October	039-2/KPTS/IK/X/2024	Perubahan ke V Admin Portal <i>Fifth Amendment to Admin Portal</i>
40	November November	040/KPTS/IK/XI/2024	Pemberhentian Dengan Hormat Memasuki Usia Pensiun a.n Doni Ari Wardhana <i>Honorable Discharge Due to Reaching Retirement Age on behalf of Doni Ari Wardhana</i>
41	November November	041/KPTS/IK/XI/2024	Pemberhentian Dengan Hormat Memasuki Usia Pensiun a.n Wasis <i>Honorable Discharge Due to Reaching Retirement Age on behalf of Wasis</i>
42	November November	042/KPTS/IK/XI/2024	Pindah Tetap a.n Heru Indriyanto, SE <i>Permanent Transfer on behalf of Heru Indriyanto, SE</i>

Penilaian Kinerja Direksi

Board of Directors Performance Assessment

Sebagai bentuk komitmen terhadap peningkatan kualitas performa Direksi, perseroan melakukan penilaian kinerja Direksi melalui pencapaian Key Performance Indicators (KPI) yang telah ditetapkan. Penilaian ini bertujuan untuk mengukur sejauh mana Direksi berhasil dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mencapai target yang telah disusun dalam rencana strategis perusahaan.

Ketentuan mengenai penilaian kinerja Direksi diatur dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Adapun ketentuan yang tertuang dalam peraturan tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. RUPS wajib menetapkan Indikator Pencapaian Kinerja (Key Performance Indicators) Direksi berdasarkan usulan dari Dewan Komisaris;
2. Indikator Pencapaian Kinerja merupakan ukuran penilaian atas keberhasilan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Direksi wajib menyampaikan laporan triwulanan perkembangan realisasi indikator Pencapaian Kinerja kepada para Dewan Komisaris.

Hasil penilaian kinerja Direksi berdasarkan KPI tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut:

As a form of commitment to improving the quality of the Board of Directors' performance, the company assesses the performance of the Board of Directors through the achievement of predetermined Key Performance Indicators (KPIs). This assessment aims to measure the extent to which the Board of Directors is successful in carrying out its duties and responsibilities and achieving the targets set out in the company's strategic plan.

The provisions regarding the performance evaluation of the Board of Directors are regulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises. The provisions contained in the regulation include the following matters:

1. The GMS must determine the Key Performance Indicators for the Board of Directors based on the proposal from the Board of Commissioners;
2. Performance Achievement Indicators serve as a measure assessment of the successful implementation of the duties and responsibilities of the Board of Directors in accordance with the provisions of the applicable laws and regulations;
3. The Board of Directors is required to submit quarterly reports on the progress of the realization of the Performance Achievement indicators to the Board of Commissioners.

The results of the Board of Directors' performance assessment based on KPIs in 2024 can be seen in the following table:

No No	Indikator Indicator	Skor Score
1	Nilai Ekonomi dan Sosial untuk Indonesia <i>Social-Economic Value for Indonesia</i>	47,20
2	Inovasi Model Bisnis <i>Business Model Innovation</i>	15,70
3	Kepemimpinan Teknologi <i>Technology Leadership</i>	10,00
4	Peningkatan Investasi <i>Investment Improvement</i>	15,80
5	Pengembangan Talenta <i>Talent Development</i>	9,14
Jumlah/Total		97,84

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Kebijakan Terkait Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Policy Related to the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris dan Direksi memiliki hak untuk mendapatkan remunerasi yang tepat dan sesuai dengan peraturan yang berlaku sebagai bentuk apresiasi atas kinerja yang telah dicapai dan kontribusi yang diberikan kepada perseroan. Remunerasi ini mencakup gaji, tunjangan, serta insentif lainnya yang ditetapkan berdasarkan kinerja dan pencapaian target perusahaan.

The Board of Commissioners and Board of Directors have the right to receive appropriate remuneration in accordance with applicable regulations as a form of appreciation for the performance achieved and contributions made to the company. This remuneration includes salaries, benefits, and other incentives determined based on performance and the achievement of company targets.

Dalam menetapkan remunerasi bagi masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Direksi, perseroan mengacu pada ketentuan sebagai berikut:

In determining the remuneration for each member of the Board of Commissioners and Board of Directors, the company refers to the following provisions:

1. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No.Per-13/MBU/09/2021 Tentang Perubahan Keenam atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-04/MBU/2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara; dan
2. Surat Danareksa dengan No. S-46/474/DIRUT Penetapan penghasilan 2022 serta Tantiem Tahun Buku 2021 Direksi dan Dewan Komisaris PT Indra Karya (Persero).

1. Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. Per-13/MBU/09/2021 on the Sixth Amendment to the regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-04/MBU/2014 on the Determination of Guidelines for the Income of the Board of Directors, Board of Commissioners and Supervisory Board of State-Owned Enterprises; and
2. Danareksa Letter with No. S-46/474/DIRUT Determination of the 2022 income and Tantiem for the 2021 Fiscal Year of the Board of Directors and Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero).

Prosedur Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Procedure for Determining the Remuneration of the Board of Commissioners and Board of Directors

Untuk memastikan bahwa remunerasi yang diberikan sesuai dengan besaran yang tepat, perseroan melalui Komite Nominasi dan Remunerasi menetapkan Pedoman dan Tata Tertib yang mengatur berbagai aspek terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab komite ini. Pedoman tersebut mencakup hal-hal seperti tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab, serta mengatur larangan, pembagian kerja, waktu kerja, etika kerja, serta struktur organisasi dan mekanisme rapat yang harus diikuti. Pedoman ini juga memuat ketentuan mengenai pelaksanaan tugas yang berkaitan dengan peran Komite Nominasi dan Remunerasi. Kebijakan yang diadopsi oleh Komite Nominasi dan Remunerasi mengacu pada:

1. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaga Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara 4756);
2. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara 4297);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER06/MBU/04/2021 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-12/MBU/2012 Tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
5. Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor KEP-117/M-MBU/2002 tanggal 01 Agustus 2002 tentang Penerapan Praktik Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara;
6. Peraturan Menteri BUMN No.PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
7. Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Indra Karya No. SK-40/MBU/02/2022 tentang Pemberhentian dan pengangkatan Direktur Utama Perusahaan perseroan (Persero) PT Indra Karya;
8. Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No. SK-16/S.MBU/2012 tentang Indikator/ Parameter penilaian dan evaluasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (Good Corporate Governance) Pada Badan Usaha Milik Negara; dan
9. Akta pernyataan keputusan rapat PT Indra Karya (Persero) Nomor 09 Tertanggal 27 Oktober 2020 dengan No. AHUAH.01.03.0410316 Perihal penerimaan pemberitahuan perubahan anggaran dasar PT Indra Karya (Persero);

Akta pernyataan keputusan Mentri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan perseroan persero PT Indra Karya Nomor 05 tertanggal 17 Februari 2022.

To ensure that the remuneration provided is at the right level, the company, through the Nomination and Remuneration Committee, establishes Guidelines and Rules that govern various aspects related to the implementation of the duties and responsibilities of this committee. The guidelines cover matters such as duties, authorities, obligations, and responsibilities, as well as regulating prohibitions, division of labour, working hours, work ethics, and organisational structure and meeting mechanisms that must be followed. These guidelines also contain provisions regarding the implementation of tasks related to the role of the Nomination and Remuneration Committee. The policies adopted by the Nomination and Remuneration Committee refer to:

1. Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Companies (State Institution of 2007 Number 106, Supplement to State Gazette 4756);
2. Law Number 19 of 2003 on State-Owned Enterprises (State Gazette 4297);
3. Government Regulation Number 45 of 2005 on the Establishment, Management and Supervision of State-Owned Enterprises;
4. Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-06/MBU /04/2021 of 2021 on Amendments to the Minister of State-Owned Enterprises Regulation Number PER-12/MBU/2012 on Supporting Organs for the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
5. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-117/M-MBU/2002 dated August 1, 2002, on the Implementation of Good Corporate Governance Practices in State-Owned Enterprises;
6. Minister of SOEs Regulation No.PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises;
7. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises at the General Meeting of Shareholders of the Company (Persero) PT Indra Karya No. SK-40/MBU/02/2022 on the Dismissal and Appointment of the President Director of the company (Persero) PT Indra Karya;
8. Decree of the Secretary of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 on Indicators/ Parameters for assessment and evaluation of the implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises; and
9. Deed of statement of PT Indra Karya (Persero) meeting resolutions Number 09 dated October 27, 2020, with Number AHUAH.01.03.0410316 Regarding notification receipt of amendment to the articles of association of PT Indra Karya (Persero);

Deed of statement of the Minister of State-Owned Enterprises resolutions as the General Meeting of Shareholders of PT Indra Karya (Persero) Number 05 dated February 17, 2022.

Struktur dan Komponen Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

Structure and Remuneration Component of the Board of Commissioners and Board of Directors

Berdasarkan peraturan dan ketentuan yang berlaku, perseroan telah menetapkan struktur dan komponen remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi dengan rincian sebagai berikut:

Based on applicable rules and regulations, the company has established a remuneration structure and components for the Board of Commissioners and Board of Directors with the following details:

Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Keputusan Resolution	Keterangan Description
Dewan Komisaris <i>Board of Commissioners</i>		
Gaji <i>Salary</i>	Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% (empat puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama, dan Honorarium anggota dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari Honorarium Komisaris Utama. <i>Honorarium for President Commissioner is set at 45% (forty five percent) of salary of the President Director, and honorarium for members of the Board of Commissioners is set at 90% (ninety percent) of honorarium for the President Commissioner.</i>	Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. <i>In accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.</i>
Honorarium <i>Honorarium</i>	Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama, dan Honorarium Anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama. <i>Honorarium for President Commissioner is set at 45% of salary of the President Director, and honorarium for members of the Board of Commissioners is set at 90% of honorarium for the President Commissioner.</i>	Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. <i>In accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.</i>
Tunjangan <i>Benefits</i>		
Tunjangan Hari Raya Keagamaan <i>Religious Holiday Allowances</i>	1 (satu) kali Honorarium. <i>1 (one) time Honorarium.</i>	Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
Asuransi Purna Jabatan <i>Retirement Insurance</i>	Premi yang ditanggung oleh perusahaan sebesar 25% dari Honorarium dalam 1 tahun. <i>The premium borne by the company is 25% of Honorarium in 1 year.</i>	<i>In accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.</i>
Tunjangan Transportasi <i>Transportation Benefits</i>	20% dari Honorarium per bulan. <i>20% of Honorarium per month.</i>	<i>In accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.</i>
Fasilitas <i>Facility</i>		
Fasilitas Kesehatan <i>Medical Facility</i>	Dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. <i>In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses.</i>	Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
Fasilitas Bantuan Hukum <i>Legal Aid Facility</i>	Sebesar pemakaian (at cost). <i>At cost.</i>	<i>In accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.</i>

Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Keputusan Resolution	Keterangan Description
Direksi <i>Board of Directors</i>		
Honorarium <i>Honorarium</i>	Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp82.000.000,- (Delapan Puluh Dua Juta Rupiah) perbulan. Gaji anggota Direksi lainnya sebesar 85% (delapan puluh lima persen) dari Gaji Direktur Utama. <i>President Director's salary is set at Rp82,000,000,- (Eighty Two Million Rupiah) per month. Salary of other members of the Board of Directors is 85% (eighty five percent) of the President Director's salary.</i> Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan sebagaimana table terlampir. Direksi dan Dewan komisaris dilarang untuk menerima jenis tunjangan dan/atau fasilitas lainnya di luar yang telah ditetapkan dalam surat ini. <i>Benefits and/or facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners are provided as in the table. Board of Directors and Board of Commissioners are prohibited from receiving other types of allowances and/or facilities other than those specified in this letter.</i> Gaji/Honorarium serta tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2022 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2022. <i>Salary/Honorarium as well as allowances and/or facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2022 will be effective from January 1, 2022.</i>	Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. <i>In accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.</i>
Tunjangan <i>Benefits</i>		
Tunjangan Hari Raya Keagamaan <i>Religious Holiday Allowances</i>	1 (satu) kali Gaji. <i>1 (one) time Salary.</i>	Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara.
Asuransi Purna Jabatan <i>Retirement Insurance</i>	Premi yang ditanggung oleh Perusahaan sebesar 25% dari Gaji dalam 1 tahun. <i>The premium borne by the Company is 25% of salary in 1 year.</i>	<i>In accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.</i>
Tunjangan Perumahan <i>Housing Allowance</i>	Rp22.500.000 per bulan / <i>per month*</i> Rp25.000.000 per bulan / <i>per month**</i> Rp27.500.000 per bulan / <i>per month***</i> <i>*) untuk wilayah Kabupaten dan Kota for Regency and City areas) untuk wilayah Ibu Kota Provinsi for the Provincial Capital area) untuk wilayah Ibu Kota Negara for the National Capital region</i>	Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. <i>In accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.</i> Apabila menyediakan rumah jabatan maka wajib digunakan sampai masa jabatan Direksi berakhir dan yang bersangkutan tidak diberikan Tunjangan Perumahan. <i>If official house is provided, it must be used until the term of office of Board of Directors ends and the person concerned is not given housing allowance.</i>

Struktur Remunerasi Remuneration Structure	Keputusan Resolution	Keterangan Description
Fasilitas Facilities		
Fasilitas Kendaraan Vehicle Facility	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional, dengan memperhatikan kondisi keuangan perusahaan. <i>1 (one) unit along with maintenance cost and operational cost, taking into account the company's financial condition</i>	Spesifikasi dan jenis kendaraan diatur oleh Dewan Komisaris dengan batas maksimal 3.500 cc untuk kendaraan berbahan bakar minyak atau batas maksimal 100 kWh untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (<i>battery electric vehicle</i>). <i>Vehicle specifications and types are regulated by the Board of Commissioners with maximum limit of 3,500 cc for oil-burning vehicles or maximum limit of 100 kWh for battery electric vehicles.</i>
Fasilitas Kesehatan Medical Facility	Dalam bentuk asuransi Kesehatan atau penggantian biaya pengobatan. <i>In the form of health insurance or reimbursement of medical expenses.</i>	Sesuai Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. <i>In accordance with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-3/MBU/03/2023 on Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.</i>
Fasilitas Bantuan Hukum Legal Aid Facility	Sebesar pemakaian. <i>At cost.</i>	

Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Perseroan berkomitmen untuk memastikan bahwa komposisi Dewan Komisaris dan Direksi mencerminkan keberagaman yang baik. Keberagaman dalam struktur kepemimpinan ini memainkan peran penting dalam menghadirkan sudut pandang yang lebih luas dalam pengambilan keputusan strategis, terutama untuk kebijakan penting yang berdampak pada masa depan perseroan.

The Company is committed to ensuring that the composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors reflects good diversity. Diversity in this leadership structure plays an important role in bringing a wider perspective to strategic decision-making, especially for important policies that have an impact on the company's future.

Selain itu, keberagaman ini diyakini akan menciptakan proses pengambilan keputusan yang lebih objektif dan komprehensif, di mana berbagai perspektif dapat dipertimbangkan secara maksimal. Dengan demikian, keberagaman dalam kepemimpinan tidak hanya meningkatkan kualitas keputusan, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang lebih inklusif dan kolaboratif, yang pada gilirannya berdampak positif terhadap keberlanjutan dan kesuksesan bisnis perseroan.

In addition, this diversity is believed to create a more objective and comprehensive decision-making process, where various perspectives can be fully considered. Thus, diversity in leadership not only improves the quality of decisions, but also creates a more inclusive and collaborative work environment, which in turn has a positive impact on the sustainability and success of the company's business.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Joint Meeting of the Board of Commissioners and Board of Directors

Dewan Komisaris dan Direksi sepanjang tahun 2024 telah menyelenggarakan rapat gabungan sebanyak 9 (sembilan) kali, dengan perincian sebagai berikut:

The Board of Commissioners and Board of Directors have held 9 (nine) joint meetings throughout 2024, with the following details:

Frekuensi dan Kehadiran Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan Tahun 2024

Frequency and Attendance of the Board of Commissioners and Board of Directors at the 2024 Joint Meeting

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) (%)
Dewan Komisaris Board of Commissioners				
Airlangga Mardjono*	Komisaris Utama President Commissioner	5	5	100

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) (%)
Fajar Rahwinto Soeharto*	Komisaris Commissioner	5	5	100
Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetija Boedi**	Komisaris Commissioner	4	4	100
Direksi <i>Board of Directors</i>				
Letjen TNI Purn. Agus Sutomo**	Direktur Utama President Director	4	4	100
Gok Ari Joso Simamora***	Direktur Director	9	9	
Eko Budiono*	Direktur Director	5	5	100

*) Berhenti menjabat sejak 11 November 2024

**) Menjabat sejak 11 November 2024

***) Dialihkan penugasan semula Direktur Utama, menjadi Direktur sejak 11 November 2024

*) No longer in office since November 11, 2024

**) Serving since November 11, 2024

***) Reassigned from the position of President Director to Director as of November 11, 2024

Agenda Rapat Gabungan Tahun 2024**Joint Meeting Agenda in 2024**

No No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	3 April 2024 April 3, 2024	Laporan Keuangan hasil Audit The audited Financial Statements
2	25 April 2024 April 25, 2024	Kinerja Triwulan I First Quarter Performance
3	26 Juni 2024 June 26, 2024	Persiapan RUPS Audit 2023 dan Usulan Remunerasi Preparation for the 2023 Audit General Meeting of Shareholders (GMS) and Remuneration Proposal.
4	24 Juli 2024 July 24, 2024	Usulan RJPP 2024-2029 Proposal of the 2024–2029 Long-Term Corporate Plan (RJPP)
5	29 Oktober 2024 October 29, 2024	Usulan RKAP 2025 The 2025 Corporate Work Plan and Budget (RKAP) proposal
6	29 November 2024 November 29, 2024	Kinerja sampai dengan bulan Oktober Performance up to the month of October
7	3 Desember 2024 December 3, 2024	Rapat Rencana Audit Laporan Keuangan 2024 Meeting on the 2024 Financial Statement Audit Plan
8	3 Desember 2024 December 3, 2024	Rapat Pembahasan Kajian Repurposing Bisnis Perkebunan Discussion Meeting on the Study of Plantation Business Repurposing
9	18 Desember 2024 December 18, 2024	Rapat Revisi Usulan RKAP Meeting to Revise the RKAP Proposal

Komite Audit

Audit Committee

Komite Audit adalah organ yang mendukung Dewan Komisaris dalam meningkatkan efektivitas pengawasan, khususnya terkait laporan keuangan, sistem pengendalian internal, audit internal dan eksternal, implementasi Good Corporate Governance (GCG), serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

The Audit Committee is an organ that supports the Board of Commissioners in improving the effectiveness of supervision, especially related to financial reports, internal control systems, internal and external audits, the implementation of Good Corporate Governance (GCG), and compliance with applicable regulations.

Piagam Komite Audit (Board Manual)

Audit Committee Charter (Board Manual)

Komite Audit memiliki piagam (*Board Manual*) yang diatur sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 024/KOM/IKA/2022 tanggal 21 Juni 2022. Piagam ini mencakup sejumlah ketentuan, antara lain mengenai (1) struktur organisasi dan masa tugas, (2) tugas, tanggung jawab, dan wewenang, serta (3) prosedur kerja Komite Audit. Komite Audit bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris, yang memastikan bahwa pelaksanaan tugasnya diawasi secara langsung.

The Audit Committee has a charter (*Board Manual*) which is regulated in accordance with the Decree of the Board of Commissioners No. 024/KOM/IKA/2022 dated 21 June 2022. This charter covers a number of provisions, including (1) organisational structure and term of office, (2) duties, responsibilities and authorities, and (3) working procedures of the Audit Committee. The Audit Committee reports directly to the Board of Commissioners, which ensures that the performance of its duties is directly supervised.

Komposisi Komite Audit

Composition of the Audit Committee

Pada tahun 2024, komposisi Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) orang Anggota, dengan rincian sebagai berikut:

In 2024, the composition of the Audit Committee consists of 1 (one) Chairperson and 1 (one) Member, with the following details:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office
Fajar Rahwinto Soeharto*	Ketua Chairman	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-143/MBU/06/2024 tanggal 19 Juni 2024. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.No. SK-143/MBU/06/2024 dated June 19, 2024.	19 Juni - 11 November 2024 June 19 - November 11, 2024
Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetya Boedi	Ketua Chairman	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-268/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024. Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. No. SK-268/MBU/11/2024 dated November 11, 2024.	11 November 2024 - 2027 November 11, 2024 - 2027
Ayudya Shinta Yunica	Anggota Member	Surat Komisaris PT Indra Karya (Persero) No. 36/KOM/IKA/2022, tanggal 28 September 2022, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Indra Karya (Persero). PT Indra Karya (Persero) Commissioner's Letter No. 36/KOM/ IKA/2022, dated September 28, 2022, concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary to the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero).	2021-2024

*) Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024 | No longer in office since November 11, 2024

Profil Komite Audit

Profile of the Audit Committee



Fajar Rahwinto Soeharto*

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Beliau ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-143/MBU/06/2024 tanggal 19 Juni 2024. Profil Beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Appointed as Chairman of the Audit Committee based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No.No. SK-143/MBU/06/2024 dated June 19, 2024. His profile can be seen in the Company Profile Chapter in this Annual Report.

*) Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024 | No longer in office since November 11, 2024



Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetya Boedi

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Beliau ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-268/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024. Profil Beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Appointed as Chairman of the Audit Committee based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. No. SK-268/MBU/11/2024 dated November 11, 2024. His profile can be seen in the Company Profile Chapter in this Annual Report.



Ayudya Shinta Yunica

Anggota Komite Audit
Member of the Audit Committee

Usia Age	35 Tahun 35 Years Old
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Bantul, 5 Juni 1989 Bantul, June 5, 1989
Domisili Domicile	Bogor Bogor
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesia

Riwayat Pendidikan Education Background

- S2 Manajemen dari Universitas Indonesia (2023)
Master's Degree in Management from Universitas Indonesia (2023)
- S1 Akuntansi dari Universitas Gadjah Mada (2011)
Bachelor's Degree in Accounting from Universitas Gadjah Mada (2011)

Pengalaman Kerja Professional Experience

- Analisis Kinerja BUMN Kementerian Badan Usaha Milik Negara (2019– Sekarang)
SOE Performance Analyst of the Ministry of State-Owned Enterprises (2019-Present)
- Strategic Planning Manager PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011– 2018)
Strategic Planning Manager at PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (2011-2018)

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Analisis Kinerja BUMN, Kementerian BUMN (2019-sekarang)
SOE Performance Analyst, Ministry of BUMN (2019-present)

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak Ada
None

Kepemilikan Saham pada Perseroan Ownership of the Company's Shares

Tidak Ada
None

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Duties and Responsibilities of the Audit Committee

Sebagai organ yang mendukung Dewan Komisaris, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- Membantu Dewan Komisaris untuk memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektivitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan Satuan Pengawasan Intern;

As an organ that supports the Board of Commissioners, the Audit Committee has the following duties and responsibilities:

- Assisting the Board of Commissioners to ensure the effectiveness of internal control system and effectiveness of duties of external auditor and Internal Audit Unit;*

2. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh auditor eksternal dan Satuan Pengawasan Intern;
 3. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
 4. Memastikan telah terdapat prosedur evaluasi yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
 5. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan perusahaan kepada pemegang saham dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya;
 6. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antar manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya;
 7. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa;
 8. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika perusahaan tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris;
 9. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan perusahaan;
 10. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris serta tugas-tugas Dewan Komisaris lainnya; dan
 11. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan perusahaan; dan menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi perusahaan.
2. Assessing the implementation of activities and results of audit by external auditor and the Internal Audit Unit;
 3. Provide recommendations regarding improvement to the management control system and its implementation;
 4. Ensure that there are satisfactory evaluation procedures for all information released by the company;
 5. Review financial information issued by the company to shareholders and/or authorities, including financial statements, projections, and other reports;
 6. Provide independent opinion in the event of difference of opinion between management and Accountant regarding the services provided;
 7. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding appointment of Accountant based on independence, scope of assignment and compensation for services;
 8. Review risk management implementation activities by the Board of Directors, if the company does not have risk monitoring function under the Board of Commissioners;
 9. Review complaints related to the company's accounting and financial reporting processes;
 10. Identify matters that require the attention of the Board of Commissioners as well as other duties of the Board of Commissioners; and
 11. Review and provide advice to the Board of Commissioners regarding potential conflicts of interest of the company; and maintain the confidentiality of company documents, data and information.

Pernyataan Independensi Komite Audit

Statement of Independence of the Audit Committee

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Audit diwajibkan untuk senantiasa mengedepankan profesionalitas dan independensi, memastikan bahwa proses pengawasan dilakukan secara objektif dan tanpa adanya campur tangan atau keterlibatan dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi hasil evaluasi atau keputusan yang diambil. Hal ini bertujuan untuk menjaga integritas dan kualitas pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit dalam mendukung Dewan Komisaris.

In carrying out its duties and responsibilities, the Audit Committee is required to always uphold professionalism and independence, ensuring that the monitoring process is carried out objectively and without any interference or involvement from any party that may influence the evaluation results or decisions made. This aims to maintain the integrity and quality of the supervision carried out by the Audit Committee in supporting the Board of Commissioners.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Audit Tahun 2024

Education and/or Training of the Audit Committee In 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Audit mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan dengan perincian sebagai berikut:

Throughout 2024, the Audit Committee participated in education and/or training with the following details:

Tanggal Date	Nama Pelatihan/Pendidikan Name of Training/Education	Penyelenggara Organizer	Peserta Pelatihan Participants
Maret 2024 March, 2024	Sertifikasi CRMO CRMO Certification	LSPMR	
13 Juni 2024 June 13, 2024	Pelatihan Navigating Uncertainty: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management Navigating Uncertainty Training: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management	DANAREKSA	Ayudia Shinta Yunia
23-29 Agustus 2024 August 23-29, 2024	Sertifikasi - Certified Risk Governance Professional (CRGP) Certified Risk Governance Professional (CRGP) Certification	LSPMR	Fajar Rahwinto Soeharto

Rapat Komite Audit Tahun 2024

Meeting of the Audit Committee in 2024

Komite Audit sepanjang tahun 2024 telah menyelenggarakan rapat sebanyak 13 (tiga belas) kali dengan perincian sebagai berikut:

Throughout 2024, the Audit Committee 13 (thirteen) meetings, with the following details:

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) (%)
Fajar Rahwinto Soeharto ¹	Ketua/Chairman	9	9	100
Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetija Boedi ²	Ketua/Chairman	4	4	100
Ayudya Shinta Yunica	Anggota/Member	13	13	100

¹ Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024 | No longer in office since November 11, 2024

² Menjabat sejak 11 November 2024 | Serving since November 11, 2024

Agenda Rapat Komite Audit Tahun 2024

2024 Audit Committee Meeting Agenda

No No	Tanggal Date	Agenda Agenda
1	30 Januari 2024 January 30, 2024	Rencana Kerja 2024 2024 Work Plan
2	21 Februari 2024 February 21, 2024	Progres Pemeriksaan Audit Tahun 2023 Progress of the 2023 Audit Examination
3	28 Februari 2024 February 28, 2024	Rapat Kerja Nasional National Work Meeting (RAKERNAS)
4	28 Februari 2024 February 28, 2024	Rapat Kerja Nasional National Work Meeting
5	3 April 2024 April 3, 2024	Laporan Keuangan Hasil Audit Audited Financial Report
6	25 April 2024 April 25, 2024	Kinerja Triwulan I First Quarter Performance
7	26 Juni 2024 June 26, 2024	Persiapan RUPS Audit 2023 dan Usulan Remunerasi Preparation for the 2023 Audit General Meeting of Shareholders (GMS) and Proposed Remuneration
8	24 Juli 2024 July 24, 2024	Usulan RJPP 2024-2029 Proposed Long-Term Corporate Plan (RJPP) 2024-2029
9	29 Oktober 2024 October 29, 2024	Usulan RKAP 2025 Proposed Corporate Work Plan and Budget (RKAP) 2025
10	29 November 2024 November 29, 2024	Kinerja sampai dengan bulan Oktober Performance up to the Month of October
11	3 Desember 2024 December 3, 2024	Rencana Audit Tahun 2024 2024 Audit Plan
12	3 Desember 2024 December 3, 2024	Kajian Repurposing Bisnis Perkebunan yang akan dibentuk oleh Konsultan Study on the Repurposing of the Plantation Business to be Developed by a Consultant
13	18 Desember 2024 December 18, 2024	Revisi Usulan RKAP Revision of the Proposed RKAP

Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Audit pada Tahun 2024

Brief Report on the Implementation of Audit Committee Duties and Activities in 2024

Pada tahun 2024, Komite Audit telah melaksanakan tugas dan kegiatannya sebagai berikut:

1. Rapat Komite Audit;
2. Evaluasi kinerja keuangan perusahaan dan pelaksanaan RKAP tahun 2024;
3. Pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan audit internal dan eksternal;
4. Pengawasan kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan;
5. Pelaksanaan audit eksternal;
6. Pengajuan calon auditor eksternal untuk audit tahun buku 2024;
7. Pengawasan kinerja operasional perusahaan;
8. Penyusunan RKA Komite Audit sebagai bagian dari RKAP Dewan Komisaris tahun 2025;
9. Evaluasi/telaah usulan RKAP dan/atau RJPP PT Indra Karya (Persero);
10. Kunjungan kerja bersama Dewan Komisaris; dan
11. Peningkatan kompetensi Komite Audit.

In 2024, the Audit Committee carried out its duties and activities as follows:

1. Audit Committee Meeting;
2. Evaluation of the company's financial performance and implementation of the 2024 RKAP;
3. Monitoring the follow-up of internal and external audit results;
4. Supervision of accounting policies and preparation of financial statements;
5. Implementation of external audits;
6. Submission of external auditor candidates for the 2024 fiscal year audit;
7. Supervision of the company's operational performance.
8. Preparation of the Audit Committee's RKA as part of the Board of Commissioners' RKAP for 2025;
9. Evaluation/review of the proposed RKAP and/or RJPP of PT Indra Karya (Persero);
10. Working visit with the Board of Commissioners; and
11. Improving the competence of the Audit Committee.

Komite Nominasi dan Remunerasi

Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi berfungsi sebagai organ pendukung yang sangat penting bagi Dewan Komisaris, dengan tugas utama untuk memperkuat efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan yang berkaitan dengan nominasi dan remunerasi anggota Dewan Komisaris, Direksi, serta manajemen Sumber Daya Manusia (SDM) di perseroan. Komite ini memiliki peran strategis dalam memastikan bahwa proses seleksi, pengangkatan, dan pemberian remunerasi dilakukan secara transparan, adil, dan sesuai dengan prinsip Tata Kelola Perusahaan yang Baik.

The Nomination and Remuneration Committee functions as a very important supporting organ for the Board of Commissioners, with the main task of strengthening the effectiveness of the implementation of supervisory functions relating to the nomination and remuneration of members of the Board of Commissioners, Board of Directors, and Human Resources (HR) management in the company. This committee has a strategic role in ensuring that the process of selection, appointment, and remuneration is carried out transparently, fairly, and in accordance with the principles of good corporate governance.

Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (Board Manual)

Nomination and Remuneration Committee Charter (Board Manual)

Dalam rangka memastikan bahwa Komite Nominasi dan Remunerasi dapat menjalankan peran dan fungsinya secara efektif, perseroan telah menetapkan Piagam Komite Nominasi dan Remunerasi (*Board Manual*). Piagam ini ditetapkan melalui Surat Komisaris PT Indra Karya (Persero) No. 36/KOM/IK/2022, tanggal 28 September 2022, yang mengatur Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Indra Karya (Persero).

In order to ensure that the Nomination and Remuneration Committee can carry out its role and function effectively, the company has established a Nomination and Remuneration Committee Charter (*Board Manual*). This charter was established through the Letter of the Commissioner of PT Indra Karya (Persero) No. 36/KOM/IK/2022, dated 28 September 2022, which regulates the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero).

Board Manual ini berfungsi sebagai pedoman operasional bagi seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab mereka. Piagam ini memuat sejumlah ketentuan terkait tata kerja komite yang harus diikuti untuk memastikan kinerja yang transparan, adil, dan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Secara lebih rinci, isi *Board Manual* tersebut mencakup:

This *Board Manual* serves as an operational guideline for all members of the Nomination and Remuneration Committee in carrying out their duties and responsibilities. The charter contains a number of provisions regarding committee procedures that must be followed to ensure transparent, fair, and compliant performance. In more detail, the contents of the *Board Manual* include:

1. Tujuan, Tugas dan Tanggung Jawab, Kewajiban, Larangan serta Wewenang;
2. Struktur Keanggotaan Komite;
3. Etika Kerja;
4. Waktu Kerja;
5. Rapat;
6. Laporan; dan
7. Mekanisme Surat Menyurat.

1. Goals, Duties and Responsibilities, Obligations, Prohibitions, and Authorities;
2. Committee Membership Structure;
3. Work Ethics;
4. Working Time;
5. Meeting;
6. Reports; and
7. Correspondence Mechanism.

Komposisi Komite Nominasi dan Remunerasi

Composition of the Nomination and Remuneration Committee

Sehubungan dengan Keputusan Dewan Komisaris PT Indra Karya (Persero) melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 36/KOM/IKA/2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Indra Karya (Persero), susunan Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indra Karya (Persero) hingga 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

In accordance with the Decree of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) through the Decree of the Board of Commissioners No. 36/KOM/IKA/2022 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero), the composition of the Nomination and Remuneration Committee of PT Indra Karya (Persero) until 31 December 2024 is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment	Periode Masa Jabatan Term of Office
Airlangga Mardjono*	Ketua Chairman	Keputusan Dewan Komisaris PT Indra Karya (Persero) No. 007/KOM KPTS/2022 tanggal 3 Januari 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua dan Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi PT Indra Karya (Persero) Decree of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) No.007/KOM/KPTS/2022 dated January 3 2022 concerning the Dismissal and Appointment of the Chair and Members of the Nomination and Remuneration Committee of PT Indra Karya (Persero)	2021 - 11 November 2024 2021 - November 11, 2024
Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetya Boedi	Anggota Member	Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-268/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024 Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. No. SK-268/MBU/11/2024 dated November 11, 2024	11 November 2024 - 2027 November 11, 2024 - 2027
Darajat	Anggota Member	Keputusan Dewan Komisaris PT Indra Karya (Persero) No. 36/KOM/IKA/2022 tanggal 28 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Indra Karya (Persero) Decree of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero) No. 36/KOM/IKA/2022 dated September 28, 2022 concerning the Dismissal and Appointment of the Secretary of the Board of Commissioners of PT Indra Karya (Persero)	2022-2025

*) Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024 | No longer in office since November 11, 2024

Profil Komite Nominasi dan Remunerasi

Profile of the Nomination and Remuneration Committee



Airlangga Mardjono*

Ketua Komite Nominasi dan Remunerasi
Chairman of the Nomination and Remuneration Committee

Usia Age	54 Tahun 54 Years Old
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Malang, 23 April 1970 Malang, April 23, 1970
Domisili Domicile	Jakarta Jakarta
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesia

Riwayat Pendidikan Education Background

- S2 Teknik dari Universitas Gadjah Mada (2004)
Master of Engineering from Universitas Gadjah Mada (2004)
- S1 Teknik Sipil dari Universitas Trisakti (1993)
Bachelor's Degree in Civil Engineering from Universitas Trisakti (1993)

Pengalaman Kerja Professional Experience

- Direktur Bendungan dan Danau Kementerian PUPR (2020-Sekarang)
Director of Dams and Lakes Ministry of Public Works and Housing (2020 Present)
- Kepala Balai Wilayah Sungai Bali Penida Kementerian PUPR (2019-2020)
Head of the Bali Penida River Area Center, Ministry of Public Works and Housing (2019-2020)
- Kepala Bidang Bendungan Wilayah Barat Kementerian PUPR (2015-2019)
Head of the Western Region Dams Division of the Ministry of Public Works and Housing (2015-2019)

*) Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024 | No longer in office since November 11, 2024

Rangkap Jabatan Concurrent Position

Direktur Bendungan dan Danau, Kementerian PUPR (2020-sekarang)
Director of Dams and Lakes, Ministry of Public Works and Housing (2020-present)

Hubungan Afiliasi Affiliation

Tidak Ada
None

Kepemilikan Saham pada Perseroan Ownership of the Company's Shares

Tidak Ada
None



Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetija Boedi

Ketua Komite Audit
Chairman of the Audit Committee

Beliau ditunjuk sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-268/MBU/11/2024 tanggal 11 November 2024. Profil Beliau dapat dilihat pada Bab Profil Perusahaan dalam Laporan Tahunan ini.

Appointed as Chairman of the Audit Committee based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. No. SK-268/MBU/11/2024 dated November 11, 2024. His profile can be seen in the Company Profile Chapter in this Annual Report.



Drajat

Anggota Komite Nominasi dan Remunerasi
Member of the Nomination and Remuneration Committee

Usia <i>Age</i>	54 Tahun <i>54 Years Old</i>
Tempat, Tanggal Lahir <i>Place, Date of Birth</i>	Garut, 20 September 1965 <i>Garut, September 20, 1965</i>
Domisili <i>Domicile</i>	Bekasi <i>Bekasi</i>
Kewarganegaraan <i>Citizenship</i>	Indonesia <i>Indonesia</i>

Riwayat Pendidikan *Education Background*

Sekolah Menengah Atas YBKP 3 (1985)
YBKP 3 High School (1985)

Pengalaman Kerja *Professional Experience*

- Sekretaris Dewan Komisaris/Dewan Pengawas PT Industri Kapal Indonesia (2018-2021)
Secretary to the Board of Commissioners/Supervisory Board of PT Industri Kapal Indonesia (2018-2021)
- Analis Kinerja BUMN (2020-2021)
SOEs Performance Analyst (2020-2021)
- Analis Data BUMN (2014-2020)
SOEs Data Analyst (2014-2020)

Rangkap Jabatan *Concurrent Position*

Tidak Ada
None

Hubungan Afiliasi *Affiliation*

Tidak Ada
None

Kepemilikan Saham pada Perseroan *Ownership of the Company's Shares*

Tidak Ada
None

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Nominasi dan Remunerasi

Duties and Responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee

Komite Nominasi dan Remunerasi dalam melaksanakan tugasnya harus selalu bertindak secara independen dan bertanggung jawab sepenuhnya kepada Dewan Komisaris. Komite ini memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung kebijakan perusahaan terkait dengan pengelolaan sumber daya manusia dan struktur kepemimpinan perusahaan.

Adapun tugas dan tanggung jawab Komite Nominasi dan Remunerasi adalah sebagai berikut:

The Nomination and Remuneration Committee, in carrying out its duties, must always act independently and be fully accountable to the Board of Commissioners. This committee has a very important role in supporting company policies related to human resources management and company leadership structure.

The duties and responsibilities of the Nomination and Remuneration Committee are as follows:

Fungsi Nominasi

1. Menyusun dan memberikan rekomendasi mengenai sistem serta prosedur pemilihan dan/atau penggantian anggota dewan Komisaris dan Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai:
 - a. Komposisi jabatan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
 - b. kebijakan dan kriteria yang dibutuhkan dalam proses Nominasi; dan
 - c. Kebijakan evaluasi kinerja bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris.
3. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris berdasarkan tolok ukur yang telah disusun sebagai bahan evaluasi;
4. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai program pengembangan kemampuan anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris;
5. Memberikan rekomendasi atau mengusulkan calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS; dan
6. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai Pihak Independen yang akan menjadi anggota Komite yang berada di bawah Dewan Komisaris.

Fungsi Remunerasi

1. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai struktur, kebijakan, dan besaran atas Remunerasi bagi anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris;
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi anggota Direksi dan/ atau anggota Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham;
3. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai evaluasi atas kebijakan remunerasi bagi Pejabat Eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi; dan
4. Membantu Dewan Komisaris melakukan penilaian kinerja dengan kesesuaian Remunerasi yang diterima masing-masing anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.

Nomination Function

1. Prepare and provide recommendations regarding systems and procedures for selecting and/or replacing members of the Board of Commissioners and the Board of Directors to the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders.
2. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding:
 - a. Composition of position of member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners;
 - b. Policies and criteria required in the Nomination process; and
 - c. Performance evaluation policy for member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.
3. Assist the Board of Commissioners in performance assessment of member of the Board of Directors and/ or member of the Board of Commissioners based on benchmark that have been prepared as evaluation material;
4. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding capacity development programs for member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners;
5. Provide recommendations or propose candidates who meet the requirements as member of the Board of Directors and/ or members of the Board of Commissioners to the Board of Commissioners to be submitted to the GMS; and
6. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding Independent Party who will become member of Committees under the Board of Commissioners.

Remuneration Function

1. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the structure, policies and amount of Remuneration for member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners;
2. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding the evaluation of remuneration policies for member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners to be submitted to the General Meeting of Shareholders;
3. Provide recommendations to the Board of Commissioners regarding evaluation of remuneration policies for Executive Officer and employees as a whole to be submitted to the Board of Directors; and
4. Assist the Board of Commissioners in conducting performance assessment in accordance with the remuneration received by each member of the Board of Directors and/or member of the Board of Commissioners.

Pernyataan Independensi Komite Nominasi dan Remunerasi

Statement of Independence of the Nomination and Remuneration Committee

Perseroan memastikan bahwa seluruh anggota Komite Nominasi dan Remunerasi berasal dari pihak yang independen dan bebas dari hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau Pemilik Modal. Hal ini bertujuan untuk menjaga kemampuan anggota komite dalam bertindak secara objektif dan independen, tanpa adanya pengaruh dari pihak manapun yang dapat mempengaruhi keputusan yang diambil dalam pelaksanaan tugasnya.

The company ensures that all members of the Nomination and Remuneration Committee are independent and free from financial, management, share ownership, and/or family relationships with the Supervisory Board, Board of Directors, and/or Capital Owners. This is aimed at maintaining the ability of committee members to act objectively and independently, without any influence from any party that may affect the decisions made in the performance of their duties.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Education and/or Training Programs of the Nomination and Remuneration Committee in 2024

Sepanjang tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi tidak mengikuti pendidikan dan/atau pelatihan.

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee did not participate in any education and training programs.

Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

Meeting of the Nomination and Remuneration Committee in 2024

Komite Nominasi dan Remunerasi sepanjang tahun 2024 telah menyelenggarakan rapat sebanyak 1 (kali) kali dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2024, the Nomination and Remuneration Committee held 1 (once) meeting, with details as follows:

Agenda Rapat Komite Nominasi dan Remunerasi Tahun 2024

The Nomination and Remuneration Committee Meeting Agenda in 2024

Tanggal Date	Agenda Agenda
26 Juni 2024 June 26, 2024	Usulan Remunerasi Proposed Remuneration

Frekuensi dan Kehadiran Komite Nominasi dan Remunerasi dalam Rapat Komite Audit Tahun 2024

Frequency and Attendance of the Nomination and Remuneration Committee at the Meeting of the Audit Committee in 2024

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Number of Meetings	Jumlah Kehadiran Total Attendance	(%) (%)
Airlangga Mardjono ¹	Ketua/ Chairman	1	1	100
Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetija Boedi ²	Ketua/ Chairman	0	0	0
Darajat	Anggota/ Member	1	1	100

1) Tidak lagi menjabat sejak 11 November 2024 | No longer in office since November 11, 2024

2) Menjabat sejak 11 November 2024 | Serving since November 11, 2024



Laporan Singkat Pelaksanaan Tugas dan Kegiatan Komite Nominasi dan Remunerasi pada Tahun 2024

Brief Report on the Implementation of Duties and Activities of the Nomination and Remuneration Committee in 2024

Pada tahun 2024, Komite Nominasi dan Remunerasi telah melaksanakan tugas sesuai ketentuan, termasuk mendukung fungsi nominasi dan remunerasi bagi Dewan Komisaris. Komite juga menyelenggarakan rapat, menyusun laporan berkala, dan memberikan rekomendasi yang diperlukan kepada Dewan Komisaris sesuai dengan *Board Manual* dan agenda kerja yang berlaku.

In 2024, the Nomination and Remuneration Committee has carried out its duties in accordance with regulations, including supporting the nomination and remuneration functions for the Board of Commissioners. The Committee also organises meetings, prepares periodic reports, and provides necessary recommendations to the Board of Commissioners in accordance with the Board Manual and the applicable work agenda.

Sekretaris Perusahaan

Corporate Secretary

Sekretaris perusahaan adalah bagian dari Direktorat Utama yang berfungsi sebagai pengelola kepaniteraan dan administrasi perseroan. Posisi ini bertanggung jawab dalam menjembatani hubungan antara perseroan dan pemangku kepentingan melalui komunikasi yang efektif dan interaktif.

The corporate secretary is part of the Main Directorate which functions as the company's registrar and administration manager. This position is responsible for bridging the relationship between the company and stakeholders through effective and interactive communication.

Sebagai pengelola komunikasi, Sekretaris perusahaan merumuskan pedoman yang tercantum dalam *Corporate Secretary Charter* No. 072/DU/IKA/VII/2020. Tugas utamanya adalah untuk menyampaikan informasi material kepada pemangku kepentingan dengan mengutamakan prinsip keterbukaan, memastikan informasi yang diberikan adalah akurat, terbaru, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, serta disajikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pihak terkait. Fungsi Sekretaris Perusahaan diatur oleh Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN. Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris, dan secara langsung bertanggung jawab kepada Direktur Utama.

As a communication manager, the Corporate Secretary formulates guidelines as stated in the Corporate Secretary Charter No. 072/DU/IKA/VII/2020. The main task is to convey material information to stakeholders by prioritising the principle of transparency, ensuring that the information provided is accurate, up-to-date, transparent, and accountable, and presented according to the needs of each related party. The function of the Corporate Secretary is regulated by the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises. The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the President Director based on the company's internal mechanism with the approval of the Board of Commissioners, and is directly responsible to the President Director.

Tugas dan Tanggung Jawab Sekretaris Perusahaan

Duties and Responsibilities of the Corporate Secretary

Perusahaan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengikuti perkembangan pasar modal, khususnya peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal;
2. Memberikan masukan kepada Direksi dan Dewan Komisaris untuk mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal;
3. Membantu Direksi dan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan tata kelola perusahaan termasuk:
 - a. Melakukan keterbukaan informasi kepada publik, termasuk ketersediaan informasi dalam situs web perusahaan;
 - b. Penyampaian laporan kepada Pemegang saham secara tepat waktu;
 - c. Penyelenggaraan dan dokumentasi Rapat Umum Pemegang Saham;
 - d. Penyelenggaraan dan dokumentasi rapat Direksi dan/atau Dewan Komisaris; dan
 - e. Pelaksanaan program orientasi kepada perusahaan untuk Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
4. Bertindak sebagai penghubung antara perusahaan dengan Pemegang Saham, Otoritas Jasa Keuangan, dan pemangku kepentingan lainnya.
5. Mewakili perusahaan dalam korespondensi dengan instansi Kementerian/Lembaga, Asosiasi, pers/media, Pihak lainnya sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh perusahaan.

As a supporting organ of the Board of Directors, the Corporate Secretary has the following duties and responsibilities:

1. Follow the capital market developments, especially applicable laws and regulations in the capital market sector;
2. Provide input to the Board of Directors and Board of Commissioners to comply with laws and regulations in the Capital Market sector;
3. Assist the Board of Directors and Board of Commissioners in implementing corporate governance including:
 - a. Conducting information disclosure to the public, including availability of information on the company's website;
 - b. Submission of reports to shareholders in a timely manner;
 - c. Organizing and documenting the General Meeting of Shareholders;
 - d. Organizing and documenting meetings of the Board of Directors and/or Board of Commissioners; and
 - e. Implementing orientation program to the company for the Board of Directors and/or Board of Commissioners.
4. Act as a liaison between the company and Shareholders, Financial Services Authority, and other stakeholders;
5. Represent the company in correspondence with Ministries/Institutions, Associations, press/media, other parties in accordance with the authority granted by the company.

Profil Sekretaris Perusahaan

Profile of the Corporate Secretary

Pada tahun 2024, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Okky Suryono, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 027/KPTS/IK/IX/2021.

In 2024, the Corporate Secretary was Okky Suryono, who was appointed based on the Decree of the Board of Directors No. 027/KPTS/IK/IX/2021.



Okky Suryono

Vice President Corporate Secretary
Vice President Corporate Secretary

Usia Age	41 Tahun 41 Years Old
Tempat, Tanggal Lahir Place, Date of Birth	Jakarta, 15 Oktober 1983 Jakarta, October 15, 1983
Domisili Domicile	Jakarta Selatan South Jakarta
Kewarganegaraan Citizenship	Indonesia Indonesia

Riwayat Pendidikan

Education Background

S1 Sistem Informasi Komputer dari STMIK Muhammadiyah Jakarta (2011)
Bachelor's Degree in Computer Information System from STMIK Muhammadiyah Jakarta (2011)

Pengalaman Kerja

Professional Experience

- Audit Internal SMAP ISO 37001:2016 dari IKRCS Academy (2020)
Internal Audit SMAP ISO 37001:2016 IKRCS Academy (2020)
- Awareness dan Standard SMAP ISO 37001 dari IKRCS Academy (2020)
Awareness and Standard SMAP ISO 37001 from IKRCS Academy (2020)
- Pengelolaan Arsip Nasional dari ANRI (2019)
National Archives Management from ANRI (2019)
- Sertifikat Kompetensi Public Relations dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (2015)
Public Relations Competency Certificate from the National Professional Certificate Agency (2015)
- Corporate Journalism dari Markshare (2013)
Corporate Journalism from Markshare (2013)

Keanggotaan Organisasi

Membership in Organizations

- Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) (2021-sekarang)
Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA) (2021-present)
- Pena Maritim Organization (2013-2020)
Pena Maritim Organization (2013-2020)
- Forum Humas BUMN (2016-2019)
SOEs Public Relations Forum (2016-2019)
- Ketua Organisasi Perpustakaan Rumah Buku Masyarakat (2007-2008)
Chairman of the Community Book House Library Organization (2007-2008)
- Humas Organisasi Wihdatul Ummah
Public Relations of the Wihdatul Ummah Organization
- Sekretaris Pencak Silat di STMIK Muhammadiyah
Secretary of Pencak Silat at STMIK Muhammadiyah
- Kepala Divisi Pengembangan Bisnis dan Pendanaan FH BUMN
Head of Business Development and Funding Division of FH SOEs

Rangkap Jabatan

Concurrent Position

- Corporate Communications and Government Relations (Corporate Secretary Division) PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2015-2018)
Corporate Communications and Government Relations (Corporate Secretary Division) at PT Biro Klasifikasi Indonesia (Persero) (2015-2018)
- Internal Communication and Media Relations (Corporate Secretary Division) PT Sucofindo (2013-2015)
Internal Communication and Media Relations (Corporate Secretary Division) at PT Sucofindo (2013-2015)
- Surveyor and Technical Operational (SBU Government) PT Sucofindo (2011-2013)
Surveyor and Technical Operational (SBU Government) at PT Sucofindo (2011-2013)
- Asst. Employee Relation Manager (HRD Division) PT Media Hotel & Group Sheraton Media Hotel (2009-2011)
Asst. Employee Relation Manager (HRD Division) at PT Media Hotel & Group Sheraton Media Hotel (2009-2011)
- Warehouse Administration and Merchandising PT Perdana Makmur Agung (PMA) subsidiary of PT Toko Buku Gunung Agung (2006-2009)
Warehouse Administration and Merchandising at PT Perdana Makmur Agung (PMA) subsidiary of PT Toko Buku Gunung Agung (2006-2009)
- Storekeeper PT Chikara Adhiyasa Mid Plaza Intercontinental Hotels (2002-2005)
Storekeeper at PT Chikara Adhiyasa Mid Plaza Intercontinental Hotels (2002-2005)

Hubungan Afiliasi

Affiliation

Tidak Ada
None

Kepemilikan Saham pada Perseroan

Ownership of the Company's Shares

Tidak Ada
None

Fungsi Sekretaris Perusahaan

Functions of the Corporate Secretary

Sebagai pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi yang diberikan kewenangan, Sekretaris Perusahaan memiliki fungsi sebagai berikut:

1. Memastikan bahwa BUMN mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG;
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta;
3. Sekretaris Perusahaan bertindak sebagai juru bicara perusahaan dan pembina fungsi komunikasi, hukum, tanggung jawab sosial perusahaan, dan kesekretariatan;
4. Sebagai koordinator penghubung (*head of liaison officer*) *shareholder & stakeholder*; dan
5. Melakukan tata usaha serta menyimpan dokumen Perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS. Selanjutnya Direksi wajib menjaga dan memperkuat fungsi Sekretaris Perusahaan.

As an official one level below the Board of Directors, the Corporate Secretary, who is given authority, has the following functions:

1. As an official 1 (one) level below the Board of Directors who is given the authority to ensure that SOE complies with regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles;
2. Provide information required by the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and/or at any time if requested;
3. Corporate Secretary acts as the company spokesperson and supervisor of communications, legal, corporate social responsibility and secretarial functions;
4. As liaison coordinator (*head of liaison officer*) for shareholders & stakeholders; and
5. Fulfill administration and store Company documents, including but not limited to the Shareholder Register, Special Register and minutes of Board of Directors meetings, Board of Commissioners meetings and GMS. Furthermore, the Board of Directors is obliged to maintain and strengthen the function of the Corporate Secretary.

Pendidikan dan/atau Pelatihan Sekretaris Perusahaan Tahun 2024

Corporate Secretary Education and/or Training Programs in 2024

Sepanjang tahun 2024, Divisi Sekretaris Perusahaan telah mengikuti berbagai pendidikan dan/atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan dalam menjalankan fungsinya. Adapun perincian pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut:

Throughout 2024, the Corporate Secretary Division has participated in various education and/or training programmes to improve its competence and knowledge in carrying out its functions. The details of the training participated in are as follows:

Tanggal Date	Nama Pelatihan/Pendidikan Name of Training/Education	Penyelenggara Organizer	Peserta Pelatihan Participants
3 Mei 2024 May 3, 2024	Seminar Environmental, Social, and Governance (ESG) Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar	PT CRMS	Okky Suryono

Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Implementation of Duties of the Corporate Secretary

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan PT Indra Karya (Persero) telah melaksanakan berbagai tugas strategis dalam mendukung komunikasi dan kehumasan perusahaan. Kegiatan yang dilakukan meliputi audiensi dengan Menteri BUMN RI dan deputi terkait, serta publikasi dan promosi kegiatan perusahaan melalui media cetak dan daring. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga menyusun profil perusahaan melalui website resmi dan kanal media sosial terintegrasi seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan LinkedIn. Sinergi dengan asosiasi profesi kehumasan turut diperkuat, serta pelaksanaan berbagai kegiatan seperti aktivasi, pameran, dan bakti sosial. Sertifikasi Humas standar BNSP juga telah diikuti, bersama dengan partisipasi dalam forum pertemuan dwi-bulanan insan humas BUMN, pelatihan PR sesuai kebutuhan BUMN, dan kompetisi PR Awarding antar BUMN.

Throughout 2024, the Corporate Secretary of PT Indra Karya (Persero) carried out various strategic tasks in support of the company's communications and public relations. These activities included holding audience meetings with the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) of the Republic of Indonesia and relevant deputies, as well as publishing and promoting company activities through print and online media. The Corporate Secretary also developed the company profile through the official website and integrated social media channels such as Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, and LinkedIn. Synergy with professional public relations associations was strengthened, along with the implementation of various activities including activations, exhibitions, and social outreach programs. Participation in the national public relations certification (BNSP standard), bi-monthly SOE PR forums, PR training tailored to each SOE's needs, and PR Awarding competitions among SOEs also took place.

Sekretaris Perusahaan juga berperan dalam kegiatan *awarding* kompetensi perusahaan di bidang TJSL dan TI, optimalisasi *press conference* di Kantor Kementerian BUMN, serta sosialisasi saluran komunikasi resmi ke berbagai divisi. Kegiatan kunjungan ke BUMN tertentu, peningkatan manfaat keanggotaan Forum Humas BUMN, dan koordinasi dalam rencana pembentukan *holding* juga menjadi bagian dari tugas yang telah dijalankan sepanjang tahun tersebut.

The Corporate Secretary further contributed to corporate competency awarding events in the areas of CSR (TJSL) and IT, optimization of press conferences at the Ministry of SOEs, and the dissemination of official communication channels across divisions. Other responsibilities carried out during the year included visits to selected SOEs, enhancing the benefits of membership in the SOE Public Relations Forum, and coordinating efforts related to the planned formation of a holding company.

Satuan Pengawasan Intern (SPI)

Internal Audit Unit (SPI)

Sepanjang tahun 2024, Sekretaris Perusahaan PT Indra Karya (Persero) telah melaksanakan berbagai tugas strategis dalam mendukung komunikasi dan kehumasan perusahaan. Kegiatan yang dilakukan meliputi audiensi dengan Menteri BUMN RI dan deputi terkait, serta publikasi dan promosi kegiatan perusahaan melalui media cetak dan daring. Selain itu, Sekretaris Perusahaan juga menyusun profil perusahaan melalui website resmi dan kanal media sosial terintegrasi seperti Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, dan LinkedIn. Sinergi dengan asosiasi profesi kehumasan turut diperkuat, serta pelaksanaan berbagai kegiatan seperti aktivasi, pameran, dan bakti sosial. Sertifikasi Humas standar BNSP juga telah diikuti, bersama dengan partisipasi dalam forum pertemuan dwi-bulanan insan humas BUMN, pelatihan PR sesuai kebutuhan BUMN, dan kompetisi PR Awarding antar BUMN. Sekretaris Perusahaan juga berperan dalam kegiatan awarding kompetensi perusahaan di bidang TJSL dan TI, optimalisasi press conference di Kantor Kementerian BUMN, serta sosialisasi saluran komunikasi resmi ke berbagai divisi. Kegiatan kunjungan ke BUMN tertentu, peningkatan manfaat keanggotaan Forum Humas BUMN, dan koordinasi dalam rencana pembentukan holding juga menjadi bagian dari tugas yang telah dijalankan sepanjang tahun tersebut.

Throughout 2024, the Corporate Secretary of PT Indra Karya (Persero) carried out various strategic tasks in support of the company's communications and public relations. These activities included holding audience meetings with the Minister of State-Owned Enterprises (SOEs) of the Republic of Indonesia and relevant deputies, as well as publishing and promoting company activities through print and online media. The Corporate Secretary also developed the company profile through the official website and integrated social media channels such as Facebook, Twitter, YouTube, Instagram, and LinkedIn. Synergy with professional public relations associations was strengthened, along with the implementation of various activities including activations, exhibitions, and social outreach programs. Participation in the national public relations certification (BNSP standard), bi-monthly SOE PR forums, PR training tailored to each SOE's needs, and PR Awarding competitions among SOEs also took place. The Corporate Secretary further contributed to corporate competency awarding events in the areas of CSR (TJSL) and IT, optimization of press conferences at the Ministry of SOEs, and the dissemination of official communication channels across divisions. Other responsibilities carried out during the year included visits to selected SOEs, enhancing the benefits of membership in the SOE Public Relations Forum, and coordinating efforts related to the planned formation of a holding company.

Piagam SPI (Board Manual)

SPI Charter (Board Manual)

Untuk mendukung Satuan Pengawasan Intern (SPI) dalam menjalankan peran dan fungsinya secara optimal, Perseroan telah menetapkan Piagam SPI (Board Manual) melalui Surat Keputusan Direksi No. 047/KPTS/IK/XII/2021.

optimally carrying out its roles and functions, the Company has established an SPI Charter (Board Manual) through the Decree of the Board of Directors No. 047/KPTS/IK/XII/2021.

Board Manual ini menjadi pedoman utama bagi SPI dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, yang mencakup berbagai ketentuan terkait tata kerja dan operasional SPI. Secara lebih rinci, isi dari *Board Manual* tersebut mencakup hal-hal sebagai berikut:

This Board Manual serves as the main guideline for SPI in carrying out its duties and responsibilities, which includes various provisions related to SPI's work procedures and operations. In more detail, the contents of the Board Manual include the following matters:

1. Pendahuluan
2. Visi, Misi dan Tujuan SPI
3. Kedudukan
4. Fungsi dan Peranan
5. Tugas dan Tanggung Jawab
6. Wewenang
7. Ruang Lingkup
8. Kebijakan Audit
9. Kode Etik
10. Hubungan dengan obyek yang diperiksa
11. Hubungan dengan Auditor Eksternal
12. Hubungan dengan Komite Audit
13. Tata Tertib Pelaksanaan Pemeriksaan
14. Tata cara pembuatan Laporan Hasil Pemeriksaan
15. Cara Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan kepada Direktur Utama
16. Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan
17. Penutup

1. Introduction
2. SPI Vision, Mission, and Objectives
3. Structure and Position
4. Function and Role
5. Duties and Responsibilities
6. Authority
7. Scope
8. Audit Policy
9. Code of Conduct
10. Relationship with the object being examined
11. Relationship with External Auditor
12. Relationship with the Audit Committee
13. Codes for Conducting Examination
14. Procedures for preparing an Inspection Result Report (LHP)
15. How to Submit Audit Result Report to the President Director
16. Follow-up on Examination Result
17. Closing

Struktur dan Kedudukan SPI

Structure and Position of SPI

Satuan unit Satuan Pengawasan Intern (SPI) ini dipimpin oleh *Head of Internal Audit*, yang pengangkatan dan pemberhentiannya dilakukan oleh Direktur Utama melalui mekanisme internal perusahaan, dengan persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Komisaris.

Dengan demikian, *Head of Internal Audit* berada langsung di bawah Direksi dan memiliki tanggung jawab langsung kepada Direktur Utama dalam melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi terhadap sistem pengelolaan perusahaan.

This Internal Audit Unit (SPI) is led by the Head of Internal Audit, whose appointment and dismissal is carried out by the President Director through the company's internal mechanism, with prior approval from the Board of Commissioners.

Thus, the Head of Internal Audit is directly under the Board of Directors and has direct responsibility to the President Director in carrying out the duties of supervision and evaluation of the company's management system.

Profil Kepala SPI

Profile of the Head of SPI

Pada tahun 2024, Head of Internal Audit dijabat oleh Ferdinandus Baskoro Hari Sapto Waluyo, yang diangkat berdasarkan Keputusan Direksi PT Indra Karya (Persero) No. 023/KPTS/IK/X/2023 tanggal 16 Oktober 2023.

In 2024, the position of Head of Internal Audit was held by Ferdinandus Baskoro Hari Sapto Waluyo, who was appointed based on the Decree of the Board of Directors of PT Indra Karya (Persero) No. 023/KPTS/IK/X/2023 dated 16 October 2023.



Ferdinandus Baskoro Hari Sapto Waluyo

Head of Internal Audit
Head of the Internal Audit

Usia
Age | **47 Tahun**
47 Years Old

Tempat, Tanggal Lahir
Place, Date of Birth | **Malang, 7 Januari 1978**
Malang, January 7, 1978

Domisili
Domicile | **Semarang**
Semarang

Kewarganegaraan
Citizenship | **Indonesia**
Indonesia

Riwayat Pendidikan *Education Background*

- S1 Profesi Insinyur, Universitas Diponegoro (2022).
Bachelor's Degree in Engineering Profession, Universitas Diponegoro (2022).
- S2 Manajemen Marketing, Universitas Stikubank (2020).
Master's Degree in Marketing Management, Universitas Stikubank (2020).
- S2 Teknik Sumber Daya Air, Universitas Islam Sultan Agung (2019).
Master's Degree in Water Resources Engineering, Universitas Islam Sultan Agung (2019).
- S1 Teknik Sipil, Universitas Merdeka Malang (2001).
Bachelor's Degree in Civil Engineering, Universitas Merdeka Malang (2001)

Pengalaman Kerja *Professional Experience*

- General Manager of Engineering II Division (2013-2023)
General Manager of Engineering II Division (2013-2023)
- Manajer Pengendalian PT Indra Karya (Persero) (2011-2012)
Control Manager of PT Indra Karya (Persero) (2011-2012)
- Tenaga Fungsional PT Indra Karya (Persero) (2001-2009)
Functional Personnel of PT Indra Karya (Persero) (2001-2009)

Keanggotaan Organisasi *Membership in Organizations*

- Himpunan Ahli Teknik Hidraulik Indonesia (HATHI) (2016-2022)
Indonesian Association of Hydraulics Engineers (HATHI) (2016-2022)
- Persatuan Insinyur Indonesia (PII) (2022)
Indonesian Engineers Association (PII) (2022)

Sertifikat Keahlian *Skill Certificate*

- Sertifikat ICSA – Pendidikan Dasar II Standar Profesi Sekretaris Perusahaan (2022)
ICSA Certificate – Basic Education II Corporate Secretary Professional Standards (2022)
- Ahli Sumber Daya Air - Madya (2021-2024)
Water Resources Expert - Intermediate (2021-2024)
- Ahli Sistem Manajemen Mutu - Madya (2021-2024)
Quality Management System Expert - Intermediate (2021-2024)

Hubungan Afiliasi *Affiliation*

Tidak Ada
None

Kepemilikan Saham pada Perseroan *Ownership of the Company's Shares*

Tidak Ada
None

Tugas dan Tanggung Jawab SPI

Duties and Responsibilities of SPI

Satuan pengawas internal perseroan memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Merencanakan program audit, perencanaan audit, dan *review* laporan manajemen dan keuangan, bimbingan teknis, sosialisasi, dan program kerja lainnya yang terkait dengan manajemen dan keuangan;
2. Bertanggung jawab atas pengendalian, *monitoring*, dan evaluasi serta menganalisis atas Rencana Kerja dan Anggaran masing-masing unit kerja secara periodik dan/ atau setiap satu diperlukan;
3. Bertanggung jawab atas *assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) oleh *assessor independent*;
4. Melakukan *self-assessment* penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dan KPKU setiap 2 tahun sekali;
5. *Monitoring* pelaksanaan rekomendasi hasil *assessment* *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU);
6. Review secara berkala buku pedoman yang berhubungan dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) PT Indra Karya (Persero), dan melakukan revisi jika terjadi tidak kesesuaian dengan Undang-Undang/Peraturan yang berlaku;
7. Melaporkan secara rutin kepada Direksi mengenai perencanaan dan aktivitas Internal Audit yang berbasis risiko (*Risk Based Audit*);
8. Menyusun Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) termasuk perhitungan anggaran biayanya yang berkaitan dengan sifat audit dan jumlah unit kerja dan proyek yang diprogramkan akan diperiksa;
9. Melakukan pemeriksaan rutin sesuai dengan jadwal yang telah dituangkan dalam Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT), dengan melakukan analisis yang berbasis risiko dan prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) atas efisiensi dan efektivitas operasional perseroan dan melaksanakan evaluasi atas sistem, prosedur serta kebijakan operasi Perseroan yang dilakukan secara berkesinambungan;
10. Menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang telah ditandatangani kepala SPI kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Cq. Komite Audit;
11. Menyiapkan dan mendokumentasikan kertas kerja pemeriksaan (KKP);
12. Membuat draft surat tindak lanjut Direktur Utama yang difokuskan kepada permasalahan utama dan perlu mendapatkan penanganan yang segera dari pimpinan unit kerja yang diperiksa dan Direktur Utama akan menandatangani Surat Tindak Lanjut tersebut bilamana telah sesuai dengan pandangan Direktur Utama;
13. Melakukan pemantauan dan pengecekan atas pelaksanaan tindak lanjut atas hasil audit internal maupun eksternal;
14. Memberikan pendapat, masukan dan pertimbangan maupun jasa konsultasi yang obyektif kepada manajemen dan unit kerja lainnya berkaitan dengan fungsi pengawasan;
15. Mempersiapkan dan melaksanakan audit terhadap sistem informasi manajemen di lingkungan perseroan;
16. Mempersiapkan dan melaksanakan audit khusus, terutama atas instruksi Direktur Utama dan/atau Komisaris Perusahaan, dan permintaan manajemen atas persetujuan Direktur Utama perseroan; dan
17. Menyusun program kerja serta kurikulum atas seluruh kegiatan Pengendalian *Intern* Perusahaan untuk mengevaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukannya.

The company's internal supervisory unit has the following duties and responsibilities:

1. *Planning audit program, audit planning and monitoring and evaluation, reviewing management and financial statements, technical guidance, outreach and other work programs related to management and finance;*
2. *Responsible for controlling, monitoring and evaluating as well as analyzing the Work Plan and Budget of each work unit periodically and/or whenever necessary;*
3. *Responsible for assessing the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) by independent assessors;*
4. *Conducting self-assessment on the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and KPKU every 2 years;*
5. *Monitoring the implementation of recommendations from the Good Corporate Governance (GCG) assessment and Superior Performance Assessment Criteria (KPKU);*
6. *Periodically review guidebooks related to the implementation of Good Corporate Governance (GCG) and PT Indra Karya (Persero) Superior Performance Evaluation Criteria (KPKU), and revise them if they do not comply with applicable Laws/ Regulations;*
7. *Report regularly to the Board of Directors regarding riskbased Internal Audit planning and activities (Risk Based Audit);*
8. *Prepare an Annual Audit Work Program (PKPT) including calculating the budget costs related to the nature of the audit and the number of work units and projects programmed to be examined;*
9. *Conducting routine inspections in accordance with the schedule outlined in the Annual Inspection Work Program (PKPT), by carrying out risk-based analysis and Good Corporate Governance (GCG) principles on the efficiency and effectiveness of the Company's operations and carrying out evaluations of the Company's operating systems, procedures and policies which carried out continuously;*
10. *Submit Audit Result Report (LHP) which has been signed by the Head of SPI to the President Director and Board of Commissioners Cq. Audit Committee;*
11. *Prepare and document inspection working papers (KKP);*
12. *Drafting follow-up letter from the President Director which is focused on main problems and needs immediate treatment from head of work unit being examined and President Director will sign the Follow-up Letter if it is in accordance with the President Director's views;*
13. *Monitoring and checking the implementation of follow-up actions on internal and external audit results;*
14. *Providing opinions, input and considerations as well as objective consulting services to management and other work units related to the supervisory function;*
15. *Prepare and conduct audit of management information system within the company;*
16. *Prepare and carry out special audits, especially on the instructions of the President Director and/or Commissioner of the Company, and at the request of management with approval of the President Director of the Company; and*
17. *Develop work programs and curricula for all Company Internal Control activities to evaluate the quality of internal audit activities.*

Pendidikan dan/atau Pelatihan SPI Tahun 2024

Education and/or Training Programs of SPI in 2024

Sepanjang tahun 2024, anggota Satuan Pengawasan Intern (SPI) telah mengikuti berbagai pendidikan dan/atau pelatihan untuk meningkatkan kompetensi dan pengetahuan mereka dalam melaksanakan tugas pengawasan. Adapun perincian pelatihan yang diikuti adalah sebagai berikut:

Throughout 2024, members of the Internal Audit Unit (SPI) have participated in various education and/or training programmes to improve their competence and knowledge in carrying out supervisory duties. The details of the training attended are as follows:

Tanggal Date	Nama Pelatihan/Pendidikan Name of Training/Education	Penyelenggara Organizer	Peserta Pelatihan Participants
22-23 Februari 2024 February 22-23, 2024	Pelatihan Internal Audit ISO 19011:2018 Internal Audit ISO 19011:2018 Training	In House	Ferdinandus Baskoro Hari Sapto Waluyo
3 Mei 2024 May 3, 2024	Seminar Environmental, Social, and Governance (ESG) Environmental, Social, and Governance (ESG) Seminar	PT CRMS	
13 Juni 2024 June 13, 2024	Pelatihan Navigating Uncertainty: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management Training on Navigating Uncertainty: Building Resilience Through Strategic Business Continuity Management	DANAREKSA	
8-9 Juli 2024 July 8-9, 2024	Workshop COSO-2013 Internal Control Framework Workshop on COSO-2013 Internal Control Framework	The Center of Internal Audit Resources - Yayasan Pendidikan Internal Audit (CIAR-YPIA)	
9-10 Oktober 2024 October 9-10, 2024	Pelatihan Elevator Pitch Elevator Pitch Training	DLI	

Sertifikasi sebagai Profesi Audit Internal

Certification as Internal Audit Professional

Selain upaya peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan, untuk mengoptimalkan fungsi Satuan Pengawasan Intern (SPI), upaya lainnya dilakukan melalui Sertifikasi Profesi Audit Internal. Sertifikasi ini bertujuan untuk memastikan anggota SPI memiliki kualifikasi profesional yang diakui dalam bidang audit internal.

In addition to efforts to improve competence through education and training, to optimise the function of the Internal Audit Unit (SPI), other efforts are being made through Internal Audit Professional Certification. This certification aims to ensure that SPI members have recognised professional qualifications in the field of internal audit.

Adapun daftar Sertifikasi Profesi Audit Internal yang dimiliki oleh SPI pada tahun 2024 adalah sebagai berikut:

The list of Internal Audit Professional Certifications held by SPI in 2024 is as follows:

Nama Sertifikasi Certification Name	Instansi Penerbit Issuing Agency	Jumlah Karyawan (Orang) Total Employees (Person)
Sertifikasi QIA KSPI Pra Managerial QIA KSPI Pra Managerial Certification	YPIA	1

Pelaksanaan Tugas SPI

Duties Implementation of SPI

Sepanjang tahun 2024, Satuan Pengawasan Intern (SPI) telah menyelesaikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) sebanyak 10 (sepuluh) laporan, dengan rincian sebagai berikut:

Throughout 2024, the Internal Audit Unit (SPI) has completed 10 (ten) Audit Reports, with the following details:

No No	Bulan Month	Wilayah Region	Objek Pemeriksaan Audit Object	Sasaran Pemeriksaan Audit Target	Realisasi Penerbitan Laporan Pemeriksaan Realization of Audit Report Issuance
1	Juni June	Jakarta	Divisi Finance, Accounting & Risk Management Finance, Accounting & Risk Management Division	Proses Bisnis, Manajemen dan Internal Kontrol, Kepatuhan, Manajemen Risiko Business Process, Management and Internal Control, Compliance, Risk Management	1
2	Juni June	Jakarta	Divisi Human Capital, General Affair & MIS Transformation Human Capital, General Affair & MIS Transformation Division		1
3	Juni June	Jakarta	Divisi Corporate Secretary Corporate Secretary Division		1
4	Juni June	Jakarta	Divisi Operation & Business Development Operation & Business Development Division		1
5	Juli July	Jakarta	Divisi Industry Industry Division		1
6	Agustus August	Malang	Divisi Survey & Investigation Survey & Investigation Division		1
7	Agustus August	Malang	Dlvisi I Engineering Engineering Division I		1
8	September September	Batang	Proyek MK Kawasan Industri Terpadu MK Project of the Integrated Industrial Area		1
9	September September	Jakarta	Divisi III Engineering Engineering Division III		1
10	November November	Tanjung Balai Karimun	Proyek MK Jetty Multi Ocean Shipyard MK Jetty Project at Multi Ocean Shipyard		1
Jumlah Total					10

Akuntan Publik

Public Accountant

Sebagai bentuk komitmen perseroan terhadap akuntabilitas kinerja keuangan, perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang berfungsi sebagai audit eksternal untuk memastikan pelaksanaan audit berdasarkan pada standar auditing yang telah ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI) dalam Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP).

Proses audit dilakukan oleh Auditor Eksternal atau Akuntan Publik Independen dari KAP yang berasal dari eksternal perseroan, untuk memastikan objektivitas hasil audit dan independensi opini yang diberikan terkait laporan keuangan perseroan.

Dengan menggunakan jasa Akuntan Publik ini, perseroan dapat memastikan bahwa seluruh laporan keuangan yang dikeluarkan, baik bulanan, triwulanan, maupun tahunan yang telah tersusun secara akurat, benar, dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku, beserta dengan setiap perubahan yang terjadi dalam regulasi tersebut.

As a form of the company's commitment to the accountability of financial performance, the company appoints a Public Accounting Firm (KAP) which functions as an external audit to ensure the implementation of audits based on auditing standards that have been established and ratified by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants (IAPI) in the Public Accountant Professional Standards (SPAP).

The audit process is carried out by an External Auditor or Independent Public Accountant from a Public Accounting Firm that is external to the company, to ensure the objectivity of the audit results and the independence of the opinion given regarding the company's financial statements.

By using the services of a Public Accountant, the company can ensure that all financial reports issued, whether monthly, quarterly, or annually, are compiled accurately, correctly, and in accordance with applicable Financial Accounting Standards (SAK), along with any changes that occur in these regulations.

Persyaratan Akuntan Publik

Public Accountant Requirement

Terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh akuntan publik untuk dapat menjadi pihak audit eksternal perseroan, di antaranya:

- Memiliki reputasi dan rekam jejak yang baik;
- Telah memiliki pengalaman audit di bidang jasa konsultan rekayasa (*Engineering*);
- Tidak memiliki hubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan Dewan Komisaris, Direksi dan pihak lain yang dapat mengendalikan perseroan serta pihak lain yang memiliki kepentingan dengan kegiatan usaha perseroan; dan
- Terdaftar sebagai Kantor Akuntan Publik pada Otoritas Jasa Keuangan.

There are several requirements that public accountants must meet in order to become the company's external audit party, including:

- *Have good reputation and track record;*
- *Have audit experience in the field of engineering consulting services (*Engineering*);*
- *Has no direct or indirect relationship with the Board of Commissioners, Board of Directors, and other parties who can control the company as well as other parties who have interest in the company's business activities; and*
- *Registered as Public Accounting Firm with the Financial Services Authority.*

Akuntan Publik dalam Lima Tahun Terakhir

Public Accountant in the Last Five Years

Untuk melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan tahun 2024, perseroan telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. Berikut adalah informasi terkait akuntan publik yang jasanya telah digunakan oleh Perseroan selama 5 (lima) tahun terakhir:

To audit the company's 2024 financial statements, the Company has appointed Public Accounting Firm (KAP) Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan. The following is information regarding the public accountant whose services the Company has used for the past 5 (five) years:

Tahun Year	Nama Akuntan Accountant Name	Nama Kantor Akuntan Publik Name of the Public Accounting Firm	Biaya Fee
2024	Jul Edy Siahaan	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Rp422.532.045,-
2023	Jul Edy Siahaan	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Rp422.532.045,-
2022	Jul Edy Siahaan	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Rp405.982.500,-
2021	Rusli	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Rp200.000.000,-
2020	Rusli	Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan	Rp150.000.000,-

Manajemen risiko

Risk Management

Perseroan menyadari bahwa setiap aktivitas operasional yang dijalankan tidak terlepas dari potensi risiko. Oleh karena itu, satuan manajemen risiko merupakan langkah preventif yang diambil oleh perseroan untuk meminimalkan dampak dari berbagai risiko bisnis. Perseroan memberikan prioritas khusus dalam pengelolaan risiko-risiko ini, dengan tujuan untuk menekan dampak buruk yang dapat merugikan kelangsungan bisnis melalui penerapan Manajemen Risiko Perusahaan (MRP) yang terstruktur dan optimal.

The company recognises that every operational activity carried out is not free from potential risks. Therefore, the risk management unit is a preventive measure taken by the company to minimise the impact of various business risks. The company gives special priority to managing these risks, with the aim of reducing adverse impacts that could jeopardise business continuity through the implementation of a structured and optimal Enterprise Risk Management (ERM).

Penerapan MRP yang efektif memungkinkan perseroan untuk membuat keputusan yang lebih tepat dan terukur, sambil mempertimbangkan faktor-faktor berikut:

The effective implementation of MRP (Enterprise Risk Management) enables the company to make more precise and measurable decisions, while taking into account the following factors:

1. Ketidakpastian dan kemungkinan atas kejadian;
2. Keadaan (yang diinginkan atau tidak diinginkan) di masa mendatang; dan
3. Pengaruhnya terhadap tujuan yang telah disepakati.

1. *Uncertainty and probability of events;*
2. *A state (desirable or undesirable) in the future; and*
3. *Its influence on agreed goals.*

Jenis-Jenis Risiko yang dihadapi Perseroan

Types of Risks Encountered by the Company

Perseroan telah mengidentifikasi berbagai jenis risiko yang mungkin timbul dalam proses bisnis pada tahun 2024 serta langkah-langkah mitigasi yang diperlukan untuk mengurangi dampak risiko tersebut. Beberapa jenis risiko dan mitigasinya adalah sebagai berikut:

The company has identified various types of risks that may arise in the business process in 2024 as well as the mitigation measures needed to reduce the impact of these risks. Some types of risks and their mitigation are as follows:

No No	Kode Code	Deskripsi Description	Tingkat Risiko Risk Level	Rencana Tindakan Pengendalian Control Action Plan	Tindakan Pengendalian Eksisting Existing Control Measures
1	Revenue Revenue	Revenue perusahaan tidak mencapai target RKAP dengan produksi sebesar Rp250.979.272.262 The company's revenue does not meet the RKAP target with production amounting to Rp250,979,272,262	Tinggi High	Reduce: - Laporan monitoring kurva S (progres/waktu) eksternal External S-curve (progress/time) monitoring reports - Laporan monitoring progres mitra Partner progress monitoring reports - Laporan monitoring kondisi lapangan Field condition monitoring reports - Laporan monitoring mingguan/bulanan Weekly/monthly monitoring reports - Monitoring pendapatan real time pada IK SMART Real-time revenue monitoring via IK SMART - Laporan atas evaluasi kinerja secara periodik bulanan untuk divisi Monthly periodic performance evaluations for the division - Pencepatan progres pekerjaan Accelerating work progress - Rescheduling progres pekerjaan Rescheduling work progress - Pengembangan lini bisnis industri dan developer Business line development in industry and developer sectors - Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemberi kerja Enhance communication with clients Accept: - Melakukan evaluasi atas EKPP Bulanan Monthly EKPP evaluation - Evaluasi secara periodik bulanan Periodic monthly evaluation	- Laporan keuangan secara periodik bulanan Monthly periodic financial reports - Laporan manajemen secara periodik bulanan Monthly periodic management reports - Rapat rutin secara periodik bulanan Regular monthly meetings - Laporan progres eksternal dan internal External and internal progress reports - EKPP EKPP - IKA-PK-MLK3-10 Prosedur Pekerjaan Study IKA-PK-MLK3-10 Work Study Procedure - IKA-PK-MLK3-11 Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Desain IKA-PK-MLK3-11 Design Work Implementation Procedure - IKA-PK-MLK3-12 Prosedur Pelaksanaan Pekerjaan Pengawasan IKA-PK-MLK3-12 Supervision Work Implementation Procedure - IKA-PK-MLK3-13 Prosedur Pengendalian Proyek IKA-PK-MLK3-13 Project Control Procedure - IKA-PK-MLK3-14 Prosedur Penyerahan Produk IKA-PK-MLK3-14 Product Handover Procedure

No No	Kode Code	Deskripsi Description	Tingkat Risiko Risk Level	Rencana Tindakan Pengendalian Control Action Plan	Tindakan Pengendalian Eksisting Existing Control Measures
2	Collection Period Collection Period	Likuiditas perusahaan terlambat akibat terlambatnya pencairan piutang dimana sumber dana non APBN/ APBD dalam perjanjian term of payment rata-rata diatas 60 hari <i>Company liquidity is delayed due to late account receivable disbursements from non-state budgets (term of payment > 60 days)</i>	Moderate to High Moderate to High	Transfer: 1. Mengalihkan proses pengelolaan piutang (anjak piutang) melalui pihak perbankan atau pihak ketiga <i>Transfer receivables management (factoring) to banks or third parties</i> Reduce: 1. Terbentuknya kebijakan pemberian denda terhadap keterlambatan pembayaran <i>Implement late payment penalty policies</i> 2. Revisi klausul syarat pembayaran dalam penyusunan kontrak <i>Revise payment terms in contracts</i> 3. Melakukan <i>monitoring</i> piutang secara efektif <i>Effectively monitor receivables</i> 4. Melakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi laporan manajemen terkait rencana kontrak, rencana realisasi dan realisasi piutang <i>Evaluate management reports on contract plans, realizations, and receivables</i> 5. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemberi kerja <i>Improve communication with clients</i> 6. Melakukan <i>monitoring</i> jadwal penagihan sesuai kontrak <i>Monitor billing schedules per contract</i> 7. Integrasi IK SMART dengan laporan manajemen dalam <i>monitoring</i> penagihan secara tersistem <i>Integrate IK SMART with management reports for systematic billing.</i> Accept: 1. Evaluasi Per-2 minggu rencana realisasi pencairan piutang <i>Bi-weekly receivables realization evaluations</i> 2. Melakukan penyisihan cadangan kerugian piutang sesuai PSAK <i>Provision for bad debt losses per PSAK</i> 3. Menetapkan dasar <i>expected credit loss</i> atas piutang dan tagihan bruto sesuai kondisi gambaran masing-masing pemberi kerja <i>Establish a basis for expected credit loss on receivables and gross claims according to the conditions and profile of each client.</i> 4. Membuat evaluasi terkait risiko operasional sehubungan pengelolaan piutang <i>Conduct an evaluation related to operational risks associated with receivables management</i>	1. Laporan keuangan secara periodik bulanan <i>Monthly periodic financial reports</i> 2. Laporan manajemen secara periodik bulanan <i>Monthly periodic management reports</i> 3. Laporan rencana pencairan <i>invoice</i> secara periodik bulanan <i>Monthly periodic invoice disbursement plan reports</i> 4. IKA-PK-MLK3-15 Prosedur Pengajuan Penagihan <i>IKA-PK-MLK3-15 Billing Submission Procedure</i>

No No	Kode Code	Deskripsi Description	Tingkat Risiko Risk Level	Rencana Tindakan Pengendalian Control Action Plan	Tindakan Pengendalian Eksisting Existing Control Measures
3	EBITDA EBITDA	Profitabilitas perusahaan tidak tercapai sesuai target RKAP dengan pendapatan sebesar Rp250.979.272.262 Company profitability not achieved according to RKAP target with revenue of Rp250,979,272,262	Tinggi High	Reduce: 1. Kontrol biaya dan dokumen pendukung biaya <i>Cost control and supporting documents</i> 2. <i>Monitoring</i> & evaluasi biaya secara periodik <i>Periodic cost monitoring and evaluation</i> 3. Optimalisasi pengendalian & <i>monitoring</i> ROPT & EKPP di proyek <i>Optimize ROPT & EKPP control and monitoring</i> 4. Menyusun program efisiensi biaya/cost reduction program <i>Develop cost reduction programs</i> 5. Sosialisasi program EKPP kepada <i>Team Leader</i> atau Admin Proyek <i>Socialize EKPP program to Team Leaders/Admins</i> 6. Melakukan kontrol langsung terhadap proyek dengan risiko produksi tidak tercapai <i>Direct project control for underperforming production</i> 7. Penyediaan personil siap tugas, mutu dan waktu <i>Ensure availability of quality, on-time personnel</i> 8. Meningkatkan komunikasi dan koordinasi dengan pemberi kerja <i>Improve communication with clients</i> 9. Peningkatan progres pekerjaan <i>Accelerate project progress</i> 10. Rescheduling progres/kurva S <i>Reschedule work/S-curve</i> 11. Penguatan hak dan kewajiban dalam kontrak <i>Strengthen contract rights and obligations</i>	1. Laporan manajemen perusahaan & keuangan secara periodik bulanan dan diserahkan ke kantor pusat untuk dikonsolidasikan <i>Monthly company management and financial reports submitted to the head office for consolidation</i>
4	Realisasi Kebutuhan Proyek Realization of Project Needs	Ketersediaan tenaga ahli tidak tercapai sesuai target RKAP <i>Expert availability not achieved according to RKAP target</i>	Moderate to High Moderate to High	Transfer: 1. Optimalisasi kerjasama dengan pihak ketiga dalam pemenuhan tenaga ahli <i>Optimize cooperation with third parties for expert fulfillment</i> Reduce: 1. Menyusun program pengembangan SDM <i>Develop HR development programs</i> 2. Merekrut personil di bidang HC <i>Recruit HC personnel</i> 3. Sosialisasi program pengembangan SDM <i>Socialize HR programs</i> 4. Optimalisasi anggaran pengembangan SDM <i>Optimize HR development budget</i> 5. Optimalisasi sistem untuk bank data personil <i>Optimize personnel database system</i> 6. Standarisasi remunerasi <i>Standardize remuneration</i> 7. Menyusun sistem rekrutment personil <i>Develop recruitment system</i>	1. <i>Monitoring</i> secara rutin dan berkala <i>Routine and periodic monitoring</i> 2. Penyusunan <i>database</i>/bank data personil dengan lengkap <i>Compilation of a complete personnel database/bank</i> 3. Pedoman pengembangan SDM <i>Human Resource (HR) development guidelines</i>

Tinjauan atas Efektivitas Sistem Manajemen Risiko

Review on the Effectiveness of Risk Management System

Dalam rangka memastikan penerapan Manajemen Risiko perusahaan (MRP) terus meningkatkan kualitas kinerjanya dalam pengelolaan dan penanganan risiko yang ada, perseroan melakukan tinjauan secara berkala terhadap penerapan MRP di seluruh elemen perusahaan. Tinjauan ini dilakukan sebagai bagian dari evaluasi oleh Manajemen untuk menyempurnakan dan menjaga kesiapan perseroan dalam menghadapi risiko-risiko yang terus berkembang seiring dengan pertumbuhan bisnis.

Berdasarkan hasil tinjauan yang dilakukan, perseroan menilai bahwa penerapan MRP telah dilakukan dengan optimal, serta berlangsung secara efektif dan efisien. Hal ini mendukung upaya perseroan dalam mengelola dan memitigasi berbagai risiko yang ada, memastikan kelangsungan dan keberlanjutan operasional perusahaan di tengah dinamika pasar dan tantangan bisnis yang semakin kompleks.

In order to ensure that the implementation of Enterprise Risk Management (MRP) continues to improve the quality of its performance in managing and handling existing risks, the company conducts regular reviews of the implementation of MRP in all elements of the company. This review is conducted as part of the evaluation by the Management to improve and maintain the company's readiness in facing risks that continue to grow along with business growth.

Based on the results of the review, the company assesses that the implementation of MRP has been carried out optimally, as well as effectively and efficiently. This supports the company's efforts in managing and mitigating various existing risks, ensuring the continuity and sustainability of the company's operations amidst market dynamics and increasingly complex business challenges.

Pernyataan Manajemen atas Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Management Statement on the Adequacy of the Risk Management System

Manajemen menilai bahwa pengelolaan sistem manajemen risiko yang dijalankan oleh Perseroan telah berjalan dengan cukup efektif. Ke depan, manajemen berkomitmen untuk terus melakukan pengembangan yang komprehensif, guna mewujudkan sistem manajemen risiko yang lebih baik dan lebih efisien. Hal ini akan dilakukan dengan memperbarui dan menyempurnakan prosedur yang ada, serta memastikan bahwa pengelolaan risiko semakin adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis yang dinamis.

Management considers that the risk management system run by the company has been running quite effectively. Going forward, the management is committed to continuing to carry out comprehensive development, in order to realise a better and more efficient risk management system. This will be done by updating and refining existing procedures, as well as ensuring that risk management is increasingly adaptive to changes in the dynamic business environment.

Sistem Pengendalian Internal

Internal Control System

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Direksi diwajibkan untuk menetapkan sistem pengendalian internal yang efektif guna mengamankan investasi dan aset perusahaan. Sistem pengendalian internal ini secara umum harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. Lingkungan pengendalian internal dalam perusahaan yang dilaksanakan dengan disiplin dan terstruktur, yang terdiri dari: a. Integritas, nilai etika dan kompetensi karyawan; b. Filosofi dan gaya manajemen; c. Cara yang ditempuh manajemen dalam melaksanakan kewenangan dan tanggung jawabnya; d. Pengorganisasian dan pengembangan sumber daya manusia; dan e. Perhatian dan arahan yang dilakukan oleh Direksi;
2. Pengkajian terhadap pengelolaan risiko usaha (*risk assessment*), yaitu suatu proses untuk mengidentifikasi, menganalisis dan menilai pengelolaan risiko yang relevan;
3. Aktivitas pengendalian, yaitu tindakan-tindakan yang dilakukan dalam suatu proses pengendalian terhadap kegiatan perusahaan pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, antara lain mengenai kewenangan, otorisasi, verifikasi, rekonsiliasi, penilaian atas prestasi kerja, pembagian tugas, dan keamanan terhadap aset perusahaan;

Based on Article 28 of the Regulation of the State Minister for SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, the Board of Directors is required to establish an effective system of internal control to secure the company's investments and assets. This internal control system should generally cover the following matters:

1. *The internal control environment within the company is implemented in disciplined and structured manner, consisting of: a. Integrity, ethical values and employee competence; b. Management philosophy and style; c. The method taken by management in conducting its authority and responsibility; d. Organizing and developing human resources; and e. Attention and direction carried out by the Board of Directors.;*
2. *Assessment of business risk management (risk assessment), namely a process for identifying, analyzing and assessing relevant risk management;*
3. *Control activities, namely actions in a the process of controlling company activities at each level and unit in the SOEs organizational structure, including regarding authority, authorization, verification, reconciliation, assessment of work performance, division of tasks, and security of company assets;*

4. Sistem informasi dan komunikasi, yaitu suatu proses penyajian laporan mengenai kegiatan operasional, finansial, serta ketaatan dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan oleh BUMN; dan
5. *Monitoring*, yaitu proses penilaian terhadap kualitas sistem pengendalian intern, termasuk fungsi internal audit pada setiap tingkat dan unit dalam struktur organisasi BUMN, sehingga dapat dilaksanakan secara optimal.

4. *Information and communication system*, namely a process of presenting reports regarding operational, financial activities, as well as compliance and adherence to statutory provisions by SOEs; and
5. *Monitoring*, namely the process of assessing the quality of the internal control system, including internal audit function at each level and unit in the SOEs organizational structure, hence it can be implemented optimally.

Komponen Sistem Pengendalian Internal Berbasis COSO

Internal Control System Component Based on COSO

Perseroan mengacu pada pendekatan COSO (*Committee of Sponsoring Organizations of The Treadway Commission*) Internal Control Integrated Framework untuk melindungi investasi dan aset perusahaan. Pendekatan ini mencakup lima komponen utama, yaitu lingkungan pengendalian, penilaian risiko, *control activity*, informasi dan komunikasi, serta *monitoring*.

In implementing the Internal Control System, the company refers to the COSO (Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission) Internal Control Integrated Framework approach to protect the company's investments and assets. This approach includes five main components, namely the control environment, risk assessment, control activity, information and communication, and monitoring.

Dengan mengikuti *framework* ini, perseroan dapat memastikan bahwa pengelolaan dan pengendalian operasional berjalan dengan baik, serta risiko yang ada dapat diminimalkan untuk menjaga keberlanjutan dan kinerja perusahaan.

By following this framework, the company can ensure that the management and control of operations are running well, and the existing risks can be minimised to maintain the sustainability and performance of the company.

Tinjauan Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Review of the Effectiveness of Internal Control System

Hasil evaluasi terhadap pelaksanaan sistem pengendalian internal menjadi dasar penting dalam penilaian Manajemen terhadap efektivitas sistem tersebut. Evaluasi ini digunakan untuk menentukan perbaikan dan penyempurnaan yang diperlukan agar Manajemen dapat lebih efektif dalam menjalankan kegiatan operasional perseroan. Berdasarkan penerapan sistem pengendalian internal pada tahun 2024, perseroan menilai bahwa sistem ini telah berjalan dengan efektif dan efisien, serta berperan penting dalam mendukung keberlangsungan usaha dan stabilitas kinerja perusahaan. Hal ini memastikan bahwa operasi perusahaan tetap terjaga dengan baik, menghadapi tantangan yang ada, dan selalu beradaptasi dengan perubahan yang terjadi di pasar.

The results of the evaluation of the implementation of the internal control system are an important basis for Management's assessment of the effectiveness of the system. This evaluation is used to determine the necessary improvements and enhancements so that Management can be more effective in carrying out the company's operational activities. Based on the implementation of the internal control system in 2024, the company assesses that this system has been running effectively and efficiently, and plays an important role in supporting business continuity and stability of company performance. This ensures that the company's operations are well maintained, facing the challenges that exist, and always adapting to changes that occur in the market.

Pernyataan Manajemen atas Kecukupan Sistem Pengendalian Internal

Management Statement on the Adequacy of the Internal Control System

Berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap penerapan sistem pengendalian internal pada 2024, Manajemen menilai bahwa perseroan telah melaksanakan pengendalian internal dengan optimal, didukung oleh kebijakan yang memadai. Selain itu, Manajemen juga optimis bahwa sistem pengendalian internal yang telah diterapkan akan berfungsi sebagai perangkat yang kuat untuk mendukung tindakan strategis yang akan diambil di masa mendatang, sehingga dapat meningkatkan efektivitas operasional dan memperkuat posisi perseroan dalam menghadapi tantangan bisnis yang semakin dinamis.

Based on the evaluation conducted on the implementation of the internal control system in 2024, Management assesses that the company has implemented internal control optimally, supported by adequate policies. In addition, the Management is also optimistic that the internal control system that has been implemented will serve as a strong tool to support strategic actions to be taken in the future, so as to improve operational effectiveness and strengthen the company's position in facing increasingly dynamic business challenges.

Akses Informasi dan Data Perusahaan

Access of Company Information and Data

Sebagai sebuah badan usaha, perseroan mengutamakan keterbukaan informasi dan data perusahaan. Perseroan memastikan bahwa pemangku kepentingan dapat dengan mudah mengakses informasi terkait aktivitas dan kinerja perusahaan, sehingga mereka dapat memahami kondisi perusahaan dengan jelas dan transparan. Selain itu, perseroan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas akses informasi dan data perusahaan agar semakin optimal bagi pemangku kepentingan.

Selain mengoptimalkan keterbukaan informasi melalui website E-PPID, perseroan juga menyediakan akses informasi dan data perusahaan kepada publik melalui berbagai sarana yang dimiliki, antara lain:

- Situs Web: agrinaspalma.id
- Instagram: agrinaspalma
- X: agrinas_palma
- Youtube: @AgrinasPalmaNusantara
- Tiktok: @agrinaspalmanusantara
- LinkedIn: PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)

As a business entity, the company prioritises the disclosure of company information and data. The company ensures that stakeholders can easily access information related to the company's activities and performance, so that they can understand the company's condition clearly and transparently. In addition, the company is committed to continuously improving the quality of access to corporate information and data to optimise it for stakeholders.

In addition to optimising information disclosure through the E-PPID website, the company also provides access to company information and data to the public through various means owned, including:

- Website: agrinaspalma.id
- Instagram: agrinaspalma
- X: agrinas_palma
- Youtube: @AgrinasPalmaNusantara
- Tiktok: @agrinaspalmanusantara
- LinkedIn: PT Agrinas Palma Nusantara (Persero)

Perkara Penting dan Sanksi Administratif

Legal Cases and Administrative Sanction

Perkara Penting

Legal Cases

Selama tahun 2024, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi oleh perseroan, anggota Dewan Komisaris, maupun anggota Direksi. Hal ini mencerminkan stabilitas dan keberhasilan dalam menjalankan operasional serta kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, yang memastikan kelancaran kegiatan bisnis tanpa adanya hambatan hukum yang signifikan.

During 2024, there were no significant cases faced by the company, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors. This reflects the stability and success of the company's operations and compliance with prevailing regulations, ensuring smooth business activities without any significant legal obstacles.

Sanksi Administratif

Administrative Sanctions

Selama tahun 2024, tidak terdapat sanksi administratif yang dikenakan kepada perseroan, anggota Dewan Komisaris, maupun anggota Direksi dari otoritas terkait. Hal ini menunjukkan bahwa perseroan dan jajaran kepengurusannya telah menjalankan operasional perusahaan dengan mematuhi peraturan dan regulasi yang berlaku, serta menjaga reputasi dan integritas perusahaan dengan baik.

During 2024, there were no administrative sanctions imposed on the company, members of the Board of Commissioners, or members of the Board of Directors from the relevant authorities. This shows that the company and its leadership have carried out the company's operations in compliance with applicable rules and regulations, as well as maintaining the company's reputation and integrity.

Kode Etik

Code of Conduct

Perseroan memiliki Buku Panduan dan Code of Conduct (Pedoman Perilaku) *Good Corporate Governance* (GCG) yang berisi komitmen untuk menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. Dokumen ini mencakup visi dan misi Perseroan, prinsip-prinsip GCG, fungsi dan peran organ-organ perseroan, manajemen risiko dan pengendalian internal, serta pokok-pokok kebijakan yang diterapkan oleh Perseroan.

Pedoman Perilaku ini dikeluarkan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. 048/KPTS/IKA/XII/2021 dan berfungsi sebagai panduan bagi seluruh karyawan dan jajaran manajemen dalam menjalankan tugas mereka sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Selain itu, Pedoman Perilaku ini bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh anggota insan perseroan berperilaku dengan teladan, baik dalam ucapan, sikap, maupun tindakan, dan selalu mencerminkan nilai-nilai integritas, transparansi, serta akuntabilitas dalam setiap aspek operasional perusahaan.

The Company has a Good Corporate Governance (GCG) Handbook and Code of Conduct that contains a commitment to implement Good Corporate Governance. This document covers the company's vision and mission, GCG principles, functions and roles of the Company's organs, risk management and internal control, as well as the main policies applied by the company.

This Code of Conduct is issued based on the Joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. 048/KPTS/IKA/XII/2021 and serves as a guide for all employees and management in performing their duties in accordance with GCG principles.

In addition, this Code of Conduct aims to ensure that all members of the company's people behave in an exemplary manner, whether in speech, attitude or action, and always reflect the values of integrity, transparency and accountability in every aspect of the company's operations.

Sosialisasi, Internalisasi dan Penyebarluasan Kode Etik

Dissemination, Internalization and Dissemination of the Code of Ethics

Untuk memastikan terinternalisasinya nilai-nilai kode etik kepada setiap individu, perseroan mewajibkan penandatanganan komitmen penerapan kode etik dan *Good Corporate Governance* (GCG) oleh seluruh karyawan secara berkala setiap tahunnya. Selain itu, proses ini juga disertai dengan sosialisasi dan *awareness* terkait penerapan kode etik, guna meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan akan pentingnya menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam setiap aspek pekerjaan mereka.

To ensure the internalisation of the values of the code of ethics to each individual, the company requires the signing of a commitment to the implementation of the code of ethics and Good Corporate Governance (GCG) by all employees periodically every year. In addition, this process is also accompanied by socialisation and awareness related to the implementation of the code of ethics, in order to increase employees' understanding and awareness of the importance of applying GCG principles in every aspect of their work.

Program Kepemilikan Saham oleh Manajemen (MSOP) dan/atau Karyawan (ESOP)

Stock Ownership Program by Management (MSOP) and/or Employees (ESOP)

Hingga 31 Desember 2024, perseroan tidak memiliki program kepemilikan saham baik oleh manajemen maupun karyawan, sehingga tidak ada informasi terkait hal tersebut yang dapat disampaikan.

As of 31 December 2024, the company does not have any share ownership programme either by management or employees, therefore no information related to this can be conveyed.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistleblowing System)

Stock Ownership Program by Management (MSOP) and/or Employees (ESOP)

Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistleblowing System* (WBS) adalah mekanisme yang dirancang untuk mengelola pengaduan atau penyingkapan terkait perilaku melawan hukum, perbuatan tidak etis, atau tindakan yang tidak semestinya di lingkungan perseroan. Sistem ini memungkinkan pelaporan dilakukan secara

The Whistleblowing System (WBS) is a mechanism designed to manage complaints or disclosures related to unlawful behaviour, unethical acts, or improper actions within the company. This system allows reporting to be done confidentially, anonymously, and independently, in order to optimise the participation of the

rahasia, anonim, dan mandiri (*independent*), guna mengoptimalkan peran serta Insan perseroan dan pihak lain dalam mengungkapkan pelanggaran yang terjadi. WBS digunakan ketika pengaduan atau penyingkapan tidak dapat disalurkan melalui jalur formal, seperti melalui atasan langsung atau fungsi terkait, dan bertujuan untuk memberikan saluran alternatif bagi pelapor untuk melaporkan tindakan yang tidak sesuai dengan kebijakan dan nilai-nilai perusahaan tanpa takut akan pembalasan atau pengaruh negatif.

Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System*) berlaku untuk seluruh Insan perseroan serta seluruh pemangku kepentingan perseroan. Sistem ini dirancang untuk menangani pengaduan atau penyingkapan yang terkait dengan tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Lingkup pengaduan/penyingkapan yang akan ditindaklanjuti oleh sistem ini meliputi berbagai tindakan yang dianggap melanggar kebijakan, hukum, atau etika perusahaan, antara lain:

1. Penyimpangan dari peraturan dan perundangan yang berlaku;
2. Penyalahgunaan jabatan untuk kepentingan lain di luar Perseroan
3. Pemerasan;
4. Perbuatan curang;
5. Benturan Kepentingan; dan
6. Gratifikasi.

Company's people and other parties in disclosing violations that occur. The WBS is used when complaints or disclosures cannot be channelled through formal channels, such as through direct superiors or related functions, and aims to provide an alternative channel for whistleblowers to report actions that are not in accordance with company policies and values without fear of retaliation or negative influence.

The Whistleblowing System applies to all employees of the company as well as all stakeholders of the Company. This system is designed to handle complaints or disclosures related to actions that may harm the company. The scope of complaints/revelations that will be followed up by this system includes various actions that are considered to violate company policies, laws, or ethics, among others:

1. Deviations from applicable rules and regulations;
2. Abuse of position for other interests outside the Company;
3. Extortion;
4. Fraudulent acts;
5. Conflict of Interest; and
6. Gratuity.

Mekanisme Penyampaian Laporan

Report Submission Mechanism

Dalam mekanismenya, pelapor dapat menyampaikan pengaduan/penyingkapan pelanggaran kepada Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran melalui sarana/media yang disediakan oleh perseroan khusus untuk Sistem Pengelolaan Pelanggaran. Sarana ini dirancang untuk memastikan bahwa pelapor dapat mengungkapkan pelanggaran secara rahasia dan anonim jika diinginkan, serta untuk menjamin independensi dan keamanan proses pelaporan.

In the mechanism, the whistleblower can submit a complaint/disclosure of violations to the Whistleblower Administration Manager through the means/media provided by the company specifically for the Whistleblower Management System. This tool is designed to ensure that the whistleblower can disclose violations confidentially and anonymously if desired, as well as to ensure the independence and security of the reporting process.

Penyampaian Pengaduan/Penyingkapan oleh Pelapor harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pelapor wajib memberikan indikasi awal yang dapat dipertanggungjawabkan, meliputi:
 - a. Pelanggaran yang diadukan, meliputi jumlah kerugian (apabila dapat ditentukan), 1 (satu) Pengaduan/ Penyingkapan sebaiknya hanya untuk 1 (satu) pelanggaran agar penanganannya dapat lebih fokus;
 - b. Pihak yang terlibat, yaitu siapa yang seharusnya bertanggungjawab atas pelanggaran tersebut, termasuk saksi-saksi dan pihak yang diuntungkan atau dirugikan atas pelanggaran tersebut;
 - c. Lokasi pelanggaran, yaitu meliputi nama, tempat, atau fungsi terjadinya pelanggaran tersebut;
 - d. Waktu pelanggaran, yaitu periode pelanggaran baik berupa hari, minggu, bulan, tahun atau tanggal tertentu pada saat pelanggaran tersebut terjadi;
 - e. Bagaimana terjadinya pelanggaran tersebut dan apakah terdapat bukti-bukti pendukung telah terjadinya pelanggaran;
 - f. Apakah pelanggaran tersebut pernah dilaporkan kepada pihak lain; dan
 - g. Apakah pelanggaran tersebut pernah terjadi sebelumnya.
2. Untuk mempercepat dan mempermudah proses tindak lanjut Pengaduan/Penyingkapan, maka Pelapor dianjurkan untuk memberikan informasi mengenai data diri, yang sekurang-kurangnya memuat alamat/nomor telepon/ *handphone*/ faksimili/*email*.

Submission of Complaints/Disclosures by the Whistleblower must pay attention to the following matters:

1. *The whistleblower is required to provide initial indications that can be accounted for, including:*
 - a. *The violation complained of includes the amount of loss (if it can be determined), 1 (one) Complaint/Disclosure should only be for 1 (one) violation so that handling can be more focused;*
 - b. *The party involved, namely who should be responsible for the violation, including witnesses and parties who benefit or suffer losses from the violation;*
 - c. *Location of the violation, which includes the name, place, or function of the violation;*
 - d. *Time of violation, namely the period of violation, whether in the form of days, weeks, months, years or certain dates when the violation occurred;*
 - e. *How did the violation occur and is there any supporting evidence that the violation occurred;*
 - f. *Has the violation been reported to other parties; and*
 - g. *Has this violation occurred before.*
2. *To speed up and simplify follow-up process for Complaints/ Disclosures, Whistleblower encouraged to provide information regarding personal data, which at least includes address/ telephone number/cellphone/fax/email.*

Prosedur Pengelolaan

Management Procedures

Dalam prosesnya, perseroan telah menetapkan prosedur pengelolaan pelaporan pelanggaran yang diterima untuk memastikan bahwa setiap pengaduan atau penyingkapan pelanggaran diproses dengan cara yang terstruktur, transparan, dan adil. Prosedur tersebut meliputi langkah-langkah berikut:

1. Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran menerima dan menyaring laporan Pengaduan/Penyingkapan pelanggaran yang diterima, apakah terdapat Indikasi Awal atau sesuai dengan kriteria laporan Sistem Pelaporan Pelanggaran dan dapat ditindak lanjuti? Bila YA laporan Pengaduan/Penyingkapan diteruskan ke Komisi Pelaporan Pelanggaran, bila TIDAK proses Sistem Pelaporan Pelanggaran selesai;
2. Komisi Pelaporan Pelanggaran menerima laporan dari Pengelola Administrasi Pelaporan Pelanggaran dan melakukan investigasi awal terhadap Pengaduan/Penyingkapan. Hasil investigasi awal tersebut dilaporkan kepada Direksi;
3. Dari laporan Komisi Pelaporan Pelanggaran, Direksi menetapkan rekomendasi apakah akan dilakukan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi (Satuan Pengawasan Intern dan/atau Eksternal Investigator), serta melaporkan hasil keputusan tersebut kepada Dewan Komisaris;
4. Tim Investigasi (Satuan Pengawasan Intern dan/atau Eksternal Investigator) melakukan investigasi lanjutan terhadap Pengaduan/Penyingkapan dan melaporkan hasilnya kepada Direksi;
5. Dari laporan investigasi lanjutan oleh Tim Investigasi, Direksi menetapkan rekomendasi tindakan selanjutnya. Bila tidak terbukti atau selesai, maka laporan Pengaduan/Penyingkapan akan ditutup. Apabila Pengaduan/Penyingkapan tersebut terbukti atau memerlukan tindak lanjut, maka akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku, atau diteruskan kepada pihak penyidik untuk diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku;
6. Seluruh proses Investigasi atas Pengaduan/Penyingkapan wajib dibuatkan Berita Acara sebagaimana contoh format dalam Lampiran IV dan V;
7. Prosedur pengelolaan atas Pengaduan/Penyingkapan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran dilaksanakan sesuai dengan bagan alur sebagaimana diatur ; dan
8. Seluruh proses Sistem Pelaporan Pelanggaran harus terdokumentasi dengan baik dan *reliable* (dapat dipertanggungjawabkan).

In the process, the company has established procedures for managing whistleblowing received to ensure that any complaints or disclosures of misconduct are processed in a structured, transparent and fair manner. The procedure includes the following steps:

1. *The Violation Reporting Administration Manager receive and screen the Violation Disclosure Complaint report received, are there any Initial Indications or do they comply with the Violation Reporting System report criteria and can they be followed up? If YES the Complaint/Disclosure report is forwarded to the Whistleblowing Commission, if NO the Whistleblowing System process is complete;*
2. *The Whistleblowing Commission receive a report from the Whistleblowing Administration Manager and conduct an initial investigation into the Complaint/Disclosure. Result of the initial investigation are reported to the Board of Directors;*
3. *From the report of the Whistleblowing Commission, the Board of Directors determine whether a follow-up investigation will be conducted by the Investigation Team (Internal Monitoring Unit and/or External Investigator), and report the result of the decision to the Board of Commissioners;*
4. *The Investigation Team (Internal Monitoring Unit and/ or External Investigator) carries further investigations into Complaints/Disclosures and report the result to the Board of Directors;*
5. *From the follow-up investigation report by the Investigation Team, the Board of Directors determined recommendations for further action. If it is not proven or completed, the Complaint/ Disclosure report will be closed. If the Complaint/Disclosure is proven or requires follow-up action, it will be subject to sanctions in accordance with applicable provisions, or forwarded to the investigating party for further processing in accordance with applicable provisions and regulations;*
6. *All Investigation processes regarding Complaints/Disclosures must be made into Minutes as per the example format in Attachments IV and V;*
7. *Procedures for managing Complaints/Disclosures through the Whistleblowing System are carried out in accordance with the flow chart as regulated; and*
8. *The entire Whistleblowing System process must be well documented and reliable (accountable).*

Media Penyampaian Laporan

Report Submission Media

Perseroan menyediakan media pelaporan dugaan pelanggaran melalui saluran sebagai berikut:

The company provides media for reporting alleged violations through the following channels:

Nomor Telepon
Telephone Number

(021) 8192 636

Surel
E-mail

wbs@agrinaspalma.id

Situs Web
Website

agrinaspalma.id

Alamat
Address

Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara ((d/h formerly PT Indra Karya (Persero))
Gedung HK Tower Lt. 9/ 9th Floor
Jl. Biru Laut X Kav. 9 Cawang, Jakarta Timur 13340

Pihak Pengelola Pengaduan

Party In-Charge With Complaint Management

Komisi Pelaporan Pelanggaran bertanggung jawab penuh atas pengelolaan pengaduan yang masuk dalam Sistem Pelaporan Pelanggaran di perseroan. Sebagai bagian dari tugasnya, komisi ini diwajibkan untuk menyusun laporan berkala setiap tiga bulan sekali, yang harus diserahkan selambat-lambatnya pada minggu kedua bulan berikutnya. Laporan tersebut mencakup jumlah Pengaduan/ Penyingkapan, kategori Pengaduan/ Penyingkapan serta media yang digunakan oleh Pelapor dan penyampaiannya kepada Direksi. Melalui proses ini, Komisi Pelaporan Pelanggaran berperan dalam menjaga integritas dan transparansi sistem pelaporan, serta memastikan bahwa pengelolaan pengaduan dilakukan dengan benar dan efisien.

The Whistleblower Commission is fully responsible for the management of complaints submitted to the company's Whistleblower System. As part of its duties, the commission is required to prepare periodic reports every three months, which must be submitted no later than the second week of the following month. The report includes the number of Complaints/Disclosures, categories of Complaints/Disclosures as well as the media used by the Whistleblower and its submission to the Board of Directors. Through this process, the Whistleblower Commission plays a role in maintaining the integrity and transparency of the reporting system, as well as ensuring that complaints are managed properly and efficiently.

Perlindungan Bagi Pelapor

Protection for Whistleblowers

Perseroan memiliki kebijakan yang dirancang untuk melindungi pelapor dari berbagai risiko atau balasan negatif yang mungkin timbul sebagai akibat dari pengungkapan masalah yang diberikan. Berikut ini adalah beberapa bentuk perlindungan bagi pelapor yang diterapkan oleh perseroan:

1. Identitas Pelapor dijamin kerahasiaannya oleh perseroan.
2. Perseroan menjamin perlindungan terhadap Pelapor dari segala bentuk ancaman, intimidasi, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak mana pun selama Pelapor menjaga kerahasiaan pelanggaran yang dilakukan kepada pihak mana pun.
3. Perlindungan terhadap pelapor juga berlaku bagi para pihak yang melaksanakan investigasi maupun pihak-pihak yang memberikan informasi terkait dengan Pengaduan/ Penyingkapan tersebut.

The Company has a policy designed to protect whistleblowers from various risks or negative responses that may arise as a result of disclosing a given issue. The following are some of the forms of protection for whistleblowers implemented by the company:

1. *Identity of the Whistleblower is guaranteed confidentiality by the company.*
2. *The company guarantees protection for the Whistleblower from all forms of threats, intimidation or unpleasant actions from any party as long as the Whistleblower maintain the confidentiality of violation committed against any party.*
3. *Protection for whistleblowers also applies to parties carrying out investigations and parties*

Pengaduan/Penyingkapan yang diterima Perseroan Tahun 2024

Complaints/Disclosures Received by the Company in 2024

Hingga 31 Desember 2024, tidak terdapat pengaduan yang masuk dan diproses oleh perseroan, dan tidak terdapat sanksi atau tindak lanjut atas pengaduan yang diterima oleh perseroan. Hal ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan pengaduan berjalan dengan baik dan tidak ada pelanggaran yang memerlukan tindak lanjut pada periode tersebut.

As of 31 December 2024, there were no complaints received and processed by the company, and there were no sanctions or follow-up on complaints received by the Company. This shows that the complaint management system is running well and there are no violations that require follow-up in that period.

Kebijakan Anti-Korupsi dan Anti-Gratifikasi

Anti-Corruption and Gratification Policy

Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Perseroan selalu berkomitmen untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih, sehat, dan bebas dari tindakan merugikan, seperti Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), serta berupaya untuk meningkatkan integritas karyawan. Untuk mewujudkan komitmen tersebut, Direksi telah menetapkan Keputusan tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi dengan Nomor: 008/KPTS/IKK/2019.

Gratuity Control Guidelines

The company is always committed to creating a clean, healthy and free from detrimental actions, such as Corruption, Collusion and Nepotism (KKN), and strives to improve employee integrity. To realise this commitment, the Board of Directors has issued a Decision on the Gratification Control Guidelines with Number: 008/KPTS/IKK/2019.

Tindakan gratifikasi dapat menimbulkan potensi kerugian besar terhadap kelangsungan bisnis perseroan. Oleh karena itu, perseroan menyusun dan mengatur Pedoman Pengendalian Gratifikasi yang sejalan dengan penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*), Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*), dan nilai-nilai yang berlaku di perseroan. Hal ini juga menjadi upaya untuk menjaga hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan (*stakeholders*), agar hubungan tersebut dapat terus terjalin dengan lancar dan saling menguntungkan.

Tujuan Pedoman Pengendalian Gratifikasi

Selain sebagai bentuk komitmen nyata perseroan dalam menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG) dan *Code of Conduct*, Pedoman Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk mengatur perilaku serta meminimalkan risiko praktik yang tidak etis atau ilegal terkait penerimaan atau pemberian gratifikasi. Pedoman ini juga bertujuan untuk memastikan bahwa Perseroan bebas dari tindakan Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang dapat merugikan integritas dan kelangsungan perusahaan.

Selain itu, Pedoman Pengendalian Gratifikasi ini menjadi upaya perseroan untuk mengutamakan kepatuhan terhadap pelaksanaan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta untuk menjalankan norma-norma sosial yang berlaku di masyarakat. Hal ini dilakukan dengan selalu mengedepankan kepentingan perseroan di atas kepentingan pribadi, keluarga, kelompok, atau golongan, demi tercapainya tujuan bersama yang lebih besar.

Prinsip Dasar Gratifikasi

Pedoman Pengendalian Gratifikasi dalam proses penyusunannya memiliki prinsip dasar, yakni:

1. Penolakan Terhadap Gratifikasi

Insan PT Indra Karya (Persero) wajib menolak secara sopan segala bentuk hadiah, cendera mata, atau hiburan (*entertainment*) serta melaporkannya kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG). Selain itu, insan Perseroan dilarang memberikan gratifikasi dalam bentuk apa pun kepada lembaga pemerintah, individu, atau institusi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Penerimaan Gratifikasi

Insan perseroan dilarang menerima gratifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, baik atas inisiatif sendiri maupun orang lain, dari pihak mana pun yang memiliki hubungan bisnis atau merupakan pesaing. Larangan ini berlaku untuk gratifikasi yang bertujuan untuk mendapatkan informasi atau keuntungan yang tidak sah menurut peraturan yang berlaku, atau untuk mempengaruhi pihak terkait agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan atau wewenang mereka.

3. Pemberian Gratifikasi

Insan perseroan dilarang memberikan gratifikasi secara langsung maupun tidak langsung, baik atas inisiatif sendiri maupun melalui pihak lain kepada mitra bisnis atau pesaing, apabila pemberian tersebut bertujuan memperoleh informasi atau manfaat yang tidak dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, serta bertujuan memengaruhi tindakan atau keputusan pihak terkait dalam menjalankan tugas, jabatan, atau kewenangannya.

Investigasi dan Penanganan Penyuapan

Perseroan menetapkan pengaturan investigasi dan penanganan penyuapan, sebagai berikut:

- Investigasi dapat dilakukan sebagai tindak lanjut atas dugaan pelanggaran yang dapat diperoleh dari kegiatan audit internal, pelanggaran kebijakan anti-penyuapan, adanya pelaporan, hasil pendeteksian atau karena layak diduga.

Gratification can potentially cause major losses to the company's business continuity. Therefore, the company prepares and regulates the Gratification Control Guidelines which are in line with the implementation of Good Corporate Governance, Code of Conduct, and values that apply in the company. This is also an effort to maintain good relations with stakeholders, so that these relationships can continue to be established smoothly and mutually beneficial.

Objective of Gratuity Control Guideline

In addition to being a form of the company's real commitment in implementing the principles of Good Corporate Governance (GCG) and Code of Conduct, the Gratification Control Guidelines aim to regulate behaviour and minimise the risk of unethical or illegal practices related to the receipt or giving of gratuities. These guidelines also aim to ensure that the Company is free from acts of Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) that could harm the Company's integrity and continuity.

In addition, this Gratification Control Guideline is the company's effort to prioritise compliance with the implementation of applicable laws and regulations, as well as to uphold social norms that apply in society. This is done by always putting the interests of the company above personal, family, group, or class interests, for the sake of achieving greater common goals.

Basic Principles of Gratuity

Gratuity Control Guidelines in the drafting process have basic principles, namely:

1. Rejection of Gratuity

Persons of PT Indra Karya (Persero) must politely refuse all forms of gifts, souvenirs, or entertainment and report them to the Gratification Control Unit (UPG). In addition, the Company's personnel are prohibited from giving gratuities of any kind to government agencies, individuals, or institutions in accordance with the provisions of applicable laws and regulations.

2. Acceptance of Gratuity

Employees of the company are prohibited from accepting gratification, either directly or indirectly, either on their own initiative or that of others, from any party that has a business relationship or is a competitor. This prohibition applies to gratification that is intended to obtain information or benefits that are not lawful under applicable regulations, or to influence the relevant party to do or not do something related to their position or authority.

3. Giving Gratuity

Employees of the company are prohibited from giving gratifications directly or indirectly, either on their own initiative or through other parties to business partners or competitors, if the purpose of the gift is to obtain information or benefits not justified by laws and regulations, and to influence the actions or decisions of related parties in carrying out their duties, positions, or authorities.

Bribery Investigation and Handling

The company has established the following arrangements for bribery investigation and handling:

- Investigations can be conducted as a follow-up to alleged violations that can be obtained from internal audit activities, violations of anti-bribery policies, reports, detection results or because they are reasonably suspected.*

- Investigasi atau pengungkapan dugaan pelanggaran terhadap kebijakan anti-penyuapan harus dilakukan secara tepat dan objektif.
- Investigasi dilakukan oleh personel atau tim yang tepat, berintegritas, kompeten, dan diberikan kewenangan secara memadai dan sesuai.
- Apabila diperlukan, investigasi dapat melibatkan investigator eksternal yang memiliki kompetensi sesuai dengan dugaan pelanggaran yang dilaporkan.
- Status dan hasil investigasi dilaporkan pada manajemen puncak, Fungsi Kepatuhan Anti-Penyuapan (FKAP), serta pihak terkait lainnya.
- Kegiatan investigasi dan laporan investigasi bersifat rahasia.
- Investigasi dilakukan secara independent dan tidak melibatkan pihak yang dilaporkan atau sedang diinvestigasi.

Sanksi dan Pelanggaran

Pedoman Pengendalian Gratifikasi telah disebarluaskan secara menyeluruh oleh Sekretaris Perusahaan melalui website perseroan, memastikan seluruh insan perseroan memahami dan mematuhi ketentuan yang telah ditetapkan.

Dalam pedoman yang disosialisasikan, perseroan juga mencantumkan sanksi bagi mereka yang melanggar. Sanksi ini diberikan sesuai dengan peraturan internal yang berlaku di perseroan. Selain itu, pelanggaran tersebut juga dapat dikenakan sanksi pidana suap, sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Komitmen Penerapan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan

Indra Karya memiliki komitmen yang kuat dalam menerapkan Sistem Manajemen Anti-Penyuapan (SMAP) sesuai dengan standar ISO 37001:2016, yang tercermin dalam pemberlakuan Pedoman SMAP sejak 20 Mei 2022. Penetapan kebijakan anti-penyuapan ini merupakan langkah perseroan untuk mengoptimalkan kualitas penerapan SMAP, baik untuk seluruh jajaran internal maupun pihak-pihak eksternal yang berkepentingan. Pedoman SMAP Indra Karya telah disusun sebagai informasi yang terdokumentasi, disosialisasikan kepada seluruh jajaran perusahaan, dan tersedia bagi pemangku kepentingan yang relevan.

Berdasarkan pedoman tersebut, perseroan berkomitmen untuk mengatur dan menyatakan hal-hal terkait dengan praktik penyuapan, sebagai berikut:

- Melarang penyuapan;
- Mensyaratkan kepatuhan dengan peraturan perundang-undangan.
- Sesuai tujuan organisasi;
- Menyediakan kerangka kerja untuk menetapkan, meninjau dan mencapai sasaran anti-penyuapan;
- Komitmen untuk memenuhi persyaratan sistem manajemen anti-penyuapan;
- Mendorong pelaporan dugaan pelanggaran disertai itikad baik, tanpa takut tindakan balasan;
- Komitmen peningkatan berkelanjutan dari sistem manajemen anti-penyuapan;
- Menjelaskan wewenang dan kemandirian fungsi kepatuhan anti-penyuapan; dan
- Menjelaskan konsekuensi jika tidak sesuai dengan kebijakan anti-penyuapan.

- Investigations or disclosures of alleged violations of antibribery policies must be conducted appropriately and objectively.
- Investigations are conducted by appropriate personnel or teams, with integrity, competence, and are given adequate and appropriate authority.
- If necessary, investigations can involve external investigators who have the competence according to the alleged violations reported.
- The status and results of the investigation are reported to top management, the Anti-Bribery Compliance Function (FKAP), and other related parties.
- Investigation activities and investigation reports are confidential.
- Investigations are conducted independently and do not involve the parties reported or being investigated.

Sanction and Violation

The Guidelines for the Control of Gratuities have been widely disseminated by the Corporate Secretary through the Company's website, ensuring that all persons within the company understand and comply with the stipulated provisions.

In the disseminated guidelines, the company also lists the sanctions for those who violate them. These sanctions are imposed in accordance with the company's internal regulations. In addition, such violations may also be subject to criminal sanctions for bribery, as stipulated in the applicable laws and regulations.

Commitment to Implementing an Anti-Bribery Management System

Indra Karya is strongly committed to implementing the Anti-Bribery Management System (ABMS) in accordance with the ISO 37001:2016 standard, which is reflected in the enactment of the ABMS Guidelines since 20 May 2022. The establishment of this anti-bribery policy is a step taken by the company to optimise the quality of ABMS implementation, both for all internal levels and external stakeholders. The guidelines for SMAP Indra Karya have been compiled as documented information, disseminated to all levels of the company, and made available to relevant stakeholders.

Based on these guidelines, the company is committed to regulating and declaring matters related to the practice of bribery, as follows:

- Prohibiting bribery;
- Requiring compliance with laws and regulations;
- In accordance with organizational objectives;
- Providing a framework for establishing, reviewing and achieving anti-bribery targets;
- Commitment to meeting the requirements of the antibribery management system;
- Encouraging reporting of suspected violations in good faith, without fear of retaliation;
- Commitment to continuous improvement of the antibribery management system;
- Explaining the authority and independence of the antibribery compliance function; and
- Explaining the consequences of not complying with the anti-bribery policy.

Mekanisme Pengadaan Barang dan Jasa

Mechanism for Goods and Services Procurement

Berdasarkan Keputusan Direksi PT Indra Karya (Persero) No 032/KPTS/IK/X/2022 mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, perseroan menganggap pengadaan barang dan jasa sebagai proses penting yang mendukung penggunaan anggaran untuk memperoleh barang, jasa, dan pekerjaan yang diperlukan untuk mencapai tujuan organisasi. Oleh karena itu, perseroan menetapkan Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Indra Karya (Persero). Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa ini, diharapkan dapat memperkuat proses pengadaan yang lebih kompetitif, transparan, dan akuntabel bagi seluruh penyedia barang dan jasa, serta untuk memelihara iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan di lingkungan perseroan.

Etika Pengadaan Barang dan Jasa

Etika dalam pengadaan barang dan jasa merujuk pada serangkaian nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan standar perilaku yang mengatur seluruh proses pengadaan di perseroan. Aspek ini sangat penting untuk memastikan bahwa proses pengadaan dijalankan dengan integritas, transparansi, dan keadilan, serta untuk meminimalkan risiko korupsi atau penyalahgunaan kekuasaan. Oleh karena itu, pengadaan barang dan jasa wajib mengikuti prinsip-prinsip etika pengadaan, antara lain:

1. Melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggung jawab untuk mencapai sasaran, kelancaran, dan ketepatan tujuan Pengadaan Barang dan Jasa;
2. Bekerja secara profesional, mandiri, dan menjaga kerahasiaan informasi yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah penyimpangan Pengadaan Barang dan Jasa;
3. Tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung yang berakibat persaingan usaha tidak sehat;
4. Menerima dan bertanggung jawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan tertulis pihak yang terkait;
5. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung, yang berakibat persaingan usaha tidak sehat dalam Pengadaan Barang dan Jasa;
6. Menghindari dan mencegah pemborosan dan kebocoran keuangan;
7. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang; dan/atau
8. Tidak menerima, tidak menawarkan, atau tidak menjanjikan untuk memberi dana atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan apa saja yang bernilai dari atau kepada siapa pun yang diketahui atau yang dapat diindikasikan sebagai praktik penyuapan;
9. Mendorong terjadinya persaingan usaha sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
10. Membuat dan/atau menyampaikan secara benar terkait dokumen dan/atau keterangan lain yang tertuang baik dalam persyaratan untuk penyusunan dan pelaksanaan pengadaan barang dan/atau jasa.

Penggunaan Produksi Dalam Negeri dan Preferensi Harga

Mengacu pada Pedoman Pengadaan Barang dan Jasa PT Indra Karya (Persero), ketentuan mengenai penggunaan produk dalam negeri dan preferensi harga dalam proses pengadaan adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri, rancang bangun dan perekayasaan nasional, serta perluasan kesempatan bagi usaha mikro, usaha kecil dan koperasi minimal sebesar 20% (dua puluh persen).
2. Dalam rangka mendorong pertumbuhan industri dalam negeri, Perusahaan memberikan preferensi harga sebagai berikut:

Based on the Decree of the Board of Directors of PT Indra Karya (Persero) No. 032/KPTS/IK/X/2022 regarding the implementation of goods and services procurement, the company considers the procurement of goods and services as an important process that supports the use of the budget to obtain goods, services, and work needed to achieve organisational goals. Therefore, the company establishes the Goods and Services Procurement Guidelines of PT Indra Karya (Persero). These Goods and Services Procurement Guidelines are expected to strengthen a more competitive, transparent and accountable procurement process for all goods and services providers, as well as to maintain a healthy and sustainable business climate within the company.

Ethics of Procurement of Goods and Services

Ethics in procurement refers to a set of values, principles and standards of behaviour that govern the entire procurement process in the company. This aspect is crucial to ensure that the procurement process is conducted with integrity, transparency and fairness, and to minimise the risk of corruption or abuse of power. Therefore, procurement of goods and services must follow the principles of procurement ethics, among others:

1. Carrying out tasks in an orderly manner, accompanied by a sense of responsibility to achieve targets, smoothness and accuracy of objectives for Procurement of Goods and Services;
2. Work professionally, independently, and maintain the confidentiality of information which by its nature must be kept confidential to prevent irregularities in the Procurement of Goods and Services;
3. Do not influence each other directly or indirectly resulting in unhealthy business competition;
4. Accept and be responsible for all decisions determined in accordance with the written agreement of the parties concerned;
5. Avoid and prevent conflicts of interest of related parties, either directly or indirectly, which result in unfair business competition in the procurement of Goods and Services;
6. Avoid and prevent waste and leakage finances;
7. Avoid and prevent abuse of authority and/or collusion; and/or
8. Do not accept, offer, or promise to provide funds or receive gifts, rewards, commissions, rebates, and anything of value from or to anyone that is known or that can be indicated as a bribery practice; and
9. Encourage healthy business competition in accordance with statutory provisions; and
10. Create and/or submit correctly related documents and/or other information contained in the requirements for the preparation and implementation of procurement of goods and/or services.

Domestic Production Usage and Price Preferences

Referring to the Guidelines for Procurement of Goods and Services of PT Indra Karya (Persero), the provisions regarding the use of domestic products and price preferences in the procurement process are as follows:

1. The company prioritizes the use of domestic production, national design and engineering, as well as expanding opportunities for micro businesses, small businesses and cooperatives by at least 20% (twenty percent).
2. In order to encourage the growth of domestic industry, the Company provides the following price preferences:

- a. Preferensi harga untuk barang paling tinggi 25% (dua puluh lima persen);
 - b. Preferensi harga untuk pekerjaan konstruksi yang dikerjakan oleh badan usaha nasional paling tinggi 7,5% (tujuh koma lima persen) di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing; dan
 - c. Preferensi harga diperhitungkan dalam evaluasi harga penawaran yang telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis.
3. *Monitoring* Penggunaan Produk Dalam Negeri/ komponen dalam negeri dilakukan oleh Tim/Personil TKDN yang dibentuk/ditunjuk oleh Direksi.

Pelaksanaan E-Procurement

Perseroan melaksanakan *e-procurement* dengan mengacu pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) No. 12 Tahun 2021, yang mengatur bahwa *e-purchasing* dilakukan untuk barang, pekerjaan konstruksi, atau jasa lainnya yang tercantum dalam katalog elektronik. Sesuai dengan peraturan tersebut, pelaksanaan *e-purchasing* wajib dilakukan untuk barang dan jasa yang terkait dengan pemenuhan kebutuhan nasional dan/atau strategis, yang ditetapkan oleh menteri, kepala lembaga, atau kepala daerah.

Dengan demikian, perseroan memastikan bahwa proses pengadaan barang dan jasa yang terkait dengan kebutuhan penting negara dilakukan secara transparan, efisien, dan sesuai dengan standar yang ditetapkan dalam peraturan yang berlaku.

Proses Pengadaan Barang dan Jasa

Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa merupakan tahap krusial dalam siklus pengadaan yang melibatkan berbagai proses, mulai dari persiapan, evaluasi, hingga penandatanganan kontrak dan pelaksanaan. Perseroan melaksanakan pengadaan barang dan jasa dengan langkah-langkah sebagai berikut:

Seleksi Vendor

- Seleksi Vendor adalah kegiatan pemilihan vendor sebelum proses pengadaan barang dan jasa, baik dilakukan berdasarkan data yang ada dalam *Vendor Management* maupun sumber lain (*website*, referensi, PADI UMKM atau yang lainnya) guna memenuhi persyaratan klasifikasi pekerjaan.
- Tahapan seleksi vendor meliputi tahapan pembuatan klasifikasi pekerjaan yang dibutuhkan dan vendor yang dibutuhkan berdasarkan data *Vendor Management* maupun berdasarkan referensi lain yang berasal dari *website* atau PADI UMKM;
- Undangan untuk Seleksi Vendor dan membuat Daftar Rekanan.
- Pelaksanaan seleksi vendor diatur dalam Prosedur Seleksi Vendor (Penyedia Eksternal).
- Bukti bukti pelaksanaan Seleksi Vendor meliputi dokumen klasifikasi pekerjaan, dokumen hasil seleksi vendor serta dokumen daftar rekanan terseleksi.

Proses Pengadaan dan Penilaian

- Proses Pengadaan adalah kegiatan untuk mendapatkan barang dan/atau Jasa yang dilakukan oleh perusahaan yang pembiayaannya berasal dari anggaran perseroan yakni anggaran yang dianggarkan melalui *Capital Expenditure* (Capex) maupun *Operating Expenditure* (Opex) dan proses pengadaannya dimulai dari perencanaan kebutuhan, implementasi pelaksanaan, hingga serah terima hasil pekerjaan.
- Proses Penilaian pada pengadaan barang dan jasa adalah data administrasi, teknis dan harga atas transaksi pengadaan yang menentukan keberhasilan *target/output* pengadaan dalam menghasilkan *value for money* dalam tata kelola pengadaan barang dan jasa.

- a. Price preference for goods is a maximum of 25% (twenty five percent);
 - b. Price preference for construction work carried out by national business entities is a maximum of 7.5% (seven point five percent) above the lowest bid price from foreign business entities; and
 - c. Price preference is taken into account in the evaluation of bid prices that have met administrative and technical requirements.
3. *Monitoring* of the Use of Domestic Products/domestic components is carried out by the TKDN Team/Personnel formed/appointed by the Board of Directors.

E-Procurement Implementation

The company implements *e-procurement* by referring to the provisions stipulated in Presidential Regulation (Perpres) No. 12 of 2021, which stipulates that *e-purchasing* is carried out for goods, construction works, or other services listed in the electronic catalogue. In accordance with the regulation, the implementation of *e-purchasing* must be carried out for goods and services related to the fulfilment of national and/or strategic needs, which are determined by the minister, head of institution, or head of region.

Thus, the company ensures that the procurement process of goods and services related to important state needs is carried out transparently, efficiently, and in accordance with the standards set out in the applicable regulations.

Processes of Procurement of Goods and Services

The implementation of goods and services procurement is a crucial stage in the procurement cycle that involves various processes, from preparation, evaluation, to contract signing and implementation. The Company carries out the procurement of goods and services with the following steps:

Vendor Selection

- Vendor Selection is an activity of selecting vendors before the procurement process of goods and services, either based on data in *Vendor Management* or other sources (*website*, references, PADI UMKM or others) to meet the requirements of job classification.
- Vendor selection stages include the stages of creating the classification of work needed and the vendors needed based on *Vendor Management* data or based on other references from the *website* or PADI UMKM;
- Invitation for Vendor Selection and creating a List of Partners.
- The implementation of vendor selection is regulated in the *Vendor Selection Procedure* (External Provider).
- Evidence of the implementation of Vendor Selection includes job classification documents, vendor selection result documents and selected partner list documents.

Procurement and Assessment Process

- The Procurement Process is an activity to obtain goods and/ or services carried out by a company whose financing comes from the company's budget, namely the budget budgeted through *Capital Expenditure* (Capex) and *Operating Expenditure* (Opex) and the procurement process starts from planning needs, implementation of implementation, to handover of work results.
- The Assessment Process in the procurement of goods and services is administrative, technical and price data on procurement transactions that determine the success of the procurement *target/output* in producing value for money in the governance of procurement of goods and services.

- Tahapan pengadaan dan penilaian meliputi pelaksanaan *bidding* serta penilaian transaksi pengadaan.
- Pelaksanaan pengadaan dan penilaian diatur dalam Prosedur Pengadaan dan Penilaian.
- Bukti-bukti pelaksanaan pengadaan dan penilaian meliputi penawaran harga dan hasil penilaian pengadaan.

Penunjukan Pemenang

- Penunjukan Pemenang adalah persetujuan penetapan kepada penyedia barang dan jasa (vendor) setelah melalui proses seleksi sesuai prosedur yang berlaku di Perusahaan.
- Tahapan penunjukan pemenang meliputi persetujuan Penetapan, Pengumuman Pemenang, Penunjukan dan Pelaksanaan Pengadaan, Pemastian Penyedia Eksternal Wanprestasi, Pemutusan Kontrak/Perjanjian serta Penerimaan dan Pengeluaran Barang/Jasa.
- Pelaksanaan penunjukan pemenang diatur dalam Prosedur Penunjukan Pemenang.
- Bukti-bukti penunjukan pemenang meliputi Pengumuman pemenang, SPMK/Kontrak Sesuai kewenangan, Media Pemutusan Kontrak dan Berita Acara Penerimaan.

Vendor Management

- Vendor *Management* adalah proses untuk mendapatkan transparansi dari seluruh aspek pengelolaan vendor/rekanan sehingga memberikan nilai tambah bagi perusahaan dan keberlangsungan pengadaan barang dan jasa.
- Tahapan vendor *management* meliputi registrasi vendor, *monitoring* kinerja vendor, evaluasi kinerja vendor dan *rating value* kinerja vendor.
- Pelaksanaan vendor *management* diatur dalam Prosedur Vendor *Management*.
- Bukti-bukti vendor *management* meliputi Dokumen Registrasi Vendor, Dokumen *Monitoring* Kinerja Vendor dan Dokumen Evaluasi Kinerja Vendor.

- The stages of procurement and assessment include the implementation of *bidding* and assessment of procurement transactions.
- The implementation of procurement and assessment is regulated in the Procurement and Assessment Procedure.
- Evidence of the implementation of procurement and assessment includes price offers and procurement assessment results.

Winner Appointment

- Winner Appointment is the approval of the determination to the goods and services provider (vendor) after going through a selection process according to the procedures applicable in the Company.
- The stages of winner appointment include approval of Determination, Winner Announcement, Procurement Appointment and Implementation, Confirmation of Default External Provider, Termination of Contract/Agreement and Receipt and Release of Goods/Services.
- The implementation of winner appointment is regulated in the Winner Appointment Procedure.
- Evidence of winner appointment includes Winner Announcement, SPMK/Contract According to authority, Contract Termination Media and Receipt Minutes.

Vendor Management

- Vendor Management is a process to obtain transparency from all aspects of vendor/partner management so as to provide added value to the company and the sustainability of procurement of goods and services.
- Vendor management stages include vendor registration, vendor performance monitoring, vendor performance evaluation and vendor performance value rating.
- Vendor management implementation is regulated in the Vendor Management Procedure.
- Evidence of vendor management includes Vendor Registration Documents, Vendor Performance Monitoring Documents and Vendor Performance Evaluation Documents.

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara (LHKPN)

State Officials Wealth Report (LHKPN)

Kebijakan Pelaporan LHKPN

LHKPN Reporting Policy

Untuk mendukung pemenuhan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta mewujudkan komitmen nyata dalam menciptakan lingkungan kerja yang bersih dan sehat, perseroan telah menetapkan kebijakan mengenai penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang tertuang dalam Keputusan Direksi PT Indra Karya (Persero) Nomor: 025/KPTS/IK/XI/2020 tentang Pedoman Kewajiban Penyampaian LHKPN di lingkungan PT Indra Karya (Persero).

Pedoman Kepatuhan LHKPN di perseroan bertujuan untuk memberikan acuan bagi insan perseroan dalam menjaga reputasi dan kualitas perusahaan sebagai penyedia layanan di bidang jasa *engineering consultant* di Indonesia, sekaligus sebagai wujud implementasi prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

To support compliance with applicable regulations and realise a real commitment to creating a clean and healthy work environment, the company has established a policy regarding the submission of the State Organiser's Asset Report (LHKPN) as stipulated in the Decree of the Board of Directors of PT Indra Karya (Persero) Number: 025/KPTS/IK/XI/2020 concerning Guidelines for Obligations to Submit LHKPN within PT Indra Karya (Persero).

The LHKPN Compliance Guidelines in the company aim to provide a reference for the Company's people in maintaining the company's reputation and quality as a service provider in the field of *engineering consultant* services in Indonesia, as well as a form of implementation of the principles of *Good Corporate Governance* (GCG).

Unit yang bertanggung jawab dalam pengelolaan LHKPN di perseroan adalah Satuan Pengawasan Intern (SPI), yang berfungsi sebagai mitra KPK dalam menjalankan pengelolaan dan pengawasan LHKPN di lingkungan perusahaan. Dengan peran SPI ini, perseroan berkomitmen untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas dalam setiap laporannya, sekaligus memastikan bahwa seluruh pejabat yang wajib lapor menjalankan kewajiban mereka dengan penuh tanggung jawab.

The unit responsible for the management of LHKPN in the company is the Internal Audit Unit (SPI), which functions as a partner of KPK in carrying out the management and supervision of LHKPN within the company. With this role of SPI, the company is committed to maintaining transparency and accountability in every report, while ensuring that all officials who are required to report carry out their obligations responsibly.

Wajib Lapor LHKPN

Parties Required for LHKPN Report

Berdasarkan Pasal 2 UU No. 28 Tahun 1999, penyelenggara negara yang wajib melapor LHKPN adalah Pejabat Negara yang sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta pejabat yang memiliki fungsi strategis.

Based on Article 2 of Law No. 28 of 1999, state officials who are required to report LHKPN are State Officials in accordance with the provisions of applicable laws and regulations, as well as officials who have strategic functions.

Berdasarkan kebijakan tersebut, berikut adalah jabatan struktural di lingkungan perseroan yang diwajibkan untuk menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN):

Based on this policy, the following are the structural positions within the company that are required to submit the State Organiser's Asset Report (LHKPN):

1. Dewan Komisaris
2. Direksi
3. Vice President/General Manager (BOD-1)
4. Manager (BOD-2)

1. Board of Commissioners
2. Board of Directors
3. Vice President/General Manager (BOD-1)
4. Manager (BOD-2)

Pejabat perseroan wajib lapor LHKPN untuk periode tahun buku 2024 adalah sebagai berikut:

Company officials are required to report LHKPN for the 2024 fiscal year period as follows:

No No	Nama Name	Jabatan Position	Status Pelaporan LHKPN LHKPN Reporting Status
1	Letjen TNI Purn. Agus Sutomo	Direktur Utama President Director	Sudah Done
2	Gok Ari Joso Simamora	Direktur Director	Sudah Done
3	Ferdinandus Baskoro H. S. W.	Internal Audit Division Head	Sudah Done
4	Oky Suryono	Corporate Secretary Division Vice President	Sudah Done
5	Devi Julirawati	Environmental Social Responsibility Manager	Sudah Done
6	Resa Nugraha	Corporate Communication and Eksternal Relation Manager	Sudah Done
7	Gagah Guntur Aribowo	Vice President	Sudah Done
8	Muhammad Fauri	Marketing Manager	Sudah Done
9	Stephanus Dadang Sancoyo	Project and Revenue Management Manager	Sudah Done
10	Anindya Estiandari	Bisnis Development Manager	Sudah Done
11	Bambang Palgunadi	Vice President	Sudah Done
12	Iwan Prayitno	Employee Service & Industrial Relation Manager	Sudah Done

No No	Nama Name	Jabatan Position	Status Pelaporan LHKPN LHKPN Reporting Status
13	Nur Utomo	Transformation & Management Information System Manager	Sudah Done
14	Evi Diah Widyastuti	General Affair and Procurement Manager	Sudah Done
15	Theovany	HR Employee Performance Manager	Sudah Done
16	Marlena Puspitasari	Vice President	Sudah Done
17	Nadia Nurtanti	Finance, Accounting Manager	Sudah Done
18	Yuli Astuti	General Manager	Sudah Done
19	Achsin Wijayanto	Proposal & Marketing Manager	Sudah Done
20	Amin Mardiyantono Hadi	Operating Manager	Sudah Done
21	Agung Yudianto Safii	Operating Manager	Sudah Done
22	Retno Sunarsih	Finance, Accounting & Risk Management Manager	Sudah Done
23	Miftahul Arifin	General Manager	Sudah Done
24	Fajar Wahyu Sihombing	Operating Manager	Sudah Done
25	Tri Wicaksono	Finance, Accounting & Risk Management Manager	Sudah Done
26	Miftah Rizky Fauzi	Proposal & Marketing Manager	Sudah Done
27	Adrian Yulianto	General Manager	Sudah Done
28	Denis Mararis	Operating Manager	Sudah Done
29	Adi Setio	Proposal & Marketing Manager	Sudah Done
30	Gita Ayu Kesuma	Finance, Accounting & Risk Management Manager	Sudah Done
Jumlah Total			30
Persentase (%) Percentage (%)			100%

Tugas dan Tanggung Jawab Unit Pengelola LHKPN

Duties and Responsibilities of the LHKPN Management Unit

Dalam menjalankan kewajibannya untuk memastikan kebijakan LHKPN dapat berjalan dengan optimal, Unit Pengelola LHKPN memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Fungsi Administrator Instansi dan Administrator Unit Kerja perseroan akan menetapkan Administrator Instansi dan Administrator Unit yang memiliki tugas sebagai berikut:

Administrasi Instansi:

- a. Mengajukan permintaan akun (*username & password*) untuk Administrator Unit kepada KPK;
- b. Mengumpulkan persyaratan formulir registrasi Wajib lapor;
- c. Memberikan konsultasi kepada Administrasi Unit terkait penggunaan aplikasi LHKPN; dan
- d. Memberikan konsultasi kepada Wajib Lapor atas penyampaian LHKPN.

Administrasi Unit Kerja:

- a. Admin Unit kerja hanya memiliki akses terhadap modul *e-Registration* untuk Wajib Lapor di perseroan;
- b. Membuat akun Wajib Lapor;
- c. Membuat dan memutakhirkan daftar Wajib Lapor;
- d. Menghimbau Wajib Lapor untuk melakukan penyampaian LHKPN; dan
- e. Melakukan pemantauan kepatuhan penyampaian LHKPN.

2. Fungsi *Compliance*

- Menyerahkan data Wajib Lapor dan data perubahan jabatan kepada KPK;
- Membuat pemberitahuan mengenai kewajiban pelaporan LHKPN kepada seluruh Wajib Lapor melalui Surat, Memo Dinas, Edaran, atau *Broadcast*;
- Berkoordinasi dengan Administrator Unit Kerja dalam hal pelaksanaan penyampaian LHKPN; dan
- Berkoordinasi dengan KPK dalam hal *monitoring* dan evaluasi pelaksanaan penyampaian LHKPN.

In carrying out its obligations to ensure that the LHKPN policy can run optimally, the LHKPN Management Unit has the following duties and responsibilities:

1. *Functions of Agency Administrator and Work Unit Administrator of the company will determine Agency Administrator and Unit Administrator who have the following duties:*

Agency Administration:

- a. *Submit an account request (username & password) for the Unit Administrator to the KPK;*
- b. *Collect registration form of Reporting Party;*
- c. *Provide consultation to Unit Administration regarding the use of the LHKPN application; and*
- d. *Providing consultation to the Reporting Party regarding the submission of LHKPN*

Work Unit Administration:

- a. *Work Unit Admin only has access to the e-Registration module for Reporting Party at the Company;*
- b. *Create Reporting Party account;*
- c. *Create and update a Reporting Party list;*
- d. *Calling on Reporting Party to submit LHKPN; and*
- e. *Monitoring compliance with LHKPN submission.*

2. *Compliance Function*

- *Submit Reporting Party data and position change data to the Corruption Eradication Commission;*
- *Make notifications regarding obligation to report LHKPN to all Reporting Parties via Letter, Service Memo, Circular, or Broadcast;*
- *Coordinate with the Work Unit Administrator in terms of implementing LHKPN submission; and*
- *Coordinate with the KPK in terms of monitoring and evaluating the implementation of LHKPN submission.*

Mekanisme Pengelolaan LHKPN

LHKPN Management Mechanism

Mekanisme pengelolaan kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) diatur sebagai berikut:

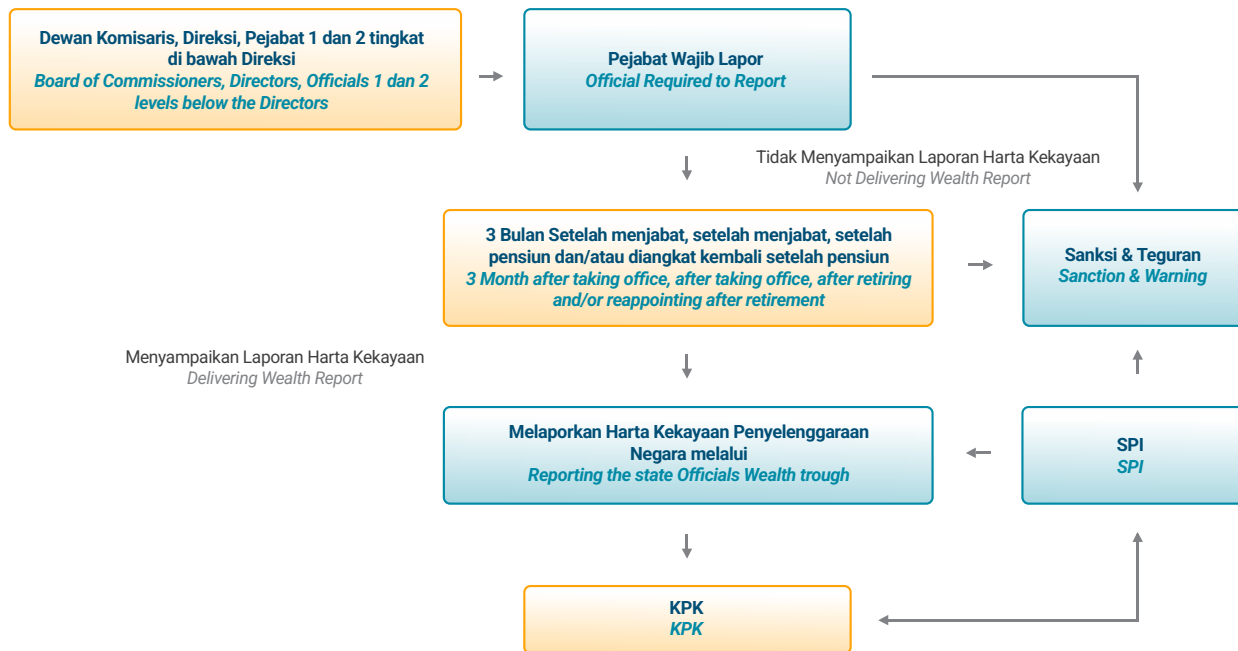
1. Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK melalui Direktorat Pendaftaran dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, yaitu pada saat:
 - a. Pengangkatan pertama kali sebagai Penyelenggara Negara saat mulai menjabat;
 - b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah masa jabatan atau pensiun berakhir;
 - c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara Negara.
2. Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan secara periodik setiap satu tahun sekali, atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari hingga 31 Desember.
3. Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada angka 2 (dua) harus disampaikan paling lambat pada tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
4. Penyampaian LHKPN dapat diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan oleh KPK.
5. Penyampaian LHKPN dilakukan melalui aplikasi *e-LHKPN* yang dapat diakses di www.elhkpn.kpk.go.id.
6. Surat Kuasa untuk mengumumkan LHKPN dari Pejabat Wajib Lapor kepada KPK, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari LHKPN, harus ditandatangani oleh Pejabat Wajib Lapor di atas materai (Rp6.000).

The compliance management mechanism of the State Organiser's Asset Report (LHKPN) is regulated as follows:

1. *State Officials must submit the LHKPN to the KPK through the Directorate of Registration and Examination of State Officials' Asset Reports, namely at the time of:*
 - a. *First appointment as a State Official when he/she takes office;*
 - b. *Reappointment as a State Official after the term of office or retirement ends;*
 - c. *Expiration of term of office or retirement as a State Official.*
2. *The submission of LHKPN during the State Organiser's tenure is carried out periodically once a year, on assets acquired from 1 January to 31 December.*
3. *Submission of LHKPN as referred to in number 2 (two) must be submitted no later than 31 March of the following year.*
4. *LHKPN submission can be submitted directly or through other media determined by KPK.*
5. *LHKPN submission is done through the e-LHKPN application which can be accessed at www.elhkpn.kpk.go.id.*
6. *The Power of Attorney to announce the LHKPN from the Reporting Official to the KPK, which is an integral part of the LHKPN, must be signed by the Reporting Official on a stamp duty (Rp6,000).*

Kerangka pengelolaan kepatuhan LHKPN adalah:

The LHKPN compliance management framework is:



Sanksi Pelaporan LHKPN

Reporting Sanction of LHKPN

Perseroan telah menetapkan sanksi bagi para pelanggar pelaporan LHKPN sesuai dengan tingkat kesalahannya, yakni:

1. Bagi Pejabat Wajib Laporkan yang terlambat menyampaikan LHKPN setelah tanggal 31 Maret setiap tahunnya, Direksi akan memberikan surat teguran atau sanksi internal sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perseroan, berdasarkan rekomendasi Kepala Satuan Pengawasan Intern.
2. Bagi Pejabat Wajib Laporkan yang tidak menyampaikan LHKPN, Direksi akan memberikan surat peringatan pertama atau sanksi internal sesuai dengan ketentuan perseroan, berdasarkan rekomendasi Kepala Satuan Pengawasan Intern.

Dengan adanya ketentuan sanksi ini, perseroan berupaya menjaga kepatuhan terhadap kewajiban LHKPN, serta memastikan bahwa setiap individu di lingkungan perseroan bertindak dengan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan kekayaan mereka.

As a form of justice and discretion, the company has set sanctions for violators of LHKPN reporting according to the level of error, namely:

1. For Mandatory Reporting Officials who are late in submitting the LHKPN after 31 March each year, the Board of Directors will give a letter of reprimand or internal sanctions in accordance with the applicable provisions in the company, based on the recommendation of the Head of Internal Audit.
2. For Reporting Officials who do not submit the LHKPN, the Board of Directors will give the first warning letter or internal sanctions in accordance with the provisions of the company, based on the recommendation of the Head of the Internal Audit Unit.

With this sanction provision, the company seeks to maintain compliance with the LHKPN obligation, as well as ensuring that every individual within the company acts with transparency and accountability in reporting their wealth.

Laporan LHKPN Tahun 2024

LHKPN Report in 2024

Pada tahun 2024, seluruh Pejabat Wajib Laporkan telah secara penuh memenuhi tanggung jawab mereka dengan patuh dalam menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). Mereka memastikan bahwa laporan tersebut disampaikan tepat waktu, dengan informasi yang akurat, terpercaya, dan sesuai dengan keadaan sebenarnya. Hal ini mencerminkan komitmen yang kuat terhadap prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku, yang menjadi landasan dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik terhadap perseroan dan seluruh jajaran manajemennya.

By 2024, all Mandatory Reporting Officials have fully fulfilled their responsibilities by dutifully submitting their State Officials' Asset Reports (LHKPN). They ensured that the reports were submitted on time, with accurate, reliable and truthful information. This reflects a strong commitment to the principles of transparency, accountability, and compliance with applicable regulations, which are the cornerstones in maintaining integrity and public trust in the company and its management.







INDRA KARYA

07

TANGGUNG JAWAB SOSIAL DAN LINGKUNGAN

CORPORATE SOCIAL AND
ENVIRONMENTAL RESPONSIBILITY



Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan

Corporate Social and Environmental Responsibility

PT Indra Karya (Persero) senantiasa menunjukkan komitmen kuat dalam mengimplementasikan program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) secara berkesinambungan. Pelaksanaan program TJSL dirancang selaras dengan empat pilar utama, yakni aspek sosial, ekonomi, lingkungan, serta hukum dan tata kelola. Program dijalankan dengan pendekatan yang terintegrasi dan strategis, serta berorientasi pada hasil yang terukur dan akuntabel, sebagai bagian dari kontribusi aktif terhadap keberlanjutan dan pertumbuhan bisnis yang bertanggung jawab.

Dalam mengembangkan program TJSL, perseroan juga menempatkan peran pemangku kepentingan sebagai elemen kunci. Perseroan secara proaktif membangun komunikasi yang terbuka dan kolaboratif untuk menyerap masukan, memahami harapan, serta merespons kebutuhan dari berbagai pihak terkait. Pendekatan ini menjadi landasan dalam merancang program TJSL yang tidak hanya relevan secara regulasi, tetapi juga memberikan nilai tambah bagi masyarakat dan mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan serta visi bisnis jangka panjang perseroan.

PT Indra Karya (Persero) consistently demonstrates a strong commitment to implementing its Corporate Social Responsibility (CSR) program in a sustainable manner. The CSR program is designed in alignment with four core pillars: social, economic, environmental, and legal and governance aspects. The program is carried out with an integrated and strategic approach, as well as being oriented towards measurable and accountable results, as part of an active contribution to sustainable and responsible business growth.

In developing the TJSL program, the company also places the role of stakeholders as a key element. The Company proactively builds open and collaborative communication to absorb input, understand expectations, and respond to the needs of various related parties. This approach is the foundation for designing TJSL programs that are not only relevant in terms of regulations but also provide added value to the community and support the achievement of sustainable development goals and the company's long-term business vision.

Dasar Hukum Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perusahaan

Legal Basis for the Company's Social and Environmental Responsibility Program

Adapun dalam melaksanakan Program TJSL, Perseroan mengacu kepada beberapa regulasi di antaranya adalah:

1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
2. Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 tentang Keselamatan Kerja;
3. Undang-Undang No. 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
5. Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
6. Undang-Undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
7. Undang-Undang No. 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;
8. Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
9. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
10. Peraturan Pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
11. Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas;
12. Peraturan Menteri BUMN No. PER-08/MBU/12/2019 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Badan Usaha Milik Negara;
13. Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 3 Juli 2015 tentang Program Kemitraan & Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
14. Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 Tentang Perubahan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan & Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;

In implementing the TJSL Program, the Company refers to several regulations, including:

1. Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
2. Law No. 1 of 1979 concerning Occupational Safety;
3. Law No. 23 of 1992 concerning Health;
4. Law No. 8 of 1999 concerning Consumer Protection;
5. Law No. 13 of 2003 concerning Manpower;
6. Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management;
7. Law No. 24 of 2011 concerning Social Security Administration Agency;
8. Law No. 39 of 1999 concerning Human Rights;
9. Government Regulation No. 27 of 2012 concerning Environmental Permits;
10. Government Regulation No. 50 of 2012 concerning the Implementation of the Occupational Safety and Health Management System (SMK3);
11. Government Regulation No. 47 of 2012 on Social and Environmental Responsibility of Limited Liability Companies;
12. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-08/MBU/12/2019 on General Guidelines for the Implementation of Procurement of Goods and Services by State-Owned Enterprises;
13. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 on Partnership Programs and Environmental Development Programs of State-Owned Enterprises;
14. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016, on the Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Programs and Environmental Development Programs of State-Owned Enterprises;

15. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/7/2017 tanggal 5 Juli 2017 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan & Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
16. Peraturan Presiden Nomor 59/2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;
17. Peraturan Menteri BUMN No. PER-02/MBU/04/2020 tanggal 2 April 2020 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Menteri Badan usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
18. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara;
19. Keputusan Direksi No. 028/KPTS/IK/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pembentukan Komite TJSL Berkelanjutan (Komite TJSL) PT Indra Karya (Persero).

15. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/7/2017 dated July 5, 2017, on the Second Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Programs and Environmental Development Programs of State-Owned Enterprises;
16. Presidential Regulation No. 59/2017 on the Implementation of the Achievement of Sustainable Development Goals;
17. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-02/MBU/04/2020 dated April 2, 2020, on the Third Amendment to Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Programs and Environmental Development Programs of State-Owned Enterprises;
18. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-1/MBU/03/2023 on Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises;
19. Board of Directors Decision No. 028/KPTS/IK/IX/2022 dated September 15, 2022, regarding the Establishment of the Sustainable Social and Environmental Responsibility Committee (TJSL Committee) of PT Indra Karya (Persero).

Metode *Due Diligence* Terhadap Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial Dari Aktivitas Perusahaan

Due Diligence Method For The Economic, Environmental, and Social Impact of Company Activities

Sebelum merumuskan program-program TJSL dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Perseroan juga telah melakukan berbagai penelaahan terhadap dampak ekonomi, lingkungan, dan sosial yang ditimbulkan dari aktivitas bisnis perseroan secara komprehensif. Adapun metode dan lingkup *due diligence* dari kegiatan TJSL Perseroan meliputi:

Before formulating TJSL programs aimed at providing added value to stakeholders, the Company has also conducted various studies on the economic, environmental, and social impacts of the company's business activities in a comprehensive manner. The methods and scope of *due diligence* for the Company's TJSL activities include:

Metode dan Lingkup *Due Diligence* *Method and Scope of Due Diligence*

Metode Method	Lingkup Scope
Survei Kepuasan dan keterikatan Karyawan <i>Employee Satisfaction and Engagement Survey</i>	Mitigasi dampak sosial terhadap karyawan <i>Mitigation of social impacts on employees</i>
Survei Kepuasan Pelanggan, Layanan <i>Call Center</i> , email, Penanganan Keluhan Pelanggan <i>Customer Satisfaction Survey, Call Center Services, Email, Customer Complaint Handling</i>	Mitigasi dampak sosial terhadap pelanggan/konsumen <i>Mitigation of social impacts on customers/consumers</i>

Identifikasi Dampak Operasi bagi Pemangku Kepentingan

Identification of Operation for Stakeholders

Perseroan mengidentifikasi dan memetakan pemangku kepentingan terdampak ataupun berpengaruh signifikan, dengan pemaparan potensi dampak aktivitas operasional terhadap pemangku kepentingan sebagai berikut:

The company identifies and maps stakeholders who are affected or significantly influenced, with an explanation of the potential impact of operational activities on stakeholders as follows:

Pemangku Kepentingan Penting yang Terdampak atau Berpengaruh pada Dampak dari Kegiatan Perusahaan

Key Stakeholders Affected by/or Influencing the Impact of the Company's Activities

Pemangku Kepentingan Stakeholders	Dasar Identifikasi Basis of Identification	Potensi Dampak Potential Impact
Pemegang Saham/ Investor <i>Shareholders/Investor</i>	Pemangku Kepentingan yang berperan dalam mengendalikan perseroan <i>Stakeholders who play a role in controlling the company</i>	- Kinerja keuangan maupun non keuangan. - Strategi pengembangan usaha. - Transparansi tata Kelola dan manajemen perseroan. - Pembagian Dividen perseroan. <i>Financial and non-financial performance.</i> <i>Business development strategy.</i> <i>Transparency in corporate governance and management.</i> <i>Distribution of dividends.</i>
Karyawan/Pegawai <i>Employees</i>	Aset utama perusahaan yang mampu menggerakkan roda bisnis perseroan <i>The company's main assets that drive the company's business</i>	- Program peningkatan kompetensi dan pengembangan karier yang setara. - Jaminan keselamatan dan Kesehatan karyawan di lingkungan kerja. - Kesetaraan ras, suku, dan gender. <i>Equal competency improvement and career development programs.</i> <i>Guaranteed safety and health of employees in the workplace.</i> <i>Racial, ethnic, and gender equality.</i>
Regulator/Pemerintah <i>Regulator/Government</i>	Pengawas kepatuhan perseroan terhadap peraturan yang berlaku <i>Supervisors of the company's compliance with applicable regulations</i>	- Kepatuhan terhadap seluruh regulasi yang berlaku. - Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik. <i>Compliance with all applicable regulations.</i> <i>Implementation of Good Corporate Governance.</i>
Rekanan/Mitra Kerja <i>Business Partners</i>	Mitra Penggerak rantai pasokan perseroan <i>Partners in the company's supply chain</i>	- Proses pengadaan yang obyektif. - Kerjasama saling menguntungkan, transparan, dan adil. <i>Objective procurement process.</i> <i>Mutually beneficial, transparent, and fair cooperation.</i>
Masyarakat/Komunitas <i>Community</i>	Mitra perseroan dalam menciptakan inisiatif sosial dan pengembangan masyarakat komunitas <i>The company's partners in creating social initiatives and community development</i>	- Optimalisasi program TJSL. - Keterlibatan masyarakat dalam program TJSL. <i>Optimization of TJSL programs.</i> <i>Community involvement in TJSL programs.</i>
Pelanggan/Konsumen <i>Customer/Consumer</i>	Pengguna produk/jasa perseroan yang dapat mendorong peningkatan kinerja keuangan perseroan <i>Users of the company's products/ services who can encourage an improvement in the company's financial performance</i>	- Informasi produk dan layanan perseroan yang jelas dan transparan. - Jaminan keselamatan dan keamanan produk dan layanan bagi pelanggan/ konsumen. - Adanya customer engagement. - Kepuasan terhadap produk dan pelayanan yang berakibat pada pemesanan ulang/repeat order menjadi Nilai Kontrak Baru (NKB). <i>Clear and transparent information on the company's products and services.</i> <i>Guaranteed safety and security of products and services for customers/consumers.</i> <i>Customer engagement.</i> <i>Satisfaction with products and services resulting in repeat orders becoming New Contract Value (NCV).</i>
Kreditur <i>Creditor</i>	Pemangku Kepentingan yang mendukung finansial perseroan <i>Financial stakeholders of the company</i>	Pembayaran kredit. <i>Credit payments.</i>
Media <i>Media</i>	Lembaga independen yang menyalurkan informasi terkait Perusahaan kepada publik <i>Independent institutions that disseminate information about the company to the public</i>	Keterbukaan informasi terkait kinerja perseroan secara akurat dan terkini. <i>Accurate and up-to-date disclosure of information related to the company's performance.</i>

Pihak Pengelola Program TJSL

TJSL Program Management

Perseroan memperkuat implementasi program TJSL melalui keberadaan Komite TJSL dan Unit TJSL, yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 028/KPTS/IK/IX/2022 tanggal 15 September 2022 tentang Pembentukan Komite TJSL Berkelanjutan. Sesuai ketentuan tersebut, Komite TJSL dibentuk dengan fungsi sebagai berikut:

1. Menentukan arah dan kebijakan CSR berbasis ISO 26000 di lingkungan PT Indra Karya (Persero) sesuai dengan Visi, Misi, dan Tujuan perusahaan;
2. Melakukan pengawasan, pemantauan, dan evaluasi terhadap keberhasilan program-program CSR berbasis ISO 26000 untuk mendukung Keberlanjutan perusahaan;
3. Menetapkan rencana kerja CSR berbasis ISO 26000 sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP);
4. Mengkoordinasikan fungsi Direktorat, Divisi, dan Bidang yang terkait dalam implementasi CSR berbasis ISO 26000;
5. Mensosialisasikan dan mempublikasikan program-program CSR berbasis ISO 26000 yang dilaksanakan perusahaan kepada Internal dan Eksternal perusahaan;
6. Merencanakan program kerja dan anggaran program sesuai dengan Sub-Direktorat, Satuan, Divisi, Sekretariat Perusahaan, dan bidang masing-masing dan melaporkan kepada Ketua di Bidang masing-masing, sesuai dengan panduan berbasis ISO 26000;
7. Mengimplementasikan program kerja sesuai dengan Sub-Direktorat, Satuan, Divisi, Sekretariat Perusahaan, dan bidang masing-masing; dan
8. Melakukan *monitoring* dan evaluasi atas pelaksanaan program yang dilaksanakan oleh Unit TJSL untuk keberhasilan program dan perbaikan/improvement.

The company strengthens the implementation of the TJSL program through the establishment of a TJSL Committee and a TJSL Unit, which were established based on the Board of Directors' Decision No. 028/KPTS/IK/IX/2022 dated September 15, 2022, regarding the Formation of a Sustainable TJSL Committee. In accordance with the aforementioned provisions, the TJSL Committee is established with the following functions:

1. *Determining the direction and policies of CSR based on ISO 26000 within PT Indra Karya (Persero) in accordance with the company's Vision, Mission, and Objectives;*
2. *Conducting supervision, monitoring, and evaluation of the success of CSR programs based on ISO 26000 to support the Company's sustainability;*
3. *Establishing ISO 26000-based CSR work plans in accordance with the Company's Work Plan and Budget (RKAP) and Long-Term Plan (RJPP);*
4. *Coordinating the functions of the Directorates, Divisions, and Departments involved in the implementation of ISO 26000-based CSR;*
5. *Socialize and publish ISO 26000-based CSR programs implemented by the Company to internal and external parties;*
6. *Plan work programs and budgets in accordance with the Sub-Directorate, Unit, Division, Company Secretariat, and respective fields, and report to the Head of the respective field in accordance with ISO 26000-based guidelines;*
7. *Implement work programs in accordance with the Sub-Directorate, Unit, Division, Company Secretariat, and respective fields; and*
8. *Conduct monitoring and evaluation of the implementation of programs carried out by the TJSL Unit for program success and improvement.*

Struktur Organisasi Komite TJSL dan Unit TJSL

Organizational Structure of the TJSL Committee and TJSL Unit

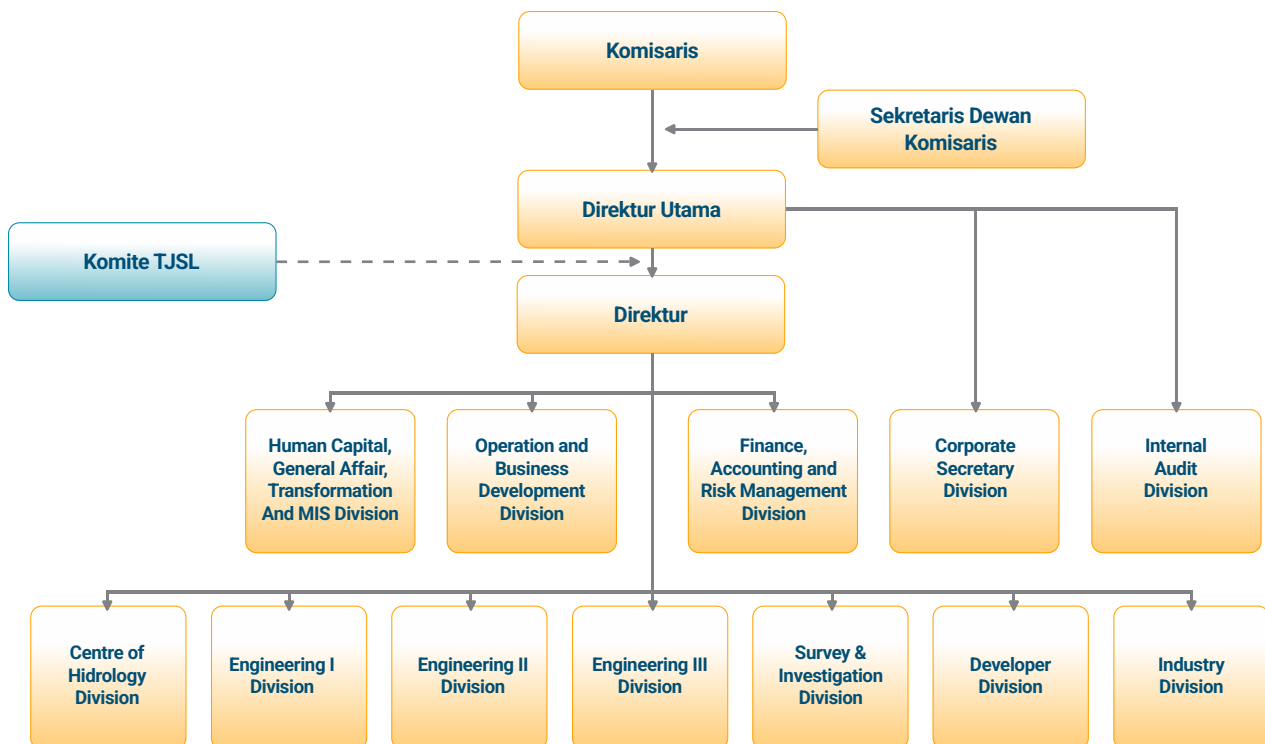
Struktur Komite TJSL di PT Indra Karya (Persero) dipimpin oleh seorang Direktur sebagai Ketua Komite, dengan Direktur Utama yang bertindak sebagai pembina sekaligus penasihat strategis. Sementara itu, fungsi operasional TJSL dijalankan oleh Unit TJSL yang berada di bawah koordinasi Divisi Corporate Secretary. Pelaksanaan kegiatan di unit ini dipimpin oleh pejabat setingkat manajer atau pejabat yang berada dua tingkat di bawah Direksi.

The TJSL Committee structure at PT Indra Karya (Persero) is led by a Director as Committee Chair, with the President Director acting as mentor and strategic advisor. Meanwhile, TJSL operational functions are carried out by the TJSL Unit under the coordination of the Corporate Secretary Division. Activities in this unit are led by managers or officials two levels below the Board of Directors.

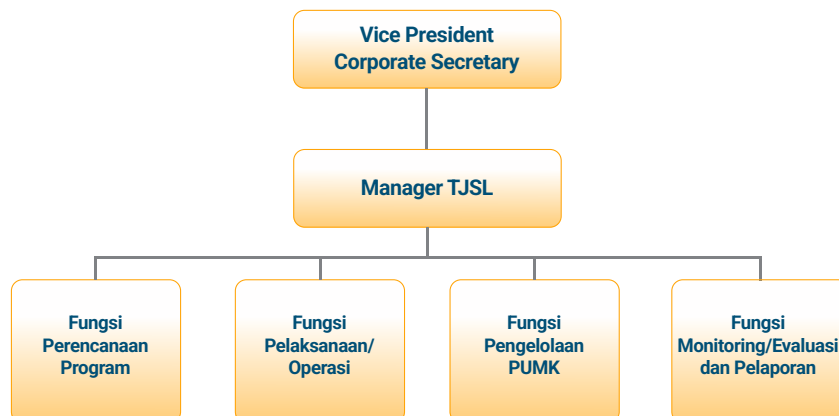
Unit TJSL memainkan peran sentral dalam pelaksanaan teknis serta mendukung efektivitas fungsi Komite TJSL dalam merumuskan dan menjalankan program tanggung jawab sosial dan lingkungan Perseroan. Struktur organisasi Komite TJSL dan Unit TJSL tersebut ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 028/KPTS/IK/IX/2022, dengan bagan berikut:

The TJSL Unit plays a central role in the technical implementation and supports the effectiveness of the TJSL Committee in formulating and executing the Company's social and environmental responsibility programs. The organizational structure of the TJSL Committee and the TJSL Unit is established pursuant to Board of Directors' Decision No. 028/KPTS/IK/IX/2022, with the following organizational chart:

Struktur Organisasi Komite TJSL dan Unit TJSL Organizational Structure of the TJSL Committee and TJSL Unit



Struktur Organisasi TJSL Organizational Structure TJSL



Realisasi Dana TJSL

Realization of TJSL Funds

Pada tahun 2024, Perseroan telah melaksanakan berbagai inisiatif Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) sebagai bagian dari komitmen untuk memberikan kontribusi nyata dan menciptakan nilai tambah bagi para pemangku kepentingan. Pelaksanaan program TJSL tersebut terbagi dalam dua kategori utama, yakni *Community Involvement and Development (CID)* dengan total penyaluran sebesar Rp350.000.000,- dan kategori non-CID yang terealisasi sebesar Rp1.854.925.407,-.

Rincian pelaksanaan dan alokasi dana untuk program TJSL kategori CID pada tahun berjalan disajikan pada tabel berikut ini:

In 2024, the Company implemented various Social and Environmental Responsibility (SER) initiatives as part of its commitment to make a real contribution and create added value for its stakeholders. The implementation of the CSR program was divided into two main categories, namely *Community Involvement and Development (CID)* with a total distribution of Rp350,000,000 and non-CID category which was realized at Rp1,854,925,407.

Details of the implementation and allocation of funds for the CID category CSR program in the current year are presented in the following table:

No No	Nama Program Program Name	TPB SDGs	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)
Program Prioritas Pilar Sosial <i>Social Pillar Priority Program</i>				
1.	Program Kolaborasi Sekolah Hijau <i>Green School Collaboration Program</i>		35.000.000	35.000.000
2.	Program Lestarian Pendidikan Budaya (LIDA BUAYA) <i>Preserve Cultural Education Program (LIDA BUAYA)</i>		20.000.000	20.000.000
3.	Program Bantuan Bencana Alam <i>Natural Disaster Relief Program</i>		10.000.000	10.000.000
4.	Program Bantuan Yatim Piatu <i>Orphan Assistance Program</i>		20.000.000	20.000.000
Program Prioritas Pilar Lingkungan <i>Environmental Pillar Priority Program</i>				
1.	Program Kolaborasi Bank Sampah <i>Waste Bank Collaboration Program</i>		35.000.000	35.000.000
2.	Kawasan Rindang Nusantara (KARINA) <i>Nusantara Reforestation Area (KARINA)</i>		40.000.000	40.000.000
Program Prioritas Pilar Ekonomi <i>Economic Pillar Priority Program</i>				
1.	Program Vokasi & Setifikasi UMK Mandiri Sejahtera (UMK MANSTRA) <i>Vocational & Certification Program for Independent Prosperous MSMEs (UMK MANSTRA)</i>		22.500.000	22.500.000
2.	Program Kolaborasi UMK Berdaya <i>Empowered MSMEs Collaboration Program</i>		17.500.000	17.500.000
3.	Program Desa Wisata <i>Tourism Village Program</i>		20.000.000	20.000.000
Program Creating Share Value (CSV) <i>Creating Share Value (CSV) Program</i>				
1.	Mitra agen AMDK Merah Putih <i>Red and White AMDK Agent Partner Program</i>		50.000.000	50.000.000
2.	Program Desa Mandiri Air Bersih dan Sanitasi Layak <i>Clean Water and Proper Sanitation Independent Village Program</i>		80.000.000	80.000.000
Jumlah Total			350.000.000	350.000.000

Berikut adalah rincian realisasi dan alokasi dana untuk program TJSL kategori Non CID:

The following is a breakdown of the realization and allocation of funds for the TJSL program in the Non-CID category:

No. No.	Nama Program Program Name	TPB SDGs	Anggaran Budget (Rp)	Realisasi Realization (Rp)
Program Pilar Sosial <i>Social Pillar Program</i>				
1.	Sertifikat dan Pelatihan Tenaga Ahli <i>Certification and Training for Experts</i>		200.000.000	190.203.510
2.	Pelatihan Tenaga Ahli dan Karyawan <i>Training for Experts and Employees</i>		538.000.000	175.672.027
3.	Program Sosial Kemasyarakatan <i>Community Social Program</i>		100.000.000	242.481.988
4.	Program Magang <i>Internship Program</i>		166.000.000	222.025.000
5.	Mendukung Masyarakat Mandiri dan Sejahtera <i>Supporting Independent and Prosperous Communities</i>		20.000.000	-
6.	Mudik Bersama <i>Eid Homecoming Program</i>		100.000.000	169.586.975
Program Pilar Lingkungan <i>Environmental Pillar Program</i>				
1.	Mendorong Lingkungan Bersih dan Sehat Berkelanjutan <i>Promoting a Clean, Healthy, and Sustainable Environment</i>		50.000.000	169.586.975
Program Pilar Hukum dan Tata Kelola <i>Legal and Governance Pillar Program</i>				
1.	Program Kerja Tata Kelola yang Baik <i>Good Governance Work Program</i>		100.000.000	748.027.373
2.	Assessment ISO <i>ISO Assessment</i>		93.540.000	71.551.804
Jumlah <i>Total</i>			1.367.540.000	1.854.925.407

Pelaksanaan Program TJSL

TJSL Program Implementation

Foto Photo	Tanggal Pelaksanaan Program Date of Program Implementation	Keterangan Pelaksanaan Program Program Implementation Description
	21 Maret 2024 March 21, 2024	Program Bantuan Bencana Alam Banjir di Demak, Jawa Tengah <i>Disaster Relief Program for Floods in Demak, Central Java</i>

Foto Photo	Tanggal Pelaksanaan Program Date of Program Implementation	Keterangan Pelaksanaan Program Program Implementation Description
	30 April 2024 April 30, 2024	Program Bantuan Tongkat Trekking pada Paguyuban Local Guide Sentul Assistance Program for Trekking Poles for the Sentul Local Guide Association
	18 Juni 2024 June 18, 2024	Program Qurban Bersama Holding BUMN Danareksa Qurban Program in Collaboration with Danareksa State-Owned Enterprises Holding
	26 Juli 2024 July 26, 2024	Program Bantuan Pengadaan Alat Snorkeling di Pulau Harapan Assistance Program for Snorkeling Equipment Procurement in Harapan Island
	2 April 2024 April 2, 2024	Program Ramadhan Holding BUMN Danareksa - Yayasan Alunjiva Ramadan Program by Danareksa State-Owned Enterprises Holding – Alunjiva Foundation
	22 Agustus 2024 August 22, 2024	Program Pengadaan Sentra Durian dan Kelapa Hibrida Bumi Katineung (Kolaborasi Eko Wisata Durian Nusantara) Procurement Program for Durian and Hybrid Coconut Centers in Bumi Katineung (in Collaboration with Durian Nusantara Eco-Tourism)
	5 April 2024 April 5, 2024	Program Mudik Asik Bersama BUMN Tahun 2024 "Mudik Asik" Eid Homecoming Program with SOEs 2024

Foto Photo	Tanggal Pelaksanaan Program Date of Program Implementation	Keterangan Pelaksanaan Program Program Implementation Description
	11 Desember 2024 December 11, 2024	Program Pengadaan Sanitasi Air Bersih di Kupang, NTT Clean Water Sanitation Procurement Program in Kupang, East Nusa Tenggara (NTT)
	25 Oktober 2024 October 25, 2024	Program Bantuan Pengadaan Packaging pada UMKM Bakulan Mamake Assistance Program for Packaging Procurement for Bakulan Mamake MSME
	6 Desember 2024 December 6, 2024	Program Bantuan Pengadaan Packaging pada UMKM Pandanaran Assistance Program for Packaging Procurement for Pandanaran MSME

Informasi Lebih Lanjut

Further Information

Uraian lengkap terkait kinerja keberlanjutan perseroan sepanjang tahun 2024, termasuk implementasi program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, disajikan secara khusus dalam dokumen Laporan Keberlanjutan yang terbit secara terpisah dari Laporan Tahunan ini.

Laporan Keberlanjutan PT Indra Karya (Persero) Tahun 2024 dapat diunduh dan diakses melalui situs resmi perseroan di agrinaspalma.id.

A comprehensive description of the company's sustainability performance throughout 2024, including the implementation of Social and Environmental Responsibility programs, is presented specifically in the Sustainability Report, which is published separately from this Annual Report.

The 2024 Sustainability Report of PT Indra Karya (Persero) can be downloaded and accessed via the Company's official website at agrinaspalma.id.



Surat Pernyataan Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara (d/h PT Indra Karya (Persero)) Tahun Buku 2024

Statement of the Board of Commissioners on the Responsibility for the 2024 Annual Report of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara (formerly PT Indra Karya (Persero))

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara (d/h PT Indra Karya (Persero)) tahun 2024 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

We, the undersigned, testify that all information in the 2024 Annual Report of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara (formerly PT Indra Karya (Persero)) is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents of the Annual Report and Financial Report of the Company.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Mei 2025
Jakarta, May 2025

Dewan Komisaris
Board of Commissioners



Letjen TNI Purn. R. Wisnoe Prasetya Boedi

Komisaris Utama
President Commissioner

Surat Pernyataan Direksi tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara (d/h PT Indra Karya (Persero)) Tahun Buku 2024

Statement of the Board of Directors on the Responsibility for the 2024 Annual Report of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara (formerly PT Indra Karya (Persero))

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara (d/h PT Indra Karya (Persero)) telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perusahaan.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

We, the undersigned, testify that all information in the 2024 Annual Report of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara (formerly PT Indra Karya (Persero)) is presented in its entirety and we are fully responsible for the correctness of the contents of the Annual Report and Financial Report of the Company.

This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, Mei 2025
Jakarta, May 2025

Direksi
Board of Directors



Letjen TNI Purn. Agus Sutomo

Direktur Utama
President Director





INDRA KARYA

INDRA KARYA

LAPORAN KEUANGAN

FINANCIAL REPORT



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h/ *formerly* PT INDRA KARYA (PERSERO))

Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023

Financial Statements
for the Years Ended
December 31, 2024 and 2023

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))**

Daftar Isi

**Halaman/
Page**

Table of Contents

Surat Pernyataan Direksi

Directors' Statement Letter

Laporan Auditor Independen

Independent Auditor's Report

**Laporan Keuangan
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023**

***Financial Statements
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023***

Laporan Posisi Keuangan

1

Statements of Financial Position

Laporan Laba Rugi dan
Penghasilan Komprehensif Lain

3

*Statements of Profit or Loss and
Other Comprehensive Income*

Laporan Perubahan Ekuitas

4

Statements of Changes in Equity

Laporan Arus Kas

5

Statements of Cash Flows

Catatan Atas Laporan Keuangan

6

Notes to the Financial Statements



AGRINAS PALMA NUSANTARA

**SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN
31 DESEMBER 2024
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(D/H. PT INDRA KARYA (PERSERO))/
DIRECTOR'S STATEMENT LETTER
RELATING TO THE RESPONSIBILITY ON THE FINANCIAL STATEMENTS
DECEMBER 31, 2024
PERUSAHAAN PERSERO (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(FORMERLY PT INDRA KARYA (PERSERO))**

Kami yang bertanda tangan dibawah ini/ *We, the undersigned* :

1. Nama/Name	: Letjen TNI Purn. Agus Sutomo
Alamat Kantor/Office Address	: Gedung HK Tower Lt. 9 Jl. Biru Laut X No.10, RT.12/RW.11, Cipinang Cempedak, Kecamatan Jatinegara Kota Jakarta Timur, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 13340
Alamat Domisili sesuai KTP/ Domicile as stated in ID Card	: Jl. Latuharhari No. 14 RT/RW 012/004 Kel. Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat
Nomor Telepon/ Telephone Number	: 0811-257-020
Jabatan/Title	: Direktur Utama/ President Director

Menyatakan bahwa/state that:

- | | |
|---|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan; | 1. <i>We are responsible for the preparation and presentation of the financial statements;</i> |
| 2. Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia; | 2. <i>The financial statements have been prepared and presented in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards;</i> |
| 3. Semua informasi dalam laporan keuangan telah dimuat secara lengkap dan benar; | 3. <i>All information has been fully and correctly disclosed in the financial statements;</i> |
| 4. Laporan keuangan tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | 4. <i>The financial statements do not contain materially misleading information or facts, and do not conceal any information or facts;</i> |
| 5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam Perseroan. | 5. <i>We are responsible for the Company's internal control system.</i> |

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement letter is made truthfully.

Jakarta, 24 Maret 2025/ *March 24, 2025*

Direktur Utama / *President Director*



Letjen TNI Purn. Agus Sutomo

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan

Registered Public Accountants

Nomor/Number : 00356/2.1030/AU.1/03/1169-3/1/III/2025

RSM Indonesia
Plaza ASIA, Level 10
Jl. Jend. Sudirman Kav. 59
Jakarta 12190 Indonesia

T +62 21 5140 1340
F +62 21 5140 1350

www.rsm.id

Laporan Auditor Independen/ Independent Auditor's Report

Pemegang Saham, Dewan Komisaris dan Direksi/
The Shareholders, Board of Commissioners, and Directors

Perusahaan Perseroan (Persero)
PT Agrinas Palma Nusantara
(d/h/ formerly PT Indra Karya (Persero))

Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara (d/h PT Indra Karya (Persero)), yang terdiri dari laporan posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, serta catatan atas laporan keuangan, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan tanggal 31 Desember 2024, serta kinerja keuangan dan arus kasnya untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2024, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Basis Opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan pada laporan kami. Kami independen terhadap Perusahaan berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

Opinion

We have audited the financial statements of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara (formerly PT Indra Karya (Persero)), which comprise the statement of financial position as of December 31, 2024 and the statements of profit or loss and other comprehensive income, changes in equity, and cash flows for the year ended December 31, 2024, and notes to the financial statements, including a material accounting policies information.

In our opinion, the accompanying financial statements present fairly, in all material respects, the financial position of the as of December 31, 2024, and its financial performance and cash flows for year ended December 31, 2024, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Basis for Opinion

We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants. Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Company in accordance with the ethical requirements that are relevant to our audit of the financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with these requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.

THE POWER OF BEING UNDERSTOOD
ASSURANCE | TAX | CONSULTING

i

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan, Registered Public Accountants is a member of the RSM network and trades as RSM. RSM is the trading name used by the members of the RSM network. Each member of the RSM network is an independent accounting and consulting firm which practices in its own right. The RSM network is not itself a separate legal entity in any jurisdiction.

Licence: KMK No.477/KM.1/2015
Registered at the Indonesia Financial Services Authority (OJK)



Informasi Lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain yang diperoleh pada tanggal laporan auditor ini adalah informasi yang tercantum dalam laporan tahunan tahun 2024, tetapi tidak termasuk laporan keuangan dan laporan auditor kami di dalamnya. Laporan tahunan tahun 2024 diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor ini.

Opini kami atas laporan keuangan tidak mencakup informasi lain, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas informasi lain tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan, tanggung jawab kami adalah untuk membaca informasi lain dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah informasi lain mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca laporan tahunan tahun 2024, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan tepat yang akan dilakukan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia.

Tanggung Jawab Manajemen dan Pihak yang Bertanggung Jawab atas Tata Kelola terhadap Laporan Keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan ini sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

Dalam penyusunan laporan keuangan, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Perusahaan dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Perusahaan atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

Other Information

Management is responsible for the other information. The other information obtained at the date of this auditor's report is information included in the 2024 annual report, but does not include our financial statements and auditor's report in it. The 2024 annual report are expected to be made available to us after the date of this auditor's report.

Our opinion on the financial statements does not cover the other information and we will not express any form of assurance conclusion thereon.

In connection with our audit of the financial statements, our responsibility is to read the other information and, in doing so, consider whether the other information is materially inconsistent with the financial statements, or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.

When we read the 2024 annual report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants.

Responsibilities of Management and Those Charged with Governance for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of these financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.

In preparing the financial statements, management is responsible for assessing the Company ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern and using the going concern basis of accounting unless management either intends to liquidate the Company or to cease operations, or has no realistic alternative but to do so.



Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Perusahaan.

Those charged with governance are responsible for overseeing the Company financial reporting process.

Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun secara agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan mempengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan tersebut.

Auditor's Responsibilities for the Audit of the Financial Statements

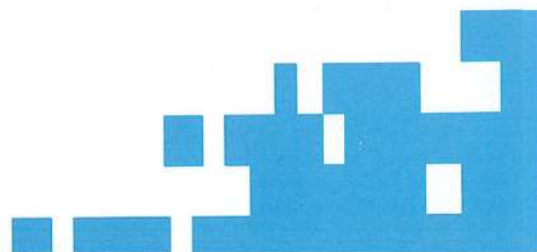
Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the financial statements as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these financial statements.

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing, we exercise professional judgement and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian pengendalian internal.
- Memperoleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifan pengendalian internal Perusahaan.
- Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.

- *Identify and assess the risks of material misstatement of the financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to those risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or the override of internal control.*
- *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Company internal control.*
- *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan material atas kemampuan Perusahaan untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, harus menentukan apakah perlu untuk memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Perusahaan tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.
- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast material doubt on the Company ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our auditor's report to the related disclosures in the financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusions are based on the audit evidence obtained up to the date of our auditor's report. However, future events or conditions may cause the Company to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure and content of the financial statements, including the disclosures, and whether the financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit, serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

Amir Abadi Jusuf, Aryanto, Mawar & Rekan



Jul Edy Siahaan

Nomor Izin Akuntan Publik: AP.1169/
Public Accountant License Number: AP. 1169

Jakarta, 24 Maret/March 24, 2025



PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 Rp	
ASET				ASSETS
ASET LANCAR				CURRENT ASSETS
Kas dan Bank	4	47,485,087,764	42,763,914,181	Cash on Hand and in Banks
Piutang Usaha	5	28,969,906,467	23,631,404,813	Account Receivables
Piutang Lain-lain	6	20,380,876,786	32,790,966,695	Other Receivables
Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa	7	88,904,564,588	74,887,596,242	Gross Amount Due from Customers
Persediaan		719,132,080	1,813,758,477	Inventories
Uang Muka dan Jaminan	8	3,307,332,617	695,097,661	Advances and Guarantee
Biaya Dibayar di Muka	9	338,822,947	284,934,734	Prepaid Expenses
Pajak Dibayar di Muka	10.a	3,544,415	3,034,095	Prepaid Taxes
Penugasan Jasa Konsultan dalam Pelaksanaan	11	347,733,560	1,755,466,656	Assignment of Consulting Services in Execution
Jumlah Aset Lancar		190,457,001,224	178,626,173,554	Total Current Assets
ASET TIDAK LANCAR				NON-CURRENT ASSETS
Investasi pada Ventura Bersama	12	1,570,203,113	4,987,294,567	Investments in Joint Ventures
Aset Tetap	13	137,747,261,642	139,311,891,479	Fixed Assets
Aset Hak Guna	14	29,777,666,281	31,509,059,871	Right of Use Assets
Aset Takberwujud		1,563,199,391	1,884,215,977	Intangible Asset
Jumlah Aset Tidak Lancar		170,658,330,427	177,692,461,894	Total Non-Current Assets
JUMLAH ASET		361,115,331,651	356,318,635,448	TOTAL ASSETS

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
LAPORAN POSISI KEUANGAN
31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 Rp	
LIABILITAS DAN EKUITAS				LIABILITIES AND EQUITY
LIABILITAS JANGKA PENDEK				CURRENT LIABILITIES
Utang Bank	15	4,248,557,534	4,998,557,534	Bank Loan
Utang Usaha	16	16,083,852,708	16,921,786,207	Account Payables
Utang Pajak	10.b	4,523,592,704	4,191,156,099	Taxes Payables
Uang Muka dari Pelanggan				Current Maturities of
yang Jatuh Tempo dalam Setahun	17	18,097,429,898	19,733,879,514	Advance From Customers
Biaya yang Masih Harus Dibayar	18	43,249,585,321	40,508,091,653	Accrued Expenses
Liabilitas Sewa Jangka Panjang				Current Maturities of
yang Jatuh Tempo dalam Setahun	20	628,338,418	1,509,239,646	Long-Term Lease Liabilities
Liabilitas Lainnya	19	24,756,265,236	26,837,979,078	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		111,587,621,819	114,700,689,731	Total Current Liabilities
LIABILITAS JANGKA PANJANG				NON-CURRENT LIABILITIES
Uang Muka dari Pelanggan	17	2,827,594,584	5,765,561,630	Advance From Customers
Liabilitas Sewa	20	32,556,813,480	37,769,464,404	Lease Liabilities
Liabilitas Imbalan Kerja	21	12,923,897,404	13,846,802,724	Employee Benefit Liabilities
Liabilitas Pajak Tangguhan	10.d	1,159,582,525	1,159,582,525	Deferred Tax Liabilities
Liabilitas Lainnya	19	9,975,381,317	7,114,070,546	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang		59,443,269,310	65,655,481,829	Total Non-Current Liabilities
JUMLAH LIABILITAS		171,030,891,129	180,356,171,560	TOTAL LIABILITIES
EKUITAS				EQUITY
Modal Saham				Capital Stock
Nilai Nominal Rp 1.000.000 per Saham				Par Value of Rp 1,000,000 per Share
Modal Dasar - 40.004 per 31 Desember				Authorized - 40,004 as of December 31,
2024 dan 2023				2024 and 2023
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh -				Capital Issued and Paid-up
10.001 per 31 Desember				10,001 as of December 31,
2024 dan 2023	22	10,001,000,000	10,001,000,000	2024 and 2023
Saldo Laba	23	72,768,049,052	59,993,959,155	Retained Earnings
Penghasilan Komprehensif Lain	24	107,315,391,470	105,967,504,733	Other Comprehensive Income
Jumlah Ekuitas		190,084,440,522	175,962,463,888	Total Equity
JUMLAH LIABILITAS DAN EKUITAS		361,115,331,651	356,318,635,448	TOTAL LIABILITIES AND EQUITY

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN
KOMPREHENSIF LAIN
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
STATEMENTS OF PROFIT OR LOSS AND OTHER
COMPREHENSIVE INCOME
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/ Notes	2024 Rp	2023 Rp	
Pendapatan Usaha	25	240,531,703,297	210,386,060,799	Revenues
Beban Pokok Pendapatan	26	(169,816,936,668)	(148,964,227,705)	Cost of Revenues
Laba Bruto		70,714,766,629	61,421,833,094	Gross Profit
Bagian Laba dari Ventura Bersama	12, 27	1,060,194,998	1,686,191,185	Share of Profit from Joint Ventures
Laba Bruto Setelah Pendapatan Bersih dari Ventura Bersama		71,774,961,627	63,108,024,279	Gross Profit After Net Revenue from Joint Ventures
Beban Usaha	28	(52,648,696,722)	(49,319,910,791)	Operating Expenses
Laba Usaha Sebelum Pajak Final		19,126,264,905	13,788,113,488	Operating Income Before Final Tax
Beban Pajak Final	10.c	(5,985,221,858)	(5,012,945,450)	Final Tax Expenses
Laba Usaha Setelah Pajak Final		13,141,043,047	8,775,168,038	Operating Income After Final Tax Expenses
Beban Keuangan		(1,741,094,350)	(1,134,851,074)	Finance Cost
Pendapatan Bunga		364,590,207	246,999,725	Interest Income
Laba Kurs Mata Uang Asing - Bersih		549,093,262	(68,359,373)	Gain on Foreign Exchange - Net
Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih	29	460,457,731	5,451,797,281	Other Income (Expense) - Net
Laba Sebelum Pajak		12,774,089,897	13,270,754,597	Income Before Tax
Beban Pajak Penghasilan		--	--	Income Tax Expenses
Laba Tahun Berjalan		12,774,089,897	13,270,754,597	Income for the Year
Pendapatan Komprehensif Lain Tahun Berjalan				Other Comprehensive Income for the Year
Pos-pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				Items That Will Not Be Reclassified to Profit and Loss:
Surplus Revaluasi Aset Tetap	13	--	1,436,555,000	Revaluation Surplus of Fixed Asset
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti		1,347,886,737	81,417,458	Remeasurement on Defined Benefit Plan
Pajak Penghasilan Terkait Pos yang Tidak Akan Direklasifikasi ke Laba Rugi		--	(35,913,875)	Income tax Relating to Item that Will not be Reclassified to Profit or Loss
Jumlah Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan		1,347,886,737	1,482,058,583	Total Other Comprehensive Income for the Year
Jumlah Pendapatan Komprehensif Tahun Berjalan		14,121,976,634	14,752,813,180	Total Comprehensive Income for the Year

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these financial statements

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Capital Issued and Paid-up	Penghasilan Komprehensif Lain/ Others Comprehensive Income								
	Saldo Laba/ Retained Earnings			Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti/ Remeasurement on Defined Benefit Plan	Surplus Revaluasi Aset Tetap/ Property, Plant and Equipment Revaluation Surplus	Jumlah/ Total	Jumlah Ekuitas/ Total Equity		
	Ditentukan Penggunaan/and Appropriated	Tidak Ditentukan Unappropriated	Jumlah / Total						
Saldo per 1 Januari 2023	10,001,000,000	2,402,511,093	44,320,693,465	46,723,204,558	(9,353,915,200)	113,839,361,350	104,485,446,150	161,209,650,708	Balance as of January 1, 2023
Laba Tahun Berjalan	--	--	13,270,754,597	13,270,754,597	--	--	--	13,270,754,597	Income for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	--	--	81,417,458	1,400,641,125	1,482,058,583	1,482,058,583	Other Comprehensive Income for the Year
Saldo per 31 Desember 2023	10,001,000,000	2,402,511,093	57,591,448,062	59,993,959,155	(9,272,497,742)	115,240,002,475	105,967,504,733	175,962,463,888	Balance as of December 31, 2023
Laba Tahun Berjalan	--	--	12,774,089,897	12,774,089,897	--	--	--	12,774,089,897	Income for the Year
Penghasilan Komprehensif Lain Tahun Berjalan	--	--	--	--	1,347,886,737	--	1,347,886,737	1,347,886,737	Other Comprehensive Income for the Year
Saldo per 31 Desember 2024	10,001,000,000	2,402,511,093	70,365,537,959	72,768,049,052	(7,924,611,005)	115,240,002,475	107,315,391,470	190,084,440,522	Balance as of December 31, 2024

Catatan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari
laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes form an integral part of these
financial statements

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
LAPORAN ARUS KAS
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
STATEMENTS OF CASH FLOWS
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2024 Rp	2023 Rp	
ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			CASH FLOWS FROM OPERATING ACTIVITIES
Penerimaan Kas dari Pelanggan	233,949,650,727	212,712,023,923	Cash Receipts from Customers
Pembayaran Kas kepada Pemasok dan Karyawan	(220,546,299,341)	(192,640,459,727)	Cash Paid to Suppliers and Employees
Pembayaran Beban Keuangan	(1,741,094,350)	(1,134,851,074)	Financial Cost Paid
Penerimaan Bunga	364,590,207	246,999,725	Interest Received
Pembayaran Pajak	(5,985,221,858)	(5,012,945,450)	Payment of Tax
Kas Bersih Diperoleh dari Aktivitas Operasi	6,041,625,385	14,170,767,397	Net Cash Provided by Operating Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI			CASH FLOWS FROM INVESTING ACTIVITIES
Perolehan Aset Tetap	(39,027,028)	(2,881,914,140)	Acquisition of Fixed Assets
Perolehan Aset Takberwujud	(132,904,774)	(853,657,245)	Acquisition of Intangible Asset
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(171,931,802)	(3,735,571,385)	Net Cash Used In Investing Activities
ARUS KAS DARI AKTIVITAS PENDANAAN			CASH FLOWS FROM FINANCING ACTIVITIES
Pembayaran Pinjaman dari Bank	(750,000,000)	(222,919,723)	Payment of Loan from Bank
Pembayaran Liabilitas Sewa	(398,520,000)	(1,192,320,000)	Payment of Lease Liabilities
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan	(1,148,520,000)	(1,415,239,723)	Net Cash Used in Financing Activities
KENAIKAN (PENURUNAN) BERSIH KAS DAN BANK	4,721,173,583	9,019,956,289	NET INCREASE (DECREASE) CASH ON HAND AND IN BANKS
KAS DAN BANK AWAL TAHUN	42,763,914,181	33,743,957,892	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE BEGINNING OF THE YEAR
KAS DAN BANK AKHIR TAHUN	47,485,087,764	42,763,914,181	CASH ON HAND AND IN BANKS AT THE END OF THE YEAR
Kas dan Bank Pada Akhir Tahun Terdiri dari :			Cash on Hand and in Banks of the Year Consists of :
Kas	75,591,375	52,173,875	Cash on Hand
Bank	47,409,496,389	42,711,740,306	Cash in Banks
Jumlah	47,485,087,764	42,763,914,181	Total

Informasi tambahan yang tidak mempengaruhi arus kas disajikan dalam Catatan 35

The additional information that does not affect the cash flow is presented in Note 35

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Rupiah penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

1. Umum

a. Pendirian Perusahaan

PT Indra Karya (Persero) selanjutnya disebut "Perusahaan" didirikan di Jakarta pada tahun 1972 sebagai kelanjutan dari PN Indra Karya, sesuai dengan Akta No. 108 tanggal 20 Desember 1972 dari Dian Paramita Tamzil, S.H., Notaris di Jakarta dan diubah dengan Akta No. 107 tanggal 17 April 1973 dari Kartini Muljadi, S.H., Notaris di Jakarta serta telah disahkan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. Y.A.5/165/11 tanggal 8 Mei 1973.

Anggaran Dasar Perusahaan telah beberapa kali mengalami perubahan, terakhir diubah dengan Akta No. 09 tanggal 20 Februari 2025 dari Arminawan, S.H., notaris di Jakarta, tentang perubahan Nama menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara, Tempat Kedudukan, Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha. Perubahan tersebut telah disahkan oleh Menteri Hukum Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. AHU-0012457.AH.01.02 Tahun 2025 tanggal 21 Februari 2025.

Perusahaan berdomisili di Jakarta dengan alamat di HK Tower Lantai 9, Jl. Biru Laut X Kav. 9, Cawang, Jakarta.

Maksud dan tujuan Perusahaan sebagaimana tercantum dalam Akta No. 09 tanggal 20 Februari 2025 adalah menjalankan kegiatan usaha di bidang perkebunan dan konsultasi konstruksi, serta mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

b. Kegiatan Perusahaan

Berdasarkan Pasal 1A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 3 Tahun 2025, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:

- a. Aktivitas usaha perkebunan;
- b. Aktivitas usaha perdagangan besar hasil perkebunan;
- c. Aktivitas usaha industri perkebunan;
- d. Aktivitas pergudangan dan penyimpanan;
- e. Aktivitas jasa konsultansi konstruksi;
- f. Aktivitas arsitektur;
- g. Aktivitas keinsinyuran;

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS

*For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

1. General

a. The Company's Establishment

PT Indra Karya (Persero) hereinafter called "the Company" was founded in Jakarta in 1972 as a continuation of the PN Indra Karya, based on the Deed No. 108 dated December 20, 1972 of Dian Paramita Tamzil, S.H., Notary in Jakarta and amended by the Deed No. 107 dated 17 April 1973 of Kartini Muljadi, S.H., notary in Jakarta and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia in Decision Letter No. Y.A.5/165/11 dated May 8, 1973.

The Company's Articles of Association have been amended several times, last amended by the Deed No. 09 dated February 20, 2025, drawn up before Arminawan, S.H., a notary in Jakarta, concerning the change of the Company's Name to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara, Domicile, Purpose and Objectives, and Business Activities. The amendment has been approved by the Ministry of Law of the Republic of Indonesia in Decree No. AHU-0012457.AH.01.02 Tahun 2025 dated February 21, 2025.

The Company is domiciled at Jakarta at HK Tower 9th Floor, Jl. Biru Laut X Kav. 9, Cawang, Jakarta.

The Company's purpose and objectives, as stated in Deed No. 09 dated February 20, 2025, are to conduct business activities in the plantation and construction consulting sectors, as well as to optimize the utilization of the Company's resources based on the principles of good corporate governance.

b. Business Activities

Based on Article 1A of Government Regulation of the Republic of Indonesia No. 2 of 2025, the Company carries out its main business activities as follows:

- a. Plantation business activities;*
- b. Wholesale trade activities of plantation products;*
- c. Plantation industry activities;*
- d. Warehousing and storage activities;*
- e. Construction consultancy services activities;*
- f. Architectural activities;*
- g. Engineering activities;*

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- h. Aktivitas jasa inspeksi;
- i. Penelitian dan pengembangan teknologi dan rekayasa;
- j. Aktivitas desain interior;
- k. Aktivitas jasa konsultasi;
- l. Aktivitas mendirikan atau turut serta dalam badan lain;
- m. Aktivitas kantor pusat;
- n. Investasi langsung atau tidak langsung; dan
- o. Aktivitas lain dalam rangka mencapai maksud dan tujuan Perusahaan Perseroan (Persero) sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero).

Selain kegiatan usaha utama tersebut, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan.

c. Wilayah Kerja

Wilayah kerja Perusahaan adalah sebagai berikut:

- a. Kantor Pusat, Jakarta;
- b. Divisi *Engineering I*, Malang, Jawa Timur;
- c. Divisi *Engineering III*, Jakarta;
- d. Divisi Survei & investigasi, Malang Jawa Timur;
- e. Divisi Khusus & Investasi, Jakarta;
- f. Divisi *Developer*, Jakarta;
- g. Divisi Industri, Jakarta.

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 20 Februari 2025 dari Arminawan, S.H., notaris di Jakarta, Perusahaan dapat membuka kantor cabang atau kantor perwakilan di tempat lain, baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, dengan persetujuan Dewan Komisaris.

d. Susunan Pengurus dan Informasi Lain

Pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023, susunan pengurus Perusahaan adalah sebagai berikut:

	2024
Dewan Komisaris	
Komisaris Utama	--
Komisaris	Letnan Jenderal TNI (Purn). Wisnoe Prasetya Boedi
Dewan Direksi	
Direktur Utama	Letnan Jenderal TNI (Purn). Agus Sutomo, SE
Direktur	Gok Ari Joso Simamora

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- h. *Inspection services activities;*
- i. *Research and development of technology and engineering;*
- j. *Interior design activities;*
- k. *Consultancy services activities;*
- l. *Activities of establishing or participating in other entities;*
- m. *Head office activities;*
- n. *Direct or indirect investment; and*
- o. *Other activities in order to achieve the objectives and purposes of the State-Owned Company (Persero) as stipulated in the Articles of Association of the State-Owned Company (Persero).*

In addition to its main business activities, the Company may engage in other business activities to optimize the utilization of its resources.

c. Working Areas

The Company's working areas are as follows:

- a. *Head Office, Jakarta;*
- b. *Engineering Division I, Malang, East Java;*
- c. *Engineering Division III, Jakarta;*
- d. *Survey & Investigation Division, Malang, East Java;*
- e. *Special & Investment Division, Jakarta;*
- f. *Developer Division, Jakarta;*
- g. *Industrial Division, Jakarta.*

Based on Deed No. 09 dated February 20, 2025, issued by Arminawan, S.H., a notary in Jakarta, the Company is authorized to establish branch offices or representative offices in other locations, both within and outside the territory of the Republic of Indonesia, with the approval of the Board of Commissioners.

d. Management and Other Information

As of December 31, 2024 and 2023, the Company's management consists of the following:

	2023	
		Board of Commissioners
	Airlangga Mardjono	<i>President Commissioner</i>
	Teddy Poernama	<i>Commissioner</i>
		Directors
	Gok Ari Joso Simamora	<i>President Director</i>
	Ir. Eko Budiono	<i>Director</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)**

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)**

	2024	2023	
Komite Audit	Ayudya Shinta Yunica, SE	Ayudya Shinta Yunica, SE	Audit Committee
Internal Audit			Internal Audit
Kepala Internal Audit	Ir. Ferdinandus Baskoro HSW., ST., MT., MM.	Ir. Ferdinandus Baskoro HSW., ST., MT., MM.	Head of Internal Audit
Sekretaris Perusahaan	Okky Suryono, S.Kom	Okky Suryono, S.Kom	Corporate Secretary

Berdasarkan Akta No. 05 tanggal 15 November 2024 dari Arminawan, S.H., Tuan Airlangga Mardjono diberhentikan sebagai Komisaris Utama dan Tuan Fajar Rahwinto Soeharto diberhentikan sebagai Komisaris serta Tuan R. Wisnoe Prasetyo B diangkat sebagai Komisaris.

Based on Deed No. 05 dated November 15, 2024, issued by Arminawan, S.H., Mr. Airlangga Mardjono was dismissed as President Commissioner, and Mr. Fajar Rahwinto Soeharto was dismissed as Commissioner. Furthermore, Mr. R. Wisnoe Prasetyo B was appointed as Commissioner.

Berdasarkan Akta No. 04 tanggal 15 November 2024 dari Arminawan, S.H., Tuan Gok Ari Joso Simamora dialihkan penugasannya yang semula sebagai Direktur Utama menjadi Direktur, Tuan Eko Budiono diberhentikan sebagai Direktur, dan Tuan Agus Sutomo diangkat sebagai Direktur Utama.

Based on Deed No. 04 dated November 15, 2024, issued by Arminawan, S.H., Mr. Gok Ari Joso Simamora was reassigned as President Director to Director, Mr. Eko Budiono was dismissed as Director, and Mr. Agus Sutomo was appointed as President Director.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-54/MBU/03/2025 Tanggal 11 Maret 2025, Wisnoe Prasetya Boedi diangkat sebagai Komisaris Utama, Wicipto Setiadi dan Ulfa Masfufah diangkat sebagai Komisaris.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-54/MBU/03/2025 Dated March 11, 2025, Wisnoe Prasetya Boedi was appointed as President Commissioner, Wicipto Setiadi dan Ulfa Masfufah was appointed as Commissioner.

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-53/MBU/03/2025 Tanggal 11 Maret 2025, memberhentikan Gok Ari Joso Simamora sebagai Direktur Utama dan mengangkat Ospin Sembiring sebagai Direktur Operasi, Eddy Slamet Irianto sebagai Direktur Bisnis dan Pengembangan Industri, Mohammad Wais Fansuri sebagai Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko, Bachtiar Utomo sebagai Direktur SDM dan Umum, Cucu Somantri sebagai Direktur Perkebunan dan Gagah Guntur Aribowo sebagai Direktur Konsultan Konstruksi.

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-53/MBU/03/2025 Dated March 11, 2025, Gok Ari Joso Simamora was discharged as President Director and appointed Ospin Sembiring as Director Operational, Eddy Slamet Irianto as .Director of Business and Industrial Development, Mohammad Wais Fansuri as Director of Finance and Risk Management, Bachtiar Utomo as Director of Human Capital and General, Cucu Somantri as Director of Plantation and Gagah Guntur Aribowo as Director of Construction Consultant.

2. Informasi Kebijakan Akuntansi Material

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia yang meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

2. Material Accounting Policies Information

a. Statement of Compliance

The financial statements have been prepared and presented in accordance to Indonesian Financial Accounting Standards which include the Statement of Financial Accounting Standards and interpretation of Financial Accounting Standards issued by the Financial Accounting Standard Board - Indonesian Institute of Accountant (DSAK-IAI).

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

b. Dasar Pengukuran dan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan keuangan disusun berdasarkan asumsi kelangsungan usaha serta atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas yang menggunakan dasar kas. Dasar pengukuran dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah konsep biaya perolehan, kecuali beberapa akun tertentu yang didasarkan pengukuran lain sebagaimana dijelaskan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut. Biaya perolehan umumnya didasarkan pada nilai wajar imbalan yang diserahkan dalam pemerolehan aset.

Dasar penyusunan laporan keuangan, kecuali untuk laporan arus kas, adalah dasar akrual.

Laporan arus kas disusun dengan menggunakan metode langsung (*direct method*) dengan mengelompokkan arus kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Mata uang penyajian yang digunakan dalam penyusunan laporan keuangan ini adalah Rupiah (Rp) yang merupakan mata uang fungsional Perusahaan. Perusahaan menetapkan mata uang fungsional sendiri dan unsur-unsur dalam laporan keuangan diukur berdasarkan mata uang fungsional tersebut.

c. Perubahan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang Berlaku Efektif pada Tahun Berjalan

Pada tanggal 1 Januari 2024, referensi terhadap masing-masing PSAK dan ISAK telah diubah sesuai dengan penerbitan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI).

Berikut amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 116: Sewa tentang Liabilitas Sewa dalam Jual dan Sewa-Balik;
- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Klasifikasi Liabilitas sebagai Jangka Pendek atau Jangka Panjang;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

b. The Basis of Measurement and Preparation of Financial Statements

The financial statements have been prepared on going concern assumption and accrual basis, except for the statements of cash flows using the cash basis. The basis of measurement in preparation of these financial statements is the historical costs, except for certain accounts which have been prepared on the basis of other measurements as described in their respective policies. Historical cost is generally based on the fair value of the consideration given in exchange for assets.

Basis of preparation of financial statements, except for cash flow statement, is an accrual basis.

The statements of cash flows are prepared using the (direct method) with classifications of cash flows into operating, investing and financing activities.

The presentation currency used in the preparation of the financial statements is Indonesian Rupiah (Rp) which is the functional currency of the Company. The Company determines its own functional currency and items included in the financial statements are measured using that functional currency.

c. Changes to Statements of Financial Accounting Standards ("PSAK") Effective in the Current Year

On January 1, 2024, references to the individual PSAKs and ISAKs has been changed as published by the Financial Accounting Standards Board of Indonesian Institute of Accountants ("DSAK-IAI").

The following amendment to standards which are relevant to the Company, are effective from January 1, 2024, but do not result in significant impact to the financial statements are as follows:

- Amendments PSAK 116: Lease regarding Lease Liability in a Sale and Leaseback;
- Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements regarding Classification of Liabilities as Current or Noncurrent.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Amendemen PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan tentang Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan;
- Amendemen PSAK 207 "Laporan Arus Kas" dan amendemen PSAK 107 "Instrumen Keuangan: Pengungkapan" tentang Pengaturan Pembiayaan Pemasok; dan
- Revisi PSAK 409: Akuntansi Zakat, Infaq, dan Sedekah dan Revisi PSAK 401: Penyajian Laporan Keuangan Syariah.

Implementasi amendemen standar tersebut tidak memiliki dampak yang material terhadap jumlah yang dilaporkan di periode berjalan atau tahun sebelumnya.

d. Standar Baru dan Amendemen atas Standar yang Telah Disahkan Namun Belum Berlaku Efektif

Standar baru dan amendemen atas standar yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2025, dengan penerapan dini diperkenankan yaitu:

- Amendemen PSAK 221 "Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing" tentang Kekurangan Ketertukaran;
- PSAK 117 "Kontrak Asuransi"; dan
- Amendemen PSAK 117: Kontrak Asuransi tentang Penerapan Awal PSAK 117 dan PSAK 109 – Informasi Komparatif.

Beberapa PSAK juga diamendemen yang merupakan amendemen konsekuensial karena berlakunya PSAK 117: Kontrak Asuransi, yaitu:

- PSAK 103: Kombinasi Bisnis;
- PSAK 105: Aset Tidak Lancar yang dikuasai untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan;
- PSAK 107: Instrumen Keuangan: Pengungkapan;
- PSAK 109: Instrumen Keuangan;
- PSAK 115: Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan;
- PSAK 201: Penyajian Laporan Keuangan;
- PSAK 207: Laporan Arus Kas;
- PSAK 216: Aset Tetap;
- PSAK 219: Imbalan Kerja;
- PSAK 228: Investasi pada Entitas Asosiasi dan Ventura Bersama;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Amendments PSAK 201: Presentation of Financial Statements related to Non-Current Liabilities with Covenants;
- Amendment to PSAK 207 "Statement of Cash Flows" and amendment to PSAK 107 "Financial Instrument: Disclosure" related to Supplier Finance Agreements; and
- Revision PSAK 409: Accounting for Zakat, Infaq, dan Sadaqah and Revision PSAK 401: Presentation of Sharia Financial Statements.

The implementation of the above amendment to standards had no material on the amounts reported for the current period or prior financial year.

d. Standard and Amendment to Standard which has been Issued but Not Yet Effective

New Standard and amendment to standards which effective for periods beginning on or after January 1, 2025, with early adoption is permitted, are as follows:

- Amendment to PSAK 221 "Effect of Changes in Foreign Exchange Rate" related to The Lack of Intechangeability;
- PSAK 117 "Insurance Contracts"; and
- Amendments PSAK 104: Insurance Contract regarding Initial Application of PSAK 104 and PSAK 109 – Comparative Information.

Several PSAKs were also amended which were consequential amendments due to the enactment of PSAK 117: Insurance Contracts, as follows:

- PSAK 103: Business Combinations;
- PSAK 105: Non-Current Assets Held for Sale and Discontinued Operations;
- PSAK 107: Financial Instruments: Disclosures;
- PSAK 109: Financial Instruments;
- PSAK 115: Income from Contracts with Customers;
- PSAK 201: Presentation of Financial Statements;
- PSAK 207: Statement of Cash Flows;
- PSAK 216: Fixed Assets;
- PSAK 219: Employee Benefits;
- PSAK 228: Investment in Associated Entities and Joint Ventures;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- PSAK 232: Instrumen Keuangan Penyajian;
- PSAK 236: Penurunan Nilai Aset;
- PSAK 237: Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi;
- PSAK 238: Aset Takberwujud; dan
- PSAK 240: Properti Investasi.

Hingga tanggal laporan keuangan ini diotorisasi, Perusahaan masih melakukan evaluasi atas dampak potensial dari penerapan standar baru dan amendemen atas standar tersebut.

e. Transaksi dan Saldo dalam Mata Uang Asing

Pada tanggal laporan posisi keuangan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan ke dalam mata uang Rupiah dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Keuntungan atau kerugian yang timbul sebagai akibat dari penjabaran aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dicatat dalam laporan laba komprehensif tahun berjalan. Konversi kurs pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp16.162 dan Rp15.416.

f. Kas dan Bank

Kas dan bank termasuk kas dan kas di bank (rekening giro) tidak digunakan sebagai jaminan atau tidak dibatasi penggunaannya.

g. Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa

Tagihan bruto kepada pemberi kerja merupakan piutang Perusahaan yang berasal dari pekerjaan kontrak konstruksi yang dilakukan namun pekerjaan yang dilakukan masih dalam pelaksanaan. Tagihan bruto disajikan sebesar selisih antara biaya yang terjadi ditambah laba yang diakui dikurangi dengan kerugian yang diakui dan termin.

Tagihan bruto diakui sebagai pendapatan sesuai dengan metode presentase penyelesaian yang dinyatakan dalam berita acara penyelesaian pekerjaan yang belum diterbitkan faktur karena perbedaan antara tanggal berita acara kemajuan (progres) fisik dengan pengajuan penagihan pada tanggal laporan posisi keuangan.

h. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dipertanggungjawabkan dengan menggunakan model biaya dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan setelah

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- PSAK 232: Financial Instruments: Presentation;
- PSAK 236 Impairment of Asset;
- PSAK 237: Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Assets;
- PSAK 238: Intangible Assets; and
- PSAK 240: Investment Property.

Until the date of the financial statements is authorized, the Company is still evaluating the potential impact of the implementation those new standard and amendments to standards.

e. Foreign Currency Transactions and Balances

At statement of financial position date, all monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are translated to Rupiah using the Bank Indonesia middle rate. The gains or losses from the translation of monetary assets and liabilities in foreign currencies are recognized in the statement of comprehensive income for the current year. Conversion rate on the date of December 31, 2024 and 2023 amounting to Rp16,162 and Rp15,416, respectively.

f. Cash on Hand and in Banks

Cash on hand and in banks are cash on hand and cash in banks (current account) are not used as collateral or are not restricted.

g. Gross Amount Due from Customers

Gross amount due from customers represent the Company's receivable originated from construction contract in progress. Gross amount due from customers is presented as the net amount of costs incurred plus recognized profits, less the sum of recognized losses and progress billings.

Gross amount due from customers is recognized as revenue based on the percentage of completion method which is stated on the certificate of work completion, while the invoice is still unbilled due to the difference of time between the date of physical progress certificates and the submission of billing on the statement of financial position date.

h. Fixed Assets

Fixed assets, except for land, are accounted for using cost model and stated at acquisition cost less accumulated depreciation and accumulated impairment losses, if any. Fixed

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

dikurangi akumulasi penyusutan. Aset tetap, kecuali tanah, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus. Taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

	Masa Manfaat/ Useful Life	Persentase/ Percentage	
Bangunan	20 tahun/ years	5%	Buildings
Kendaraan	8 tahun/ years	25%	Vehicles
Peralatan Kantor	4 tahun/ years	50%	Office Equipments
Peralatan Survei dan Investigasi	4 tahun/ years	50%	Survey and Investigation Equipments

assets, except for land, are depreciated using the straight-line method. The estimated economic life of the assets as follows:

Tanah dinyatakan berdasarkan nilai revaluasi yang merupakan nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai yang terjadi setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang memadai untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tidak berbeda secara material dari jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajar pada tanggal laporan.

Land are stated at their revalued amounts, being the fair value at the date of revaluation, less any subsequent accumulated impairment losses. Revaluation is made with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from the amount determined using fair value at the reporting date.

Kenaikan yang berasal dari revaluasi tanah diakui pada penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi, kecuali sebelumnya penurunan revaluasi atas aset yang sama pernah diakui dalam laba rugi, dalam hal ini kenaikan revaluasi hingga sebesar penurunan nilai aset akibat revaluasi tersebut, dikreditkan dalam laba rugi. Penurunan jumlah tercatat yang berasal dari revaluasi tanah dan bangunan dibebankan dalam laba rugi apabila penurunan tersebut melebihi saldo surplus revaluasi aset yang bersangkutan, jika ada.

Any revaluation increase arising on the revaluation of such land is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under revaluation surplus, except to the extent that it reverses a revaluation decrease, for the same asset which was previously recognized in profit or loss, in this case the increase is credited to profit or loss to the extent of the decrease previously charged. A decrease in carrying amount arising on the revaluation of such land and buildings is charged to profit or loss to the extent that it exceeds the balance, if any.

Biaya perbaikan dan pemeliharaan dibebankan pada laporan laba rugi pada saat terjadinya biaya-biaya tersebut, sedangkan pengeluaran dalam jumlah besar dan sifatnya meningkatkan kondisi aset secara signifikan dikapitalisasi. Pengeluaran setelah perolehan awal aset tetap akan ditambah (kapitalisasi) pada jumlah tercatat aset yang bersangkutan.

Cost of repairs and maintenance is charged to the current statements of income as incurred, while the significant expenditures for renewals and improvements are capitalized. All expenditures subsequent to the purchasing of fixed assets would be (capitalized).

Aset tetap yang dikonstruksi sendiri disajikan sebagai bagian aset tetap sebagai "Aset dalam Pembangunan" dan dinyatakan sebesar biaya perolehannya. Semua biaya yang terjadi sehubungan dengan konstruksi aset tersebut dikapitalisasi sebagai bagian dari biaya perolehan aset tetap dalam penyelesaian konstruksi.

Own built fixed assets is presented as part of property and equipment as "Construction in Progress" and is stated at cost. All cost incurred related to the construction of such assets is capitalized as part of cost of construction in progress.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Akumulasi biaya perolehan yang akan dipindahkan ke masing-masing pos aset tetap sesuai dengan saat aset tersebut selesai dikerjakan atau siap digunakan dan disusutkan sejak beroperasi.

Apabila suatu aset tetap tidak dipergunakan lagi atau dilepas, nilai tercatat dan akumulasi penyusutannya dikeluarkan dari pencatatannya sebagai aset tetap dan keuntungan atau kerugian yang timbul dilaporkan dalam laporan laba rugi tahun berjalan.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset (dihitung sebagai perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan dan jumlah tercatat dari aset) dimasukkan dalam laba rugi pada periode/ tahun aset tersebut dihentikan pengakuannya.

Pada akhir periode/ tahun buku pelaporan, Perusahaan melakukan penelaahan berkala atas masa manfaat ekonomis aset, nilai residu, metode penyusutan, dan sisa umur pemakaian berdasarkan spesifikasi teknis.

i. Aset Takberwujud

Aset takberwujud diukur sebesar nilai perolehan pada pengakuan awal. Setelah pengakuan awal, aset takberwujud dicatat pada biaya perolehan dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Umur manfaat aset takberwujud dinilai apakah terbatas atau tidak terbatas.

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi. Masa manfaat aset takberwujud dengan umur tak terbatas ditelaah setiap tahun untuk menentukan apakah peristiwa dan keadaan dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, perubahan masa manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Aset takberwujud dengan umur tidak terbatas diuji untuk penurunan nilai setiap tahun dan kapanpun terdapat suatu indikasi bahwa aset takberwujud mungkin mengalami penurunan nilai.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets items at the time the asset is completed or ready for use and is depreciated since the operation.

When fixed assets are not used or otherwise disposed of, the carrying costs and related accumulated depreciation are removed from the fixed assets account and any resulting gain or loss is recorded or charged in to profit or loss for the year.

The carrying amount of fixed assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in the profit or loss for the year the assets are derecognized.

At the end of reporting period/ year end, the Company periodically reviews the useful lives of the assets, asset's residual value, depreciation method and the remaining usage expectation based on technical specification.

i. Intangible Assets

Intangible asset is measured on initial recognition at cost. After initial recognition, intangible asset is carried at cost less any accumulated amortization and any accumulated impairment loss. The useful life of intangible asset is assessed to be either finite or indefinite.

Intangible asset with indefinite useful life

Intangible asset with indefinite useful life is not amortized. The useful life of an intangible asset with an indefinite life is reviewed annually to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If they do not, the change in the useful life assessment from indefinite to finite is accounted for on a prospective basis.

Intangible asset with indefinite useful life is tested for impairment annually and whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired.

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas

Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus (atau metode lainnya sepanjang mencerminkan pola manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dikonsumsi oleh entitas).

Perangkat lunak diamortisasi selama umur manfaat ekonomi dengan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis selama 4 tahun.

Amortisasi dihitung sebagai penghapusan biaya perolehan aset, dikurangi nilai residunya.

j. Transaksi Dengan Pihak-Pihak Berelasi

Pihak berelasi adalah orang atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor:

- a) Orang atau anggota keluarga dekatnya mempunyai relasi dengan entitas pelapor jika orang tersebut:
 - i. Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas entitas pelapor;
 - ii. Memiliki pengaruh signifikan atas entitas pelapor; atau
 - iii. Merupakan personil manajemen kunci entitas pelapor atau entitas induk dari entitas pelapor.
- b) Suatu entitas berelasi dengan entitas pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
 - i. Entitas dan entitas pelapor adalah anggota dari kelompok usaha yang sama (artinya entitas induk, entitas anak, dan entitas anak berikutnya saling berelasi dengan entitas lain);
 - ii. Satu entitas adalah entitas asosiasi atau ventura bersama dari entitas lain (atau entitas asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu kelompok usaha, yang mana entitas lain tersebut adalah anggotanya);
 - iii. Kedua entitas tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama;
 - iv. Satu entitas adalah ventura bersama dari entitas ketiga dan entitas yang lain adalah entitas asosiasi dari entitas ketiga;

Intangible asset with finite useful life

Intangible asset with finite useful life is amortized over the economic useful life by using a straight-line method (or other method as it reflects the pattern in which the asset's future economic benefits are expected to be consumed by the entity).

Software is amortized over the economic useful life with the straight-line method based on the estimated useful life for 4 years.

Amortization is calculated so as to write-off the cost of the asset, less its estimated residual value.

j. Transactions with Related Parties

A related party is a person or an entity that is related to the reporting entity:

- a) A person or a close member of that person's family is related to a reporting entity if that person:
 - i. Has control or joint control over the reporting entity;
 - ii. Has significant influence over the reporting entity; or
 - iii. Is a member of the key management personnel of the reporting entity or of a parent of the reporting entity.
- b) An entity is related to the reporting entity if any of the following conditions applies:
 - i. The entity and the reporting entity are members of the same group (which means that each parent, subsidiary and fellow subsidiary is related to other entities);
 - ii. One entity is an associate or joint venture of the other entity (or an associate or joint venture of a member of a group of which the other entity is a member);
 - iii. Both entities are joint ventures of the same third party;
 - iv. One entity is a joint venture of a third entity and the other entity is an associate of the third entity;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- v. Entitas tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu entitas pelapor atau entitas yang terkait dengan entitas pelapor. Jika entitas pelapor adalah entitas yang menyelenggarakan program tersebut, maka entitas sponsor juga berelasi dengan entitas pelapor;
- vi. Entitas yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam huruf (a);
- vii. Orang yang diidentifikasi dalam huruf (a) (i) memiliki pengaruh signifikan atas entitas atau merupakan personil manajemen kunci entitas (atau entitas induk dari entitas); dan
- viii. Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah adalah entitas yang dikendalikan, dikendalikan bersama, atau dipengaruhi oleh Pemerintah. Pemerintah mengacu kepada pemerintah, instansi Pemerintah dan badan yang serupa baik lokal, nasional maupun internasional.

Entitas yang berelasi dengan Pemerintah dapat berupa entitas yang dikendalikan oleh Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN sebagai kuasa pemegang saham.

Transaksi signifikan yang dilakukan dengan pihak-pihak berelasi, baik dilakukan dengan kondisi dan persyaratan yang sama dengan pihak ketiga maupun tidak, diungkapkan pada laporan keuangan (Catatan 32).

k. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Dalam menentukan pengakuan pendapatan, Perusahaan melakukan analisis atas transaksi melalui lima langkah berikut:

1. Mengidentifikasi kontrak dengan pelanggan, dengan kriteria sebagai berikut:
 - Kontrak telah disetujui oleh pihak-pihak terkait dalam kontrak;

- v. The entity is a post-employment benefit plan for the benefit of employees of either the reporting entity, or an entity related to the reporting entity. If the reporting entity is the entity that organized the program, the sponsoring employers are also related to the reporting entity;

- vi. The entity is controlled or jointly controlled by a person identified in (a);

- vii. A person identified in (a) (i) has significant influence over the entity or is a member of the key management personnel of the entity (or a parent of the entity); and

- viii. The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

A Government-related entity is an entity that is controlled, jointly controlled or significantly influenced by the government. Government refers to Government, Government agencies and similar bodies whether local, national or international.

Government related entity can be an entity that is controlled by the Government of Republic of Indonesia, represented by the BUMN's Ministry as a shareholder's representative.

Significant transactions with related parties, whether or not made at similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the financial statements (Note 32).

k. Revenue and Expense Recognition

In determining revenue recognition, the Company perform analysis transaction through the following five steps of assessment:

1. Identify contracts with customers with certain criteria as follows:
 - The contract has been agreed by the parties involved in the contract;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Perusahaan dapat mengidentifikasi hak dari pihak-pihak terkait dan jangka waktu pembayaran dari barang atau jasa yang akan dialihkan;
 - Kontrak memiliki substansi komersial;
 - Besar kemungkinan entitas akan menerima imbalan atas barang atau jasa yang dialihkan.
2. Mengidentifikasi kewajiban pelaksanaan dalam kontrak, untuk menyerahkan barang atau jasa yang memiliki karakteristik yang berbeda ke pelanggan.
 3. Menentukan harga transaksi, setelah dikurangi diskon, retur, insentif penjualan, dan pungutan ekspor, yang berhak diperoleh suatu entitas sebagai kompensasi atas penyerahannya barang atau jasa yang dijanjikan ke pelanggan.
 4. Mengalokasikan harga transaksi kepada setiap kewajiban pelaksanaan dengan menggunakan dasar harga jual dari setiap barang atau jasa yang dijanjikan di kontrak.
 5. Mengakui pendapatan ketika kewajiban pelaksanaan telah dipenuhi (sepanjang waktu atau pada suatu waktu tertentu).

Pembayaran harga transaksi berbeda untuk setiap kontrak. Aset kontrak diakui apabila kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi melebihi pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan. Liabilitas kontrak diakui ketika pembayaran yang dilakukan oleh pelanggan melebihi kewajiban pelaksanaan yang telah dipenuhi. Aset kontrak disajikan dalam "Piutang usaha" dan liabilitas kontrak disajikan dalam "Utang usaha" dan "Liabilitas lainnya".

Kriteria tertentu juga harus terpenuhi untuk setiap aktivitas Perusahaan seperti yang dijelaskan di bawah.

Pendapatan dari penjualan barang diakui pada saat pengendalian atas barang telah berpindah kepada pelanggan.

Pendapatan jasa diakui pada saat pelanggan menerima dan mengonsumsi manfaat dari jasa tersebut.

Beban diakui pada saat terjadinya, dengan menggunakan dasar akrual.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

- *The Company can identify the rights of relevant parties and the term of payment for the goods or services to be transferred;*
 - *The Contract has commercial substance;*
 - *It is probable that the Company will receive benefits for the goods or services transferred.*
2. *Identify the performance obligations in the contract, to transfer distinctive goods or services to the customer.*
 3. *Determine the transaction price, net of discounts, returns, sales incentives and export duty, which an entity expects to be entitled in exchange for transferring promised goods or services to a customer.*
 4. *Allocate the transaction price to each performance obligation on the basis of the selling prices of each goods or services promised in the contract.*
 5. *Recognise revenue when performance obligation is satisfied (over time or at a point in time).*

Payment of the transaction price differs for each contract. Contract asset is recognised when performance obligation satisfied is more than the payments by customer. Contract liability is recognised when the payments by customer is more than the performance obligation satisfied. Contract assets are presented under "Trade receivables" and contract liabilities are presented under "Trade payables" and "Other liabilities".

The specific criteria also must be met for each of the Company's activities as described below.

Revenue from the sale of goods is recognised when the control of goods has been transferred to the customer.

Revenue from the rendering of services is recognised when the customer has received and consumed benefit from the services.

Expenses are recognised as incurred on an accrual basis.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

I. Pajak Penghasilan

Pajak Final

Sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku, sebagian penghasilan Perusahaan dan entitas anak dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final. Untuk tujuan pelaporan keuangan, beban PPh final dilaporkan dalam laporan laba rugi sebagai bagian dari beban usaha.

Beban pajak final diakui proporsional dengan jumlah pendapatan menurut akuntansi yang diakui pada tahun berjalan. Selisih antara jumlah pajak penghasilan final yang dibayar dengan jumlah yang dibebankan pada perhitungan laba rugi, diakui sebagai pajak dibayar di muka atau utang pajak. Bila penghasilan telah dikenakan pajak penghasilan final, perbedaan antara nilai tercatat aset dan liabilitas dengan dasar pengenaan pajaknya tidak diakui sebagai aset dan liabilitas tangguhan.

Pajak kini diakui berdasarkan laba kena pajak untuk tahun yang bersangkutan, yakni pajak yang dihitung sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku.

Pajak Penghasilan

Beban pajak kini ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam tahun yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak yang berlaku.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui atas konsekuensi pajak periode mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas. Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan, sepanjang besar kemungkinan dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa datang.

I. Income Tax

Final Tax

According to the tax regulation, certain the Company and subsidiary income is subject to final tax. For the purpose of financial statement preparation, final income tax expenses are stated in the statement of profit or loss as part of operating expenses.

Final tax expense is recognized in proportion with the revenue according to recognized accounting practices during the current year. The difference between the total final income tax paid and the amount charged to the profit and loss calculation is recognized as prepaid taxes or tax payable. When income has been subject to final tax, the difference between the carrying value of assets and liabilities and the tax bases are not recognized as deferred assets and liabilities.

Current tax is recognized based on the taxable income for the year, computed in accordance with the current tax regulation.

Income Tax

Current tax expense is determined based on the taxable profit for the year computed using the prevailing tax rates.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the financial statement carrying amounts of assets and liabilities and their respective tax bases. Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences to the extent that it is probable that taxable income will be available in future periods against which the deductible temporary differences can be utilized.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diekspektasikan berlaku dalam periode ketika liabilitas diselesaikan atau aset dipulihkan dengan tarif pajak (dan peraturan pajak) yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada akhir periode pelaporan.

Pengukuran aset dan liabilitas pajak tangguhan mencerminkan konsekuensi pajak yang sesuai dengan cara Perusahaan ekspektasikan untuk memulihkan atau menyelesaikan jumlah tercatat aset dan liabilitasnya pada akhir periode pelaporan.

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan dikaji ulang pada akhir periode pelaporan dan dikurangi jumlah tercatatnya jika kemungkinan besar laba kena pajak tidak lagi tersedia dalam jumlah yang memadai untuk mengkompensasikan sebagian atau seluruh aset pajak tangguhan tersebut.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama serta Perusahaan yang berbeda yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar bersih.

Pajak kini dan pajak tangguhan diakui sebagai beban atau penghasilan dalam laporan laba rugi, kecuali sepanjang pajak penghasilan yang berasal dari transaksi atau kejadian yang diakui, diluar laporan laba rugi (baik dalam pendapatan komprehensif lain maupun secara langsung di ekuitas), dalam hal tersebut pajak juga diakui di luar laporan laba rugi.

Pajak tangguhan tidak dihitung karena tidak terdapat perbedaan temporer yang signifikan antara dasar pengenaan pajak dan komersial.

**m. Instrumen Keuangan
Pengakuan dan Pengukuran**

Perusahaan mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan dalam laporan posisi keuangan, jika dan hanya jika, Perusahaan menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply in the period in which the liability is settled or the asset realised, based on the tax rates (and tax laws) that have been enacted, or substantively enacted, by the end of the reporting period.

The measurement of deferred tax assets and liabilities reflects the consequences that would follow from the manner in which the Company expects to recover or settle the carrying amount of their assets and liabilities at the end of the reporting period.

The carrying amount of deferred tax assets is reviewed at the end of each reporting period and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profits will be available to allow all or part of the asset to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities when they relate to income taxes levied by the same taxation authority when the Company intends to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

Current and deferred tax are recognized as an expense or income in the profit or loss, except when they relate to items that are recognized outside the profit or loss (whether in other comprehensive income or directly in equity), in which case the tax is also recognized outside the profit or loss.

No deferred tax is accounted as there is no significant temporary difference identified for commercial and tax base values.

**m. Financial Instruments
Initial Recognition and Measurement**

The Company recognizes a financial asset or a financial liability in the statement of financial position when, and only when, the company becomes a party to the contractual provisions of the instrument.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Pengukuran Selanjutnya Aset Keuangan

Pada saat pengakuan awal, aset keuangan diklasifikasikan dalam aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi.

Aset keuangan dapat diukur dengan biaya perolehan diamortisasi hanya jika memenuhi kedua kondisi berikut dan tidak ditetapkan sebagai FVTPL:

- Aset keuangan dikelola dalam model bisnis yang bertujuan untuk memiliki aset keuangan untuk tujuan mendapatkan arus kas kontraktual (*held to collect*); dan
- Kriteria kontraktual dari aset keuangan yang pada tanggal tertentu menghasilkan arus kas yang merupakan pembayaran pokok dan bunga semata (SPPI) dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan ini diukur pada jumlah yang diakui pada awal pengakuan dikurangi dengan pembayaran pokok, kemudian dikurangi atau ditambah dengan jumlah amortisasi kumulatif atas perbedaan jumlah pengakuan awal dengan jumlah pada saat jatuh tempo, dan penurunan nilainya.

Pendapatan keuangan dihitung dengan metode menggunakan suku bunga efektif dan diakui di laba rugi. Perubahan pada nilai wajar diakui di laba rugi ketika aset dihentikan atau direklasifikasi.

Aset keuangan yang diklasifikasikan menjadi aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi dapat dijual ketika terdapat peningkatan risiko kredit. Penghentian untuk alasan lain diperbolehkan namun jumlah penjualan tersebut harus tidak material jumlahnya atau tidak sering.

Pengukuran Selanjutnya Liabilitas Keuangan

Perusahaan mengklasifikasikan seluruh liabilitas keuangan sehingga setelah pengakuan awal liabilitas keuangan diukur pada biaya perolehan diamortisasi.

Penghentian Pengakuan Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan, jika dan hanya jika, hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

*For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)*

Subsequent Measurement of Financial Assets

At initial recognition, financial assets are classified in financial assets at amortized costs.

A financial asset is measured at amortized cost only if it meets both of the following conditions and it is not designated as at FVTPL:

- The financial assets is held within a business model whose objective is to hold the asset to collect contractual cash flows (held to collect); and*
- Its contractual terms give rise on specified dates to cash flows that are Solely Payments of Principal and Interest (SPPI) on the principal amount outstanding.*

The financial asset is measured at the amount recognized at initial recognition minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization of any difference between that initial amount and the maturity amount, and any loss allowance.

Interest income is calculated using the effective interest method and is recognized in profit or loss. Changes in fair value are recognized in profit or loss when the asset is derecognized or reclassified.

Financial assets classified to amortized cost may be sold where there is an increase in credit risk. Disposals for other reasons are permitted but such sales should be immaterial in value or infrequent in nature.

Subsequent Measurement of Financial Liabilities

The Company shall classify all financial liabilities as subsequently measured at amortized cost.

Derecognition of Financial Assets and Liabilities

The Company derecognizes a financial assets if, and only if the contractual rights to the cash flows from the financial assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

aset keuangan berakhir atau Perusahaan mengalihkan hak kontraktual untuk menerima kas yang berasal dari aset keuangan atau tetap memiliki hak kontraktual untuk menerima kas tetapi juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar arus kas yang diterima tersebut kepada satu atau lebih pihak penerima melalui suatu kesepakatan. Jika Perusahaan secara substansial mengalihkan seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan menghentikan pengakuan aset keuangan dan mengakui secara terpisah sebagai aset atau liabilitas untuk setiap hak dan kewajiban yang timbul atau yang masih dimiliki dalam pengalihan tersebut. Jika Perusahaan secara substansial tidak mengalihkan dan tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan tersebut dan masih memiliki pengendalian, maka Perusahaan mengakui aset keuangan sebesar keterlibatan berkelanjutan dengan aset keuangan tersebut.

Jika Perusahaan secara substansial masih memiliki seluruh risiko dan manfaat atas kepemilikan aset keuangan, maka Perusahaan tetap mengakui aset keuangan tersebut.

Perusahaan menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas keuangan tersebut berakhir, yaitu ketika kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak dilepaskan atau dibatalkan atau kedaluarsa.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset atau liabilitas keuangan (atau kelompok aset atau liabilitas keuangan) dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode yang relevan.

Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas masa depan selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh jumlah tercatat neto dari aset keuangan atau liabilitas keuangan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

expire or the Company transfers the contractual rights to receive the cash flows of the financial assets or retains the contractual rights to receive the cash flows but assumes a contractual obligation to pay the cash flows to one or more recipients in an arrangement. If the Company transfers substantially all the risks and benefits of ownership of the financial assets, the Company derecognizes the financial assets and recognize separately as assets or liabilities any rights and obligation created or retained in the transfer. If the Company neither transfers nor retains substantially all the risks and benefits of ownership of the financial assets and has retained control, the Company continues to recognize the financial assets to the extent of its continuing involvement in the financial assets.

If the Company retains substantially all the risks and benefits of ownership of the financial assets, the Company continues to recognize the financial assets.

The Company derecognized a financial liability from its statement of financial position if, and only if, it is extinguished, i.e when the obligation specified in the contract is discharged or cancelled or expires.

The Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability (or group of financial assets or financial liabilities) and of allocating the interest income or interest expense over the relevant period.

The effective interest rate is the rate that exactly discount estimated future cash payments or receipts through the expected life of the financial instrument or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial asset or financial liability.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Perusahaan mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, seperti pelunasan dipercepat, opsi beli dan opsi serupa lain, tetapi tidak mempertimbangkan kerugian kredit masa depan. Perhitungan ini mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima oleh pihak-pihak dalam kontrak yang merupakan bagian takterpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi, dan seluruh premium atau diskonto lain.

Pengukuran Nilai Wajar

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset dan liabilitas keuangan diestimasi untuk keperluan pengakuan dan pengukuran atau untuk keperluan pengungkapan.

Nilai wajar dikategorikan dalam tingkat 3 yaitu input yang tidak dapat diobservasi untuk aset atau liabilitas.

n. Liabilitas Imbalan Kerja

Perusahaan menghitung liabilitas imbalan pasca kerja dengan metode *Projected Unit Credit*, sesuai dengan PSAK 219 (Revisi 2013). Biaya jasa kini diakui sebagai beban pada tahun berjalan. Biaya jasa lalu sebagai dampak perubahan asumsi aktuarial bagi karyawan aktif diakui langsung dalam laporan laba rugi. Imbalan kerja atas pemutusan hubungan kerja diakui sebagai liabilitas dan beban pada saat terjadi.

Perusahaan mengakui jumlah liabilitas imbalan pasti neto sebesar nilai kini kewajiban imbalan pasti pada akhir periode pelaporan dikurangi nilai wajar aset program yang dihitung oleh aktuaris independen dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Nilai kini kewajiban imbalan pasti ditentukan dengan mendiskontokan imbalan tersebut.

When calculating the effective interest rate, the Company estimates cash flows considering all contractual terms of the financial instrument, for example, prepayment, call and similar option, but shall not consider future credit losses. The calculation includes all fees and points paid or received between parties to the contract that are an integral part of the effective interest rate, transaction costs, and all other premiums or discounts.

Fair Value Measurement

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date.

The fair value of financial assets and financial liabilities must be estimated for recognition and measurement or for disclosure purposes.

Fair values are categorized into level 3 which is unobservable inputs for the assets or liabilities.

n. Employee Benefits Liabilities

Based on PSAK 219 (Revised 2013), the Company has calculated the liability for other employee benefits using the *Projected Unit Credit* method. Current service cost is recognized as an expense in the current year. Past service cost, actuarial adjustments and the effect of changes in actuarial assumptions for active employees are directly recognized in statements of income. Employee benefits for terminations are recognized as liabilities and expenses when these occur.

The Company recognizes the amount of the net defined benefit liability at the present value of the defined benefit obligation at the end of the reporting period less fair value of plan assets which calculated by independent actuaries using the *Projected Unit Credit* method. Present value benefit obligation determined by discounting the benefit.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Perusahaan mencatat tidak hanya kewajiban hukum berdasarkan persyaratan formal program imbalan pasti, tetapi juga kewajiban konstruktif yang timbul dari praktik informal entitas.

Biaya jasa kini, biaya jasa lalu dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, serta bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui dalam laba rugi.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang terdiri dari keuntungan dan kerugian aktuarial, imbalan hasil atas aset program dan setiap perubahan dampak atas aset diakui sebagai penghasilan komprehensif lain.

Pesangon

Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara:

- a. Ketika Perusahaan tidak dapat lagi menarik tawaran atas imbalan tersebut; dan
- b. Ketika Perusahaan mengakui kewajiban konstruktif yang berada dalam ruang lingkup PSAK 237, ("provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi") dan melibatkan pembayaran pesangon.

Perusahaan mengukur pesangon pada saat pengakuan awal, dan mengukur dan mengakui perubahan selanjutnya, sesuai dengan sifat imbalan kerja.

o. Pengaturan Bersama

Perusahaan mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai:

1) Operasi Bersama

Merupakan pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset dan kewajiban terhadap liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut operator bersama.

Operator bersama mengakui hal berikut terkait dengan kepentingannya dalam operasi bersama:

- (a) Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- (b) Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

The Company not only record for its legal obligation under the formal terms of a defined benefit plan, but also for any constructive obligation that arises from the entity's informal practices.

Current service cost, past service cost and gain or loss on settlement, and net interest on the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss.

The remeasurement of the net defined benefit liabilities (assets) comprises actuarial gains and losses, the return on plan assets and any change in effect of the asset are recognized in other comprehensive income.

Termination Benefits

The Company recognizes liability and expense for termination benefits at the earlier of the following dates:

- a. When the Company no longer can withdraw the offer of those benefits; and
- b. When the Company recognizes constructive of liabilities within the scope of PSAK 237 ("provisions, contingent liabilities and contingent assets") and involves payment of termination benefits.

The Company measures termination benefits on initial recognition, and measures and recognizes subsequent changes, in accordance with the nature of the employee benefits.

o. Joint Arrangement

The Company classifies joint arrangement as:

1) Joint Operation

Represents joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets, and obligations for the liabilities, relating to the arrangement. Those parties are called joint operator.

A joint operator recognizes in relation to its interest in a joint operation:

- (a) Assets, including its share of any assets held jointly;
- (b) Liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- (c) Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- (d) Bagian atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- (e) Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

2) Ventura Bersama

Perusahaan mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai ventura bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Para pihak tersebut disebut sebagai ventura bersama.

Ventura bersama mengakui kepentingannya dalam ventura bersama sebagai investasi dan mencatat investasi tersebut dengan menggunakan metode ekuitas.

Dalam akuntansi metode ekuitas, kepentingan dalam ventura bersama diakui pada biaya perolehan dan disesuaikan selanjutnya untuk mengakui bagian Perusahaan atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain pasca perolehan. Ketika bagian Perusahaan atas rugi dalam ventura bersama sama dengan atau melebihi kepentingannya dalam ventura bersama (dimana termasuk kepentingan jangka panjang, dalam substansinya membentuk bagian dari investasi bersih Perusahaan dalam ventura bersama), Perusahaan tidak mengakui kerugian selanjutnya, kecuali telah menjadi kewajiban atau telah melakukan pembayaran atas nama ventura bersama.

Keuntungan yang belum terealisasi atas transaksi antara Perusahaan dan ventura bersama dieliminasi sebesar kepentingan Perusahaan dalam ventura bersama. Kerugian yang belum terealisasi juga dieliminasi kecuali transaksi tersebut memberikan bukti adanya penurunan nilai aset yang dialihkan. Kebijakan akuntansi ventura bersama telah diubah jika diperlukan untuk memastikan konsistensi dari kebijakan yang diterapkan oleh Perusahaan.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- (c) Revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;
- (d) Share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and
- (e) Expenses, including its share of any expenses incurred jointly.

2) Joint Venture

The Company classifies joint arrangement as a joint venture whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Those parties are called joint venturers.

A joint venture recognizes its interest in a joint venture as an investment and account for that investment using the equity method.

Under the equity method of accounting, interests in joint ventures are initially recognized at cost and adjusted thereafter to recognize the Company's share of profits or losses and other comprehensive income post acquisition. When the Company's share of losses in a joint venture equals or exceeds its interests in the joint ventures (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Company's net investment in the joint ventures), the Company does not recognize further losses, unless it has incurred obligations or made payments on behalf of the joint ventures.

Unrealized gains on transactions between the Company and its joint ventures are eliminated to the extent of the Company's interest in the joint ventures. Unrealized losses are also eliminated unless the transaction provides evidence of an impairment of the asset transferred. Accounting policies of the joint ventures have been changed where necessary to ensure consistency with the policies adopted by the Company.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

p. Sewa

Pada tanggal insepisi kontrak, Perusahaan menilai apakah kontrak merupakan, atau mengandung sewa. Suatu kontrak merupakan atau mengandung sewa jika kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

Untuk menilai apakah kontrak memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasi selama suatu jangka waktu, Perusahaan menilai apakah selama periode penggunaan, Perusahaan memiliki dua hal berikut:

- (a) Hak untuk mendapatkan secara substansial seluruh manfaat ekonomi dari penggunaan aset identifikasi; dan
- (b) Hak untuk mengarahkan penggunaan aset identifikasi, yaitu hanya jika:
 - (i) Perusahaan memiliki hak untuk mengarahkan bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan selama periode penggunaan; atau
 - (ii) Keputusan yang relevan tentang bagaimana dan untuk tujuan apa aset digunakan telah ditentukan sebelumnya dan:
 - Perusahaan memiliki hak mengoperasikan aset (atau mengarahkan pihak lain untuk mengoperasikan aset dengan cara yang telah ditentukan) selama periode penggunaan, tanpa pemasok memiliki hak untuk mengubah instruksi operasi tersebut; atau
 - Perusahaan mendesain aset (atau aspek tertentu dari aset) dengan cara menetapkan sebelumnya bagaimana dan untuk tujuan apa aset akan digunakan selama periode penggunaan

Perusahaan sebagai Lessee:

Perusahaan menerapkan satu pendekatan pengakuan dan pengukuran bagi seluruh sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Perusahaan mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak guna yang merupakan hak untuk menggunakan aset pendasar.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

p. Leases

At inception of a contract, the Company shall assess whether the contract is, or contains, a lease. A contract is, or contains, a lease if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

To assess whether a contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time, the Company shall assess whether, throughout the period of use, the Company has both of the following:

- (a) The right to obtain substantially all of the economic benefits from use of the identified asset; and*
- (b) The right to direct the use of the identified asset, only if either:*
 - (i) The Company has the right to direct how and for what purpose the asset is used throughout the period of use; or*
 - (ii) The relevant decisions about how and for what purpose the asset is used are predetermined and:*
 - The Company has the right to operate the asset (or to direct others to operate the asset in a manner that it determines) throughout the period of use, without the supplier having the right to change those operating instructions; or*
 - The Company designed the asset (or specific aspects of the asset) in a way that predetermines how and for what purpose the asset will be used throughout the period of use.*

The Company as Lessee:

The Company applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Company recognizes lease liabilities to make lease payments and right of use assets representing the the right to use the underlying assets.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Aset Hak Guna

Perusahaan mengakui aset hak guna pada tanggal dimulainya sewa (yaitu tanggal aset tersedia untuk digunakan). Aset hak guna diukur pada harga perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak guna mencakup jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung yang timbul diawal, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal mulai dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak guna disusutkan dengan metode garis lurus selama periode yang lebih pendek antara sewa dan estimasi masa manfaat aset.

Jika kepemilikan aset sewa beralih ke Perusahaan pada akhir masa sewa atau biaya perolehan mencerminkan pelaksanaan opsi beli, penyusutan dihitung dengan menggunakan estimasi masa manfaat aset.

Liabilitas Sewa

Pada tanggal dimulainya sewa, Perusahaan mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa. Pembayaran sewa mencakup pembayaran tetap.

Dalam menghitung nilai kini pembayaran sewa, Perusahaan menggunakan tingkat bunga implisit dalam sewa.

Sewa Jangka Pendek dan Sewa Aset Bernilai Rendah

Perusahaan menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa bangunan (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang, dari tanggal permulaan dan tidak mengandung opsi beli). Hal ini juga berlaku untuk pengecualian pengakuan sewa aset bernilai rendah untuk sewa bangunan yang dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Right of Use Assets

The Company recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (i.e., the date underlying assets is available for use). Right-of-use assets are measure at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, intital direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straght-line basis over the shorter period of the lease term and the estimated useful lives of the assets.

If ownership of the leased assets transfers to the Company at the end of the lease term or the cost reflects to exercise of a purchase option, depreciation is calculated using the estimated useful life of the assets.

Lease Liabilities

At the commencement date of the lease, the Company recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term. The lease payments include fixed payments.

In calculating the present value of lease payments, the Company uses its interest rate implicit in the lease.

Short-Term Leases and Leases of Low-Value Assets

The Company applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases of buildings and infrastructures (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). It also applies the lease of low-values assets recognition exemption to leases of buildings and infrastructures that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.

3. Sumber Ketidakpastian Estimasi dan Pertimbangan Akuntansi Penting

Penyusunan laporan keuangan dilakukan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dimana Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia tersebut mengharuskan Manajemen untuk membuat estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah aset dan liabilitas yang dilaporkan dan pengungkapan aset dan liabilitas kontingen pada tanggal laporan keuangan, serta jumlah pendapatan dan beban selama periode pelaporan. Estimasi, asumsi dan penilaian tersebut dievaluasi secara terus menerus dan berdasarkan pengalaman historis dan faktor-faktor lainnya, termasuk harapan akan terjadi atau tidak terjadinya peristiwa di masa mendatang.

Perusahaan telah mengidentifikasi kebijakan akuntansi penting berikut dimana dibutuhkan pertimbangan, estimasi dan asumsi signifikan yang dibuat dan dimana hasil aktual dapat berbeda dari estimasi tersebut berdasarkan asumsi dan kondisi yang berbeda dan dapat mempengaruhi secara material hasil keuangan atau posisi keuangan yang dilaporkan dalam tahun mendatang.

Rincian lebih lanjut mengenai sifat dari asumsi-asumsi dan kondisi-kondisi tersebut dapat ditemukan dalam catatan yang relevan atas laporan keuangan.

Kepentingan dalam Pengaturan Bersama

Pertimbangan diperlukan untuk menentukan ketika Perusahaan memiliki pengendalian bersama, yang membutuhkan penilaian mengenai aktivitas yang relevan dan ketika keputusan yang berkaitan dengan aktivitas tersebut membutuhkan persetujuan dengan suara bulat. Perusahaan menentukan bahwa aktivitas yang relevan untuk pengaturan bersama adalah aktivitas yang berkaitan dengan operasi dan pengambilan keputusan dalam pengaturan tersebut.

Pertimbangan juga diperlukan untuk mengklasifikasikan pengaturan bersama sebagai pengendalian bersama atau ventura bersama. Pengklasifikasian pengaturan tersebut mengharuskan Perusahaan untuk menilai hak dan kewajiban yang timbul dari pengaturan tersebut.

3. Source of Estimation Uncertainty and Critical Accounting Judgements

The preparation of financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires Management to make estimates and assumptions that impact the reported amounts of assets and liabilities and disclosure of contingent assets and liabilities at the date of the financial statements, and also the amounts of revenue and expenses during the reporting period. Estimations, assumptions and judgements are continually evaluated and are based on historical experience and other factors, including expectations of the occurrence of future events.

The Company has identified the following critical accounting policies under which significant judgements, estimates and assumptions are made and where actual results may differ from these estimates under different assumptions and conditions and may materially affect financial results or the financial position reported in future years.

Further details of the nature of these assumptions and conditions may be found in the relevant notes to the financial statements.

Interest in Joint Arrangements

Judgement is required to determine when the Company have joint control, which requires an assessment of the relevant activities and when the decisions in relation to those activities require unanimous consent. The Company have determined that the relevant activities for its joint arrangements are those relating to the operating and capital decisions of the arrangement.

Judgement is also required to classify a joint arrangement as either a joint operation or a joint venture. Classifying the arrangement requires the Company to assess its rights and obligations arising from the arrangement.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

Secara khusus, Perusahaan mempertimbangkan:

- a. Struktur dari pengaturan bersama - apakah dibentuk melalui kendaraan terpisah.
- b. Ketika pengaturan tersebut terstruktur melalui kendaraan terpisah, Perusahaan juga mempertimbangkan hak dan kewajiban yang timbul dari:
 - Bentuk legal dari kendaraan terpisah;
 - Persyaratan dari perjanjian kontraktual;
 - Fakta dan kondisi lain (ketika relevan).

Penilaian ini sering membutuhkan pertimbangan yang signifikan, dan kesimpulan yang berbeda mengenai pengendalian bersama dan apakah pengaturan tersebut merupakan operasi bersama atau ventura bersama, dapat memiliki dampak material terhadap akuntansi.

Sumber Ketidakpastian Estimasi

Asumsi utama mengenai masa depan dan sumber estimasi lainnya pada akhir periode pelaporan, yang memiliki risiko signifikan yang mengakibatkan penyesuaian material terhadap jumlah tercatat aset dan liabilitas dalam periode pelaporan berikutnya dijelaskan dibawah ini:

Pengakuan Pendapatan Kontrak

Perusahaan mengakui pendapatan kontrak yang masih dalam proses berdasarkan metode persentase penyelesaian. Tahap penyelesaian diukur berdasarkan proporsi biaya kontrak yang terjadi untuk pekerjaan yang dilaksanakan sampai tanggal perhitungan dibandingkan dengan estimasi total biaya kontrak sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dijelaskan dalam Catatan 2. Asumsi yang penting diperlukan adalah dalam menentukan tahap penyelesaian (persentase penyelesaian) dan jumlah estimasi pendapatan. Pendapatan kontrak diungkapkan dalam Catatan 25.

Imbalan Pascakerja

Penentuan liabilitas imbalan pascakerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah liabilitas tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain tingkat diskonto

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Specifically, the Company considers:

- a. The structure of the joint arrangement - whether it is structured through a separate vehicle.
- b. When the arrangement is structured through a separate vehicle, the Company also considers the rights and obligations arising from:
 - The legal form of the separate vehicle;
 - The terms of the contractual arrangement;
 - Other facts and circumstances (when relevant).

This assessment often requires significant judgement and a different conclusion on joint control and also whether the arrangement is a joint operation or a joint venture, may materially impact the accounting.

Sources of Estimation Uncertainty

The key assumptions concerning future and other key sources of estimation at the end of the reporting period, which have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year, are discussed below:

Contract Revenue Recognition

The Company recognizes contract revenues still in progress based on a percentage of completion method. The stage of completion is measured based on the proportion of contract costs incurred for work performed to the calculation date compared to the estimated total contract costs based on the accounting policies described in Note 2. Important assumptions are required in determining the stage of completion (percentage of completion) and the amount of the estimated income. Contract revenue is disclosed in Note 25.

Post-employment Benefits

The determination of the post-employment benefits obligation is dependent on the selection of certain assumptions used by actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

dan tingkat kenaikan gaji. Realisasi yang berbeda dari asumsi Perusahaan diakumulasi dan diamortisasi selama periode mendatang dan akibatnya akan berpengaruh terhadap jumlah biaya serta liabilitas yang diakui di masa mendatang. Walaupun asumsi Perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada kenyataannya atau perubahan signifikan dalam asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap liabilitas imbalan pascakerja Perusahaan.

Asumsi yang digunakan untuk perhitungan liabilitas imbalan pascakerja diungkapkan dalam Catatan 21.

Taksiran Masa Manfaat Ekonomis Aset Tetap

Masa manfaat setiap aset tetap Perusahaan ditentukan berdasarkan kegunaan yang diharapkan dari aset tersebut. Estimasi ini ditentukan berdasarkan evaluasi teknis internal dan pengalaman atas aset sejenis. Masa manfaat setiap aset direviu secara periodik dan disesuaikan apabila prakiraan berbeda dengan estimasi sebelumnya karena keusangan fisik, teknis dan komersial, hukum atau keterbatasan lainnya atas pemakaian aset.

Namun terdapat kemungkinan bahwa hasil operasi dimasa mendatang dapat dipengaruhi secara signifikan oleh perubahan atas jumlah serta periode pencatatan biaya yang diakibatkan karena perubahan faktor yang disebutkan di atas.

Perubahan masa manfaat aset tetap dapat mempengaruhi jumlah beban penyusutan yang diakui dan penurunan nilai tercatat aset tersebut.

Nilai tercatat aset tetap diungkapkan dalam Catatan 13.

Nilai Wajar Aset Tetap yang Menggunakan Model Revaluasi

Dalam proses revaluasi aset, manajemen, dengan bantuan penilai publik independen, menentukan data dan asumsi, menelaah metode penilaian serta berdiskusi dengan penilai. Pendekatan dan metode yang digunakan dalam melakukan revaluasi tergantung pada kelas aset. Walaupun data dan asumsi Perusahaan dianggap tepat dan wajar, namun perubahan signifikan pada data

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

rate and rate of salary increase. Actual results that differ from the Company assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Company assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the Company post-employment benefit obligations.

Assumptions used in the calculation of post-employment benefit obligations are disclosed in Note 21.

Estimated Useful Life of Fixed Assets

The useful life of each item of the Company's fixed assets are estimated based on the period over which the asset is expected to be available for use. Such estimation is based on internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful life of each asset is reviewed periodically and updated if expectations differ from previous estimates due to physical, technical, commercial, legal obsolescence or other limitation on the use of the asset.

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the amounts and timing of recorded expenses brought about by changes in the factors mentioned above.

A change in the estimated useful life of any item of fixed assets would affect the recorded depreciation expense and the carrying amounts of fixed assets.

The carrying amounts of fixed assets are disclosed in Note 13.

Fair Value of Fixed Assets that Use the Revaluation Model

In the process of asset revaluation, management, with the assistance of an independent public valuer, determines the data inputs and assumptions, assesses valuation methods, and holds discussions with the valuers as part of the valuation process. The approaches and methods used in the revaluation depend on the asset class. While it is believed that the Company's data

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

input atau asumsi yang digunakan dapat berpengaruh secara signifikan terhadap nilai aset yang menggunakan model revaluasi.

Rincian dari pendekatan dan data input signifikan yang digunakan dalam melakukan revaluasi aset tetap diungkapkan dalam Catatan 13.

Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Perusahaan menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK 109 "Instrumen Keuangan" dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Perusahaan.

Perpajakan

Pertimbangan signifikan dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan pajak tertentu yang penentuan akhirnya adalah tidak pasti dalam kegiatan usaha normal. Perusahaan mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Ketika hasil pajak yang dikeluarkan berbeda dengan jumlah yang awalnya diakui, perbedaan tersebut akan berdampak pada pajak penghasilan dan penyisihan pajak tangguhan pada periode di mana penentuan tersebut dilakukan.

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan. Penentuan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui berdasarkan perbedaan waktu dan laba fiskal di masa mendatang bersama sama dengan strategi perencanaan pajak masa depan membutuhkan pertimbangan signifikan dari manajemen.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

and assumptions are reasonable and appropriate, significant changes in data inputs or significant changes in assumptions may materially affect the value of assets that use the revaluation model.

Details of the valuation approach and significant data inputs used in the revaluation of fixed assets are disclosed in Note 13.

Classification of Financial Assets and Financial Liabilities

The Company determine the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 109 "Financial Instrument". Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the Company's accounting policies.

Taxation

Significant judgment is involved in determining the provision for income taxes. There are certain transactions and computations for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business. The Company's recognizes liabilities for expected tax issues based on estimates of whether additional taxes will be due. Where the final tax outcome of these matters is different from the amounts that were initially recognized, such differences will impact the income tax and deferred tax provisions in the period in which such determination is made.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences. The determination of the amount of deferred tax assets that can be recognized based upon the likely timing and level of future taxable profits together with future tax planning strategies required significant management judgment.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. Kas dan Bank

	2024	2023
	Rp	Rp
Kas	75,591,375	52,173,875
Bank		
Pihak Berelasi (Catatan 32)		
Rupiah		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	37,110,561,746	36,394,061,263
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5,387,965,974	177,174,645
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,854,051,785	2,853,674,897
USD		
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2,056,916,884	3,195,930,424
Subjumlah	47,409,496,389	42,620,841,229
Pihak Ketiga		
Rupiah		
PT Bank KB Bukopin Tbk	--	90,899,077
Jumlah Bank	47,409,496,389	42,711,740,306
Jumlah Kas dan Bank	47,485,087,764	42,763,914,181

4. Cash on Hand and in Banks

Cash	
Bank	
Related Parties (Note 32)	
Rupiah	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	
USD	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	
Subtotal	
Third Parties	
Rupiah	
PT Bank KB Bukopin Tbk	
Total Banks	
Total Cash on Hand and in Banks	

5. Piutang Usaha

	2024	2023
	Rp	Rp
Pihak Berelasi (Catatan 32)		
Piutang Usaha Jasa Konsultasi	11,683,894,743	18,090,626,662
<i>Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha Jasa Konsultasi</i>	<i>(762,921,342)</i>	<i>(729,883,679)</i>
Subjumlah	10,920,973,401	17,360,742,983
Pihak Ketiga		
Piutang Usaha Jasa Konsultasi	19,458,602,278	6,985,595,811
Piutang Dagang	663,959,132	1,087,712,102
<i>Dikurangi: Cadangan Kerugian Penurunan Nilai Piutang Usaha Jasa Konsultasi</i>	<i>(2,073,628,344)</i>	<i>(1,802,646,083)</i>
Subjumlah	18,048,933,066	6,270,661,830
Jumlah	28,969,906,467	23,631,404,813

5. Account Receivables

Related Parties (Note 32)	
Consulting Service Receivables	
Less: Allowance for Impairment	
Losses of Consulting Service Receivables	
Subtotal	
Third Parties	
Consulting Service Receivables	
Trade Receivables	
Less: Allowance for Impairment	
Losses of Consulting Service Receivables	
Subtotal	
Total	

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Analisis piutang usaha berdasarkan jatuh temponya adalah sebagai berikut:

Analysis of account receivables by maturity are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Jatuh Tempo			<i>Past Due</i>
1 bulan - 6 bulan	19,779,126,882	19,124,649,652	<i>1 up to 6 months</i>
> 6 bulan - 12 bulan	4,361,914,689	312,560,637	<i>> 6 up to 12 months</i>
> 12 bulan	7,665,414,582	6,726,724,286	<i>>12 months</i>
Jumlah	31,806,456,153	26,163,934,575	Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha jasa konsultasi adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses of consulting services receivables are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	2,532,529,762	2,049,805,541	<i>Beginning Balance</i>
Penambahan	304,019,924	482,724,221	<i>Addition</i>
Saldo Akhir	2,836,549,686	2,532,529,762	Ending Balance

Manajemen berpendapat bahwa tidak terdapat risiko yang terkonsentrasi secara signifikan atas piutang usaha.

The management believes that there is no significant risk concentrated in accounts receivables.

Manajemen berpendapat penyisihan penurunan nilai tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian kredit ekspektasi piutang usaha.

Management believes that the allowance for impairment in value is adequate to cover the possibility expected credit loss of account receivables.

6. Piutang Lain-lain

6. Other Receivables

	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 32)	18,206,766,538	30,459,148,752	<i>Related Parties (Note 32)</i>
Pihak Ketiga	2,174,110,248	2,331,817,943	<i>Third Parties</i>
Jumlah	20,380,876,786	32,790,966,695	Total

Piutang lain-lain merupakan pinjaman dan biaya operasi bersama yang dibayarkan terlebih dahulu oleh Perusahaan kepada konsorsium. Piutang lain-lain tidak dikenakan bunga. Piutang ini tidak memiliki jaminan dan akan dilunasi pada saat diminta.

Other receivables represent loans and joint operating expenses paid in advance by the Company to consortium. Other receivables are not subject to interest. This receivable is unsecured and will be repaid upon request.

Manajemen Perusahaan berpendapat bahwa tidak terdapat perubahan signifikan terhadap kualitas kredit dan jumlah tersebut masih dapat dipulihkan sehingga tidak diadakan penyisihan penurunan nilai.

The Company's management believes that there was no significant change in credit quality and the amount can still be recovered so it is not held allowance for impairment.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa

7. Gross Amount Due from Customers

	2024 Rp	2023 Rp
Pihak Berelasi (Catatan 32)	68,639,933,405	54,220,033,105
<i>Dikurangi: Cadangan Kerugian</i>		
Penurunan Nilai	(5,405,343,225)	(3,808,805,809)
Subjumlah Pihak Berelasi - Bersih	63,234,590,180	50,411,227,296
Pihak Ketiga	28,184,608,445	28,445,575,859
<i>Dikurangi: Cadangan Kerugian</i>		
Penurunan Nilai	(2,514,634,037)	(3,969,206,913)
Subjumlah Pihak Ketiga - Bersih	25,669,974,408	24,476,368,946
Jumlah - Bersih	88,904,564,588	74,887,596,242

Related Parties (Note 32)
Less: Allowance for Impairment
Losses
Subtotal Related Parties - Net

Third Parties
Less: Allowance for Impairment
Losses
Subtotal Third Parties - Net

Total - Net

Tagihan bruto pemberi jasa adalah jasa konsultasi yang telah diberikan Perusahaan kepada pemberi kerja namun belum dapat ditagihkan.

Gross amount due from customers are consulting services the Company that has been given to the employer but not yet charged.

Analisis tagihan bruto pemberi jasa berdasarkan umurnya sejak pengakuan pendapatan adalah sebagai berikut:

Analysis of gross amount due from customers by the age since revenue recognition are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
< 6 bulan	68,065,242,969	45,520,623,467
> 6 bulan - 12 bulan	8,363,010,015	17,535,990,979
>12 bulan	20,396,288,866	19,608,994,518
Jumlah	96,824,541,850	82,665,608,964

< 6 months
> 6 up to 12 months
>12 months
Total

Mutasi cadangan kerugian penurunan nilai tagihan bruto kepada pengguna jasa adalah sebagai berikut:

The movements of allowance for impairment losses of gross amount due from customers are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp
Saldo Awal	7,778,012,722	7,413,169,859
Penambahan	141,964,540	364,842,863
Saldo Akhir	7,919,977,262	7,778,012,722

Beginning Balance
Addition
Ending Balance

Manajemen berpendapat penyisihan penurunan nilai tersebut cukup untuk menutup kemungkinan kerugian kredit ekspektasian tagihan bruto pemberi jasa.

Management believes that the allowance for impairment in value is adequate to cover the possibility expected credit loss of gross amount due from customers.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. Uang Muka dan Jaminan

8. Advances and Guarantee

	2024 Rp	2023 Rp	
Jaminan Proyek	3,000,000,000	--	Project Guarantee
Panjar Kerja	182,002,617	587,467,661	Temporary of Payment
Lainnya	125,330,000	107,630,000	Others
Jumlah	3,307,332,617	695,097,661	Total

9. Biaya Dibayar di Muka

9. Prepaid Expenses

	2024 Rp	2023 Rp	
Sewa Dibayar di Muka	183,006,642	230,054,528	Prepaid Rent
Lainnya	155,816,305	54,880,206	Others
Jumlah	338,822,947	284,934,734	Total

10. Perpajakan

10. Taxes

a. Pajak Dibayar di Muka

a. Prepaid Taxes

	2024 Rp	2023 Rp	
Pajak Penghasilan:			Income Tax:
PPH Pasal 23	3,544,415	2,888,510	Article 23
PPH Pasal 21	--	145,585	Article 21
Jumlah	3,544,415	3,034,095	Total

b. Utang Pajak

b. Tax Payables

	2024 Rp	2023 Rp	
Pajak Pertambahan Nilai	2,831,682,859	2,635,818,359	Value Added Tax
Pajak Penghasilan:			Income Tax:
Pasal 21	726,405,890	503,948,023	Article 21
Pasal 23	105,893,791	24,869,250	Article 23
Pasal 4 (2)	859,610,164	1,026,520,467	Article 4 (2)
Jumlah	4,523,592,704	4,191,156,099	Total

c. Beban Pajak Final

Jumlah beban pajak final untuk tahun 2024 dan 2023 adalah sebesar Rp5.985.221.858 dan Rp5.012.945.450.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 51 tanggal 20 Juli 2008 yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2008 tentang pajak penghasilan dari usaha konsultasi, semua pendapatan perusahaan jasa konsultasi dikenakan pajak final.

c. Final Tax Expenses

Total final tax expense for 2024 and 2023 was Rp5,985,221,858 and Rp5,012,945,450, respectively.

Based in the Government Regulation No. 51 dated July 20, 2008 which effective on January 1, 2008 concerning to income tax from consulting services, all revenue from consulting service companies is subject to final tax.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

d. Pajak Tangguhan
 Jumlah liabilitas pajak tangguhan pada
 31 Desember 2024 dan 2023 masing-
 masing sebesar Rp1.159.582.525.

d. *Deferred Tax*
Total deferred tax liabilities on
December 31, 2024 and 2023 amounted
to Rp1,159,582,525, respectively.

11. Penugasan Jasa Konsultan dalam Pelaksanaan

11. Assignment of Consulting Services in Execution

Penugasan jasa konsultan dalam pelaksanaan merupakan beban kontrak yang ditangguhkan atas proyek-proyek yang dalam persiapan, yang akan dibebankan sebagai beban kontrak pada saat proyek tersebut dilaksanakan.

Assignment of consulting services in execution are contract deferred charges of the projects' preparation, which will be charged as expense when the project contract is executed.

	2024 Rp	2023 Rp	
Umum dan Administrasi	168,012,133	559,598,362	General and Administration
Perjalanan Dinas	135,672,572	403,859,679	Official Travel
Kendaraan	31,098,855	31,892,031	Transportation
Pemasaran	12,950,000	194,093,424	Marketing
Pegawai	--	566,023,160	Employee
Jumlah	347,733,560	1,755,466,656	Total

12. Investasi pada Ventura Bersama

12. Investments in Joint Ventures

Rincian investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

The details of investments in joint ventures are as follows:

Nama Ventura Bersama/ Name of Joint Venture	Nama Proyek/ Name of Project	(%)	2024 Rp	2023 Rp
IKA W1 - MEC - BEC	Supervisi Konstruksi Pembangunan Bendungan Lolak di Kabupaten Bolaang Mongondow	100	--	1,006,634,094
Lain-lain (dibawah Rp250 juta) Others (below Rp250 million)			1,570,203,113	3,980,660,473
Jumlah/ Total			1,570,203,113	4,987,294,567

Mutasi saldo investasi pada ventura bersama adalah sebagai berikut:

Mutation of investments in joint ventures are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Saldo Awal	4,987,294,567	12,637,733,345	Beginning Balance
Pengurangan	(4,477,286,452)	(9,336,629,963)	Deduction
Bagian Laba Tahun Berjalan	1,060,194,998	1,686,191,185	Share of Profit in for the Year
Saldo Akhir	1,570,203,113	4,987,294,567	Ending Balance

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

13. Aset Tetap

13. Fixed Assets

2024											
	Saldo Awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Reklasifikasi/ Reclassification	Saldo akhir/ Ending balance						
Diukur pada Metode Revaluasi						Measured at Revaluation Method					
Pemilikan Langsung						Direct Ownership					
Tanah	129,376,785,000	--	--	--	129,376,785,000	Land					
Diukur pada Metode Biaya						Measured at Cost Method					
Harga Perolehan						Acquisition Cost					
Pemilikan Langsung						Direct Ownership					
Bangunan	7,903,575,247	--	--	446,834,807	8,350,410,054	Buildings					
Kendaraan	6,999,173,117	--	--	--	6,999,173,117	Vehicles					
Peralatan Kantor	10,263,481,679	39,027,028	--	--	10,302,508,707	Office Equipments					
Peralatan Survei dan						Survey and					
Investigasi	1,504,761,317	--	--	--	1,504,761,317	Investigation Equipments					
Pembangunan Gedung						Construction in					
dalam Pelaksanaan	962,844,594	--	114,527,805	(446,834,807)	401,481,982	Progress-buildings					
Jumlah	157,010,620,954	39,027,028	114,527,805	--	156,935,120,177	Total					
Pemilikan Langsung						Direct Ownership					
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation					
Bangunan	2,635,140,893	404,561,417	--	--	3,039,702,310	Buildings					
Kendaraan	5,661,390,273	329,128,649	--	--	5,990,518,922	Vehicles					
Peralatan Kantor	8,553,492,941	627,404,022	--	--	9,180,896,963	Office Equipments					
Peralatan Survei dan						Survey and					
Investigasi	848,705,368	128,034,972	--	--	976,740,340	Investigation Equipments					
Jumlah	17,698,729,475	1,489,129,060	--	--	19,187,858,535	Total					
Nilai Tercatat	139,311,891,479				137,747,261,642	Carrying Value					
2023											
	Saldo Awal/ Beginning balance	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deduction	Revaluasi/ Revaluation	Saldo akhir/ Ending balance						
Diukur pada Metode Revaluasi						Measured at Revaluation Method					
Pemilikan Langsung						Direct Ownership					
Tanah	127,940,230,000	--	--	1,436,555,000	129,376,785,000	Land					
Diukur pada Metode Biaya						Measured at Cost Method					
Harga Perolehan						Acquisition Cost					
Pemilikan Langsung						Direct Ownership					
Bangunan	6,203,302,823	1,700,272,424	--	--	7,903,575,247	Buildings					
Kendaraan	6,999,173,117	9,000,000	--	--	6,999,173,117	Vehicles					
Peralatan Kantor	9,797,113,202	466,368,477	--	--	10,263,481,679	Office Equipments					
Peralatan Survei dan						Survey and					
Investigasi	1,504,761,317	--	--	--	1,504,761,317	Investigation Equipments					
Pembangunan Gedung						Construction in					
dalam Pelaksanaan	256,571,355	706,273,239	--	--	962,844,594	Progress-buildings					
Jumlah	152,692,151,814	2,881,914,140	--	1,436,555,000	157,010,620,954	Total					
Pemilikan Langsung						Direct Ownership					
Akumulasi Penyusutan						Accumulated Depreciation					
Bangunan	2,268,083,375	367,057,518	--	--	2,635,140,893	Buildings					
Kendaraan	4,901,036,032	760,354,241	--	--	5,661,390,273	Vehicles					
Peralatan Kantor	7,790,810,970	762,681,971	--	--	8,553,492,941	Office Equipments					
Peralatan Survei dan						Survey and					
Investigasi	725,774,563	122,930,805	--	--	848,705,368	Investigation Equipments					
Jumlah	15,685,704,940	2,013,024,535	--	--	17,698,729,475	Total					
Nilai Tercatat	137,006,446,874				139,311,891,479	Carrying Value					

Beban penyusutan pada tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp1.489.129.060 dan Rp2.013.024.535 seluruhnya dibebankan sebagai beban usaha (Catatan 28).

Depreciation expense in 2024 and 2023 amounting to Rp1,489,129,060 and Rp2,013,024,535, respectively are fully charged as operating expenses (Note 28).

Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan penilaian kembali atas nilai wajar aset tetap, yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Penilaian, dengan nilai wajar tanah sebesar Rp129.376.785.000 sehingga terdapat surplus revaluasi sebesar Rp1.436.555.000.

In 2023, the Company performs revaluation of the fair value of its fixed assets which is performed by Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktorat Jenderal Kekayaan Negara Direktorat Penilaian in the report, with the fair value of land amounted to Rp129,376,785,000 so there was a surplus revaluation amounted to Rp1,436,555,000.

Biaya perolehan aset tetap yang telah disusutkan penuh dan masih digunakan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp10.668.214.387.

Acquisition cost of property and equipment which were fully depreciated and still used by the Company on December 31, 2024 and 2023 amounted to Rp10,668,214,387, respectively.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Nilai wajar tanah dihitung menggunakan pendekatan nilai pasar mempertimbangkan penjualan dari aset sejenis atau pengganti dan data pasar yang terkait serta menghasilkan estimasi nilai melalui proses perbandingan.

The fair value of land is calculated using the market value approach considering sales of similar or replacement assets and related market data and generates an estimate of value through a comparison process.

14. Aset Hak Guna

14. Right of Use Assets

	2024 Rp	2023 Rp	
Aset Hak Guna			Right of Use Assets
Bangunan	36,307,030,562	36,307,030,562	Buildings
Akumulasi Penyusutan			Accumulated Depreciation
Bangunan	6,529,364,281	4,797,970,691	Buildings
Jumlah	29,777,666,281	31,509,059,871	Total

Beban penyusutan pada tahun 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp1.731.393.590 dan Rp875.228.802 seluruhnya dibebankan sebagai beban usaha (Catatan 28).

Depreciation expense in 2024 and 2023 amounting to Rp1,731,393,590 and Rp875,228,802, respectively are fully charged as operating expenses (Note 28).

15. Utang Bank

15. Bank Loan

	2024 Rp	2023 Rp	
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,248,557,534	4,998,557,534	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk

Perusahaan menandatangani perjanjian fasilitas Kredit Modal Kerja dengan maksimum *Credit Overeencomst* (CO) PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Perjanjian telah mengalami perubahan terakhir pada tanggal 24 Juli 2024 berdasarkan Akta Notaris Meri Efda, S.H. Notaris di Jakarta, No. 146. Perpanjangan jangka waktu fasilitas Kredit Modal Kerja sampai dengan tanggal 30 Juli 2025.

The Company entered into an agreement of Working Capital Loan with maximum Credit Overeencomst (CO) with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. The agreement has been amended on July 24, 2024 based on deed No. 146 of Meri Efda, S.H., Notary in Jakarta. Extension of the overdraft loan facility due until July 30, 2025.

Fasilitas yang diberikan Fasilitas Kredit Modal dengan maksimum *Credit Overeencomst* (CO), dengan limit maksimal Rp5.000.000.000, dengan tingkat suku bunga sebesar 10,20% per tahun.

Facilities provided by Limited Working Capital Credit Facility with maximum Credit Overeencomst (CO), with a maximum limit of Rp5,000,000,000, with an interest rate of 10.20% per year.

Pinjaman tersebut dijamin dengan sebidang tanah hak guna bangunan seluas 1.104 m² yang terletak di dalam provinsi Jawa Timur, Kota Malang, Jalan Janti Barat Nomor 27.

The loan is guaranteed by land with building rights with an area of 1,104 sqm, which is located in the province of East Java, Malang City, Jalan Janti Barat Number 27.

Perusahan diharuskan mematuhi beberapa batasan, dan melaksanakan seperti:

Companies are required to comply with several restrictions, and carry out such as:

- Menyalurkan secara aktif mutasi keuangan minimal 80%

- Actively distribute financial mutations of at least 80%

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- Telah melunasi kewajiban fiskal yang menjadi kewajiban
- Pada tanggal 31 Desember 2024, Perusahaan telah memenuhi syarat dan kondisi pinjaman.

- Has paid off the fiscal obligations
- As of December 31, 2024, the Company has complied with the terms and conditions of the loans.

16. Utang Usaha		16. Account Payables	
	2024 Rp	2023 Rp	
Subkonsultasi	12,677,582,118	13,590,417,163	Subconsultants
Asosiasi	3,044,066,186	2,752,597,494	Association
Pemasok	362,204,404	578,771,550	Suppliers
Jumlah	16,083,852,708	16,921,786,207	Total

17. Uang Muka dari Pelanggan		17. Advance From Customers	
	2024 Rp	2023 Rp	
Pihak Berelasi (Catatan 32)	14,899,898,089	22,283,229,506	Related Parties (Note 32)
Pihak Ketiga	6,025,126,393	3,216,211,638	Third Parties
Jumlah	20,925,024,482	25,499,441,144	Total
Dikurangi: Bagian Jangka Pendek	18,097,429,898	19,733,879,514	Less: Short Term Portion
Bagian Jangka Panjang	2,827,594,584	5,765,561,630	Long Term Portion

18. Biaya yang Masih Harus Dibayar		18. Accrued Expenses	
	2024 Rp	2023 Rp	
Biaya Proyek Kerjasama Operasi	30,591,602,771	29,414,758,367	Project Expense of Joint Ventures
Cadangan Penyelesaian Proyek	6,539,564,827	7,488,138,816	Reserve for Completion Project
Gaji dan Honorarium	6,081,713,267	2,789,843,118	Salaries and Honorarium
Lainnya	36,704,456	815,351,352	Others
Jumlah	43,249,585,321	40,508,091,653	Total

19. Liabilitas Lainnya		19. Other Liabilities	
	2024 Rp	2023 Rp	
Jangka Pendek	24,756,265,236	26,837,979,078	Short - Term
Jangka Panjang	9,975,381,317	7,114,070,546	Long - Term
Jumlah	34,731,646,553	33,952,049,624	Total

Liabilitas lainnya merupakan liabilitas kepada pihak ketiga sehubungan dengan jasa konsultasi meliputi supervisi, desain, studi kelayakan, survei dan investigasi.

Other liabilities are liabilities to third parties related to consulting services including supervision, design, feasibility studies, surveys and investigations.

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

20. Liabilitas Sewa

20. Lease Liabilities

	2024 Rp	2023 Rp	
Bangunan	33,185,151,898	39,278,704,050	Buildings
Dikurangi: Bagian Jangka Pendek	(628,338,418)	(1,509,239,646)	Less: Short Term Portion
Jumlah	32,556,813,480	37,769,464,404	Total

21. Liabilitas Imbalan Kerja

21. Employee Benefit Liabilities

	2024 Rp	2023 Rp	
Kewajiban Tunjangan Hari Tua	199,718,209	201,432,367	Retirement Benefits Obligations
Kewajiban Imbalan Pascakerja	12,724,179,195	13,645,370,357	Post-employment Benefits Obligation
Jumlah	12,923,897,404	13,846,802,724	Total

Kewajiban tunjangan hari tua tersebut merupakan utang Dana *Past Service Liability* (PSL) jangka panjang kepada Dana Pensiun Lembaga Keuangan PT Asuransi Jiwasraya (Persero) pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023.

The retirement benefits obligations are payable *Past Service Liability Fund (PSL)* to the long term PT Asuransi Jiwasraya (Persero) Pension Fund on December 31, 2024 and 2023.

Perusahaan menyelenggarakan program imbalan kerja karyawan (program imbalan pasti) sesuai Undang Undang Cipta Kerja No.11 Tahun 2020 dengan usia pensiun normal adalah 56 tahun. Terdapat pendanaan yang dilakukan sehubungan dengan manfaat karyawan tersebut yaitu DPLK. Perusahaan telah melakukan perhitungan dan pengakuan kewajiban diestimasi berdasarkan PSAK 219. Jumlah karyawan yang berhak atas imbalan pascakerja tersebut adalah 73 karyawan pada tahun 2024 dan 74 karyawan pada tahun 2023. Asumsi aktuarial yang digunakan dalam menentukan biaya manfaat pensiun pada tahun 2024 oleh aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria Nandi dan Utama No. 349/LV/NSR/II/2025 tanggal 28 Februari 2025 adalah sebagai berikut:

The Company provides employee benefit plan (defined benefit plan) in accordance with prevailing Law No. 11 Year 2020, the normal retirement age is 56 years. There is funding made in connection with the employee benefits is Pension Fund. The Company has computed the estimated liability and the recognition is based on PSAK 219. The number of employees eligible for the benefits was 73 employees in 2024 and 74 employees in 2023. Actuarial assumptions used in determining the cost of retirement benefits in 2024 by independent aktuaris Consultant Nandi and Utama No. 349/LV/NSR/II/2025 dated February 28, 2025 are as follows:

	2024	2023	
Tabel Mortalitas	TMI IV 2019	TMI IV 2019	Mortality Table
Tingkat Diskonto	7.01%	6.52%	Discount Rate
Tingkat Proyeksi Kenaikan Gaji	7,00%	7,00%	Projected Level of Salary Increase
Tingkat Cacat dan Sakit	5% TMI IV 2019	5% TMI IV 2019	Level of Disability and Pain
Tingkat Pengunduran Diri	5,00%	5,00%	Resignation Level

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Besarnya kewajiban dan beban yang timbul sehubungan dengan program imbalan karyawan tersebut adalah sebagai berikut:

The amount of liabilities and expenses incurred in connection with employee benefit plans are as follows:

	2024 Rp	2023 Rp	
Kewajiban yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan			Obligation recognized in Statement of Financial Position
Nilai Kini Kewajiban Imbalan Pasti	12,724,179,195	13,645,370,357	Current Value - Defined Benefit Obligation
Beban yang Diakui di Laba Rugi			Expense Recognized in Profit Loss
Biaya Jasa Kini	702,159,843	766,262,396	Current Service Cost
Biaya Jasa Lalu	(94,466,853)	(488,195,382)	Past Service Cost
Biaya Bunga	889,678,147	892,520,915	Interest Expense
Jumlah	1,497,371,137	1,170,587,929	Total
	2024 Rp	2023 Rp	
Rekonsiliasi Perubahan Kewajiban yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan			Reconciliation of Changes in Liabilities Recognized in The Statement of Financial Position
Kewajiban (Aset) yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan pada Awal Tahun	13,645,370,357	12,879,089,690	Obligation (Asset) Recognized in Statement of Financial Position at the Beginning of the Year
Pembayaran Imbalan	(1,070,675,562)	(1,067,207,409)	Benefit Payment
Beban Imbalan pada Tahun Berjalan	1,497,371,137	1,170,587,929	Benefits Expense in the Current Year
Beban pada Penghasilan Komprehensif Lain	(1,347,886,737)	662,900,147	Expense to Other Comprehensive Income
Kewajiban yang Diakui di Laporan Posisi Keuangan Pada Akhir Tahun	12,724,179,195	13,645,370,357	Obligation Recognized in The Statement of Financial Position at the End of the Year

Risiko Tingkat Bunga

Nilai kini imbalan pasti dihitung dengan menggunakan tingkat bunga obligasi pemerintah, oleh karenanya, penurunan suku bunga obligasi pemerintah meningkatkan liabilitas program.

Interest Risk

The present value of the defined benefits plan liability is calculated using the interest of government bond, therefore, the decreasing in the government bond interest rate will increase defined benefits plan liability.

Risiko Gaji

Nilai kini imbalan pasti dihitung menggunakan asumsi kenaikan gaji di masa depan, oleh karenanya, peningkatan persentase kenaikan gaji di masa depan akan meningkatkan liabilitas program.

Salary Risk

The present value of the defined benefits plan is calculated using the assumption of future salaries increase, therefore, the increasing of salary percentage will increase defined benefits plan liability.

Analisis Sensitivitas

Analisis sensitivitas pada 31 Desember 2024 adalah sebagai berikut:

Sensitivity Analysis

Sensitivity analysis as of December 31, 2024 are follows:

	1% lebih tinggi/ 1% higher Rp	1% lebih rendah/ 1% lower Rp	
Perubahan tingkat diskonto	12,223,894,931	13,262,922,490	Changes in discount rate
Perubahan tingkat kenaikan gaji tahunan	13,371,934,156	12,111,219,351	Changes in annual salary increase rate

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Analisis sensitivitas untuk tahun yang berakhir
 pada 31 Desember 2023 adalah sebagai
 berikut:

Sensitivity analysis as of December 31, 2023
 are follows:

	1% lebih tinggi/ 1% higher Rp	1% lebih rendah/ 1% lower Rp	
Perubahan tingkat diskonto	13,036,824,068	14,302,395,813	Changes in discount rate
Perubahan tingkat kenaikan gaji tahunan	14,423,198,442	12,910,530,508	Changes in annual salary increase rate

22. Modal Saham

22. Capital Stock

Berdasarkan Akta terkait Perubahan Anggaran Dasar No. 09 tanggal 20 Februari 2025 oleh Arminawan, S.H., notaris di Jakarta, pemegang saham menyetujui modal dasar Perusahaan sebesar 40.004 lembar saham atau setara Rp40.004.000.000, yang telah ditempatkan dan disetor penuh sebanyak 10.001 lembar saham atau setara Rp10.001.000.000. Modal saham Perusahaan seluruhnya (100%) dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Susunan kepemilikan saham Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 adalah sebagai berikut:

Based on the Deed related to the Amendment of Articles of Association No. 09 dated February 20, 2025, by Arminawan, S.H., Notary in Jakarta, the shareholder approved the Company's authorized capital of 40,004 shares or equivalent to Rp40,004,000,000, of which 10,001 shares or equivalent to Rp10,001,000,000 have been issued and fully paid. The Company's total share capital (100%) is owned by the Government of the Republic of Indonesia.

The Company stockholders' composition as of December 31, 2024 and 2023 are as follow:

Pemegang Saham/ Stockholders	Jumlah Saham/ Total Shares (Lembar/ Shares)	Persentase Kepemilikan/ Percentage of Ownership %	Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Issued and Fully Paid Rp
Saham Seri A Dwiwarna/ Share Serie A Dwiwarna Pemerintah Republik Indonesia/ Government of the Republic of Indonesia	1	0.009999	1,000,000
Saham Seri B/ Share Serie B Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	10,000	99.990001	10,000,000,000
Jumlah/ Total	10,001		10,001,000,000

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

23. Saldo Laba

	2024	2023
	Rp	Rp
Ditentukan Penggunaannya		
Saldo Awal	2,402,511,093	2,402,511,093
Kapitalisasi menjadi Modal	--	--
Saldo Akhir	2,402,511,093	2,402,511,093
Belum Ditentukan Penggunaannya		
Saldo Awal	57,591,448,062	44,320,693,465
Laba Bersih Tahun Berjalan	12,774,089,897	13,270,754,597
Saldo Akhir	70,365,537,959	57,591,448,062
Jumlah	72,768,049,052	59,993,959,155

Appropriated
Beginning Balance
Capitalization into Capital Stock
Ending Balance
Unappropriated
Beginning Balance
Net Income for The Year
Ending Balance
Total

23. Retained Earning

24. Penghasilan Komprehensif Lainnya

	2024	2023
	Rp	Rp
Pengukuran Kembali atas Program Imbalan Pasti Surplus Revaluasi Aset Tetap	(7,924,611,005)	(9,272,497,742)
Jumlah	107,315,391,470	105,967,504,733

*Remeasurement on
 Defined Benefit Plan
 Fixed Assets
 Revaluation Surplus*
Total

24. Other Comprehensive Income

25. Pendapatan Usaha

	2024	2023
	Rp	Rp
Supervisi	100,329,431,124	78,994,653,452
Desain	58,907,683,219	59,901,098,939
Survei dan Investigasi	19,671,193,440	13,945,474,192
Studi Kelayakan	19,247,444,173	35,721,530,346
Lain-lain	42,375,951,341	21,823,303,870
Jumlah	240,531,703,297	210,386,060,799

Supervision
Design
Survey and Investigation
Feasibility Study
Others
Total

25. Revenues

Pendapatan usaha dari pihak berelasi disajikan pada Catatan 32.

Revenues from related parties presented in Note 32.

26. Beban Pokok Pendapatan

	2024	2023
	Rp	Rp
Tenaga Kerja	57,252,831,974	67,930,248,895
Overhead	50,634,359,191	29,315,446,390
Subkonsultasi	43,374,520,911	30,738,137,486
Perjalanan Dinas	12,939,330,642	14,100,692,243
Kendaraan / Peralatan	5,252,537,026	5,802,456,942
Pemasaran	363,356,924	1,077,245,749
Jumlah	169,816,936,668	148,964,227,705

Labour
Overhead
Subconsultant
Travel
Transport / Equipment
Marketing
Total

26. Cost of Revenue

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

27. Pendapatan Bersih dari Ventura Bersama

Akun ini merupakan pendapatan dari ventura bersama (Catatan 12). Untuk tahun-tahun yang berakhir pada 31 Desember 2024 dan 2023 pendapatan bersih dari ventura bersama sebesar Rp1.060.194.998 dan Rp1.686.191.185.

27. Net Revenue from Joint Ventures

This account represents revenue from joint ventures (Note 12). For the years ended December 31, 2024 and 2023, net revenue from joint ventures amounted Rp1,060,194,998 and Rp1,686,191,185, respectively.

28. Beban Usaha

	2024	2023
	Rp	Rp
Gaji, Tunjangan dan Bonus Umum dan Administrasi	32,316,955,150	32,756,897,122
Penyusutan/Amortisasi	13,919,200,477	10,727,169,281
Aset Hak Guna (Catatan 14)	1,731,393,590	875,228,802
Aset Tetap (Catatan 13)	1,489,129,060	2,013,024,535
Aset Takberwujud	453,921,360	--
Perjalanan Dinas	1,501,818,073	1,522,441,067
Pemasaran	646,556,690	738,126,968
Sewa Kendaraan	589,722,322	687,023,016
Jumlah	52,648,696,722	49,319,910,791

Salaries, Allowances and Bonus General and Administration Depreciation/Amortization Right of Use Assets (Note 14) Fixed Assets (Note 13) Intangible Asset Travel Marketing Vehicle rent **Total**

28. Operating Expenses

29. Pendapatan (Beban) Lain-lain - Bersih

	2024	2023
	Rp	Rp
Pendapatan Sewa	2,378,800,473	2,378,800,473
Lain-lain - Bersih	(1,918,342,742)	3,072,996,808
Jumlah - Bersih	460,457,731	5,451,797,281

Lease Revenue Others - Net **Total - Net**

29. Other Income (Expense) - Net

30. Instrumen Keuangan

Berikut ini adalah nilai tercatat dan estimasi nilai wajar atas aset dan liabilitas keuangan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023 terdiri dari:

30. Financial Instruments

Below are the Company's carrying value and estimated fair values of those financial assets and liabilities as of December 31, 2024 and 2023 are as follows:

	2024		2023	
	Jumlah Tercatat/ Carrying Value Rp	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Value Rp	Jumlah Tercatat/ Carrying Value Rp	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Value Rp
Aset Keuangan				
Kas dan Bank	47,485,087,764	47,485,087,764	42,763,914,181	42,763,914,181
Piutang Usaha	28,969,906,467	28,969,906,467	23,631,404,813	23,631,404,813
Tagihan Bruto kepada Pengguna Jasa	88,904,564,588	88,904,564,588	74,887,596,242	74,887,596,242
Piutang Lain-lain	20,380,876,786	20,380,876,786	32,790,966,695	32,790,966,695
Jumlah Aset Keuangan	185,740,435,605	185,740,435,605	174,073,881,931	174,073,881,931

Financial Assets
 Cash and Bank
 Account Receivables
 Gross Amount Due from Customers
 Other Receivables
Total Financial Assets

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2024		2023		
	Jumlah Tercatat/ Carrying Value Rp	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Value Rp	Jumlah Tercatat/ Carrying Value Rp	Estimasi Nilai Wajar/ Estimated Fair Value Rp	
Liabilitas Keuangan					Financial Liabilities
Utang Usaha	16,083,852,708	16,083,852,708	16,921,786,207	16,921,786,207	Account Payables
Biaya Yang Masih Harus Dibayar	43,249,585,321	43,249,585,321	40,508,091,653	40,508,091,653	Accrued Expenses
Utang Bank	4,248,557,534	4,248,557,534	4,998,557,534	4,998,557,534	Bank Loan
Liabilitas Sewa	33,185,151,898	33,185,151,898	39,278,704,050	39,278,704,050	Lease Liabilities
Liabilitas Lainnya	34,731,646,553	34,731,646,553	33,952,049,624	33,952,049,624	Other Liabilities
Jumlah Liabilitas Keuangan	131,498,794,014	131,498,794,014	135,659,189,068	135,659,189,068	Total Financial Liabilities

Metode-metode dan asumsi-asumsi dibawah ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk masing-masing kelas instrumen keuangan:

- Nilai tercatat kas dan bank, piutang usaha, piutang lain-lain, dan utang usaha mendekati nilai wajarnya karena transaksi bersifat jangka pendek.
- Nilai tercatat dari utang bank mendekati nilai tercatat karena suku bunga yang dikenakan atas utang bank tersebut sudah mencerminkan tingkat bunga pasar.

The methods and assumptions below are used to estimate fair value for each class of financial instruments:

- The carrying values of cash and bank, account receivables, other receivables and account payables approximate their fair values due to short term nature of transactions.
- The carrying amount of bank debt approaching the carrying value as the interest rate charged on the bank loan had an interest rate reflecting the market.

31. Tujuan dan Kebijakan Manajemen Risiko Keuangan dan Manajemen Permodalan

Risiko utama dari instrumen keuangan Perusahaan adalah risiko tingkat suku bunga, risiko mata uang asing, risiko kredit, risiko likuiditas dan risiko harga komoditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan untuk mengelola masing-masing risiko, sebagaimana dijelaskan secara rinci sebagai berikut:

Kebijakan Manajemen Risiko

- a. Risiko tingkat suku bunga
Risiko tingkat suku bunga Perusahaan terutama timbul dari bunga simpanan dalam bentuk bunga bank ataupun giro. Pendapatan pada berbagai tingkat suku bunga variabel menunjukkan Perusahaan kepada nilai wajar risiko tingkat suku bunga.

Untuk investasi dan simpanan bank, Perusahaan berusaha mengurangi risiko tingkat suku bunganya dengan cara selalu melakukan pengawasan terhadap tingkat suku bunga yang berlaku di pasar.

31. Financial Risk Management Objectives and Policies and Capital Management

The main risks arising from the Company's financial instruments are interest rate risk, foreign currency risk, credit risk, liquidity risk, and commodity price risk. The directors review and approve policies for managing each of these risks, which are described in more detail as follows:

Risk Management Policies

- a. Interest rate risk
The Company's interest rate risk mainly arises from interest from bank deposit. Income at variable rates expose the Company to fair value interest rate risk.

For investment and bank deposit, the Company may seek to mitigate its interest rate risky continuously monitoring the interest rates in the market.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- b. Risiko mata uang asing
Perusahaan tidak mempunyai kebijakan lindung nilai yang formal untuk laju pertukaran mata uang asing. Bagaimanapun, terkait dengan hal-hal yang telah didiskusikan pada paragraf diatas, fluktuasi dalam nilai tukar rupiah dan mata uang asing lainnya (dolar Amerika Serikat) menghasilkan lindung nilai natural untuk laju nilai tukar Perusahaan.
- c. Risiko kredit
Risiko kredit yang dihadapi oleh Perusahaan berasal dari piutang kepada pelanggan dan penempatan deposito atau simpanan di bank.
- Untuk mengurangi risiko gagal bayar Bank atas penempatan deposito. Perusahaan memiliki kebijakan hanya akan menempatkan deposito pada bank yang memiliki reputasi yang baik.
- Perusahaan *relative* tidak memiliki risiko kredit yang terkonsentrasi secara signifikan.
- d. Risiko likuiditas
Risiko likuiditas adalah risiko bahwa Perusahaan akan mengalami kesulitan dalam memenuhi liabilitas keuangan karena kekurangan dana.
- Perusahaan mengelola profil likuiditasnya untuk dapat mendanai pengeluaran modalnya dan membayar utang yang jatuh tempo dengan menjaga kecukupan kas dan bank dan ketersediaan pendanaan melalui jumlah fasilitas kredit berkomitmen yang cukup.
- Perusahaan secara rutin mengevaluasi proyeksi arus kas dan arus kas aktual dan terus menerus menjaga kestabilan hari pembayaran utang dan penerimaan piutangnya.
- e. Manajemen modal
Perusahaan bertujuan mencapai struktur modal yang optimal untuk memenuhi tujuan usaha di antaranya dengan mempertahankan rasio modal yang sehat dan memaksimalkan nilai pemegang saham.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- b. *Foreign currency risk*
The Company does not have any formal hedging policy for foreign exchange exposure. However, in relation to the matters discussed in the preceding paragraph, the fluctuations in the exchange rates between the rupiah and other foreign currencies (United States dollar) provide some degree of natural hedge for the Company's foreign exchange exposure.
- c. *Credit risk*
The Company is exposed to receivable arising from the credit granted to its customers and deposits placed in banks.
- To mitigate the default risk of banks on deposits. The Company has policies to place its deposits only in banks with good reputation.*
- The Company relative does not have a risk of significant concentrations of credit.*
- d. *Liquidity risk*
Liquidity risk is the risk that the Company will have difficulty in meeting financial obligations due to shortage of funds.
- The Company manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditure and service its maturing debts by maintaining sufficient cash and bank and the availability of funding through an adequate amount of committed credit facilities.*
- The Company regularly evaluates its projected and actual cash flow and continuously maintains its payables and receivables days' stability.*
- e. *Capital management*
The Company aims to achieve an optimal capital structure in pursuit of its business objectives which include maintaining healthy capital ratio and maximizing stockholder value.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Perusahaan menetapkan sejumlah modal sesuai dengan proporsi terhadap risiko. Perusahaan mengelola struktur modal dan membuat penyesuaian dengan memperhatikan perubahan kondisi ekonomi dan karakteristik risiko aset yang mendasari. Untuk menjaga atau menyesuaikan struktur modal. Perusahaan mungkin menyesuaikan jumlah dividen yang dibayar kepada pemegang saham, pengembalian modal kepada pemegang saham, penerbitan saham baru, atau menjual aset untuk mengurangi utang.

Konsisten dengan entitas lain dalam industri Perusahaan memonitor modal dengan dasar rasio utang terhadap modal yang disesuaikan. Utang neto dihitung: dari total utang (sebagaimana jumlah dalam laporan posisi keuangan) dikurangi kas dan bank.

The Company sets the amount of capital in proportion to risk. The Company manages its capital structure and makes adjustments with respect to changes in economic conditions and the risk characteristics of the underlying assets. To maintain or adjust the capital structure. The Company may adjust the amount of dividends paid to shareholders, return of capital to shareholders, issue new shares, or sell assets to reduce debt.

Consistent with other entities in the industry the Company monitors capital on the basis of the ratio of debt to adjusted capital. Net debt is calculated: from total debt (as the amount in the statement of financial position) less cash and bank.

32. Sifat dan Transaksi dengan Pihak Berelasi

Sifat hubungan dengan pihak-pihak yang berelasi adalah sebagai berikut:

- Pemerintah dalam hal ini adalah Kementerian Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia yang merupakan pemegang saham Perusahaan dan BUMN.
- Perusahaan mempunyai hubungan berelasi dengan BUMN lainnya yang dimiliki bersama oleh Kementerian Keuangan.
- Komisaris dan Direksi merupakan personil manajemen kunci Perusahaan.

Berikut ini adalah daftar pihak berelasi yang memiliki transaksi dengan Perusahaan:

Pihak - pihak berelasi / Related Parties	Sifat hubungan / The Nature of
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities

32. Nature of Relationships and Transactions with Related Parties

The nature of the relationship with the party related parties are as follows:

- The Government is the Ministry of State Owned Enterprise of the Republic of Indonesia, the shareholder of the Company and State Owned Enterprise.
- The Company is related to other State Owned Enterprise owned by the Ministry of State Owned Enterprise.
- Commissioners and Directors are member of the key management of the Company.

Below is the list of related parties with which the Company has transactions:

Transaksi	Transaction
Bank, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Cash in Bank, Gross Amount Due From Customers
Bank	Cash in Bank

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak - pihak berelasi / Related Parties	Sifat hubungan / The Nature of	Transaksi	Transaction
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Bank, Utang Bank	Cash in Bank, Bank Loan
PT Perusahaan Umum Jasa Tirta II	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Account Receivables, Gross Amount Due From Customers
Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Lain- lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	Account Receivables, Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers
Balai Besar Wilayah Sungai Maluku	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Lain- lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	Account Receivables, Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers
Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I, II dan III	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Lain- lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	Account Receivables, Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers
PT PAL Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha	Account Receivables
PT Danareksa Capital	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Account Receivables, Gross Amount Due From Customers
PT Kawasan Berikat Nusantara	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Account Receivables, Gross Amount Due From Customers
Kantor Banjarmasin	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha	Account Receivables
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Lain- lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	Account Receivables, Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers
PT Indah Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha	Account Receivables
Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksana Jaringan Sumber Air Serayu Opak	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Lain- lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	Account Receivables, Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak - pihak berelasi / Related Parties	Sifat hubungan / The Nature of	Transaksi	Transaction
PT Virama Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Account Receivables, Gross Amount Due From Customers
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha	Account Receivables
PT Bhanda Ghara Rekso (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha	Account Receivables
Direktorat Jenderal Bina Marga	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Gross Amount Due From Customers
PT Kawasan Industri Terpadu Batang	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Gross Amount Due From Customers
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Gross Amount Due From Customers
PT Utama Karya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Gross Amount Due From Customers
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi I	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain	Other Receivables
Bina Marga - Departemen PU	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain	Other Receivables
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jendral Sumber Daya Air	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Other Receivables, Gross Amount Due From Customers
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi IV	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain	Other Receivables
Hutama Karya PRJT	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain	Other Receivables
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Kalimantan IV	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak - pihak berelasi / Related Parties	Sifat hubungan / The Nature of	Transaksi	Transaction
Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah Sungai Sulawesi III Palu	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	<i>Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
Balai Besar Wilayah Sungai Bangka belitung	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	<i>Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Other Receivables, Gross Amount Due From Customers</i>
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Sulawesi III	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Other Receivables, Gross Amount Due From Customers</i>
PT Kayan Hydro Energy	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	<i>Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
PT PLN Nusantara Power	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
PT Krakatau Chandra Energi	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
Balai Wilayah Sungai Sumatera I	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
Bank Indonesia	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
Balai Wilayah Sungai Kalimantan I Pontianak	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
PT Brantas Abipraya (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	<i>Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	<i>Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>
Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	<i>Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak - pihak berelasi / Related Parties	Sifat hubungan / The Nature of	Transaksi	Transaction
Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Dari Pelanggan	<i>From Customers</i>
PT PLN Indonesia Power	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
Direktorat Jendral Perhubungan Laut	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
Pesisir Ibu Kota Negara	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
Pemanfaatan Air Pemali Juana	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
Sumber Daya Air - Dirjend PU	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
PT Kawasan Industri Medan (Persero)	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
Kolaborasi 9 BUMN Madua Moljeh Asreh	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
Balai Prasarana Pemukiman Wilayah NTT	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa,	<i>Gross Amount Due From Customers</i>
Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers,</i>
Direktorat Jendral Perhubungan	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ <i>Government Related Entities</i>	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	<i>Gross Amount Due From Customers</i>

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak - pihak berelasi / Related Parties	Sifat hubungan / The Nature of	Transaksi	Transaction
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Citarum	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers
Perusahaan Umum Jasa Tirta I	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Piutang Lain- lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan,	Account Receivables, Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers
PT PLN Indonesia Power	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Gross Amount Due From Customers
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Lain-lain, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan,	Other Receivables, Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers
Direktorat Jendral Perhubungan Laut	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Gross Amount Due From Customers
Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Piutang Usaha, Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Account Receivables, Gross Amount Due From Customers
Balai Wilayah Sungai Bali - Penida	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan,	Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Gross Amount Due From Customers
Direktorat Jendral Cipta Karya	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Gross Amount Due From Customers
PT Jasa Marga - Toll road	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Gross Amount Due From Customers
Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air Sulawesi II	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Gross Amount Due From Customers
Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau Ciujung Cidurian	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa	Gross Amount Due From Customers

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Pihak - pihak berelasi / Related Parties	Sifat hubungan / The Nature of	Transaksi	Transaction
Satuan Kerja Direktorat Pengembangan Kawasan Pemukiman	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Tagihan Bruto Kepada Pengguna Jasa, Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	Gross Amount Due From Customers, Advance From Customers
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS Kaliki-Karama WS Palu-Lariang Provinsi Sulawesi Barat	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	Advance From Customers
PT Utama Karya Realtindo	Entitas yang Berelasi dengan Pemerintah/ Government Related Entities	Uang Muka Proyek Dari Pelanggan	Advance From Customers

Dalam kegiatan usahanya Perusahaan melakukan transaksi dengan pihak-pihak yang berelasi sebagai berikut:

In the normal course of business transactions with the company related parties as follows:

	2024		2023		
	Rp	% *)	Rp	% *)	
Kas dan Bank (Catatan 4)					Cash on Hand and in Banks (Note 4)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	39,167,478,630	10.85%	39,589,991,687	11.11%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	5,387,965,974	1.49%	177,174,645	0.05%	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2,854,051,785	0.79%	2,853,674,897	0.80%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Jumlah	47,409,496,389	13.13%	42,620,841,229	11.96%	Total
Piutang Usaha (Catatan 5)					Account Receivables (Note 5)
Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa	3,544,627,379	0.98%	2,846,678,468	0.79%	Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa
Balai Wilayah Sungai Maluku	2,056,190,765	0.57%	889,213,531	0.25%	Balai Wilayah Sungai Maluku
PT Perusahaan Umum Jasa Tirta I	1,873,769,000	0.52%	--	--	PT Perusahaan Umum Jasa Tirta I
PT PAL Indonesia (Persero)	1,273,399,410	0.35%	1,273,399,410	0.35%	PT PAL Indonesia (Persero)
PT Perusahaan Umum Jasa Tirta II	710,009,729	0.20%	4,430,777,600	1.23%	PT Perusahaan Umum Jasa Tirta II
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	469,183,725	0.13%	--	--	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
PT Indah Karya (Persero)	254,575,000	0.07%	290,604,905	0.08%	PT Indah Karya (Persero)
PT Bhanda Ghara Rekza (Persero)	220,000,000	0.06%	220,000,000	0.06%	PT Bhanda Ghara Rekza (Persero)
Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I dan II	--	--	4,063,963,964	1.13%	Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I dan II
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang	--	--	1,428,708,688	0.40%	Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
PT PLN Danareksa Capital	--	--	374,868,750	0.10%	PT PLN Danareksa Capital
PT Kawasan Berikat Nusantara Kantor Banjarmasin	--	--	360,175,000	0.10%	PT Kawasan Berikat Nusantara Kantor Banjarmasin
Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksana Jaringan Sumber Air Serayu Opak	--	--	283,798,661	0.08%	Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksana Jaringan Sumber Air Serayu Opak
PT Virama Karya (Persero)	--	--	282,380,000	0.08%	PT Virama Karya (Persero)
PT Pelabuhan Indonesia (Persero)	--	--	224,025,048	0.06%	PT Pelabuhan Indonesia (Persero)
Lain-lain (Dibawah Rp200 Juta)	1,282,139,735	0.36%	819,072,636	0.16%	Others (below Rp200 Million)
Jumlah	11,683,894,743	3.24%	18,090,626,662	4.95%	Total

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2024		2023		
	Rp	% *)	Rp	% *)	
Piutang Lain-lain (Catatan 6)					Other Receivables (Note 6)
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Bendungan Balai Wilayah Sungai					Bendungan Balai Wilayah Sungai
Sulawesi IV	3,092,574,975	0.86%	1,752,858,575	0.49%	Sulawesi IV
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Bendungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III	2,772,200,580	0.77%	--	--	Bendungan Balai Wilayah Sungai Sulawesi III
Bina Marga - Departemen PU	2,568,634,317	0.71%	3,107,118,818	0.86%	Bina Marga - Departemen PU
Hutama Karya PRJT	1,848,742,764	0.51%	1,747,092,026	0.48%	Hutama Karya PRJT
Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I	1,747,441,727	0.48%	1,384,006,081	0.38%	Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai Nusa Tenggara I
Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa	927,340,947	0.26%	6,782,451,383	1.88%	Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa
Satuan Non Vertikal Tertentu Pemanfaatan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pemanfaatan
Jaringan Sumber Air	904,037,735	0.25%	--	--	Jaringan Sumber Air
Balai Besar Wilayah Sungai Maluku	866,495,411	0.24%	3,427,005,801	0.95%	Balai Besar Wilayah Sungai Maluku
PT Perusahaan Umum Jasa Tirta I	721,060,785	0.20%	--	--	PT Perusahaan Umum Jasa Tirta I
Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan
Jaringan Pemanfaatan Air Bali - Penida	564,976,212	0.16%	353,582,996	0.10%	Jaringan Pemanfaatan Air Bali - Penida
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai					Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai
Kalimantan IV	497,500,000	0.14%	1,386,622,500	0.38%	Kalimantan IV
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	404,653,017	0.11%	358,950,000	0.10%	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana
Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai					Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai
Nusa Tenggara II	--	--	3,202,000,000	0.89%	Nusa Tenggara II
Kementrian Pekerjaan Umum dan					Kementrian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat Direktorat Jendral					Perumahan Rakyat Direktorat Jendral
Sumber Daya Air	--	--	2,039,225,620	0.56%	Sumber Daya Air
Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan
Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah					Jaringan Sumber Air Balai Besar Wilayah
Sungai Sulawesi III Palu	--	--	1,140,283,873	0.32%	Sungai Sulawesi III Palu
Balai Besar Wilayah Sungai					Balai Besar Wilayah Sungai
Bangka Belitung	--	--	1,032,674,847	0.29%	Bangka Belitung
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai					Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai
Pompengan Jeneberang	--	--	824,783,170	0.23%	Pompengan Jeneberang
Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan
Jaringan Sumber Air Serayu Opak	--	--	566,533,133	0.16%	Jaringan Sumber Air Serayu Opak
Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo	--	--	336,347,479	0.09%	Balai Besar Wilayah Sungai Bengawan Solo
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai					Bendungan Balai Besar Wilayah Sungai
Sulawesi I	--	--	200,606,770	0.06%	Sulawesi I
Lain - lain (dibawah Rp200 Juta)	1,291,108,068	0.36%	817,005,680	0.23%	Others (below Rp200 Million)
Jumlah	18,206,766,538	5.05%	30,459,148,752	8.45%	Total

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)
 Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
 Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
 (Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)
 For the Years Ended
 December 31, 2024 and 2023
 (In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2024		2023		
	Rp	% *)	Rp	% *)	
Tagihan Bruto kepada					Gross Amount Due from
Pengguna Jasa (Catatan 7)					Customers (Note 7)
Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa	12,893,598,526	3.57%	--	--	Satuan Kerja Direktorat Irigasi dan Rawa
Direktorat Jenderal Sumber Daya Air	4,565,290,381	1.26%	--	--	Direktorat Jenderal Sumber Daya Air
Perusahaan Umum Jasa Tirta I	4,534,389,000	1.26%	941,970,200	0.26%	Perusahaan Umum Jasa Tirta I
Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai					Satuan Kerja Balai Wilayah Sungai
Nusa Tenggara I, II dan III	4,264,570,067	1.18%	8,656,138,874	2.40%	Nusa Tenggara I, II dan III
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Bendungan Balai Besar Wilayah					Bendungan Balai Besar Wilayah
Sungai Citarum	3,379,005,587	0.94%	1,243,792,336	0.34%	Sungai Citarum
Balai Wilayah Sungai Sumatera I	3,297,388,929	0.91%	2,840,514,043	0.79%	Balai Wilayah Sungai Sumatera I
PT Utama Karya (Persero)	3,286,241,751	0.91%	2,733,804,494	0.76%	PT Utama Karya (Persero)
Direktorat Jenderal Bina Marga	2,845,861,389	0.79%	--	--	Direktorat Jenderal Bina Marga
PT PLN Nusantara Power	2,737,954,749	0.76%	3,123,172,783	0.86%	PT PLN Nusantara Power
PT. Krakatau Chandra Energi	2,477,813,482	0.69%	--	--	PT. Krakatau Chandra Energi
Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau					Balai Besar Wilayah Sungai Cidanau
Ciujung Cidurian	2,417,936,757	0.67%	--	--	Ciujung Cidurian
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Bendungan I Balai Wilayah Sungai					Bendungan I Balai Wilayah Sungai
Nusa Tenggara II	2,181,129,501	0.60%	3,578,231,755	0.99%	Nusa Tenggara II
PT Brantas Abipraya (Persero)	1,984,994,675	0.55%	1,984,994,674	0.55%	PT Brantas Abipraya (Persero)
Balai Wilayah Sungai Kalimantan I					Balai Wilayah Sungai Kalimantan I
Pontianak	1,467,050,076	0.41%	2,072,320,276	0.57%	Pontianak
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Bendungan Balai Wilayah Sungai					Bendungan Balai Wilayah Sungai
Kalimantan IV	1,299,511,735	0.36%	--	--	Kalimantan IV
PT Surabaya Industrial Estate Rungkut	1,250,922,400	0.35%	--	--	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut
Satuan Kerja Direktorat Pengembangan					Satuan Kerja Direktorat Pengembangan
Kawasan Pemukiman	1,191,248,645	0.33%	--	--	Kawasan Pemukiman
PT Jasa Marga - Toll road	1,167,850,000	0.32%	280,800,000	0.08%	PT Jasa Marga - Toll road
Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan
Jaringan Sumber Air Balai Besar					Jaringan Sumber Air Balai Besar
Wilayah Sungai Sulawesi III Palu	1,152,158,538	0.32%	2,192,276,930	0.61%	Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
PT Kawasan Industri Terpadu Batang	853,495,100	0.24%	--	--	PT Kawasan Industri Terpadu Batang
PT Kawasan Berikat Nusantara	814,586,101	0.23%	839,344,353	0.23%	PT Kawasan Berikat Nusantara
PT Danareksa Capital	760,050,094	0.21%	--	--	PT Danareksa Capital
Direktorat Jenderal Perhubungan Laut	464,529,403	0.13%	438,211,903	0.12%	Direktorat Jenderal Perhubungan Laut
Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV	439,329,594	0.12%	1,256,332,768	0.35%	Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV
Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai					Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai
Serayu Opak	386,588,725	0.11%	--	--	Serayu Opak
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	378,027,759	0.10%	378,027,759	0.10%	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
Direktorat Jenderal Cipta Karya	371,803,964	0.10%	--	--	Direktorat Jenderal Cipta Karya
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara	306,255,217	0.08%	306,255,217	0.08%	Terpadu Pesisir Ibu Kota Negara
Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan
Jaringan Sumber Air Sulawesi II	269,309,900	0.07%	269,309,900	0.07%	Jaringan Sumber Air Sulawesi II
Bank Indonesia	253,790,001	0.07%	2,280,749,174	0.63%	Bank Indonesia
Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pembangunan
Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII	246,677,403	0.07%	--	--	Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII
Balai Wilayah Sungai Maluku	197,382,157	0.05%	2,578,562,995	0.71%	Balai Wilayah Sungai Maluku
PT Virama Karya (Persero)	131,164,200	0.04%	367,164,200	0.10%	PT Virama Karya (Persero)
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	114,250,000	0.03%	1,732,490,910	0.48%	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
PT Kayan Hydro Energy	--	--	6,393,441,593	1.77%	PT Kayan Hydro Energy
Kementerian Pekerjaan Umum dan					Kementerian Pekerjaan Umum dan
Perumahan Rakyat	--	--	1,541,229,086	0.43%	Perumahan Rakyat
Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan
Jaringan Sumber Air Serayu Opak	--	--	1,043,706,637	0.29%	Jaringan Sumber Air Serayu Opak
PT PLN Indonesia Power	--	--	648,965,012	0.18%	PT PLN Indonesia Power
Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana	--	--	535,013,083	0.15%	Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana
Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak	--	--	386,588,725	0.11%	Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak
Balai Wilayah Sungai Bali - Penida	--	--	320,495,676	0.09%	Balai Wilayah Sungai Bali - Penida
Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan					Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksanaan
Jaringan Pemanfaatan Air Pemali Juana	--	--	244,134,100	0.07%	Jaringan Pemanfaatan Air Pemali Juana
Satuan Non Vertikal Tertentu					Satuan Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Bendungan Balai Besar					Pembangunan Bendungan Balai Besar
Wilayah Sungai Serayu Opak	--	--	220,058,308	0.06%	Wilayah Sungai Serayu Opak
Balai Besar Wilayah Sungai					Balai Besar Wilayah Sungai
Bengawan Solo	--	--	219,832,500	0.06%	Bengawan Solo
Lain - lain (dibawah Rp200 Juta)	4,257,777,599	1.18%	2,572,102,841	0.71%	Others (below Rp200 Million)
Jumlah	68,639,933,405	19.01%	54,220,033,105	15.01%	Total

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2024		2023		
	Rp	% **	Rp	% **	
Utang Bank (Catatan 15)					Bank Loan (Note 15)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	4,248,557,534	2.48%	4,998,557,534	2.77%	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Uang Muka dari Pelanggan (Catatan 17)					Advance From Customers (Note 17)
PT Hutama Karya Realtindo	5,097,431,065	2.98%	5,352,301,065	2.97%	PT Hutama Karya Realtindo
PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)	1,803,718,128	1.05%	--	0.00%	PT Perusahaan Listrik Negara (Persero)
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu					Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Bendungan Balai Besar					Pembangunan Bendungan Balai Besar
Wilayah Sungai Citarum	1,698,324,983	0.99%	559,013,456	0.31%	Wilayah Sungai Citarum
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu					Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS Kaliki-Karama					Pelaksanaan Jaringan Sumber Air WS Kaliki-Karama
WS Palu-Lariang Provinsi Sulawesi Barat	1,310,310,446	0.77%	--	0.00%	WS Palu-Lariang Provinsi Sulawesi Barat
Perusahaan Umum Jasa Tirta I	1,267,842,000	0.74%	267,070,000	0.15%	Perusahaan Umum Jasa Tirta I
Satuan Kerja Direktorat Pengembangan					Satuan Kerja Direktorat Pengembangan
Kawasan Pemukiman	825,892,630	0.48%	825,892,630	0.46%	Kawasan Pemukiman
Balai Wilayah Sungai Kalimantan I	781,652,647	0.46%	781,652,647	0.43%	Balai Wilayah Sungai Kalimantan I
PT Brantas Abipraya (Persero)	280,080,401	0.16%	280,080,401	0.16%	PT Brantas Abipraya (Persero)
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu					Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Bendungan Balai Besar					Pembangunan Bendungan Balai Besar
Wilayah Sungai Sumatera VIII	246,677,404	0.14%	211,285,278	0.12%	Wilayah Sungai Sumatera VIII
PT Kayan Hydro Energy	--	--	3,793,693,508	2.10%	PT Kayan Hydro Energy
Satuan Kerja Balai Wilayah					Satuan Kerja Balai Wilayah
Sungai Nusa Tenggara	--	--	2,855,695,549	1.58%	Sungai Nusa Tenggara
Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksana					Satuan Non Vertikal Tertentu Pelaksana
Jaringan Sumber Air Balai Besar					Jaringan Sumber Air Balai Besar
Wilayah Sungai Sulawesi III Palu	--	--	1,894,283,405	1.05%	Wilayah Sungai Sulawesi III Palu
Balai Wilayah Sungai Maluku	--	--	1,849,685,174	1.03%	Balai Wilayah Sungai Maluku
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Jaringan					Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu Jaringan
Sumber Air Serayu Opak	--	--	527,229,254	0.29%	Sumber Air Serayu Opak
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu					Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Bendungan Balai Besar					Pembangunan Bendungan Balai Besar
Kalimantan IV	--	--	522,598,141	0.29%	Kalimantan IV
Supervisi Bendungan Meninting	--	--	382,435,780	0.21%	Supervisi Bendungan Meninting
Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu					Satuan Kerja Non Vertikal Tertentu
Pembangunan Bendungan Balai Besar					Pembangunan Bendungan Balai Besar
Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang	--	--	273,998,014	0.15%	Wilayah Sungai Pompengan Jeneberang
Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV	--	--	273,079,494	0.15%	Balai Wilayah Sungai Kalimantan IV
Balai Wilayah Sungai Bali - Penida	--	--	212,008,648	0.12%	Balai Wilayah Sungai Bali - Penida
Lain-lain (Dibawah Rp200 Juta)	1,587,968,385	0.93%	1,421,227,062	0.79%	Others (below Rp200 Million)
Jumlah	14,899,898,089	8.71%	22,283,229,506	12.36%	Total
Pendapatan usaha	168,311,576,041	69.97%	163,540,408,603	77.73%	Revenue

*) Persentase terhadap jumlah aset yang bersangkutan / Percentage to related total assets

**) Persentase terhadap jumlah liabilitas yang bersangkutan / Percentage to related total liabilities

***) Persentase terhadap jumlah pendapatan usaha yang bersangkutan / Percentage to related total revenue

33. Komitmen dan Perikatan

- a) Berdasarkan Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Lahan No. 008-I / SPJ / IKA / 2017, PBI / EP.859 / S.Perj.8.1 / III / 2017 dan 21.2 / DU / AG / PERJ.1.2 / III / 2017 tanggal 22 Maret 2017, Perusahaan telah melakukan perjanjian kerjasama optimalisasi lahan PT Hutama Karya (Persero) dan PT Indra Karya (Persero) di Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 dan 9 Cawang, Jakarta Timur, antara PT Indra Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero) dengan PT HK Realtindo, dengan penjelasan sebagai berikut:
- Perusahaan menyewakan lahan kepada PT HK Realtindo seluas 2.245m² selama 30 tahun, dengan tujuan dioptimalisasi untuk didirikan bangunan Gedung HK Tower.

33. Commitments and Agreements

- a) Based on the Land Optimization Cooperation Agreement No. 008-I / SPJ / IKA / 2017, PBI / EP.859 / S.Perj.8.1 / III / 2017 and 21.2 / DU / AG / PERJ.1.2 / III / 2017 dated March 22, 2017, the Company has entered into an optimization cooperation agreement land PT Hutama Karya (Persero) and PT Indra Karya (Persero) on Jalan Letjen Haryono MT Kav. 8 and 9 Cawang, East Jakarta, between PT Indra Karya (Persero), PT Hutama Karya (Persero) and PT HK Realtindo, with the following explanation:
- The Company leases 2,245 sqm of land to PT HK Realtindo for 30 years, with the aim of optimizing the construction of the HK Tower Building.

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- Perusahaan mendapatkan ruang kantor dengan luasan 1,000 m² selama masa pengelolaan 30 tahun, dengan sistem sewa kepada PT HK Realtindo.
- Setelah masa pengelolaan 30 tahun, Perusahaan akan mendapatkan ruang kantor seluas 2.245 m².

Lalu terdapat amendemen Perjanjian Kerjasama Optimalisasi Lahan No. 016/PKS/IK/XII/2021 dan No. 230/DU/LKP/PERJ.41/XII/2021 tanggal 23 Desember 2021 dengan penjelasan tambahan sebagai berikut:

- PT HK Realtindo menyetujui untuk menyewakan ruang sewa yang terletak di HK Tower lantai 9 kepada Perusahaan dengan luas lantai 1.000 m²;
- Masa berlaku perjanjian sewa menyewa adalah 30 tahun, dari tanggal 1 April 2019 sampai 31 Maret 2049.

- b) Pengelola proyek yang berasal dari Pemberi Kerja (Owner) bertanggungjawab sepenuhnya terhadap seluruh kegiatan tersebut termasuk laporan pertanggungjawaban keuangan proyek kepada masing-masing pihak yang melakukan perjanjian kerjasama.

34. Peristiwa Signifikan Setelah Periode Pelaporan

a. Transformasi Bisnis dan Perubahan Nama Perusahaan

Pada tanggal 11 November 2024, Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengeluarkan Surat Nomor: S-579/MBU/11/2024 yang berisi rencana transformasi bisnis untuk PT Indra Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), dan PT Virama Karya (Persero). Rencana tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan peran masing-masing perusahaan dalam mendukung percepatan dan menunjang program prioritas swasembada pangan.

Transformasi bisnis ini semakin diperkuat dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 tentang Pengalihan Bentuk Perusahaan Negara (PN) Indra Karya menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) pada tanggal 16 Januari 2025,

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- The Company obtained office space with an area of 1,000 sqm over a 30 years management period, with a lease system to PT HK Realtindo.
- After a management period of 30 years, the Company will obtain 2,245 sqm of office space.

Then there is an amendment to the Land Optimization Cooperation Agreement No. 016/PKS/IK/XII/2021 and No. 230/DU/LKP/PERJ.41/XII/2021 dated December 23, 2021 with additional explanations as follows:

- PT HK Realtindo agreed to lease the leased space located at HK Tower 9th floor to the Company with a floor area of 1,000 sqm;
- The term of the lease agreement is 30 years, from the date April 1, 2019 to March 31, 2049.

- b) Project managers from Employer (Owner) fully responsible for all activities that include financial accountability reports for each project each party to perform a cooperation agreement.

34. Significant Events After Reporting Period

a. Transformation Business and Change of Company's Name

On November 11, 2024, the Ministry of State-Owned Enterprises (BUMN) issued Letter No. S-579/MBU/11/2024, outlining the business transformation plan for PT Indra Karya (Persero), PT Yodya Karya (Persero), and PT Virama Karya (Persero). This plan aimed to optimize the role of each company in supporting acceleration and facilitating the priority program for food self-sufficiency.

The business transformation process was further reinforced by the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 3 of 2025 concerning Amendments to Government Regulation Number 42 of 1970 on the Conversion of The State Company (PN) Indra Karya into a Limited Liability Company (Persero) on

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

yang mengubah status hukum PT Indra Karya (Persero) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1970 terkait pengalihan bentuk perusahaan dan perluasan usaha

Sebagai bagian dari transformasi bisnis yang berkelanjutan, pada tanggal 20 Februari 2025, dilakukan perubahan anggaran dasar perusahaan serta perubahan nama dari PT Indra Karya (Persero) menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara sebagaimana tertuang dalam Akta Notaris Arminawan, SH Nomor 09. Perubahan ini mencerminkan penyesuaian strategi dan arah bisnis perusahaan dalam mendukung pengembangan ekosistem komoditas perkebunan nasional.

b. Perubahan Anggaran Dasar

Berdasarkan Akta No. 09 tanggal 20 Februari 2025 yang dibuat di hadapan Arminawan, S.H., Notaris di Jakarta, mengenai pernyataan keputusan rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara (d/h PT Indra Karya (Persero)), telah dilakukan perubahan dalam Pasal 3 mengenai Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha disesuaikan dalam rangka mendukung program pemerintah dalam mewujudkan swasembada pangan melalui pengembangan ekosistem komoditas perkebunan dengan tetap menjalankan kegiatan usaha sebelumnya.

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah untuk melaksanakan kegiatan usaha di bidang perkebunan dan konsultasi konstruksi, serta melakukan optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan berdasarkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut, Perusahaan melaksanakan kegiatan usaha sebagai berikut:

- 01611 – Jasa Pengolahan Lahan;
- 01262 – Perkebunan Buah Kelapa Sawit;
- 01640 – Pemilihan Benih Tanaman untuk Pengembangbiakan;
- 01612 – Jasa Pemupukan, Penanam Bibit/Benih dan Pengendalian Hama dan Gulma;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

January 16, 2025. This regulation changes the legal status of PT Indra Karya (Persero) in accordance with Government Regulation Number 42 of 1970 concerning the Company's conversion and business expansion.

As part of the ongoing business transformation, on February 20, 2025, the Company's articles of association were amended, and the Company name was officially changed from PT Indra Karya (Persero) to Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara, as recorded in Notarial Deed No. 09 by Arminawan, S.H. This change reflects the Company's strategic adjustment and realignment of its business focus to support the development of the national plantation commodity ecosystem.

b. Change of Company's Article of Association

Based on Deed No. 09 dated February 20, 2025, drawn up before Arminawan, S.H., Notary in Jakarta, regarding the statement of resolutions of the meeting of Perusahaan Perseroan (Persero) PT Agrinas Palma Nusantara (formerly PT Indra Karya (Persero)), amendments have been made to Article 3 concerning the Company's Purpose, Objectives, and Business Activities, which have been adjusted to support the government's program to achieve food self-sufficiency through the development of the plantation commodity ecosystem while maintaining the Company's existing business activities.

The purpose and objectives of the Company are to conduct business activities in the plantation sector and construction consulting, as well as to optimize the utilization of the Company's resources based on the principles of good corporate governance..

To achieve these purposes and objectives, the Company engages in the following business activities:

- 01611 – Land Preparation Services;
- 01262 – Oil Palm Fruit Plantation;
- 01640 – Selection of Plant Seeds for Breeding;
- 01612 – Fertilization, Seeding/Planting, and Pest & Weed Control Services;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- 01619 – Jasa Penunjang Pertanian Lainnya;
- 01613 – Jasa Pemanenan;
- 01630 – Jasa Pasca Panen;
- 10431 – Industri Minyak Mentah Kelapa Sawit (*Crude Palm Oil*);
- 10432 – Industri Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit (*Crude Palm Kernel Oil*);
- 10433 – Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
- 10434 – Industri Pemurnian Minyak Mentah Kelapa Sawit dan Minyak Mentah Inti Kelapa Sawit;
- 10435 – Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Kelapa Sawit;
- 10436 – Industri Pemisahan/Fraksinasi Minyak Murni Inti Kelapa Sawit;
- 10437 – Industri Minyak Goreng Kelapa Sawit;
- 20115 – Industri Kimia Dasar Organik Yang Bersumber Dari Hasil Pertanian;
- 10412 – Industri Margarin;
- 0424 – Industri Pelet Kelapa;
- 20131 – Industri Damar Buatan (Resin Sintetis) Dan Bahan Baku Plastik;
- 22220 – Industri Barang Dari Plastik Untuk Pengemasan;
- 01111 – Pertanian Jagung;
- 01135 – Pertanian Umbi Palawija;
- 01140 – Perkebunan Tebu;
- 10721 – Industri Gula Pasir;
- 10722 – Industri Gula Merah;
- 10729 – Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirup;
- 17011 – Industri bubur Kertas (PULP);
- 35111 – Pembangkitan Tenaga Listrik;
- 35113 – Distribusi Tenaga Listrik;
- 35129 – Aktivitas Penunjang Tenaga Listrik Lainnya;
- 46331 – Perdagangan Besar Gula, Coklat, Dan Kembang Gula;
- 46443 – Perdagangan Besar Komestik Untuk Manusia;
- 10613 – Industri Penggilingan Aneka Umbi Dan Sayuran (Termasuk Rhizoma);
- 10614 – Industri Tepung Campuran Dan Adonan Tepung;
- 10621 – Industri Pati Ubi Kayu;
- 46339 – Perdagangan Besar Makanan Dan Minuman Lainnya;
- 01122 – Pertanian Padi Inhibrida;
- 01411 – Pembibitan dan Budidaya Sapi Potong;
- 01412 – Pembibitan dan Budidaya Sapi Perah;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- 01619 – Other Agricultural Support Services;
- 01613 – Harvesting Services;
- 01630 – Post-Harvest Services;
- 10431 – Crude Palm Oil Industry;
- 10432 – Crude Palm Kernel Oil Industry;
- 10433 – Fractionation of Crude Palm Oil and Crude Palm Kernel Oil Industry;
- 10434 – Refining of Crude Palm Oil and Crude Palm Kernel Oil Industry;
- 10435 – Fractionation of Refined Palm Oil Industry;
- 10436 – Fractionation of Refined Palm Kernel Oil Industry;
- 10437 – Palm Cooking Oil Industry;
- 20115 – Organic Basic Chemicals Industry Derived from Agricultural Products;
- 10412 – Margarine Industry;
- 0424 – Coconut Pellet Industry;
- 20131 – Synthetic Resin and Plastic Raw Materials Industry;
- 22220 – Plastic Packaging Industry;
- 01111 – Corn Farming;
- 01135 – Various Tuber Crop Farming;
- 01140 – Sugarcane Plantation;
- 10721 – Granulated Sugar Industry;
- 10722 – Brown Sugar Industry;
- 10729 – Other Sugar Processing Industry (excluding Syrup);
- 17011 – Pulp Industry;
- 35111 – Power Generation;
- 35113 – Power Distribution;
- 35129 – Other Electricity-Related Supporting Activities;
- 46331 – Wholesale Trade of Sugar, Chocolate, and Confectionery;
- 46443 – Wholesale Trade of Cosmetics for Human Use;
- 10613 – Milling Industry for Various Tubers and Vegetables (Including Rhizomes);
- 10614 – Mixed Flour and Dough Industry;
- 10621 – Cassava Starch Industry;
- 46339 – Wholesale Trade of Other Food and Beverages;
- 01122 – Inbred Rice Farming;
- 01411 – Beef Cattle Breeding and Rearing;
- 01412 – Dairy Cattle Breeding and Rearing;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- 01469 – Pembibitan Dan Budidaya Ternak Unggas Lainnya;
- 20231 – Industri Sabun Dan Bahan Pembersih Keperluan Rumah Tangga;
- 09900 – Aktivitas Penunjang Pertambangan dan Penggalian lainnya;
- 11050 – Industri Air Minum Dan Air Mineral;
- 11051 – Industri Air Kemasan;
- 11052 – Industri Air Minum Isi Ulang;
- 36002 – Penampungan dan Penyaluran Air Baku;
- 42202 – Konstruksi Bangunan Sipil Pengolahan Air Bersih;
- 42203 – Konstruksi Bangunan Sipil Prasarana dan Sarana Sistem Pengolahan Limbah Padat, Cair, dan Gas;
- 42207 – Pembuatan/Pengeboran Sumur Air Tanah;
- 42916 – Konstruksi Bangunan Sipil Pertambangan;
- 43120 – Penyiapan Lahan;
- 43214 – Jasa Instalasi Konstruksi Navigasi Laut, Sungai dan Udara;
- 43909 – Aktivitas Konstruksi Khusus Lainnya;
- 46202 – Perdagangan Besar Buah Yang Mengandung Minyak;
- 46209 – Perdagangan Besar Hasil Pertanian Dan Hewan Hidup Lainnya;
- 46315 – Perdagangan Besar Minyak Dan Lemak Nabati;
- 46610 – Perdagangan Besar Bahan Bakar Padat, Cair Dan Gas Dan Produk YBDI;
- 46651 – Perdagangan Besar Bahan Dan Barang Kimia;
- 46693 – Perdagangan Besar Karet Dan Plastik Dalam Bentuk Dasar;
- 49120 – Angkutan Jalan Rel Untuk Barang;
- 49432 – Angkutan Bermotor Untuk Barang Khusus;
- 52101 – Pergudangan Dan Penyimpanan;
- 70202 – Aktivitas Konsultasi Transportasi;
- 70209 – Aktivitas Konsultasi Manajemen Lainnya;
- 71101 – Aktivitas Arsitektur;
- 71102 – Aktivitas Keinsinyuran dan Konsultasi Teknis YBDI;
- 71201 – Jasa Sertifikasi;
- 71202 – Jasa Pengujian Laboratorium;
- 71203 – Jasa Inspeksi Periodik;
- 71204 – Jasa Inspeksi Teknik Instalasi;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- 01469 – Other Poultry Breeding and Rearing;
- 20231 – Soap and Household Cleaning Products Industry;
- 09900 – Supporting Activities for Mining and Quarrying;
- 11050 – Bottled Drinking Water and Mineral Water Industry;
- 11051 – Packaged Drinking Water Industry;
- 11052 – Refilled Drinking Water Industry;
- 36002 – Raw Water Collection and Distribution;
- 42202 – Construction of Water Treatment Civil Infrastructure;
- 42203 – Construction of Solid, Liquid, and Gas Waste Treatment Systems;
- 42207 – Groundwater Well Drilling and Construction;
- 42916 – Mining Civil Construction;
- 43120 – Land Preparation;
- 43214 – Installation of Marine, River, and Air Navigation Construction Services;
- 43909 – Other Specialized Construction Activities;
- 46202 – Wholesale Trade of Oil-Bearing Fruits;
- 46209 – Wholesale Trade of Other Agricultural Products and Live Animals;
- 46315 – Wholesale Trade of Vegetable Oils and Fats;
- 46610 – Wholesale Trade of Solid, Liquid, and Gas Fuels and Related Products;
- 46651 – Wholesale Trade of Chemicals and Chemical Products;
- 46693 – Wholesale Trade of Rubber and Plastic in Primary Forms;
- 49120 – Rail Freight Transport;
- 49432 – Specialized Motor Freight Transport;
- 52101 – Warehousing and Storage;
- 70202 – Transportation Consultancy Activities;
- 70209 – Other Management Consultancy Activities;
- 71101 – Architectural Activities;
- 71102 – Engineering and Other Related Technical Consulting Activities;
- 71201 – Certification Services;
- 71202 – Laboratory Testing Services;
- 71203 – Periodic Inspection Services;
- 71204 – Technical Inspection Services for Installations;

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**

Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

- 71206 – Jasa *Comissioning* Proses Industrial, *Quality Assurance* (QA), dan *Quality Control* (QC);
- 74120 – Aktivitas Desain Interior;
- 77400 – Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Intelektual Properti, Bukan Karya Hak Cipta;
- 78300 – Penyediaan Sumber Daya Manusia dan Manajemen Fungsi Sumber Daya Manusia;
- 70100 – Aktivitas Kantor Pusat;
- 37021 – *Treatment* Dan Pembuangan Air Limbah Tidak Berbahaya;
- 37022 – *Treatment* Dan Pembuangan Air Limbah Berbahaya;
- 38211 – *Treatment* Dan Pembuangan Limbah Dan Sampah Tidak Berbahaya;
- 38212 – Produksi Kompos Sampah Organik;
- 55900 – Penyediaan Akomodasi Lainnya;
- 68111 – *Real Estate* Yang Dimiliki Sendiri Atau Disewa;
- 68120 – Kawasan Pariwisata;
- 68130 – Kawasan Industri;
- 78200 – Aktivitas Penyediaan Tenaga Waktu Tertentu;
- 85500 – Kegiatan Penunjang Pendidikan.

Selain kegiatan usaha utama tersebut, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha lain dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perusahaan

c. Perubahan Susunan Anggota Dewan Direksi dan Dewan Komisaris

Berdasarkan SK Menteri BUMN Republik Indonesia No. SK-53/MBU/03/2025 Tanggal 11 Maret 2025 dan No. SK-54/MBU/03/2025 Tanggal 11 Maret 2025 terdapat pengangkatan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan sehingga susunan Dewan Direksi dan Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama
Komisaris
Komisaris

Letnan Jenderal TNI (Purn). Wisnoe Prasetya Boedi
Prof. Dr. Wicipto Setiadi, S.H., M.H
drg. Ulfa Masfufah, M. Kes

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**

For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

- 71206 – *Industrial Process Commissioning Services, Quality Assurance (QA), and Quality Control (QC)*;
- 74120 – *Interior Design Activities*;
- 77400 – *Leasing Without Option Rights for Intellectual Property (Excluding Copyrighted Works)*;
- 78300 – *Provision of Human Resources and Human Resource Management Functions*;
- 70100 – *Head Office Activities*;
- 37021 – *Treatment and Disposal of Non-Hazardous Wastewater*;
- 37022 – *Treatment and Disposal of Hazardous Wastewater*;
- 38211 – *Treatment and Disposal of Non-Hazardous Waste and Garbage*;
- 38212 – *Organic Waste Compost Production*;
- 55900 – *Provision of Other Accommodation Services*;
- 68111 – *Owned or Leased Real Estate Activities*;
- 68120 – *Tourism Area Development*;
- 68130 – *Industrial Estate Development*;
- 78200 – *Temporary Employment Agency Activities*;
- 85500 – *Educational Support Activities*.

In addition to its main business activities, the Company may engage in other business activities to optimize the utilization of its resources.

c. Change of Board of Directors and Board of Commissioners Members

Based on the Decision Letter of the Minister of BUMN of the Republic of Indonesia No. SK-53/MBU/03/2025 Dated March 11, 2025 and No. SK-54/MBU/03/2025 Dated March 11, 2025, there was an appointment of the Board of Directors and Board of Commissioners of the Company so that the composition of the Board of Directors and Board of Commissioners is as follows:

2025

Board of Commissioners

President Commissioner
Commissioner
Commissioner

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(d/h PT INDRA KARYA (PERSERO))
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(Lanjutan)**
Untuk Tahun-tahun yang Berakhir
Pada Tanggal 31 Desember 2024 dan 2023
(Dalam Rupiah Penuh, Kecuali Dinyatakan Lain)

**PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT AGRINAS PALMA NUSANTARA
(formerly PT INDRA KARYA (PERSERO))
NOTES TO THE FINANCIAL STATEMENTS
(Continued)**
For the Years Ended
December 31, 2024 and 2023
(In full amount of Rupiah, Unless Otherwise Stated)

2025			
Dewan Direksi			Directors
Direktur Utama	Letnan Jenderal TNI (Purn). Agus Sutomo, SE		President Director
Direktur Operasi	Ospin Sembiring		Director of Operation
Direktur Bisnis dan Pengembangan Industri	Prof. Dr. Eddy Slamet Irianto, SH., MSi		Director of Business and Industrial Development
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Mohammad Wais Fansuri, SE., CFP		Director of Finance and Risk Management
Direktur Sumber Daya dan Umum	Mayjen TNI (Purn). Dr. Bachtiar Utomo, SIP., MAP		Director of Human Resources and General Affairs
Direktur Perkebunan	Mayjen TNI (Purn). Cucu Somantri, SSos., MH		Director of Plantation
Direktur Konsultan Konstruksi	Dr. Ir. Gagah Guntur Aribowo, ST., MT		Director of Construction Consultant

35. Informasi Tambahan Terkait Arus Kas

Tabel di bawah ini menjelaskan perubahan dalam liabilitas Perusahaan yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas dan perubahan non kas.

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas adalah sebagai berikut:

35. Additional Information Regarding Cashflow

The table below explains the changes in the Company liabilities arising from financing activities, including both cash and non-cash changes.

Changes in liabilities arising from financing activities in the statement of cash flows are as follows:

	31 Desember/ December 31, 2023 Rp	Arus Kas/ Cash Flow		Non Kas/ Non Cash Rp	31 Desember/ December 31, 2024 Rp
		Penerimaan/ Receipts Rp	Pembayaran/ Payments Rp		
Utang Bank/ Bank Loan	4,998,557,534	--	(750,000,000)	--	4,248,557,534
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	39,278,704,050	--	(398,520,000)	(5,695,032,152)	33,185,151,898
	31 Desember/ December 31, 2022 Rp	Arus Kas/ Cash Flow		Non Kas/ Non Cash Rp	31 Desember/ December 31, 2023 Rp
		Penerimaan/ Receipts Rp	Pembayaran/ Payments Rp		
Utang Bank/ Bank Loan	4,994,264,429	--	(222,919,723)	227,212,828	4,998,557,534
Liabilitas Sewa/ Lease Liabilities	40,568,166,998	--	(1,192,320,000)	(97,142,948)	39,278,704,050

36. Tanggung Jawab Manajemen dan Persetujuan atas Laporan Keuangan

Penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan merupakan tanggung jawab manajemen dan telah disetujui oleh Direksi untuk diterbitkan pada tanggal 24 Maret 2025.

36. Management's Responsibility and Approval of the Financial Statements

The preparation and fair presentation of the financial statements were the responsibilities of the management and were approved by the Directors for issuance on March 24, 2025.



PT INDRA KARYA (PERSERO)

Kantor Pusat

HK Tower Lantai 9/9th Floor Jl. Biru Laut X Kav. 9 Cawang
Jakarta 13340 Indonesia

Phone : (021) 8192 636

E-mail : agrinaspalma@agrinaspalma.id

agrinaspalma.id